PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

2024

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005–2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud adalah :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V : Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota;
Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Bab VIII : Penutup.

(3) Naskah RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan RKP Tahun 2024 serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 - 6 - 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27 - 6 - 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 14

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4. Maksud dan Tujuan I-8
1.4.1. Maksud I-8
1.4.2. Tujuan I-8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1. Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-9
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-19
2.1.1.4. Demografi II-21
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-25
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-25
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-36
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan II-41
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-42
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar II-43
2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar II-74
2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan II-95
2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan II-118
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-125

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-125
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-127
2.1.4.3. Luas Wilayah Produktif II-127
2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi II-128
2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia II-129
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-129
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-270
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-270
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-270
2.3.3. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) II-274

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 ..... III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ... III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-9
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-10
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-13
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 ..... IV-4

BAB V ARAHAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA V-1

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... V-1
5.2. Pengembangan Wilayah V-6
5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2024 ..... V-8

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1

7.1. Indikator Makro VII-1

7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah VII-2

7.3. Indikator Kinerja Kunci Daerah VII-3

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota, 2022 ..... II-3
Tabel 2.2. Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2022 ..... II-4
Tabel 2.3. Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2022 ..... II-5
Tabel 2.4. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara II-7
Tabel 2.5. Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2022 ..... II-8
Tabel 2.6. Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara II-10
Tabel 2.7. Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024 ..... II-12
Tabel 2.8. Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024 ..... II-13
Tabel 2.9. Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 ..... II-15
Tabel 2.10. Hasil Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019 II-18
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022 ..... II-22
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022 ..... II-23
Tabel 2.13. Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022 ..... II-23
Tabel 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022 ..... II-24
Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ..... II-25
Tabel 2.16. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2022 ..... II-26
Tabel. 2.17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022 ..... II-27
Tabel 2.18. PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2017 s.d. 2022 ..... II-29
Tabel 2.19. Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022 .. II-29
Tabel 2.20. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2020, Maret-September 2021 dan Maret-September 2022 ..... II-32

Tabel 2.21. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022 ..... II-32
Tabel 2.22. Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022 ..... II-33
Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2018-2022 II-35
Tabel 2.24. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 ..... II-36
Tabel 2.25. Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024. II-37
Tabel 2.27. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2021 ..... II-38
Tabel 2.28. Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 ..... II-39
Tabel 2.29 Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022 ..... II-40
Tabel 2.30. Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 ..... II-41
Tabel 2.31. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024..... II-42
Tabel 2.32. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 ..... II-43
Tabel 2.33. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022 ..... II-43
Tabel 2.34. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 ..... II-44
Tabel 2.35. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2018-2024 ..... II-44
Tabel 2.36. Capaian dan Target Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 ..... II-44
Tabel 2.37. Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 – 2024 ..... II-45
Tabel 2.38. Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 II-45
Tabel 2.39. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ..... II-45
Tabel 2.40. Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2022 . II-46
Tabel 2.41. Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 ..... II-47
Tabel 2.42. Capaian Kinerja Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022 ..... II-48
Tabel 2.43. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 ..... II-50

Tabel 2.44. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2022 ..... II-50
Tabel 2.45. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022 ..... II-52
Tabel 2.46. Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-54
Tabel 2.47. Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 ..... II-54
Tabel 2.48. Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-55
Tabel 2.49. Capaian Kinerja dan Target Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-56
Tabel 2.50. Capaian Kinerja dan Target Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024..... II-56
Tabel 2.51. Capaian dan Target Kinerja SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-61
Tabel 2.52. Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2021..... II-63
Tabel 2.53. Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai) II-64
Tabel 2.54. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2021 ..... II-65
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan RTRW) II-65
Tabel 2.56. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-67
Tabel 2.57 Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 ..... II-69
Tabel 2.58. Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021 ..... II-69
Tabel 2.59. Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022..... II-70
Tabel 2.60. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-71
Tabel 2.61. Capaian dan Target Kinerja SPM Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024 ..... II-72
Tabel 2.62. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024 ..... II-74
Tabel 2.63 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024..... II-75
Tabel 2.64 Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2021 – 2022 ..... II-80
Tabel 2.65 Capaian dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024..... II-80

Tabel 2.66. Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2018 ..... II-80
Tabel 2.67. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021 ..... II-82
Tabel 2.68. Capaian dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024 ..... II-82
Tabel 2.69 Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara II-84
Tabel 2.70 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024 ..... II-85
Tabel 2.71 Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ..... II-86
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020 ..... II-86
Tabel 2.73 Arus Lalu Lintas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021 ..... II-87
Tabel 2.74. Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021 . II-88
Tabel 2.75 Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020 ..... II-89
Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018– 2024 ..... II-89
Tabel 2.77. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021 ..... II-91
Tabel 2.78 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2021 ..... II-91
Tabel 2.79 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024 ..... II-92
Tabel 2.80. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024 ..... II-94
Tabel 2.81 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 ..... II-94
Tabel 2.82 Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-96
Tabel 2.83. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-98
Tabel 2.84. Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021 ..... II-100
Tabel 2.85. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-101
Tabel 2.86 Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2021 ..... II-102
Tabel 2.87. Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 ..... II-102

Tabel 2.88. Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2021 ..... II-103
Tabel 2.89. Capaian dan Target Kinerja Sektor Perkebunan dan Hortikultural Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 ..... II-104
Tabel 2.90. Target dan Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2022..... II-106
Tabel 2.91. Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2022 (menurut Jenis Izin II-106
Tabel 2.92 Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2018-2022..... II-107
Tabel 2.93. Persentase Luas lahan kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018-2022. II-108
Tabel 2.94. Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018- 2022..... II-108
Tabel.2.95 Rasio Luas Kawasan Lindung Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel 2.96 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 -2024 ..... II-110
Tabel 2.97. Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2017 – 2020 ..... II-110
Tabel 2.98. Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2020..... II-111
Tabel 2.99 Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021 II-111
Tabel 2.100. Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 – 2021 ..... II-111
Tabel 2.101. Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020 – 2021..... II-112
Tabel 2.102 Bauran Energi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 ..... II-112
Tabel 2.103 Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021 ..... II-113
Tabel 2.104 Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2018 – 2021 ..... II-114
Tabel 2.105 Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2021 II-116
Tabel 2.106 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2021 II-117
Tabel 2.107. Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2021... II-117
Tabel 2.108 Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2017 – 2021..... II-118
Tabel 2.109. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-119
Tabel 2.110. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-120
Tabel 2.111. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2020 ..... II-121

Tabel 2.112. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 – 2019 ..... II-121
Tabel 2.113. Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2024 ..... II-121
Tabel 2.114. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-123
Tabel 2.115. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2022 ..... II-125
Tabel 2.116. Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2018 – 2022 ..... II-126
Tabel 2.117. Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018-2019..... II-127
Tabel 2.118. Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 - 2021 (Hektar) II-128
Tabel 2.119. Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021–2022 ..... II-121
Tabel 2.120. Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2021 ..... II-129
Tabel 2.121. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ..... II-130
Tabel 2.122. Realisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota II-275
Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara..... III-3
Tabel 3.2. Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Sulawesi Tenggara (Kendari dan Baubau) Tahun 2021-2023 ..... III-5
Tabel 3.3. Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara Januari 2021-Maret 2023 ..... III-6
Tabel 3.4. Realisasi Indikator Makro Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2024 Provinsi Sulawesi Tenggara..... III-9
Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2022 III-10
Tabel 3.6. Target dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 dan 2024 ..... III-11
Tabel 3.7. Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 dan 2022 III-13
Tabel 3.8. Target dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024 ..... III-14
Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2024 III-16
Tabel 3.10. Target dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024 ..... III-16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2024 dan menjadi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024..... IV-2

Tabel 5.1. Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024..... V-3
Tabel 5.2. Data Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten dan Kota..... V-6
Tabel 5.3. Data Rata-Rata Kinerja Indikator Makro Kabupaten/Kota pada Wilayah Daratan dan Kepulauan Tahun 2022..... V-8
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara..... VI-1
Tabel 7.1 Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024..... VII-1
Tabel 7.2. Target Indikator Makro Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ..... VII-2
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara..... VII-2
Tabel 7.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerj Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain I-7
Gambar 2.1. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022..... II-2
Gambar 2.2. Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022 ..... II-2
Gambar 2.3. Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara II-4
Gambar 2.4. Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara II-11
Gambar 2.5. Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-11
Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-21
Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 II-27
Gambar 2.8. PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021..... II-28
Gambar 2.9. Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2019 – September 2022..... II-31
Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2019-2022..... II-35
Gambar 2.11. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021..... II-38
Gambar 2.12. Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara II-64
Gambar 2.13. Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 (Food Security and Vulnerability Atlat) Prioritas Komposit..... II-79
Gambar 2.14. Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial Tahun 2018-2022..... II-106
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara y on y Triwulan I-2020 -Triwulan I-2023..... III-2
Gambar 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Februari 2020-Februari 2023..... III-5
Gambar 5.1. Peta Gambaran Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai Indikator Makro Pada Tahun 2022..... V-8
Gambar 5.2. Konsep Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara..... V-10

Bab I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, maka pembangunan nasional harus direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam praktek sehari-hari, perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pernerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang dengan periodisasi selama 20 (Dua puluh) tahun, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dengan periodisasi selama 5 (Lima) tahun, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan rencana pernbangunan tahunan yang disusun setiap tahun,

meliputi: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Konteks penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan RKPD Tahun 2024 memiliki perbedaan dengan penyusunan RKPD tahun-tahun sebelumnya karena RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Tahun 2024 – 2026, sedangkan RKPD tahun-tahun sebelumnya merupakan penjabaran dari RPJMD. Hal ini disebabkan karena RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 telah berakhir pada tahun 2023 dan dilanjutkan dengan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen transisi sebagai pedoman Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pada tahun 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 disusun melalui tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tahapan tersebut dilakukan dengan pendekatan perencanaan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, pendekatan perencanaan partisipatif yaitu proses penyusunan melibatkan pemangku kepentingan (Instansi vertikal dan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perwakilan masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, media massa/elektronik, dan pemangku kepentingan lainnya), sedangkan pendekatan perencanaan politis dilakukan dengan cara penghimpunan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikran DPRD, serta pendekatan perencanaan *top-down* (atas-bawah) dan *buttom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan cara penyelarasan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Substansi dokumen disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, menerapkan pendekatan THIS (Tematik-Holistik, Integratif, Spasial), Pendekatan Tematik-Holistik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas nasional dan daerah; Pendekatan Integratif, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan Pendekatan Spasial, yaitu kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan terlebih dahulu menindaklanjuti hasil reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pasca penetapan dokumen selanjutnya menjadi pedoman dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi, pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi sebagai dokumen perencanaan anggaran dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan tiga kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. Untuk menjabarkan RPJPN, maka disusun RPJMN yang meliputi visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP dimaksud memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan dokumen perencanaan baik itu pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. Untuk menjabarkan RPJPN, maka disusun RPJMN yang meliputi visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP dimaksud memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

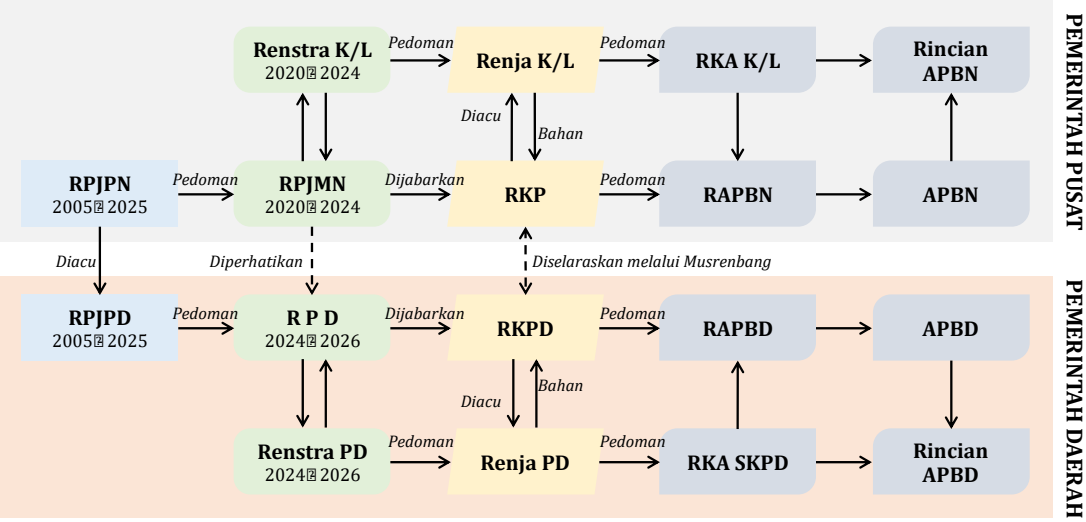

Gambar 1.1.
Proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lain

Perencanaan pembangunan pada level pemerintahan daerah dikenal pula dengan perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan perencanaan tahunan (RKPD). RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada tahun 2023 periodisasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 telah berakhir dan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen transisi perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan.

RPD disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yakni menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang menjabat hingga tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026. RPD tahun 2024 – 2026 dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 menjadi dasar Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daera (Renja PD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk digunakan sebagai acuan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Substansi RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan cara menyelaraskan antara program dan kegiatan prioritas nasional yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dalam Renja K/L dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan maksud agar sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan upaya sinergitas tersebut. RKPD merupakan akumulasi dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib maupun dalam menjalankan urusan pemerintahan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, setiap OPD harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah disusun dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meliputi RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu juga memperhatikan dokumen lainnya yang relevan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah:

a. Menjelaskan secara umum tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024;
b. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD sasaran penyusunan dokumen RKPD

1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
Pada bagian ini memberikan data dan informasi yang menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Bagian ini akan memberikan data dan informasi serta telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Bagian ini akan memberikan informasi hasil telaah kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan serta tantangan dan prospek perekonomian yang mungkin akan dihadapi pada tahun 2023 dan 2024.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Bagian ini akan memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2024 yang merupakan bagian dari pencapain visi, misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD Prov. Sultra 2005-2025.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024
Prioritas pembangunan adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB V ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arahan Kebijakan Pembangunan Tahun 2024
Bagian ini akan memuat arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

5.2. Pengembangan Wilayah
Bagian ini akan memuat pengembangan wilayah berdasarkan isu strategis yang terdapat di kabupaten/kota.

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Bagian ini akan memuat arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bagian ini akan memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan dan harapan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Bab II
Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'–06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'–124°45' Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Tenggara adalah berupa daratan seluas 36.159,71 km2 dan dan luas laut 110.000 km2. Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni.

Berdasarkan posisi geografisnya, batas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebelah Selatan : Provinsi NTT di Laut Flores;
Sebelah Timur : Provinsi Maluku di Laut Banda;
Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan terluas yakni Kabupaten Konawe (5.351,85 km2). Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 berdasarkan Hasil Proyeksi Interim 2020-2023 (pertegahan tahun/Juni) tercatat sebanyak **2.701.661 jiwa** yang terdiri dari laki-laki **1.366.862** jiwa dan perempuan **1.334.789** jiwa. Jumlah penduduk tersebut terpetakan dalam kategori umur 0-75 tahun ke atas.

Sumber: BPS , Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.1.
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Sumber: BPS , Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.2.
Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota, 2022

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten	Luas Total Area (Km2)
Buton	Pasarwajo	1.669,33
Muna	Raha	1.858,10
Konawe	Unaaha	5.351,85
Kolaka	Kolaka	2.958,92
Konawe Selatan	Andoolo	4.237,74
Bombana	Rumbia	3.293,97
Wakatobi	Wanci	450,46
Kolaka Utara	Lasusua	2.932,25
Buton Utara	Buranga	1.755,83
Konawe Utara	Wanggudu	4.219,81
Kolaka Timur	Tirawuta	3.992,53
Konawe Kepulauan	Langara	705,71
Muna Barat	Laworo	818,70
Buton Tengah	Labungkari	836,96
Buton Selatan	Batauga	517,63
Kota Kendari	Kendari	265,79
Kota Baubau	BauBau	294,14
Sulawesi Tenggara	**Kendari**	**36.159,71**

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

1) Letak dan Kondisi Geografis

a) *Posisi Astronomis*

Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 02^{O}45’ – 06^{O}15’ Lintang Selatan dan 120^{O}25’ - 124^{O}45’ Bujur Timur.

b) *Posisi Geostrategis*

Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.

c) *Kondisi/Kawasan*

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara.

Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat Kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km^2 .

Tabel 2.2. Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Jumlah
Kab. Kolaka	53	82	135
Kab. Konawe	33	338	371
Kab. Muna	78	108	186
Kab. Buton	66	29	95
Kab. Konawe Selatan	92	265	357
Kab. Bombana	73	70	143
Kab. Wakatobi	90	10	100
Kab. Kolaka Utara	47	86	133
Kab. Konawe Utara	61	112	173
Kab. Buton Utara	78	13	91
Kab. Kolaka Timur	-	133	133
Kab. KonaweKepulauan	84	12	96
Kab. Muna Barat	33	53	86
Kab. Buton Tengah	63	14	77
Kab. Buton Selatan	54	16	70
Kota Kendari	30	35	65
Kota Baubau	19	24	43
Jumlah	**954**	**1400**	**2354**

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

d) *Topografi*

Topografi merupakan gambaran permukaan bumi, yang biasanya berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu daerah. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu ± 74% sedang selebihnya datar sampai berombak ± 26%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut :

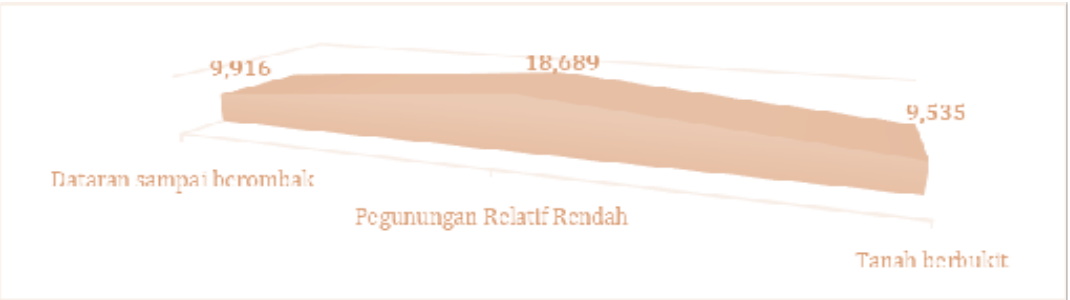

Gambar 2.3.
Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 ha.
b. Dataran Rate-rate–Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 ha.
c. Dataran Waworamo–Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 ha.
d. Dataran Tinanggea–Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
e. Dataran Lalindu–Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
f. Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
g. Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
h. Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.
i. Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.
j. Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.
k. Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.
l. Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 ha.

Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°.

Tabel 2.3. Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Kab. Kolaka	20	9	106	135
Kab. Konawe	20	23	328	371
Kab. Muna	4	2	180	186
Kab. Buton	3	6	86	95
Kab. Konawe Selatan	18	-	339	357
Kab. Bombana	14	2	127	143
Kab. Wakatobi	24	1	75	100
Kab. Kolaka Utara	33	2	98	133
Kab. Konawe Utara	20	5	148	173
Kab. Buton Utara	2	-	89	91
Kab. Kolaka Timur	11	35	87	133
Kab. KonaweKepulauan	1	-	95	96
Kab. Muna Barat	-	-	86	86
Kab. Buton Tengah	2	2	73	77
Kab. Buton Selatan	15	1	54	70
Kota Kendari	8	-	57	65
Kota Baubau	-	-	43	43
Jumlah	195	88	2071	2354

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

2) Geologi

Secara geologis Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan (*collition*) dua buah lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari Australia dan lempeng samudra yang berasal dari pacific. Akibat tumbukan tersebut maka wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 3 group utama batuan penyusunnya yaitu :

- Kompleks batuan malihan di Sulawesi Tenggara terdiri dari sekis, kuarsit, sabak dan marmer yang melampar dari kolaka utara hingga ke selatan membentuk pegunungan Tangkelemboke, Mendoke dan Pegunungan Rumbia.
- Kompleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari lajur ofiolit Sulawesi Timur dimana diatasnya di tutupi oleh sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara didominasi oleh batuan ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit, lerzolit, websterit, serpentinit, dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan mafik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk batuan sedimen pelagic tersusun oleh batugamping laut dalam dan sisipan rijang merah.
- Molasa Sulawesi tersebar luas dan umumnya menempati bagian selatan dari jasirah Sulawesi bagian tenggara. Molasa Sulawesi yang berada di Sulawesi Tenggara terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan. Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas Formasi Langkowala dan Formasi Boepinang. Sedangkan sedimen karbonat yang berasosiasi dengan batu pasir adalah formasi eomoiko.

Potensi kandungan Nikel di Sulawesi Tenggara telah di kenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah di eksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi. Cadangan Nikel di Sulawesi Tenggara cukupbesar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Adapun status kawasan nikel di Sulawesi Tenggara terkait dengan fungsi kawasan hutan Sulawesi Tenggara dapat terbagi kedalam: nikel Sulawesi Tenggara yang berada pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah Aspal Alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di sultra yang terletak di pulau buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Prov.Sultra, 2011). Jika disetarakan dengan jumlah energi yang dapatdihasilkansekitar tatanan geologi pulau buton sendiri didapatkan potensi aspal (bitumen padat) di buton setelah dilakukan studi geokimia hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Sampolakosa dari daerah Lawele dan daerah Sampolawa, bitumen padat/oil shale dari Fm. Winto dari daerah Sampolawa dan minyak rembesan/oilseeps pada Fm. Tondo daerah Kapontori. Ini semua memberikan gambaran potensi hidrokarbon pada daerah sultra sangat prospek.

Potensi kandungan Emas di Sulawesi Tenggara juga cukup besar. Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas, yakni Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan total cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton. Potensi lain yang ada di Sulawesi Tenggara adalah marmer seluas 206.237 juta meter kubik, dan batu gamping seluas 188.352 hektare.

3) Hidrologi

Sumberdaya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi sumberdaya alam tersebut. Gagasan pengelolaan sumberdaya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahan yang demikian kompleks serta syarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan sasaran pengelolaan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo, Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26,38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62%) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km^2 dengan debit air rata-rata 200 m^3/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha.

Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti : Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

4) Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu:

Tabel 2.4. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Tipe Iklim	Wilayah
1.	B	Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)
2.	C	Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe)
		Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako(Kab. Kolaka) dan Mowewe (Kab. Kolaka Timur)
		Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton)
		Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana)
		Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau)
		Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)
3.	D	Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe)
		Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka Timur)

No.	Tipe Iklim	Wilayah
		Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton)
		Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Bombana)
		Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau)
		Sekitar Kota Kendari
		Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna Barat)
4.	E	Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton Tengah)
		Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
5.	G	Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan catatan di 4 stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2022

Bulan	Stasiun Meteorologi Maritim Kendari	Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau	Stasiun Klimatologi Konawe Selatan	Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera Kolaka
Januari	15	17	18	15
Februari	21	20	16	18
Maret	19	21	22	22
April	14	13	15	19
Mei	19	15	22	18
Juni	21	23	20	24
Juli	17	8	22	24
Agustus	16	11	20	17
September	11	8	17	18
Oktober	17	20	19	22
November	18	26	16	23
Desember	15	22	15	23

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

b. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK.81155/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 dan data BPS tahun 2022 disebutkan bahwa luas kawasan hutan dan konservasi perairan Sulawesi Tenggara adalah 3.742.909 Ha, terdiri atas : Kawasan Hutan Nasional (108.415 Ha), Kawasan Hutan Marga Satwa (162.656 Ha), Kawasan Hutan Suaka Alam (7.905 Ha), Kawasan Hutan Cagar Alam (1.457 Ha), Kawasan Hutan Taman Raya (7.849 Ha), Hutan Lindung (1.080.819 Ha), Hutan Produksi Tidak Tetap (408.995 Ha), Hutan Produksi Tetap (448.011 Ha), Taman Nasional Laut (1.315.552 Ha), dan Taman Bawah Laut (105.079 Ha)

Keberadaan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dalam rangka meningkatkan potensinya di Sulawesi Tenggara, mengingat kawasan hutan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan diantaranya : kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi dan budidaya pertanian non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan HTI, serta permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

c. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha, tanah padang rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Hadan untuk luas lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha.

d. Kawasan Lindung

Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano
- Cagar Alam Lamedai
- Cagar Alam Kakinauwe
- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara
- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
- Taman Nasional Laut Wakatobi
- Taman Wisata Alam Mangolo
- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
- Taman Buru Mata Osu

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti : perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas :

1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan;

2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;

3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana

dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan;

4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan; dan

5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.

b. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
c. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
d. Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
e. Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
f. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
g. Kawasan industri semen di Pulau Muna;
h. Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
i. Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Selain membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah juga membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat-pusat kegiatan industri, adapun pusat-pusat kegiatan industri yang direncanakan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kendari (I/B/1)
2.	Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Baubau (I/B/1)
3.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Unaaha (II/B/1)
		Lasolo (II/B/1)
		Raha (II/B/1)
		Kolaka (II/B/1)
4.	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Pasarwajo (II/B/1)
		Wangi-Wangi (II/B/1)
5.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pomalaa
		Langara
		Usuku
		Kasipute
		Sikeli
		Lasusua
		Andoolo
		Wanggudu
		Perkotaan Buranga dan sekitarnya
		Tirawuta
		Laworo

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Keterangan:
I - IV : Tahapan pengembangan
A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
B/2 Pengembangan baru

B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi

C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

C/2 Pengembangan baru

C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.4.
Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dalam beberapa sektor unggulan, yaitu :

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor Pertanian terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari (1) Padi Sawah, (2) Padi Ladang, (3) Jagung, (4) Kacang Kedelai, (5) Kacang Tanah, (6) Kacang Hijau, (7) Ubi Kayu, dan (8) Ubi jalar.

Sedangkan untuk Sektor Peternakan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari: (1) Populasi hewan ternak yaitu Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Burasm Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila, Puyuh, (2) Populasi hewan petelur yaitu Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Itik, Itik Manila dan Puyuh.

Adapun produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7. Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)**							
	Padi	709.516	519.707	532.773	530.029	488.389	740.042	499.133
	Jagung	221.498	279.170	179.906	150.561	181.295	196.715	185.283
	Kedelai	9.853	1.540	629	574	9.681	6.876	9.894
	Kacang Tanah	2.054	3.221	3.046	3.104	2.332	2.996	2.383
	Kacang Hijau	510	449	804	296	307	650	314
	Ubi Kayu	210.387	144.752	167.769	137.657	149.336	216.582	152.621
	Ubi Jalar	20.291	17.682	17.707	15.469	15.269	22.396	15.605
2.	**Jumlah Populasi Ternak (Ekor)**							
	Sapi Potong	298.692	330.594	361.568	391.479	421.454	341.712	371.099
	Sapi Perah	47	37	51	46	60	42	55
	Kerbau	1.472	2.162	2.349	2.544	2.668	2.310	2.502
	Kambing	177.845	183.725	195.128	204.357	213.719	187.828	196.468
	Babi	89.600	90.524	98.108	108.606	117.216	92.843	102.313
	Kuda	721	712	644	667	724	760	787
	Ayam Buras	9.934.224	10.861.007	11.088.813	11.572.793	12.168.591	10.719.077	11.190.716
	Ayam Ras Petelur	437.634	463.163	455.719	473.916	505.923	456.022	473.807
	Ayam Ras Pedaging	4.504.344	4.453.326	4.477.630	5.122.986	5.444.745	4.588.885	5.249.684
	Itik	509.262	543.904	577.699	609.651	631.190	53.767	56.724
	Itik Manila	49.323	43.578	42.942	45.353	47.071	45.213	48.441
	Puyuh	10.368	6.319	9.266	3.724	4.090	8.618	9.419
3.	**Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)**							
	Produksi Daging							

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sapi	6.474.830	4.437.749	3.720.990	4.521.025	4.525.615	5.769.413	7.009.837
	Kerbau	38.862	35.832	17.183	32.303	32.768	30.566	39.124
	Kambing	356.488	312.734	324.283	205.081	200.882	356.676	420.878
	Babi	801.125	895.349	624.514	556.432	585.216	783.461	879.043
	Kuda	8.100	15.600	9.684	16.800	17.250	9.368	9.954
	Ayam Buras	10.709.094	11.708.166	11.953.741	12.475.471	13.117.741	11.365.197	11.860.720
	Ayam Ras Petelur	320.611	339.314	333.873	352.453	376.254	337.923	357.185
	Ayam Ras Pedaging	4.085.215	4.038.944	5.092.956	5.826.722	6.192.976	4.222.067	4.830.045
	Itik	319.307	341.026	362.216	381.182	395.756	323.186	369.402
	Itik Manila	32.553	28.760	28.342	29.912	31.067	31.967	35.931
	Puyuh	2.281	1.391	2.039	819	900	218	233
	Produksi Telur							
	Ayam Buras	6.446.318	7.047.707	7.195.531	10.277.404	10.806.512	6.841.258	7.716.939
	Ayam Ras Petelur	3.295.388	3.487.618	5.724.897	6.135.121	6.549.471	3.473.342	3.722.728
	Itik	3.266.403	3.488.601	6.705.361	4.885.177	5.057.771	3.445.985	3.955.991
	Itik Manila	270.781	239.243	235.752	248.988	258.431	265.911	280.616
	Puyuh	18.007	10.975	16.094	6.468	7.104	17.207	18.842

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tahun 2022, produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan secara berurutan didominasi oleh produksi padi sawah sebesar 488.389 ton, produksi jagung mencapai 181.295 ton dan produksi ubi kayu 149.336 ton. Untuk populasi ternak, Tahun 2022 secara berurutan produksi didominasi oleh ternak ayam buras mencapai 12.168.591 kg, ternak ayam ras pedaging 5.444.745 kg dan ternak itik 631.190 kg. Selanjutnya untuk produksi telur secara berurutan didominasi oleh ternak ayam buras 10.277.404 kg, ternak ras ayam petulur 6.135.121 kg dan ternak itik 5.057.771 kg.

Selanjutnya Sektor Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun produksi Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8. Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kakao	134.585	115.023	114.919	114.828	106.667	130.180	104.754
2.	Jambu Mete	25.504	50.862	48.704	59.142	51.834	23.826	36.321
3.	Kelapa Dalam	41.899	37.572	46.860	40.281	39.192	39.678	41.540
4.	Cengkeh	5.315	13.420	14.291	14.420	9.853	12.911	9.410
5.	Lada	13.719	5.718	5.747	5.798	5.749	5.069	6.009

No.	Indikator	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Kopi	-	-	-	2.796	2.779	2.677	2.705
7.	Pala	-	-	-	806	769	422	633
8.	Bawang Merah	379	390	558	1.015	487	621	458
9.	Cabai Rawit	3.377	3.669	3.865	4.287	3.915	3.811	3.923
10.	Cabai Besar	1.230	1.408	1.815	2.411	2.540	1.706	2.545
11.	Jeruk	86.291	27.267	35.208	22.219	22.163	22.100	21.100
12.	Durian	-	-	-	12.885	23.752	11.092	23.983

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2022 produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 106.667 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 487 ton.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yaitu **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain karena keterbatasan dukungan anggaran APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi benih). Sedangkan **Faktor Eksternal (Petani/Lahan)** antara lain (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura.

Disamping faktor penghambat tersebut diatas, terdapat faktor pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi yaitu **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain (1) Dukungan angaran APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura yang telah ditetapkan secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan No. 472/Kpts/RC.040/2018; dan (3) Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor **Faktor Eksternal (Petani/lahan)** antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura; dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan.

b. Sektor Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis penopang perekonomian di Sulawesi Tenggara. Produksi perikanan itu sendiri diartikan sebagai semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Produksi Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra) setiap tahun mengalami peningkatan. Produksi yang berlimpah ini mampu memenhui kebutuhan wilayah sekitar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam dan Semarang. Di samping itu juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi. Data produksi sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9. Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11,32	11,25	11,6	11,6	11,6*	11,7	11,7
2	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	871,57	707,41	636,868	660,877	670,03	670	670
3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	-	-	70	85	87	90	93
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	65,14	71,13	70,51	70,95	72,32	72	72
5	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	131	131	135	135	153	155
6	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	259,64	254,03	255,178	254,553	259,64	260	260
7	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
8	Nilai Tukar Nelayan	123,46	117,02	97,45	102,65	102,46	105	105

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 139,06 triliun pada tahun 2021.

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra)

dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi penurunan pada tahun 2019 dan menurun lebih dalam pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan pada menurunnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor penyebab penurunan ini adalah adanya wabah covid 19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisirkan dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terus melaksanakan kebijakan pokok pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap serta membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2022. Dampak lebih lanjut tentunya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 102,46 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,45.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir triwulan III tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 56,48 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,37 (angka sementara).

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat

ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

a. Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;
b. Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,
c. Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. umlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2022, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan. Sementara ada 12 kelompok baru yang dikukuhkan sebagai Pokmaswas Binaan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Sektor Pertambangan

Potensi kandungan nikel di Sulawesi Tenggara telah dikenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah dieksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi. Cadangan nikel di Sulawesi Tenggara cukup besar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah aspal alamnya yang terkenal di dunia.Potensi aspal alam di Sulawesi Tenggara yang terletak di Pulau Buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011). Nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Tahun 2016 jumlah pr

Produksi nikel mengalami sebesar 1.539.426 ton, tahun 2018 peningkatannya cukup signifikan yaitu mencapai 20.220.717 ton dan pada tahun 2019 produksi Nikel mencapai 23.967.146 ton. Peningkatan produksi Nikel tersebut seiring dengan beroperasinya perusahaan nikel yang berada di Kabupaten Konawe dan menjadi Kawasan Industri Nasional. Sementara itu, produksi pertambangan Aspal dari tahun ke tahun mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 produksi Aspal hanya mencapai 3.957 ton, tahun 2017 dan tahun 2018 terus meningkat masing-masing sebesar 15.821 ton dan 20.625 ton, dan pada tahun 2019 peningkatan produksi Aspal naik signifikasi hingga mencapai 71.113 ton. Peningkatan produksi tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan Aspal Buton sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara nasional.

Tabel 2.10. Hasil Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Nikel (ton)	Aspal (ton)
1.	2016	1.539.426	3.957
2.	2017	1.539.426	3.957
3.	2018	1.539.426	3.957
4.	2019	1.539.426	3.957

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Untuk meningkatkan Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas :

a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
b. peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
c. menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
d. menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
e. pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas:

a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
b. mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;

c. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan
d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas:

a. menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
b. mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
e. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
f. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
g. pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :

a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;
b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
c. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
d. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
e. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi :

a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari :
   - Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi
   - Kawasan Rawan gelombang pasang, yaitu : wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten

Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi.

- Kawasan Rawan Banjir, yaitu : wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

b. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

- Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu : Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.
- Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :
  - Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.
  - Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.
  - Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
  - Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.
- Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
- Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

Selain Kawasan Rawan Bencana di atas, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

2.1.1.4. Demografi

Dalam Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 dinyatakan bahwa salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020, sebagai upaya untuk mewujudkan **"SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".**

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atauberencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun, WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020–2023, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebanyak 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki–laki dan 1.334.789 penduduk perempuan, Dibandingkan dengan hasil SP2020 tahun 2020, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen, Secara umum, penduduk laki–laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 102,40. Dengan luas wilayah **36.159,71 km2**, secara rata–rata setiap km2 wilayah Sulawesi Tenggara

ditinggali sekitar 74-75 orang penduduk, Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 13,20 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.342 jiwa/km2, Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 16-17 jiwa/Km2 dengan persentase penduduk sebesar 2,60 persen.

Adapun Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	
	2021	2022
Buton	115.207	119.353
Muna	215.527	223.283
Konawe	257.011	266.299
Kolaka	237.587	246.137
Konawe Selatan	308.524	317.826
Bombana	150.706	153.304
Wakatobi	111.402	115.286
Kolaka Utara	137.659	141.151
Buton Utara	66.653	69.051
Konawe Utara	67.871	70.314
Kolaka Timur	120.699	121.145
Konawe Kepulauan	37.050	38.383
Muna Barat	84.590	84.902
Buton Tengah	114.773	118.904
Buton Selatan	95.261	95.613
Kota Kendari	345.107	356.747
Kota Baubau	159.248	163.963
Sulawesi Tenggara	**2.624.875**	**2.701.661**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pada tabel 2.11 diatas terlihat bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sensus Penduduk Tahun 2020 sebesar **2.624.875** jiwa dimana Kota Kendari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu **345.107** jiwa atau sebesar **13,15%** dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya komposisi jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar **37.050** jiwa atau hanya mencaapai **1,41%** dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi **2.701.661** jiwa atau terjadi kenaikan sebesar **76.786** jiwa atau naik sebesar 2,84% dari Sensus Penduduk Tahun 2020. Dimana Kota Kendari masih tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 356.747 jiwa dan

Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah dengan jumlah penduduk terendah yaitu 38.383 jiwa.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%)	
	2010–2020	2020–2022
Buton	1,95	2,04
Muna	0,89	2,04
Konawe	1,83	2,05
Kolaka	1,26	2,04
Konawe Selatan	1,5	1,71
Bombana	0,77	0,98
Wakatobi	1,76	1,98
Kolaka Utara	1,23	1,44
Buton Utara	1,92	2,04
Konawe Utara	2,7	2,04
Kolaka Timur	1,23	0,21
Konawe Kepulauan	2,42	2,04
Muna Barat	1,62	0,21
Buton Tengah	2,79	2,04
Buton Selatan	2,34	0,21
Kota Kendari	1,7	1,91
Kota Baubau	1,47	1,68
Sulawesi Tenggara	**1,58**	**1,66**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Periode Tahun 2010-2022, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Buton Tengah sebesar 2,79 persen dan terendah sebesar 0,77 persen adalah Kabupaten Bombana. Periode Tahun 2020-2022, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi Kabupaten Konawe sebesar 2,05 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk terendah berada pada 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kolaka Timur, Muna Barat dan Buton Selatan sebesar 0,21 persen.

Tabel 2.13. Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Distribusi Penduduk (Persen)	
	2021	2022
Buton	4,23	4,42
Muna	8,81	8,26
Konawe	9,54	9,86
Kolaka	9,35	9,11
Konawe Selatan	11,85	11,76

Kabupaten/Kota	Distribusi Penduduk (Persen)	
	2021	2022
Bombana	6,24	5,67
Wakatobi	4,17	4,27
Kolaka Utara	5,43	5,22
Buton Utara	2,45	2,56
Konawe Utara	2,31	2,6
Kolaka Timur	4,77	4,48
Konawe Kepulauan	1,3	1,42
Muna Barat	3,21	3,14
Buton Tengah	3,87	4,4
Buton Selatan	3,36	3,54
Kota Kendari	12,99	13,2
Kota Baubau	6,14	6,07
Sulawesi Tenggara	**100**	**100**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Tabel 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin	
	2021	2022
Buton	102,35	101,95
Muna	96,53	96,16
Konawe	107,4	106,97
Kolaka	104,38	103,97
Konawe Selatan	105,63	105,21
Bombana	102,36	101,96
Wakatobi	100,45	100,07
Kolaka Utara	104,79	104,38
Buton Utara	104,61	104,2
Konawe Utara	107,18	106,75
Kolaka Timur	105,85	105,43
Konawe Kepulauan	103,2	102,79
Muna Barat	97,85	97,48
Buton Tengah	100,28	99,89
Buton Selatan	102,34	101,94
Kota Kendari	101,68	101,28
Kota Baubau	99,69	99,31
Sulawesi Tenggara	102,81	102,4

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		
	Laki–Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	130.497	126.932	257.429
5–9	126.021	123.361	249.382
10–14	127.362	121.335	248.697
15–19	126.966	119.068	246.034
20–24	121.816	117.764	239.580
25–29	118.018	114.826	232.844
30–34	111.169	108.112	219.281
35–39	101.881	100.138	202.019
40–44	92.470	90.959	183.429
45–49	81.871	80.184	162.055
50–54	67.992	66.813	134.805
55–59	54.727	53.997	108.724
60–64	41.270	41.215	82.485
65–69	28.979	29.700	58.679
70–74	18.823	19.935	38.758
75+	17.010	20.450	37.460
Jumlah	**1.366.872**	**1.334.789**	**2.701.661**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kontribusi nilai tambah yang tercipta dari setiap lapangan usaha di suatu wilayah menggambarkan struktur perekonomian wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan akan menjadi kategori yang menunjukan ciri khas ekonomi wilayah tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2022) struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya potensi sumber daya alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari tingginya persentase PDRB Sulawesi Tenggara pada 5 (lima) lapangan usaha utama, yakni: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Kelima sektor lapangan usaha tersebut memiliki peranan yang cukup dominan yakni diatas 70 persen terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara.

Tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara, yaitu mencapai 23,25 persen. Sektor berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2022 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,27 persen; kemudian disusul sektor

Konstruksi sebesar 13,55 persen; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi sebesar 12,81 persen; serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,36 persen. Dalam empat tahun terakhir, kelima sektor tersebut menunjukkan tren kontribusi positif yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.16. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2022

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,09	23,96	23,73	24,13	23,60	23,25
2.	Pertambangan &penggalian	20,68	20,83	21,04	*19,79*	*19,35*	*20,27*
3.	Industri pengolahan	6,13	6,17	6,40	*7,25*	*7,63*	*8,36*
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	*0,04*	*0,04*	*0,04*
5.	Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan daurUlang	0,18	0,18	0,17	*0,17*	*0,17*	*0,15*
6.	Kontruksi	13,35	13,49	13,69	*13,58*	*14,51*	*13,55*
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & SSepeda Motor	12,55	12,64	12,77	*12,54*	*12,78*	*12,81*
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,52	4,59	4,43	*4,07*	*3,82*	*4,34*
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,58	0,58	0,56	*0,55*	*0,53*	*0,52*
10.	Informasi dan Komunikasi	1,85	1,82	1,79	*1,90*	*1,76*	*1,69*
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,35	2,34	*2,39*	*2,50*	*2,42*
12.	Real Estate	1,49	1,40	1,34	*1,34*	*1,30*	*1,22*
13.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	*0,20*	*0,19*	*0,20*
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,15	5,09	4,89	*5,18*	*4,99*	*4,61*
15.	Jasa Pendidikan	4,54	4,51	4,48	*4,67*	*4,64*	*4,51*
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,90	0,91	*1,00*	*1,02*	*0,93*
17.	Jasa Lainnya	1,30	1,26	1,22	*1,20*	*1,17*	*1,14*
PDRB		**100**	**1 00**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut.

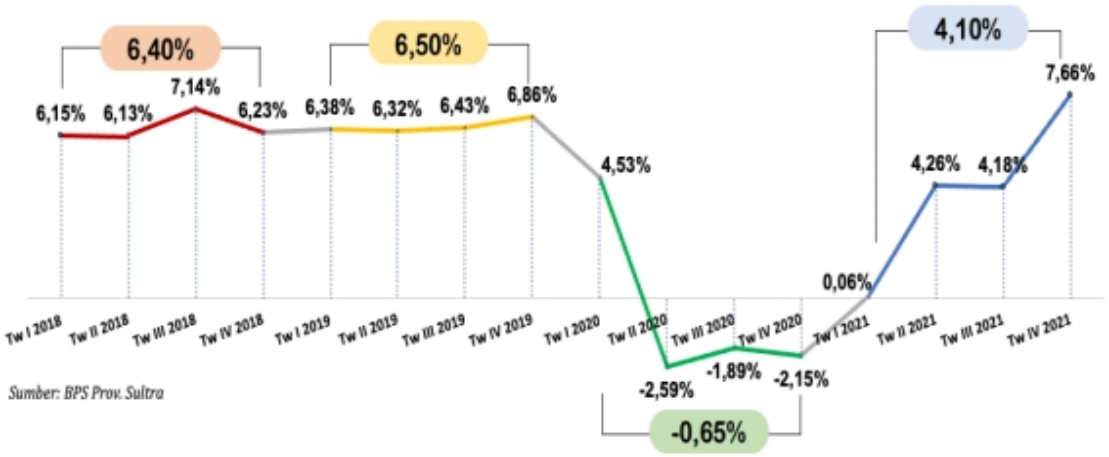

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebesar 5,53 persen. Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya percepatan kemajuan ekonomi dibanding Tahun 2021 dan Tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan hanya 4,10 persen dan -0,65 persen akibat dari dampak pandemi *Covid*-19. Adanya percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang terjadi di Tahun 2022, yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 16,74 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 12,41 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,23 persen dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,29 persen yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Sulawesi Tenggara yang memberi efek positif pada percepatan pertumbuhan PDRB Tahun 2022.

Tabel. 2.17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,76	6,37	4,99	0,68	2,39	6,74
2.	Pertambangan &penggalian	12,77	6,46	6,99	-6,65	0,29	1,53
3.	Industri pengolahan	6,38	6,81	10,83	10,19	6,38	16,74
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,92	1,52	6,89	-0,33	7,31	8,77
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,12	5,70	3,94	3,30	1,93	-1,39
6.	Kontruksi	3,16	6,64	7,00	-0,68	10,10	-0,21
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,80	6,63	7,76	-2,73	7,97	7,68
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,24	8,76	4,54	-5,26	0,14	10,23
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,16	6,69	4,94	-3,93	4,33	8,36
10.	Informasi dan Komunikasi	8,43	8,20	7,83	8,08	3,63	9,29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,16	6,96	3,22	6,89	2,85
12.	Real Estate	4,17	2,58	3,83	0,42	2,82	2,42
13.	Jasa Perusahaan	5,98	5,82	5,21	-3,80	1,35	12,41
14.	Adm Pemerintahan,	4,10	3,73	3,59	3,30	1,91	4,95

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib						
15.	Jasa Pendidikan	3,03	7,59	7,00	3,81	3,73	5,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,41	6,86	8,41	8,10	7,46	2,29
17.	Jasa Lainnya	2,74	5,61	4,57	-3,92	2,43	7,48
PDRB		**6,88**	**6,40**	**6,50**	**-0,65**	**4,10**	**5,53**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, yakni sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi dan sektor Real Estate, serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Penurunan laju pertumbuhan PDRB pada sektor tersebut secara umum dipengaruhi oleh pandemi *Covid*-19.

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang ada di wilayah tersebut.

Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara tahun 2017 sebesar 41.279 juta rupiah atau 4,65 persen dibanding tahun sebelumnya; tahun 2018 sebesar 44.492 juta rupiah atau 4,34 persen; tahun 2019 sebesar 48.514 juta rupiah; tahun 2020 sebesar 49.745 juta rupiah; tahun 2021 sebesar 52.294 juta rupiah atau meningkat 2,76 persen dari tahun sebelumnya.

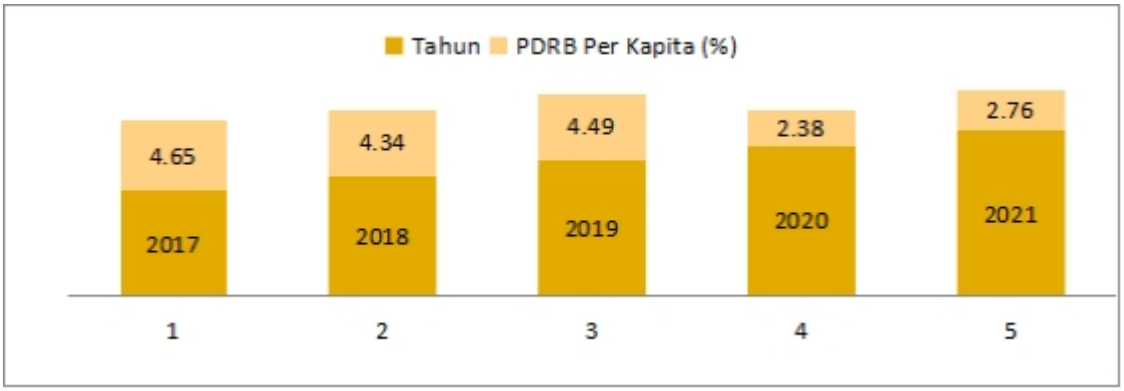

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Gambar 2.8.
PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021

PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Tenggara rata-rata mampu menghasilkan

nilai tambah sebesar nilai perkapita dimasing-masing tahun tersebut. Pertumbuhan perkapita secara *riil* pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 cukup berfluktuatif. Dimana pertumbuhan perkapita tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,10 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,13 persen akibat dampak pandemi *Covid*-19.

Tabel 2.18. PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2017 s.d. 2022

No.	*Indikator*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
	- ADHB	107.423,50	118.066,61	129.225,15	130.107,27	139.463,63	158.761,13
	- ADHK	83.001,70	88.310,05	94.053,52	93.445,72	97.276,36	102.657,94
2.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
	- ADHB	41,28	44,49	48,51	49,72	52,45	58,76
	- ADHK	31,89	33,28	35,31	35,71	36,58	38
3.	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (Persen)	4,65	4,34	6,1	1,13	2,44	3,87
4.	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	2.602,00	2.653,65	2.663,66	2.616,90	2.659,16	2.701,66
5.	Pertumbuhan Jumlah Penduduk	2,01	1,97	0,83	-1,76	1,61	1,6

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

d. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi di Indonesia diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Tabel 2.19. Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi TenggaraTahun 2020-2022

Kelompok Pengeluaran	**Indeks Harga Konsumen**			**Inflasi Mei 2021[1)]**	**Laju Inflasi Tahun Kalender 2021[2)]**	**Inflasi Tahun Ke Tahun [3)]**
	Mei-20	**Des-20**	**Mei-21**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Umum	103,42	105,28	106,40	1,13	1,12	2,98

Kelompok Pengeluaran		Indeks Harga Konsumen			Inflasi Mei 2021[1)]	Laju Inflasi Tahun Kalender 2021[2)]	Inflasi Tahun Ke Tahun [3)]
		Mei-20	Des-20	Mei-21			
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,69	106,99	109,79	2,18	2,8	5,1
2.	Pakaian dan Alas Kaki	104,13	103,19	103,21	0,13	0,02	-0,92
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	101,14	101,38	101,61	0,06	0,23	0,47
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,24	104,62	105,17	0,25	0,55	1,93
5.	Kesehatan	107,71	108,48	109,26	0,06	0,52	1,55
6.	Transportasi	101,93	107,19	108,24	2,36	1,05	6,31
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,90	97,70	97,94	0,02	0,24	0,04
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,22	101,60	103,16	1,09	1,56	1,94
9.	Pendidikan	106,85	108,48	107,89	0,00	-0,59	1,04
10.	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	103,47	108,83	105,30	0,00	-3,35	1,83
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,72	110,99	111,30	0,65	0,31	3,58

Sumber : Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

[1)]Persentase perubahan IHK bulan Mei 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya

[2)]Persentase perubahan IHK bulan Mei 2021terhadap IHK bulan Desember 2020

[3)]Persentase perubahan IHK bulan Mei 2021 terhadap IHK bulan Mei 2020

Inflasi Kota Kendari bulan Mei tahun 2021 tercatat sebesar 1,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,40. Inflasi yang terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,18 persen; pakaian dan alas kaki 0,13 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya 0,06 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,25 persen; kesehatan 0,06 persen; transportasi 2,36 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 1,09 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,65 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada Mei 2021 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,8 persen; kelompok transportasi1,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing 0,55 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,31 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,56 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,24 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya 0,23 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; serta kelompok pendidikan tidak memberikan sumbangan/relatif stabil.

e. Indeks Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara selama periode September 2019 - September 2022 terus mengalami penurunan meski naik sesaat di September 2021.

Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik.

Dalam setahun terakhir, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,382. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,022 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,404 dan meningkat sebesar 0,008 poin dibanding September 2021 yang sebesar 0,402. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2022 tercatat sebesar 0,341, turun sebesar 0,011 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,352 dan mengalami penurunan sebesar 0,012 poin dibandingkan dengan kondisi September 2021 sebesar 0,353.

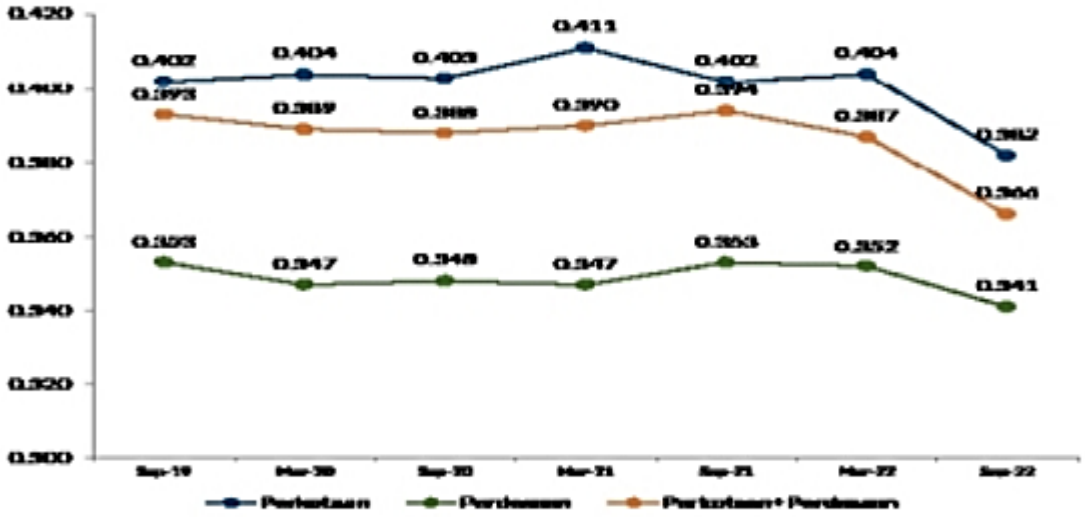

Gambar 2.9.

Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2019 – September 2022

f. Pemerataan Pendapat Versi Bank Dunia

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 - 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,23 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 17,38 persen dan September 2021 yang sebesar 16,31 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,65 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,11 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.20. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2020, Maret-September 2021 dan Maret-September 2022

Distribusi Pengeluaran Penduduk	Distribusi Pengeluaran Penduduk (Persen)					
	2020		2021		2022	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	15,07	17,00	15,72	16,11	16,53	17,65
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	34,75	30,98	31,55	37,64	35,96	36,72
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	50,18	52,02	52,73	46,25	47,51	45,63
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	20,37	21,11	20,24	18,04	18,84	19,11
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	39,51	37,50	39,86	39,93	38,37	39,75
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	40,12	41,38	39,90	39,77	40,63	41,14
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	18,61	19,80	19,02	16,31	17,38	18,23
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	37,30	35,95	37,68	37,96	36,74	38,12
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	44,08	44,25	43,31	45,72	45,88	43,65

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023, Survei Susenas.

g. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebesar 318,7 ribu jiwa naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 301,82 ribu jiwa dan pada Tahun 2022 bertambah menjadi 314,74 ribu jiwa naik 4,95 ribu jiwa dengan presentase 11,27 persen.

Tabel 2.21. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	*2*	*3*	*4*
Maret 2017	285.609	331,71	12,81
September 2017	300.258	313,16	11,97
Maret 2018	303.618	307,10	11,63

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	*2*	*3*	*4*
September 2018	300.258	301,85	11,32
Maret 2019	327,402	302,58	11,24
September 2019	346,466	299,97	11,04
Maret 2020	350.019	301,82	11,00
September 2020	360.123	317,32	16,69
Maret 2021	369.824	318,70	16,66
September 2021	385.845	323,26	11,74
Maret 2022	404.137	309,79	11,17
September 2022	432.464	314,74	11,27

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2021 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 285.609 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 meningkat mencapai 303.618 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada bulan Maret 2021 mencapai 369.824 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan yang terakhir pada bulan September 2022 sebesar Rp. 432.464 perkapita perbulan.

Pada bulan September 2017 dan bulan September 2022 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara kian menurun mencapai 11,27 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih berada diatas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat, sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional.

Persebaran penduduk miskin di Sulawesi Tenggara baik di Desa maupun di Kota dari tahun 2017-2022 fluktuatif. Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di Desa, namun persebaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Maret 2017 – September 2022 mengalami penurunan berbanding terbalik dengan penduduk miskin di perkotaan, walaupun penduduk miskin sebagian besar berada di desa tetapi perkembangan penduduk miskin di perkotaan cenderung naik tiap tahunnya.

Tabel 2.22. Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Maret 2017	62,75	268,96	7,56	15,29	297.829	279.739
September 2017	67,96	245,19	7,14	14,74	308.624	295.496
Maret 2018	66,41	240,69	6,56	14,77	311.241	298.702

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
September 2018	70,05	240,09	6,87	14,07	324.276	311.592
Maret 2019	71,82	230,76	6,81	14,09	336.877	321.197
September 2019	72,58	227,38	6,81	13,77	356.235	340.065
Maret 2020	76,93	224,89	7,14	13,50	366.063	350.019
September 2020	73,22	244,10	7,62	13,93	383.839	360.123
Maret 2021	75,05	243,65	7,66	13,89	394.183	369.824
September 2021	71,02	252,25	7,14	14,34	410.332	385.845
Maret 2022	69,94	239,85	6,98	13,57	420.442	394.734
September 2022	73,71	241,04	7,22	13,60	451.180	421.684

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh **pendapatan, kesehatan, pendidkan,** dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama Sekolah dan harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apritas daya beli (*purchasing power parity*).

Peningkatan IPM pada Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan pencapaian IPM Tahun 2020. Pada Tahun 2020 pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,53 persen dibanding Tahun 2020 dan Tahun 2022 meningkat menjadi 72,23.

Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2022 selama 13,69 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 13,68 tahun. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mencapai 9,25 Tahun pada tahun 2022. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki

harapan untuk dapat hidup hingga 71,37 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 71,20 pada tahun 2018 menjadi 71,45 pada tahun 2020. Selama periode tersebut. Pada periode 2018-2019, IPM Sulawesi Tenggara tumbuh 0,84 persen. Selama periode 2019 hingga 2022, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Selama periode 2011 hingga 2018 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus ”sedang”, sedang pada tahun 2019-2022 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah bersatus ”tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, IPM Sulawesi Tenggara masih berada di bawahnya, namun secara optimis akan mampu menyamai capaian nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91 Jarak IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan IPM Nasional pada tahun 22022 sebesar 0,68.

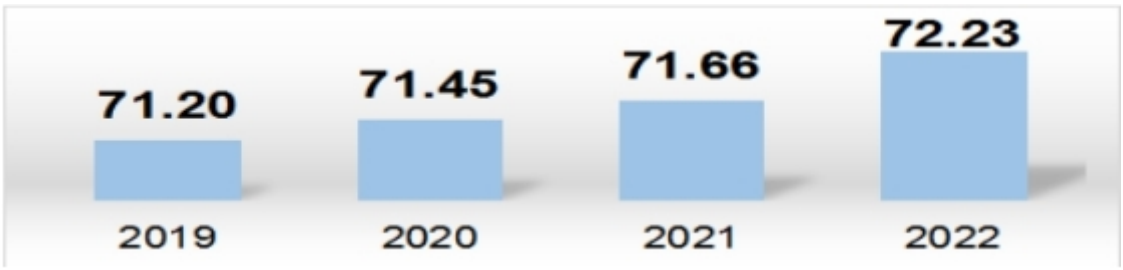

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2019-2022

Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,72	70,97	71,22	71,27	71,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,53	13,55	13,65	13,68	13,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,69	8,91	9,04	9,13	9,25
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	9.262	9.436	9.331	9.381	9.708
IPM	-	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Pertumbuhan IPM	Persen	0,75	0,84	0,35	0,21	0,57

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan 0,09 poin yaitu 0,75 pada Tahun 2018 menjadi 0,84 pada Tahun 2021. Pertumbuhan IPM mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari Tahun 2019 menjadi 0,35 pada Tahun 2020. Demikian halnya dengan Pertumbuhan IPM pada Tahun 2021 mengalami penurunan 0,14 poin dari Tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,57. Hal ini disebabkan dengan dampak pandemi Covid 19.

Tabel 2.24. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

No.	Provinsi/ Kab/Kota	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita (000)		IPM	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Buton	68.39	68.46	13.76	13.87	7.92	8.25	7.324.00	7.594.00	66,32	67,23
2.	Muna	70.41	70.47	13.80	14.01	8.46	8.52	8.218.00	838.00	69,17	69,61
3.	Konawe	70.32	70.38	13.01	13.03	9.21	9.30	10.151.00	10.552.00	71,48	72,04
4.	Kolaka	71.21	71.30	12.83	13.02	8.99	9.06	12.525.00	12.639.00	73,56	73,98
5.	Konawe Selatan	70.87	70.95	12.37	12.59	8.11	8.27	9.059.00	9.347.00	68,58	69,36
6.	Bombana	69.09	69.20	11.85	11.89	8.04	8.05	831.00	8.680.00	66,25	66,81
7.	Wakatobi	70.48	70.59	13.51	13.51	8.16	8.50	928.00	9.758.00	69,87	70,85
8.	Kolaka Utara	70.36	70.40	12.15	12.16	8.22	8.54	10.244.00	10.721.00	69,50	70,39
9.	Buton Utara	70.93	70.96	12.92	12.99	8.93	9.11	7.496.00	7.935.00	68,08	69,00
10.	Konawe Utara	69.53	69.59	13.08	13.11	9.30	9.53	9.181.00	9.666.00	70,23	71,00
11.	Kolaka Timur	72.82	72.90	12.69	12.69	7.84	8.15	7.753.00	8.155.00	67,76	68,73
12.	Konawe Kep.	68.43	68.46	12.32	12.53	9.42	9.42	6.738.00	7.192.00	65,73	66,69
13.	Muna Barat	70.35	70.39	12.51	12.61	7.30	7.60	7.502.00	7.668.00	65,48	66,21
14.	Buton Tengah	67.69	67.78	13.12	13.18	7.31	7.33	7.244.00	7.670.00	64,55	65,29
15.	Buton Selatan	67.69	67.76	13.24	13.25	7.54	7.64	7.279.00	7.476.00	64,99	65,44
16.	Kendari	73.83	73.93	16.89	16.90	12.51	12.52	14.356.00	14.765.00	84,15	84,51
17.	Baubau	71.25	71.36	15.17	15.18	10.91	10.92	10,503.00	10.835.00	76,26	76,67
18.	Sulawesi Tenggara	71,27	71.37	13.68	13.69	9.13	9.25	9.381.00	9.708.00	71.66	72,23

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pada Tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,21 (Muna Barat) hingga 84,51 (Kota Kendari).Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 67,76 dan 67,78 (Buton Selatan dan Buton Tengah) hingga 73,93 (Kota Kendari). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,89 (Bombana) hingga 16,90 (Kota Kendari) sertaRata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,60 (Muna Barat) hingga 12,52 (Kota Kendari). Pengeluaran per kapita level kabupaten/ kota berkisar antara Rp. 7.192.000,- (Konawe Kepulauan) hingga Rp. 14.765.000,- (Kota Kendari).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2022 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten yang berstatus tinggi sebanyak 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara dan Kota Bau-Bau) dan 1 kota berstatus sangat tinggi yaitu Kota Kendari. Sedangkan 10 Kabupaten lainnya berada pada status sedang. Dimana klasifikasi indeks pembangunan manusia (IPM) dikatakan rendah jika kurang dari 60, sedang jika berada antara 60 sampai 69, tinggi 70-79 dan 80 keatas dikatakan sangat tinggi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Sulawesi Tenggara telah mencapai diatas 94,91 persen. Sejak lima tahun terakhir, antara tahun 2017 hingga tahun 2021, AMH penduduk usia 15 tahun keatas terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 AMH penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 94,32 persen, tahun 2018 meningkat 94,46 persen, tahun 2019 meningkat 94,91, tahun 2020 Angka Melek Huruf meningkat yaitu 95,00 persen dan tahun 2021 tidak terlalu meningkat, mencapai 94,91 persen.

Tabel 2.25. Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Uraian	Capaian Kinerja					Target Kinera	
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023	2024
Angka Melek Huruf	94,46	94,91	95,00	94,94			

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 sd 2020 mengalami peningkatan yang tidak terlalu cukup siginifikan. Tahun 2021, Angka Melek Huruf mengalami penurunan menkabupaten/ kota antara tahun 2016 terendah adalah Kabupaten Buton sebesar 86,65 persen dan tertinggi adalah Kota Kendari sebesar 98,69 persen. Pada tahun 2020 capaian terendah adalah Kabupaten Buton sebesar 98,57 persen sedangkan tertinggi berada pada 14 Kab/Kota sebesar 100 persen.

Tabel 2.26. Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Buton	90.50	92,10	99.57
2.	Muna	93.27	90,77	99.62
3.	Konawe	95.82	96,26	100.00
4.	Kolaka	96.08	95,99	100.00
5.	Konawe Selatan	94.29	95,56	100.00
6.	Bombana	92.83	92,63	100.00
7.	Wakatobi	89.30	93,33	100.00
8.	Kolaka Utara	93.08	94,07	100.00
9.	Buton Utara	96.20	94,33	100.00
10.	Konawe Utara	95.33	95,86	100.00
11.	Kolaka Timur	96.66	95,49	100.00
12.	Konawe Kepulauan	97.39	97,01	100.00
13.	Muna Barat	88.33	88,35	100.00
14.	Buton Tengah	84.82	88,08	100.00
15.	Buton Selatan	88.84	92,35	100.00
16.	Kendari	98.93	99,32	99.87
17.	Baubau	96.18	96,66	100.00

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

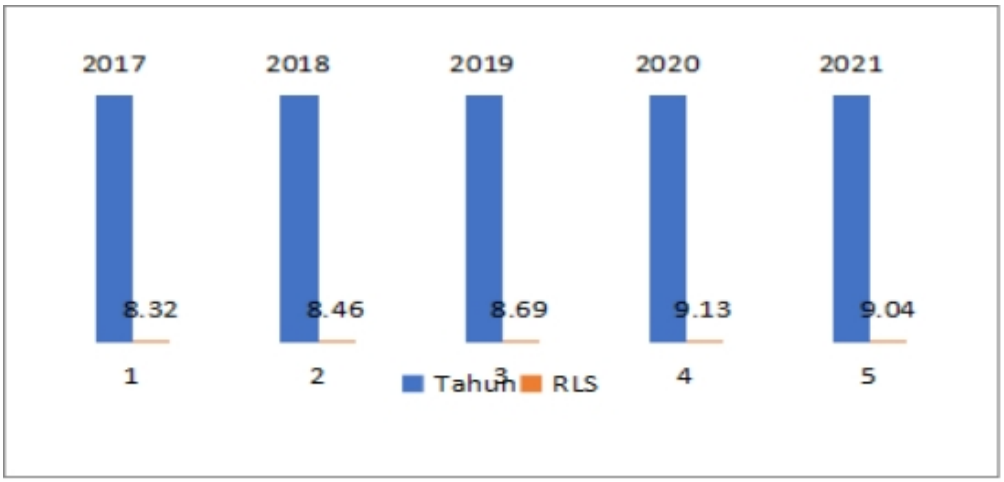

Gambar 2.11. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibanding Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional, hal ini bisa dilihat pada Grafik di atas.

Tabel 2.27. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2021

No.	Provinsi/Kab/Kota	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
1.	Buton	7,50	7,51	7,92	7,71
2.	Muna	8,19	8,35	8,46	8,36
3.	Konawe	8,94	9,14	9,21	9,15
4.	Kolaka	8,57	8,76	8,99	8,98
5.	Konawe Selatan	7,73	7,74	8,11	7,86
6.	Bombana	7,54	7,74	8,04	8,03
7.	Wakatobi	7,72	7,73	8,16	7,94
8.	Kolaka Utara	7,67	7,86	8,22	8,12
9.	Buton Utara	8,54	8,75	8,93	8,92
10.	Konawe Utara	8,81	8,97	9,30	9,21
11.	Kolaka Timur	7,18	7,35	7,84	7,56
12.	Konawe Kepulauan	9,17	9,18	9,42	9,41
13.	Muna Barat	6,76	6,77	7,30	7,01
14.	Buton Tengah	7,28	7,29	7,31	7,30
15.	Buton Selatan	6,01	7,32	7,54	7,53
16.	Kendari	11,69	11,94	12,51	12,20
17.	Baubau	10,13	10,13	10,91	10,64

No.	Provinsi/Kab/Kota	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
	Sulawesi Tenggara	**8,46**	**8,69**	**9,13**	**9,04**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2021

c. Angka Usia Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir *(life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun secara keseluruhan Angka UsiaHarapan Hidup Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 hanya 2 kabupaten/kota yang memiliki Angka Usia Harapan Hidup diatas rata-rata provinsi, yaitu : Kolaka Timur (72,82 tahun)danKotaKendari (73,83 tahun).

Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.

Tabel 2.28. Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buton	67,60	67,92	68,25	68,39	68,46
Muna	69,97	70,18	70,39	70,41	70,47
Konawe	69,76	70,02	70,27	70,32	70,38
Kolaka	70,38	70,72	71,06	71,21	71,30
Konawe Selatan	70,24	70,52	70,80	70,87	70,95
Bombana	68,17	68,54	68,91	69,09	69,20
Wakatobi	69,85	70,13	70,41	70,48	70,59
Kolaka Utara	69,94	70,15	70,36	70,36	70,40
Buton Utara	70,56	70,75	70,93	70,93	70,96
Konawe Utara	68,95	69,23	69,51	69,53	69,59
Kolaka Timur	71,99	72,33	72,67	72,82	72,90
Konawe Kepulauan	68,06	68,25	68,43	68,43	68,46
Muna Barat	69,97	70,16	70,34	70,35	70,39
Buton Tengah	67,33	67,50	67,66	67,69	67,78
Buton Selatan	67,33	67,50	67,66	67,69	67,76
Kota Kendari	73,26	73,52	73,77	73,83	73,93
Kota Baubau	70,72	70,95	71,19	71,25	71,36
Sulawesi Tenggara	**70,72**	**70,97**	**71,22**	**71,27**	**71,37**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

d. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi memberikan gambaran kemampuan seorang anak dalam periode usia dibawah 12 bulan. Angka kelangsungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2017 dan laporan kematian bayi menunjukkan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari 989 per 1000 KH menjadi 990

per 1000 KH tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019-2021 yakni sebesar 991 per 1000 KH..

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator-Indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas menggambarkan perkembangan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun. Angka kematian yang biasanya dijadikan indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.29 Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022

Indikator	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun	70,76	70,88	71,22	71,27	71,37
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	990	991	991	991	
Jumlah Kasus Kematian Ibu	60	66	56	117	
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita	445	484	428	411	
Pravalensi Balita Gizi Buruk	209	271	1,4	5,9	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 70,59 tahun, kemudian dari tahun ke tahun terus bertambah hingga mencapai angka 71,27 tahun pada tahun 2021. Meningkatnya angka harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan menunjukkan penurunan yakni dari 215 kasus tahun 2017 turun menjadi 209 kasus tahun 2018 kemudianmeningkat pada tahun 2019 yaknisebesar 271 kasus. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa diantaranya dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas perawatan.

Jumlah kasus kematian ibu dalam lima tahun terakhir penurunan yakni dari 73 kasus tahun 2017 menjadi 60 kasus tahun 2018. Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukkan penurunan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus kematian bayi turun dari 428 kasus menjadi 411 kasus. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan anak diantaranya peningkatan kapasitas tenaga, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, penanganan komplikasi neonatal, deteksi dini tumbuh kembang bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah Status Gizi Balita. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk 3 indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umum

(TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lainnya (akut) Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya : kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makanan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tenggara pada Februari 2021 sebanyak 1.970.728 orang,dibanding Februari 2020 sebanyak 1.852.420 orang. Penduduk yang bekerja pada Februari 2021 sebanyak 1.327.069 orang, dibanding keadaan setahun lalu dan bertambah 1.274.067 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 27.983 orang, mengalami penurunan sekitar 13.789 orang.

Tabel 2.30. Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Kegiatan Utama	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Februari 2021
Penduduk Usia Kerja	1.768.949	1.810.345	1.852.420	1.970.728
Angkatan Kerja	1.286.623	1.296.494	1.315.839	1.381.203
Bekerja	1.250.729	1.258.102	1.274.067	1.327.069
Pengangguran	35.894	38.392	41.772	27.983
Bukan Angkatan Kerja	482.326	513.851	536.581	589.525
Sekolah	158.693	167.054	171.664	150.296
Mengurus Rumah Tangga	281.595	298.083	313.524	377.233
Lainnya	42.038	48.714	51.393	61.996
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	72,73	71,62	71,03	70,09
Tingkat Pengangguran (persen)	2,79	2,96	3,17	3,9

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023, Sakernas 2018-2022

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK di Sulawesi Tenggara berfluktuasi, meskipun menunjukkan tren positif. TPAK pada Februari 2019 tercatat sebesar 71,62 persen, sementara Februari 2020 mencapai 71,03 persen, turun 0,59 persen poin. Sementara Februari 2021 semakinmenurun menjadi 70,09 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan

Pembangunan bidang olahraga dan kepemudaan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan Olah raga dan kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.31. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Nilai Lakip Minimal B	100%	100%	100%	-	-	-	-
2	Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Pemuda dalam berwirausaha (orang)	150	250		-	-	-	-
4	Persentase Pemuda/masyarakat yang meningkat kebugarannya	73%	75%		-	-	-	-
5	Cakupan Pemberdayaan Pemuda (orang)	-	-	-	75%	83%	100%	100%
6	Cakupan Prestasi Olahraga	-	-	-	85%	85%	100%	100%
7	Cakupan Organisasi Pemuda	-	-	-	75%	78%	100%	100%
8	Nilai LAKIP							BB (72)

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2023

Berdasarkan tabek diatas terlihat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018-2020 terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase Nilai Lakip Minimal B, (2) Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan dan (3) 3. Pemuda dalam berwirausaha dan 4. Persentase Pemuda/Masyarakat yang meningkat kebugarannya. Pada Tahun 2021-2023 terjadi perubahan indikator Kinerja Utama sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan disetiap OPD dengan dasar tersebut IKU Diskepora pun mengalami perubahan. Cakupan Pemberdayaan Pemuda tahun 2021-2022 merupakan kegiatan pemuda yang dilaksankan untuk membangun sumber daya manusia bagi pemuda, adapun bentuk kegiatan kepemudaaan terfokus pada pengembangan karakter kepemimpinan pemuda serta meningkatkan pereokomian mandiri pemuda dalam bentuk kegiatan wirausaha bagi pemuda.

Cakupan Prestasi Olahraga tahun 2021-2022 faktor pendukung peningkatan prestasi khususnya ditahun 2021 yaitu pelaksanaan kegiatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara Berhasil mendapatkan Prestasi dengan 5 medali Emas 5 medali Perak dan 5 medali perunggu dan meningkatnya jumlah atlet sulawesi Tenggara yang mengikuti iven Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade.

Cakupan Organisasi Pemuda tahun 2021-2022 Dinas Kepemudaan melakukan pemeliharaan Organisasi kepemudaan yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra serta di dukung oleh organisasi lain seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi lainnya.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

a. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Pendidikan Atas Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dan 2019 APK Pendidikan Atas mencapai 84,83 persen, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 89,50 persen.

Tabel 2.32. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMA/SMK/MA	84,83	86,81	87,74	89,50	89,14	98,05	107,86

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021 mengalami sedikit peningkatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan APM Pendidikan Atas sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan pendidikan yang tinggi akan sangat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.33. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMA/SMK/MA	62,87	62,92	63,41	63,70	64,11	70,521	77,5731

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2023

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia

sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.34. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun	73,47	73,94	74,50	75,02	86,04	94,64	104,11

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara untuk APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan setiap tahunnya.

4) Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK

Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan bidang pendidikan untuk melihat keterjangkauan maupun pemerataan pendidikan.Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak yang putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alas an seperti tidak adanya biaya, bekerja untuk membatu perekonomian keluarga, ataupun alasan lainnya. Ganggauan belajar pada siswa sekolah baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, kemampuan belajar yang kurang) maupun yang disebabkan oleh factor eksternal dapat menjadikan siswa putus sekolah/berhenti sekolah.

Tabel 2.35. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2018-2024

Indikator	Capaian Target Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APTS SMA/SMK/MA	26,53	26,06	25,5	24,98	13,96	12,50	12,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

5) Angka Kelulusan

Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan adalah angka kelulusan. Perkembangan angka kelulusan 5 (Lima) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Hal menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Target angka kelulusan untuk tahun berjalan (2023) dan tahun depan (2024) juga ditargetkan mencapai angka 100 persen. Perkembangan Angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2021 sebagai berikut :

Tabel 2.36. Capaian dan Target Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Tahun	SMA (persen)	SMK (persen)
Capaian		
2018	100	100
2019	100	100

Tahun	SMA (persen)	SMK (persen)
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
Target		
2023	100	100
2024	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

6) Angka Melanjutkan Sekolah

Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37. Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024

Indikator	Capaian Kinerja			Target Kinerja	
	2020	2021	2022	2023	2024
Siswa Baru SMA/SMK	44.045	44.045	47.159	51.874	57.062
Angka Melanjutkan (persen)	101,90	111,00	104,62	115,08	126,59

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (PDSPK) Tahun 2023

7) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran. Kondisi Bangunan Sekolah di Sulawesi Tenggara digambarkan pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.38. Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Ruang Kelas Baik (SMA)	38,37%	23,51%	38,58%	35,35%	47,94%	50,00%	51,00%
2.	Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SMK)	40,80%	18,28%	37,91%	36,76%	47,61%	49,00%	50,00%
3.	Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SLB)	26,57%	6,11%	16,41%	19,48%	33,96%	35.00%	36.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Tabel 2.39. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

No.	Kab/Kota	SARANA DAN PRASARANA											
		SMA				SMK				SLB			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bombana	197	63	87	59	100	16	15	27	0	0	6	9
2	Buton	184	100	57	58	47	32	21	23	4	0	0	0

No.	Kab/Kota	SARANA DAN PRASARANA											
		SMA				SMK				SLB			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
3	Buton Selatan	212	38	30	44	24	19	6	1	0	0	0	0
4	Buton Tengah	137	96	104	8	63	19	38	6	9	12	0	0
5	Buton Utara	137	13	22	35	38	10	16	22	15	3	0	0
6	Kolaka	191	112	26	17	159	48	47	41	29	36	34	12
7	Kolaka Timur	122	59	33	23	91	26	21	2	15	0	0	0
8	Kolaka Utara	43	59	57	38	98	12	10	8	0	0	0	0
9	Konawe	298	144	58	60	137	28	13	26	90	16	32	0
10	Konawe Kep.	26	33	25	24	21	3	9	6	0	2	0	0
11	Konawe Selatan	294	140	76	71	45	65	59	28	17	17	2	9
12	Konawe Utara	96	28	50	34	23	6	10	0	0	6	6	0
13	Muna	327	147	80	151	135	87	110	67	46	108	43	83
14	Muna Barat	139	31	57	44	65	12	45	6	48	15	10	4
15	Wakatobi	107	78	80	84	17	33	8	5	1	0	7	6
16	Baubau	179	84	38	41	79	86	55	20	55	18	14	2
17	Kendari	364	185	91	68	297	54	63	44	24	61	19	36
	Sulawesi Tenggara	3053	1410	971	859	1439	556	546	332	353	294	173	161

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

8) Sertifikasi Guru

Tabel 2.40. Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan		
		SMA	SMK	SLB
1.	Bombana	179	80	0
2.	Buton	174	41	0
3.	Buton Selatan	110	18	
4.	Buton Tengah	114	16	0
5.	Buton Utara	112	25	1
6.	Kolaka	202	173	2
7.	Kolaka Timur	106	68	1
8.	Kolaka Utara	132	68	
9.	Konawe	337	82	5
10.	Konawe Kepulauan	35	15	0
11.	Konawe Selatan	254	60	5
12.	Konawe Utara	89	10	0
13.	Muna	435	187	42
14.	Muna Barat	131	47	8
15.	Wakatobi	167	17	1
16.	Baubau	308	197	9
17.	Kendari	501	352	15
Sulawesi Tenggara		**3.386**	**1.456**	**89**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

9) SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di bidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang juga mengatur tentang SPM khususnya SPM bidang Pendidikan.

Tabel 2.41. Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Jenis Pelayana	Indikator	Capaian Target Kinerja 2018		2019		2020		2021		2022		Target Kinerja 2023	2024
			TN/KL	C	TN/KL	C	TN/KL	C	TN/KL	C	TN/KL	C		
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berapartisipasi dalam pendidikan menengah	9.765.488	122.466	9.887.787	125.183	10.051.919	128.756	10.164.653	130.292	10.167.617	129.420	130.000	131.000
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	132.642	2.873	138.984	2.886	141.924	2.897	142.167	2.671	150.828	2.742	2.800	2.900

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara,Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah dari tahun ketahun. Demikian juga pada jumlahpenduduk yang terserap pada satuan pendidikan khusus/layanan khusus. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan APK dan APM yang menunjukkan makin meningkatnya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Tingginya angka putus sekolah pada kedua jenjang

pendidikan tersebut cukup tinggi yang disebabkan oleh factor sosial, ekonomi dan kondisi geografis yang sulit.

Adapun masalah dalam pencapaian SPM pendidikan di Sulawesi Tenggara, secara umum didominasi oleh 3 (tiga) masalah utama yaitu: (1) masih kurangnya sarana prasarana pendidikan di daerah 3T, (2) masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan khususnya pendidikan khusus/layanan khusus dan (3) kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Urusan Kesehatan

1) Perkembangan Fasilitas Kesehatan

Perkembangan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat. Secara rinci perkembangan pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022

Jenis Fasilitas	Capaian Target Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Puskesmas :					
- Puskesmas Perawatan	86	94	98	106	105
- Puskesmas Non Perawatan	196	195	194	187	191
Jaringan Puskesmas :					
- Puskesmas Keliling	159	161	241	198	122
- Puskesmas Pembantu	493	493	504	492	431
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) :					
- Polindes & Poskesdes	1.157	1.157	1.044	1.069	
- Posyandu	3.137	3.200	3.231	3.260	3268
Rumah Sakit :					
- Rumah Sakit Umum	36	36	33	37	34
- Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

a) Puskesmas

Jumlah Puskesmas Non Perawatan selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 186 unit pada tahun 2017, lalu meningkat menjadi 187 unit pada tahun 2021. Jumlah Puskesmas Perawatan 2017 berjumlah 93 unit dan meninggkat menjadi 187 unit di tahun 2021. Jaringan Puskesmas keliling meningkat dari 132 unit tahun 2017 menjadi 198 unit pada tahun 2021.

Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di provinsi Sulawesi Tenggara sudah terpenuhi namun untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang luas wilayahnya sehingga jumlah penduduknya tersebar dan tidak merata didukung juga dengan kondisi geografis yang sulit, sehingga Rasio puskesmas digunakan berdasarkan kecamatan yaitu setiap 1 kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas. Maka jika dibandingkan jumlah puskesmas yaitu 293 puskesmas terhadap jumlah kecamatan yaitu 219 kecamatan maka diperoleh rasio 1,3 artinya setiap kecamatan memiliki 1 atau 2 puskesmas.

b) Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tenggara terus bertambah, pada tahun 2019 sudah mencapai 37 RS. Jumlah ini terjadi penurunan pada tahun 2020 yakni sebanyak 34 RS dikarenakan oleh adanya 3 (tiga) RS yang masih teregistrasi namun izin operasionalnya dihentikan/tidak berlaku lagi yaitu RS Griya Husada, RS PMI dan RS Mitra sakinah Konawe. Jumlah tersebut termasuk RS Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN, dan RS Swasta.

c) Poskesdes dan Polindes

Periode tahun 2017 – 2021 poskesdes dan polindes di Sulawesi Tenggara rata-rata mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2017 poskesdes dan polindes berjumlah 1.157 unit yang terdistribusi di 17 kabupaten/kota sedangkan pada tahun 2021 jumlah poskesdes dan polindes berkurang menjadi 1.069 unit.

Poskesdes adalah singkatan dari pos kesehatan desa, dimana lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit.

Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Persediaan obat yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat. Biasanya obat-obat tersebut didatangkan setiap 3 bulan sekali.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah masyarakat desa dalam rangka :

(1) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat desa.

(2) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan.

(3) Meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.

(4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan tenaga kesehatan.

(5) Meningkatkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat desa ditandai dengan terbentuknya Ambulans Siaga, Donor Siaga dan Dana Sehat.

d) Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat, dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan posyandu yang cukup baik di mana peningkatan jumlah posyandu dari 3.182 di tahun 2017 meningkat menjadi 3260 di tahun 2021. Rasio posyandu dalam kurun waktu 5 tahun periode tahun 2017–2021 dengan rasio posyandu

terhadap desa/kelurahan mencapai 1,38 atau terdapat 1–2 posyandu setiap desa/kelurahan.

2) Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan

Dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerah salah satunya dengan melihat jumlah tenaga kesehatan. Berikut ini gambaran ketersediaan tenaga kesehatan menurut kabupaten/kota lebih rinci dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Spesialis	255	320	254	273	278	295	310
	Rasio (11 per 100.000 penduduk)	9.65	11.83	9,68	9,95	10,13	10,75	11,3
2.	Dokter Umum	435	535	684	800	844	875	905
	Rasio (45 per 100.000 penduduk)	16.46	19.78	26,06	29,16	30,77	31,89	32,99
3.	Dokter Gigi	182	227	220	252	262	275	280
	Rasio (13 per 100.000 penduduk)	6.89	8.39	6,38	9,19	9,55	10,02	10,20
4.	Perawat	4.803	4.691	6.058	7408	9320	9380	9410
	Rasio (180 per 100.000 penduduk)	181.74	173.44	230,8	270,05	340	341,9	343,03
5.	Bidan	3.963	3.231	4.496	5492	7972	8000	8012
	Rasio (120 per 100.000 penduduk)	149.96	119.46	171,3	200,21	290,61	291,63	292,07
6.	Farmasi	745	855	995	1191	1617	1705	1725
	Rasio (36 per 100.000 penduduk)	28.19	31.61	37,91	43,42	58,95	62,15	62,88
7.	Ahli Gizi	616	619	845	750	1006	1020	1045
	Rasio (14 per 100.000 penduduk)	23.31	22.89	32	27	36,67	37,18	38,09
8.	Tenaga Sanitasi	393	456	490	474	687	702	785
	Rasio (13 per 100.000 penduduk)	14.87	16.86	18,67	17	25,04	25,59	28,61

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.44. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2022

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga Medis		Tenaga Keperawatan		Tenaga Kebidanan		Tenaga Kefarmasian		Tenaga Kesehatan lainnya	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Buton	58	73	289	402	275	420	49	61	289	346

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga Medis		Tenaga Keperawatan		Tenaga Kebidanan		Tenaga Kefarmasian		Tenaga Kesehatan lainnya	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
2.	Muna	98	92	847	1039	685	88	100	148	606	665
3.	Konawe	93	93	771	943	677	915	101	128	471	504
4.	Kolaka	92	99	636	790	410	618	103	113	356	363
5.	Konawe Selatan	55	81	396	501	550	656	59	101	394	451
6.	Bombana	67	79	335	416	337	386	60	81	256	254
7.	Wakatobi	51	51	241	396	129	349	59	79	225	341
8.	Kolaka Utara	58	74	305	489	221	555	57	87	255	311
9.	Buton Utara	27	30	224	285	222	261	38	49	222	232
10.	Konawe Utara	34	45	157	344	171	356	31	71	138	276
11.	Kolaka Timur	28	32	264	371	286	372	31	52	122	163
12.	Konawe Kepulauan	15	23	105	162	98	166	23	43	127	198
13.	Muna Barat	30	36	231	324	279	331	49	59	209	262
14.	Buton Tengah	33	38	304	348	268	290	32	47	190	193
15.	Buton Selatan	38	36	284	355	271	388	53	55	223	247
16.	Kendari	413	413	1430	1534	596	668	312	342	1043	923
17.	Baubau	118	114	589	621	292	355	83	101	353	409
Sulawesi Tenggara		**1.308**	**1.409**	**7.408**	**9.320**	**5.767**	**7.972**	**1.240**	**1.617**	**5.479**	**6.138**

Sumber : Aplikasi SI-DMK Kemenkes (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023)

Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat berperan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menjelaskan pengertian tenaga kesehatanya itu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018 sampai tahun 2021 cukup berfluktuatif. Untuk dokter spesialis selain keberadaan dokter spesialis PNS, juga didukung dokter spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan R.I yang ditempatkan di Rumah Sakit kabupaten namun bersifat *temporary*, serta dokter spesialis yang dikontrak oleh pemerintah kabupaten. Diharapkan peningkatan jumlah dokter spesialis di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah PNS kejenjang spesialis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga setelah mereka selesai dapat Kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk dokter umum sampai dengan tahun 2021 berdasarkan table diatas juga terus meningkat, baik dokter yang PNS dan PTT. Adanya dokter umum dengan status PTT sampai masa kontrak 2 tahun akan mempengaruhi keberadaannya khususnya di Puskesmas. Keberadaan Fakultas Kedokteran untuk dokter umum di Universitas

Haluoleo diharapkan dapat mencetak alumni-alumni kedokteran yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi PNS serta bersedia ditugaskan Puskesmas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu peralatan kesehatan yang berhubungan dengan tugas dokter gigi belum memadai di Puskesmas apalagi di daerah terpencil. Disamping itu belum adanya fakultas kedokteran gigi di Universitas Provinsi ini juga merupaka Pekerjaan Rumah yang perlu dipikirkan bersama antara pemerintah provinsi dan pihak universitas khususnya Universitas Haluoleo agar ke depannya dibuka Fakultas Kedokteran gigi untuk mengakomodir tenaga dokter gigi.

Pemenuhan jenis tenaga bidan, nutrisionis dan perawat di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2021 juga berfluktuasi, selain yang berstatus PNS termasuk PNS dari alumni Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk program gizi, kebidanan dan keperawatan dikabupaten/kota, juga didukung dengan adanya program PTT khususnya untuk bidan, selanjutanya Program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus untuk bidan, perawat, nutrisionis.

Tenaga farmasi/apotker juga berfluktuatif dari sampai tahun 2021, banyaknya asisten apoteker beberapa tahun terakhir ini, salah satunya karena didukung oleh Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Khususnya Akdemi farmasi yang berada di Kendari, selain alumni dari luar provinsi Sulawesi tenggara yang penempatan CPNS di daerah ini. jenis tenaga ini juga masuk dalam analisis kebutuhan rencana kebutuhan untuk Program Nusantara sehat dan penugasan khusus dari pemerintah pusat yang akan ditempatkan di Puskesmas khususnya daerah terpencil. Namun demikian tantangan yang dialami, khususnya untuk status PNS, masih belum meratanya pendistribusian tenaga asisten apoteker di Puskesmas di seluruh kabupaten, masih ada Puskesmas yang tidak ada tenaga apoteker dan asisten apoteker padahal kalau dilihat dari rasionya, untuk tenaga asisten apoteker sudah melebihi target. Diharapkan pihak pemerintah kabupaten khususnya dinas kesehatan dapat mengoptimalkan Standar Ketenagaan Minimal tenaga asisten apoteker sehingga pendistribusiannya dapat lebih merata lagi.

3) Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pebaikan gizi, Pengendalian Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Penemuan dan Penanganan BTA Positif (persen)	82.7	83.43	83	91			
2.	Cakupan Desa UCI	89.52	88.56	85,46	73,5	78,5		
3.	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	93,06	89,75	94,31	88,7	87,3	90	91
4.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	77,4	77,3	75,73	75,8	72,6		
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6					44,6	60	60
5.	Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Kompeten	84.80	86.80	99,73	87,8	81.4	82	84
6.	Penanganan Kasus Gizi Buruk	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	100	100	100	100	100	100	100
8.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin	85	90	85	90			
	Cakupan Ketersediaan Obat				90	92	94	96
	Cakupan Ketersediaan Vaksin							
10.	Cakupan Rumah Tangga dengan PHBS	36,23	53,15	56,15	58,6	55,9	75	80
11.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	24.4	30	57,13	69,35			
	Persentase Sarana Air Minum yang di awasi/diperiksa air minumnya sesuai standar			60	64	68	72	76
12.	Angka Kesakitan: Menurunnya Kasus Malaria per 1000 Penduduk	0.3	0.3	0,17	0,13	0.25		
13.	Angka Kesakitan: Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa (15-49 Thn) (persen)	0.009	0.013	0,18	0,3	0,245		
14.	Angka Kesakitan: Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	38,4	63,5	14,1	25,7	34	10	10
15.	Angka Kesakitan: Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	150.0	166.52	118	135			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

4) Cakupan Penanganan Tubercolosis (TB)

Menurut *World Health Organization* (WHO) Tuberculosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang pada umumnya mempengaruhi paru-paru. Tuberculosis (TB) merupakan masalah utama kesehatan global sebagai penyebab utama kematian pada jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia setelah HIV. Tuberculosis lebih dikenal dengan TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil Tuberculosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberculosis dapat diukur dengan *case notification rate* (CNR) dan prevalensi (didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberculosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefenisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberculosis dalam jangka waktu tertentu).

Proporsi pasien baru BTA (+) dari semua kasus TB proporsi pasien baru BTA+ dari semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular diantara seluruh pasien TB baru yang diobati. Dalam usaha mengeliminir kasus baru, angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65 persen. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 65 persen maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (Pasien BTA+).

Tabel 2.46. Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Penanganan Penyakit TB	82.7	83.43	83	91			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

5) Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu yang diberikan pada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur dan ibu hamil. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana >80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila desa UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana > 80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada kelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd Immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Tabel 2.47. Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Program Imunisasi	89.52	88.56	85,46	73,5			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

6) Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap)

Dewasa ini kematian bayi sebagian besar terjadi pada usia kurang dari satu bulan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian neonatal diutamakan pada pemeliharaan kehamilan sebaik mungkin, pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan dan perawatan bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas (termasuk bidan desa, polindes dan kunjungan rumah) dengan ketentuan :

a) Kunjungan pertama, hari pertama sampai hari ketujuh (sejak 6 jam setelah lahir)

b) Kunjungan kedua kali pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan (8 sampai 28 hari)

c) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan kunjungan neonatal.

Tabel 2.48. Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap	93,06	89,75	94,31	88,7	87,3	90	91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut :

a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
b) Pengukuran tekanan darah.
c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA).
d) Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi.
f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana).
i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
j) Tatalaksana kasus.

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal ditiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan ditiap trisemester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil

dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja dan Target Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Kunjungan Ibu Hamil	77,4	77,3	75,73	75,8	72.6		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

8) Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompoten

Salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan. Kondisi geografis, persebaran penduduk, sosial budaya dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan oleh masyarat (Depkes, 2009).Cakupan persalinan tenaga kesehatan terlihat bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang cukup tinggi dalam pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu yaitu, meningkatkan peran bidan desa melalui peningkatan keterampilan, fasilitas dan peralatan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja dan Target Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Persalinan Tenaga Berkompeten	84.80	86.80	99,73	87,8			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

9) Penanganan Kasus Gizi Buruk

Faktor utama terjadinya gizi buruk di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh permasalahan ekonomi atau kemiskinanqwqsa, hal tersebut sangat berkorelasi mengingat makin tinggi angka kemiskinan yang tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, makin tinggi pula potensi terjadinya balita gizi buruk. Penyebab lain terjadinya balita gizi buruk adalah pola asuh anak yang salah serta akibat penyakit terutama infeksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus gizi buruk dengan menjadikan posyandu sebagai ujung tombak dalam melakukan pelayanan. Melalui posyandu, kita bisa memberikan pelayanan terhadap ibu hamil agar intens memeriksakan kehamilan, memberikan makanan tambahan ibu hamil, pemberian unsur zat besi pada ibu hamil, hingga pada paska kelahiran anaknya dengan cara memberikan pengetahuan tentang pemberian asupan gizi yang cukup kepada anak. Penanganan gizi buruk di Sulawesi

Tenggara periode tahun 2015 – 2021 rata-rata setiap tahunnya mencapai target 100 persen.

10) Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Dasar

Salah satu program Pemerintah yaitu program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Diharapkan dapat menurunkan kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pelayanan kesehatan yang bertumpuh pada masyarakat miskin dan terjangkau yaitu optimalisasi pemanfaatan pelayanan dasar atau pelayanan di tingkat puskesmas. Dari 283 Puskesmas di Sulawesi Tenggara, semua puskesmas aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat umum. Periode tahun 2015 – 2021 cakupan pelayanan kesehatan trendnya bersifat tetap yaitu 100 persen.

11) Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penerima manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikenal dengan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas (Program pemerintah pusat) dan Jaminan kesehatan daerah (kabupaten) serta peserta PBP Bahteramas (provinsi). Pelayanan kesehatan bukan saja pada level pelayanan dasar atau Puskesmas namun juga pada tingkat lanjut atau rumah sakit diberikan pada masyarakat miskin dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 – 2021 trendnya tetap yaitu rata-rata tiap tahun sejumlah 100 persen.

12) Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin

Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu dari delapan sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di puskesmas dengan melakukan penyediaan obat dan vaksin yang efektif, efisien dan akuntabel, guna mendukung dan mewujudkan sasaran strategis maupun sasaran program tersebut.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2020-2024 terkait program kefarmasian dan alat Kesehatan, yaitu meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2020 – 2024 yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediann obat esensial sebesar 85 persen – 100 persen, persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 77 persen – 85 persen, dan persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 90 persen – 96,50 persen.

Pemantauan ketersediaan obat periode tahun 2020 – 2024 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas di tiap kabupaten/kota tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program dimasa yang akan datang

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Sulawesi Tenggara, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat dan vaksin yang dipantau ketersediaannya merupakan obat dan vaksin indikator yang merupakan obat pendukung program tuberculosis, malaria, Kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan Kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pemantauan dan pengukuran tingkat ketersediaan dilakukan terhadap 40 item obat esensial dan 5 item vaksin imunisasi dasar lengkap, dengan target sasaran yaitu 292 puskesmas 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didasarkan adanya kebutuhan untuk melihat gambaran tingkat ketersediaan obat dan vaksin yang lebih menyeluruh.

Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan oleh Kefarmasian dan Alat Kesehatan didapatkan bahwa pada persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,55 di tahun 2020 dan meningkat sebesar 90,06 persen pada tahun 2021. Pada persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 79,44 pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 80,39 persen di tahun 2021, sedangkan untuk persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) di tahun 2020 sebesar 85,49 dan mengalami penurunan sebesar 82,73 persen di tahun 2021.

13) Cakupan PHBS di Rumah Tangga

Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 – 2021 PHBS mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 PHBS mencapai 48,77 persen, tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen. Pada tahun 2020 16,15 persen dan tahun 2021 cakupan rumahtangga dengan PHBS yakni 58,5 persen.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan–kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga yaitu :

a) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
b) Memberi bayi ASI Eksklusif
c) Menimbang bayi dan balita
d) Menggunakan air bersih
e) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
f) Menggunakan jamban sehat
g) Memberantas jentik di rumah
h) Makan buah dan sayur setiap hari
i) Melakukan aktivitas fisik setiap hari

j) Tidak merokok di dalam rumah.

14) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

Menurut permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggaraan air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individu melakukan penyelenggaraan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum harus standar permenkes yang dimaksud.

Penduduk Sulawesi Tenggara menggunakan sumber air minum yang bervariasi seperti sumur gali terlindung (SGT), sumur gali dengan pompa air (SGP), sumur bor dengan pompa (SBP), terminal air (TA), mata air terlindung (MAT), penampungan air hujan (PAH) dan PDAM.

Periode tahun 2017 - 2021 di Sulawesi Tenggara, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dengan trend berfluktuasi pada tahun 2017 mencapai 54,87 persen masyarakat mengakses air minum yang berkualitas namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sejumlah 24,4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sejumlah 30 persen dan 57,13 persen pada tahun 2020 namun terjadi peningkatankembali pada tahun 2021 sebesar 69,35 persen.

15) Angka Penyakit Tidak Menular (Kardiovaskuler)

Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.

Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan, prevalensi tertinggi untuk penyakit Kardiovaskuler di Indonesia adalah PJK, yakni sebesar 1,5 persen atau 2.650.340 orang. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4 persen atau 137.130 orang) dan terendah di Provinsi Riau (0,3 persen atau 12.321 orang), untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 1,7 persen atau 26.170 orang. Sementara total wilayah timur Indonesia 2,2 persen atau 635.754 orang. angka tersebut mencapai 23,98 persen dari total seluruh Indonesia sebesar 2.650.340 orang.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah timur Indonesia berpotensi besar penyumbang penderita penyakit jantung di Indonesia. Sementara belum ada Rumah Sakit Khusus yang menangani jantung bertempat di wilayah timur Indonesia.

16) Angka Kesakitan Kasus Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dan dapat menyerang semua orang baik laki-laki maupun perempuan pada semua kelompok umur.

Sulawesi tenggara periode tahun 2017-2021 dengan angka kesakitan malaria rata-rata per tahun 0,3 – 0,46 per 1000 penduduk, angka tersebut menunjukkan setiap

1000 penduduk akan beresiko 1 orang yang terkena malaria, trend ini menunjukkan penurunan setiap tahun namun tahun 2017 mengalami peningkatan 0,01 per 1000 penduduk. Pada tahun 2017 jumlah kasus positif malaria di Sulawesi Tenggara sebanyak 1.069 dengan angka kesakitan (*Annual parasite incidence*/API) per 1000 penduduk beresiko sebesar 0,41 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2016. Pada tahun 2018 dan 2019 terusmenurun yakni sebesar 0,3 persen dan mengalami peningkatan kasus pada tahun 2020 sekitar 0,16 persen dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sekitar 0,12 persen.

Jumlah kasus malaria di Sulawesi Tenggara < 1,25 per 1000 penduduk yang artinya dengan API 0,46 telah memenuhi target. Capaian API tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori rendah (API lebih kecil dari 1) untuk angka kesakitan malaria. Kematian akibat malaria yang dilaporkan sebanyak 2 kasus, keduanya berasal dari Kabupaten Muna sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) untuk Sulawesi Tenggara mencapai 0,19 persen.

Permasalahan yang ditemui dalam pemberantasan penyakit malaria antara lain adalah kurangnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan penderita, sehingga nilai ABER (*Annual blood examination rate*) masih sangat rendah dan di sisi lain nilai SPR (*slide Positive Rate*) masih cukup tinggi.

17) Angka Kesakitan Kasus HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *infeksi human immunodeficiency virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai pengidap pengidap HIV positif. Jumlah pengidap HIV positif dapat diketahui dengan 3 metode, yaitu layanan *voluntary*, *conselingand testing* (VCT), *zero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Kejadian kasus HIV+ dan AIDS di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun wilayah penyebarannya, meskipun berbagai upaya preventif dan promotif yang dilakukan juga belum optimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui data dan fakta yang sesungguhnya mengenai penyebaran kasus HIV dan AIDS di Sulawesi Tenggara, meskipun mayoritas masyarakat tahu resiko dan bahaya perilaku yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS.

Periode tahun 2017-2021 angka kesakitan prevalensi HIV pada populasi dewasa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 angka kesakitan prevalensi HIV sebesar 0,08 persen meningkat pada tahun 2018 sebesar 0,09 persen dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 0,13 persen. Dari tahun 2020 ke 2021 menurun dari 0,18 persen menjadi 0,3 persen.

18) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya aedes aigypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2017 - 2021 dengan Insidence Rate/Angka kesakitan DBD rata-rata per tahun berkisar 34,8 – 132,45 per 100.000

penduduk yang artinya setiap 100.000 penduduk terdapat 35 – 132 orang yang menderita DBD. Pada tahun 2017 Angka kesakitan DBD sekitar 35,68 persen, kemudian mengalami penurunanyang signifikan pada tahun 2018-2019 sebesar 34,8 persen, tahun 2020 sebilai 34,5 persen dan tahun 2021 penurunan angka Kesakitan DBD sekitar 24,6 persen.

19) Angka Kesakitan: Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Angka kesakitan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk adalah jumlah kasus tuberkulosis pada waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu setiap 100.000 penduduk. Angka untuk menggambarkan kecenderungan atau trend meningkat, tetap atau menurunnya kasus pada waktu dan wilayah tertentu. Periode tahun 2017 – 2021 trend prevalensi tuberkulosis Sulawesi Tenggara cenderung meningkat setiap tahunnya yakni 136,12 meningkat 150,59. Dan 166,52 Kecuali pada tahun 2020 menurun sejumlah 118 per 100.000 penduduk. Sedangkan tahun 2021 meningkat lagimenjadi 135 per 100.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Kasus tuberkulosis banyak terjadi pada kondisi lingkungan yang buruk dan padat penduduk serta banyak dipengaruhi oleh perilaku. Di Sulawesi Tenggara, penemuan kasus banyak ditemukan di Kota Kendari dan Kabupaten Muna pada tahun 2017. Dengan jumlah penemuan kasus baru 152 per 100.000 penduduk di Kota Kendari dan 4 per 100.000 di Kabupaten Muna. Penyebaran tuberkulosis melalui udara sehingga 1 orang yang terkena positif tuberkulosis dan berada di kota/kabupaten yang padat penduduk dan lingkungan buruk maka akan mempercepat dan memudahkan penyebaran tuberkulosis tersebut.

Selain urusan kesehatan di atas, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM urusan kesehatan berdasarkan Kemendagri Nomor 100 tahun 2018 yaitu :

- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Data capaian SPM urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51. Capaian dan Target Kinerja SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)		
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)		
	Bencana Provinsi (%)												
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM menyebutkan bahwa SPM urusan kesehatan di provinsi meliputi:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pelayanan terhadap penduduk terkena dampak krisis kesehatan atau berpotensi bencana rutin dilakukan setiap tahun sejak tahun 2018 – 2022 ketika terjadi bencana. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah kab/kota dan OPD terkait.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan melalui Program Mobil PSC (Public Safety Center) 119. Program Mobil PSC 119 merupakan program layanan cepat tanggap darurat dan promosi kesehatan. Apabila terjadi keadaan darurat, maka mobil tersebut akan langsung menuju ke tempat kejadian. Mobil PSC 119 dilengkapi dengan tempat tidur untuk korban dan peralatan medis lainnya. Mobil PSC 119 ini juga berfungsi untuk menyampaikan program dan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan internasional yang membutuhkan

koordinasi dalam penanggulannganya. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2018 – 2022 bersifat konstan yaitu 100 persen. Kejadian luar biasa (KLB) provinsi Sulawesi Tenggara 3 (tiga) tahun terakhir atau tahun 2020, tahun 2021, dan 2022 yang ditangani yaitu kejadian luar biasa (KLB) Virus Corona Covid-19.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang – bidang lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai akhir tahun 2021 yaitu sepanjang 13.861,82 km, yang terdiri dari 1.495,84 km jalan nasional, 1.009,28 km jalan provinsi, dan 11.356,7 km jalan kabupaten/kota. Tabel di bawah menunjukkan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.52. Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Nasional	1.553,99	1.497,8	1.497,8	1.495,84
	- Diaspal (Km)	1.474,56	1.497,8	1.497,8	1.487,84
	- Tidak Diaspal (Km)	79,43	0	0	8
2.	Provinsi	1.009,28	1.009,28	1.009,28	1.009,28
	- Diaspal (Km)	789,64	673,74	673,74	710,23
	- Tidak Diaspal (Km)	219,64	335,54	335,54	299,05
3.	Kabupaten/ Kota	10.233,80	11.352	11.416	11.356,7
	- Diaspal (Km)	3.736,34	4.466.6	4.379,8	4.584,11
	- Tidak Diaspal (Km)	6.497,46	6.885.65	7.038,27	6.772,59

Sumber: Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Jalan Nasional XXI Sultra, BPS Provinsi Sultra Tahun 2023

Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi disisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.

Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan

abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. Untuk Peta Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara dapatpe dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.53. Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sumber Daya Air						
1.	Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi	82,55 %	77,80 %	77,8%	67,98 %	67,98%	67,98%
2.	Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	46 lok	25 lok	-	-	-	-

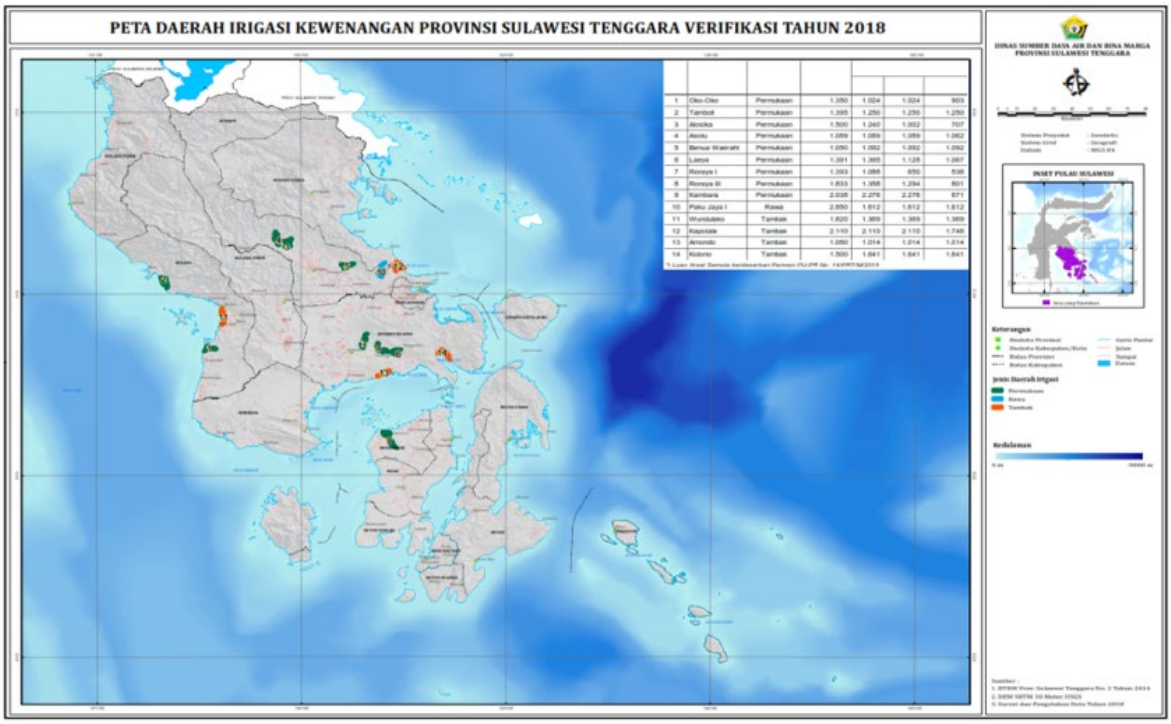

Sumber : Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Gambar 2.12. Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangunan dibidang Cipta Karya selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), 0persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses air minum yang merupakan program Pemerintah. Dari data yang ditampilkan tabel dibawah ini, untuk presentase rumah tinggal bersanitasi dan presentase penduduk berakses air minum walaupun belum mencapai level 100% tetapi telah terjadi peningkatan, demikian juga halnya dengan luas kawasan kumuh yang telah terjadi penurunan luasan sejak Tahun 2016 sampai 2021. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur baik yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2021

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	73,61	79,75	82,38	85,62
2.	Persentase Penduduk berakses air minum (persen)	80,95	80,89	92,49	91,94
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	80,95	89,66	92,49	91,94
4.	Persentase areal kawasan kumuh (Ha)	1.540,06	1.540,06	1.445,12	746,69

Sumber :Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Tahun 2023, BPS Susenas 2022

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018, Pekerjaan Umum juga memiliki fungsi Standar Pelayanan Minum (SPM), yaitu : Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan air minum domestik regional lintas Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki capaian SPM tersebut karena Infrastruktur SPAM Regional di Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang terbangun.

2) Penataan Ruang

Dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana didalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima tahun) setelah RTRW diundangkan, maka saat ini RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan sedang dalam proses revisi.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan RTRW)

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Perda RTRW	Status Revisi Perda RTRW saat ini
1.	Buton	Perda No. 1 Tahun 2014	Revisi tahun 2019
2.	Baubau	Perda No. 2 Tahun 2014	Revisi tahun 2019
3.	Muna	Perda No. 4 Tahun 2014	Revisi tahun 2020
4.	Konawe	Perda No. 9 Tahun 2014	Revisi Tahun 2020
5	Konawe Selatan	Perda No. 19 Tahun 2013	Perda No 5 Tahun 2020
6	Bombana	Perda No. 20 Tahun 2013	Revisi tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Perda RTRW	Status Revisi Perda RTRW saat ini
7	Kendari	Perda No. 1 Tahun 2012	Pembahasan Lintas Sektor dipusat
8	Buton Utara	Perda No. 5 Tahun 2012	Peninjuan Kembali (PK) Tahun 2021
9	Kolaka Utara	Perda No. 6 Tahun 2012	Revisi Tahun 2019
10	Wakatobi	Perda No. 12 Tahun 2012	Revisi Tahun 2020
11	Kolaka	Perda No. 16 Tahun 2012	Revisi Tahun 2019
12	Konawe Utara	Perda No. 20 Tahun 2014	Peninjuan Kembali (PK) Tahun 2021
13	Kolaka Timur	Perda No. 78 Tahun 2020	Perda No. 78 Tahun 2020
14	Konawe Kepulauan	Pembahasan Lintas sektor dipusat	Pembahasan Lintas sektor dipusat
15	Buton Selatan	Pembahasan Lintas sektor dipusat	Pembahasan Lintas sektor dipusat
16	Buton Tengah	Perda No. 6 Tahun 2020	Perda No. 6 Tahun 2020
17	Muna Barat	Perda No. 10 Tahun 2020	Perda No. 10 Tahun 2020
18	Sulawesi Tenggara	Perda No. 2 Tahun 2014	Revisi Tahun 2020, penyusunan Naskah Akademik Tahun 2021 dan pengintegrasian RTRW dan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Tahun 2023

Tabel 2.55. di atas menunjukkan tentang status RTRW 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini, dimana masih terdapat 1 (satu) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Peraturan Daerah RTRW sendiri yakni Kab. Buton Selatan dan 16 (enam belas) Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah RTRW sendiri. Kab. Buton Selatan sendiri saat ini sedang dalam proses penyusunan RTRW.

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Berdasarkan basis data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, backlog kepemilikan rumah di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu 127.684 unit rumah, sedangkan backlog penghunian rumah sebanyak 41.002 unit rumah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kabupaten/ kota. RTLH di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 berjumlah 188.069 unit. Ketersediaan rumah susun di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu 11.332 unit. Rumah susun pada umumnya diperuntukan untuk MBR, pegawai, mahasiswa/pelajar. Untuk jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang

sebanyak 24.416 unit rumah, dengan bentuk rumah adalah tapak. Ketersediaan rumah khusus di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu sebanyak 563 unit yang terdapat pada beberapa kabupaten/kota, pada umumnya rumah khusus ini diperuntukan sebagai masyarakat nelayan, masyarakat didaerah tertinggal, serta masyarakat berdampak relokasi.

Urusan Perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman. Adapun SPM Perumahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 ada 2 yaitu terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Kedua data SPM ini belum ada data pencapaiannya. Untuk capaian SPM Tahun 2012 – 2017, SPM tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan Jenis Pelayanan dasarnya : a. Rumah Layak Huni dan terjangkau; b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dengan indikator : a. Rumah layak huni yang terjangka; b. Prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan permukiman sedangkan pada Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal tidak memuat indikator tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

d. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di uruProvinsi Sulawesi Tenggara ditangani dengan cukup baik ini terlihat dari suasana yang kondusif, aman dan terkendali. Indikator kondusif, aman dan terkendalinya stabilitas ketentraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berlangsung dalam suasana tertib, aman dan demokratis. Upaya Pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kriminalitas	4.935 kasus	4.258 kasus	4.611 kasus	3.662 kasus	2.636 kasus	1.600 kasus	-
2.	Jumlah Satlinmas Per Desa/Kelurahan	2	4,38	7,88	1	2,35	6	-
3.	Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas pencapaian dan target kinerja Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada point 1 (satu) kolom 2 (dua)Indikator Kinerja Utama ‘angka kriminalitas’dari tahun 2018-2022 adalah merupakan capaian IKU Satpol PP Prov. Sultra sebagaimana yang termuat dalan LAKIP 2018-2022 dan target kinerja tahun 2023 juga sebagaimana yang termuat pada dokumen perencanaan yakni dokumen Renstra Satpol PP Prov. Sultra periode 2018-2023, data yang tersaji sampai saat ini berupa jumlah kasus/angka kriminalitas adalah trend jumlah kasus dari tahun ke tahun. Korelasi antara tugas Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban yang dihubungkan dengan trend angka kriminalitas adalah dimana Satpol PP dalam menjalankan peran dan fungsinya juga berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas dengan melakukan patroli operasi pekat(penyakit masyarakat) serta meningkatkan peran satlinmas sehingga tindakan atau perilaku masyarakat yang sifatnya pelanggaran masih dapat dicegah dan tidak berujung pada perbuatan pidana dan menjadi laporan/aduan masyarakat (1 laporan/pengaduan = 1 angka kriminalias). Sedangkan target tahun 2024 (sebagaimana kolom 9) tidak terisi atau kosong, hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan terhadap IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026 sehingga angka kriminalitas tidak lagi menjadi target kinerja/IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026.
2. Pada point 2 (dua) kolom 2 (dua) Indikator Kinerja Utama ‘Jumlah Satlinmas Per Desa/Kelurahan’. Hal yang sama dari tahun 2018-2022 adalah merupakan capaian IKU Satpol PP Prov. Sultra sebagaimana yang termuat dalan LAKIP 2018-2022 dan target kinerja tahun 2023 juga sebagaimana yang termuat pada dokumen perencanaan yakni dokumen Renstra Satpol PP Prov. Sultra periode 2018-2023, data yang tersaji sampai saat ini beruparasio jumlah personil satlinmas yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan dari jumlah total satlinmas se-sultra dibagi jumlah desa dan kelurahan se-sultra dan kemudian di rata-ratakan sehingga dapat menampilkan trend maupun capaian rasio jumlah satlinmas per masing-masing desa/kelurahan setiap tahun nya. Sedangkan target tahun 2024 (sebagaimana kolom 9) tidak terisi atau kosong, hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan terhadap IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026 sehingga Jumlah Satlinmas per Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi target kinerja/IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026.
3. Pada point 3 (tiga) kolom 2 (dua) Indikator Kinerja Utama ‘Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara’, adalah merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru periode 2024-2026. Adapun terisinya capaian sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) kolom3,4,5,6 dan 7 yakni capaian tahun 2018-2022 adalah berasal dari data capaian SPM Trantibum dari tahun 2018 hingga tahun 2022, sedangkat target tahun 2024 adalah berasal dari dokumen Renstra periode tahun 2024-2026 yakni Indikatir Kinerja Utama yang baru yang disesuaikan dengan indikator capaian SPM. Hal tersebut dimaksudkan adalah untuk memudahkan Satpol PP Prov. Sultra untuk mengkompilasi data dengan menyelaraskan Indikator Capaian SPM selaku OPD pemangku SPM dengan Indikator Kinerja Utama OPD.

Tabel 2.57 Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)		
Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: TN= Target Nasional
CKD= Capaian Kinerja Daerah
Sumber: Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2017 menjadi kewenangan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam skala/issue lintas wilayah Kabupaten/Kota atau dalam skala provinsi. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan pencapaian tingkat penyelesaian keamanan ketertiban dan keindahan (K3) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertangani dengan baik, atau 100 persen dapat diatasi.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan penegakkan perundang-undangan daerah dimaksud dalam pelaksanaannya adalah dilakukan oleh PPNS melalui mekanisme Pro Justisia (diputuskan melalui pengadilan). Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari tahun 2017-2022 juga mengalami peningkatan walaupun sebenarnya PPNS yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergolong kurang, namun dengan peningkatan PPNS tersebut meningkatkanpersentasi angka penegakkan Perda di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada tahun 2000 sampai dengan 2021 terjadi penurunan jumlah PPNS secara signifikan, hal ini dikarenakan jumlah PPNS yang di data hanyalah pada Instansi Satpol PP saja sehingga Jumlah PPNS yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58. Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021

No	Prov/Kab/Kota	Jumlah PPNS (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sulawesi Tenggara	57	57	63	23	1
2.	Kendari	21	21	23	18	4
3.	Baubau	18	18	18	3	1
4.	Buton	3	3	3	-	1
5.	Buton Tengah	-	-	-	7	1
6.	Buton Utara	7	7	7	-	-
7.	Buton Selatan	-	-	-	22	1
8.	Wakatobi	22	22	22	7	4
9.	Muna	6	7	7	-	-
10.	Muna Barat	-		-	23	1

No	Prov/Kab/Kota	Jumlah PPNS (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
11.	Bombana	5	5	5	5	-
12.	Konawe	14	14	14	14	-
13.	Konawe Selatan	10	8	10	10	-
14.	Konawe Utara	7	7	7	7	-
15.	Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-
16.	Kolaka	7	6	7	7	2
17	Kolaka Utara	8	8	8	8	-
18.	Kolaka Timur	-	-	-	-	1
Jumlah		**185**	**188**	**183**	**152**	**17**

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah rumah-rumah ibadah sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.59. Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
Buton	144	33	3	8	16	–
Muna	235	35	16	9	2	–
Konawe	393	66	54	6	33	4
Kolaka	332	66	54	10	39	1
Konawe Selatan	417	168	60	12	94	4
Bombana	182	28	11	1	11	–
Wakatobi	172	27	1	–	–	–
Kolaka Utara	209	39	20	–	–	–
Buton Utara	95	15	4	3	8	–
Konawe Utara	149	1	10	3	16	–
Kolaka Timur	197	30	17	4	44	–
Konawe Kepulauan	76	1	–	1	1	–
Muna Barat	118	38	6	1	14	2
Buton Tengah	117	7	–	–	–	–
Buton Selatan	90	13	–	–	–	–
Kota Kendari	535	58	53	4	2	4
Kota Baubau	117	3	11	–	14	2
Sulawesi Tenggara	3 578	628	320	62	294	17

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2023

Bencana juga merupakan salah satu urusan dalam ketentraman dan ketertiban. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakkan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Urusan Sub bencana merupakan urusan dasar pada standar pelayanan Minimal yang termuat dalam Peraturan Mendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang terkait dengan : a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

e. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :

Tabel 2.60. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)					Target Kinerja (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,03	0,03					
2.	Prosentase PSKS yang melakukan pelayanan terhadap PMKS	1,3	1,5,					
3.	Prosentase PMKS dalam Panti yang ditangani dan memperoleh Bantuan pelayanan Rehabilitasi	1,3	1,3					
4.	Prosentase Peningkatan Pelayanan Panti Sosial	25	25					
5.	Prosentase Korban bencana yang ditangani dan terpeliharanya taraf Kesejahteraan Sosial PMKS	100	100					
6.	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial			15,3	0,12	15,8	51.4	51.4
7.	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan			30	5,7	1,7	41	41

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2018 sd 2019 terdiri dari: (1).Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, (2) Prosentase PSKS yang melakukan pelayanan terhadap PMKS, (3) Prosentase PMKS dalam Panti yang ditangani dan memperoleh Bantuan pelayanan Rehabilitasi, (4). Prosentase Peningkatan Pelayanan Panti Sosial dan (5)Prosentase Korban bencana yang ditangani dan terpeliharanya taraf Kesejahteraan Sosial PMKS.

Sementara sejak Tahun 2020 seiring dengan Perubahan Nomenklatur dan peyesuaian Perubahan Pada Renstra maka IKU Dinas Sosial direvisi menjadi : (1) Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial dan (2) Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan.

Capaian Kinerja Tahun 2018 sd Tahun 2021 belum maksimal disebabkan adanya beberapa **Faktor Penghambat** antara lain :

1. Dari 26 Macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara baru bisa melaksanakan penanganan untuk Anak Terlantar, Penanganan Korban Bencana Alam dan Penanganan Fakir Miskin karena Dinas Sosial hanya memiliki 1 (satu) UPTD yang menangani Anak Terlantar;
2. Updating Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum maksimal dilaksanakan oleh Kab/Kota
3. Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial masih sangat terbatas.

Selain faktor penghambat, adanya **Faktor Pendukung** yang diharap bisa mendorong Pencapaian Target Kinerja IKU Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sosial adalah salah satu OPD yang menangani urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan akan berimbas pada alokasi anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
2. Penanganan Fakir Miskin adalah salah satu Program Prioritas sehingga akan memberi dampak pada Penyusunan Perencanaan dan Penanggaran.

Tabel 2.61. Capaian dan Target Kinerja SPM Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)		
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	100		100		100		100		100	98,9	25	25
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	100	78	100	78	100	1,3	100	1,3	100	1,3	80	80
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	100		100		100		100		100	0,0021	50	50

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)		
	terlantar didalam Panti												
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	100		100		100		100		100	0,1	40	40
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	100	100	100	100	781,6	100	276	100	100	100	100
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	100		100		100		100		100	98,9	25	25
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	100	78	100	78	100	1,3	100	1,3	100	1,3	80	80

Keterangan: TN= Target Nasional
CKD= Capaian Kinerja Daerah
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Kinerja SPM Dinas Sosial dari Tahun 2018 sd 2022 adalah :

1. Untuk Realisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2018 sd Tahun 2021 belum maksimal dilaksanakan karena Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara saat ini baru memiliki 1 (satu) UPTD Panti Sosial yang menangani Anak Terlantar sehingga dari total 5 Indikator SPM yang ada baru dilaksanakan 2 yaitu Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Penanganan Korban Bencana Alam skala Propinsi;
2. Tahun 2020 terdapat Capaian Kinerja yang sangat tinggi dari target karena diluncurkan Bansos bagi Korban Pandemi Covid 19.

3. Tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan Target Capaian SPM melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Panti Sosial milik Swasta, sehingga dari 5 Target SPM bisa dilaksanakan semuanya meskipun dengan angka capaian yang masih relatif kecil.

Untuk capaian SPM belum maksimal dilaksanakan karena beberapa faktor yang menjadi Penghambat antara lain :

1. Pengalihan UPTD Panti dilokasi yang baru membuat penanganan Anak terlantar mengalami penurunan Kapasitas karena Kondisi sarana dan Prasarana dilokasi yang baru belum memadai.
2. Indikator Target SPM bagi Dinas Sosial Propinsi adalah Penanganan Dalam Panti sehingga dengan hanya memiiki 1 Panti Layanan anak terlantar tentunya akan menghambat capaian Indikator lainnya.
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dilakukan Updating dan Pemutakhiran dari Kabupaten/Kota sehingga menghambat upaya mapping Penanganan yang dilakukan Pemerintah melalui UPTD Pani Dinas Sosial, Lembaga Kedejahteraan Sosial (LKS) dan Panti-panti Swasta.

Faktor Pendukung yang diharapkan dapatmendorong Pencapaian Target Kinerja SPM Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana Dinas Sosial adalah salah satu dari 6 urusan wajib.
2. Dengan diberi ruang untuk melakukan Intervensi penanganan Pada Panti-panti Swasta maka diharapkan akan mendorong peningkatan capaian target SPM
3. Melakukan upaya Updating data dikabupaten Kota sebagai langkah awal penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga kerja yang ditangani pemerintah meliputi: masalah sengketa pekerja, keselamatan dan perlindungan kerja, keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan, dimana urusan tenaga kerja dapat diukur dengan indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)		
		2018	2019	2020
1.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0
2.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	766	595	260
3.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	179	249	261
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	170	170	200
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	30	30	30

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

Adapun tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara yakni pada tahun 2018 sekitar 3,26 persen, tahun 2019 sekitar 3,59 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 4,58 persen disebabkan dampak dari pandemic virus Covid 19 yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,92 persen.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.63 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,54	71,40	72,54	73,10	Belum ada data	73,76	74,10
2.	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencapai level minimal Predikat Pratama	5,88%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	47,06%	-
3.	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4.	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	-	51,2	50,6	51,6	54,65	58,8	-
5.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	-	-	-	-
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	69,34 (B)	Belum ada data	70,34	70,59
7.	Persentase Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA	-	-	-	-	-	-	23,53%
8.	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	75%
9.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	75%
10.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	-	-	-	-	-	-	2,68

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Tahun 2023

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2019 - 2021. Peningkatan IDG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IDG yang meliputi keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang tersebut diamanatkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD sebagai aksi affirmasi (affirmative action). Selama Tahun 2018 - 2021 keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sulawesi Tenggara berfluktuasi pada angka 17.78 – 20.00 persen. Capaian ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang mengamatkan sebesar 30%. Ada beberapa persoalan terkait masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Selain keterwakilan perempuan di parlemen, komponen lain yang menjadi pembentuk IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Selama tahun 2018 – 2021, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 2,41 persen dari 48,79 persen tahun 2018 menjadi 51,20 persen tahun 2021.

Perhitungan IDG untuk melihat kontribusi perempuan dalam ekonomi menggunakan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2020, sumbangan pendapat perempuan di Sulawesi Tenggara sebesar 36.27 persen. Capaian ini meningkat sebesar 0,23 persen dan merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2018 - 2021. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh. Namun komponen sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara khususnya saat ini semakin membaik.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak dalam bentuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pada tahun 2011 Kota Kendari telah menginisiasi pengembangan Kota Layak Anak dan memperoleh penghargaan predikat Pratama. Selanjutnya pada tahun 2013 Kota Kendari kembali memperoleh penghargaan predikat Madya, tahun 2017 mengalami penurunan dari predikat Madya menjadi predikat Pratama dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi predikat Madya. Sampai dengan tahun 2022

sudah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, namun baru 2 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori KLA yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya dan Kabupaten Kolaka dengan predikat Madya. Sampai dengan Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencapai level minimal predikat pratama adalah 11,76%. Capaian kinerja ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 35,29% atau 5 dari 17 Kabupaten/Kota ditargetkan mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya 24 indikator yang terdapat dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kabupaten/Kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya dari segala bentuk tindakan kekerasan dan perlakuan salah lainnya merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan adn anak, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematik yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berdasarkan data SIMFONI PPA (Simfoni Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diperoleh dari hasil penginputan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) provinsi dan kabupaten/kota se Sultra, tahun 2018 tercatat ada 93 kasus kekerasan terhadap perempuan/KtP dan 147 kasus kekerasan terhadap anak/KtA (121 kasus terhadap anak perempuan dan 26 kasus terhadap anak laki-laki), dimana 130 kasus adalah KDRT/RP (ranah personal), 5 kasus terjadi di tempat kerja dan 105 kasus terjadi diranah lainnya (fasilitas umum, ruko, sekolah, hotel/wisma, kebun, rumah saudara).

Sedangkan untuk tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan/KtP di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 58% dibandingkan tahun 2018 yaitu 54 kasus, dan kekerasan terhadap anak/KtA mengalami penurunan sebesar 57% dibandingkan tahun 2018 yaitu 85 kasus, dimana 81kasus adalah KDRT, 2 kasus terjadi ditempat kerja dan 57 kasus terjadi diranah lainnya (fasilitas umum, ruko, sekolah, hotel/wisma, kebun, rumah saudara). Tahun 2020 s/d 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan, dimana tahun 2020 sebanyak 240 kasus, 2021 sebanyak 235 kasus dan 2022 sebanyak 330 kasus. Namun belum semua lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota mengirimkan data terkait KtP dan KtA, sehingga perlu dilakukan advokasi dan koordinasi pada lembaga-lembaga tersebut. Dari sejumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2018 s/d 2022, terdapat 5 jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi.

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi ini akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran. Peningkatan CPR didukung oleh partisipasi peserta KB aktif. Program KB sangat penting dilaksanakan dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. Peningkatan CPR merupakan strategi terwujudnya keluarga berkualitas dan sebagai penanda keberhasilan program KB di Indonesia. Capaian CPR Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 3,45% selama kurun waktu 2019 – 2020 dari 51,2% pada tahun 2019 menjadi 54,56% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 namun capaian CPR Sulawesi Tenggara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 - 2022.

c. Urusan Pangan

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota dengan total penduduk sebanyak **2.701.661 jiwa** pada Tahun 2022. Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada sektor pertanian sebesar 24,08 persen. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dampak pertumbuhan ekonomi global yang melambat, maka

ketahanan pangan dan gizi terus menjadi perhatian utama. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2017, perkembangan konsumsi kalori dan protein di Sulawesi Tenggara sebesar 2.320 kkal per kapita per hari meningkat menjadi 2.359 kkal per kapita per hari di tahun 2017.

Ketahanan Pangan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dengan lokus wilayah kecamatan yang ada di kabupaten/kota. Status ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 merupakan hasil pemutakhiran dari peta FSVA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan peta FSVA menggunakan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan memperhatikan ketersediaan data dan informasi pendukung lainnya dari lintas sektor terkait.

Metode yang digunakan untuk mengurutkan dan mengelompokkan wilayah kecamatan ke dalam prioritas status ketahanan pangan yaitu metode analisis komposit dengan menggunakan pembobotan mengadopsi metode penyusunan **Global Food Security Index (GFSI)**. Penggunaan pendekatan pembobotan ini dapat ditingkatkan obyektifitas hasil dari analisis komposit. Bobot masing-masing indikator individu diperoleh melalui sisten **judegment**yang ditetapkan oleh para ahli. Analisis komposit menghasilkan skor komposit dari masing-masing kecamatan, yang selanjutnya dikelompokkan kedalam salah satu dari 6 kelompok prioritas.

Kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kecamatan yang berada pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi **sangat rentan** (Prioritas 1), **rentan** (Prioritas 2), **agak rentan** (Prioritas 3). Kecamatan pada 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi **Agak tahan** (Prioritas 4), **tahan** (Prioritas 5), dan **sangat tahan** (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk memvisualisasikan klasifikasi tersebut, kecamatan dipetakan dengan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah digunakan untuk memetakan kelompok Prioritas 1, 2, dan 3, serta gradasi warna hijau digunakan untuk kelompok Prioritas 4, 5, dan 6.

Penyusunan peta FSVA tahun 2022 untuk 203 kecamatan di 15 Kabupaten dan 19 kecamatan di 2 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota.

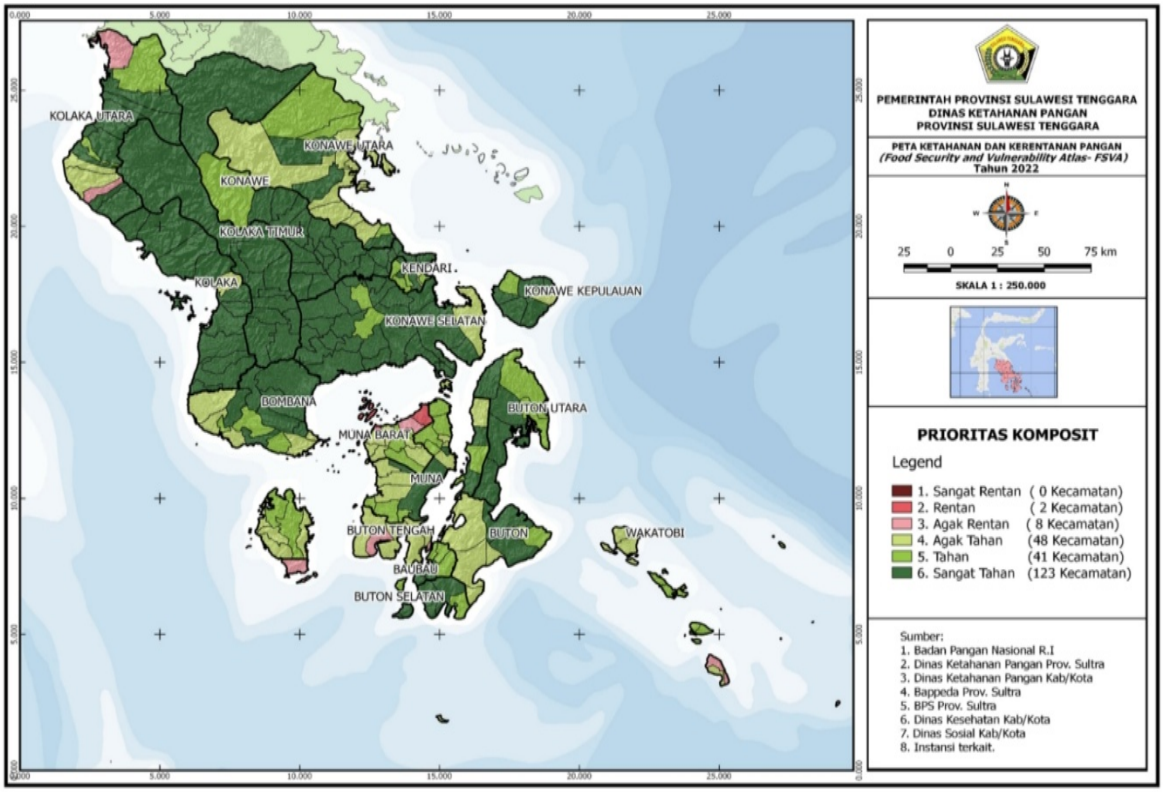

Gambar 2.13. Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 (Food Security and Vulnerability Atlat) Prioritas Komposit

Kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi sedangkan kabupaten yang masuk dalam Prioritas 6 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih tahan pangan.

Berdasarkan hasil analasis komposit ketahanan pangan 222 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam kategori Prioritas 1-3 yaitu sebanyak 10 kecamatan (4,5%),untuk kategori kecamatan yang masuk Prioritas-1 tidak ada. Adapun kecamatan yang masuk Prioritas 2 sebanyak 2 kecamatan yaitu di Kabupaten Muna Barat. Kabupaten yang masuk Prioritas-3 sebanyak 8 kecamatan (Kabupaten Bombana 1 kecamatan, Wakatobi 1 kecamatan, Kolaka Utara 2, Muna Barat 1 kecamatan dan Buton Tengah 3 kecamatan. Kecamatan yang masuk kategori Prioritas 4-6 dengan rincian sebagai berikut: 48 kecamatan (21,63%) prioritas-4 (agak tahan), 41 kecamatan (18,47%) prioritas-5 (tahan), dan 123 kecamatan (55,41%) prioritas-6 (sangat tahan).

Di seluruh kecamatan, faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 3 adalah : 1) Tingginya rasio konsumsi normatif terhadap konsumsi serealia, 2) tingginya angka kesakitan, 3) tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih, 4) tingginya prevalensi stunting, 5) tingginya rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 Tahun. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kecamatan yang masuk dalam perioritas 3 itu dianggap rentan terhadap kerawanan pangan, demikian juga pada prioritas 4, 5, dan 6 tidak semua

kecamatan dalam wilayah tersebut aman terhadap kerawanan pangan berdasarkan per indikator.

Dalam 2 tahun terakhir periode 2021 - 2022, ketersediaan pangan yang mengalami penurunan rata-rata pertahun, terutama padi. Sedangkan komoditi lainnya cenderung masih stabil seperti jagung, ubi kayu, ubi Jalar, kedelai, telur, daging ayam, dan daging sapi. Ketersedian dan Kebutuhan Komoditi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64 Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2021 – 2022

No.	Komoditas	2021			2022		
		Ketersediaan Untuk di Konsumsi (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)	Ketersediaan Untuk di Konsumsi (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)
1.	Padi	304.079,23	247.806,75	56.272,48	280,190.24	255,746.91	24,443.33
2.	Jagung	79.051,11	13.295,78	65.755,33	79,051.11	13,721.80	65,329.31
3.	Ubi Kayu	104.643,47	19.465,02	85.178,45	104,643.47	20,088.72	84,554.75
4.	Ubi Jalar	14.680,16	4.414,20	10.265,96	14,680.16	4,555.64	10,124.52
5.	Kedelai	536,25	12.019,39	(11.483,14)	536.25	12,404.51	- 11,868.26
6.	Telur	9.314,30	15.263,56	(5.949,26)	9,314.30	15,752.63	- 6,438.33
7.	Daging Ayam	9.315,36	8.083,83	1.231,53	9,315.36	8,342.85	972.51
8.	Daging Sapi	2.647,28	452,06	2.195,22	2,647.28	466.54	2,180.74

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Adapun data capaian dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.65 Capaian dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3	95,3	92,4	80,2	79	97,5	86,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Pola Pangan Harapan Adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung skor PPH adalah menghitung sub total kandungan energi dari 9 kelompok pangan, menghitung total energi actual seluruh kelompok pangan dan menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. Sembialn kelompok pangan disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.66. Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2018

No.	Kelompok Pangan	Standar WNPG				Sulawesi Tenggara			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
1	Padi-Padian	289	1050	50,0	25,0	330,4	1336	63,6	25,0

No.	Kelompok Pangan	Standar WNPG				Sulawesi Tenggara			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
2	Umbi-Umbian	105	126	6,0	2,5	42,5	77	3,7	1,8
3	Pangan hewani	157	252	12,0	24,0	144,1	296	9,3	18,7
4	Minyak + Lemak	21	210	10,0	5,0	20	180	8,6	4,3
5	Biji/Buah Berminyak	11	63	3,0	1,0	3,7	20	1,0	0,5
6	Kacang-Kacangan	37	105	5,0	10,0	13	32	1,5	3,0
7	Gula	31	105	5,0	2,5	19,6	72	3,4	1,7
8	Sayur+Buah	262	126	6,0	30,0	220,5	101	4,8	24,0
9	Lain-Lain	-	63	3,0	0,0	58,5	32	1,5	-
	Total		**2100**	**100,0**			**2146**	**97,4**	
	Sok PPH	**100,0**				**79,0**			

Sumber Data : Susenas Tahun 2023

Dalam pencapaian target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. **Faktor Pendukung** pencapaian target Skor PHH adalah: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan seimbang; (3) Kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik; dan (4) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga. Sedangkan **Faktor Penghambat** pencapaian target Skor PHH antara lain: (1) Kurangnya Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan local yang tersedia terkalahkan oleh pangan introduksi dari luar; (3) Pemanfaatan pangan local belum optimal dan (4) Mesih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk.

Merujuk pada faktor pendukung dan penghambat tersebut diatas, maka dirumuskan langkah-langkah **alternatif solusi** sebagai berikut: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar membiasakan mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga.

d. Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.67. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Tidak ada	Ada	ada	Ada
2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Tidak ada	ada	ada	Ada
5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	ada	ada	ada
6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	54	53,1	50,55	53,26
7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	91,1	91,22	90,01	90,89
8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,14	69,14	74,67	74,34
9.	Laporan Inventarisasi GRK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	0	0	0	0
12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	18,5	20	15
14.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	1	0	0	0
15.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100
16.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada
17.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.68. Capaian dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**71.19**	**70.95**	**72.04**	**74.97**	**76.88**	**74.05***	**77.00****
1.	Indeks Kualitas Air	54.00	53.10	50.55	53.26	56.21	53.35*	56.32**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Indeks Kualitas Udara	91.10	91.22	90.01	90.89	92.05	89.13*	92.12**
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.14	69.14	74.67	74.34	74.33	77.14	74.64**
4.	Indeks Kualitas Air Laut***	-	-	-	81.60	85.70	75.81*	85.84**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Keterangan :

** = Target kinerja Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan DLH Sultra Tahun 2018-2023, lebih rendah dari capaian Tahun 2022 disebabkan capaian Tahun 2022 melampaui target.*

*** = Target kinerja berdasarkan Renstra DLH Sultra Tahun 2024-2026*

**** = Indeks kualitas air laut (IKAL) berlaku mulai Tahun 2021*

IKLH digunakan untuk menilai kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH ditentukan dari empat komponen indikator kinerja kunci, yaitu : indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), dan mulai tahun 2021 melalui Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditambah dengan indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, yaitu sebesar 70,95 pada tahun 2019; 72,04 pada tahun 2020; 74,97 pada tahun 2021; dan 76,88 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH dari tahun 2018 sebesar 71.19 menjadi 70.95 pada tahun 2019, namun nilai IKLH tersebut tetap berada pada level cukup. Capaian nilai IKLH tersebut juga lebih tinggi dari nilai IKLH nasional yaitu 66,55 pada tahun 2019; 70,27 pada tahun 2020; 71,41 pada tahun 2021; dan 72,42 pada tahun 2022. Untuk IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 seluruhnya berada dalam level **cukup** karena berada pada kisaran nilai 66 ≤ x ≤ 76, dan untuk tahun 2022 pada level **baik**.

Faktor pendukung utama pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara dari level cukup pada tahun 2018 sampai 2021 menjadi baik pada tahun 2022 adalah adanya kebijakan pembangunan daerah serta dukungan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan terutama pada sektor-sektor pengelolaan sumberdaya alam. Selain faktor pendukung tersebut, juga terdapat faktor penghambat terutama minimnya prasarana dan sarana dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks kualitas air (IKA) memberi pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian IKLH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data capaian tahun 2018-2022 masih berada pada level rendah (50.55 – 56.21), yang menunjukkan adanya pencemaran air terutama air sungai. Isu pencemaran air sudah menjadi fenomena yang terjadi di Sulawesi Tenggara, seiring dengan aktifitas pembangunan yang bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam terus meningkat. Indikasi lainnya adalah ditemukannya parameter kualitas air di beberapa sungai yang telah melewati baku mutu air (BMA) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, diantaranya pH, residu tersuspensi (TSS), biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), oksigen terlarut (DO), Nitrit (NO3), Besi (Fe) dan Clorida (Cl), bakteri coli form, dan Coli Tinja).

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (2018), terdapat beberapa sungai yang sudah mengalami pencemaran seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Parameter yang melebihi baku mutu
1.	Sungai Sabilambo	Cemar berat	BOD, Fosfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga, Timbal
2.	Sungai Wanggu	Cemar ringan-berat	Posfat, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembagadan Timbal
3.	Sungai Konaweha	Cemar ringan-berat	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
4.	Sungai Poleang	Cemar ringan-sedang	Posfat,Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga, Timbal
5.	Sungai Roraya	Cemar ringan-sedang	BOD,Posfat,Nitrit, Sulfida,Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembagadan Timbal
6.	Sungai Lasolo-Lalindu	Cemar ringan-sedang	BOD, Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
7.	Sungai Toari	Cemar ringan-sedang	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
8.	Sungai Kaongkeongkea	Cemar ringan-sedang	Posfat, Sulfida, Klorin seng, Minyakdan lemak, Tembaga dan Timbal

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Selain kegiatan pembangunan, pencemaran air juga disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang baik. Di beberapa daerah seperti Wakatobi, Buton Tengah dan Kabupaten Muna, sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang menonjol. Permasalahan lingkungan terkait sampah saat ini adalah belum tersedianya skema pengelolaan sampah rumah tangga. Di wilayah pesisir dan sekitar daerah aliran sungai (DAS) menjadi area sensitif sebagai penampung sampah utamanya dari sampah rumah tangga.

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.

Urusan Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 merupakan OPD yang wajib ada di Daerah, oleh karena itu tahun

2017 Urusan kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditangani oleh OPD Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.70 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Cakupan Pelayanan							
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk		73,09	93	-	-		-
2	Rasio bayi beraktekelahiran		87,33	79,64	-	-		-
3	Rasio pasangan berakte nikah		13,89	33,67	-	-		-
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	-	-		-
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	-	-		-
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		84,11	93	-	-		-
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		87,33	73	-	-		-
	Penyajian Data Kependudukan							
1	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	-	-	-	100	100	90	95
2	Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-	13,16	60	31	42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Walaupun OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara baru terbentuk tahun 2017, namun kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik dengan persentase kinerja dari tahun 2018 - 2022 yang selalu meningkat.

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan.

Semangat otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan

terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya.

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencana dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71 Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	PUS	Peserta KB
1.	Buton	15.933	8.975
2.	Muna	24.099	11.093
3.	Konawe	38.040	23.631
4.	Kolaka	32.990	17.752
5.	Konawe Selatan	48.410	30.243
6.	Bombana	24.172	16.671
7.	Wakatobi	15.382	6.606
8.	Kolaka Utara	19.139	11.086
9.	Buton Utara	10.119	4.548
10.	Konawe Utara	9.983	11.449
11.	Kolaka Timur	17.968	3.447
12.	Konawe Kepulauan	5.822	5.207
13.	Muna Barat	11.061	3.944
14.	Buton Tengah	13.156	5.979
15.	Buton Selatan	11.973	5.979
16.	Kota Kendari	38.601	17.648
17.	Kota Baubau	20.228	11.120
Sulawesi Tenggara		**357.076**	193.734

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2023

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,18	2,10	Belum ada data
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,88	2,89	2,92
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	15,3	16,8	21,4
4.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		23,29	24,17
5.	Jumlah akseptor KB	332,621	338.525	343,318
6.	Jumlah Tenaga Medis Pengelola Program KB :	-	-	-
7.	- Dokter	331	321	309
	- Bidan	1980	2025	1979
	- PPLKB	177	136	219
	- Penyuluh KB	309	304	297

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
8.	Persentase Keluarga Sejahterah	2,18	2,10	Belum ada data

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

h. Urusan Perhubungan

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Tidak hanya pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana saja namun peningkatan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal. Berikut ini ketersediaan sarana angkutan udara dan laut dan pemanfaatannya dalam mobilitas penumpang dan distribusi barang lintas daerah.

Tabel 2.73 Arus Lalu Lintas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021

No.	Bidang Urusan/Indikator	Jumlah Penumpang Melalui Moda Angkutan Transportasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Arus Lalu Lintas Penumpang Melalui Angkutan Udara (Orang)	1,904,380	2,054,807	1,608,895	866.435	838.552
2	Arus Lalu Lintas Penumpang Melalui Angkutan Laut (Orang)	3,714,299	4,636,364	6,930,920	3.260.797	3.525.040

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Data di atas menunjukkan lalu lintas pesawat udara dan penumpang dari lima bandara di Sulawesi Tenggara memperlihatkan jumlah yang beragam dari tahun ke tahun. Pada lima bandara tersebut sejak tahun 2015 hingga 2019 jumlah lalu lintas pesawat udara terus meningkat demikian halnya jumlah penumpang datang dan berangkat, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana bandara semakin baik. Penurunan terjadi pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 terkait adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang kemudian berdampak pada berkurangnya arus penumpang. Demikian halnya dengan bandara lainnya yang terus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjadi garansi bagi pihak maskapai dan penumpang untuk memanfaatkan bandara tersebut untuk kebutuhan mobilitas penumpang dan distribusi barang. Sementara itu, distribusi barang bongkar maupun muat akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya lalu lintas pesawat udara yang mereduksi rentan waktu pendistribusian. Namun demikian, distribusi barang masih didominasi melalui angkutan darat dan laut karena selain kapasitas angkut yang lebih besar juga besaran biaya distribusi yang lebih minim. Terminal Penumpang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 ada 2 terminal penumpang, yaitu Terminal Penumpang Tipe A yang berlokasi di Kota Kendari, dan Terminal Penumpang Tipe B yang masih dalam proses perencanaan pembangunan dengan lokasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu di

Kabupaten Konawe, Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe utara, Kolaka Timur, Buton Utara dan Kota Baubau. Selain itu direncanakan juga akan dibangun Terminal Barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya dekat pergudangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyebarangan yaitu direncanakan di Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton dan Buton Utara.

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi yang akurat dan benar, dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik kecuali selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Perkembangan media komunikasi dan informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat namun, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Cakupan layanan komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, serta Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet sudah cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kemudahan masyarakat dalam akses untuk memiliki telepon seluler didukung dengan adanya operator *provider* yang menyediakan tower jaringan keseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga layanan Komunikasi dan akses internet sangat mudah didapatkan sampai kepelosok desa walaupun jaringan yang tersedia kecepatannya masih rendah karena hanya menggunakan jaringan radio dan pita kecil, sehingga ada beberapa kabupaten yang masih sulit jaringan telekomunikasinya.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan Koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 jumlah koperasi meningkat ditahun 2021, diikuti oleh jumlah koperasi aktif yang juga mengalami peningkatan dari 2.908 unit koperasi menurun sebesar 2.280 unit di tahun 2021, akibat dari pada pandemic Covid 19 yang berimbas pada sector perekonomian.

Tabel 2.74. Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1.	Kendari	468	466	465	201
2.	Baubau	272	124	140	150
3.	Konawe	279	287	297	177
4.	Konawe Utara	168	136	137	226
5.	Konawe Selatan	187	122	141	155
6.	Konawe Kepulauan	28	2	5	19
7.	Kolaka	377	301	244	134
8.	Kolaka Utara	137	136	137	143
9.	Kolaka Timur	138	32	15	16
10.	Buton	130	98	157	162
11.	Buton Utara	181	45	60	44
12.	Buton Selatan	88	86	38	38
13.	Buton Tengah	75	20	20	20
14.	Muna	264	272	298	261
15.	Muna Barat	103	113	118	89
16.	Wakatobi	164	175	191	66
17.	Bombana	203	123	63	40

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
18.	Provinsi	159	171	290	339
	Jumlah	**3.421**	**2.709**	**2.816**	**2280**

Sumber : Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi sejak Tahun 2018 - 2020 untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75 Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Persentase Koperasi Aktif (persen)	69,39	69,54	68,73
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,65	96,65	96,84

Sumber : Dinas Koperasi dan KUKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas persentase Koperasi aktif setiap tahunnya makin menurun, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan koperasi tidak sebesar jumlah koperasi yang aktif.

k. Urusan Penanaman Modal

Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alam, tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan melalui berkembangnya modal investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018– 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	172 perusahaan	275 Perusahaan	253 Perusahaan	349 Perusahaan	474 Perusahaan	480 Perusahaan	480 perusahaan
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 15,50 Triliun	Rp. 18,64 Triliun	Rp. 21,73 Triliun	Rp. 27,93 triliun	Rp. 20,19 triliun	Rp. 21,73 Triliun	Rp. 21,73 Triliun
3	Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN (%)	Naik 27,13%	Naik 16,77 %	Naik 13,36 %	Naik 32,18 %	Naik 100,69 %	Naik 7,62%	Tetap
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Lama maksimal waktu pelayanan	7 hari	7 hari	5 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B	B	A (-)	A (-)	A (-)	A (-)	A (-)

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja DPMPTSP Provisni Sulawesi Tenggara Tahun 2022 antara lain:

1. **Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya**

   Disadari DPMPTSP Prov. Sultra merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumberdaya terbatas, baik sumber daya dana, manusia, maupun sarana dan prasana, namun DPMPTSP Prov. Sultra mampu menunjukkan capaian kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

2 . **Kondusifnya Iklim Investasi di Sulawesi Tenggara**

   Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.

3. **Dukungan Pendanaan dari BKPM RI**

   Langkah BKPM RI yang tetap memberikan dukungan dana dekonsentrasi ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan perusahaan PMA.

4. **Ketersediaan Aplikasi Perizinan Berbasis Online**

   Apilkasi Perizinan berbasi online sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Prov. Sultra paling lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dirampungkan hanya dalam hitungan jam.

5. **Strategi dan Promosi**

   Strategi promosi yang sinergis dengan pemerintah pusat melalui pameran serta one on one meeting mampu menarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Sulawesi Tenggara.

Selain faktor-faktor tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMPTSP juga menghadapi berbagai tantangan antara lain: (1) Kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih perlu ditingkatkan; (2) Saat mengadakan kunjungan lapangan sulit bertemu dengan penanggung jawab proyek dilapangan sehingga sulit mendapatkan informasi mendalam; (3) Kontak person perusahaan tidak aktif; (4) Jarak tempuh dan medan lokasi proyek sulit dijangkau; (5) Tidak ada perwakilan/kantor dilokasi proyek; dan (6) Adanya alamat palsu, atau alamat yang tertera pada izin proyek tidak sesuai dengan kondisi faktual.

I. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.77. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
A	**Kepemudaan**				
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	120	120	120	120
2.	Persentase Wirausaha Muda	50	50	50	0
B	**Keolahragaan**				
1.	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100
2.	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	7	6	9	23
3.	Jumlah atlit muda/pelajar yang dibina	46	46	46	46

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Jumlah atlet yang berprestasi maupun prestasi olahraga yang diraih Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya makin menurun, hal ini disebabkan karena sarana prasarana olahraga yang kurang memadai, dan juga kurangnya jumlah pelatih yang bersertifikat.

m. Urusan Statistik

Urusan statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara selain ditangani oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk pada tahun 2016. Namun dalam penyelenggaraan urusan statistik Dinas Kominfo belum menjalankan sepenuhnya sehingga kinerja penyelenggaraan urusan statistik belum optimal dan masih didominasi oleh BPS sebagai . Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menyajikan data melalui media elektronik maupun media cetak. Untuk media elektronik BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, sedangkan media cetak BPS menyajikan dalam bentuk produk Buku Sulawesi Tenggara dalam angka dan Buku PDRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian Kinerja Urusan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.78 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Target Kinerja		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun 2018-2020								
1	Data Statistik yang *Up to Date* dan Mudah Diakses	0%	55%	65%	-	-	-	-
Tahun 2021-2023								
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral pemerintah Provinsi SulawesiTenggara	-	-	-	140,64 %	109%	10 9%	-
Tahun 2024-2026								

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektoral	-	-	-	-	-	-	Cukup (1,8 - 2,6)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyelenggaraan Pemerintah **Urusan Statistik** pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Pada Tahun 2021-2023 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dalam menyiapkan ketersedian data-data sektoral OPD sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Pada Tahun 2024-2026 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2024-2026 tujuan diarahkan untuk Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

n. Urusan Persandian

Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang terbuka. Masih rendahnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, hal ini disebabkan karena Organisasi Pemerintah yang menangani urusan Persandian yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru dibentuk tahun 2017, begitu pula Peraturan yang menjadi payung Hukum urusan Persandian yaitu Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/kota juga baru dikeluarkan pada tahun 2017.

Tabel 2.79 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun 2018-2020								
1	Meningkatnya peran Persandian Dalam Pengamanan Informasi	40%	60%	85%	-	-	-	-
Tahun 2021-2023								
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan	-	-	-	70%	110%	110%	-

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	informasi Pemerintah							
Tahun 2024-2026								
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	-	-	-	-	Tinggi (16-34) dan Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (273 - 455)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyelenggaraan Pemerintah **Urusan Persandian** pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum namun tetap mengutamakan keamanan Sistem Informasi Program Pemerintah. Pada Tahun 2021-2023 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dengan mengutamakan pengaman informasi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Tahun 2024-2026 tujuan diarahkan untuk mewujudkan Transparansi Infomasi Publik dan Mutu Sektoral dengan Keamanan Informasi melalui Pemanfaaatan TIK dengan tetap mengutamakan peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah.

o. Urusan Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya. Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian dan perfilman di daerah;

b. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah; dan

c. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang sejarah dan nilai budaya di daerah.

p. Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara

garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Di bidang perpustakaan selama tahun 2017 hingga 2021 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian per Tahun					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	14.115	22.514	12.681	9.472	19.708	25.000	30.000
2	Koleksi Buku yang tersedia	77.176	77.176	77.176	77.176	238.153	350.000	400.000
3	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.500	13.000
4	Jumlah rata-rata engunjung Perpustakaan/Tahun	12.000	18.314	16.436	14.695	15.698	18.000	23.000
5	Jumlah Koleksi Judul Buku	73.197	0	250	250	73.197	100.000	110.000
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	12	28	40	40	41	50	60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.81 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian per Tahun					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	2,40%	2,70%	2,90%	3,15%	3,15%	100,00%	100,00%
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. **Faktor Pendukung :**

   a. Ketersediaan Koleksi Buku yang menarik dan lengkap;

      Kelengkapan koleksi buku dan e-book adalah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan oleh pihak perpustakaan. Selain buku yang lengkap, buku-buku yang menarik juga harus dipastikan tersedia di perpustakaan. Mulai dari buku untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dengan demikian semua orang bisa membaca buku sesuai minat dan usia

   b. Ketersediaan tempat Membaca

Kenyamanan pembaca adalah salah satu hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan oleh petugas perpustakaan. Kita tentu tahu bahwa semakin nyaman seseorang maka akan semakin betah pula orang tersebut. Maka dari itu dibuat desain interior perpustakaan modern semenarik mungkin sehingga memungkinkan para pengunjung merasa nyaman membaca buku di perpustakaan.

c. Ketersediaan Fasilitas Kantin

Bagi orang-orang yang suka membaca tidak jarang merasa betah untuk menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku. Akan tetapi dalam satu waktu tertentu terkadang mereka justru terganggu dengan rasa lapar ditengah kegiatan membaca tersebut. Maka dari itu untuk membuat pembaca merasa tetap nyaman fasilitas kantin.

d. Ketersediaan Fasilitas WIFI

Salah satu inovasi yang diyakini efektif untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan adalah adanya layanan wifi gratis. Akan tetapi dalam penyediaan fasilitas yang satu, petugas perpustakaan harus tegas dan menerapkan peraturan bahwa wifi tidak boleh digunakan untuk kepentingan bermain game, menonton film, atau kegiatan tidak penting lainnya

e. Penggunaan Aplikasi Srikandi

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

2. **Faktor Penghambat**

a. Keterbatasan dukungan Anggaran operasional

b. Masih Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khusunya di pedesaan dalam pembinaan minat dan budaya baca masyarakat

c. Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan/Pustawakan

d. Jumlah Bahan perpustakaan belum memenuhi standar Nasional

e. Sarana dan prasarana penyimpanan fisik arsip dan pemeliharaan arsip masih kurang. Sarana penyimpanan arsip digital/arsip hasil alih media juga masih terbatas di hardisk eksternal /belum mempunyai server khusus.

f. Masih kurangnya jumlah Kearsipan/Arsiparis

g. Masih terbatasnya data dan informasi perpustakaan dan kearsipan dari kabupaten/kota sebagai bahan dalam penyusunan rencana kinerja di tingkat provinsi.

2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 139,06 triliun pada tahun 2021.

Tabel 2.82 Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11,32	11,25	11,6	11,6	11,6*	11,7	11,7
2	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	871,57	707,41	636,868	660,877	670,03	670	670
3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	-	-	70	85	87	90	93
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	65,14	71,13	70,51	70,95	72,32	72	72
5	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	131	131	135	135	153	155
6	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	259,64	254,03	255,178	254,553	259,64	260	260
7	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
8	Nilai Tukar Nelayan	123,46	117,02	97,45	102,65	102,46	105	105

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi penurunan pada tahun 2019 dan menurun lebih dalam pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan pada menurunnya kontribusi sub

sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor penyebab penurunan ini adalah adanya wabah covid 19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisirkan dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terus melaksanakan kebijakan pokok pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap serta membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2022. Dampak lebih lanjut tentunya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 102,46 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,45.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir triwulan III tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 56,48 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,37 (angka sementara).

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

a. Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;

b. Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,

c. Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. umlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2022, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan. Sementara ada 12 kelompok baru yang dikukuhkan sebagai Pokmaswas Binaan DKP Prov. Sultra.

b. Urusan Pariwisata

Perkembangan Kepariwisataan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Capaian kinerja Pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.83. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Destinasi Wisata yang	2						

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja 2023	2024
	dikembangkan (lokasi)							
2	Persentase Tingkat Hunian Hotel (persen)	40,52						
3	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	2.481.632	8.720.256	1.927.142	2.539.976	4.832.290	1.232.915	
4	Rata-rata Lama tinggal Wisatawan (hari)	2,90	3,57	3,48	7,47	7,54	1,70	
5	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)	1.030.411.500	1.118.285.000	402.973.900	621.330.000	1.122.401.000	1.102.500.000	
6	Rata – rata Belanja Wisatawan (Rupiah)							3.567.769
7	Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara (Persen)							1,99

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan perkembangan kinerja utama Dinas pariwisata setiap Periode:

1. IKU Tahun 2018 adalah Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan, Persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisata, dan Rata –rata lama tinggal wisatawan
2. IKU Tahun 2019-2023 adalah jumlah kunjungan wisata, dan Rata –rata lama tinggal wisatawan dan PAD SEktor Pariwisata
3. IKU Tahun 2024-2026 adalah Rata – rata Belanja Wisatawan dan Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara

Perkembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara Terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata serta sarana penunjang lainnya dalam melakukan perjalanan di destinasi wisata. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada periode 2018 sampai 2022 jumlah kunjungan wisata, rata-rata lama tinggala wisatawan dan rata-rata pengeluaran wisatawan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatwan dan jumlah PAD berangsur naik dan semakain memperlihatkan peningkatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan berakhitrnya masi pandemic dan beralih ke masa new normal.

Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan system teknologi Mobile Positioning Data (MPD) untuk menghitung jumlah kunjungan dan memantau pergerakan wisatawan nusantara metode MPD pada era digital saat ini dinilai vali, akurat dan real-time dalm pendistribusian data untuk menghitung pergerakan wisatawn di Indonesia. Rata-rata jumlah pengeluran wisatwan dalam menyumbang perekonimian sulawesi tenggara juga mengalami peningkatan sejak tahu 2019 walaupun sempat menurun tahun 2020 disebabkan adanya wabah Covid 19 yang diikiuti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.

Seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19, Pariwisata Sulawesi Tenggara kembali bangkit dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan untuk menyambut keadaan ini pemerintah gencar melakukan promosi dan even baik lokal, daerah maupun nasional serta program kepariwisataan lainnya untuk kembali menarik minat wisatwan berkunjung ke Sulawesi Tenggara.

c. Urusan Pertanian

a) Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya, tabel di bawah ini menampilkan Luas Lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 – 2021.

Tabel 2.84. Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021

No.	Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman			Tidak Ditanami Padi *)	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
		Tiga kali	Dua kali	Satu kali			
Tahun : 2020							
1	Irigasi	43,0	73.642,3	14.090,0	9.315,4	-	97.090,7
2	Tadah Hujan	6,0	3.780,8	10.973,3	7.140,0	-	21.900,1
3	Rawa Pasang Surut	0,0	639,0	813,0	1.696,5	-	3.148,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	-	1.871,0
	Jumlah	49	78253,1	25926,3	19781,9	-	124010,3
Tahun : 2021							
1	Irigasi	974,0	68.846,8	11.137,3	8.996,4	-	89.954,5
2	Tadah Hujan	15,2	9.851,6	11.605,2	5.437,3	-	26.909,3
3	Rawa Pasang Surut	0,0	617,0	2.017,0	1.797,5	-	4.431,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	-	1.871,0
	Jumlah	**989,2**	**79506,4**	**24809,5**	**17861,2**	**-**	**123166,3**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh padi dengan jumlah produksi pertanian sebesar 530.029 ton pada tahun 2021, kemudian ubi kayu dengan jumlah produksi 134.038 ton pada tahun 2021 dan jagung dengan produksi sebesar 144.538 ton pada tahun 2021. Pada tabel di bawah ini menunjukkan data luas tanaman, luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021.

Tabel 2.85. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)**							
	Padi	709.516	519.707	532.773	530.029	488.389	740.042	499.133
	Jagung	221.498	279.170	179.906	150.561	181.295	196.715	185.283
	Kedelai	9.853	1.540	629	574	9.681	6.876	9.894
	Kacang Tanah	2.054	3.221	3.046	3.104	2.332	2.996	2.383
	Kacang Hijau	510	449	804	296	307	650	314
	Ubi Kayu	210.387	144.752	167.769	137.657	149.336	216.582	152.621
	Ubi Jalar	20.291	17.682	17.707	15.469	15.269	22.396	15.605
2.	**Jumlah Populasi Ternak (Ekor)**							
	Sapi Potong	298.692	330.594	361.568	391.479	421.454	341.712	371.099
	Sapi Perah	47	37	51	46	60	42	55
	Kerbau	1.472	2.162	2.349	2.544	2.668	2.310	2.502
	Kambing	177.845	183.725	195.128	204.357	213.719	187.828	196.468
	Babi	89.600	90.524	98.108	108.606	117.216	92.843	102.313
	Kuda	721	712	644	667	724	760	787
	Ayam Buras	9.934.224	10.861.007	11.088.813	11.572.793	12.168.591	10.719.077	11.190.716
	Ayam Ras Petelur	437.634	463.163	455.719	473.916	505.923	456.022	473.807
	Ayam Ras Pedaging	4.504.344	4.453.326	4.477.630	5.122.986	5.444.745	4.588.885	5.249.684
	Itik	509.262	543.904	577.699	609.651	631.190	53.767	56.724
	Itik Manila	49.323	43.578	42.942	45.353	47.071	45.213	48.441
	Puyuh	10.368	6.319	9.266	3.724	4.090	8.618	9.419
3.	**Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)**							
	Produksi Daging							
	Sapi	6.474.830	4.437.749	3.720.990	4.521.025	4.525.615	5.769.413	7.009.837
	Kerbau	38.862	35.832	17.183	32.303	32.768	30.566	39.124

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Kambing	356.488	312.734	324.283	205.081	200.882	356.676	420.878
	Babi	801.125	895.349	624.514	556.432	585.216	783.461	879.043
	Kuda	8.100	15.600	9.684	16.800	17.250	9.368	9.954
	Ayam Buras	10.709.094	11.708.166	11.953.741	12.475.471	13.117.741	11.365.197	11.860.720
	Ayam Ras Petelur	320.611	339.314	333.873	352.453	376.254	337.923	357.185
	Ayam Ras Pedaging	4.085.215	4.038.944	5.092.956	5.826.722	6.192.976	4.222.067	4.830.045
	Itik	319.307	341.026	362.216	381.182	395.756	323.186	369.402
	Itik Manila	32.553	28.760	28.342	29.912	31.067	31.967	35.931
	Puyuh	2.281	1.391	2.039	819	900	218	233
	Produksi Telur							
	Ayam Buras	6.446.318	7.047.707	7.195.531	10.277.404	10.806.512	6.841.258	7.716.939
	Ayam Ras Petelur	3.295.388	3.487.618	5.724.897	6.135.121	6.549.471	3.473.342	3.722.728
	Itik	3.266.403	3.488.601	6.705.361	4.885.177	5.057.771	3.445.985	3.955.991
	Itik Manila	270.781	239.243	235.752	248.988	258.431	265.911	280.616
	Puyuh	18.007	10.975	16.094	6.468	7.104	17.207	18.842

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.86 Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2021

No.	Tahun	Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi *)		Jumlah
		Satu kali	Dua Kali	≥ Tiga kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak Ditanami apa pun	
1	2019	24.810,0	76.139,0	1.685,9	7.240,0	13.415,0	123.289,9
2.	2020	25.926,3	78.253,1	49,0	7.502,0	12.279,9	124.010,3
3.	2021	24.809,5	79.506,4	989,2	7.358,3	10.502,9	123.166,3

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tabel 2.87.Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Lp2b (Ha)	Lcp2b (Ha)	Kp2b (Ha)
1.	Buton	1.778	1.130	2.908
2.	Muna	1.785	3.298	5.083
3.	Konawe	41.406	18.826	60.232
4.	Kolaka	12.181	1.300	13.481

No.	Kabupaten/Kota	Lp2b (Ha)	Lcp2b (Ha)	Kp2b (Ha)
5.	Konawe Selatan	25.565	15.323	40.888
6.	Bombana	13.689	4.870	18.559
7.	Wakatobi	-	-	-
8.	Kolaka Utara	2.586	1.318	3.904
9.	Buton Utara	2.332	552	2.884
10.	Konawe Utara	4.277	3.487	7.764
11.	Kolaka Timur	15.101	6.513	21.614
12.	Konawe Kepulauan	3.756	4.240	7.996
13.	Muna Barat	4.005	4.638	8.643
14.	Buton Tengah	51	663	714
15.	Buton Selatan	-	-	-
16.	Kendari	1.319	1.797	3.116
17.	Baubau	1.375	664	2.039
Jumlah		**131.206**	**131.206**	**68.619**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2022

Ket: LP2B = Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LCP2B = Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KP2B = Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

b) Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 26,06 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 8,61 Triliun Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,20 persen. Pada tahun 2021 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan tumbuh positif 2,49 persen.

Sektor Hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 0,94 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,036 Triliun rupiah pada tahun 2021. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 0,94 persen. Pada tahun 2021 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor hortikultura meningkat 0,76 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.88. Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Kontribusi			
		2018	2019	2020	2021
	Perkebunan				
1.	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB (Juta Rupiah)	7.430,81 (Miliar Rupiah)	8.154,60 (Miliar Rupiah)	8.186,84 (Miliar Rupiah)	8.618,62 (Miliar Rupiah)
2.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHB (persen)	23,96	23,73	24,13	23,80
3.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap Subkategori	26,26	26,59	26,07	26,05

No.	Indikator	Kontribusi			
		2018	2019	2020	2021
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)				
4.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	6,29	6,31	6,29	6,20
5.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman perkebunan ADHK (persen)	8,72	7,06	-3,87	2,49
	Hortikultura				
6.	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB (Juta Rupiah)	1.119,18 (Miliar Rupiah)	1.241,04 (Miliar Rupiah)	1.264,12 (Miliar Rupiah)	1.306.,98 (Miliar Rupiah)
7.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)	3,96	4,05	4,02	3,95
8.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	0,95	0,96	0,97	0,94
9.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman hortikultura ADHK (persen)	5.50	5,91	-2,66	0,76

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Tabel 2.89. Capaian dan Target Kinerja Sektor Perkebunan dan Hortikultural Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura :							
1.	Kakao	134.585	115.023	114.919	114.828	106.667	130.180	104.754
2.	Jambu Mete	25.504	50.862	48.704	59.142	51.834	23.826	36.321
3.	Kelapa Dalam	41.899	37.572	46.860	40.281	39.192	39.678	41.540
4.	Cengkeh	5.315	13.420	14.291	14.420	9.853	12.911	9.410
5.	Lada	13.719	5.718	5.747	5.798	5.749	5.069	6.009
6.	Kopi	-	-	-	2.796	2.779	2.677	2.705

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
7.	Pala	-	-	-	806	769	422	633
8.	Bawang Merah	379	390	558	1.015	487	621	458
9.	Cabai Rawit	3.377	3.669	3.865	4.287	3.915	3.811	3.923
10.	Cabai Besar	1.230	1.408	1.815	2.411	2.540	1.706	2.545
11.	Jeruk	86.291	27.267	35.208	22.219	22.163	22.100	21.100
12.	Durian	-	-	-	12.885	23.752	11.092	23.983

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

c) Urusan Kehutanan

A. Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial

Indikator kinerja ini merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pola pengelolaan yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan. Pola Perhutanan sosial ini selain memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat yang secara langsung merupakan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat.

Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial ini dilaksanakan dalam program pendidikan dan pelatihan , penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan dengan indikator kinerja adalah luas fasilitasi izin perhutanan sosial (10.000 Hektar/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 seluas 91.608 Ha atau 183,22 % dari target seluas 50.000 Ha. yang terdiri dari HD seluas 31.476 Ha, HKm seluas 37.001 Ha, HTR seluas 3.575 Ha dan Kemitraan seluas 19.556 Ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2018 seluas 39.122 Ha atau 391,22 % dari target seluas 10.000 Ha, yang terdiri dari HD seluas 29.317 Hektar, HKm seluas 8.643 Ha, HTR seluas 1.067 Ha dan Kemitraan seluas 95 Ha. tahun 2019 seluas 25.747 Ha
2. Tahun 2019 seluas 25.747 Ha atau 257,47% dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HKm seluas 13.215 Ha, HTR seluas 273 Ha dan Kemitraan seluas 12.259 Ha
3. Tahun 2020 seluas 5.244 Ha atau 52,44 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 349 Ha, HKm seluas 4.860 Ha dan Kemitraan seluas 35 Ha
4. Tahun 2021 seluas 11.440 atau 114,40 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 1.810 Ha dan HKm seluas 9.630 Ha

5. Tahun 2022 seluas 10.055 Ha atau 100, 55 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HTR seluas 2.235 Ha, HKm seluas 653 Ha

Tingginya capaian kinerja ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengikuti program perhutanan sosial, adanya regulasi dan pembinaan serta pendampingan dari Dinas Kehutanan dan BPSKL wilayah Sulawesi.

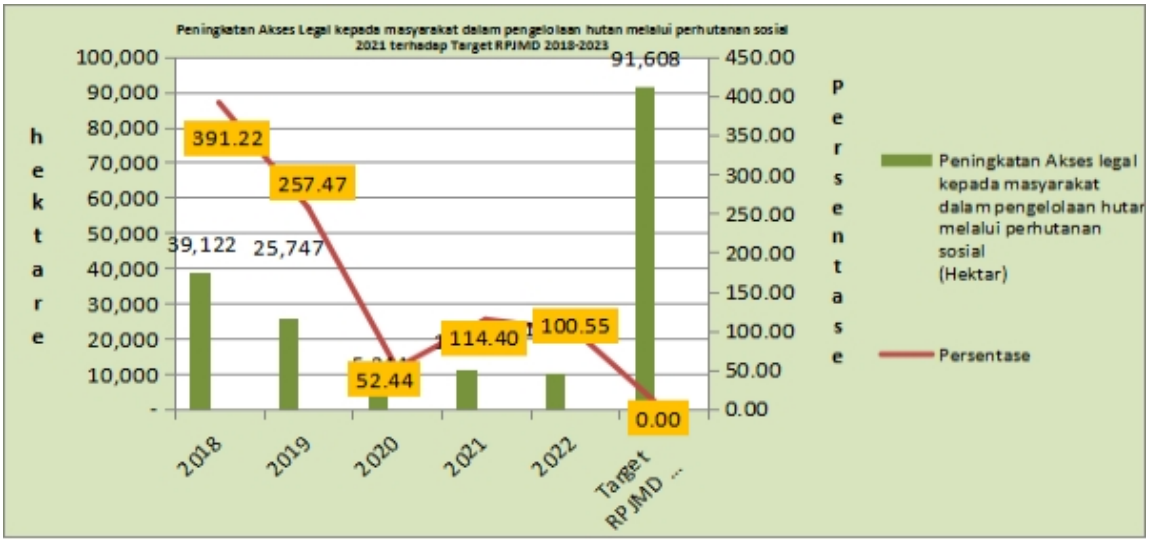

Gambar 2.14 Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial Tahun 2018-2022

Tabel 2.90. Target dan Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2022

Tahun	Izin Perhutanan Sosial (Hektar)		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	10.000	39.122	391,22
2019	10.000	25.747	257,47
2020	10.000	5.244	52,44
2021	10.000	11.440	114,40
2022	10.000	10.055	100,55
Jumlah	**50.000**	**91.608**	**183,22**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.91. Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2022 (menurut Jenis Izin)

Tahun	Luas Izin Perhutanan Sosial (Hektar)				
	HD	HKm	HTR	Kemitraan	Jumlah
2018	29.317	8.643	1.067	95	39.122
2019	0	13.215	273	12.259	25.747
2020	349	4.860	0	35	5.244
2021	1.810	9.630	0	0	11.440
2022		653	2.235	7.167	10.055
Jumlah	**31.476**	**37.001**	**3.575**	**19.556**	**91.608**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

B. Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (deforestasi)

Indikator kinerja ini menargetkan agar laju deforestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi penurunan sekitar 1 % per tahun (maksimal). Guna Optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat di capai dengan menurunkan laju kerusakan hutan per tahun melalui upaya menurunkan luas lahan kritis, melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari kebakaran hutan dan lahan, pencurian atau illegal loging, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang illegal. Realisasi capaian sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.92 Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2018-2022

Tahun	Luas Kawasan Hutan (Hektar)	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Hektar)	Persentase (%)
2018	2.322.311,73	80.888,600	3,48
2019	2.322.311,73	2.893,107	0,12
2020	2.322.311,73	3.209,040	0,14
2021	2.322.311,73	1.852,250	0,08
2022	2.322.311,73	8.429,600	0,36

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun ini dilaksanakan dalam program pengelolaan Hutan dengan salah satu indikator kinerja adalah persentase penurunan luas kerusakan hutan (1%/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 rata-rata capaian 0,84 persen yang berarti laju deforestasi di provinsi sulawesi tenggara terjadi penurunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2018 seluas 80.888,660 Ha atau 3, 48 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan peningkatan laju deforestasi
2. Tahun 2019 seluas 2.893,107 Ha atau 0,12 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi
3. Tahun 2020 seluas 3.209,040 Ha atau 0,14 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi
4. Tahun 2021 seluas 1.852,250 Ha atau 0,08 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi
5. Tahun 2022 seluas 8.429,600 Ha atau 0,36 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi

Berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2019-2022 terjadi penurunan laju deforestasi yang berarti target capaian indikator kinerja rata-rata maksimal 1 % laju kerusakan hutan tercapai dengan realisasi kinerja rata-rata 0,84 %

C. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi

Indikator kinerja menunjukan luas lahan kritis yang direhabilitasi sampai dengan tahun 2022 mencapai 0,37 % atau 7.266 Hektar dari total luas lahan kritis 1.985.795 Hektar. Persentase Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi dilakasanakan dalam program Pengelolaan Hutan, Program Konsrvasi Sumber Daya Alam Hayat dan ekosistemnya dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.250 Hektar atau 100 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,30 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis.
2. Tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.333 Hektar atau 106,64 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,31 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis.
3. Tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 2.547 Hektar atau 203,76 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,61 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.
4. Tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 931 Hektar atau 74,48 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,22 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.
5. Tahun 2022 luas lahan kritis yang drehabilitasi adalah 1.205 Hektar atau 96,40 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,41 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.

Tabel 2.93. Persentase Luas lahan kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi		
	Luas Lahan Kritis	Realisasi	%
2018	423.375	1.250	0,30
2019	423.375	1.333	0,31
2020	420.764	2.547	0,61
2021	420.764	931	0,22
2022	297.517	1.205	0,41
Jumlah	**1.985.795**	**7.266**	**0,37**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.94. Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018- 2022

Tahun	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar)		
	Target	Realisasi	%
2018	1.250	1.250	100,00
2019	1.250	1.333	106,64
2020	1.250	2.547	203,76
2021	1.250	931	74,48
2022	1.250	1.205	96,40
Jumlah	**6.250**	**7.266**	**116,26**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

D. Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Luas Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2022 adalah 1.369.9117 Hektar dengan rasio 58,98 % dari total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 2.322.312 Hektar.Indikator capaian pertahun sebagai berikut :

1. Tahun 2018, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Tahun 2019, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Tahun 2020, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Tahun 2021, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Tahun 2022, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, luas kawasan lindung bertambah 4.704 hektar dari perubahan fungsi akan tetapi luas kawasan hutan berkurang 10.843 hektar. Perubahan ini tidak mempengaruhi secara signifikan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.

Tabel. 2.95 Rasio Luas Kawasan Lindung Tahun 2018-2022

Tahun	Kawasan Lindung (Hektar)			Total Luas Kawasan Hutan	Rasio (%)
	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Jumlah		
2018	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2019	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2020	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2021	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,98
2022	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,98

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.96 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 -2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				Target Kinerja		
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
	IKU 2018-2023							
1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (Ha)	39.122	25.747	5.244	11.440	10.055	10.000	-
2	Persentase Penurunan Kawasan Hutan (%)	3,48	0,12	0,14	0,08	0,36	1	-
3	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (Ha)	1.250	1.333	2.547	931	1.205	1.000	-
4	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan Hutan (%)	58,48	58,48	58,48	58,98	8,98	58,48	-
	IKU 2024-2026							
1	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	2,75
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	-	-	-	-	-	-	74,32

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Bidang energi dan sumberdaya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukungperekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah.

1) Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.97. Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2017 - 2020

Uraian	Realisasi Capaian Per Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Penerimaan daerah dari sektor Pertambangan	256.996.000.56	581.855.707.509	1.038.711.685.941	1.529.449.502.612

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.98. Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2020

Tahun	Produksi (ton)			Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah)		
	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal
2013	29.431.004	15.535	583.830	5.398	2.563.275	175.148
2014	1.387.140	16.851	27.529	138.714	1.152	27.529
2015	932.539	17.350	18.150	709.290	41.550	6.676
2016	1.539.426	18.000	50.435	753.291	2.020.750	5.589
2017	9.043.232,94	112.490	17.039	4.059.613	3.073.548	15.960
2018	16.926.763	24.135	53.000	-	-	-
2019	22.576.054	119.900	25.846	-	-	-
2020	22.531.686	-	91.000	-	-	-

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2021

Sampai saat ini, izin pertambangan di Sulawesi Tenggara semakin diperketat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penambangan liar.

Tabel 2.99 Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Realisasi Capaian Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas areal penambangan liar yang ditertibkan	662,25	47,68	0	199,62	8,96
2.	Luas areal penambangan liar	511	108,48	33,91	25,04	36,311
3.	Pertambangan tanpa izin	129,60	43,95	0	797	25

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tahun 2017 - 2018, kewenangan perizinan mineral dan batubara masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada data penambangan liar. Data luas area penambangan liar diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap bukaan lahan usaha pertambangan tanpa izin, data luas penambangan liar yang ditertibkan diperoleh dari perhitungan luas lahan usaha pertambangan yang telah ditertibkan Izin Usaha Pertambangan.

2) Listrik

Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting perusahaan listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.100. Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Elektrifikasi (persen)	82,1	78,11	91,47	94,94	95,96	94
Daya Terpasang	243,520	257,690	-	91,70	91,70	-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Pertumbuhan permukiman, industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting Perusahaan Listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.101. Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020 - 2021

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan		Tenaga Listrik yang terjual		Nilai Penjualan	
	2020	2021	2020	2020	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Industri	358	390	42.757.076	358	390	42.757.076
Bisnis	21.296	22.301	154.633.658	21.296	22.301	154.633.658
Penerangan jalan	-	-	-	-	-	-
Jawatan	3.901	4.363	45.588.009	3.901	4.363	45.588.009
Rumah tangga	393.355	423.735	518.712.576	393.355	423.735	518.712.576
Sosial	8.837	9.500	30.722.402	8.837	9.500	30.722.402
Lainnya	86	106	1.945.046	86	106	1.945.046
Jumlah	**427.833**	**460.395**	**794.358.766**	**427.833**	**460.395**	**794.358.766**

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

3) Energi Baru Terbarukan

Bauran energi primer Sulawesi Tenggara Tahun 2015 didominasi oleh minyak bumi atau sekitar 88,5 persen. Selanjutnya adalah batubara dengan pangsa sekitar 6,7 persen serta gas sebesar 4,0 persen. Selain itu, bauran energi lainnya berupa energi baru terbarukan menyumbang sebagian kecil keseluruhan bauran energi daerah atau sebesar 0,8 persen.

Energi fosil berupa cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia diperkirakan habis dalam 12 tahun mendatang, sehingga bauran energi primer Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh minyak bumi dikhawatirkan ketahanan dan keberlanjutannya.

Sulawesi Tenggara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi, surya, air, angin/bayu, biomassa dan lainnya. Potensi-potensi tersebut seharusnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengganti dominasi minyak bumi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Tabel 2.102 Bauran Energi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No.	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1.	Panas Bumi	MW	6.340*
2.	Mikro Hidro	MW	896
3.	Biomassa	MW	301
4.	Surya	MW	164
5.	Bayu	MW	3.917
6.	Minyak Bumi	MW	257
7.	Gas Bumi	MMSTB	0,1

Sumber : Rencana Umum Energi Nasional

Ket : Sulseltra*

e. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1) Perkembangan Sektor Industri Kecil

Perkembangan sektor industri kecil di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri tahun 2018 sebesar 13.213 perusahaan, cukup banyak dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 9.471

perusahaan dengan nilai investasi tahun 2018 sebesar 1,6 trilyun. Perkembangan Sektor Industri Kecil Tahun 2017-2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103 Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2017 - 2021

Kelompok / Jenis Industri	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Nilai (Rp.000)
Industri Kimia	2017	1.557	8.934	182.727.498	805.132.943
	2018	10	248	18.782.421	115.739.908
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Logam dan Mesin	2017	1.335	9.624	122.881.134	2.680.613.152
	2018	1	718	30.733.958	2.927.427.599
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Aneka	2017	-	-	-	-
	2018	1	122	520.000	547.560
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	2017	6.579	30.966	1,134.753.891	1.790.638.742
	2018	205	2.987	210.943.172	229.032.383
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Kecil :					
- IK Hasil Pertanian dan Kehutanan	2017	-	-	-	-
	2018	1.781	28.609	960.450.349	1.743.048.445
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
- IK Kimia	2017	-	-	-	-
	2018	1.568	9.886	176.097.754	736.172.659
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
- IK Logam dan Mesin	2017	-	-	-	-
	2018	3.186	8.837	102.009.662	224.218.467
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
- IK Aneka	2017	-	-	-	-
	2018	6.461	16.741	128.738.561	342.122.372
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Jumlah	2017	**9.471**	**49.524**	**1.440.362.523**	**5.276.384.837**
	2018	**13.213**	**68.148**	**1.628.275.878**	**6.318.309.393**
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

2) Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri

- **Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Nilai dan Volume**

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 volume dan nilai ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Komodiats tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2018 volume ekspor sebesar 9.246.103,59 ton dengan nilai 1.081.258,27 USD, mengalamipeningkatan cukup baik pada tahun 2019 sebesar 16.294.410,85 ton dengan nilai1.859.753,48 USD, namun pada tahun 2020Volume Ekspor turun dan Volume NIlai Naik hingga mencapai 1.625.514,52 ton dengan nilai 2.937.514,20 USD. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya volume ekspor dan impor. Tahun 2021 total ekspor volume dan nilai mengalami peningkatan dibanding 2020.Volume dan nilai ekspor Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104 Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2018 – 2021

Jenis Komoditas Ekspor	Volume (Ton)				Nilai (USD)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ekspor Langsung	**9.156.740,81**	**16.188.812,77**	**1.527.100,74**	**2.353.721,08**	**824.201,14**	**1.584.732,58**	**2.159.212,29**	**3.853.773,43**
Berbagai Produk Kimia (38)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Bakar Mineral (27)	51.657,19	29.334,50	116.902,10	50.002,00	2.168,59	1.259,14	4.221,38	1.500,06
Besi dan Baja (72)	395.028,30	724.796,64	1.410.159,94	2.303.691,42	552.224,01	1.072.095,16	2.154.799,21	3.853.221,81
Bijih, Kerak dan Abu Logam (26)	8.709.728,17	15.434.593,37	-	-	268.099,27	511.084,28	-	-
Ikan dan Udang (03)	135,00	-	4,16	9,66	975,50	-	12,38	29,06
Kakako/ Coklat (18)	100,00	-	-	-	660,00	-	-	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemak dan Minyak Hewan (15)	-	-	-		-	-	-	
Sayuran (07)	-	-	-		-	-	-	
Tembakau (24)	-	-	-		-	-	-	
Mesin dan	-	-	34,54	-	-	-	179,32	-

Jenis Komoditas Ekspor	Volume (Ton)				Nilai (USD)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pesawat Mekanik								
Lainnya	38,15	88,26	0,00	18,00	53,77	294,00	0,00	22,50
Ekspor Tidak Langsung	**89.362,78**	**105.598**	**98.418,78**	**155.230,73**	**257.057,13**	**275.020,90**	**238.301,91**	**370.262,79**
Bahan Bakar Mineral (27)	36,00	1.222,00	-	-	1,41	246.027,88	-	-
Besi dan Baja (72)	81.278,90	95.968,98	88.245,75	143.646.,95	213.999,31	-	207.674,47	336.287,55
Biji-bijian Berminyak (12)	1.272,88	1.323,04	-	-	1.410,77	1.140,04	-	-
Buah-buahan (08)	540,21	3.299,11	4.120,52	2.337,29	858,20	4.812.66	5.634,46	2.882,03
Ikan dan Udang (03)	3.750,87	2.697,96	3.032,97	6.307,19	25.328,37	19.326,51	20.085,20	27.157,67
Kakao/ Coklat (18)	390,14	640,08	-	-	2.102,19	1.860,00	-	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)	344,90	337,74	-	-	903,05	809,54	-	-
Kopi, Teh, dan Rempah-rempah (09)	166,64	41,52	517,25	134,04	606,86	289,29	1.927,93	654,27
Perhiasan/ Permata (71)	0,05	-	-	-	4,14	-	-	-
Produk Hewani (05)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pupuk (31)	-	-	-		-	-	-	-
Paket Pos, Panel dan barang dikembalikan	-	-	0,30	33,06	-	-	25,62	56,93
Lainnya	1.582,20	67,66	2.496,99	2.772,21	11.842,83	602,61	2.954,45	3.224,34
Total	**9.246.103,59**	**16.294.410,85**	**1.625.514,52**	**2.508.951,81**	**1.081.258,27**	**1.859.753,48**	**2.397.514,20**	**4.224.036,22**

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

- **Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan**

Selama tahun 2013-2021 jumlah negara tujuan ekspor Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik negara tujuan, nilai maupun volume. Nilai dan Volume ekspor Negara tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105 Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2021

Tahun	Negara Tujuan	Nilai (USD)	Volume (Ton)
2013	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina	765.857.144, 55	22.179.857,10
2014	China, USA, Australia, Netherland, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, India.	333.012.160,80	1.896.916,65
2015	USA, Australia, Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Kepulauan Solomon	134.489.271,31	80,902,57
2016	Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste	111.930.343,27	135.046,64
2017	Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste	193.021.030,30	2.530.150,16
2018	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	824.201.129,68	9.156.740,79
2019	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	16.188.812,77	1.584.732,58
2020	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	1.527.100,75	2.159.212,29
2021*	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	2.353.721,08	3.853.773.43

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

3) Volume dan Nilai Ekspor

Selama tahun 2013-2015 jumlah dan nilai ekspor komoditi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelabuhan di Sulawesi Tenggara cenderung menurun, di Tahun 2016 mengalami Peningkatan sampai di Tahun 2019, tetapi di Tahun 2020 Volume Ekspor Langsung cenderung menurun di bandingkan dengan Tahun 2019 . Jumlah ekspor langsung Tahun 2016 nilai ekspor langsung maupun tidak langsung sedikit meningkat yaitu sebesar 135.046,64 ton untuk ekspor langsung dengan nilai sebesar 111.930,34 USD dan ekspor tidak langsung sebesar 47.893,10 ton dengan nilai sebesar 107.312,66 USD. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu untuk Ekspor langsung pada tahun 2017 sebesar 193.021,03 (USD), dan untuk Ekspor Tidak langsung tahun 2017 adalah sebesar 189.942,83 (USD). Pada Tahun 2018 dan 2019 Kembali mengalami Peningkatan dari Tahun 2017, Yaitu untuk Ekspor Langsung pada Tahun 2018 sebesar 824.201,13 (USD) dan di Tahun 2019 sebesar 1.584.732,58 (USD), Ekspor Tidak Langsung di Tahun 2018 adalah sebesar 257.057,13 (USD) dan di Tahun 2019 sebesar 275.020,90 (USD), Sedangkan pada Tahun 2020

volume ekspor langsung mengalami penurunan di bandingkan Tahun 2019, Yaitu untuk Ekspor Langsung sebesar 2.159.212,29 (USD), dan Ekspor Tidak Langsung sebesar 238.301,91 (USD) . Pada tahun 2021 nilai ekspor langsung dan ekspor tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 3.853.773,43 (USD) dan 370.262,29 (USD).

Tabel 2.106 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2021

Tahun	Ekspor Langsung		Ekspor Tidak langsung	
	Berat (Ton)	Nilai (USD)	Berat (Ton)	Nilai (USD)
2013	32.086.631,62	975.622,92	2.325,55	7.932.95
2014	2.473.197,80	326.314,73	9.813,62	25.321.23
2015	80.802,57	134.489,27	38.186,46	102.427.04
2016	135.046,64	111.930,34	47.893,10	107.312.66
2017	2.530.150,16	193.021,03	85.890,26	189.942.83
2018	9.156.740,00	824.201,13	89.362,78	257.057.13
2019	14.032.134,98	1.584.732,58	97.073,90	275.020.,90
2020	1.527.100,75	2.159.212.29	98.413,78	238.301,91
2021	2.353.721,08	3.853.773,43	155.230,73	370.262,29

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

4) Perkembangan Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Antar Pulau

Pada tahun 2020 jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau dalam daerah di Sulawesi Tenggara terdiri dari jenis komoditas antara lain: perkebunan dengan volume 55.829.98ton, perikanan dengan volume 12.492,59 ton , peternakan dengan volume66,02 ton dan 2.438 ekor, kehutanan dengan volume 102 ton dan 4 m3, industri dengan volume 35.055,38 serta total nilai keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 2.516.488.515,75, sedangkan total nilai keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 5.429 727.355. Perdagangan antar pulau di provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107. Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2021

Jenis Komoditi	Satuan	2020		2021	
		Volume	Nilai (Rp.000)	Volume	Nilai (Rp.000)
Hasil Tanaman Pangan	Ton	-	-	-	-
Hasil Perkebunan	Ton	55.829.98	1.708.196.109,75	30.371	838.555.500
Hasil Perikanan	Ton	12.492,59	237.544.723	3.386.711	976.429.772
Hasil Peternakan	Ton Ekor	66,02 2.438	2.690.415 13.179.780	55,44 5.140,44	1.330.608 16.511.675
Hasil Kehutanan	Ton m3	102 4	510.490 2.500	-	-
Hasil Industri	Ton buah	35.055,38	554.364.498	2.573.000	3.596.899.800

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

f. Urusan Transmigrasi

Urusan pilihan adalah urusan yang dipriotaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*Core Competence*) yang menjadi kekhasan daerah salah satu diantaranya adalah urusan pilihan ketransmigrasian. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi terbanyak di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk dan pemekaran daerah, maka ketersediaan lahan untuk permukiman transmigrasi semakin berkurang sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan transmigran. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.108 Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
		KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
1.	Keadaan Penerimaan Transmigran Umum Menurut Jenis Transmigran	175	649	115	454	240	802	0	0	45	217

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sultra, Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa hingga tahun 2017 penerimaan transmigrasi terus dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan lahan transmigrasi yang tersebar di beberapa daerah. Pada tahun 2013 total Kepala Keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi dari berbagai wilayah tercatat 407 KK dengan total individu 1.572 jiwa, pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan transmigrasi umum menjadi 261 KK dan 1.041 jiwa. Sementaratransmigrasi swakarsa sejak tahun 2014 tidak dilakukan penerimaan lagi sampai dengan sekarang. Tahun 2017 merupakan penerimaan terendah sejak lima tahun terakhir yaitu sebesar 175 KK dan 649 jiwa. Salah satu alasan menurunnya penerimaan transmigran disebabkan karena kesediaan pemerintah daerah kabupaten di Sulawesi Tenggara untuk menerima Program Transmigrasi yang didukung oleh ketersediaan lahan untuk lokasi transmigrasi baru. Tahun 2020 tidak ada penempatan akibat adanya pandemi covid 19. Akibat masih terjadinya pandemi covid 19, maka Penempatan tahun 2021 hanya menempatkan transmigran penduduk setempat (TPS) tidak ada transmigrasi penduduk asal (TPA) atau transmigran yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan :

1) Melakukan Perumusan Kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
2) Menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
3) Melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

4) Melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

5) Melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

6) Melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara;

8) Melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

9) Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

10) Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;

11) Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

12) Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.109. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJPD 2005-2025 No. 4 Tahun 2012	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJMD 2018-2023 No. 9 Tahun 2019	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 2023

b. Urusan Keuangan

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.110. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	SILPA terhadap APBD	352.655.750.081,43	485.194.593.185,58	449.958.890.339,61	155.273.768.956,00	241.066.735.765

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara 2021.

c. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian meliputi pendidikan ASN, jabatan struktural, jabatan fungsional. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan tanggungjawab dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan untuk data terkait jabatan struktural, jabatan fungsional menjadi wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah. Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pelayanan urusan pendidikan dan pelatikepegawaian di Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.111. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2020

No	Indikator	2018	2019	2020
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10,69 %	8,17 %	7,36 %
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	6,48 %	0%	3,24 %

Sumber : BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara yang berkualitas adalah dengan menikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, pada tahun 2018 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10,69 persen, dan mengalami penurunan tahun 2019 8,17 persen dan tahun 2020 7,36 persen. Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada tahun 2018 sekitar 6,48 persen, tahun 2019 tidak ada pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, kemudian pada tahun 2020 sekitar 3,24 persen.

Tabel 2.112. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 - 2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	55	55	54	53	54
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.056	1.076	1.182	1182	1186
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	927	1.027	7.731	7.818	8.024

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Tabel 2.113. Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi kriteria / syarat	94%	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi kriteria / syarat	85%	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah	-	117,65%	111,11%	-	-	-	-
4.	Persentase Aparatur yang diberi sanksi disiplin	-	93,33%	169,23%	-	-	-	-
5.	Menurunnya persentase aparatur yang diberi sanksi disiplin	-	-	-	25%	70%	0,09%	-

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-	-	-	78 (Sedang)

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Pada tahun 2018 tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 1 menunjukkan bahwa capaian Pejabat Struktural yang telah memenuhi kriteria tahun 2018 mencapai 94 % dimana tidak mencapai sesuai target 2018 yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Sebagian besar pejabat telah mengikuti pendidikan kepemimpinan struktural, baik Pim IV, Pim III dan Pim II tetapi pada tahun 2018 sebagian besar formasi pejabat masih tetap sama dengan tahun 2017 sehingga realisasi capaian tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk indikator nomor 2 dari tabel diatas menunjukan persentase ketercapaian Pejabat Fungsional mencapai 85 % dimana tidak mencapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100 %, hal itu disebabkan karena belum semua pejabat fungsional yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis fungsional.

Pada Tahun 2019 dari tabel di atas untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 100% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 226 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural yang diikuti 262 orang peserta dimana semua peserta lulus dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang diikuti 115 orang peserta dimana semua peserta lulus. Jika ditotalkan maka jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebesar 603 orang peserta dan semuanya lulus seleksi.

Indikator nomor 4 realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar 0,14 % dari target sebesar 0,15 % sehingga capaiannya menjadi 93,33 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS” selama tahun 2019 sebanyak 20 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2019 sebanyak 13.597 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 20 : 13.508 x 100 = 0,14 % dan capaiannya yaitu 0,14% : 0,15% x 100 = 93,33%.

Pada tahun 2020 dari tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 111,11% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 280 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang tidak jadi dilaksanakan akibat dana kegiatannya dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi covid 19 sehingga tidak ada peserta yang mengikuti seleksi pada kedua kegiatan tersebut. Jika ditotalkan dari ketiga kegiatan tersebut maka jumlah total peserta yang mengikuti seleksi sebesar 280 orang peserta yang hanya berasal dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis saja.

Indikator nomor 4 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,22 % dari target sebesar 0,13% sehingga capaiannya menjadi 169,23 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan "Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS" selama tahun 2020 sebanyak 30 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2020 sebanyak 13.342 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 30 : 13.342 x 100 = 0,22 % dan capaiannya yaitu 0,22% ; 0,13 % x 100 = 169,23%.

Pada tahun 2021 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,03 % dari target sebesar 0,12% sehingga capaiannya menjadi 25 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Pada tahun 2021 terdapat 5 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin tetapi masih akan dilakukan peninjauan kembali terhadap proses penanganan kasus pelanggaran disiplin yang telah dilakukan. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2021 sebanyak 12.814 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 5 : 12.814 x 100 = 0,03 % dan capaiannya yaitu 0,03% : 0,12% x 100 = 25%.

Pada tahun 2022 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,07 % dari target sebesar 0,10% sehingga capaiannya menjadi 70 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Pada tahun 2022 terdapat 9 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2022 sebanyak 12.528 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 9 : 12.528 x 100 = 0,07 % dan capainnya yaitu 0,07 : 0,10% x 100 = 70%.

d. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan menangani masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Pemerintahan seperti persentase pelanggaran pegawai, pelanggaran keuangan dan tindak lanjut temuan yang akan dilakukan. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK.

Tabel 2.114. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	74,72 %	79,99 %	95,86 %	90,35 %	80,02%	88,75%	88,75%

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase Penurunan Temuan APIP	16,67 %	19,83 %	101,2 %	18,38%	133,8 %	19,75%	20,05%
3.	Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B	44,44 %	48,89 %	95,56 %	104,8 %	104,95 %	85,75%	85,75%
4.	Persentase kasus pengaduan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Level Maturitas SPIP	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	100 %	100 %	100 %
6.	Level Kapabilitas APIP	66,67%	66,67%	66,67%	100%	100 %	100 %	100 %

Sumber : Inspektorat Daerah Prov. Sultra, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas bahwa indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tenggara setiap tahun mengalami fluktuasi, namun rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase penurunan temuan APIP pada tahun 2021 mengalami penurunan temuan, namun mencapai target yg telah di tetapkan dan yang tahun selanjutnya melebihi target yang telah di tetapkan pada target RENSTRA 2018-2023. Selain itu juga pada level kapabilitas APIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan Capaian kinerja pada level 3 sesuai target capaian Renstra yang di tetapkan. Sedangkan pada level maturitas SPIP pada tahun 2021 tdk mencapai target yaitu pada capaian level 2 Berkembang di karenakan yang menjadi hambatan dalam penerapan SPIP meliputi: (a) persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, (b) budaya sungkan yang masih kental, dan (c) kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai (4) dan belum adanya komitmen pimpinan dalam menerapkan perencanaan berbasis risiko. Namun, pada tahun 2022 telah mencapai tingkat maturitas SPIP pada level 3 terdefinisi yaitu Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

e. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan memiliki fungsi urusan penunjang dalam Pemerintahan. Fungsi Sekertarian Dewan dalam Pemerintahan :

1) Memastikan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

2) Memastikan tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Telah di jelaskan Pada Tabel Kerangka pendanaan terhadap kinerja capaian indikator Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Frekwensi pembahasan dengan jumlah banyaknya Perda yang di bahas serta Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan Jumlah sosialisasi perundang-undangan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.115. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2022

Indikator	Satuan	Capaian
Inflasi Kota Kendari, April 2022	Persen	1,80
Pertumbuhan Ekonomi, Triwulan I 2022	Persen	5,07
Persentase Penduduk Miskin, September 2021	Persen	11,66
Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2021	Persen	3,92
Gini Rasio, September 2021	Persen	0,394
Indeks Pembangunan Manusia, 2021	Persen	71,66
Ekspor Sulawesi Tenggara, April 2022	USS	563,51
Impor Sulawesi Tenggara, April 2022	USS	156,19
PDRB ADHK 2010, Triwulan I 2022	Juta Rp	72.674.564,41
Nilai Tukar Petani, Mei 2022	Persen	99,97

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.116. Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2018 - 2022

Kabupaten	Tahun			
	2018 (Rupiah)	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)	2021 (Rupiah)
Buton	567,341	617,061	759,159	666,866
Muna	706,484	779,017	809,677	751,006
Konawe	982,295	1,105,872	968,539	1,010,959
Kolaka	1,001,753	1,119,194	1,135,254	1,074,381
Konawe Selatan	803,711	902,608	901,433	1,024,787
Bombana	895,069	988,460	993,701	973,074
Wakatobi	848,192	782,715	896,836	880,615
Kolaka Utara	883,996	1,001,623	1,041,145	1,218,254
Buton Utara	748,753	757,860	892,738	836,889
Konawe Utara	970,529	1,136,152	1,176,540	1,244,561
Kolaka Timur	993,174	876,843	1,007,634	1,000,559
KonaweKepulauan	841,982	906,913	716,948	841,899
Muna Barat	601,916	615,286	651,286	785,091
Buton Tengah	947,181	632,400	544,071	635,848
Buton Selatan	459,136	621,687	670,319	637,771
Kendari	1,596,118	1,644,433	1,684,698	1,704,396
Baubau	1,131,250	1,157,034	1,071,599	1,203,317
Sulawesi Tenggara	**969,749**	**1,021,290**	**1,037,799**	**1,070,493**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 sebesar Rp 853.720,-. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 969.749,- pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk adalah sebesar Rp 1.021.290,-. Sedangkan tahun 2020 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1,037.799,- dan pada tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1.070.493,-.

Jika dilihat dari sisi proporsi, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (konsumsi makanan dan non makanan) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2021 yang sebesar 47,62 persen terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 48,83 persen. Dan proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi non makanan pada tahun 2021 yang sebesar 52.38 persen terjadi kanaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 51.17 persen.

Secara keseluruhan persentase terbesar yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan masyarakat Sulawesi Tenggara didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi (12,28 persen), diikuti oleh konsumsi kelompok padi-padian (7,38 persen), rokok (7,16 persen) dan ikan/udang/cumi/kerang (6,48 persen). Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran untuk perumahan menempati posisi tertinggi (26,30 persen), diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (9,81 persen).

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah 2000 kkal per orang per hari. Sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 tersebut dipatok sebesar 52 gram per orang per hari.

Tabel di atas menyajikan perkembangan konsumsi kalori dan protein di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2019. Tahun 2018, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Sulawesi Tenggara sebesar 2.125,18 kkal per kapita per hari meningkat menjadi 2.083,17 kkal per kapita per hari di tahun 2019. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 20197 sudah diatas standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (2000 kkal/kapita/hari). Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga dijadikan ukuran *proxy* terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2016 8dan 2019masing-masing sebesar 62,00gram/kapita/hari dan 61,16gram/kapita/hari sudah cukup tinggi melebihi standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (52 gram/kapita/hari).

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator : infrastruktur jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan.

Tabel 2.117. Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018-2019

No.	Uraian	2018	2019
A.	**Jalan**		
1.	Nasional	1.498	1.498
2.	Provinsi	1.009	1.009
3.	Kabupaten/ Kota	9.809	9.809
B.	**Perumahan**		
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	69,9	69,9
2.	Persentase Penduduk berakses air minum (persen)		
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	80,95	80,95
4.	Persentase areal kawasan kumuh (Ha)	4.098,89	4.098,89
C.	**Irigasi**		
1.	Rasio Irigasi	69%	69%
2.	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	25	25
d.	**Perhubungan**		
1.	Bandara	5 lokasi	5 lokasi
2.	Pelabuhan	15 lokasi	15 lokasi
3.	Terminal Type B	3 lokasi	4 lokasi

Sumber : BPS , Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2022

2.1.4.3. Luas Wilayah Produktif

Pada Tahun 2018 luas lahan bukan pertanian dan lahan pertanian bukan sawah menurut penggunaan seluas 2,956,206.61 ha, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2,911,908.60 ha dan tahun 2020 turun menjadi 2,973,266,90 ha dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seluara 3,538,119.4 ha.

Tabel 2.118. Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 - 2021 (Hektar)

No.	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut penggunaan di Sulawesi Tenggara (Hektar)	2,956,206.61	2,911,908.60	2,734,266.90	3,538,119,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119. Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021–2022

Jenis Kriminalitas	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
Pembunuhan	14	32	18	25
Aniaya Berat	22	14	7	6
Aniaya Ringan	16	27	19	16
Aniaya Biasa	848	615	1145	706
C u r a s	30	18	29	16
C u r a t	203	221	189	198
Curanmor	185	65	156	36
Perkosaan	19	22	11	11
Perjudian	26	21	41	20
Perzinahan	26	18	27	20
Pengrusakan	91	62	79	55
Penipuan	94	67	91	48
Penggelapan/Embezzlement	74	67	99	56
Curi Biasa	296	169	277	201
Penipuan dengan Penggelapan	131	55	181	73
Palsu Surat	38	29	56	23
Serobot Tanah	38	22	26	8
Penghinaan	19	10	20	20
Pengeroyokan	303	157	344	177
Lahgun Sajam	2	2	6	2

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

b. Pengenaan Pajak Daerah

Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2029 – 2021 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.120. Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2021

Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2021		
	Target (000 Rp)	Realisasi Nilai (000 Rp)	Realisasi persen	Target (000 Rp)	Realisasi Nilai (000Rp)	Realisasi persen
Pajak Daerah	-	984,253.36	-	-	931,823.51	-
Retribusi Daerah	-	19,591,16	-	-	24,380.91	-
Bagian Laba BUMD	-	56,845.49	-	-	64,694.89	-
Lain-Lain Pendapatan	-	163,528.52	-	-	135,749.56	-
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	-	97,441.26	-	-	41,053.87	-

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.

Pembanguan Sumberdaya Manusia dalam suatu daerah dapat dilhat dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusai adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD bertujuan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran RPJMD yang tertuang dalam RKPD. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Perkembangan pelaksanaan dimaksud meliputi Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang direncanakan dalam RKPD dan dianggarakan dalam APBD.

Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikategorikan dalam interval penilaian sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Sangat Tinggi (ST)	Interval	91% ≥ 100%
2. Capaian Realisasi Tinggi (T)	Interval	76% ≤ 90%
3. Capaian Realisasi Sedang (S)	Interval	66% = 75%
4. Capaian RealisasiRendah (R)	Interval	51% =65%
5. Capaian Realisasi Sangat Rendah (SR)	Interval	51% ≤65%

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2023) dan realisasi RPJMD Tahun 2018-2023 dilihat pada Tabel 2.121 (lampiran).

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat makro, meliputi:

1. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara masih berada diatas rata-rata nasional;
2. Tingkat Pengangguran masih berfluktuasi seiring meningkatnya lapangan pekerjaan pada sektor industri;
3. Kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata-rata nasional;
4. Masih rendahnya pemerataan dan mutu pendidikan;
5. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
6. Kerentanan terhadap kerawanan pangan yang tinggi;
7. Kontribusi PDRB sektor unggulan masih rendah;
8. Kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai;
9. Konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota masih rendah;
10. Kesenjangan antar daerah cukup tinggi;
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana;
12. Pendapatan Asli Daerah masih rendah; dan
13. Profesionalitas aparatur masih rendah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkum berdasarkan hasil perumusan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Belum semua penduduk memperoleh layanan pendidikan menengah;
- Masih terdapat bangunan sekolah yang tidak memadai;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas guru tetap jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Rendahnya produktivitas guru pada jenjang pendidikan menengah kejuruan;
- Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- Rendahnya kearifan budaya dan tradisional lokal yang dilestarikan;
- Belum optimalnya pembangunan pendidikan khususnya pendidikan menengah kejuruan dengan sektor tenaga kerja.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih tinggi (74 kasus yang dilaporkan atau 229/100.000KH);
- Angka Kematian Neonatal yang masih tinggi;
- Angka Kematian bayi dan Kematian balita masih tingi dibanding dengan Angka Nasional;
- Prevalensi kekurangan gizi/prevalensi stunting lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional;
- Angka kesembuhan penderita TB yang rendah (60% target 100%);
- Penderita HIV AIDS di Sultra mencapai 998 kasus;
- Prevalensi penderita malaria di Sultra Tahun 2017 mencapai 0,21 per 1000 penduduk;
- Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat;
- Prevalensi penderita penyakit tidak menular semakin bertambah;
- Masih terdapat 11 kab/kota yang endemis Kasus Kusta dan Frambusia;
- Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit;
- Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas kefaramasian dan alat kesehatan;
- Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin masih rendah;
- Ketersediaan SDM Kesehatan yang belum sesuai dengan standar;
- Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat, Ormas dan swasta serta stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan;
- Belum semua Keluarga di Prov. Sultra memiliki Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak;
- Adanya pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Adanya Krisis dan Kedaruratan Bencana Alam;
- Terbatasnya jenis dan jumlah, kualitas standar alat sarana dan prasarana;

- Kurangnya sarana dan prasarana serta alat penunjang pendidikan dan pelatihan di Balai;
- Pelatihan Kesehatan Masyarakat;
- 41 % Kabupaten/ Kota belum memimiliki kawasan bebas asap rokok;
- Presentase Desa yang melaksanakan STBM baru mencapai 46,4 %;
- Cakupan pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat baru mencapai 18 %.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Sumber Daya Air**

- Kinerja Sistem Irigasi kewenangan provinsi masih belum optimal, terlihat dalam pencapaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan provinsi yang baru mencapai 58,68% di tahun 2021. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan provinsi yang sekitar 63,98%.
- Terjadi peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tidak begitu signifikan disebabkan kurangnya alokasi anggaran pada tahun 2022, dimana persentase kondisi jaringan irigasi tahun 2021 adalah 63,98% menjadi 64,64% pada tahun 2022.

- **Jalan Dan Jembatan**

- Kondisi jaringan jalan provinsi sesuai data Tahun 2023 yaitu jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 73,91% dan jalan kondisi tidak mantap 26,09%. (Hasil Verifikasi Balai Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Maret 2023), penilaian nilai kondisi permukaan jalan mengalami perubahan. Namun Nilai Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu jalan dalam kondisi mantap sebesar 64,87%.
- Kondisi jembatan pada jalan provinsi berdasarkan data tahun 2023 adalah 482 jembatan dalam kondisi mantap dan 90 jembatan kondisi tidak mantap, dengan total keseluruhan jembatan 572. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi jembatan pada tahun 2022 yaitu dari total 571 jembatan, 462 jembatan dintaranya dalam kondisi mantap, sedangkan sisanya 109 jembatan dalam kondisi tidak mantap.

- **Air Minum**

- Belum terlaksananya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Skala Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Data akses air minum layak di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 yaitu mencapai 94,64% rumah tangga (tahun 2021: 91,94%). Masih terdapat 8,06% rumah tangga yang perlu mendapat perhatian terhadap akses air minum layak, khususnya untuk mendukung capaian target 100% akses air minum layak. Masih terdapat 5 (lima) kabupaten untuk rumah tangga yang akses air minum layaknya dibawah akses air minum layak provinsi.

- Belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk air minum yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah yang kesulitan mendapatkan sumber air layak seperti daerah kepulauan.
- Belum adanya kelembagaan yang baik dalam pengelolaan air minum bagi masyarakat baik skala kabupaten/kota maupun skala regional (provinsi).

- **Sanitasi**

- Belum optimalnya pelayanan sanitasi yang dapat dilihat dari data rumah tangga terhadap akses fasilitas buang air besar pada tahun 2022 yaitu masih ada 12,93% rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak, sedangkan 87,07% rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dimana terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang akses sanitasi layaknya dibawah akses sanitasi layak provinsi dan terdapat 2 (dua) kabupaten yang memiliki *gap* > 20% untuk mencapai target 90% target nasional terhadap sanitasi layak.
- Belum tersedianya infrastruktur sanitasi skala regional beruapa pengolahan air limbah regional dan TPA regional.

- **Penataan Ruang**

- Belum tersedianya dan buruknya kualitas dari rencana tata ruang yang sudah ada menyebabkan produk rencana tata ruang belum dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

  a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah proses revisi pada tahun 2020, namun belum mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN.

  b. Masih ada 1 (satu) Kabupaten (DOB) yang belum memiliki Perda terkait RTRW dan 11 Kabupaten dan Kota yang RTRWnya masih dalam proses revisi.

- Belum tersedianya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, dan pengaturan sanksi.
- Belum optimalnya kinerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi diakibatkan belum adanya kelembagaan yang terstruktur

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar hirarki pemerintahan yang mencakup data numerik dan spasial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan program yang terintegrasi.
- Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum optimal, sehingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menjadi lambat.
- Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan pada tahun 2019 yaitu 135.922 unit dan tahun 2020 yaitu 189.548 unit

- Data kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah kurang lebih 195.372,89 Ha (total kawasan kumuh yang kewenangan penanganannya nasional, provinsi, kabupaten dan kota), dimana hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi: 747 Ha (2019) dan 722 Ha (2020)
- Masih tingginya backlog rumah dan masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau (jumlah backlog perumahan tahun 2020 yaitu kurang lebih 71.712 unit).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua tahapan belum optimal.
- Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat.
- Belum optimalnya Pengarustamaan Adapatasi Perubahan Iklim dalam Pengurangan Risiko Bencana
- Kerangka Hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana belum optimal
- Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua tahapan belum optimal
- Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat
- Belum Optimalnya Partisipasi kemitraan multi pihak dalam penyelenggaran penanggulangan bencana.
- Kurangnya Pembangunan dan Pengembangan Sistem informasi rawan bencana dan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

6. Sosial

- Penanganan dan penanggulangan pemberdayaan masyarakat miskin;
- Bertambahnya jumlah PMKS dan Rendahnya Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya terkait target SPM skala provinsi yaitu fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, disabilitas dan penangangan bencana alam skala provinsi;
- Kurang optimalnya Peran Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pendampingan penanganan PMKS skala Provinsi.
- Belum Maksimal dalam penerapan SPM urusan sosial karena terbatasnya sarana dan prasarana UPT/panti

2.4.1.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 ketaatan terhadap RTRW cukup baik yaitu mencapai 85 persen. Ini terlihat hingga tahun 2019, telah terbentuk sebanyak 12 (duabelas) Perda Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebanyak 1 (satu) Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Perda RTRW memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tabel 2.122. Realisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

No	Nama Wilayah	Lingkup	Perda RTRW
	Sulawesi Tenggara	**Provinsi**	**Perda No.2 Tahun 2014**
1.	Buton	Kabupaten	Perda No.1 Tahun 2014
2.	Muna	Kabupaten	Perda No.2 Tahun 2014
3.	Baubau	Kota	Perda No.4 Tahun 2014
4.	Konawe	Kabupaten	Perda No.9 Tahun 2014
5.	Konawe Selatan	Kabupaten	Perda No.19 Tahun 2013
6.	Bombana	Kabupaten	Perda No.20 Tahun 2013
7.	Kendari	Kota	Perda No.1 Tahun 2012
8.	Buton Utara	Kabupaten	Perda No.5 Tahun 2012
9.	Kolaka Utara	Kabupaten	Perda No.6 Tahun 2012
10.	Wakatobi	Kabupaten	Perda No.12 Tahun 2012
11.	Kolaka	Kabupaten	Perda No.16 Tahun 2012
12.	Konawe Utara	Kabupaten	Perda No.20 Tahun 2012
13	Buton Tengah	Kabupaten	Perda No. 1 Tahun 2014
14.	Konawe Kepulauan	Kabupaten	Perda No. 2 Tahun 2021
15.	Kolaka Timur	Kabupaten	Perda No. 78 Tahun 2020
16.	Muna Barat	Kabupaten	Perda No. 10 Tahun 2020

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Kabupaten Kabupaten Buton Selatan sebagai satu-satunya wilayah yang belum memiliki Perda Rencana Tata Ruang sehingga masih mengacu pada Tata Ruang kabupaten induknya yakni Kabupaten Buton.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Masih tingginya *mismatch* antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan keahlian dan keterampilan tenaga kerja;
- Tingkat Pengangguran Terbuka angkatan kerja muda masih cukup tinggi;
- Fungsi kelembagaan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja belum optimal.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- Masih terjadi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan (APK dan APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan);
- Masih terdapat kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan (TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan, upah/pendapatan laki-laki lebih tinggi dari perempuan);

- Partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah;
- Masih cukup tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan ekonomi perempuan dan laki-laki (belum ada data kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan anak pada Bab II);
- Perlindungan anak dan TPPO (Tindakan Pidana Perdagangan Orang);
- Belum maksimalnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagi tindak kekerasan.

3. Pangan

- Tidak stabilnya harga pangan strategis menjelang HBKN.
- Belum adanya Pergub/Perda CBPP
- Belum memiliki laboratorium uji mutu pangan.

4. Pertanahan

- Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan (Reforma Agraria) belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam inventarisasi, penetapan dan penataan akses pemanfaatan objek redistribusi tanah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
- Belum optimalnya pendataan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan objek tanah yang terkait dengan tanah ulayat dan tanah kosong kewenangan provinsi.
- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kendala pada faktor budaya sosial masyarakat. Adanya proyek strategis yang pelaksanaan pengadaan tanahnya masih belum selesai dan prosesnya berjalan lambat
- Kebutuhan Lahan untuk kepentingan umum yang cukup tinggi
- Masih adanya Konflik dan Sengketa Pertanahan
- Belum adanya sistem informasi pertanahan

5. Lingkungan Hidup

- Kapasitas daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) rendah
- Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Perubahan iklim

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan masih relatif rendah;
- Masih relatif terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan;
- Masih relatif terbatasnya SDM pengelola data Kependudukan dan pencatatan sipil;

- Prosedur dan persyaratan kepemilikan dokumen kependudukan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota belum maksimal;
- Sarana dan Prasarana belum memadai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kelembagaan desa yang belum berjalan efektif;
- Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa masih rendah;
- Minimnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Memudarnya nilai gotong royong di masyarkat;
- Kurangnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dengan pemanfaatan TTG;
- Kurangnya pembinaan dan pembentukan pos yantek Desa;
- Belum maksimalnya pengelolaan BUMDesa/pasar desa;
- Belum maksimalnya pembinaan masyarakat pesisir;
- Kelembagaan PKK dan Kader PKK perlu ditingkatkan;
- Kelembagaan Adat dan pengelola Adat perlu ditingkatkan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;
- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;
- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) masih tinggi;
- Tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi masih tinggi (drop out);
- Peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah.
- Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
- Rendahnya Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

9. Perhubungan

- Masih rendahnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang berupa pemasangan rambu-rambu, dari ruas jalan provinsi sepanjang 1.009 km. (pemasangan rambu sejumlah 1.513 buah sejak tahun 2014 - 2016).
- Belum optimalnya pelayanan terminal tipe B (kewenangan pemerintah provinsi) dalam hal mendukung konektivitas antar moda transportasi.
- Pada layanan transportasi laut, belum diserahkannya kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi terkait

pelayanan angkutan laut regional guna mendukung aksesibilitas masyarakat wilayah kepulauan.Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Terbatasnya konektivitas antar wilayah dan antar moda
- Rendahnya Tingkat Keselamatan Transportasi
- Belum optimalnya pelayanan dasar jasa perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dilihat melalui berbagai aspek, yaitu:
  a. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan Teknologi Informasi.
  b. Belum optimalnya pengelolaan website pemerintah provinsi dan OPD belum adanya website OPD yang mampu memberikan informasi terkait data dan pelaksanaan tugas serta fungsi OPD bagi publik.
  c. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi elektronik untuk mendukung pembangunan daerah.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum optimalnya manajemen Koperasi & UMKM
- Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi & UMKM
- Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM
- Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi & UMKM
- Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM
- Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi & UMKM
- Jalur perizinan yang panjang

12. Penanaman Modal

- Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha
- Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih
- Jalur birokrasi yang panjang

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Kurangnya lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan tengah pengangguran dikalangan generasi muda yang mengakibatkan berkurangnya produktifitas nasional dan memperlambat laju perkembangan pembangunan nasional;
- Menurunnya prestasi atlit diberbagai cabang olahraga unggulan;
- Masih kurangnya persepsi masyarakat bahwa prestasi olahraga identik dengan medali dan mengabaikan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
- Kurangnya pembibitan dan pembinaan atlet usia dini;
- Kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.

14. Statistik

- Belum sinkronnya ketersediaan data dengan kebutuhan data, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- Koordinasi yang belum terjalin dengan baik antar instansi disetiap level pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten dan kota) dalam hal penyediaan data. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya mekanisme kerja dan perbedaan kepentingan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral yang berdampak pada rendahnya data yang tersedia dalam bentuk spasial dan non-spasial

15. Persandian

- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang belum berjalan dengan baik
- Belum optimalnya jaring komunikasi sandi pemerintah provinsi
- Infrastruktur pendukung pengamanan informasi yang belum memadai

16. Kebudayaan

- Rendahnya kearifan budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan

17. Perpustakaan

- Rendahnya Budaya Gemar Membaca;
- Masih rendahnya mutu pelayanan;
- Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pustakawan;

18. Kearsipan

- Tidak Berfungsinya Arsiparis yang ada di SKPD;
- Akuisisi Arsip Tidak Maksimal;
- Kurangnya Tenaga Arsiparis.

c. Urusan Pilihan Pemerintahan

1. Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya
- Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing produk hasil perikanan
- Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan daerah
- Belum optimalnya peranan nelayan kecil dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan
- Masih tingginya ilegal, *unreported and unregulated finishing*.

2. Pariwisata

- Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal
- Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien
- Belum optimalnya pengembangan SDM, regulasi dan kelembagaan kepariwisataan
- Intergrasi sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
- Harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerah

3. Pertanian

- Alih fungsi lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan non pertanian/perkebunan
- Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
- Sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai
- Tingginya serangan OPT dan dampak perubahan iklim pada tanaman pertanian dan perkebunan
- Fluktuasi harga produk pertanian dan perkebunan masih tinggi
- Terbatasnya akses permodalan bagi petani
- Populasi ternak masih rendah sehingga impor daging masih tinggi
- Kurangnya sumber-sumber perbibitan ternak
- Belum adanya industri pakan ternak
- Belum adanya pasar ternak
- Tingginya penyakit menular pada ternak
- Rendahnya sumberdaya manusia bidang pertanian dan perkebunan
- Sebagian besar umur tanaman perkebunan dan hortikultural sudah tua
- Daya dukung lahan perkebunan dan hortikultura menurun
- Kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal.

4. Kehutanan

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan
- Belum berkembangnya hutan rakyat
- Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan
- Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sebesar 74,98% masih jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional sebesar Tahun 2017 nasional sebesar 95,35%
- Rasio desa berlistrik Sulawesi Tenggara hingga Juli Tahun 2018 sebesar 99,4%. Perhitungan didasarkan pada 25% pemenuhan listrik desa sudah dapat dikatakan sebagai desa berlistrik
- Kontribusi PDRB sektor pertambangan Tahun 2017 sebesar 20,68%.

6. Perdagangan

- Jenis dan Jumlah Komoditi yang diekspor masih terbatas
- Komoditi ekspor didominasi produk pertambangan
- Terbatasnya sarana prasarana infrastruktur laboratorium pengujian mutu barang
- Masih terbatasnya SDM pengawas dan penguji mutu barang
- Masih terbatasnya ruang lingkup akreditasi pengujian dan kalibrasi
- Maraknya perdagangan antar pulau provinsi khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga mempengaruhi ketersediaan dalam daerah
- Harga-harga barang kebutuhan pokok berfluktuasi yang dominan harga disepakati oleh pelaku usaha (distributor dan pedagang eceran di pasar-pasar rakyat)
- Masih kurangnya fasilitas pengawasan berkala produk wajib SNI dan barang diawasi

- Penanganan pengaduan perlindungan konsumen masih kurang

7. Perindustrian

- Lemahnya nilai tambah Produk industri Kecil dan Menengah
- Lemahnya kapabilitas pelaku industri Kecil dan menengah
- Kurangnya Modal usaha bagi pelaku usaha Industri Kecil dan menengah
- Peralatan IKM yang tidak memadai
- Produk Industri Kecil dan menengah yang potensial dan baik belum bisa dipromosikan secara baik
- Kurangnya sarana prasarana pendukung peralatan desain dan peralatan kemasan produk
- Lemahnya kapabilitas SDM tenaga teknis desain kemasan
- Kurangnya sarana teknologi tepat guna bagi industri pengolahan komoditi agro, logam dan mesin di daerah
- Belum terwujudnya struktur industri daerah secara aktual dan jelas

8. Transmigrasi

- Keterbatasan sarana dan prasarana sistem dan akses fasilitas dasar permukiman, ekonomi dan sosial budaya di kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- Ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan belum memadai
- Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah
- Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal

2. Keuangan

- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
- Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan potensinya
- Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi
- Kualitas SDM aparat pengelola pajak masih rendah
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Pelayanan Publik belum optimal

3. Kepegawaian

- Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.

- Tingginya angka pelanggaran disiplin oleh aparatur
- Belum optimalnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur

4. Pendidikan dan Pelatihan

- Rendahnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Kompeten dan Profesional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur
- Kurang memadainya Sarana dan Prasarana utama dan pendukung kegiatan kediklatan
- Masih kurangnya data dan informasi mengenai seberapa besar kontribusi Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Aparatur

5. Penelitian dan Pengembangan

- Kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan/riset (Policy Based Research);
- Kesenjangan antara potensi kekayaan/komoditas sumber daya alam Sulawesi Tenggara dengan pemanfaatan IPTEK/Inovasi teknologi pengolahan/produksi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian daerah dan masyarakat;
- Adanya kesenjangan sumber daya IPTEK di masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki daya saing dan kemandirian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Pengawasan

- Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari OPD
- Masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan OPD
- Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah

7. Fungsi lainnya

Sekretariat Daerah

- Rendahnya OPD dalam menyimpan bukti dan administrasi sengketa Hukum;
- Rendahnya pengentahuan masyarakat terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang berpradilan;
- Pembentukan Lembaga PD belum Efektif (Belum tepat Ukuran dan Tepat Fungsi);
- Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar Pelayanan Publik masih rendah;
- Penerapan Standarisasi Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan belum efektif
- Pengukuran Kinerja Indivindu belum dilakukan secara berkala;
- Belum melakukan Review Standar Kompetensi Pegawai dan belum melakukan Review Proses Bisnis yang diikuti dengan Review SOP;
- Belum menetapkan Unit Kerja Zona Intgritas untuk mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai miniatur Reformasi Birokrasi;

- Belum maksimalnya pengelolaan administrasi wilayah pemerintahan daerah yang tertata dengan baik;
- Belum maksimalnya pembinaan dan evaluasi kinerja daerah dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Harga Eceren Tertinggi (HET) komoditas beras;
- Kurangnya koordinasi dan monitoring distribusi barang dan jasa;
- Kurangnya koordinasi dan monitoring Rastra;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal;
- Sering terlambatnya proses penginputan perencanan umum pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menuju *Central Of Excelent* belum terintegrasi dengan baik;
- Proses pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan;
- Pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum memenuhi standar kompetensi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kabupaten/kota belum optimal;
- Masih kurangnya koordinasi kerjasama daerah antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun instransi vertikal;
- Kurangnya dukungan mitra kerjasama daerah.

Sekretariat DPRD

- Belum adanya produk hukum DPRD hak prakarsa DPRD yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat;
- Belum terlaksananya akuntabilitas dan transparansi mengawal produk tentang hak-hak prakarsa DPRD.

Tabel 2.121. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA,SMK, SMLB.	Persen	100	627.539.574.464	2,19	4.089.083.998	95,82	589.391.250.847	0	0	0	0	0,29	380.697.080	95,58	554.192.270.529	95,87	554.572.967.609	98,06	558.662.051.607	98,06	89,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA	Persen	100	336.103.922.687	0,69	2.685.856.800	96,12	314.901.035.017	0	0	0	0	0,48	380.697.080	95,72	308.023.775.559	96,2	308.404.472.639	96,89	311.090.329.439	96,89	92,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3	5.261.866.800	1	1.003.637.200	1	2.986.116.800	0	0	0	0	0	0	4	2.767.045.300	4	2.767.045.300	5	3.770.682.500	166,67	71,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	25	5.750.184.750	25	1.682.219.600	5	3.689.031.600	0	0	0	0	0	0	5	3.225.439.150	5	3.225.439.150	30	4.907.658.750	120	85,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	33	226.973.550	0	0	33	226.973.550	0	0	0	0	0	0	33	92.907.650	33	92.907.650	33	92.907.650	100	40,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	4	135.934.350	0	0	4	135.934.350	0	0	0	0	0	0	4	111.934.350	4	111.934.350	4	111.934.350	100	82,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang	12	169.029.650	0	0	12	169.029.650	0	0	0	0	0	0	12	144.551.950	12	144.551.950	12	144.551.950	100	85,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang	16	23.921.050	0	0	16	23.921.050	0	0	0	0	0	0	16	23.921.050	16	23.921.050	16	23.921.050	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang	10	99.483.300	0	0	10	99.483.300	0	0	0	0	0	0	10	68.929.300	10	68.929.300	10	68.929.300	100	69,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang	6	63.483.300	0	0	6	63.483.300	0	0	0	0	0	0	6	37.219.650	6	37.219.650	6	37.219.650	100	58,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	14.575.000	0	0	3	14.575.000	0	0	0	0	0	0	3	14.575.000	3	14.575.000	3	14.575.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	69	87.286.966.132	0	0	69	87.286.966.132	0	0	0	0	0	0	69	83.605.990.194	69	83.605.990.194	69	83.605.990.194	100	95,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah ruang yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	124	16.865.984.520	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	163.153.900	0	0	6	163.153.900	0	0	0	0	0	0	6	88.849.200	6	88.849.200	6	88.849.200	100	54,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10.330.200	0	0	1	10.330.200	0	0	0	0	0	0	1	10.330.200	1	10.330.200	1	10.330.200	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	25.375.000	0	0	1	25.375.000	0	0	0	0	0	0	1	23.375.000	1	23.375.000	1	23.375.000	100	92,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	13.127.600	0	0	1	13.127.600	0	0	0	0	0	0	1	13.127.600	1	13.127.600	1	13.127.600	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	13.806.650	0	0	1	13.806.650	0	0	0	0	0	0	1	13.806.650	1	13.806.650	1	13.806.650	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	64.989.600	0	0	7	64.989.600	0	0	0	0	0	0	7	64.989.600	7	64.989.600	7	64.989.600	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	338.414.000	0	0	3	338.414.000	0	0	0	0	0	0	3	322.260.000	3	322.260.000	3	322.260.000	100	95,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	15	1.340.656.850	0	0	15	1.340.656.850	0	0	0	0	0	0	15	1.260.106.000	15	1.260.106.000	15	1.260.106.000	100	93,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7	12.508.357.600	0	0	7	12.508.357.600	0	0	0	0	0	0	7	12.292.758.500	7	12.292.758.500	7	12.292.758.500	100	98,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	7.836.884.000	0	0	3	7.836.884.000	0	0	0	0	0	0	3	7.756.900.000	3	7.756.900.000	3	7.756.900.000	100	98,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2000	194.697.000	0	0	2000	194.697.000	0	0	0	0	0	0	2000	44.174.800	2000	44.174.800	2000	44.174.800	100	22,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	2.900.635.350	0	0	1	2.900.635.350	0	0	0	0	0	0	1	2.537.064.000	1	2.537.064.000	1	2.537.064.000	100	87,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	8	180.000.000	0	0	8	180.000.000	0	0	0	0	0	0	8	180.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	260	1.134.406.000	0	0	260	1.134.406.000	0	0	0	0	0	0	260	1.074.307.446	260	1.074.307.446	260	1.074.307.446	100	94,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	47	33.339.536.000	0	0	47	33.339.536.000	0	0	0	0	0	0	47	33.108.792.000	47	33.108.792.000	47	33.108.792.000	100	99,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	270	1.370.018.556	0	0	270	1.370.018.556	0	0	0	0	0	0	270	1.230.698.434	270	1.230.698.434	270	1.230.698.434	100	89,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	206	463.888.835	0	0	206	463.888.835	0	0	0	0	0	0	206	443.362.650	206	443.362.650	206	443.362.650	100	95,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	251	1.938.915.144	0	0	251	1.938.915.144	0	0	0	0	0	0	251	1.657.679.885	251	1.657.679.885	251	1.657.679.885	100	85,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	02	1	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	350	155.808.680.000	0	0	350	155.808.680.000	0	0	0	0	0	0	350	155.808.680.000	350	155.808.680.000	350	155.808.680.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	18	559.648.000	0	0	18	559.648.000	0	0	0	0	18	380.697.080	0	0	18	380.697.080	18	380.697.080	100	68,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	55	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Angka Partsipisasi Murni (APM) Jenjang SMK**	**Persen**	**100**	**249.744.010.410**	**0**		**100**	**249.744.010.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**240.476.408.333**	**100**	**240.476.408.333**	**100**	**240.476.408.333**	**100**	**96,29**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	1	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	03	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibanoun	Ruang	7	107.022.150	0	0	7	107.022.150	0	0	0	0	0	0	7	107.022.150	7	107.022.150	7	107.022.150	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	13	6.375.964.879	0	0	13	6.375.964.879	0	0	0	0	0	0	13	5.251.979.238	13	5.251.979.238	13	5.251.979.238	100	82,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium sekolah yang dibangun	Ruang	31	3.073.298.649	0	0	31	3.073.298.649	0	0	0	0	0	0	31	2.965.741.101	31	2.965.741.101	31	2.965.741.101	100	96,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	7	581.311.661	0	0	7	581.311.661	0	0	0	0	0	0	7	568.955.661	7	568.955.661	7	568.955.661	100	97,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	342.646.300	0	0	2	342.646.300	0	0	0	0	0	0	2	334.096.300	2	334.096.300	2	334.096.300	100	97,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	98.668.766.730	0	0	5	98.668.766.730	0	0	0	0	0	0	5	95.087.950.197	5	95.087.950.197	5	95.087.950.197	100	96,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	22	3.015.744.712	0	0	22	3.015.744.712	0	0	0	0	0	0	22	2.503.054.187	22	2.503.054.187	22	2.503.054.187	100	83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	35	1.710.897.125	0	0	35	1.710.897.125	0	0	0	0	0	0	35	1.612.576.175	35	1.612.576.175	35	1.612.576.175	100	94,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	16	1.362.674.700	0	0	16	1.362.674.700	0	0	0	0	0	0	16	1.304.645.250	16	1.304.645.250	16	1.304.645.250	100	95,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	12	473.791.550	0	0	12	473.791.550	0	0	0	0	0	0	12	379.600.000	12	379.600.000	12	379.600.000	100	80,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	251.352.325	0	0	5	251.352.325	0	0	0	0	0	0	5	241.784.325	5	241.784.325	5	241.784.325	100	96,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	15	10.536.255.150	0	0	15	10.536.255.150	0	0	0	0	0	0	15	9.560.178.700	15	9.560.178.700	15	9.560.178.700	100	90,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	28	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	56	18.567.049.750	0	0	56	18.567.049.750	0	0	0	0	0	0	56	16.668.865.550	56	16.668.865.550	56	16.668.865.550	100	89,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	25	8.294.560.000	0	0	25	8.294.560.000	0	0	0	0	0	0	25	8.233.260.000	25	8.233.260.000	25	8.233.260.000	100	99,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1500	122.693.000	0	0	1500	122.693.000	0	0	0	0	0	0	1500	10.193.000	1500	10.193.000	1500	10.193.000	100	8,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	50	1.265.000.000	0	0	50	1.265.000.000	0	0	0	0	0	0	50	1.211.250.000	50	1.211.250.000	50	1.211.250.000	100	95,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	70	490.000.000	0	0	70	490.000.000	0	0	0	0	0	0	70	449.000.000	70	449.000.000	70	449.000.000	100	91,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	17	26.586.117.000	0	0	17	26.586.117.000	0	0	0	0	0	0	17	26.474.575.800	17	26.474.575.800	17	26.474.575.800	100	99,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1	105.724.600	0	0	1	105.724.600	0	0	0	0	0	0	1	70.330.600	1	70.330.600	1	70.330.600	100	66,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	34	858.526.600	0	0	34	858.526.600	0	0	0	0	0	0	34	681.006.627	34	681.006.627	34	681.006.627	100	79,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5	1.359.570.169	0	0	5	1.359.570.169	0	0	0	0	0	0	5	1.297.132.028	5	1.297.132.028	5	1.297.132.028	100	95,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	160	64.950.150.000	0	0	160	64.950.150.000	0	0	0	0	0	0	160	64.950.150.000	160	64.950.150.000	160	64.950.150.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	59	644.893.360	0	0	59	644.893.360	0	0	0	0	0	0	59	513.061.444	59	513.061.444	59	513.061.444	100	79,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	02	1	48	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Keunuan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus**	**Persen**	**100**	**41.691.641.367**	**38,06**	**1.403.227.198**	**60,9**	**24.746.205.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,9**	**5.692.086.637**	**60,9**	**5.692.086.637**	**98,96**	**7.095.313.835**	**98,96**	**17,02**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	1	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	4.490.000	0	0	1	4.490.000	0	0	0	0	0	0	1	4.490.000	1	4.490.000	1	4.490.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	3.390.399.000	0	0	2	3.390.399.000	0	0	0	0	0	0	2	3.285.644.145	2	3.285.644.145	2	3.285.644.145	100	96,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	436.832.500	4	415.465.500	1	8.335.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	415.465.500	100	95,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) vang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	17	755.053.850	4	124.551.198	13	525.053.850	0	0	0	0	0	0	13	375.317.800	13	375.317.800	17	499.868.998	100	66,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	11	690.627.500	5	500.000	6	451.605.000	0	0	0	0	0	0	6	305.936.000	6	305.936.000	11	306.436.000	100	44,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1	4.900.000	0	0	1	4.900.000	0	0	0	0	0	0	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50	446.294.000	0	0	50	446.294.000	0	0	0	0	0	0	50	349.641.542	50	349.641.542	50	349.641.542	100	78,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	81	2.006.144.517	80	620.761.500	1	1.376.348.570	0	0	0	0	0	0	1	1.300.045.150	1	1.300.045.150	81	1.920.806.650	100	95,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	33.799.880.000	17	241.949.000	72	18.441.760.000	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	89	241.949.000	100	0,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	02	1	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	29	97.020.000	0	0	29	97.020.000	0	0	0	0	0	0	29	66.112.000	29	66.112.000	29	66.112.000	100	68,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1	54	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	3	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS YANG MELAKSANAKAN KURIKULM MUATAN LOKAL**	**Persen**	**100**	**533.565.710**	**0**		**100**	**533.565.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**506.317.768**	**100**	**506.317.768**	**100**	**506.317.768**	**100**	**94,89**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**03**	**1**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**Persentase Satuan Pendidikan Yang Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal**	**Persen**	**100**	**239.092.800**	**0**		**100**	**239.092.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**227.391.131**	**100**	**227.391.131**	**100**	**227.391.131**	**100**	**95,11**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	03	1	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang	232	239.092.800	0	0	232	239.092.800	0	0	0	0	0	0	232	227.391.131	232	227.391.131	232	227.391.131	100	95,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**	**1**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal**	**Persen**	**100**	**294.472.910**	**0**		**100**	**294.472.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**278.926.637**	**100**	**278.926.637**	**100**	**278.926.637**	**100**	**94,72**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	03	1	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang	50	294.472.910	0	0	50	294.472.910	0	0	0	0	0	0	50	278.926.637	50	278.926.637	50	278.926.637	100	94,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**RASIO GURU DAN SISWA**	**Persen**	**100**	**262.865.942.893**	**0,04**	**506.709.090**	**99,96**	**262.307.721.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,96**	**256.627.412.824**	**99,96**	**256.627.412.824**	**100**	**257.134.121.914**	**100**	**97,82**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**04**	**1**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Rasio Guru Terhadap Peserta Didik**	**Persen**	**100**	**262.865.942.893**	**0,04**	**506.709.090**	**99,96**	**262.307.721.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,96**	**256.627.412.824**	**99,96**	**256.627.412.824**	**100**	**257.134.121.914**	**100**	**97,82**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	1	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	4695	262.541.634.055	1	229.165.090	4694	262.307.721.000	0	0	0	0	0	0	4694	256.627.412.824	4694	256.627.412.824	4695	256.856.577.914	100	97,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	1	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	1	324.308.838	1	277.544.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	277.544.000	100	85,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**	**Persen**	**100**	**94.754.078**	**0**		**100**	**94.754.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**15.668.225**	**100**	**15.668.225**	**100**	**15.668.225**	**100**	**16,54**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**05**	**1**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**	**Persen**	**100**	**94.754.078**	**0**		**100**	**94.754.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**15.668.225**	**100**	**15.668.225**	**100**	**15.668.225**	**100**	**16,54**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	05	1	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	10	94.754.078	0	0	10	94.754.078	0	0	0	0	0	0	10	15.668.225	10	15.668.225	10	15.668.225	100	16,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	1	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**05**	**1**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	05	1	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	1	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	1	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																								
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PERSENTASE PELESTARIAN KEBUDAYAAN**	**Persen**	**100**	**6.232.133.105**	**3,15**	**608.869.700**	**96,85**	**5.473.485.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,85**	**4.960.339.993**	**96,85**	**4.960.339.993**	**100**	**5.569.209.693**	**100**	**89,36**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**1**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten**	**Persen**	**100**	**2.618.759.605**	**3,33**	**608.869.700**	**96,67**	**1.860.112.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,67**	**1.629.949.093**	**96,67**	**1.629.949.093**	**100**	**2.238.818.793**	**100**	**85,49**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	3	1.571.430.873	2	379.867.000	1	1.081.200.900	0	0	0	0	0	0	1	976.189.312	1	976.189.312	3	1.356.056.312	100	86,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	117	1.047.328.732	2	229.002.700	115	778.911.400	0	0	0	0	0	0	115	653.759.781	115	653.759.781	117	882.762.481	100	84,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**1**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Peresntase Pelestarian Kesenian Tradisional**	**Persen**	**100**	**339.947.700**	**0**		**100**	**339.947.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**313.001.000**	**100**	**313.001.000**	**100**	**313.001.000**	**100**	**92,07**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	339.947.700	0	0	1	339.947.700	0	0	0	0	0	0	1	313.001.000	1	313.001.000	1	313.001.000	100	92,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**1**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional**	**Persen**	**100**	**3.273.425.800**	**0**		**100**	**3.273.425.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.017.389.900**	**100**	**3.017.389.900**	**100**	**3.017.389.900**	**100**	**92,18**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	6	3.273.425.800	0	0	6	3.273.425.800	0	0	0	0	0	0	6	3.017.389.900	6	3.017.389.900	6	3.017.389.900	100	92,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PERSENTASE PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persen**	**100**	**1.043.601.743**	**3,77**	**134.743.700**	**94,34**	**478.049.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,77**	**134.743.700**	**3,77**	**12,91**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**1**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian Kesenian Yang Msyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten**	**Persen**	**100**	**1.043.601.743**	**3,77**	**134.743.700**	**94,34**	**478.049.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,77**	**134.743.700**	**3,77**	**12,91**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	03	1	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	52	646.409.130	2	134.743.700	50	478.049.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	134.743.700	3,85	20,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	397.192.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PERSENTASE PELESTARIAN SEJARAH**	**Persen**	**100**	**3.815.393.739**	**1,89**	**1.078.641.450**	**98,11**	**2.496.872.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,11**	**2.334.446.254**	**98,11**	**2.334.446.254**	**100**	**3.413.087.704**	**100**	**89,46**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4						11(10/5*100)		
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**22**	**04**	**1**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**Persentase Pelestarian Sejarah Lokal**	**Persen**	**100**	**3.815.393.739**	**1,89**	**1.078.641.450**	**98,11**	**2.496.872.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,11**	**2.334.446.254**	**98,11**	**2.334.446.254**	**100**	**3.413.087.704**	**100**	**89,46**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	04	1	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	51	184.992.800	0	0	51	184.992.800	0	0	0	0	0	0	51	135.479.000	51	135.479.000	51	135.479.000	100	73,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	2	3.630.400.939	1	1.078.641.450	1	2.311.879.222	0	0	0	0	0	0	1	2.198.967.254	1	2.198.967.254	2	3.277.608.704	100	90,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**PERSENTASE PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**	**Persen**	**100**	**713.945.210**	**16,67**	**483.862.050**	**83,33**	**181.904.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,33**	**179.480.500**	**83,33**	**179.480.500**	**100**	**663.342.550**	**100**	**92,91**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**05**	**1**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya**	**Persen**	**100**	**181.904.800**	**0**		**100**	**181.904.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**179.480.500**	**100**	**179.480.500**	**100**	**179.480.500**	**100**	**98,67**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	05	1	01	Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	5	181.904.800	0	0	5	181.904.800	0	0	0	0	0	0	5	179.480.500	5	179.480.500	5	179.480.500	100	98,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	**1**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Perrsentase Cagar Budaya Yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**532.040.410**	**100**	**483.862.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**483.862.050**	**100**	**90,94**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	05	1	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1	532.040.410	1	483.862.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	483.862.050	100	90,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	**1**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**	**Persentase Izin Cagar Budaya di Bawa Keluar Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	05	1	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PERSENTASE PELESTARIAN MUSEUM**	**Persen**	**100**	**1.487.030.240**	**55,56**	**771.427.100**	**44,44**	**487.030.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,44**	**487.030.240**	**44,44**	**487.030.240**	**100**	**1.258.457.340**	**100**	**84,63**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**06**	**1**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	**Persentase pelestarian Museum**	**Persen**	**100**	**1.487.030.240**	**55,56**	**771.427.100**	**44,44**	**487.030.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,44**	**487.030.240**	**44,44**	**487.030.240**	**100**	**1.258.457.340**	**100**	**84,63**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	06	1	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit	5	967.214.740	2	463.176.100	3	317.214.740	0	0	0	0	0	0	3	317.214.740	3	317.214.740	5	780.390.840	100	80,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	1	120.000.000	1	90.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90.205.000	100	75,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1	169.815.500	0	0	1	169.815.500	0	0	0	0	0	0	1	169.815.500	1	169.815.500	1	169.815.500	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	1	80.000.000	1	72.826.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	72.826.500	100	91,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	1	150.000.000	1	145.219.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	145.219.500	100	96,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Persen**	**100**	**1.286.310.538.345**	**48,71**	**710.186.328.164**	**51,37**	**547.836.701.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,26**	**519.381.830.799**	**51,26**	**519.381.830.799**	**99,97**	**1.229.568.158.963**	**99,97**	**95,59**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.856.509.938**	**30,77**	**1.360.569.200**	**53,85**	**2.043.361.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,85**	**1.602.983.266**	**53,85**	**1.602.983.266**	**84,62**	**2.963.552.466**	**84,62**	**76,85**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	384.461.701	1	11.771.000	1	350.598.560	0	0	0	0	0	0	1	170.465.754	1	170.465.754	2	182.236.754	100	47,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	836.252.302	1	613.380.600	1	55.334.797	0	0	0	0	0	0	1	27.116.000	1	27.116.000	2	640.496.600	100	76,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	34.927.615	1	66.322.000	1	24.390.000	0	0	0	0	0	0	1	510.000	1	510.000	2	66.832.000	100	191,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	20.504.600	0	0	1	15.384.757	0	0	0	0	0	0	1	9.573.000	1	9.573.000	1	9.573.000	50	46,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	18.609.388	0	0	1	18.609.388	0	0	0	0	0	0	1	14.152.000	1	14.152.000	1	14.152.000	100	76,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	172.895.363	0	0	1	167.775.520	0	0	0	0	0	0	1	124.213.200	1	124.213.200	1	124.213.200	50	71,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.388.858.969	1	669.095.600	1	1.411.268.637	0	0	0	0	0	0	1	1.256.953.312	1	1.256.953.312	2	1.926.048.912	100	80,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.235.387.487.062**	**50,03**	**697.799.831.790**	**49,97**	**510.262.033.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,98**	**488.696.281.329**	**49,98**	**488.696.281.329**	**100,02**	**1.186.496.113.119**	**100,02**	**96,04**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12000	1.232.248.104.477	6000	696.596.328.377	6000	508.490.916.977	0	0	0	0	0	0	6000	486.849.234.496	6000	486.849.234.496	12000	1.183.445.562.873	100	96,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	1.905.171.948	1	632.560.792	1	1.168.002.112	0	0	0	0	0	0	1	1.056.209.433	1	1.056.209.433	2	1.688.770.225	100	88,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	115.435.866	1	31.656.400	1	80.557.440	0	0	0	0	0	0	4	316.564.000	4	316.564.000	5	348.220.400	250	301,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	21.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1	6.150.000	1	6.150.000	2	12.150.000	100	57,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	2	45.611.771	1	17.218.000	1	26.977.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.218.000	50	37,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	1.052.163.000	9	516.068.221	1	480.580.000	0	0	0	0	0	0	1	468.123.400	1	468.123.400	10	984.191.621	100	93,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**432.604.087**	**92,31**	**76.709.700**	**7,69**	**332.728.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,69**	**312.801.000**	**7,69**	**312.801.000**	**100**	**389.510.700**	**100**	**90,04**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	432.604.087	12	76.709.700	1	332.728.320	0	0	0	0	0	0	1	312.801.000	1	312.801.000	13	389.510.700	100	90,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.247.738.194**	**11,34**	**651.564.850**	**88,66**	**858.951.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,25**	**449.260.650**	**88,25**	**449.260.650**	**99,59**	**1.100.825.500**	**99,59**	**88,23**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	377	294.450.000	0	0	377	294.450.000	0	0	0	0	0	0	377	294.315.000	377	294.315.000	377	294.315.000	100	99,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	39.995.990	1	36.814.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36.814.200	100	92,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	105.668.000	2	28.048.200	1	65.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28.048.200	66,67	26,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	332.823.420	1	54.285.000	1	274.011.420	0	0	0	0	0	0	1	26.644.150	1	26.644.150	2	80.929.150	100	24,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	95.000.000	1	393.298.000	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	393.298.000	50	414	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	379.800.784	50	139.119.450	50	179.806.072	0	0	0	0	0	0	50	128.301.500	50	128.301.500	100	267.420.950	100	70,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**8.703.739.250**	**66,97**	**2.745.391.832**	**44,04**	**6.366.473.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,86**	**4.807.573.408**	**34,86**	**4.807.573.408**	**101,83**	**7.552.965.240**	**101,83**	**86,78**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	44.683.366	12	5.980.550	12	19.911.100	0	0	0	0	0	0	1	19.437.500	1	19.437.500	13	25.418.050	54,17	56,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.621.652.500	12	979.653.000	12	2.621.652.500	0	0	0	0	0	0	13	2.231.300.000	13	2.231.300.000	25	3.210.953.000	208,33	122,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39.005.000	0	0	1	39.005.000	0	0	0	0	0	0	1	35.156.000	1	35.156.000	1	35.156.000	100	90,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	1.164.532.341	12	334.413.627	3	790.722.146	0	0	0	0	0	0	3	744.272.172	3	744.272.172	15	1.078.685.799	100	92,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	1.194.386.043	12	410.709.250	2	596.749.143	0	0	0	0	0	0	2	368.429.548	2	368.429.548	14	779.138.798	100	65,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	884.640.000	1	400.303.000	5	478.156.000	0	0	0	0	0	0	5	256.620.000	5	256.620.000	6	656.923.000	100	74,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	13	311.816.000	12	160.926.000	1	113.484.000	0	0	0	0	0	0	1	69.804.000	1	69.804.000	13	230.730.000	100	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.443.024.000	12	453.406.405	12	1.706.794.000	0	0	0	0	0	0	12	1.082.554.188	12	1.082.554.188	24	1.535.960.593	100	62,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**15.274.699.983**	**25**	**3.362.383.658**	**75**	**11.640.870.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**9.225.811.775**	**50**	**9.225.811.775**	**75**	**12.588.195.433**	**75**	**82,41**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	809.150.500	2	45.062.908	5	760.000.000	0	0	0	0	0	0	1	388.500.000	1	388.500.000	3	433.562.908	42,86	53,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.615.042.802	0	0	1	2.615.042.802	0	0	0	0	0	0	1	2.254.870.000	1	2.254.870.000	1	2.254.870.000	100	86,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	11.571.176.681	2	3.317.320.750	5	7.986.497.950	0	0	0	0	0	0	5	6.308.524.775	5	6.308.524.775	7	9.625.845.525	100	83,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	279.330.000	0	0	1	279.330.000	0	0	0	0	0	0	1	273.917.000	1	273.917.000	1	273.917.000	100	98,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**14.163.048.650**	**50**	**3.542.613.668**	**50**	**9.897.351.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**8.734.352.036**	**50**	**8.734.352.036**	**100**	**12.276.965.704**	**100**	**86,68**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	78.510.000	12	48.858.000	12	25.470.000	0	0	0	0	0	0	12	18.236.000	12	18.236.000	24	67.094.000	100	85,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.388.800.604	12	482.647.568	12	847.236.304	0	0	0	0	0	0	12	602.821.174	12	602.821.174	24	1.085.468.742	100	78,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	12.695.738.046	12	3.011.108.100	12	9.024.645.108	0	0	0	0	0	0	12	8.113.294.862	12	8.113.294.862	24	11.124.402.962	100	87,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**7.244.711.181**	**50**	**647.263.466**	**50**	**6.434.930.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**5.552.767.335**	**50**	**5.552.767.335**	**100**	**6.200.030.801**	**100**	**85,58**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	199.720.000	12	176.815.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	176.815.488	100	88,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	307.388.500	0	0	12	307.388.500	0	0	0	0	0	0	12	205.675.535	12	205.675.535	12	205.675.535	100	66,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	115.422.248	12	5.000.000	12	105.620.000	0	0	0	0	0	0	12	24.441.000	12	24.441.000	24	29.441.000	100	25,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	6.084.895.345	12	395.272.528	12	5.559.734.800	0	0	0	0	0	0	12	4.877.322.800	12	4.877.322.800	24	5.272.595.328	100	86,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	537.285.088	12	70.175.450	12	462.187.000	0	0	0	0	0	0	12	445.328.000	12	445.328.000	24	515.503.450	100	95,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Lengkap (%) / Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar (%) / Persentase Penyediaan PMT Bumil KEK dan Balita (%) / Persentase	Persen	100	192.380.158.561	324,121.17	25.355.195.300	45,9	98.924.798.240	0,11	#######	0	0	1,51	11.436.572.092	65,998.38	119.012.165.422	66,000.00	130.458.737.514	390,121.17	155.813.932.814	390,121.17	80,99	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)	Persen	100	159.232.214.378	9,82	5.118.146.067	55,89	76.115.930.000	0	0	0	0	0	0	44,11	104.084.135.747	44,11	104.084.135.747	53,93	109.202.281.814	53,93	68,58	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	1.621.939.778	3	1.480.098.846			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.480.098.846	0	91,25	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	1	30.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	147.592.668.000	7	1.286.462.077	1	72.589.334.000	0	0	0	0	0	0	213	96.856.688.497	213	96.856.688.497	220	98.143.150.574	7,333.33	66,5	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	6	500.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	1	3.303.795.867	1	3.303.795.867	1	3.303.795.867	16,67	660,76	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.694.716.600	23	1.625.149.554			0	0	0	0	0	0	1	194.039.100	1	194.039.100	24	1.819.188.654	2,400.00	107,34	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	100	400.286.000	0	0	100	200.143.000	0	0	0	0	0	0	2	199.755.600	2	199.755.600	2	199.755.600	2	49,9	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	100	1.509.615.000	5	479.667.600	100	564.000.000	0	0	0	0	0	0	18	859.343.667	18	859.343.667	23	1.339.011.267	23	88,7	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	25	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	300	781.557.000	17	246.767.990	100	261.737.000	0	0	0	0	0	0	4	507.082.514	4	507.082.514	21	753.850.504	7	96,45	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	24	5.001.432.000	0	0	12	2.500.716.000	0	0	0	0	0	0	8	2.163.430.502	8	2.163.430.502	8	2.163.430.502	33,33	43,26	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Layanan UKP dan UKM Rujukan (%)	Persen	100	32.883.460.479	838,353.35	20.124.003.010	30,45	22.747.829.240	0,28	#######	0	0	3,91	11.436.572.092	170,636.31	14.760.568.675	170,640.50	26.207.140.767	1,008,993.85	46.331.143.777	1,008,993.85	140,89	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	0	0	258103	1.611.326.357			0	0	0	0	0	0	604062	108.218.000	604062	108.218.000	862165	1.719.544.357	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	2743155	10.608.754.778			0	0	0	0	0	0	6796	12.379.639.136	6796	12.379.639.136	2749951	22.988.393.914	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	3	2.253.498.703	5	796.902.068	1	632.800.000	0	0	0	0	3	428.770.203	1	230.616.000	4	659.386.203	9	1.456.288.271	300	64,62	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2	331.334.378	0	0	1	165.667.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	23.484.444.299	6	2.688.711.076	1	10.105.653.720	0	0	0	0	4	521.548.800	4	344.619.489	8	866.168.289	14	3.554.879.365	466,67	15,14	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	381.887.391	1	224.462.487	1	67.055.000	0	0	0	0	1	45.225.000	1	48.483.000	2	93.708.000	3	318.170.487	100	83,32	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	1.606.898.350	1	215.076.000	1	558.813.800	0	0	0	0	2	201.643.250	1	121.596.000	3	323.239.250	4	538.315.250	133,33	33,5	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	1.985.523.622	4	661.653.437	1	463.742.811	1	#######	0	0	1	130.039.000	1	344.600.000	3	484.639.000	7	1.146.292.437	233,33	57,73	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	51	469.591.571	17	323.149.471	17	51.390.000	0	0	0	0	0	0	5	439.606.000	5	439.606.000	22	762.755.471	43,14	162,43	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	225	200.870.000	1	77.836.000	75	76.858.000	0	0	0	0	0	0	1	71.706.000	1	71.706.000	2	149.542.000	0,89	74,45	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	50.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	34	301.097.344	0	0			0	0	0	0	0	0	1	76.606.000	1	76.606.000	1	76.606.000	2,94	25,44	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	65.000.000	1	74.285.200			0	0	0	0	2	131.919.200	0	0	2	131.919.200	3	206.204.400	300	317,24	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	3	580.000.000	3	24.115.600	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	1	73.892.000	1	73.892.000	4	98.007.600	133,33	16,9	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	2	40.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	136.105.000	1	136.105.000	1	136.105.000	50	340,26	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	2	180.400.000	0	0	1	90.200.000	0	0	0	0	0	0	1	83.236.000	1	83.236.000	1	83.236.000	50	46,14	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	16	300.000.000	0	0	4	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	18.000.000	0	0	1	9.000.000	0	0	0	0	0	0	1	13.719.050	1	13.719.050	1	13.719.050	50	76,22	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	3	634.914.821	2	129.019.460	1	250.995.000	0	0	0	0	0	0	1	287.927.000	1	287.927.000	3	416.946.460	100	65,67	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terinteorasi	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan (%)	Persen	100	143.483.704	66,67	113.046.223	33,33	13.039.000	0	0	0	0	0	0	66,67	99.945.000	66,67	99.945.000	133,33	212.991.223	133,33	148,44	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	3	143.483.704	2	113.046.223	1	13.039.000	0	0	0	0	0	0	2	99.945.000	2	99.945.000	4	212.991.223	133,33	148,44	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS milik pemerintah dengan pelayanan sesuai standar	Persen	100	121.000.000	0		40	48.000.000	0	0	0	0	0	0	360	67.516.000	360	67.516.000	360	67.516.000	360	55,8	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2	20.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	50	50	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	25.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan faskes	Laporan	2	76.000.000	0	0	1	38.000.000	0	0	0	0	0	0	17	57.516.000	17	57.516.000	17	57.516.000	850	75,68	Dinas Kesehatan
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes Sesuai Standar (%) / Tenaga Kesehatan yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan lanjutan (Orang)	Persen	100	9.441.889.650	0,04	843.161.650	0,12	4.200.500.000	0	0	0	0	0	0	50,02	6.516.575.052	50,02	6.516.575.052	50,06	7.359.736.702	50,06	77,95	Dinas Kesehatan
1	02	03	1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persen	100	85.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0	50	75.387.000	50	75.387.000	50	75.387.000	50	88,69	Dinas Kesehatan
1	02	03	1	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	18229	35.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	03	1	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	18229	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	18229	75.387.000	18229	75.387.000	18229	75.387.000	100	150,77	Dinas Kesehatan
1	02	03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK (%)	Persen	100	9.356.889.650	17,98	843.161.650	49,44	4.200.500.000	0	0	0	0	0	0	56,18	6.441.188.052	56,18	6.441.188.052	74,16	7.284.349.702	74,16	77,85	Dinas Kesehatan
1	02	03	1	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	88	9.201.000.000	14	700.000.000	44	4.200.500.000	0	0	0	0	0	0	48	6.324.054.052	48	6.324.054.052	62	7.024.054.052	70,45	76,34	Dinas Kesehatan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	02	03	1	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	155.889.650	2	143.161.650	0	0	0	0	0	0	0	0	2	117.134.000	2	117.134.000	4	260.295.650	400	166,97	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha (%)**	**Persen**	**100**	**158.132.000**	**0**	**0**	**50**	**78.132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**147.007.000**	**33,33**	**147.007.000**	**33,33**	**147.007.000**	**33,33**	**92,96**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**1**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**		**Persen**	**100**	**118.132.000**	**0**		**50**	**58.132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**147.007.000**	**50**	**147.007.000**	**50**	**147.007.000**	**50**	**124,44**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	1	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	2	20.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	1	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Dokumen	2	98.132.000	0	0	1	48.132.000	0	0	0	0	0	0	2	147.007.000	2	147.007.000	2	147.007.000	100	149,81	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**Cakupan layanan izin UKOT (%)**	**Persen**	**100**	**40.000.000**	**0**	**0**	**50**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	1	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Hapus)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	1	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	40.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)**	**Persen**	**100**	**4.188.477.500**	**2,38**	**1.299.738.000**	**47,62**	**1.421.492.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,14**	**608.845.850**	**7,14**	**608.845.850**	**9,52**	**1.908.583.850**	**9,52**	**45,57**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**1**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi, pemberdayaan dan kemitraan mendukung penerapan GERMAS (kab/Kota)**	**Persen**	**100**	**76.000.000**	**0**		**50**	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	1	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	76.000.000	0	0	1	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**1**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan penyeberan informasi dalam rangka promotif dan preventif Kesehatan**	**Persen**	**100**	**4.036.477.500**	**16,67**	**1.299.738.000**	**33,33**	**1.345.492.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,67**	**467.979.850**	**16,67**	**467.979.850**	**33,33**	**1.767.717.850**	**33,33**	**43,79**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	1	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	6	4.036.477.500	1	1.299.738.000	2	1.345.492.500	0	0	0	0	0	0	1	467.979.850	1	467.979.850	2	1.767.717.850	33,33	43,79	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**1**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Kabupate/Kota melaksanakan pembinaan psoyandu aktif**	**Persen**	**100**	**76.000.000**	**0**		**50**	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,88**	**140.866.000**	**5,88**	**140.866.000**	**5,88**	**140.866.000**	**5,88**	**185,35**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	1	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	34	76.000.000	0	0	17	38.000.000	0	0	0	0	0	0	2	140.866.000	2	140.866.000	2	140.866.000	5,88	185,35	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tata Kelola Administrasi dan Manajemen Sistem Kesehatan (%)**	**Persen**	**100**	**119.282.759.605**	**27,35**	**34.601.475.551**	**25,52**	**42.806.917.989**	**0**	**#######**	**0**	**######**	**1,66**	**2.221.086.089**	**24,89**	**45.776.842.359**	**26,55**	**48.510.519.556**	**53,9**	**83.111.995.107**	**53,9**	**69,68**	**Dinas Kesehatan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun (%)**	**Persen**	**100**	**1.030.857.623**	**40,91**	**707.008.690**	**36,36**	**163.131.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,09**	**98.335.000**	**63,64**	**1.234.422.040**	**72,73**	**1.332.757.040**	**113,64**	**2.039.765.730**	**113,64**	**197,87**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	154.534.257	4	544.200.250	3	12.019.200	0	0	0	0	0	0	8	1.154.317.040	8	1.154.317.040	12	1.698.517.290	133,33	1.099,12	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	5.650.424	2	12.152.100	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	6.791.400	1	6.791.400	3	18.943.500	100	335,26	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	19.987.600	0	0	1	9.987.600	0	0	0	0	0	0	1	7.887.600	1	7.887.600	1	7.887.600	50	39,46	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1	5.037.000	1	5.037.000	1	5.037.000	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	16.400.000	0	0	1	8.200.000	0	0	0	0	0	0	1	4.808.000	1	4.808.000	1	4.808.000	50	29,32	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	14.797.212	1	4.841.240	1	4.797.360	0	0	0	0	0	0	1	2.520.000	1	2.520.000	2	7.361.240	66,67	49,75	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	819.488.130	2	145.815.100	1	128.122.000	0	0	0	0	2	98.335.000	1	53.061.000	3	151.396.000	5	297.211.100	166,67	36,27	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan laporan kinerja keuangan yang terselesaikan tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**104.595.272.500**	**31,72**	**30.522.172.451**	**33,25**	**34.912.606.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,56**	**91.280.000**	**33,01**	**33.087.450.376**	**33,58**	**33.178.730.376**	**65,29**	**63.700.902.827**	**65,29**	**60,9**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1233	104.157.061.500	389	30.381.802.601	410	34.719.020.500	0	0	0	0	0	0	400	32.968.969.976	400	32.968.969.976	789	63.350.772.577	63,99	60,82	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	9.775.000	1	4.544.750	1	4.770.000	0	0	0	0	0	0	1	4.770.000	1	4.770.000	2	9.314.750	66,67	95,29	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	428.436.000	3	135.825.100	1	188.816.000	0	0	0	0	7	91.280.000	8	113.710.400	15	204.990.400	18	340.815.500	600	79,55	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Aministrasi Barang Milik Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**300.072.419**	**42,86**	**95.329.000**	**42,86**	**116.295.000**	**0**	**#######**	**0**	**######**	**0**	**61.928.000**	**42,86**	**122.855.000**	**42,86**	**228.143.000**	**85,71**	**323.472.000**	**85,71**	**107,8**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	92.480.000	1	19.026.000	1	46.240.000	0	########	0	######	0	30.618.000	1	45.990.000	1	103.068.000	2	122.094.000	100	132,02	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	50.250.000	1	2.500.000	1	25.125.000	0	0	0	######	0	13.550.000	1	39.435.000	1	55.485.000	2	57.985.000	100	115,39	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	157.342.419	1	73.803.000	1	44.930.000	0	0	0	######	0	17.760.000	1	37.430.000	1	69.590.000	2	143.393.000	66,67	91,13	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepesawaian Peranokat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**365.055.832**	**8,33**	**102.907.000**	**36,11**	**132.444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**627.211.187**	**275**	**627.211.187**	**283,33**	**730.118.187**	**283,33**	**200**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	2	193.388.700	2	193.388.700	2	193.388.700	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.167.832	1	90.557.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.657.000	1	25.657.000	2	116.214.000	200	116,02	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	264.888.000	2	12.350.000	13	132.444.000	0	0	0	0	0	0	26	371.851.487	26	371.851.487	28	384.201.487	80	145,04	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	70	36.314.000	70	36.314.000	70	36.314.000	0	0	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**4.595.468.040**	**29,37**	**970.621.661**	**31,14**	**1.837.800.000**	**0**	**#######**	**0**	**######**	**0**	**145.273.000**	**14,61**	**3.824.720.802**	**14,61**	**4.051.279.802**	**43,98**	**5.021.901.463**	**43,98**	**109,28**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	41.829.600	12	16.718.100	12	11.880.000	0	0	0	0	0	3.476.000	1	11.880.000	1	15.356.000	13	32.074.100	36,11	76,68	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	479.999.440	12	121.480.004	12	192.000.000	0	0	0	0	0	0	2	273.844.887	2	273.844.887	14	395.324.891	38,89	82,36	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	457.500.000	12	122.218.898	12	174.000.000	0	0	0	0	0	0	2	275.305.750	2	275.305.750	14	397.524.648	38,89	86,89	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	30.000.000	0	0	12	15.000.000	0	400.000	0	0	0	1.800.000	1	2.400.000	1	4.600.000	1	4.600.000	4,17	15,33	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	24	8.200.000	0	0	12	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	472.839.000	12	186.740.370	12	174.420.000	0	########	0	######	0	139.997.000	1	418.868.500	1	639.751.500	13	826.491.870	36,11	174,79	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1054	3.105.100.000	318	523.464.289	316	1.267.300.000	0	0	0	0	0	0	175	2.842.421.665	175	2.842.421.665	493	3.365.885.954	46,77	108,4	Dinas Kesehatan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8						9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**5.434.932.571**	**5,49**	**1.090.493.045**	**4,72**	**4.491.677.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,6**	**1.305.093.915**	**4,39**	**4.405.953.874**	**9,99**	**5.711.047.789**	**15,48**	**6.801.540.834**	**15,48**	**125,14**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	4	1.260.400.000	4	1.260.400.000	4	1.260.400.000	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	122.500.000	0	0	5	122.500.000	0	0	0	0	6	122.400.000	5	85.800.000	11	208.200.000	11	208.200.000	220	169,96	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	836	1.346.150.000	0	0	3	1.346.150.000	0	0	0	0	0	0	3	375.721.680	3	375.721.680	3	375.721.680	0,36	27,91	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	782.381.130	18	189.650.000	22	477.800.000	0	0	0	0	42	468.019.500	17	187.900.000	59	655.919.500	77	845.569.500	171,11	108,08	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.199.550.000	5	580.448.245	2	1.199.550.000	0	0	0	0	0	332.416.635	1	1.165.590.370	1	1.498.007.005	6	2.078.455.250	300	173,27	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	1.355.213.391	0	0	8	731.539.669	0	0	0	0	1	94.147.500	6	877.928.862	7	972.076.362	7	972.076.362	43,75	71,73	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	629.138.050	27	320.394.800	3	614.138.050	0	0	0	0	2	288.110.280	4	452.612.962	6	740.723.242	33	1.061.118.042	471,43	168,66	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**450.138.200**	**48**	**549.384.977**	**33,33**	**150.379.400**	**0**	**#######**	**0**	**######**	**0**	**519.176.174**	**4**	**821.388.401**	**4**	**1.728.509.683**	**52**	**2.277.894.660**	**52**	**506,04**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	90.000.000	12	7.500.000	12	30.000.000	0	0	0	0	0	3.740.000	1	18.100.000	1	21.840.000	13	29.340.000	36,11	32,6	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	299.698.200	12	526.029.977	12	99.899.400	0	#######	0	######	0	503.436.174	1	783.578.401	1	1.668.959.683	13	2.194.989.660	36,11	732,4	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	60.440.000	12	15.855.000	1	20.480.000	0	0	0	######	0	12.000.000	1	19.710.000	1	37.710.000	13	53.565.000	433,33	88,63	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**2.510.962.420**	**154,76**	**563.558.727**	**38,1**	**1.002.584.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179,76**	**1.652.840.679**	**179,76**	**1.652.840.679**	**334,52**	**2.216.399.406**	**334,52**	**88,27**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	101.500.000	43	61.000.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	61.000.774	358,33	60,1	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	455.168.420	39	102.032.953	12	227.584.210	0	0	0	0	0	0	39	416.621.209	39	416.621.209	78	518.654.162	325	113,95	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	40.000.000	0	0	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	39	16.845.000	39	16.845.000	39	16.845.000	162,5	42,11	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	1.708.944.000	6	296.714.000	4	704.500.000	0	0	0	0	0	0	5	962.198.470	5	962.198.470	11	1.258.912.470	91,67	73,67	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	205.350.000	42	103.811.000	4	50.500.000	0	0	0	0	0	0	68	257.176.000	68	257.176.000	110	360.987.000	916,67	175,79	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																								
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persen**	**100**	**82.357.861.654**	**76,32**	**67.509.492.474**	**28,95**	**4.053.601.298**	**5,26**	**#######**	**0**	**0**	**2,63**	**403.764.850**	**21,05**	**3.027.115.850**	**28,95**	**3.506.457.700**	**105,26**	**71.015.950.174**	**105,26**	**86,23**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
1	**02**	**02**	**1**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**82.357.861.654**	**76,32**	**67.509.492.474**	**28,95**	**4.053.601.298**	**5,26**	**#######**	**0**	**0**	**2,63**	**403.764.850**	**21,05**	**3.027.115.850**	**28,95**	**3.506.457.700**	**105,26**	**71.015.950.174**	**105,26**	**86,23**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
1	02	02	1	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	11	6.051.726.698	3	3.025.693.000	8	2.051.726.698	2	#######	0	0	1	403.764.850	5	1.039.202.850	8	1.518.544.700	11	4.544.237.700	100	75,09	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	1	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	25	75.563.734.956	19	48.856.669.724	3	2.001.874.600	0	0	0	0	0	0	3	1.987.913.000	3	1.987.913.000	22	50.844.582.724	88	67,29	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	1	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas layanan kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	2	742.400.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.010.843.756.483**	**48,04**	**416.574.878.172**	**24,89**	**294.175.543.600**	**6,08**	**#######**	**6,05**	**######**	**6,11**	**58.220.858.764**	**6,2**	**72.322.562.992**	**24,44**	**254.499.197.769**	**72,49**	**671.074.075.941**	**72,49**	**66,39**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**285.054.334**	**26,09**	**84.000.000**	**34,78**	**117.127.000**	**4,35**	**#######**	**4,35**	**######**	**8,7**	**24.500.000**	**17,39**	**35.500.000**	**34,78**	**111.000.000**	**60,87**	**195.000.000**	**60,87**	**68,41**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	71.702.150	0	0	2	15.000.000	0	0	0	0	0	0	2	14.215.500	2	14.215.500	2	14.215.500	25	19,83	Rumah Sakit Umum Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	3	15.246.200	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	198.105.984	6	84.000.000	6	102.127.000	1	#######	1	######	2	24.500.000	2	21.284.500	6	96.784.500	12	180.784.500	100	91,26	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Honorarium**	**Persen**	**100**	**349.597.566.349**	**48,46**	**153.087.456.571**	**24,94**	**86.693.168.526**	**6,14**	**#######**	**6,11**	**######**	**6,11**	**16.264.634.984**	**6,11**	**13.557.932.287**	**24,48**	**72.094.318.789**	**72,94**	**225.181.775.360**	**72,94**	**64,41**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3220	309.498.053.973	1566	137.441.761.319	800	85.957.900.526	197	#######	196	######	196	16.086.854.984	196	13.432.652.287	785	71.440.198.789	2351	208.881.960.108	73,01	67,49	Rumah Sakit Umum Daerah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	40.099.512.376	12	15.645.695.252	12	735.268.000	3	#######	3	######	3	177.780.000	3	125.280.000	12	654.120.000	24	16.299.815.252	66,67	40,65	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**30.126.700**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	6	30.126.700	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananyan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**270.000.000**	**0**		**100**	**270.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**270.000.000**	**100**	**270.000.000**	**100**	**270.000.000**	**100**	**100**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	270.000.000	0	0	1	270.000.000	0	0	0	0	0	0	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**720.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	720.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**100**	**659.941.009.100**	**50**	**263.403.421.601**	**25**	**207.095.248.074**	**4,17**	**#######**	**4,17**	**######**	**8,33**	**41.931.723.780**	**8,33**	**58.459.130.705**	**25**	**182.023.878.980**	**75**	**445.427.300.581**	**75**	**67,5**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan pelayanan BLUD	Kegiatan	24	659.941.009.100	12	263.403.421.601	6	207.095.248.074	1	#######	1	######	2	41.931.723.780	2	58.459.130.705	6	182.023.878.980	18	445.427.300.581	75	67,5	Rumah Sakit Umum Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																								
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan yang memenuhi standar SPM**	**Persen**	**100**	**58.387.535.000**	**27,33**	**6.572.479.971**	**33,2**	**19.326.338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,34**	**6.687.326.461**	**28,34**	**6.687.326.461**	**55,67**	**13.259.806.432**	**55,67**	**22,71**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	**02**	**02**	**1**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**53.999.285.000**	**30,27**	**6.390.101.171**	**33,25**	**17.949.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,79**	**3.071.756.676**	**27,79**	**3.071.756.676**	**58,06**	**9.461.857.847**	**58,06**	**17,52**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	16	16.963.745.000	2	2.138.724.000	5	4.787.058.000	0	0	0	0	0	0	5	342.091.500	5	342.091.500	7	2.480.815.500	43,75	14,62	Rumah Sakit Jiwa

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	02	02	1	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	35	30.737.200.000	0	0	11	10.825.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	27	1.500.000.000	0	0	9	405.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1	12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	450.000.000	14	1.234.440.600	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1.234.440.600	1,400.00	274,32	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediaka	Paket	18	1.745.000.000	4	475.429.578	6	585.000.000	0	0	0	0	0	0	6	324.319.979	6	324.319.979	10	799.749.557	55,56	45,83	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	6	235.000.000	2	79.576.928	2	75.000.000	0	0	0	0	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000	3	91.576.928	50	38,97	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	300	2.368.340.000	100	2.461.930.065	100	822.780.000	0	0	0	0	0	0	100	2.393.345.197	100	2.393.345.197	200	4.855.275.262	66,67	205,01	Rumah Sakit Jiwa
1	**02**	**02**	**1**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.872.250.000**	**33,33**	**168.796.000**	**33,33**	**1.006.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,56**	**186.600.810**	**30,56**	**186.600.810**	**63,89**	**355.396.810**	**63,89**	**12,37**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	36	2.872.250.000	12	168.796.000	12	1.006.500.000	0	0	0	0	0	0	11	186.600.810	11	186.600.810	23	355.396.810	63,89	12,37	Rumah Sakit Jiwa
1	**02**	**02**	**1**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet**	**Persen**	**100**	**626.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	1	626.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
1	**02**	**02**	**1**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**890.000.000**	**1,85**	**13.582.800**	**33,33**	**370.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,48**	**3.428.968.975**	**31,48**	**3.428.968.975**	**33,33**	**3.442.551.775**	**33,33**	**386,8**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	tersedianya Pelayanan Kesehatan yang terstandarisasi	Kegiatan	54	890.000.000	1	13.582.800	18	370.000.000	0	0	0	0	0	0	17	3.428.968.975	17	3.428.968.975	18	3.442.551.775	33,33	386,8	Rumah Sakit Jiwa
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase peningkatan sumberdaya tenaga Kesehatan**	**Persen**	**100**	**440.000.000**	**0**		**33,33**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**3.127.000**	**33,33**	**3.127.000**	**33,33**	**3.127.000**	**33,33**	**0,71**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	**02**	**03**	**1**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**440.000.000**	**0**		**33,33**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**3.127.000**	**33,33**	**3.127.000**	**33,33**	**3.127.000**	**33,33**	**0,71**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	03	1	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	9	440.000.000	0	0	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	3	3.127.000	3	3.127.000	3	3.127.000	33,33	0,71	Rumah Sakit Jiwa
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persen**	**100**	**372.000.000**	**0**		**33,33**	**124.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,33**	**7.492.500**	**17,33**	**7.492.500**	**17,33**	**7.492.500**	**17,33**	**2,01**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	**02**	**05**	**1**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**372.000.000**	**0**		**33,33**	**124.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,33**	**7.492.500**	**17,33**	**7.492.500**	**17,33**	**7.492.500**	**17,33**	**2,01**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	05	1	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	75	372.000.000	0	0	25	124.000.000	0	0	0	0	0	0	13	7.492.500	13	7.492.500	13	7.492.500	17,33	2,01	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**81.390.328.000**	**14,2**	**22.422.998.363**	**50**	**27.001.526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,5**	**24.898.381.125**	**16,5**	**24.898.381.125**	**30,7**	**47.321.379.488**	**30,7**	**58,14**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**65.100.000**	**37,5**	**14.031.050**	**25**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,5**	**23.294.500**	**37,5**	**23.294.500**	**75**	**37.325.550**	**75**	**57,34**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	50.100.000	2	11.466.300	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	19.163.250	2	19.163.250	4	30.629.550	80	61,14	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	15.000.000	1	2.564.750	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.131.250	1	4.131.250	2	6.696.000	66,67	44,64	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**65.241.222.000**	**33,33**	**19.989.163.153**	**33,33**	**21.747.014.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,1**	**21.192.986.731**	**32,1**	**21.192.986.731**	**65,43**	**41.182.149.884**	**65,43**	**63,12**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	64.877.592.000	12	19.895.779.853	12	21.625.864.000	0	0	0	0	0	0	12	21.116.666.731	12	21.116.666.731	24	41.012.446.584	66,67	63,22	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	12.000.000	1	1.118.500	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.118.500	33,33	9,32	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	42	351.630.000	14	92.264.800	14	117.150.000	0	0	0	0	0	0	14	76.320.000	14	76.320.000	28	168.584.800	66,67	47,94	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah /Aset (Persen)**	**Persen**	**100**	**191.080.000**	**5,56**	**38.160.000**	**33,33**	**63.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,56**	**38.160.000**	**5,56**	**38.160.000**	**11,11**	**76.320.000**	**11,11**	**39,94**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	18	191.080.000	1	38.160.000	6	63.660.000	0	0	0	0	0	0	1	38.160.000	1	38.160.000	2	76.320.000	11,11	39,94	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**3.720.560.000**	**0**		**75,82**	**1.245.390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,08**	**219.721.982**	**4,08**	**219.721.982**	**4,08**	**219.721.982**	**4,08**	**5,91**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	240	129.790.000	0	0	240	129.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	56	878.000.000	0	0	15	180.000.000	0	0	0	0	0	0	15	219.721.982	15	219.721.982	15	219.721.982	26,79	25,03	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	2.155.690.000	0	0	10	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	42	557.080.000	0	0	14	185.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**2.995.910.000**	**29**	**652.515.494**	**33,33**	**1.005.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,71**	**1.134.990.147**	**27,71**	**1.134.990.147**	**56,71**	**1.787.505.641**	**56,71**	**59,66**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	178.580.000	12	64.521.964	12	59.500.000	0	0	0	0	0	0	12	26.860.436	12	26.860.436	24	91.382.400	66,67	51,17	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	17.560.000	6	245.848.020	3	5.850.000	0	0	0	0	0	0	3	188.080.330	3	188.080.330	9	433.928.350	100	2.471,12	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	147.490.000	0	0	1	58.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	672.010.000	12	192.432.131	12	221.860.000	0	0	0	0	0	0	12	119.473.316	12	119.473.316	24	311.905.447	66,67	46,41	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	256.900.000	12	88.569.505	12	85.590.000	0	0	0	0	0	0	12	94.491.191	12	94.491.191	24	183.060.696	66,67	71,26	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	8.890.000	12	2.040.000	24	2.960.000	0	0	0	0	0	0	12	1.960.000	12	1.960.000	24	4.000.000	33,33	44,99	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	67.530.000	12	26.950.724	12	22.500.000	0	0	0	0	0	0	12	70.068.534	12	70.068.534	24	97.019.258	66,67	143,67	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1.646.950.000	1	32.153.150	1	548.700.000	0	0	0	0	0	0	1	634.056.340	1	634.056.340	2	666.209.490	66,67	40,45	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**2.832.626.000**	**0**		**50,2**	**860.696.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,67**	**366.098.715**	**5,67**	**366.098.715**	**5,67**	**366.098.715**	**5,67**	**12,92**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	19	505.000.000	0	0	2	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	188	1.195.610.000	0	0	108	562.030.000	0	0	0	0	0	0	9	57.009.600	9	57.009.600	9	57.009.600	4,79	4,77	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	978.786.000	0	0	10	166.166.000	0	0	0	0	0	0	4	287.999.115	4	287.999.115	4	287.999.115	13,33	29,42	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	123.230.000	0	0	3	42.500.000	0	0	0	0	0	0	1	21.090.000	1	21.090.000	1	21.090.000	14,29	17,11	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Persen**	**100**	**1.584.110.000**	**32**	**604.306.402**	**33,33**	**528.316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**653.389.270**	**32**	**653.389.270**	**64**	**1.257.695.672**	**64**	**79,39**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	10.890.000	12	5.800.000	12	4.016.000	0	0	0	0	0	0	12	4.300.000	12	4.300.000	24	10.100.000	66,67	92,75	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	634.220.000	12	277.506.402	12	211.300.000	0	0	0	0	0	0	12	217.089.270	12	217.089.270	24	494.595.672	66,67	77,98	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	78	939.000.000	24	321.000.000	26	313.000.000	0	0	0	0	0	0	24	432.000.000	24	432.000.000	48	753.000.000	61,54	80,19	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aset Milik Dearah yang terpelihara (unit)**	**Persen**	**100**	**4.759.720.000**	**28,77**	**1.124.822.264**	**31,51**	**1.540.790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,51**	**1.269.739.780**	**31,51**	**1.269.739.780**	**60,27**	**2.394.562.044**	**60,27**	**50,31**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	38.100.000	1	37.414.850	1	12.700.000	0	0	0	0	0	0	1	18.941.944	1	18.941.944	2	56.356.794	66,67	147,92	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	489.920.000	6	137.912.214	3	163.210.000	0	0	0	0	0	0	6	108.828.529	6	108.828.529	12	246.740.743	133,33	50,36	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	75.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	100.790.000	0	0	1	33.580.000	0	0	0	0	0	0	1	17.014.530	1	17.014.530	1	17.014.530	33,33	16,88	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	847.090.000	0	0	3	237.240.000	0	0	0	0	0	0	1	1.090.241.777	1	1.090.241.777	1	1.090.241.777	7,69	128,7	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	3.208.820.000	14	949.495.200	14	1.069.060.000	0	0	0	0	0	0	14	34.713.000	14	34.713.000	28	984.208.200	66,67	30,67	Rumah Sakit Jiwa
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																								
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**465.624.384.000**	**10,13**	**47.228.860.696**	**45,32**	**211.691.585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,96**	**44.580.483.607**	**17,96**	**44.580.483.607**	**28,09**	**91.809.344.303**	**28,09**	**19,72**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	**03**	**02**	**1**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perlindungan terhadap banjir dan abrasi kewenangan provinsi**	**Persen**	**100**	**284.956.491.000**	**2,16**	**20.070.650.909**	**52,17**	**139.320.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,95**	**23.053.466.340**	**2,95**	**23.053.466.340**	**5,11**	**43.124.117.249**	**5,11**	**15,13**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	02	1	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	8	6.850.000.000	0	0	5	4.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	5	4.700.000.000	0	0	5	4.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	6	9.000.000.000	0	0	3	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	7	93.597.991.000	0,357	8.822.009.490	3	44.330.000.000	0	0	0	0	0	0	0,872	12.573.923.660	0,872	12.573.923.660	1,229	21.395.933.150	17,56	22,86	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	17	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	5	35.000.000.000	0	0	2	13.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	4,5	83.883.500.000	0,883	11.248.641.419	2	41.040.000.000	0	0	0	0	0	0	0,826	10.479.542.680	0,826	10.479.542.680	1,709	21.728.184.099	37,98	25,9	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	3	27.700.000.000	0	0	2	22.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	2	3.500.000.000	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Penaaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Penaaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM	2	7.500.000.000	0	0	1	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	6	450.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	6	125.000.000	0	0	3	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**03**	**02**	**1**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas jaringan Irigasi teknis kewenangan provinsi dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**180.667.893.000**	**10,69**	**27.158.209.787**	**44,84**	**72.371.585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,02**	**21.527.017.267**	**19,02**	**21.527.017.267**	**29,71**	**48.685.227.054**	**29,71**	**26,95**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	02	1	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	16	8.462.500.000	5	2.805.226.000	5	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.805.226.000	31,25	33,15	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	53	122.049.208.000	3	19.528.687.767	25	51.260.400.000	0	0	0	0	0	0	8,132	16.566.813.987	8,132	16.566.813.987	11,132	36.095.501.754	21	29,57	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM	146	30.301.185.000	14	2.736.978.270	45	9.351.185.000	0	0	0	0	0	0	2,2	426.834.030	2,2	426.834.030	16,2	3.163.812.300	11,1	10,44	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	587	18.755.000.000	65	2.087.317.750	290	9.260.000.000	0	0	0	0	0	0	144,503	4.533.369.250	144,503	4.533.369.250	209,503	6.620.687.000	35,69	35,3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit	12	1.100.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**Persen**	**100**	**2.687.799.329.379**	**3,23**	**445.902.653.533**	**97,2**	**988.908.851.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,56**	**515.056.244.787**	**0,56**	**515.056.244.787**	**3,79**	**960.958.898.320**	**3,79**	**35,75**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	**03**	**10**	**1**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**Persentase peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**2.687.799.329.379**	**3,23**	**445.902.653.533**	**97,2**	**988.908.851.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,56**	**515.056.244.787**	**0,56**	**515.056.244.787**	**3,79**	**960.958.898.320**	**3,79**	**35,75**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	10	1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	9.300.000.000	0	0	7	4.300.000.000	0	0	0	0	0	0	4	1.037.615.000	4	1.037.615.000	4	1.037.615.000	33,33	11,16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Meter Persegi	70000	11.500.000.000	0	0	70000	11.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	2.000.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6	1.824.640.000	2	929.000.000	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	2	760.927.000	2	760.927.000	4	1.689.927.000	66,67	92,62	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	58,98	961.924.721.695	3	299.315.604.121	25,78	226.844.911.250	0	0	0	0	0	0	29,956	376.994.720.203	29,956	376.994.720.203	32,956	676.310.324.324	55,88	70,31	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	27,66	186.250.000.000	0	0	13,83	117.250.000.000	0	0	0	0	0	0	25,2	64.068.030.978	25,2	64.068.030.978	25,2	64.068.030.978	91,11	34,4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	381,14	1.310.601.743.000	33,42	111.206.830.893	165,57	530.984.000.000	0	0	0	0	0	0	24,64	50.737.919.136	24,64	50.737.919.136	58,06	161.944.750.029	15,23	12,36	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	36,56	42.694.225.000	3,98	8.322.082.975	5,78	20.166.000.000	0	0	0	0	0	0	9,67	9.651.461.240	9,67	9.651.461.240	13,65	17.973.544.215	37,34	42,1	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	138,64	7.576.262.142	234	13.101.433.494	49,32	3.205.800.000	0	0	0	0	0	0	49,5	4.919.217.505	49,5	4.919.217.505	283,5	18.020.650.999	204,49	237,86	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Meter	199	69.311.482.000	21,7	9.458.886.700	87	30.197.905.000	0	0	0	0	0	0	20,5	1.992.660.400	20,5	1.992.660.400	42,2	11.451.547.100	21,21	16,52	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Meter	257,2	80.730.426.600	10	542.651.000	123,6	41.083.035.000	0	0	0	0	0	0	14,8	4.056.659.175	14,8	4.056.659.175	24,8	4.599.310.175	9,64	5,7	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	03	10	1	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	258	1.969.140.000	0	0	58	405.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	536	527.288.942	1929,18	2.424.024.000	86	127.500.000	0	0	0	0	0	0	86	796.716.000	86	796.716.000	2015,18	3.220.740.000	375,97	610,81	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Meter	896	1.539.400.000	113,1	602.140.350	148	444.700.000	0	0	0	0	0	0	145	40.318.150	145	40.318.150	258,1	642.458.500	28,81	41,73	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Dokumen	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase SDM yang kompeten dan profesional di bidang konstruksi**	**Persen**	**100**	**1.245.000.000**	**31,34**	**0**	**31,34**	**415.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,34**	**0**	**31,34**	**0**	**62,69**	**0**	**62,69**	**0**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	**03**	**11**	**1**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Jumlah kelas pelatihan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi yang diselenggarakan**	**Persen**	**100**	**1.245.000.000**	**31,34**	**0**	**31,34**	**415.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,34**	**0**	**31,34**	**0**	**62,69**	**0**	**62,69**	**0**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	11	1	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	134	1.245.000.000	42	0	42	415.000.000	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	84	0	62,69	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)**	**Persen**	**100**	**119.781.218.469**	**31,87**	**29.256.520.268**	**34,06**	**42.815.196.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,64**	**240.217.518**	**29,01**	**28.694.584.899**	**30,66**	**28.934.802.417**	**62,53**	**58.191.322.685**	**62,53**	**48,58**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**1.202.264.237**	**33,33**	**240.580.139**	**33,33**	**436.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**587.629.790**	**33,33**	**587.629.790**	**66,67**	**828.209.929**	**66,67**	**68,89**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	600.810.101	2	70.380.739	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	2	180.399.290	2	180.399.290	4	250.780.029	66,67	41,74	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	60.364.699	1	20.166.700	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	19.225.000	1	19.225.000	2	39.391.700	66,67	65,26	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	52.866.652	1	20.166.700	1	18.000.000	0	0	0	0	0	0	1	18.719.500	1	18.719.500	2	38.886.200	66,67	73,56	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	52.886.043	1	14.805.000	1	18.000.000	0	0	0	0	0	0	1	14.820.000	1	14.820.000	2	29.625.000	66,67	56,02	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	435.336.742	2	115.061.000	2	180.000.000	0	0	0	0	0	0	2	354.466.000	2	354.466.000	4	469.527.000	66,67	107,85	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**77.660.950.483**	**33,33**	**22.604.195.915**	**33,33**	**25.914.365.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**23.344.236.241**	**33,33**	**23.344.236.241**	**66,67**	**45.948.432.156**	**66,67**	**59,17**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	909	72.795.556.500	303	21.194.163.915	303	24.265.185.500	0	0	0	0	0	0	303	21.160.285.742	303	21.160.285.742	606	42.354.449.657	66,67	58,18	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	4.126.950.000	1	1.177.450.000	1	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.808.142.500	1	1.808.142.500	2	2.985.592.500	66,67	72,34	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	41.381.132	1	7.080.000	1	16.300.000	0	0	0	0	0	0	1	7.100.000	1	7.100.000	2	14.180.000	66,67	34,27	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	31.422.851	1	5.422.000	1	11.000.000	0	0	0	0	0	0	1	7.608.000	1	7.608.000	2	13.030.000	66,67	41,47	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	665.640.000	1	220.080.000	1	221.880.000	0	0	0	0	0	0	1	361.099.999	1	361.099.999	2	581.179.999	66,67	87,31	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**885.255.000**	**12,5**	**78.165.109**	**46,88**	**500.776.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,13**	**89.312.508**	**12,5**	**506.626.960**	**15,63**	**595.939.468**	**28,13**	**674.104.577**	**28,13**	**76,15**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	552.000.000	0	0	1	184.000.000	0	0	0	0	0	0	1	466.428.000	1	466.428.000	1	466.428.000	33,33	84,5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	60.000.000	0	0	3	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23	273.255.000	3	53.375.709	10	95.000.000	0	0	0	0	0	0	3	40.198.960	3	40.198.960	6	93.574.669	26,09	34,24	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.140.267.434**	**30,08**	**1.193.835.601**	**34,96**	**1.711.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,88**	**1.000.000**	**25,2**	**1.900.605.544**	**30,08**	**1.901.605.544**	**60,16**	**3.095.441.145**	**60,16**	**60,22**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	216.052.750	12	55.046.550	12	75.000.000	0	0	0	0	0	0	12	70.336.880	12	70.336.880	24	125.383.430	66,67	58,03	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	125.000.000	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	559.967.684	12	129.892.479	12	200.000.000	0	0	0	0	0	0	12	203.310.183	12	203.310.183	24	333.202.662	66,67	59,5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	572.813.000	12	171.785.500	12	191.000.000	0	0	0	0	0	0	12	379.951.970	12	379.951.970	24	551.737.470	66,67	96,32	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	150.300.000	12	13.000.000	12	50.000.000	0	0	0	0	12	1.000.000	0	0	12	1.000.000	24	14.000.000	66,67	9,31	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	6	149.959.000	2	48.636.500	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	2	49.471.000	2	49.471.000	4	98.107.500	66,67	65,42	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	285.000.000	12	94.796.600	12	95.000.000	0	0	0	0	0	0	12	131.699.000	12	131.699.000	24	226.495.600	66,67	79,47	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	3.081.175.000	12	680.677.972	12	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	12	1.065.836.511	12	1.065.836.511	24	1.746.514.483	66,67	56,68	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**26.176.257.874**	**33,61**	**2.660.998.064**	**34,45**	**11.255.828.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,68**	**0**	**31,09**	**1.014.461.500**	**32,77**	**1.014.461.500**	**66,39**	**3.675.459.564**	**66,39**	**14,04**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	3.796.300.000	6	589.765.000	6	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	6	589.000.000	6	589.000.000	12	1.178.765.000	66,67	31,05	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	03	Pengadaa n Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	1.097.515.402	2	241.889.430	2	375.000.000	0	0	0	0	0	0	1	43.290.000	1	43.290.000	3	285.179.430	42,86	25,98	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	90	2.882.442.472	30	504.308.700	30	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	30	382.171.500	30	382.171.500	60	886.480.200	66,67	30,75	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	8.400.000.000	0	0	1	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**2.181.873.039**	**25**	**544.695.791**	**33,33**	**723.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**547.225.864**	**25**	**547.225.864**	**50**	**1.091.921.655**	**50**	**50,05**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	44.120.000	12	12.119.000	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	12	19.950.000	12	19.950.000	24	32.069.000	66,67	72,69	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.513.753.039	12	466.224.791	12	500.000.000	0	0	0	0	0	0	12	453.294.364	12	453.294.364	24	919.519.155	66,67	60,74	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	300.000.000	12	66.352.000	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	12	73.981.500	12	73.981.500	24	140.333.500	66,67	46,78	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	324.000.000	0	0	12	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**6.457.215.798**	**32,12**	**1.896.279.849**	**32,12**	**2.235.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,76**	**134.905.010**	**17,52**	**793.799.000**	**26,28**	**928.704.010**	**58,39**	**2.824.983.859**	**58,39**	**43,75**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	2.447.635.000	12	251.436.449	12	950.000.000	0	0	0	0	12	134.905.010	0	0	12	134.905.010	24	386.341.459	66,67	15,78	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	54	1.334.860.798	18	601.828.500	18	450.000.000	0	0	0	0	0	0	10	178.464.000	10	178.464.000	28	780.292.500	51,85	58,45	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	2.355.320.000	7	1.018.614.900	7	800.000.000	0	0	0	0	0	0	7	584.835.000	7	584.835.000	14	1.603.449.900	66,67	68,08	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	119.400.000	7	24.400.000	7	35.000.000	0	0	0	0	0	0	7	30.500.000	7	30.500.000	14	54.900.000	66,67	45,98	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	03				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																								
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**	**Persen**	**100**	**17.730.797.728**	**0,35**	**2.717.568.601**	**0,25**	**3.530.797.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**183.434.350**	**0,25**	**2.716.480.281**	**0,5**	**2.899.914.631**	**0,85**	**5.617.483.232**	**0,85**	**31,68**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**03**	**1**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota**	**Persen**	**100**	**17.730.797.728**	**0,35**	**2.717.568.601**	**0,25**	**3.530.797.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**183.434.350**	**0,25**	**2.716.480.281**	**0,5**	**2.899.914.631**	**0,85**	**5.617.483.232**	**0,85**	**31,68**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	03	1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	03	1	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	1005	13.200.980.550	2	458.879.000	5	3.200.980.550	0	0	0	0	5	183.434.350	5	2.716.480.281	10	2.899.914.631	12	3.358.793.631	1,19	25,44	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	03	1	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Liter/Detik	1000	3.529.817.178	5	2.258.689.601	0	329.817.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.258.689.601	0,5	63,99	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persen**	**100**	**5.902.407.554**	**16,67**	**1.007.579.000**	**20,83**	**1.498.007.554**	**12,5**	**#######**	**12,5**	**######**	**12,5**	**499.934.030**	**20,83**	**1.419.724.119**	**58,33**	**2.596.394.709**	**75**	**3.603.973.709**	**75**	**61,06**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**06**	**1**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis**	**Persen**	**100**	**5.902.407.554**	**16,67**	**1.007.579.000**	**20,83**	**1.498.007.554**	**12,5**	**#######**	**12,5**	**######**	**12,5**	**499.934.030**	**20,83**	**1.419.724.119**	**58,33**	**2.596.394.709**	**75**	**3.603.973.709**	**75**	**61,06**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	06	1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	9	1.921.530.000	4	1.007.579.000	3	687.330.000	3	#######	3	######	3	353.124.680	3	674.769.600	12	1.429.778.040	16	2.437.357.040	177,78	126,84	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	06	1	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	15	3.980.877.554	0	0	2	810.677.554	0	#######	0	######	0	146.809.350	2	744.954.519	2	1.166.616.669	2	1.166.616.669	13,33	29,31	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Cakupan pengembangan permukiman**	**Persen**	**100**	**27.414.786.527**	**23,44**	**8.132.969.956**	**84,38**	**16.887.786.527**	**0**	**#######**	**0**	**######**	**26,56**	**2.872.683.389**	**87,5**	**15.639.937.719**	**114,06**	**19.034.668.066**	**137,5**	**27.167.638.022**	**137,5**	**99,1**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**07**	**1**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Terselenggaranya Infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**27.414.786.527**	**23,44**	**8.132.969.956**	**84,38**	**16.887.786.527**	**0**	**#######**	**0**	**######**	**26,56**	**2.872.683.389**	**87,5**	**15.639.937.719**	**114,06**	**19.034.668.066**	**137,5**	**27.167.638.022**	**137,5**	**99,1**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	07	1	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sistem Jaringan	64	27.414.786.527	15	8.132.969.956	54	16.887.786.527	0	#######	0	######	17	2.872.683.389	56	15.639.937.719	73	19.034.668.066	88	27.167.638.022	137,5	99,1	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Cakupan Penataan Bangunan Gedung**	**Persen**	**100**	**727.980.194.208**	**31,31**	**223.534.427.945**	**74,75**	**330.132.194.208**	**4,04**	**#######**	**11,11**	**######**	**34,34**	**135.264.050.060**	**68,69**	**275.937.479.326**	**118,18**	**526.733.180.213**	**149,49**	**750.267.608.158**	**149,49**	**103,06**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**08**	**1**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**727.980.194.208**	**31,31**	**223.534.427.945**	**74,75**	**330.132.194.208**	**4,04**	**#######**	**11,11**	**######**	**34,34**	**135.264.050.060**	**68,69**	**275.937.479.326**	**118,18**	**526.733.180.213**	**149,49**	**750.267.608.158**	**149,49**	**103,06**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	08	1	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	67	703.914.587.342	24	221.910.840.195	47	307.276.587.342	3	#######	8	######	21	127.450.097.806	43	255.384.978.978	75	494.003.812.161	99	715.914.652.356	147,76	101,7	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	08	1	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	32	24.065.606.866	7	1.623.587.750	27	22.855.606.866	1	#######	3	######	13	7.813.952.254	25	20.552.500.348	42	32.729.368.052	49	34.352.955.802	153,13	142,75	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**Persen**	**100**	**63.226.437.789**	**48,67**	**23.642.359.469**	**53,98**	**35.364.977.789**	**1,77**	**#######**	**4,42**	**######**	**17,7**	**9.593.452.049**	**53,98**	**26.714.869.460**	**77,88**	**46.487.720.057**	**126,55**	**70.130.079.526**	**126,55**	**110,92**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**09**	**1**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategi Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten**	**Persen**	**100**	**63.226.437.789**	**48,67**	**23.642.359.469**	**53,98**	**35.364.977.789**	**1,77**	**#######**	**4,42**	**######**	**17,7**	**9.593.452.049**	**53,98**	**26.714.869.460**	**77,88**	**46.487.720.057**	**126,55**	**70.130.079.526**	**126,55**	**110,92**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	09	1	01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	4	399.663.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	399.663.000	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	09	1	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	106	60.885.058.719	49	22.216.810.379	56	34.265.058.719	2	#######	5	######	19	9.193.464.959	56	25.614.950.390	82	44.987.813.897	131	67.204.624.276	123,58	110,38	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	09	1	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	7	2.341.379.070	2	1.025.886.090	5	1.099.919.070	0	0	0	0	1	399.987.090	5	1.099.919.070	6	1.499.906.160	8	2.525.792.250	114,29	107,88	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persen**	**100**	**1.585.251.880**	**41,78**	**426.311.912**	**35,65**	**725.251.880**	**0**	**0**	**7,52**	**######**	**29,25**	**218.360.155**	**29,25**	**459.648.245**	**66,02**	**688.358.400**	**107,8**	**1.114.670.312**	**107,8**	**70,32**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**11**	**1**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Presentase Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Persen**	**100**	**647.269.980**	**54,55**	**230.378.112**	**30,07**	**247.269.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,07**	**149.375.705**	**30,07**	**185.458.305**	**60,14**	**334.834.010**	**114,69**	**565.212.122**	**114,69**	**87,32**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	11	1	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang	104	444.775.980	78	230.378.112	24	144.775.980	0	0	0	0	24	143.825.705	24	143.825.705	48	287.651.410	126	518.029.522	121,15	116,47	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	11	1	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	39	202.494.000	0	0	19	102.494.000	0	0	0	0	19	5.550.000	19	41.632.600	38	47.182.600	38	47.182.600	97,44	23,3	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	**1**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Presentase Pengadaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**541.029.200**	**60,87**	**190.869.800**	**30,43**	**241.029.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,43**	**15.237.300**	**30,43**	**189.733.990**	**60,87**	**204.971.290**	**121,74**	**395.841.090**	**121,74**	**73,16**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	11	1	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	115	541.029.200	70	190.869.800	35	241.029.200	0	0	0	0	35	15.237.300	35	189.733.990	70	204.971.290	140	395.841.090	121,74	73,16	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	**1**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**Presentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**Persen**	**100**	**396.952.700**	**1,98**	**5.064.000**	**49,5**	**236.952.700**	**0**	**0**	**26,73**	**######**	**26,73**	**53.747.150**	**26,73**	**84.455.950**	**80,2**	**148.553.100**	**82,18**	**153.617.100**	**82,18**	**38,7**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	11	1	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	52	261.470.000	2	5.064.000	27	151.470.000	0	0	27	######	27	53.747.150	27	84.455.950	81	148.553.100	83	153.617.100	159,62	58,75	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	11	1	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Laporan	49	135.482.700	0	0	23	85.482.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelenggaraan Pentaan Ruang	Persen	100	5.021.768.407	38,46	366.682.050	30,77	1.149.768.407	0	0	0	0	15,38	251.324.800	30,77	885.975.100	46,15	1.137.299.900	84,62	1.503.981.950	84,62	29,95	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persen	100	935.000.000	66,67	218.759.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,67	218.759.500	66,67	23,4	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	1	385.000.000	1	104.777.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	104.777.500	100	27,21	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2	550.000.000	1	113.982.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	113.982.000	50	20,72	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persen	100	1.932.499.741	66,67	138.222.550	33,33	749.999.741	0	0	0	0	33,33	65.043.500	33,33	597.318.500	66,67	662.362.000	133,33	800.584.550	133,33	41,43	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.052.499.741	1	116.245.850	1	749.999.741	0	0	0	0	1	65.043.500	1	597.318.500	2	662.362.000	3	778.607.850	150	73,98	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1	880.000.000	1	21.976.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.976.700	100	2,5	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persen	100	19.999.947	0		100	19.999.947	0	0	0	0	0	0	100	19.807.250	100	19.807.250	100	19.807.250	100	99,04	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	19.999.947	0	0	1	19.999.947	0	0	0	0	0	0	1	19.807.250	1	19.807.250	1	19.807.250	100	99,04	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persen	100	2.134.268.719	16,67	9.700.000	33,33	379.768.719	0	0	0	0	16,67	186.281.300	33,33	268.849.350	50	455.130.650	66,67	464.830.650	66,67	21,78	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	423.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	3	1.072.880.719	0	0	1	104.880.719	0	0	0	0	0	0	1	96.970.350	1	96.970.350	1	96.970.350	33,33	9,04	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	637.888.000	1	9.700.000	1	274.888.000	0	0	0	0	1	186.281.300	1	171.879.000	2	358.160.300	3	367.860.300	150	57,67	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen	100	20.089.190.379	11,43	12.332.397.861	52,15	15.003.650.379	5,89	########	34,78	######	34,88	9.149.155.991	39,15	14.059.747.425	114,71	32.399.923.511	126,14	44.732.321.372	126,14	222,67	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persen	100	538.965.038	42,62	264.105.756	50,82	346.665.038	22,95	########	45,9	######	52,46	207.597.275	52,46	295.019.275	173,77	655.106.550	216,39	919.212.306	216,39	170,55	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	64.427.260	2	26.205.862	2	28.127.260	2	########	2	######	2	8.396.175	2	23.548.675	8	33.924.850	10	60.130.712	250	93,33	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	16.471.755	0	0	2	11.471.755	0	0	2	######	2	4.710.600	2	9.240.100	6	14.940.700	6	14.940.700	200	90,7	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	9.448.565	0	0	1	4.448.565	0	0	0	0	0	0	1	1.216.000	1	1.216.000	1	1.216.000	50	12,87	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	16.428.030	0	0	1	11.428.030	0	0	0	0	2	2.640.500	2	7.605.500	4	10.246.000	4	10.246.000	200	62,37	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	13.899.548	0	0	1	8.899.548	0	0	0	0	2	2.250.000	1	7.955.000	3	10.205.000	3	10.205.000	150	73,42	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	23.214.080	12	19.399.894	12	8.214.080	0	0	12	######	12	2.310.000	12	7.064.000	36	10.694.000	48	30.093.894	200	129,64	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	395.075.800	12	218.500.000	12	274.075.800	12	########	12	######	12	187.290.000	12	238.390.000	48	573.880.000	60	792.380.000	250	200,56	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	9.132.490.933	49,08	7.776.192.827	49,54	8.944.335.933	43,12	########	48,62	######	48,62	6.399.602.141	48,62	8.368.655.962	188,99	21.441.559.788	238,07	29.217.752.615	238,07	319,93	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	192	8.722.977.115	94	7.636.775.301	95	8.722.977.115	94	########	94	######	94	6.384.242.141	94	8.171.685.962	376	21.215.229.788	470	28.852.005.089	244,79	330,76	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	12.194.885	1	5.486.860	1	5.539.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.486.860	50	44,99	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	397.318.933	12	133.930.666	12	215.818.933	0	0	12	######	12	15.360.000	12	196.970.000	36	226.330.000	48	360.260.666	200	90,67	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	82.880.300	50	41.124.368	50	37.505.300	25	########	50	######	50	23.084.900	50	29.084.900	175	72.769.800	225	113.894.168	225	137,42	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	16.580.300	12	11.124.368	12	7.505.300	0	0	12	######	12	6.084.900	12	6.084.900	36	12.769.800	48	23.894.168	200	144,11	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	66.300.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	########	12	######	12	17.000.000	12	23.000.000	48	60.000.000	60	90.000.000	250	135,75	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	251.970.000	16,67	87.516.000	50	122.500.000	0	0	0	0	0	0	16,67	111.055.500	16,67	111.055.500	33,33	198.571.500	33,33	78,81	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	199.620.000	1	87.516.000	1	112.500.000	0	0	0	0	0	0	1	111.055.500	1	111.055.500	2	198.571.500	100	99,47	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	52.350.000	0	0	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.405.832.170	1,44	1.511.262.690	50,01	1.888.492.170	0,71	########	34,28	######	34,28	1.071.160.085	34,31	1.762.273.335	103,59	3.849.334.220	105,03	5.360.596.910	105,03	157,39	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	188.412.720	12	122.159.160	12	79.512.720	0	0	12	######	12	45.351.635	12	63.181.635	36	125.425.270	48	247.584.430	200	131,41	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	145.216.250	12	54.216.400	12	79.876.250	12	########	12	######	12	44.842.750	12	72.277.200	48	150.922.450	60	205.138.850	250	141,26	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3304	23.003.200	0	0	1652	10.903.200	0	0	1118	######	1118	5.400.000	1118	7.380.000	3354	16.380.000	3354	16.380.000	101,51	71,21	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8						9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	189.200.000	12	47.458.000	12	68.200.000	0	0	12	######	12	15.970.000	12	20.404.000	36	48.174.000	48	95.632.000	200	50,55	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.760.000.000	12	1.187.549.130	12	1.550.000.000	12	#######	12	######	12	959.595.700	12	1.499.186.500	48	3.408.588.500	60	4.596.137.630	250	166,53	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000	1	99.880.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	99.844.000	1	99.844.000	2	199.724.000	200	199,72	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**3.115.334.700**	**93,37**	**863.944.150**	**90,82**	**1.844.834.700**	**0**	**0**	**2,04**	**######**	**2,04**	**317.800.000**	**90,82**	**1.825.697.363**	**94,9**	**2.461.297.363**	**188,27**	**3.325.241.513**	**188,27**	**106,74**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	1.252.900.000	6	677.720.000	4	418.000.000	0	0	4	######	4	317.800.000	4	407.410.000	12	1.043.010.000	18	1.720.730.000	200	137,34	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	775.954.700	15	123.028.150	12	642.854.700	0	0	0	0	0	0	12	641.825.963	12	641.825.963	27	764.854.113	117,39	98,57	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	164	1.086.480.000	162	63.196.000	162	783.980.000	0	0	0	0	0	0	162	776.461.400	162	776.461.400	324	839.657.400	197,56	77,28	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana**	**Persen**	**100**	**2.242.825.643**	**50**	**1.326.357.320**	**50**	**1.222.795.643**	**33,33**	**#######**	**50**	**######**	**50**	**873.411.940**	**50**	**1.158.317.380**	**183,33**	**2.834.943.760**	**233,33**	**4.161.301.080**	**233,33**	**185,54**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	25.371.800	12	8.491.800	12	9.641.800	0	0	12	######	12	6.000.000	12	6.000.000	36	15.000.000	48	23.491.800	200	92,59	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.133.794.943	12	790.590.520	12	492.494.943	12	#######	12	######	12	354.411.940	12	468.317.380	48	1.109.943.760	60	1.900.534.280	250	167,63	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.083.658.900	12	527.275.000	12	720.658.900	12	#######	12	######	12	513.000.000	12	684.000.000	48	1.710.000.000	60	2.237.275.000	250	206,46	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**1.318.891.595**	**34,06**	**461.894.750**	**56,52**	**596.521.595**	**55,07**	**#######**	**55,07**	**######**	**55,07**	**256.499.650**	**55,8**	**509.643.710**	**221,01**	**973.856.530**	**255,07**	**1.435.751.280**	**255,07**	**108,86**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	558.143.595	13	260.502.250	18	285.893.595	18	#######	18	######	18	151.850.170	18	279.761.880	72	567.547.220	85	828.049.470	236,11	148,36	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	44.690.000	31	14.635.000	56	20.490.000	56	#######	56	######	56	4.710.000	56	6.410.000	224	16.370.000	255	31.005.000	271,28	69,38	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	441.950.000	2	186.757.500	2	199.950.000	2	#######	2	######	2	99.939.480	2	183.283.830	8	349.751.310	10	536.508.810	250	121,4	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	274.108.000	1	0	2	90.188.000	0	0	0	0	0	0	1	40.188.000	1	40.188.000	2	40.188.000	50	14,66	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																								
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program**	**Persen**	**100**	**60.820.740.000**	**17,66**	**15.936.444.250**	**34,76**	**31.300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,04**	**6.080.407.000**	**0**	**0**	**6,04**	**6.080.407.000**	**23,7**	**22.016.851.250**	**23,7**	**36,2**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	**04**	**02**	**1**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**660.000.000**	**0**		**60**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Reloksi Korban Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	5	260.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Penerima Rumah	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	**1**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.860.740.000**	**10,91**	**264.140.000**	**20**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,91**	**264.140.000**	**10,91**	**14,2**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	150	580.000.000	30	159.650.000	30	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	159.650.000	20	27,53	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	230	740.000.000	0	0	30	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	150	440.740.000	30	104.490.000	30	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	104.490.000	20	23,71	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	20	100.000.000	0	0	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	**1**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**58.100.000.000**	**25,49**	**15.672.304.250**	**49,41**	**30.200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,75**	**6.080.407.000**	**0**	**0**	**12,75**	**6.080.407.000**	**38,24**	**21.752.711.250**	**38,24**	**37,44**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8						9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	04	02	1	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	110	5.500.000.000	0	0	35	1.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	7	700.000.000	0	0	7	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	03	Pengadaan Lahan untuk Pembnagunan Rumah bagi korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Ha	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	153	11.400.000.000	130	15.672.304.250	30	2.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	15.672.304.250	84,97	137,48	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	210	37.500.000.000	0	0	150	22.500.000.000	0	0	0	0	65	6.080.407.000	0	0	65	6.080.407.000	65	6.080.407.000	30,95	16,21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	30	3.000.000.000	0	0	30	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	**1**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**0**		**100**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	3	100.000.000	0	0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	100.000.000	0	0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Tertatanya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**Persen**	**100**	**273.929.801.985**	**45,88**	**40.918.849.637**	**49,58**	**243.375.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,15**	**5.019.206.400**	**0**	**0**	**0,15**	**5.019.206.400**	**46,02**	**45.938.056.037**	**46,02**	**16,77**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	**04**	**03**	**1**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**Persen**	**100**	**180.900.000.000**	**11,9**	**6.715.749.000**	**83,33**	**176.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,76**	**212.919.400**	**0**	**0**	**4,76**	**212.919.400**	**16,67**	**6.928.668.400**	**16,67**	**3,83**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	03	1	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	17	85.000.000.000	0	0	17	85.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	7	10.650.000.000	3	6.246.228.000	1	6.000.000.000	0	0	0	0	2	212.919.400	0	0	2	212.919.400	5	6.459.147.400	71,43	60,65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	18	85.250.000.000	2	469.521.000	17	85.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	469.521.000	11,11	0,55	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**	**1**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**Persen**	**100**	**93.029.801.985**	**46,64**	**34.203.100.637**	**48,81**	**67.375.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,04**	**4.806.287.000**	**0**	**0**	**0,04**	**4.806.287.000**	**46,69**	**39.009.387.637**	**46,69**	**41,93**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	03	1	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	49	9.904.217.048	14	8.410.185.108	9	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	8.410.185.108	28,57	84,92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	17	850.000.000	0	0	17	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	1710	28.815.585.000	834	21.546.100.000	850	19.125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	21.546.100.000	48,77	74,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	60	6.000.000.000	17	181.327.592	15	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	181.327.592	28,33	3,02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	20	47.459.999.937	0,72	4.065.487.937	15	45.000.000.000	0	0	0	0	0,78	4.806.287.000	0	0	0,78	4.806.287.000	1,5	8.871.774.937	7,5	18,69	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU	Persen	100	83.408.637.116	57,94	50.156.440.761	76,04	34.974.554.305	0	0	0	0	41,5	37.417.006.113	0	0	41,5	37.417.006.113	99,44	87.573.446.874	99,44	104,99	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU	Persen	100	83.408.637.116	57,94	50.156.440.761	76,04	34.974.554.305	0	0	0	0	41,5	37.417.006.113	0	0	41,5	37.417.006.113	99,44	87.573.446.874	99,44	104,99	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	10	3.659.459.305	19	3.669.903.733	5	1.724.554.305	0	0	0	0	7	3.849.354.000	0	0	7	3.849.354.000	26	7.519.257.733	260	205,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	348	79.699.177.811	182	46.421.396.738	268	33.250.000.000	0	0	0	0	142	33.567.652.113	0	0	142	33.567.652.113	324	79.989.048.851	93,1	100,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	50.000.000	7	65.140.290			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	65.140.290	700	130,28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	Persen	100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	06	1		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-	Persen	100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	06	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																								
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi	Persen	100	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	02	1		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	100	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	02	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan	Lokasi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	100	158.523.408.986	50	154.314.003.017	37,5	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	154.314.003.017	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	03	1		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi	Persen	100	158.523.408.986	50	154.314.003.017	37,5	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	154.314.003.017	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	03	1	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	8	158.523.408.986	4	154.314.003.017	3	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	154.314.003.017	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	11.000.000.000	0		37,5	10.200.000.000	0	0	0	0	37,5	20.248.609.169	0	0	37,5	20.248.609.169	37,5	20.248.609.169	37,5	184,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	1		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	11.000.000.000	0		37,5	10.200.000.000	0	0	0	0	37,5	20.248.609.169	0	0	37,5	20.248.609.169	37,5	20.248.609.169	37,5	184,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	6	1.000.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	1	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	2	10.000.000.000	0	0	2	10.000.000.000	0	0	0	0	3	20.248.609.169	0	0	3	20.248.609.169	3	20.248.609.169	150	202,49	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terlaksananya Program Redistribusi Tanah	Persen	100	30.000.000.000	0		100	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persen	100	10.000.000.000	0		100	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	-	Lokasi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	10.000.000.000	0	0	2	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Persen	100	20.000.000.000	0		100	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000.000	0	0	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000.000	0	0	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**07**	**1**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	07	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	07	1	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi aesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang/Undangan yang Berlaku	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**08**	**1**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	08	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**08**	**1**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	08	1	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08	1	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**10**	**1**		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	10	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**51.203.994.443**	**34,42**	**42.712.072.093**	**21,45**	**16.719.187.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,88**	**11.280.029.040**	**0,66**	**243.399.891**	**17,54**	**11.523.428.931**	**51,96**	**54.235.501.024**	**51,96**	**105,92**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	**XX**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan**	**Persen**	**100**	**886.265.113**	**58,82**	**202.485.227**	**35,29**	**246.655.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,29**	**146.655.176**	**0**	**0**	**35,29**	**146.655.176**	**94,12**	**349.140.403**	**94,12**	**39,39**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	64.986.244	7	39.992.952	5	19.993.122	0	0	0	0	5	19.993.122	0	0	5	19.993.122	12	59.986.074	109,09	92,31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	24.805.741	4	19.859.600	1	4.859.600	0	0	0	0	1	4.859.600	0	0	1	4.859.600	5	24.719.200	100	99,65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	9.892.282	1	4.946.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	4.946.141	0	0	1	4.946.141	2	9.892.282	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9.892.282	1	4.946.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	4.946.141	0	0	1	4.946.141	2	9.892.282	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	9.864.062	1	4.932.031	1	4.932.031	0	0	0	0	1	4.932.031	0	0	1	4.932.031	2	9.864.062	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	28.956.282	5	21.978.141	2	6.978.141	0	0	0	0	2	6.978.141	0	0	2	6.978.141	7	28.956.282	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	737.868.220	1	105.830.221	1	200.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	2	205.830.221	40	27,9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah gaji Pegawai yang terbayarkan**	**Persen**	**100**	**14.831.027.572**	**93,68**	**12.126.721.967**	**51,05**	**7.624.730.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,58**	**6.780.985.376**	**0,53**	**76.399.891**	**42,11**	**6.857.385.267**	**135,79**	**18.984.107.234**	**135,79**	**128**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	170	14.398.803.100	166	11.653.528.200	90	7.400.000.000	0	0	0	0	73	6.747.091.500	0	0	73	6.747.091.500	239	18.400.619.700	140,59	127,79	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	6.922.282	1	1.976.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	6.922.282	1	1.976.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	8.927.282	1	3.981.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	3.981.141	0	0	1	3.981.141	2	7.962.282	100	89,19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	21.936.512	3	11.990.371	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.990.371	0	0	1	1.990.371	4	13.980.742	80	63,73	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa	Dokumen	2	121.993.941	1	21.993.941	1	100.000.000	0	0	0	0	1	21.993.941	0	0	1	21.993.941	2	43.987.882	100	36,06	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	258.599.891	4	429.299.891	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	76.399.891	1	76.399.891	5	505.699.782	100	195,55	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	6.922.282	1	1.976.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**326.913.418**	**35,29**	**228.744.982**	**41,18**	**94.976.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,29**	**56.407.744**	**0**	**0**	**35,29**	**56.407.744**	**70,59**	**285.152.726**	**70,59**	**87,23**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.976.141	1	1.976.141	1	2.000.000	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	99,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	79.985.015	1	66.068.720	1	40.000.000	0	0	0	0	1	7.768.970	0	0	1	7.768.970	2	73.837.690	100	92,31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	3.976.141	1	1.976.141	1	2.000.000	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	99,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1.976.141	0	0	1	1.976.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	232.999.980	3	158.723.980	1	45.000.000	0	0	0	0	1	40.734.210	0	0	1	40.734.210	4	199.458.190	80	85,6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	1	1.976.141	50	98,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	1	1.976.141	50	98,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.375.861.750**	**15,34**	**577.260.875**	**13,8**	**316.305.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,09**	**201.672.567**	**0**	**0**	**12,09**	**201.672.567**	**27,44**	**778.933.442**	**27,44**	**56,61**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	3.450.000	0	0	1	1.725.000	0	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	1	1.976.141	50	57,28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1045	634.250.000	176	143.000.000	100	63.000.000	0	0	0	0	84	62.916.000	0	0	84	62.916.000	260	205.916.000	24,88	32,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2.999.808	1	1.499.904	1	1.499.904	0	0	0	0	1	1.499.904	0	0	1	1.499.904	2	2.999.808	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	24.999.942	2	402.499.971	1	2.499.971	0	0	0	0	1	2.499.971	0	0	1	2.499.971	3	404.999.942	75	1.620,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	53	250.000.000	0	0	2	10.000.000	0	0	0	0	2	2.499.971	0	0	2	2.499.971	2	2.499.971	3,77	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	64	400.162.000	10	30.261.000	5	177.581.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30.261.000	15,63	7,56	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30.000.000	0	0	30	30.000.000	0	0	0	0	30	65.140.290	0	0	30	65.140.290	30	65.140.290	100	217,13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32	30.000.000	0	0	30	30.000.000	0	0	0	0	30	65.140.290	0	0	30	65.140.290	30	65.140.290	93,75	217,13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**8.211.313.268**	**76,51**	**4.435.348.348**	**21,48**	**2.584.696.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,41**	**1.272.315.784**	**8,05**	**167.000.000**	**19,46**	**1.439.315.784**	**95,97**	**5.874.664.132**	**95,97**	**71,54**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	184.997.630	4	120.153.890	1	30.000.000	0	0	0	0	1	15.153.890	0	0	1	15.153.890	5	135.307.780	100	73,14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	454.275.000	1	85.150.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	85.150.000	20	18,74	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	315.577.220	1	178.244.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	178.244.000	50	56,48	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.175.599.505	4	883.387.958	1	500.000.000	0	0	0	0	1	336.826.864	0	0	1	336.826.864	5	1.220.214.822	100	103,8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	655.000.000	4	349.537.000	1	150.000.000	0	0	0	0	1	95.681.500	0	0	1	95.681.500	5	445.218.500	100	67,97	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	242.993.000	4	32.712.100	1	2.696.500	0	0	0	0	1	2.694.000	0	0	1	2.694.000	5	35.406.100	100	14,57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	933.000.000	48	402.900.000	12	200.000.000	0	0	0	0	0	0	12	167.000.000	12	167.000.000	60	569.900.000	100	61,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	4.147.870.913	48	2.383.263.400	12	1.200.000.000	0	0	0	0	12	819.459.559	0	0	12	819.459.559	60	3.202.722.959	100	77,21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	1	2.499.971	0	0	1	2.499.971	1	2.499.971	100	125	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Persen**	**100**	**20.329.945.096**	**38,94**	**21.869.313.560**	**32,21**	**4.366.823.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,04**	**1.579.800.000**	**0**	**0**	**24,04**	**1.579.800.000**	**62,98**	**23.449.113.560**	**62,98**	**115,34**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	17	2.516.300.000	9	1.512.300.000	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1.512.300.000	52,94	60,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	2	72.000.000	0	0	2	72.000.000	2	72.000.000	200	14,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	UMKM	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	1.457.458.500	15	87.450.000	50	300.000.000	0	0	0	0	41	89.750.000	0	0	41	89.750.000	56	177.200.000	74,67	12,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	133.646.596	16	159.192.100	4	66.823.298	0	0	0	0	5	35.000.000	0	0	5	35.000.000	21	194.192.100	175	145,3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	11.232.600.000	3	19.178.032.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19.178.032.000	100	170,74	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	2.989.940.000	12	544.339.460	5	2.000.000.000	0	0	0	0	1	238.110.000	0	0	1	238.110.000	13	782.449.460	26	26,17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.500.000.000	26	388.000.000	5	1.000.000.000	0	0	0	0	1	1.144.940.000	0	0	1	1.144.940.000	27	1.532.940.000	54	102,2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.783.498.993**	**73,33**	**1.375.847.640**	**20**	**385.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**486.498.993**	**0**	**0**	**20**	**486.498.993**	**93,33**	**1.862.346.633**	**93,33**	**104,42**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	83.500.000	4	35.207.500	1	5.000.000	0	0	0	0	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	5	38.707.500	100	46,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	799.998.993	3	759.040.140	1	200.000.000	0	0	0	0	1	167.998.993	0	0	1	167.998.993	4	927.039.133	80	115,88	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	900.000.000	4	581.600.000	1	180.000.000	0	0	0	0	1	315.000.000	0	0	1	315.000.000	5	896.600.000	100	99,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**3.459.169.233**	**63,93**	**1.896.349.494**	**27,87**	**1.100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,11**	**755.693.400**	**0**	**0**	**13,11**	**755.693.400**	**77,05**	**2.652.042.894**	**77,05**	**76,67**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	31	1.085.700.050	32	803.862.700	4	350.000.000	0	0	0	0	14	287.699.700	0	0	14	287.699.700	46	1.091.562.400	148,39	100,54	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	465.000.000	20	149.250.000	8	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	149.250.000	46,51	32,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	210.580.000	18	12.980.000	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12.980.000	47,37	6,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5	1.486.299.183	3	801.731.794	1	500.000.000	0	0	0	0	1	455.493.700	0	0	1	455.493.700	4	1.257.225.494	80	84,59	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	211.590.000	4	107.525.000	1	50.000.000	0	0	0	0	1	12.500.000	0	0	1	12.500.000	5	120.025.000	100	56,73	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	21.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.000.000	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																							
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																							
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persen**	**100**	**6.529.971.345**	**33,75**	**87.945.000**	**33,75**	**2.329.859.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,75**	**2.111.078.600**	**33,75**	**2.111.078.600**	**67,5**	**2.199.023.600**	**67,5**	**33,68**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**02**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemntapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persen**	**100**	**6.529.971.345**	**33,75**	**87.945.000**	**33,75**	**2.329.859.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,75**	**2.111.078.600**	**33,75**	**2.111.078.600**	**67,5**	**2.199.023.600**	**67,5**	**33,68**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
8	01	02	1	01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	900	6.260.666.345	300	51.043.000	300	2.179.045.950	0	0	0	0	0	0	300	2.008.721.600	300	2.008.721.600	600	2.059.764.600	66,67	32,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan	24	128.308.000	12	9.331.000	12	96.100.000	0	0	0	0	0	0	12	55.227.000	12	55.227.000	24	64.558.000	100	50,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan	36	140.997.000	12	27.571.000	12	54.714.000	0	0	0	0	0	0	12	47.130.000	12	47.130.000	24	74.701.000	66,67	52,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai p**	**Persen**	**100**	**13.963.758.227**	**33,75**	**117.823.000**	**33,75**	**5.496.607.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,25**	**218.164.000**	**32,5**	**4.550.303.350**	**33,75**	**4.768.467.350**	**67,5**	**4.886.290.350**	**67,5**	**34,99**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**03**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemili**	**Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan demokrasi pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik**	**Persen**	**100**	**13.963.758.227**	**33,75**	**117.823.000**	**33,75**	**5.496.607.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,25**	**218.164.000**	**32,5**	**4.550.303.350**	**33,75**	**4.768.467.350**	**67,5**	**4.886.290.350**	**67,5**	**34,99**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	03	1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilih	Orang	900	13.362.941.227	300	42.700.000	300	5.148.007.418	0	0	0	0	0	0	300	4.504.076.350	300	4.504.076.350	600	4.546.776.350	66,67	34,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa	Pelaksanaan koordinasi kesesuaian program antara kesbangpol provinsi dan badan kesbang pusat	Bulan	36	258.617.000	12	34.216.000	12	61.700.000	0	0	0	0	0	0	12	46.227.000	12	46.227.000	24	80.443.000	66,67	31,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Pelaksanaan monotoring evaluasi dan pelaporan kesesuain program kesbangpol provinsi dan kab/kota	Bulan	24	342.200.000	12	40.907.000	12	286.900.000	0	0	0	0	12	218.164.000	0	0	12	218.164.000	24	259.071.000	100	75,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**868.436.769**	**32,91**	**59.450.000**	**32,91**	**625.254.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,91**	**618.595.300**	**32,91**	**618.595.300**	**65,82**	**678.045.300**	**65,82**	**78,08**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**868.436.769**	**32,91**	**59.450.000**	**32,91**	**625.254.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,91**	**618.595.300**	**32,91**	**618.595.300**	**65,82**	**678.045.300**	**65,82**	**78,08**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	04	1	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	900	666.143.769	300	29.850.000	300	583.954.300	0	0	0	0	0	0	300	580.679.300	300	580.679.300	600	610.529.300	66,67	91,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan	12	61.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan	36	141.093.000	12	29.600.000	12	41.300.000	0	0	0	0	0	0	12	37.916.000	12	37.916.000	24	67.516.000	66,67	47,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi. sosial dan budaya**	**Persen**	**100**	**2.546.240.974**	**32,91**	**92.511.000**	**32,91**	**607.042.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,91**	**584.812.700**	**32,91**	**584.812.700**	**65,82**	**677.323.700**	**65,82**	**26,6**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**05**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Persen**	**100**	**2.546.240.974**	**32,91**	**92.511.000**	**32,91**	**607.042.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,91**	**584.812.700**	**32,91**	**584.812.700**	**65,82**	**677.323.700**	**65,82**	**26,6**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	05	1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperc	Orang	900	2.319.986.974	300	54.250.000	300	528.142.700	0	0	0	0	0	0	300	527.992.700	300	527.992.700	600	582.242.700	66,67	25,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Da	Bulan	36	190.154.000	12	38.261.000	12	78.900.000	0	0	0	0	0	0	12	56.820.000	12	56.820.000	24	95.081.000	66,67	50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Bulan	12	36.100.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	**Persen**	**100**	**1.385.870.790**	**6,43**	**119.491.000**	**6,43**	**179.596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,7**	**357.393.400**	**6,7**	**357.393.400**	**13,14**	**476.884.400**	**13,14**	**34,41**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**06**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanaanan konflik sosial**	**Persen**	**100**	**1.385.870.790**	**6,43**	**119.491.000**	**6,43**	**179.596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,7**	**357.393.400**	**6,7**	**357.393.400**	**13,14**	**476.884.400**	**13,14**	**34,41**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	06	1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, F	Orang	300	634.909.350	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi K	Bulan	36	308.079.000	12	32.411.000	12	88.000.000	0	0	0	0	0	0	12	64.223.000	12	64.223.000	24	96.634.000	66,67	31,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Neg	Bulan	36	291.597.000	12	87.080.000	12	91.596.000	0	0	0	0	0	0	12	146.585.200	12	146.585.200	24	233.665.200	66,67	80,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1	06	pelaksanaan forum kordinasi pimpinan daerah provinsi	terlaksananya forum kordinasi pimpinan daerah provinsi	Dokumen	1	151.285.440	0	0			0	0	0	0	0	0	1	146.585.200	1	146.585.200	1	146.585.200	100	96,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**18.816.120.079**	**30,77**	**1.275.177.862**	**30,77**	**8.656.369.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,54**	**13.600.000**	**29,23**	**7.462.843.772**	**30,77**	**7.476.443.772**	**61,54**	**8.751.621.634**	**61,54**	**46,51**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya renstra OPD dan tersusunnya Renja tahunan OPD/Renja perubahan**	**Persen**	**100**	**675.386.214**	**27,27**	**99.915.000**	**27,27**	**241.129.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,27**	**175.413.800**	**27,27**	**175.413.800**	**54,55**	**275.328.800**	**54,55**	**40,77**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8										9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	36	72.786.563	12	15.564.000	12	34.389.000	0	0	0	0	0	0	12	26.429.200	12	26.429.200	24	41.993.200	66,67	57,69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	36	444.806.000	12	77.842.000	12	199.086.000	0	0	0	0	0	0	12	144.788.000	12	144.788.000	24	222.630.000	66,67	50,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	12	3.570.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	21.210.326	12	6.509.000	12	7.654.100	0	0	0	0	0	0	12	4.196.600	12	4.196.600	24	10.705.600	66,67	50,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	133.013.325	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Persen**	**100**	**9.875.078.399**	**16,67**	**123.230.000**	**33,33**	**5.200.051.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**4.321.014.934**	**33,33**	**4.321.014.934**	**50**	**4.444.244.934**	**50**	**45**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	9.341.349.558	0	0	12	5.056.773.126	0	0	0	0	0	0	12	4.193.276.934	12	4.193.276.934	12	4.193.276.934	50	44,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	113.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	419.928.841	12	123.230.000	12	143.278.000	0	0	0	0	0	0	12	127.738.000	12	127.738.000	24	250.968.000	66,67	59,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-Terlaksananya sarana dan Prasarana Kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**381.988.875**	**20**	**31.200.000**	**20**	**110.175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**110.175.000**	**20**	**110.175.000**	**40**	**141.375.000**	**40**	**37,01**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	11.613.875	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36	221.875.000	12	31.200.000	12	110.175.000	0	0	0	0	0	0	12	110.175.000	12	110.175.000	24	141.375.000	66,67	63,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	4	koordinasi dan pelaksaan informasi kepegawaian	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	12	148.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.768.821.319**	**30,43**	**376.785.200**	**34,78**	**2.103.664.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,78**	**1.905.377.300**	**34,78**	**1.905.377.300**	**65,22**	**2.282.162.500**	**65,22**	**47,86**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	55.565.924	12	24.156.000	12	17.782.000	0	0	0	0	0	0	12	15.275.000	12	15.275.000	24	39.431.000	66,67	70,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	2.110.566.620	12	54.560.000	12	896.005.000	0	0	0	0	0	0	12	845.890.000	12	845.890.000	24	900.450.000	66,67	42,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	72.647.093	12	24.900.000	12	29.801.700	0	0	0	0	0	0	12	29.643.200	12	29.643.200	24	54.543.200	66,67	75,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	60.299.000	12	17.630.000	12	25.015.400	0	0	0	0	0	0	12	24.265.000	12	24.265.000	24	41.895.000	66,67	69,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	167.516.000	12	8.640.000	12	67.512.000	0	0	0	0	0	0	12	48.910.000	12	48.910.000	24	57.550.000	66,67	34,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	180.575.000	12	30.343.200	12	58.700.000	0	0	0	0	0	0	12	45.779.000	12	45.779.000	24	76.122.200	66,67	42,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	2.099.151.682	12	216.556.000	12	999.848.682	0	0	0	0	0	0	12	886.765.100	12	886.765.100	24	1.103.321.100	66,67	52,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	24	22.500.000	0	0	12	9.000.000	0	0	0	0	0	0	12	8.850.000	12	8.850.000	12	8.850.000	50	39,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**504.800.000**	**100**	**26.245.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**26.245.000**	**100**	**5,2**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	12	478.500.000	12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	100	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan mebel	jumlah pekat mebel yang disediakan	Paket	12	26.300.000	12	26.245.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	26.245.000	100	99,79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**853.132.596**	**33,33**	**237.616.862**	**33,33**	**248.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**232.339.438**	**33,33**	**232.339.438**	**66,67**	**469.956.300**	**66,67**	**55,09**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12.000.000	12	2.500.000	12	4.500.000	0	0	0	0	0	0	12	4.500.000	12	4.500.000	24	7.000.000	66,67	58,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	286.132.596	12	93.808.300	12	76.300.000	0	0	0	0	0	0	12	59.839.450	12	59.839.450	24	153.647.750	66,67	53,7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	555.000.000	12	141.308.562	12	168.000.000	0	0	0	0	0	0	12	167.999.988	12	167.999.988	24	309.308.550	66,67	55,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penujang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**1.756.912.676**	**33,33**	**380.185.800**	**33,33**	**752.549.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,11**	**13.600.000**	**22,22**	**718.523.300**	**33,33**	**732.123.300**	**66,67**	**1.112.309.100**	**66,67**	**63,31**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	441.914.750	12	70.752.800	12	196.668.750	0	0	0	0	0	0	12	181.664.800	12	181.664.800	24	252.417.600	66,67	57,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dioelihara/Direhabilitasi	Unit	36	1.267.347.926	12	302.663.000	12	538.681.120	0	0	0	0	0	0	12	536.858.500	12	536.858.500	24	839.521.500	66,67	66,24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	47.650.000	12	6.770.000	12	17.200.000	0	0	0	0	12	13.600.000	0	0	12	13.600.000	24	20.370.000	66,67	42,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																								
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**24.043.491.197**	**80,14**	**18.210.590.628**	**19,26**	**4.697.355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,34**	**4.447.268.309**	**19,34**	**4.447.268.309**	**99,48**	**22.657.858.937**	**99,48**	**94,24**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**02**	**1**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan**	**Persen**	**100**	**20.591.087.197**	**79,07**	**15.486.449.693**	**20,14**	**4.562.555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,24**	**4.368.503.309**	**20,24**	**4.368.503.309**	**99,31**	**19.854.953.002**	**99,31**	**96,42**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	1	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasus	750	1.690.914.470	630	1.102.389.720	150	394.000.000	0	0	0	0	0	0	180	393.878.000	180	393.878.000	810	1.496.267.720	108	88,49	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	1000	15.877.274.975	803	12.037.817.700	200	3.762.360.000	0	0	0	0	0	0	200	3.661.427.000	200	3.661.427.000	1003	15.699.244.700	100,3	98,88	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	12	50.000.000	12	15.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15.980.000	100	31,96	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	80	585.013.652	21	196.253.950	20	227.295.000	0	0	0	0	0	0	1	181.181.309	1	181.181.309	22	377.435.259	27,5	64,52	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	440.850.000	31	315.228.638	10	57.000.000	0	0	0	0	0	0	1	57.000.000	1	57.000.000	32	372.228.638	64	84,43	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	3	382.264.000	2	309.009.585	1	66.900.000	0	0	0	0	0	0	1	20.057.000	1	20.057.000	3	329.066.585	100	86,08	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	05	02	1	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	2	1.564.770.100	1	1.509.770.100	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	1	54.960.000	1	54.960.000	2	1.564.730.100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	**1**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Yang Ditegakkan**	**Persen**	**100**	**3.287.340.000**	**83,42**	**2.614.273.935**	**16,58**	**134.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,58**	**78.765.000**	**16,58**	**78.765.000**	**100**	**2.693.038.935**	**100**	**81,92**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	1	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	165.064.000	3	109.867.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	109.867.500	100	66,56	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	500	2.427.012.000	400	2.198.290.850	100	134.800.000	0	0	0	0	0	0	100	78.765.000	100	78.765.000	500	2.277.055.850	100	93,82	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	100	695.264.000	100	306.115.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	306.115.585	100	44,03	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	**1**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Persen**	**100**	**165.064.000**	**100**	**109.867.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**109.867.000**	**100**	**66,56**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	1	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Peksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1	67.350.000	1	57.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57.350.000	100	85,15	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	2	97.714.000	2	52.517.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	52.517.000	100	53,75	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Kabupaten/Kota Yang Tanggap Bencana**	**Persen**	**100**	**259.111.694**	**527,27**	**34.904.000**	**4,55**	**134.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113,64**	**126.979.044**	**113,64**	**126.979.044**	**640,91**	**161.883.044**	**640,91**	**62,48**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**03**	**1**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Rawan Bencana Provinsi**	**Persen**	**100**	**259.111.694**	**90,91**	**34.904.000**	**4,55**	**134.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,55**	**126.979.044**	**4,55**	**126.979.044**	**95,45**	**161.883.044**	**95,45**	**62,48**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	22	259.111.694	20	34.904.000	1	134.274.000	0	0	0	0	0	0	1	126.979.044	1	126.979.044	21	161.883.044	95,45	62,48	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**	**1**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Siaga dan Tanggap Bencana**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	-	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**	**1**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	50	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	10	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	07	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**	**1**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Tertata Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	50	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**04**	**1**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Tersedianya Peta Rawan Kebakaran**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	04	1	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	05	04	1	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan N	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**	**1**		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	04	1	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**69.483.973.898**	**72,22**	**50.485.129.466**	**20,78**	**14.205.870.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,71**	**13.422.345.442**	**17,71**	**13.422.345.442**	**89,93**	**63.907.474.908**	**89,93**	**91,97**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Persen**	**100**	**598.153.042**	**80**	**460.264.580**	**20**	**67.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**70.115.950**	**20**	**70.115.950**	**100**	**530.380.530**	**100**	**88,67**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	67.982.926	8	57.232.850	2	7.000.000	0	0	0	0	0	0	2	18.798.200	2	18.798.200	10	76.031.050	100	111,84	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	13.982.929	4	6.496.000	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	6.724.000	1	6.724.000	5	13.220.000	100	94,54	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	7.000.000	4	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	55.033.187	12	32.181.700	3	21.000.000	0	0	0	0	0	0	3	19.593.750	3	19.593.750	15	51.775.450	100	94,08	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	60	454.154.000	48	364.354.030	12	25.000.000	0	0	0	0	0	0	12	25.000.000	12	25.000.000	60	389.354.030	100	85,73	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Persen**	**100**	**34.515.465.098**	**80**	**26.179.421.144**	**20**	**7.245.859.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**6.539.033.314**	**20**	**6.539.033.314**	**100**	**32.718.454.458**	**100**	**94,79**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	5600	33.854.653.300	4480	25.694.266.644	1120	7.095.490.000	0	0	0	0	0	0	1120	6.390.607.264	1120	6.390.607.264	5600	32.084.873.908	100	94,77	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	500.000	48	0	12	500.000	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguilian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	565.802.191	4	431.196.000	1	121.320.000	0	0	0	0	0	0	1	121.320.000	1	121.320.000	5	552.516.000	100	97,65	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	29.632.929	4	21.106.000	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	6.724.000	1	6.724.000	5	27.830.000	100	93,92	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	64.876.678	72	32.852.500	18	21.549.000	0	0	0	0	0	0	18	20.382.050	18	20.382.050	90	53.234.550	100	82,05	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Persen**	**100**	**240.613.982**	**80**	**183.815.000**	**20**	**38.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**38.160.000**	**20**	**38.160.000**	**100**	**221.975.000**	**100**	**92,25**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	300	240.613.982	240	183.815.000	60	38.160.000	0	0	0	0	0	0	60	38.160.000	60	38.160.000	300	221.975.000	100	92,25	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.303.853.770**	**68,52**	**1.455.553.783**	**22,34**	**39.786.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,34**	**39.734.220**	**22,34**	**39.734.220**	**90,86**	**1.495.288.003**	**90,86**	**64,9**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	500	0	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	500	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2070	1.503.631.770	1234	1.036.770.500	500	39.786.000	0	0	0	0	0	0	500	39.734.220	500	39.734.220	1734	1.076.504.720	83,77	71,59	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	293	327.000.000	233	326.866.500	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	293	326.866.500	100	99,96	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	50	0	40	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	50	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	50	0	40	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	50	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	50	0	40	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	50	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	51	350.582.000	36	91.916.783	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	46	91.916.783	90,2	26,22	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	0	80	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	100	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	122.640.000	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	500	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.721.649.649**	**70,69**	**3.096.846.404**	**20,54**	**1.054.321.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,75**	**1.013.947.516**	**14,75**	**1.013.947.516**	**85,44**	**4.110.793.920**	**85,44**	**87,06**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1000	72.600.400	576	34.151.600	250	19.953.400	0	0	0	0	0	0	150	19.716.000	150	19.716.000	726	53.867.600	72,6	74,2	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	500	568.402.540	400	530.948.040	100	6.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.739.300	1	5.739.300	401	536.687.340	80,2	94,42	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	500	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	500	382.016.833	324	186.076.083	100	103.070.640	0	0	0	0	0	0	24	102.215.000	24	102.215.000	348	288.291.083	69,6	75,47	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3500	581.675.500	2640	394.524.159	700	140.564.000	0	0	0	0	0	0	540	137.974.750	540	137.974.750	3180	532.498.909	90,86	91,55	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2500	68.216.000	2000	38.230.000	500	14.436.000	0	0	0	0	0	0	500	14.400.000	500	14.400.000	2500	52.630.000	100	77,15	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	500	0	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	500	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	273.752.376	48	130.292.300	12	91.797.000	0	0	0	0	0	0	12	90.080.500	12	90.080.500	60	220.372.800	100	80,5	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2.774.986.000	48	1.782.624.222	12	678.500.000	0	0	0	0	0	0	12	643.821.966	12	643.821.966	60	2.426.446.188	100	87,44	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	60	0	48	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	60	0	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan**	**Persen**	**100**	**3.256.017.899**	**30,14**	**2.452.681.800**	**19,96**	**285.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,37**	**284.390.230**	**1,37**	**284.390.230**	**31,51**	**2.737.072.030**	**31,51**	**84,06**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	405	2.328.409.250	110	1.776.975.700	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	5	49.640.000	5	49.640.000	115	1.826.615.700	28,4	78,45	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	8	25.260.897	8	25.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25.224.000	100	99,85	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	125.300.000	0	0	1	125.300.000	0	0	0	0	0	0	1	124.791.230	1	124.791.230	1	124.791.230	100	99,59	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	528.345.000	18	524.138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	524.138.000	112,5	99,2	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	81	248.702.752	18	126.344.100	1	110.000.000	0	0	0	0	0	0	1	109.959.000	1	109.959.000	19	236.303.100	23,46	95,01	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan**	**Persen**	**100**	**21.034.803.478**	**80**	**14.930.523.863**	**20**	**4.678.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**4.648.381.307**	**20**	**4.648.381.307**	**100**	**19.578.905.170**	**100**	**93,08**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	41.980.000	48	19.525.000	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	12	9.000.000	12	9.000.000	60	28.525.000	100	67,95	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	370.981.000	48	185.336.863	12	64.145.000	0	0	0	0	0	0	12	37.301.307	12	37.301.307	60	222.638.170	100	60,01	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	137.700.000	48	84.607.000	12	21.850.000	0	0	0	0	0	0	12	19.280.000	12	19.280.000	60	103.887.000	100	75,44	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	20.484.142.478	48	14.641.055.000	12	4.582.800.000	0	0	0	0	0	0	12	4.582.800.000	12	4.582.800.000	60	19.223.855.000	100	93,85	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara**	**Persen**	**100**	**2.813.416.980**	**57,6**	**1.726.022.892**	**29,2**	**796.649.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,2**	**788.582.905**	**29,2**	**788.582.905**	**86,8**	**2.514.605.797**	**86,8**	**89,38**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	94	1.019.280.000	41	613.814.145	29	279.080.000	0	0	0	0	0	0	29	276.073.760	29	276.073.760	70	889.887.905	74,47	87,31	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	139	1.332.055.980	100	805.045.997	31	405.360.000	0	0	0	0	0	0	31	400.602.385	31	400.602.385	131	1.205.648.382	94,24	90,51	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	460.392.000	3	307.162.750	1	110.520.000	0	0	0	0	0	0	1	110.410.760	1	110.410.760	4	417.573.510	80	90,7	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	1.689.000	0	0	12	1.689.000	0	0	0	0	0	0	12	1.496.000	12	1.496.000	12	1.496.000	100	88,57	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	05				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																							
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-	**Persen**	**100**	**29.301.949.408**	**14,29**	**563.411.802**	**62,86**	**15.463.400.827**	**8,57**	#######	**20**	######	**20**	**1.777.554.611**	**37,14**	**20.504.389.830**	**85,71**	**23.196.023.431**	**100**	**23.759.435.233**	**100**	**81,08**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**3.462.140.000**	**25**	**160.906.345**	**50**	**1.781.540.000**	**25**	#######	**50**	######	**75**	**625.760.021**	**100**	**5.529.783.660**	**250**	**6.245.193.681**	**275**	**6.406.100.026**	**275**	**185,03**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	3.163.080.000	0	0	1	1.581.540.000	1	#######	1	######	2	472.147.021	3	5.360.988.660	7	5.842.635.681	7	5.842.635.681	350	184,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	2	299.060.000	1	160.906.345	1	200.000.000	0	0	1	######	1	153.613.000	1	168.795.000	3	402.558.000	4	563.464.345	200	188,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	**Persen**	**100**	**12.658.726.000**	**13,33**	**128.487.907**	**60**	**7.094.863.000**	**0**	**0**	**13,33**	######	**6,67**	**697.084.690**	**20**	**2.646.810.890**	**40**	**3.563.510.770**	**53,33**	**3.691.998.677**	**53,33**	**29,17**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	2	3.973.900.000	0	0	1	1.986.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	1	400.000.000	0	0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	2	219.000.000	1	58.300.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58.300.000	50	26,62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	-	Kegiatan	2	250.856.000	1	70.187.907	1	125.428.000	0	0	1	######	0	579.941.000	2	2.519.882.200	3	3.204.394.700	4	3.274.582.607	200	1.305,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	2	6.764.970.000	0	0	1	3.382.485.000	0	0	1	######	1	117.143.690	1	126.928.690	3	359.116.070	3	359.116.070	150	5,31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	**Persen**	**100**	**12.555.763.642**	**10**	**65.091.000**	**60**	**6.174.337.944**	**10**	#######	**20**	######	**10**	**94.439.500**	**30**	**11.668.076.860**	**70**	**11.846.789.360**	**80**	**11.911.880.360**	**80**	**94,87**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	2	279.832.000	1	65.091.000	1	150.000.000	1	#######	1	######	0	28.434.500	1	99.195.500	3	184.499.000	4	249.590.000	200	89,19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	2	683.000.000	0	0	1	341.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2	125.005.000	0	0	1	75.000.000	0	0	1	######	1	66.005.000	1	74.305.000	3	167.714.000	3	167.714.000	150	134,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	2	11.217.926.642	0	0	1	5.357.837.944	0	0	0	0	0	0	1	11.494.576.360	1	11.494.576.360	1	11.494.576.360	50	102,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	**Persen**	**100**	**625.319.766**	**16,67**	**208.926.550**	**83,33**	**412.659.883**	**16,67**	#######	**16,67**	######	**33,33**	**360.270.400**	**50**	**659.718.420**	**116,67**	**1.540.529.620**	**133,33**	**1.749.456.170**	**133,33**	**279,77**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	199.448.020	1	199.448.020	100	398,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	425.319.766	1	208.926.550	1	212.659.883	1	#######	1	######	1	260.270.400	1	260.270.400	4	1.041.081.600	5	1.250.008.150	250	293,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	1	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	200	600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**19.158.202.547**	**37,01**	**7.569.891.139**	**40,04**	**10.993.695.573**	**9,52**	#######	**20,78**	######	**34,47**	**5.505.227.292**	**57,14**	**8.372.922.430**	**121,91**	**19.338.375.707**	**158,92**	**26.908.266.846**	**158,92**	**140,45**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**53.255.944**	**40**	**13.627.972**	**60**	**29.127.972**	**30**	#######	**30**	######	**30**	**9.077.200**	**230**	**36.386.290**	**320**	**62.417.890**	**360**	**76.045.862**	**360**	**142,79**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	25.010.768	1	6.505.384	1	12.505.384	1	#######	1	######	1	4.553.200	3	8.954.240	6	21.713.840	7	28.219.224	350	112,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	3.999.438	1	499.719	1	1.999.719	0	0	0	0	0	0	17	4.482.200	17	4.482.200	18	4.981.919	900	124,57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1	14.222.350	1	14.222.350	1	14.222.350	100	568,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	9.944.828	1	3.472.414	1	4.972.414	1	#######	1	######	1	2.624.000	1	5.477.500	4	13.049.500	5	16.521.914	250	166,14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	9.300.910	1	3.150.455	1	4.650.455	1	#######	1	######	1	1.900.000	1	3.250.000	4	8.950.000	5	12.100.455	250	130,1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**10.823.675.994**	**47,46**	**4.531.080.179**	**52,54**	**5.722.411.201**	**13,56**	**#######**	**25,42**	**######**	**35,98**	**3.456.721.836**	**47,46**	**4.598.532.845**	**122,42**	**11.334.736.815**	**169,88**	**15.865.816.994**	**169,88**	**146,58**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	10.415.896.000	14	4.402.629.179	14	5.500.000.000	3	#######	7	######	11	3.365.859.836	14	4.445.440.845	35	10.992.558.815	49	15.395.187.994	175	147,8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	371.500.000	12	117.860.000	12	200.000.000	3	#######	6	######	9	84.860.000	12	143.870.000	30	314.950.000	42	432.810.000	175	116,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	9.822.402	1	3.987.000	1	4.911.201	1	#######	1	######	0,87	3.492.000	1	4.012.000	3,87	14.488.000	4,87	18.475.000	243,5	188,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	18.957.592	1	6.604.000	1	10.000.000	1	#######	1	######	0,36	2.510.000	1	5.210.000	3,36	12.740.000	4,36	19.344.000	218	102,04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**319.706.000**	**22,22**	**98.621.000**	**88,89**	**203.000.000**	**0**	**0**	**11,11**	**######**	**11,11**	**176.689.800**	**11,11**	**176.689.800**	**33,33**	**530.069.400**	**55,56**	**628.690.400**	**55,56**	**196,65**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	151.750.000	1	65.700.000	1	85.000.000	0	0	1	######	1	176.689.800	1	176.689.800	3	530.069.400	4	595.769.400	400	392,6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	124.956.000	1	32.921.000	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32.921.000	50	26,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**2.714.664.088**	**49,41**	**769.338.434**	**50,59**	**1.385.560.000**	**12,35**	**#######**	**21,18**	**######**	**37,06**	**579.970.852**	**50**	**922.153.154**	**120,59**	**2.195.332.881**	**170**	**2.964.671.315**	**170**	**109,21**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	21.897.900	12	23.566.500	12	15.000.000	3	#######	6	######	9	5.965.000	12	7.945.000	30	20.890.000	42	44.456.500	175	203,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	18.287.300	1	18.287.300	1	18.287.300	100	182,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	84.988.180	12	39.051.000	12	70.000.000	3	#######	3	######	9	8.777.500	12	15.753.500	27	30.331.000	39	69.382.000	162,5	81,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	174.969.008	12	69.284.068	12	100.000.000	3	#######	6	######	9	53.758.000	12	71.808.500	30	195.318.500	42	264.602.568	175	151,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	100.000.000	12	36.986.500	12	60.000.000	3	#######	6	######	9	30.515.000	12	44.815.000	30	105.880.000	42	142.866.500	175	142,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	21.120.000	12	4.680.000	12	10.560.000	3	#######	3	######	9	5.100.000	12	10.200.000	27	20.400.000	39	25.080.000	162,5	118,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	781.689.000	12	106.043.000	12	100.000.000	3	#######	6	######	9	93.762.563	12	122.242.563	30	329.743.852	42	435.786.852	175	55,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.500.000.000	12	489.727.366	12	1.000.000.000	3	#######	6	######	9	382.092.789	12	631.101.291	30	1.474.482.229	42	1.964.209.595	175	130,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**3.591.204.909**	**56,52**	**1.512.706.400**	**47,83**	**2.581.596.400**	**0**	**0**	**56,52**	**######**	**143,48**	**325.948.000**	**326,09**	**1.038.453.300**	**526,09**	**1.560.487.300**	**582,61**	**3.073.193.700**	**582,61**	**85,58**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	1.525.000.000	4	1.087.400.100	6	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2	73.500.000	2	73.500.000	6	1.160.900.100	85,71	76,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	126.803.595	2	36.036.000	1	101.000.000	0	0	0	0	0	0	37	184.507.600	37	184.507.600	39	220.543.600	1.950,00	173,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	259.286.634	1	68.577.800	1	200.000.000	0	0	13	######	13	196.086.000	14	220.583.700	40	612.755.700	41	681.333.500	2.050,00	262,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	561.609.180	1	242.600.000	2	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2	430.000.000	2	430.000.000	3	672.600.000	100	119,76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	268.505.500	5	78.092.500	0	130.596.400	0	0	0	0	20	129.862.000	20	129.862.000	40	259.724.000	45	337.816.500	642,86	125,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**344.549.200**	**20**	**153.453.066**	**20**	**182.000.000**	**3,33**	**#######**	**10**	**######**	**15**	**211.687.753**	**20**	**298.669.527**	**48,33**	**680.057.581**	**68,33**	**833.510.647**	**68,33**	**241,91**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	4.000.000	12	600.000	12	2.000.000	3	370.000	6	######	9	750.000	12	1.500.000	30	3.370.000	42	3.970.000	70	99,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	144.549.200	12	44.853.066	12	80.000.000	3	#######	6	######	9	75.937.753	12	117.169.527	30	271.687.581	42	316.540.647	70	218,98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	196.000.000	12	108.000.000	12	100.000.000	0	0	6	######	9	135.000.000	12	180.000.000	27	405.000.000	39	513.000.000	65	261,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**1.311.146.412**	**36,36**	**491.064.088**	**63,64**	**890.000.000**	**54,55**	**#######**	**90,91**	**######**	**100**	**745.131.851**	**145,45**	**1.302.037.514**	**390,91**	**2.975.273.840**	**427,27**	**3.466.337.928**	**427,27**	**264,37**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	289.622.445	1	55.194.000	1	200.000.000	1	#######	1	######	1	87.248.000	1	138.898.000	4	363.871.000	5	419.065.000	250	144,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	618.992.967	1	291.926.753	1	400.000.000	3	#######	6	######	9	418.649.650	12	576.678.770	30	1.636.468.945	31	1.928.395.698	1,550.00	311,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	44.350.000	1	19.193.000	1	25.000.000	1	#######	1	######	1	24.748.000	1	24.748.000	4	81.061.000	5	100.254.000	250	226,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	######	0	164.486.201	1	461.712.744	2	668.872.895	2	668.872.895	200	1,337.75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	124.750.335	1	200.000.000	1	#######	1	######	0	50.000.000	1	100.000.000	3	225.000.000	4	349.750.335	400	174,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	93.181.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																								
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial**	**Persen**	**100**	**1.074.750.000**	**25,53**	**1.024.749.000**	**74,47**	**750.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,55**	**795.770.000**	**42,55**	**795.770.000**	**68,09**	**1.820.519.000**	**68,09**	**169,39**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**1**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**75.000.000**	**0**		**100**	**75.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100.080.000**	**100**	**100.080.000**	**100**	**100.080.000**	**100**	**133,44**	**Dinas Sosial**
1	06	02	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	1	100.080.000	1	100.080.000	1	100.080.000	100	133,44	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	**1**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Terselenggaranya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Persen**	**100**	**999.750.000**	**25,81**	**1.024.749.000**	**74,19**	**675.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,94**	**695.690.000**	**41,94**	**695.690.000**	**67,74**	**1.720.439.000**	**67,74**	**172,09**	**Dinas Sosial**
1	06	02	1	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	15	125.000.000	0	0	15	125.000.000	0	0	0	0	0	0	15	100.080.000	15	100.080.000	15	100.080.000	100	80,06	Dinas Sosial
1	06	02	1	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	275.000.000	0	0	30	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	02	1	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	40	425.000.000	20	949.999.000	20	175.000.000	0	0	0	0	0	0	20	252.905.000	20	252.905.000	40	1.202.904.000	100	283,04	Dinas Sosial
1	06	02	1	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	8	174.750.000	4	74.750.000	4	100.000.000	0	0	0	0	0	0	4	342.705.000	4	342.705.000	8	417.455.000	100	238,89	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Terselenggaranya penanganan warga negara korban tindak kekerasan**	**Persen**	**100**	**306.040.000**	**50**	**21.040.000**	**50**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**21.040.000**	**50**	**6,87**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**03**	**1**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**Terselenggaranya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**306.040.000**	**50**	**21.040.000**	**50**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**21.040.000**	**50**	**6,87**	**Dinas Sosial**
1	06	03	1	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	306.040.000	10	21.040.000	10	285.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21.040.000	50	6,87	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terselenggaranya rehabilitasi Sosial PPKS terlantar**	**Persen**	**100**	**3.494.933.000**	**31,12**	**1.394.932.000**	**68,28**	**2.100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,68**	**1.838.939.750**	**36,68**	**1.838.939.750**	**67,8**	**3.233.871.750**	**67,8**	**92,53**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**04**	**1**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**47.699.000**	**1,02**	**10.000.000**	**98,98**	**37.699.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,63**	**26.105.750**	**31,63**	**26.105.750**	**32,65**	**36.105.750**	**32,65**	**75,69**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	30	4.000.000	0	0	30	4.000.000	0	0	0	0	0	0	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	100	625	Dinas Sosial
1	06	04	1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	30	5.000.000	0	0	30	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	30	5.000.000	0	0	30	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	3	4.199.000	0	0	3	4.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	3	11.000.000	0	0	3	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	2	18.500.000	1	10.000.000	1	8.500.000	0	0	0	0	0	0	1	1.105.750	1	1.105.750	2	11.105.750	100	60,03	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Persen**	**100**	**3.247.375.000**	**36,81**	**1.350.073.000**	**63,19**	**1.897.301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,07**	**1.714.724.000**	**42,07**	**1.714.724.000**	**78,89**	**3.064.797.000**	**78,89**	**94,38**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1	01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	140	246.320.000	70	125.600.000	70	120.720.000	0	0	0	0	0	0	70	77.705.000	70	77.705.000	140	203.305.000	100	82,54	Dinas Sosial
1	06	04	1	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.817.200.000	70	826.000.000	70	991.200.000	0	0	0	0	0	0	70	826.000.000	70	826.000.000	140	1.652.000.000	100	90,91	Dinas Sosial
1	06	04	1	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	150.620.000	70	68.420.000	70	82.200.000	0	0	0	0	0	0	70	68.600.000	70	68.600.000	140	137.020.000	100	90,97	Dinas Sosial
1	06	04	1	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	290.697.000	70	40.697.000	70	250.000.000	0	0	0	0	0	0	70	540.993.000	70	540.993.000	140	581.690.000	100	200,1	Dinas Sosial

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	06	04	1	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	140	96.707.000	70	47.867.000	70	48.840.000	0	0	0	0	0	0	70	21.280.000	70	21.280.000	140	69.147.000	100	71,5	Dinas Sosial
1	06	04	1	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	133.931.000	70	76.490.000	70	57.441.000	0	0	0	0	0	0	70	47.500.000	70	47.500.000	140	123.990.000	100	92,58	Dinas Sosial
1	06	04	1	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provins	Orang	70	91.400.000	0	0	70	91.400.000	0	0	0	0	0	0	70	72.646.000	70	72.646.000	70	72.646.000	100	79,48	Dinas Sosial
1	06	04	1	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	140	175.000.000	70	164.999.000	70	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	164.999.000	50	94,29	Dinas Sosial
1	06	04	1	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	198.000.000	0	0	70	198.000.000	0	0	0	0	0	0	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	100	30,3	Dinas Sosial
1	06	04	1	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	15.000.000	0	0	70	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	10.000.000	0	0	70	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Penggganti Kewenangan Provinsi	Orang	70	7.500.000	0	0	70	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**89.859.000**	**22,9**	**34.859.000**	**77,1**	**55.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,58**	**38.110.000**	**4,58**	**38.110.000**	**27,48**	**72.969.000**	**27,48**	**81,2**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	30	10.000.000	0	0	30	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	30	5.000.000	0	0	30	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	30	15.000.000	0	0	30	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	5	5.000.000	0	0	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5	27.060.000	5	27.060.000	5	27.060.000	100	541,2	Dinas Sosial
1	06	04	1	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari Kewenangan Provinsi	Orang	30	34.859.000	30	34.859.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	34.859.000	100	100	Dinas Sosial
1	06	04	1	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	5	8.000.000	0	0	5	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	12.000.000	0	0	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	11.050.000	1	11.050.000	1	11.050.000	100	92,08	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**57.000.000**	**0**		**85,07**	**57.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,88**	**50.000.000**	**23,88**	**50.000.000**	**23,88**	**50.000.000**	**23,88**	**87,72**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	15	5.000.000	0	0	15	5.000.000	0	0	0	0	0	0	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	100	500	Dinas Sosial
1	06	04	1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	15	5.000.000	0	0	15	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	3	12.000.000	0	0	3	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	15	5.000.000	0	0	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	3	8.000.000	0	0	3	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	15	10.000.000	0	0	15	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	1	12.000.000	0	0	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100	208,33	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1,1**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**53.000.000**	**0**		**100**	**53.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,13**	**10.000.000**	**2,13**	**10.000.000**	**2,13**	**10.000.000**	**2,13**	**18,87**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1,1	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	10	3.000.000	0	0	10	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	10	3.000.000	0	0	10	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,1	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	3	10.000.000	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,1	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	10	7.000.000	0	0	10	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,1	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	3	10.000.000	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,1	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	10	10.000.000	0	0	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,1	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang di lindungi, diberi jaminan sosial**	**Persen**	**100**	**465.000.000**	**0**		**100**	**465.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**544.327.000**	**60**	**544.327.000**	**60**	**544.327.000**	**60**	**117,06**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**1**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**Persen**	**100**	**22.500.000**	**0**		**100**	**22.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**23.715.000**	**50**	**23.715.000**	**50**	**23.715.000**	**50**	**105,4**	**Dinas Sosial**
1	06	05	1	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	6	15.000.000	0	0	6	15.000.000	0	0	0	0	0	0	6	23.715.000	6	23.715.000	6	23.715.000	100	158,1	Dinas Sosial
1	06	05	1	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	6	7.500.000	0	0	6	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	**1**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**442.500.000**	**0**		**100**	**442.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**520.612.000**	**66,67**	**520.612.000**	**66,67**	**520.612.000**	**66,67**	**117,65**	**Dinas Sosial**
1	06	05	1	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	6	147.500.000	0	0	6	147.500.000	0	0	0	0	0	0	6	487.000.000	6	487.000.000	6	487.000.000	100	330,17	Dinas Sosial
1	06	05	1	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	6	155.000.000	0	0	6	155.000.000	0	0	0	0	0	0	6	33.612.000	6	33.612.000	6	33.612.000	100	21,69	Dinas Sosial
1	06	05	1	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	6	140.000.000	0	0	6	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Terselenggaranya Penanganan Bencana Alam**	**Persen**	**100**	**661.772.000**	**32,88**	**1.385.950.000**	**34,24**	**225.821.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,08**	**185.575.135**	**33,08**	**185.575.135**	**65,97**	**1.571.525.135**	**65,97**	**237,47**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**06**	**1**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Persen**	**100**	**661.772.000**	**32,88**	**1.385.950.000**	**34,24**	**225.821.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,08**	**185.575.135**	**33,08**	**185.575.135**	**65,97**	**1.571.525.135**	**65,97**	**237,47**	**Dinas Sosial**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	06	06	1	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	2906	441.772.000	1453	1.385.950.000	1453	155.821.000	0	0	0	0	0	0	1453	34.200.000	1453	34.200.000	2906	1.420.150.000	100	321,47	Dinas Sosial
1	06	06	1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1453	150.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	06	1	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	51	30.000.000	0	0	51	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
1	06	06	1	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	6	25.000.000	0	0	6	25.000.000	0	0	0	0	0	0	6	1.467.135	6	1.467.135	6	1.467.135	100	5,87	Dinas Sosial
1	06	06	1	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	3	15.000.000	0	0	3	15.000.000	0	0	0	0	0	0	3	149.908.000	3	149.908.000	3	149.908.000	100	999,39	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persen**	**100**	**1.068.743.000**	**49,32**	**393.053.000**	**50,68**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,32**	**166.632.000**	**49,32**	**166.632.000**	**98,65**	**559.685.000**	**98,65**	**52,37**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**07**	**1**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.068.743.000**	**49,32**	**393.053.000**	**50,68**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,32**	**166.632.000**	**49,32**	**166.632.000**	**98,65**	**559.685.000**	**98,65**	**52,37**	**Dinas Sosial**
1	06	07	1	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	358.871.000	1	33.998.000	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	1	15.580.000	1	15.580.000	2	49.578.000	100	13,81	Dinas Sosial
1	06	07	1	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	144	644.872.000	72	359.055.000	72	95.000.000	0	0	0	0	0	0	72	151.052.000	72	151.052.000	144	510.107.000	100	79,1	Dinas Sosial
1	06	07	1	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	2	65.000.000	0	0	2	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**26.496.768.000**	**14,9**	**11.450.499.000**	**81,46**	**14.544.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,89**	**12.644.448.000**	**15,89**	**12.644.448.000**	**30,79**	**24.094.947.000**	**30,79**	**90,94**	**Dinas Sosial**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**562.004.000**	**36,36**	**123.926.000**	**54,55**	**426.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,45**	**788.135.000**	**45,45**	**788.135.000**	**81,82**	**912.061.000**	**81,82**	**162,29**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	262.477.000	1	13.787.000	1	256.000.000	0	0	0	0	0	0	1	226.814.000	1	226.814.000	2	240.601.000	100	91,67	Dinas Sosial
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	139.028.000	1	53.302.000	1	75.840.000	0	0	0	0	0	0	1	2.639.000	1	2.639.000	2	55.941.000	100	40,24	Dinas Sosial
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1	8.269.000	1	8.269.000	1	8.269.000	100	55,13	Dinas Sosial
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000	0	0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	14.299.000	1	6.499.000	1	7.800.000	0	0	0	0	0	0	1	5.473.000	1	5.473.000	2	11.972.000	100	83,73	Dinas Sosial
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	117.700.000	1	50.338.000	1	64.200.000	0	0	0	0	0	0	1	544.940.000	1	544.940.000	2	595.278.000	100	505,76	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**20.377.341.000**	**50**	**9.274.521.000**	**50**	**10.224.387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**9.889.660.000**	**50**	**9.889.660.000**	**100**	**19.164.181.000**	**100**	**94,05**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	19.735.901.000	12	8.977.399.000	12	9.867.950.000	0	0	0	0	0	0	12	9.564.253.000	12	9.564.253.000	24	18.541.652.000	100	93,95	Dinas Sosial
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	302.498.000	1	131.617.000	1	165.000.000	0	0	0	0	0	0	1	162.360.000	1	162.360.000	2	293.977.000	100	97,18	Dinas Sosial
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	7.146.000	1	3.246.000	1	3.900.000	0	0	0	0	0	0	1	3.900.000	1	3.900.000	2	7.146.000	100	100	Dinas Sosial
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	331.796.000	1	162.259.000	1	187.537.000	0	0	0	0	0	0	1	159.147.000	1	159.147.000	2	321.406.000	100	96,87	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**227.000.000**	**0**		**100**	**227.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	4.500.000	0	0	1	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	130.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	40.500.000	0	0	1	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12.000.000	0	0	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**13.000.000**	**0**		**100**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	6.500.000	0	0	1	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**533.198.000**	**1,07**	**130.033.000**	**93,58**	**460.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,07**	**207.838.000**	**1,07**	**207.838.000**	**2,14**	**337.871.000**	**2,14**	**63,37**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	45.000.000	0	0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	150.000.000	0	0	150	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	85.000.000	0	0	10	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	198.198.000	2	130.033.000	4	135.000.000	0	0	0	0	0	0	2	207.838.000	2	207.838.000	4	337.871.000	66,67	170,47	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	55.000.000	0	0	10	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.572.119.000**	**37,5**	**563.710.000**	**62,5**	**995.942.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,75**	**827.580.000**	**43,75**	**827.580.000**	**81,25**	**1.391.290.000**	**81,25**	**88,5**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	18.480.000	1	8.400.000	1	10.080.000	0	0	0	0	0	0	1	9.560.000	1	9.560.000	2	17.960.000	100	97,19	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	125.000.000	0	0	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.280.000	1	3.280.000	1	3.280.000	100	2,62	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	39.599.000	1	17.999.000	1	21.600.000	0	0	0	0	0	0	1	14.990.000	1	14.990.000	2	32.989.000	100	83,31	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	26.400.000	1	12.000.000	1	14.400.000	0	0	0	0	0	0	1	39.072.000	1	39.072.000	2	51.072.000	100	193,45	Dinas Sosial

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	24.640.000	1	9.085.000	1	13.442.000	0	0	0	0	0	0	1	10.800.000	1	10.800.000	2	19.885.000	100	80,7	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	87.110.000	1	39.590.000	1	47.520.000	0	0	0	0	0	0	1	48.040.000	1	48.040.000	2	87.630.000	100	100,6	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1.071.390.000	1	476.636.000	1	584.400.000	0	0	0	0	0	0	1	701.838.000	1	701.838.000	2	1.178.474.000	100	109,99	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.356.161.000**	**20**	**192.603.000**	**80**	**1.270.713.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**129.600.000**	**20**	**129.600.000**	**40**	**322.203.000**	**40**	**23,76**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	415.000.000	0	0	1	415.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	280.000.000	0	0	1	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	84.707.000	1	13.994.000	1	70.713.000	0	0	0	0	0	0	1	21.500.000	1	21.500.000	2	35.494.000	100	41,9	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	86.454.000	1	178.609.000	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1	108.100.000	1	108.100.000	2	286.709.000	100	331,63	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	215.000.000	0	0	1	215.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	175.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**453.611.000**	**33,33**	**141.543.000**	**66,67**	**306.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**154.610.000**	**33,33**	**154.610.000**	**66,67**	**296.153.000**	**66,67**	**65,29**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	121.318.000	1	4.750.000	1	111.118.000	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	2	19.750.000	100	16,28	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	266.793.000	1	136.793.000	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	1	139.610.000	1	139.610.000	2	276.403.000	100	103,6	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenokapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	40.500.000	0	0	1	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.402.334.000**	**42,42**	**1.024.163.000**	**57,58**	**620.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,45**	**647.025.000**	**45,45**	**647.025.000**	**87,88**	**1.671.188.000**	**87,88**	**119,17**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	117.998.000	12	264.436.000	12	75.000.000	0	0	0	0	0	0	12	85.544.000	12	85.544.000	24	349.980.000	100	296,6	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	125.000.000	0	0	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.500.000	0	0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.500.000	0	0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	545.744.000	1	510.696.000	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	1	195.995.000	1	195.995.000	2	706.691.000	100	129,49	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	428.592.000	1	249.031.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	165.993.000	1	165.993.000	2	415.024.000	100	96,83	Dinas Sosial
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	165.000.000	0	0	1	165.000.000	0	0	0	0	0	0	1	199.493.000	1	199.493.000	1	199.493.000	100	120,9	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																								
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peningkatan tenaga kerja yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya**	**Persen**	**100**	**1.618.672.000**	**14,55**	**150.000.000**	**65,45**	**939.667.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,45**	**907.460.530**	**65,45**	**907.460.530**	**80**	**1.057.460.530**	**80**	**65,33**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**03**	**1**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi peningkatan kompetensi dan produktivitasnya**	**Persen**	**100**	**1.543.672.000**	**16**	**150.000.000**	**72**	**939.667.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**907.460.530**	**72**	**907.460.530**	**88**	**1.057.460.530**	**88**	**68,5**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	03	1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	250	1.543.672.000	40	150.000.000	180	939.667.000	0	0	0	0	0	0	180	907.460.530	180	907.460.530	220	1.057.460.530	88	68,5	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**1**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**-**	**Persen**	**100**	**75.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	03	1	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	25	75.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan, difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri**	**Persen**	**100**	**1.270.629.033**	**46,15**	**615.871.400**	**32,42**	**486.602.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,06**	**184.242.750**	**32,31**	**389.343.330**	**32,38**	**573.586.080**	**78,53**	**1.189.457.480**	**78,53**	**93,61**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**04**	**1**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah layanan informasi pasar kerja**	**Persen**	**100**	**599.854.188**	**46,19**	**312.834.400**	**32,38**	**184.535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,34**	**177.415.900**	**32,34**	**177.415.900**	**78,53**	**490.250.300**	**78,53**	**81,73**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	04	1	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	74325	469.854.188	36639	312.834.400	20686	54.535.000	0	0	0	0	0	0	20686	51.033.900	20686	51.033.900	57325	363.868.300	77,13	77,44	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	1	03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	5000	130.000.000	0	0	5000	130.000.000	0	0	0	0	0	0	4966	126.382.000	4966	126.382.000	4966	126.382.000	99,32	97,22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	**1.04.**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**Jumlah CTKI/TKI yang mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri**	**Persen**	**100**	**184.242.750**	**0**		**100**	**184.242.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**161.370.430**	**100**	**161.370.430**	**100**	**161.370.430**	**100**	**87,59**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	04	1.04.	1.04.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	184.242.750	0	0	30	184.242.750	0	0	0	0	0	0	30	161.370.430	30	161.370.430	30	161.370.430	100	87,59	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	**1,1**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah perusahaan yang menggunakan TKA secara legal**	**Persen**	**100**	**421.532.095**	**52,67**	**303.037.000**	**16,67**	**52.825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,67**	**50.557.000**	**16,67**	**50.557.000**	**69,33**	**353.594.000**	**69,33**	**83,88**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	04	1,1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	150	421.532.095	79	303.037.000	25	52.825.000	0	0	0	0	0	0	25	50.557.000	25	50.557.000	104	353.594.000	69,33	83,88	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**Persen**	**100**	**1.752.136.589**	**16,67**	**1.033.011.700**	**48,72**	**479.536.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,72**	**458.677.100**	**48,72**	**458.677.100**	**65,38**	**1.491.688.800**	**65,38**	**85,14**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**05**	**1**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**153.361.400**	**0**		**100**	**153.361.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**153.161.400**	**100**	**153.161.400**	**100**	**153.161.400**	**100**	**99,87**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	05	1	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	1	153.361.400	0	0	1	153.361.400	0	0	0	0	0	0	1	153.161.400	1	153.161.400	1	153.161.400	100	99,87	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	**1**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelayanan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial**	**Persen**	**100**	**876.212.546**	**12,68**	**488.891.000**	**50,7**	**254.175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,7**	**240.877.700**	**50,7**	**240.877.700**	**63,38**	**729.768.700**	**63,38**	**83,29**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	07	05	1	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	40	97.791.000	5	32.591.000	10	33.000.000	0	0	0	0	0	0	10	27.894.000	10	27.894.000	15	60.485.000	37,5	61,85	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	1	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	6	632.196.546	4	456.300.000	1	74.950.000	0	0	0	0	0	0	1	71.570.000	1	71.570.000	5	527.870.000	83,33	83,5	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	1	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	25	146.225.000	0	0	25	146.225.000	0	0	0	0	0	0	25	141.413.700	25	141.413.700	25	141.413.700	100	96,71	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	**1**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**Jumlah surat keputusan penetapan UMP, UMK dan UMSK**	**Persen**	**100**	**722.562.643**	**66,67**	**544.120.700**	**16,67**	**72.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,67**	**64.638.000**	**16,67**	**64.638.000**	**83,33**	**608.758.700**	**83,33**	**84,25**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	05	1	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	6	722.562.643	4	544.120.700	1	72.000.000	0	0	0	0	0	0	1	64.638.000	1	64.638.000	5	608.758.700	83,33	84,25	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase perusahaan yang menerapkan standar norma ketenagakerjaan dan norma K3**	**Persen**	**100**	**1.796.828.669**	**56,25**	**991.509.916**	**22,92**	**238.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,33**	**76.965.000**	**14,58**	**84.957.700**	**22,92**	**161.922.700**	**79,17**	**1.153.432.616**	**79,17**	**64,19**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**06**	**1**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, pengupahan dan jamsostek serta penyidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan**	**Persen**	**100**	**1.796.828.669**	**56,25**	**991.509.916**	**22,92**	**238.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,33**	**76.965.000**	**14,58**	**84.957.700**	**22,92**	**161.922.700**	**79,17**	**1.153.432.616**	**79,17**	**64,19**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	06	1	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	825	1.237.674.888	475	925.268.400	150	56.980.000	0	0	0	0	0	0	150	56.094.700	150	56.094.700	625	981.363.100	75,76	79,29	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	06	1	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	75	109.153.781	50	30.841.750	25	32.000.000	0	0	0	0	0	0	25	28.863.000	25	28.863.000	75	59.704.750	100	54,7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	06	1	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	300	450.000.000	150	35.399.766	100	150.000.000	0	0	0	0	100	76.965.000	0	0	100	76.965.000	250	112.364.766	83,33	24,97	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																							
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya**	**Persen**	**100**	**409.116.508**	**55,56**	**267.908.108**	**22,22**	**43.882.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,22**	**41.574.500**	**22,22**	**41.574.500**	**77,78**	**309.482.608**	**77,78**	**75,65**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	**32**	**02**	**1**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah kimtrans yang memiliki aspek legal pertanahan (SK-HPL)**	**Persen**	**100**	**409.116.508**	**55,56**	**267.908.108**	**22,22**	**43.882.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,22**	**41.574.500**	**22,22**	**41.574.500**	**77,78**	**309.482.608**	**77,78**	**75,65**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	32	02	1	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen	6	341.499.000	4	250.378.100	1	24.750.000	0	0	0	0	0	0	1	24.750.000	1	24.750.000	5	275.128.100	83,33	80,56	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	02	1	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Ha	3	67.617.508	1	17.530.008	1	19.132.500	0	0	0	0	0	0	1	16.824.500	1	16.824.500	2	34.354.508	66,67	50,81	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase KK transmigran yang ditempatkan**	**Persen**	**100**	**1.172.990.617**	**33,28**	**614.579.580**	**27,5**	**359.257.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,5**	**292.202.823**	**27,5**	**292.202.823**	**60,78**	**906.782.403**	**60,78**	**77,31**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	**32**	**03**	**1**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah MoU kerjasama antar daerah provinsi pengirim dan penerima transmigrasi**	**Persen**	**100**	**1.172.990.617**	**33,28**	**614.579.580**	**27,5**	**359.257.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,5**	**292.202.823**	**27,5**	**292.202.823**	**60,78**	**906.782.403**	**60,78**	**77,31**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	32	03	1	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	3	109.434.118	1	32.197.118	1	36.217.000	0	0	0	0	0	0	1	26.422.000	1	26.422.000	2	58.619.118	66,67	53,57	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	03	1	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga	346	106.902.036	45	30.531.000	101	32.283.800	0	0	0	0	0	0	101	28.063.800	101	28.063.800	146	58.594.800	42,2	54,81	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	03	1	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	240	956.654.463	150	551.851.462	60	290.757.023	0	0	0	0	0	0	60	237.717.023	60	237.717.023	210	789.568.485	87,5	82,53	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase peningkatan lokasi transmigrasi dan masyarakat transmigrasi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya**	**Persen**	**100**	**2.396.346.988**	**68**	**1.766.600.888**	**16**	**537.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**522.612.900**	**16**	**522.612.900**	**84**	**2.289.213.788**	**84**	**95,53**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	**32**	**04**	**1**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**Jumlah satuan permukiman yang menuju kemandirian**	**Persen**	**100**	**2.396.346.988**	**68**	**1.766.600.888**	**16**	**537.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**522.612.900**	**16**	**522.612.900**	**84**	**2.289.213.788**	**84**	**95,53**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	32	04	1	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Pemukiman	25	2.396.346.988	17	1.766.600.888	4	537.840.000	0	0	0	0	0	0	4	522.612.900	4	522.612.900	21	2.289.213.788	84	95,53	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**13.052.696.415**	**50,61**	**6.717.154.883**	**13,74**	**2.849.163.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,85**	**2.753.806.536**	**12,85**	**2.753.806.536**	**63,46**	**9.470.961.419**	**63,46**	**72,56**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**1.068.933.486**	**58,82**	**533.050.800**	**17,65**	**212.986.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,65**	**197.628.650**	**17,65**	**197.628.650**	**76,47**	**730.679.450**	**76,47**	**68,36**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	699.953.896	4	363.103.800	1	123.996.620	0	0	0	0	0	0	1	108.638.650	1	108.638.650	5	471.742.450	83,33	67,4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	4	19.947.000			0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	5	24.947.000	500	498,94	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	29.989.590	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	333.990.000	2	150.000.000	1	83.990.000	0	0	0	0	0	0	1	83.990.000	1	83.990.000	3	233.990.000	75	70,06	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.293.067.448**	**38,46**	**1.232.704.350**	**16,67**	**414.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,62**	**413.445.000**	**9,62**	**413.445.000**	**48,08**	**1.646.149.350**	**48,08**	**71,79**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	78	1.081.046.995	52	636.456.500	13	181.045.000	0	0	0	0	0	0	13	181.045.000	13	181.045.000	65	817.501.500	83,33	75,62	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	29.993.450	4	19.993.250	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	5	24.993.250	83,33	83,33	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	1.182.027.003	4	576.254.600	12	228.000.000	0	0	0	0	0	0	1	227.400.000	1	227.400.000	5	803.654.600	6,94	67,99	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**5.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**90.933.500**	**0**	**0**	**0,58**	**35.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,58**	**35.261.000**	**0,58**	**35.261.000**	**0,58**	**35.261.000**	**0,58**	**38,78**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	169	50.700.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	40.233.500	0	0	1	35.261.000	0	0	0	0	0	0	1	35.261.000	1	35.261.000	1	35.261.000	50	87,64	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.705.139.731**	**66,36**	**2.222.386.459**	**16,59**	**712.006.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,59**	**693.818.728**	**16,59**	**693.818.728**	**82,95**	**2.916.205.187**	**82,95**	**78,71**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	62.685.900	48	43.168.500	12	9.320.000	0	0	0	0	0	0	12	9.320.000	12	9.320.000	60	52.488.500	83,33	83,73	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	529.529.981	48	374.733.500	12	98.881.500	0	0	0	0	0	0	12	98.877.000	12	98.877.000	60	473.610.500	83,33	89,44	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	529.255.000	48	355.384.250	12	101.874.750	0	0	0	0	0	0	12	101.671.750	12	101.671.750	60	457.056.000	83,33	86,36	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	244.999.000	48	55.007.500	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	12	59.940.000	12	59.940.000	60	114.947.500	83,33	46,92	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	419.308.200	48	288.633.959	12	65.100.000	0	0	0	0	0	0	12	65.100.000	12	65.100.000	60	353.733.959	83,33	84,36	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	1.854.361.650	48	1.105.458.750	12	376.830.000	0	0	0	0	0	0	12	358.909.978	12	358.909.978	60	1.464.368.728	83,33	78,97	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**1.432.888.342**	**59,83**	**823.845.000**	**6,84**	**146.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,84**	**146.120.000**	**6,84**	**146.120.000**	**66,67**	**969.965.000**	**66,67**	**67,69**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	64	1.214.287.200	52	701.445.000	7	125.400.000	0	0	0	0	0	0	7	125.170.000	7	125.170.000	59	826.615.000	92,19	68,07	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	53	218.601.142	18	122.400.000	1	21.000.000	0	0	0	0	0	0	1	20.950.000	1	20.950.000	19	143.350.000	35,85	65,58	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**1.167.913.072**	**66,21**	**648.081.207**	**16,55**	**176.629.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,55**	**152.720.252**	**16,55**	**152.720.252**	**82,76**	**800.801.459**	**82,76**	**68,57**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	60.075.800	48	43.888.000	12	8.000.000	0	0	0	0	0	0	12	8.000.000	12	8.000.000	60	51.888.000	83,33	86,37	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	1.077.837.272	48	604.193.207	12	168.629.642	0	0	0	0	0	0	12	144.720.252	12	144.720.252	60	748.913.459	83,33	69,48	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	30.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**3.288.820.836**	**52,04**	**1.257.087.067**	**18,37**	**1.151.835.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,37**	**1.114.812.906**	**18,37**	**1.114.812.906**	**70,41**	**2.371.899.973**	**70,41**	**72,12**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	81	43.000.000	47	19.103.962	17	7.000.000	0	0	0	0	0	0	17	7.000.000	17	7.000.000	64	26.103.962	79,01	60,71	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81	866.599.000	47	590.227.105	17	146.894.000	0	0	0	0	0	0	17	142.967.900	17	142.967.900	64	733.195.005	79,01	84,61	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	45.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	300.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.649.724.676	4	446.746.750	1	930.424.924	0	0	0	0	0	0	1	897.353.807	1	897.353.807	5	1.344.100.557	83,33	81,47	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	384.497.160	4	201.009.250	1	67.516.200	0	0	0	0	0	0	1	67.491.199	1	67.491.199	5	268.500.449	83,33	69,83	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																							
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)**	**Persen**	**100**	**1.811.380.000**	**0**	**0**	**50**	**977.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,81**	**110.140.030**	**6,81**	**110.140.030**	**6,81**	**110.140.030**	**6,81**	**6,08**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**08**	**02**	**1**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Jumlah perangkat daerah yang menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budgeting Statement)**	**Persen**	**100**	**958.600.000**	**0**	**0**	**50**	**497.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,67**	**110.140.030**	**13,67**	**110.140.030**	**13,67**	**110.140.030**	**13,67**	**11,49**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	02	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	161.500.000	0	0	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	02	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	277.000.000	0	0	1	142.000.000	0	0	0	0	0	0	1	38.797.600	1	38.797.600	1	38.797.600	50	14,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	02	1	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	200	345.000.000	0	0	100	180.000.000	0	0	0	0	0	0	40	71.342.430	40	71.342.430	40	71.342.430	20	20,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	02	1	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	96	175.100.000	0	0	48	90.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**02**	**1**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah perempuan anggota Lembaga Masyarakat/Partai Politik yang mendapatkan pendampingan dan penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan**	**Persen**	**100**	**505.600.000**	**0**	**0**	**50**	**288.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	02	1	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	347.300.000	0	0	1	196.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	02	1	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Mas	Organisasi	200	158.300.000	0	0	100	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**02**	**1**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan penguatan**	**Persen**	**100**	**347.180.000**	**0**	**0**	**50**	**192.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	08	02	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	50	186.500.000	0	0	25	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	02	1	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	160.680.000	0	0	25	82.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	02	1	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di Daerah**	**Persen**	**100**	**1.007.145.420**	**20**	**273.217.400**	**50**	**529.534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,22**	**526.452.188**	**42,22**	**526.452.188**	**62,22**	**799.669.588**	**62,22**	**79,4**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**08**	**03**	**1**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pendampingan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan TPPO**	**Persen**	**100**	**187.272.000**	**0,98**	**48.832.800**	**50**	**95.472.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**227.411.088**	**50**	**227.411.088**	**50,98**	**276.243.888**	**50,98**	**147,51**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	03	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	88.434.000	1	48.832.800	1	45.084.000	0	0	0	0	0	0	1	76.531.400	1	76.531.400	2	125.364.200	100	141,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	03	1	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	100	98.838.000	0	0	50	50.388.000	0	0	0	0	0	0	50	150.879.688	50	150.879.688	50	150.879.688	50	152,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**03**	**1**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Persen**	**100**	**222.000.000**	**39,29**	**143.880.000**	**50**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,05**	**299.041.100**	**62,05**	**299.041.100**	**101,34**	**442.921.100**	**101,34**	**199,51**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	32	111.000.000	0	0	16	60.000.000	0	0	0	0	0	0	2	18.192.000	2	18.192.000	2	18.192.000	6,25	16,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	03	1	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	192	111.000.000	88	143.880.000	96	60.000.000	0	0	0	0	0	0	137	280.849.100	137	280.849.100	225	424.729.100	117,19	382,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**03**	**1**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Persen**	**100**	**597.873.420**	**0,81**	**80.504.600**	**50**	**314.062.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,81**	**80.504.600**	**0,81**	**13,47**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	03	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	218.211.420	0	0	1	117.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	03	1	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	178.602.000	0	0	50	91.902.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	03	1	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	20	45.000.000	0	0	10	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	03	1	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	156.060.000	1	80.504.600	1	79.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80.504.600	50	51,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kelembagaan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terbentuk**	**Persen**	**100**	**1.297.200.000**	**9,11**	**344.627.150**	**50,08**	**663.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,68**	**282.662.761**	**32,68**	**282.662.761**	**41,79**	**627.289.911**	**41,79**	**48,36**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**08**	**04**	**1**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah SDM penyedia layanan dan lembaga/stakeholder/instansi terkait yang mendapatkan advokasi dan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga**	**Persen**	**100**	**571.356.000**	**0**	**0**	**50**	**292.556.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	04	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	200	156.408.000	0	0	100	81.308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	04	1	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2	134.040.000	0	0	1	68.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12	
2	08	04	1	03	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	2	280.908.000	0	0	1	143.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	**08**	**04**	**1**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan penguatan dan pengembangan pelaksanaan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**Persen**	**100**	**548.976.000**	**12,69**	**252.741.150**	**50**	**280.576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**282.662.761**	**50**	**282.662.761**	**62,69**	**535.403.911**	**62,69**	**97,53**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	04	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	200	157.500.000	50	192.324.400	100	81.000.000	0	0	0	0	0	0	200	213.039.261	200	213.039.261	250	405.363.661	125	257,37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	04	1	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	200	197.676.000	0	0	100	100.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	04	1	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	193.800.000	1	60.416.750	1	98.800.000	0	0	0	0	0	0	1	69.623.500	1	69.623.500	2	130.040.250	100	67,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**04**	**1**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dalam pembentukan lembaga penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**	**Persen**	**100**	**176.868.000**	**55,56**	**91.886.000**	**55,56**	**90.168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55,56**	**91.886.000**	**55,56**	**51,95**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	04	1	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	9	176.868.000	5	91.886.000	5	90.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	91.886.000	55,56	51,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang mengembangkan Sistem Inforamsi Gender dan Anak**	**Persen**	**100**	**1.264.776.000**	**50**	**84.335.750**	**50**	**603.376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**204.591.040**	**75**	**204.591.040**	**125**	**288.926.790**	**125**	**22,84**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**08**	**05**	**1**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen penyajian data gender dan anak provinsi yang tersedia**	**Persen**	**100**	**1.264.776.000**	**50**	**84.335.750**	**50**	**603.376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**204.591.040**	**75**	**204.591.040**	**125**	**288.926.790**	**125**	**22,84**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	05	1	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2	720.676.000	1	40.715.250	1	375.776.000	0	0	0	0	0	0	1	1.940.000	1	1.940.000	2	42.655.250	100	5,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	05	1	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2	544.100.000	1	43.620.500	1	227.600.000	0	0	0	0	0	0	2	202.651.040	2	202.651.040	3	246.271.540	150	45,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kecamatan, Forum anak Kelurahan) yang terbentuk**	**Persen**	**100**	**2.076.978.000**	**1,27**	**125.330.600**	**50**	**1.088.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,54**	**232.815.396**	**33,54**	**232.815.396**	**34,81**	**358.145.996**	**34,81**	**17,24**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**08**	**06**	**1**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Jumlah SDM Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait kebijakan pemenuhan hak anak**	**Persen**	**100**	**319.090.000**	**1,92**	**63.832.600**	**50**	**166.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,92**	**33.533.750**	**1,92**	**33.533.750**	**3,85**	**97.366.350**	**3,85**	**30,51**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	06	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerint	Organisasi	50	157.590.000	0	0	25	81.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	06	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	161.500.000	1	63.832.600	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	1	33.533.750	1	33.533.750	2	97.366.350	100	60,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**06**	**1**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemenuhan hak anak (Ruang Bermain Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Rumah Sakit, Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak, PISA, Forum Anak Kecamatan dan Desa, lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, dll)**	**Persen**	**100**	**1.757.888.000**	**0,94**	**61.498.000**	**50**	**922.528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,06**	**199.281.646**	**49,06**	**199.281.646**	**50**	**260.779.646**	**50**	**14,83**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	06	1	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	100	176.868.000	0	0	50	90.168.000	0	0	0	0	0	0	50	56.258.000	50	56.258.000	50	56.258.000	50	31,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	06	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	439.700.000	1	61.498.000	1	238.040.000	0	0	0	0	0	0	1	73.526.750	1	73.526.750	2	135.024.750	100	30,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	08	06	1	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	823.760.000	0	0	1	429.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	06	1	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	317.560.000	0	0	1	164.560.000	0	0	0	0	0	0	1	69.496.896	1	69.496.896	1	69.496.896	50	21,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di daerah**	**Persen**	**100**	**935.062.000**	**0**	**0**	**46,36**	**400.012.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**08**	**07**	**1**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA)**	**Persen**	**100**	**187.272.000**	**0**	**0**	**50**	**95.472.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	07	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	100	98.838.000	0	0	50	50.388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	88.434.000	0	0	1	45.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**07**	**1**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**339.750.000**	**0**	**0**	**37,21**	**97.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	07	1	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang	30	147.500.000	0	0	15	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	10	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	1	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	51.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	1	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**08**	**07**	**1**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Persen**	**100**	**408.040.000**	**0**	**0**	**50**	**207.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	08	07	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Laporan	2	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	204.000.000	0	0	1	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	104.040.000	0	0	1	53.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																						
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**Persen**	**100**	**796.000.000**	**14,29**	**236.189.000**	**57,14**	**501.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**155.760.700**	**14,29**	**155.760.700**	**28,57**	**391.949.700**	**28,57**	**49,24**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**14**	**02**	**1**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan proyeksi penduduk)**	**Persen**	**100**	**796.000.000**	**14,29**	**236.189.000**	**57,14**	**501.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**155.760.700**	**14,29**	**155.760.700**	**28,57**	**391.949.700**	**28,57**	**49,24**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	02	1	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	02	1	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	300.000.000	1	236.189.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	236.189.000	50	78,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	14	02	1	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	2	220.000.000	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1	155.760.700	1	155.760.700	1	155.760.700	50	70,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	02	1	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ke	Dokumen	2	176.000.000	0	0	1	81.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	02	1	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**02**	**1**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	02	1	01	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	02	1	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	02	1	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Persen**	**100**	**1.023.230.000**	**0**	**0**	**50,14**	**611.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,76**	**26.451.500**	**5,76**	**26.451.500**	**5,76**	**26.451.500**	**5,76**	**2,59**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**14**	**03**	**1**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah laporan hasil pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**700.730.000**	**0**	**0**	**57,14**	**446.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	03	1	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan B	Dokumen	2	279.370.000	0	0	1	188.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	1	03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Se	Laporan	2	176.460.000	0	0	1	89.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	1	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	1	88.400.000	0	0	1	88.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	1	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ken	Dokumen	2	156.500.000	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	1	07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	1	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**03**	**1**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan stakeholder terkait yang mendapatkan advokasi terkait pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB**	**Persen**	**100**	**322.500.000**	**0**	**0**	**50**	**165.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,88**	**26.451.500**	**5,88**	**26.451.500**	**5,88**	**26.451.500**	**5,88**	**8,2**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	03	1	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	200	166.000.000	0	0	100	85.000.000	0	0	0	0	0	0	20	26.451.500	20	26.451.500	20	26.451.500	10	15,93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	1	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Organisasi	140	156.500.000	0	0	70	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Persen**	**100**	**1.343.908.800**	**0**	**0**	**43,06**	**632.271.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**14**	**04**	**1**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah laporan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**752.875.800**	**0**	**0**	**42,81**	**289.047.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	04	1	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	120	98.727.200	0	0	120	98.727.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi	120	96.828.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	07	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dib	Organisasi	40	87.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1	89.960.000	0	0	1	89.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga	Laporan	1	85.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	2	196.860.000	0	0	1	100.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	98.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**04**	**1**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**100**	**591.033.000**	**0**	**0**	**66,67**	**343.224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	04	1	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarg	Dokumen	2	511.033.000	0	0	1	263.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Dokumen	1	80.000.000	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**17.364.473.047**	**43,02**	**6.788.565.448**	**50,51**	**8.939.946.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,78**	**6.794.572.157**	**41,78**	**6.794.572.157**	**84,79**	**13.583.137.605**	**84,79**	**78,22**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**693.760.640**	**35**	**247.377.750**	**50**	**366.544.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**59.794.996**	**45**	**59.794.996**	**80**	**307.172.746**	**80**	**44,28**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	41.032.320	2	60.172.000	2	20.624.320	0	0	0	0	0	0	2	8.583.300	2	8.583.300	4	68.755.300	100	167,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	1	7.814.250	1	10.374.000	0	0	0	0	0	0	1	35.453.196	1	35.453.196	2	43.267.446	100	222,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	0	0	1	10.374.000	0	0	0	0	0	0	1	6.178.000	1	6.178.000	1	6.178.000	50	31,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	0	0	1	10.374.000	0	0	0	0	0	0	1	1.122.000	1	1.122.000	1	1.122.000	50	5,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9				10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	0	0	1	10.374.000	0	0	0	0	0	0	1	2.699.500	1	2.699.500	1	2.699.500	50	13,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	11.032.320	3	5.243.000	3	5.624.320	0	0	0	0	0	0	3	5.759.000	3	5.759.000	6	11.002.000	100	99,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	563.800.000	1	174.148.500	1	298.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	174.148.500	50	30,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**12.609.130.526**	**50,39**	**5.551.643.899**	**50,39**	**6.453.935.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,84**	**5.824.954.705**	**48,84**	**5.824.954.705**	**99,23**	**11.376.598.604**	**99,23**	**90,23**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1750	12.302.660.162	882	5.467.760.399	882	6.301.362.522	0	0	0	0	0	0	854	5.691.900.705	854	5.691.900.705	1736	11.159.661.104	99,2	90,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	182.448.000	12	77.780.000	12	91.224.000	0	0	0	0	0	0	12	82.680.000	12	82.680.000	24	160.460.000	100	87,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	11.032.320	1	2.625.500	1	5.624.320	0	0	0	0	0	0	1	4.434.000	1	4.434.000	2	7.059.500	100	63,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	112.990.044	18	3.478.000	18	55.724.293	0	0	0	0	0	0	18	45.940.000	18	45.940.000	36	49.418.000	100	43,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah SDM Aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin dan mengikuti pendidikan, sosialisasi, bimtek kompetensi spesifik tupoksi/profesi**	**Persen**	**100**	**513.544.875**	**30,65**	**90.710.000**	**51,21**	**262.069.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,95**	**61.713.200**	**18,95**	**61.713.200**	**49,6**	**152.423.200**	**49,6**	**29,68**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	396	211.200.000	136	88.400.000	204	108.800.000	0	0	0	0	0	0	70	48.930.000	70	48.930.000	206	137.330.000	52,02	65,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	125.916.750	0	0	5	63.966.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	58.809.375	0	0	15	29.767.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	117.618.750	16	2.310.000	30	59.535.417	0	0	0	0	0	0	24	12.783.200	24	12.783.200	40	15.093.200	66,67	12,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum perkantoran yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**1.481.136.722**	**38,34**	**305.819.518**	**50,45**	**749.298.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,45**	**468.624.500**	**50,45**	**468.624.500**	**88,79**	**774.444.018**	**88,79**	**52,29**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	29.359.716	8	1.768.500	12	14.861.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1.768.500	33,33	6,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	20.000.000	0	0	15	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	25.954.338	19	83.784.000	25	13.260.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	83.784.000	38	322,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	54	45.954.338	20	35.241.518	27	23.260.838	0	0	0	0	0	0	17	36.730.500	17	36.730.500	37	71.972.018	68,52	156,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18	141.267.038	8	33.148.000	9	71.505.538	0	0	0	0	0	0	5	25.524.700	5	25.524.700	13	58.672.700	72,22	41,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	216	25.274.886	104	10.200.000	108	12.793.461	0	0	0	0	0	0	164	1.000.000	164	1.000.000	268	11.200.000	124,07	44,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	96.920.156	3	11.967.000	12	48.460.078	0	0	0	0	0	0	7	16.240.000	7	16.240.000	10	28.207.000	41,67	29,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	135	1.051.406.250	50	129.710.500	70	530.156.250	0	0	0	0	0	0	86	389.129.300	86	389.129.300	136	518.839.800	100,74	49,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	45.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi**	**Persen**	**100**	**939.189.104**	**12,98**	**73.413.000**	**50,38**	**533.564.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,58**	**92.907.000**	**4,58**	**92.907.000**	**17,56**	**166.320.000**	**17,56**	**17,71**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	122.173.479	0	0	2	47.173.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	40	155.671.875	0	0	20	78.796.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang Disediakan	Unit	40	155.671.875	17	73.413.000	20	78.796.875	0	0	0	0	0	0	6	92.907.000	6	92.907.000	23	166.320.000	57,5	106,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	42	155.671.875	0	0	21	78.796.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kegiatan penunjang urusan SKPD yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**424.588.730**	**50**	**177.982.626**	**50**	**214.875.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**204.103.076**	**50**	**204.103.076**	**100**	**382.085.702**	**100**	**89,99**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8.503.753	12	3.000.000	12	4.264.487	0	0	0	0	0	0	12	3.000.000	12	3.000.000	24	6.000.000	100	70,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	312.900.469	12	107.482.626	12	158.381.719	0	0	0	0	0	0	12	111.103.076	12	111.103.076	24	218.585.702	100	69,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	103.184.508	12	67.500.000	12	52.229.195	0	0	0	0	0	0	12	90.000.000	12	90.000.000	24	157.500.000	100	152,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi**	**Persen**	**100**	**703.122.450**	**27,27**	**341.618.655**	**50**	**359.659.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,61**	**82.474.680**	**10,61**	**82.474.680**	**37,88**	**424.093.335**	**37,88**	**60,32**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	175.597.875	0	0	7	88.882.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	79.143.581	7	87.324.335	3	40.060.331	0	0	0	0	0	0	7	82.474.680	7	82.474.680	14	169.799.015	233,33	214,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	26.125.313	0	0	10	13.312.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	26.125.313	10	7.840.000	10	13.312.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7.840.000	50	30,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	278.133.750	1	246.454.320	1	140.783.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	246.454.320	50	88,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	68.000.000	0	0	1	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	49.996.618	0	0	1	25.306.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																						
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Ketersediaan pangan utama (beras) / Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari) / Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)**	**Persen**	**100**	**152.156.442**	**54,55**	**107.826.942**	**45,45**	**56.732.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,45**	**56.732.500**	**0**	**0**	**45,45**	**56.732.500**	**100**	**164.559.442**	**100**	**108,15**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**02**	**1**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**152.156.442**	**54,55**	**107.826.942**	**45,45**	**56.732.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,45**	**56.732.500**	**0**	**0**	**45,45**	**56.732.500**	**100**	**164.559.442**	**100**	**108,15**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	02	1	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	10	114.601.971	5	62.578.471	5	56.732.500	0	0	0	0	5	56.732.500	0	0	5	56.732.500	10	119.310.971	100	104,11	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penvediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1	37.554.471	1	45.248.471			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45.248.471	100	120,49	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat**	**Koefisien variasi pangan strategis (beras,cabe merah, bawang merah, kedelai) (CV) / Konsumsi Energi (Kkl/Kap/hari) / Konsumsi Protein /(Gr/kap/hari)**	**Persen**	**100**	**1.282.220.881**	**30,77**	**710.169.013**	**46,15**	**509.019.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,69**	**0**	**30,77**	**2.154.206.450**	**38,46**	**2.154.206.450**	**69,23**	**2.864.375.463**	**69,23**	**223,39**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**03**	**1**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersedianya dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Haroa Panoan**	**Persen**	**100**	**178.683.471**	**20**	**45.500.000**	**40**	**133.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**1.871.017.500**	**40**	**1.871.017.500**	**60**	**1.916.517.500**	**60**	**1.072,58**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	49.905.000	0	0	1	49.905.000	0	0	0	0	0	0	1	70.205.000	1	70.205.000	1	70.205.000	100	140,68	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	2	128.778.471	1	45.500.000	1	83.320.000	0	0	0	0	0	0	1	1.800.812.500	1	1.800.812.500	2	1.846.312.500	100	1.433,71	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**601.271.659**	**50**	**499.999.983**	**50**	**101.271.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.147.700**	**0**	**111.147.700**	**50**	**611.147.683**	**50**	**101,64**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	2	601.271.659	1	499.999.983	1	101.271.676	0	0	0	0	0	0	0	111.147.700	0	111.147.700	1	611.147.683	50	101,64	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Persen**	**100**	**52.585.841**	**100**	**52.721.870**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**200**	**52.721.870**	**200**	**100,26**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	52.585.841	1	52.721.870			0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	52.721.870	200	100,26	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**Persen**	**100**	**449.679.910**	**20**	**111.947.160**	**60**	**274.523.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**172.041.250**	**40**	**172.041.250**	**60**	**283.988.410**	**60**	**63,15**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	124.131.000	0	0	1	118.220.000	0	0	0	0	0	0	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	100	34,64	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	2	141.086.000	0	0	1	61.362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	2	184.462.910	1	111.947.160	1	94.941.250	0	0	0	0	0	0	1	129.041.250	1	129.041.250	2	240.988.410	100	130,64	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN (%)**	**Persen**	**100**	**113.881.971**	**40**	**75.735.442**	**40**	**75.166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**107.251.000**	**40**	**107.251.000**	**80**	**182.986.442**	**80**	**160,68**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**04**	**1**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**113.881.971**	**50**	**75.735.442**	**50**	**75.166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**107.251.000**	**50**	**107.251.000**	**100**	**182.986.442**	**100**	**160,68**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	04	1	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	113.881.971	2	75.735.442	2	75.166.000	0	0	0	0	0	0	2	107.251.000	2	107.251.000	4	182.986.442	100	160,68	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**	**1**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	04	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	1	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	TINGKAT KEAMANAN PANGAN (%) / SERTIFIKAT PRIMA 3 / REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR	Persen	100	489.546.375	66,67	264.395.904	50	245.221.000	0	0	5,56	######	0	0	44,44	269.481.000	50	308.621.000	116,67	573.016.904	116,67	117,05	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	489.546.375	66,67	264.395.904	50	245.221.000	0	0	5,56	######	0	0	44,44	269.481.000	50	308.621.000	116,67	573.016.904	116,67	117,05	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	2	87.538.942	1	16.906.471	1	60.726.000	0	0	0	0	0	0	1	66.726.000	1	66.726.000	2	83.632.471	100	95,54	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	10	146.387.813	8	90.881.813	5	60.904.000	0	0	0	0	0	0	5	89.604.000	5	89.604.000	13	180.485.813	130	123,29	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	72.797.000	1	44.060.000	1	30.845.000	0	0	0	0	0	0	1	30.845.000	1	30.845.000	2	74.905.000	100	102,9	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	97.337.250	1	61.035.250	1	53.606.000	0	0	0	0	0	0	1	82.306.000	1	82.306.000	2	143.341.250	100	147,26	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	2	85.485.370	1	51.512.370	1	39.140.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	39.140.000	2	90.652.370	100	106,04	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	9.385.365.978	0		88,46	9.385.365.978	25,32	#######	0,64	######	0	0	56,41	9.175.434.718	82,37	9.300.591.218	82,37	9.300.591.218	82,37	99,1	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	156.211.000	0		100	156.211.000	0	0	20	######	0	0	60	196.610.000	80	197.527.000	80	197.527.000	80	126,45	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2.762.000	0	0	3	2.762.000	0	0	0	0	0	0	2	15.360.000	2	15.360.000	2	15.360.000	66,67	556,12	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	917.000	0	0	1	917.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	917.000	1	917.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	152.532.000	0	0	1	152.532.000	0	0	0	0	0	0	1	181.250.000	1	181.250.000	1	181.250.000	100	118,83	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.922.593.000	0		100	7.922.593.000	1,11	#######	0	0	0	0	88,89	7.669.978.764	90	7.677.918.264	90	7.677.918.264	90	96,91	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	87	7.770.868.500	0	0	87	7.770.868.500	0	0	0	0	0	0	78	7.526.193.764	78	7.526.193.764	78	7.526.193.764	89,66	96,85	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.939.500	0	0	1	7.939.500	1	#######	0	0	0	0	0	0	1	7.939.500	1	7.939.500	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	985.000	0	0	1	985.000	0	0	0	0	0	0	1	985.000	1	985.000	1	985.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	142.800.000	0	0	1	142.800.000	0	0	0	0	0	0	1	142.800.000	1	142.800.000	1	142.800.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah	Persen	100	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	46.800.000	0		90,63	46.800.000	81,25	#######	0	0	0	0	0	0	81,25	46.800.000	81,25	46.800.000	81,25	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Set	87	46.800.000	0	0	87	46.800.000	78	#######	0	0	0	0	0	0	78	46.800.000	78	46.800.000	89,66	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	552.485.000	0		43,48	552.485.000	0	0	0	0	0	0	43,48	657.395.000	43,48	657.395.000	43,48	657.395.000	43,48	118,99	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.603.000	0	0	2	13.603.000	0	0	0	0	0	0	2	13.603.000	2	13.603.000	2	13.603.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	58.546.000	0	0	2	58.546.000	0	0	0	0	0	0	2	63.456.000	2	63.456.000	2	63.456.000	100	108,39	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	41.560.000	0	0	2	41.560.000	0	0	0	0	0	0	2	41.560.000	2	41.560.000	2	41.560.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.904.000	0	0	2	2.904.000	0	0	0	0	0	0	2	2.904.000	2	2.904.000	2	2.904.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	67.872.000	0	0	1	67.872.000	0	0	0	0	0	0	1	67.872.000	1	67.872.000	1	67.872.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	368.000.000	0	0	1	368.000.000	0	0	0	0	0	0	1	468.000.000	1	468.000.000	1	468.000.000	100	127,17	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	113.480.000	0		42,86	113.480.000	0	0	14,29	######	0	0	28,57	46.000.000	42,86	115.500.000	42,86	115.500.000	42,86	101,78	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	43.980.000	0	0	2	43.980.000	0	0	0	0	0	0	2	46.000.000	2	46.000.000	2	46.000.000	100	104,59	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	69.500.000	0	0	1	69.500.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	69.500.000	1	69.500.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**278.576.426**	**0**		**100**	**278.576.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**261.081.176**	**100**	**261.081.176**	**100**	**261.081.176**	**100**	**93,72**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	184.576.426	0	0	1	184.576.426	0	0	0	0	0	0	1	167.081.176	1	167.081.176	1	167.081.176	100	90,52	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	90.000.000	0	0	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**315.220.552**	**0**		**96,3**	**315.220.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,3**	**344.369.778**	**96,3**	**344.369.778**	**96,3**	**344.369.778**	**96,3**	**109,25**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	122.100.000	0	0	25	122.100.000	0	0	0	0	0	0	25	124.350.904	25	124.350.904	25	124.350.904	100	101,84	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	51	34.707.000	0	0	51	34.707.000	0	0	0	0	0	0	51	31.960.000	51	31.960.000	51	31.960.000	100	92,09	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dioelihara/Direhabilitasi	Unit	2	158.413.552	0	0	2	158.413.552	0	0	0	0	0	0	2	188.058.874	2	188.058.874	2	188.058.874	100	118,71	Dinas Ketahanan Panoan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**1.166.473.532**	**32**	**244.319.800**	**68**	**896.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**1.263.112.022**	**68**	**1.263.112.022**	**100**	**1.507.431.822**	**100**	**129,23**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**02**	**1**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Cakupan keterpenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**935.115.379**	**29,17**	**38.412.200**	**70,83**	**896.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,83**	**1.263.112.022**	**70,83**	**1.263.112.022**	**100**	**1.301.524.222**	**100**	**139,18**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	1	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	24	935.115.379	7	38.412.200	17	896.603.000	0	0	0	0	0	0	17	1.263.112.022	17	1.263.112.022	24	1.301.524.222	100	139,18	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	**1**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Cakupan keterpenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**231.358.153**	**100**	**205.907.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**205.907.600**	**100**	**89**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	1	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	231.358.153	1	205.907.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	205.907.600	100	89	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**1.909.138.268**	**33,61**	**780.881.850**	**66,39**	**996.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,39**	**1.246.707.718**	**66,39**	**1.246.707.718**	**100**	**2.027.589.568**	**100**	**106,2**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**03**	**1**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)**	**Persen**	**100**	**1.436.100.513**	**35,71**	**571.752.550**	**64,29**	**764.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,29**	**1.029.340.118**	**64,29**	**1.029.340.118**	**100**	**1.601.092.668**	**100**	**111,49**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	62	543.348.503	22	234.202.300	40	300.000.000	0	0	0	0	0	0	40	268.511.000	40	268.511.000	62	502.713.300	100	92,52	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	12	204.872.837	1	103.780.100	11	77.000.000	0	0	0	0	0	0	11	66.771.000	11	66.771.000	12	170.551.100	100	83,25	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	1	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	24	687.879.173	12	233.770.150	12	387.290.000	0	0	0	0	0	0	12	694.058.118	12	694.058.118	24	927.828.268	100	134,88	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**1**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Cakupan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)**	**Persen**	**100**	**382.755.000**	**22,73**	**167.878.000**	**77,27**	**192.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,27**	**183.329.000**	**77,27**	**183.329.000**	**100**	**351.207.000**	**100**	**91,76**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	1	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	22	382.755.000	5	167.878.000	17	192.000.000	0	0	0	0	0	0	17	183.329.000	17	183.329.000	22	351.207.000	100	91,76	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**1**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Cakupan pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)**	**Persen**	**100**	**90.282.755**	**50**	**41.251.300**	**50**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**34.038.600**	**50**	**34.038.600**	**100**	**75.289.900**	**100**	**83,39**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	90.282.755	1	41.251.300	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	1	34.038.600	1	34.038.600	2	75.289.900	100	83,39	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan Pengelolaan Taman Keanekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (%)**	**Persen**	**100**	**115.068.000**	**0**	**0**	**100**	**115.068.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**243.440.000**	**100**	**243.440.000**	**100**	**243.440.000**	**100**	**211,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**04**	**1**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragam Hayati Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**115.068.000**	**0**	**0**	**100**	**115.068.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**243.440.000**	**100**	**243.440.000**	**100**	**243.440.000**	**100**	**211,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	04	1	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1	115.068.000	0	0	1	115.068.000	0	0	0	0	0	0	1	243.440.000	1	243.440.000	1	243.440.000	100	211,56	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (%)**	**Persen**	**100**	**241.319.920**	**50**	**87.544.920**	**50**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**110.140.000**	**50**	**110.140.000**	**100**	**197.684.920**	**100**	**81,92**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**05**	**1**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Cakupan keterpenuhan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**241.319.920**	**50**	**87.544.920**	**50**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**110.140.000**	**50**	**110.140.000**	**100**	**197.684.920**	**100**	**81,92**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	05	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pe	Dokumen	60	241.319.920	30	87.544.920	30	120.000.000	0	0	0	0	0	0	30	110.140.000	30	110.140.000	60	197.684.920	100	81,92	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (%)**	**Persen**	**100**	**210.631.107**	**37,5**	**96.463.050**	**62,5**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,5**	**96.791.900**	**62,5**	**96.791.900**	**100**	**193.254.950**	**100**	**91,75**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**06**	**1**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**210.631.107**	**37,5**	**96.463.050**	**62,5**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,5**	**96.791.900**	**62,5**	**96.791.900**	**100**	**193.254.950**	**100**	**91,75**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	06	1	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	40	210.631.107	15	96.463.050	25	100.000.000	0	0	0	0	0	0	25	96.791.900	25	96.791.900	40	193.254.950	100	91,75	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Peningkatan persentase jumlah penghargaan lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**392.045.831**	**50**	**142.347.400**	**50**	**228.586.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**410.349.700**	**50**	**410.349.700**	**100**	**552.697.100**	**100**	**140,98**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**09**	**1**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan (penghargaan)**	**Persen**	**100**	**392.045.831**	**50**	**142.347.400**	**50**	**228.586.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**410.349.700**	**50**	**410.349.700**	**100**	**552.697.100**	**100**	**140,98**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	09	1	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	220	392.045.831	110	142.347.400	110	228.586.840	0	0	0	0	0	0	110	410.349.700	110	410.349.700	220	552.697.100	100	140,98	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**239.436.002**	**50**	**76.922.850**	**50**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**100.356.850**	**50**	**100.356.850**	**100**	**177.279.700**	**100**	**74,04**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**10**	**1**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**239.436.002**	**50**	**76.922.850**	**50**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**100.356.850**	**50**	**100.356.850**	**100**	**177.279.700**	**100**	**74,04**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	10	1	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Dokumen	200	239.436.002	100	76.922.850	100	120.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100.356.850	100	100.356.850	200	177.279.700	100	74,04	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan pengelolaan persampahan regional (%)**	**Persen**	**100**	**597.724.987**	**2,8**	**148.905.145**	**97,2**	**398.037.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,93**	**0**	**96,26**	**444.955.600**	**97,2**	**444.955.600**	**100**	**593.860.745**	**100**	**99,35**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**11**	**1**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Cakupan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)**	**Persen**	**100**	**597.724.987**	**2,8**	**148.905.145**	**97,2**	**398.037.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,93**	**0**	**96,26**	**444.955.600**	**97,2**	**444.955.600**	**100**	**593.860.745**	**100**	**99,35**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	11	1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	3	51.086.950	0	0	3	51.086.950	0	0	0	0	0	0	3	44.757.300	3	44.757.300	3	44.757.300	100	87,61	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1	37.411.942	1	33.604.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.604.392	100	89,82	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	2	116.105.261	1	91.188.253	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	91.188.253	100	78,54	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	101	393.120.834	1	24.112.500	100	346.950.250	0	0	0	0	0	0	100	400.198.300	100	400.198.300	101	424.310.800	100	107,93	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**17.029.187.019**	**52,02**	**6.730.123.279**	**47,98**	**8.728.504.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,98**	**7.474.833.543**	**47,98**	**7.474.833.543**	**100**	**14.204.956.822**	**100**	**83,42**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD (%)**	**Persen**	**100**	**253.674.368**	**60**	**106.637.368**	**40**	**132.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**176.165.800**	**40**	**176.165.800**	**100**	**282.803.168**	**100**	**111,48**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	173.318.335	5	80.114.335	1	82.603.000	0	0	0	0	0	0	1	136.231.000	1	136.231.000	6	216.345.335	100	124,83	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	9.080.000	1	9.080.000	2	9.080.000	100	90,8	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.259.800	1	3.259.800	2	3.259.800	100	65,2	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	65.356.033	5	26.523.033	5	35.000.000	0	0	0	0	0	0	5	27.595.000	5	27.595.000	10	54.118.033	100	82,8	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan administrasi keuangan (%)**	**Persen**	**100**	**13.331.749.574**	**50**	**5.464.009.672**	**50**	**6.658.062.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**5.711.941.352**	**50**	**5.711.941.352**	**100**	**11.175.951.024**	**100**	**83,83**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	13.031.031.666	12	5.328.410.436	12	6.497.272.000	0	0	0	0	0	0	12	5.555.869.152	12	5.555.869.152	24	10.884.279.588	100	83,53	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	220.560.000	12	102.000.000	12	118.560.000	0	0	0	0	0	0	12	113.970.000	12	113.970.000	24	215.970.000	100	97,92	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	50.439.200	6	26.528.836	6	19.583.000	0	0	0	0	0	0	6	19.519.100	6	19.519.100	12	46.047.936	100	91,29	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	29.718.708	12	7.070.400	12	22.647.000	0	0	0	0	0	0	12	22.583.100	12	22.583.100	24	29.653.500	100	99,78	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan SDM aparatur yang memenuhi standar disiplin aparatur (%)**	**Persen**	**100**	**345.900.000**	**50**	**60.900.000**	**50**	**83.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**57.900.000**	**50**	**57.900.000**	**100**	**118.800.000**	**100**	**34,35**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	345.900.000	20	60.900.000	20	83.400.000	0	0	0	0	0	0	20	57.900.000	20	57.900.000	40	118.800.000	100	34,35	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**1.760.172.672**	**50**	**584.704.231**	**50**	**1.171.933.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**918.355.269**	**50**	**918.355.269**	**100**	**1.503.059.500**	**100**	**85,39**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	22.100.000	1	10.100.000	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000	2	22.100.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	96.364.272	12	46.364.231	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	49.814.969	12	49.814.969	24	96.179.200	100	99,81	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	65.849.000	12	30.849.000	12	35.000.000	0	0	0	0	0	0	12	35.000.000	12	35.000.000	24	65.849.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	603.010.400	12	39.480.000	12	559.995.200	0	0	0	0	0	0	12	357.530.000	12	357.530.000	24	397.010.000	100	65,84	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	29.818.000	12	14.880.000	12	14.938.000	0	0	0	0	0	0	12	14.938.000	12	14.938.000	24	29.818.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144	943.031.000	72	443.031.000	72	500.000.000	0	0	0	0	0	0	72	449.072.300	72	449.072.300	144	892.103.300	100	94,6	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)**	**Persen**	**100**	**130.391.160**	**86,36**	**84.391.160**	**13,64**	**46.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,64**	**119.200.000**	**13,64**	**119.200.000**	**100**	**203.591.160**	**100**	**156,14**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	13.200.000	15	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	13.200.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	83.391.160	3	37.391.160	3	46.000.000	0	0	0	0	0	0	3	119.200.000	3	119.200.000	6	156.591.160	100	187,78	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	33.800.000	1	33.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.800.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**734.658.240**	**50**	**211.909.248**	**50**	**396.929.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**295.860.068**	**50**	**295.860.068**	**100**	**507.769.316**	**100**	**69,12**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8.400.000	12	4.200.000	12	4.200.000	0	0	0	0	0	0	12	4.200.000	12	4.200.000	24	8.400.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	522.258.240	12	140.209.248	12	248.729.760	0	0	0	0	0	0	12	147.660.068	12	147.660.068	24	287.869.316	100	55,12	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	204.000.000	12	67.500.000	12	144.000.000	0	0	0	0	0	0	12	144.000.000	12	144.000.000	24	211.500.000	100	103,68	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)**	**Persen**	**100**	**472.641.005**	**50**	**217.571.600**	**50**	**239.577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**195.411.054**	**50**	**195.411.054**	**100**	**412.982.654**	**100**	**87,38**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	79.898.000	2	25.157.400	2	49.748.000	0	0	0	0	0	0	2	41.589.550	2	41.589.550	4	66.746.950	100	83,54	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	211.121.000	4	99.052.200	4	101.789.000	0	0	0	0	0	0	4	65.781.504	4	65.781.504	8	164.833.704	100	78,08	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	181.622.005	2	93.362.000	2	88.040.000	0	0	0	0	0	0	2	88.040.000	2	88.040.000	4	181.402.000	100	99,88	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																						

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pembinaan, penataan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk di kab/kota	Persen	100	1.087.532.000	28,57	310.842.000	71,43	787.532.000	28,57	#######	28,57	######	0	28.335.010	14,29	45.302.790	71,43	743.291.800	100	1.054.133.800	100	96,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen KTP-el, KK dan KIA	Persen	100	787.576.000	33,33	206.800.000	66,67	587.576.000	0	#######	66,67	######	0	28.335.010	0	21.364.990	66,67	549.398.000	100	756.198.000	100	96,02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	87.576.000	0	0	1	87.576.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	87.576.000	1	87.576.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	2	700.000.000	1	206.800.000	1	500.000.000	0	#######	1	######	0	28.335.010	0	21.364.990	1	461.822.000	2	668.622.000	100	95,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya informasi terkait pendaftaran kependudukan	Persen	100	212.350.000	33,33	104.042.000	66,67	112.350.000	33,33	#######	0	0	0	0	33,33	23.937.800	66,67	106.287.800	100	210.329.800	100	99,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	130.000.000	1	104.042.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	1	23.937.800	1	23.937.800	2	127.979.800	100	98,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	82.350.000	0	0	1	82.350.000	1	#######	0	0	0	0	0	1	82.350.000	1	82.350.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persen	100	87.606.000	0		100	87.606.000	100	#######	0	0	0	0	0	0	100	87.606.000	100	87.606.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	87.606.000	0	0	1	87.606.000	1	#######	0	0	0	0	0	1	87.606.000	1	87.606.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pembinaan administrasi pencatatan sipil bagi kab/kota	Persen	100	830.571.539	0		55,56	430.571.539	0	0	11,11	######	0	0	0	0	11,11	87.606.000	11,11	87.606.000	11,11	10,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya pelayanan pencatatan sipil	Persen	100	480.571.539	0		60	280.571.539	0	0	20	######	0	0	0	0	20	87.606.000	20	87.606.000	20	18,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	4	390.571.539	0	0	2	190.571.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1	90.000.000	0	0	1	90.000.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	87.606.000	1	87.606.000	100	97,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen	100	350.000.000	0		50	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	4	350.000.000	0	0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persen	100	3.285.000.000	0		72,73	1.830.000.000	39,2	#######	3,41	######	0	0	2,84	105.655.440	45,45	671.599.720	45,45	671.599.720	45,45	20,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Keependudukan	Persen	100	385.000.000	0		51,43	340.000.000	2,86	#######	0	0	0	0	0	73.986.340	2,86	271.606.588	2,86	271.606.588	2,86	70,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	1	#######	0	0	0	0	0	73.986.340	1	271.606.588	1	271.606.588	100	90,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	34	85.000.000	0	0	17	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bagi Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara	Persen	100	2.560.000.000	0		57,53	1.150.000.000	13,7	#######	1,37	######	0	0	0	32.100	15,07	145.485.046	15,07	145.485.046	15,07	5,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	60.000.000	0	0	1	60.000.000	0	0	1	######	0	0	0	32.100	1	56.072.686	1	56.072.686	100	93,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	34	1.030.000.000	0	0	17	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	4	500.000.000	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	10	90.000.000	0	0	10	90.000.000	10	#######	0	0	0	0	0	0	10	89.412.360	10	89.412.360	100	99,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	24	880.000.000	0	0	12	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adminduk Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara	Persen	100	340.000.000	0		100	340.000.000	85,29	#######	7,35	######	0	0	7,35	31.637.000	100	254.508.086	100	254.508.086	100	74,86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	17	200.000.000	0	0	17	200.000.000	7	#######	5	######	0	0	5	31.637.000	17	165.000.000	17	165.000.000	100	82,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	51	140.000.000	0	0	51	140.000.000	51	#######	0	0	0	0	0	0	51	89.508.086	51	89.508.086	100	63,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Persen	100	125.000.000	50	57.310.491	50	65.000.000	16,67	#######	33,33	######	0	0	0	0	50	57.551.000	100	114.861.491	100	91,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	1	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	Persen	100	125.000.000	50	57.310.491	50	65.000.000	16,67	#######	33,33	######	0	0	0	0	50	57.551.000	100	114.861.491	100	91,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	1	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	4	60.000.000	2	27.310.491	2	30.000.000	1	#######	1	######	0	0	0	0	2	26.945.000	4	54.255.491	100	90,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	1	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	2	65.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	30.606.000	2	60.606.000	100	93,24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	17.138.849.719	56,28	7.572.109.180	45,83	8.601.139.447	7,99	#######	8,6	######	6,5	1.505.142.358	8,87	1.502.035.700	31,96	7.344.784.556	88,24	14.916.893.736	88,24	87,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persen	100	507.561.800	41,67	97.944.334	50	262.561.800	16,67	#######	16,67	######	0	2.780.100	16,67	84.766.452	50	248.028.480	91,67	345.972.814	91,67	68,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	208.361.800	1	17.516.360	1	108.361.800	0	#######	0	######	0	2.780.100	1	75.735.452	1	118.309.800	2	135.826.160	100	65,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	#######	0	0	0	0	0	0	1	5.895.600	2	15.895.600	100	79,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	20.000.000	1	3.929.850	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	7.743.000	1	7.743.000	2	11.672.850	100	58,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	1	8.747.624	1	10.000.000	1	#######	0	0	0	0	0	0	1	6.680.080	2	15.427.704	100	77,14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	239.200.000	1	57.750.500	2	124.200.000	0	0	2	######	0	0	0	1.288.000	2	109.400.000	3	167.150.500	75	69,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**10.325.912.761**	**50**	**4.059.241.651**	**50**	**5.449.231.647**	**4,41**	**#######**	**5,15**	**######**	**5,15**	**1.145.434.915**	**5,15**	**888.958.143**	**19,85**	**4.777.887.356**	**69,85**	**8.837.129.007**	**69,85**	**85,58**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110	9.976.552.761	55	3.888.641.931	55	5.270.631.647	3	#######	4	######	4	1.106.494.915	3	840.123.143	14	4.612.232.356	69	8.500.874.287	62,73	85,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	30.600.000	1	9.464.500	1	15.600.000	0	0	0	0	0	0	1	12.895.000	1	12.895.000	2	22.359.500	100	73,07	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	318.760.000	12	161.135.220	12	163.000.000	3	#######	3	######	3	38.940.000	3	35.940.000	12	152.760.000	24	313.895.220	100	98,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersusunnya administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**909.895.158**	**72,7**	**656.930.700**	**37,23**	**193.516.000**	**0,35**	**#######**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,35**	**73.400.000**	**73,05**	**730.330.700**	**73,05**	**80,27**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	190.000.000	3	94.560.000	3	95.000.000	1	#######	0	0	0	0	0	0	1	73.400.000	4	167.960.000	66,67	88,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	102	100.000.000	101	92.236.000	51	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	92.236.000	99,02	92,24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	152	619.895.158	101	470.134.700	51	48.516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	470.134.700	66,45	75,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersusunnya administrasi umum kantor**	**Persen**	**100**	**2.295.480.000**	**53,91**	**1.268.296.524**	**46,09**	**1.013.980.000**	**11,72**	**#######**	**13,02**	**######**	**7,81**	**233.348.500**	**13,54**	**280.479.332**	**46,09**	**1.011.062.332**	**100**	**2.279.358.856**	**100**	**99,3**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	18	17.000.000	10	9.611.180	8	7.000.000	2	#######	0	0	2	2.000.000	4	2.577.500	8	6.172.500	18	15.783.680	100	92,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5.200.000	10	2.500.000	10	2.700.000	5	#######	5	######	0	0	0	0	10	2.699.000	20	5.199.000	100	99,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	63	70.280.000	33	36.308.150	30	33.280.000	10	#######	10	######	0	0	10	18.116.350	30	32.459.350	63	68.767.500	100	97,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	86.000.000	10	38.512.000	15	46.000.000	2	#######	3	######	2	7.308.500	8	19.165.200	15	45.601.200	25	84.113.200	100	97,81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	28	71.000.000	14	38.280.000	14	32.000.000	2	#######	2	######	5	8.340.000	5	10.920.000	14	32.160.000	28	70.440.000	100	99,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	88.000.000	30	52.640.000	20	35.000.000	4	#######	10	######	1	4.040.000	5	11.960.000	20	34.300.000	50	86.940.000	100	98,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	1.958.000.000	100	1.090.445.194	80	858.000.000	20	#######	20	######	20	211.660.000	20	217.740.282	80	857.670.282	180	1.948.115.476	100	99,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang kantor**	**Persen**	**100**	**1.175.000.000**	**39,47**	**490.628.500**	**52,63**	**668.000.000**	**7,89**	**#######**	**7,89**	**######**	**5,26**	**5.236.250**	**21,05**	**96.100.000**	**42,11**	**464.484.950**	**81,58**	**955.113.450**	**81,58**	**81,29**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	142.000.000	4	93.128.500	2	48.000.000	0	0	0	0	0	0	2	48.000.000	2	48.000.000	6	141.128.500	100	99,39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	42.000.000	3	41.600.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41.600.000	100	99,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	671.000.000	6	290.900.000	12	371.000.000	3	#######	0	0	0	0	6	48.100.000	9	370.248.700	15	661.148.700	75	98,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	120.000.000	2	65.000.000	5	49.000.000	0	0	3	######	2	5.236.250	0	0	5	46.236.250	7	111.236.250	100	92,7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang kantor**	**Persen**	**100**	**327.500.000**	**48,83**	**173.546.939**	**51,17**	**150.000.000**	**12,21**	**#######**	**12,21**	**######**	**12,21**	**25.980.000**	**12,21**	**26.848.518**	**48,83**	**141.700.800**	**97,65**	**315.247.739**	**97,65**	**96,26**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	165	20.000.000	80	8.200.000	85	10.000.000	20	#######	20	######	20	2.250.000	20	2.250.000	80	9.000.000	160	17.200.000	96,97	86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	275.000.000	12	151.846.939	12	120.000.000	3	#######	3	######	3	19.230.000	3	20.098.518	12	114.700.800	24	266.547.739	100	96,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	32.500.000	12	13.500.000	12	20.000.000	3	#######	3	######	3	4.500.000	3	4.500.000	12	18.000.000	24	31.500.000	100	96,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya penunjang barang milik daerah urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**1.597.500.000**	**50**	**825.520.532**	**50**	**863.850.000**	**10,81**	**#######**	**13,51**	**######**	**12,16**	**92.362.593**	**8,11**	**124.883.255**	**44,59**	**628.220.638**	**94,59**	**1.453.741.170**	**94,59**	**91**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	267.500.000	12	114.442.507	12	133.850.000	3	#######	3	######	3	8.920.098	3	31.725.750	12	77.423.350	24	191.865.857	100	71,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	55.000.000	12	22.805.000	12	30.000.000	2	#######	3	######	3	5.600.000	0	0	8	22.050.000	20	44.855.000	83,33	81,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	875.000.000	12	488.373.000	12	500.000.000	3	#######	3	######	3	77.842.495	3	93.157.505	12	342.000.000	24	830.373.000	100	94,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	400.000.000	1	199.900.025	1	200.000.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	186.747.288	2	386.647.313	100	96,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																								
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Tertatanya Desa**	**Persen**	**100**	**20.500.000**	**0**	**0**	**50**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**02**	**1**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Terlaksananya Penataan Usahaan Penetapan susunan Kelembagaan, Pengsian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Adat Desa**	**Persen**	**100**	**20.500.000**	**0**	**0**	**50**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	13	02	1	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	2	20.500.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA**	**Terbentuknya kawasan pedesaan**	**Persen**	**100**	**440.724.336**	**33,33**	**218.057.732**	**166,67**	**344.697.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**157.791.544**	**0**	**0**	**66,67**	**157.791.544**	**100**	**375.849.276**	**100**	**85,28**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**03**	**1**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antara Desa Yang Menjadi Kewenangan provinsi**	**Persen**	**100**	**440.724.336**	**33,33**	**218.057.732**	**166,67**	**344.697.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**157.791.544**	**0**	**0**	**66,67**	**157.791.544**	**100**	**375.849.276**	**100**	**85,28**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	03	1	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	1	102.789.000	0	0	1	102.789.000	0	0	0	0	1	86.436.544	0	0	1	86.436.544	1	86.436.544	100	84,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	1	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	337.935.336	1	218.057.732	1	77.615.000	0	0	0	0	1	71.355.000	0	0	1	71.355.000	2	289.412.732	100	85,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**911.817.896**	**54,46**	**636.672.586**	**45,54**	**828.049.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,54**	**485.339.246**	**0**	**0**	**45,54**	**485.339.246**	**100**	**1.122.011.832**	**100**	**123,05**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**04**	**1**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang dibina**	**Persen**	**100**	**911.817.896**	**54,46**	**636.672.586**	**45,54**	**828.049.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,54**	**485.339.246**	**0**	**0**	**45,54**	**485.339.246**	**100**	**1.122.011.832**	**100**	**123,05**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	04	1	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	50	4.598.000	0	0	50	4.598.000	0	0	0	0	50	1.653.000	0	0	50	1.653.000	50	1.653.000	100	35,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	828.635.316	1	221.208.000	1	582.694.000	0	0	0	0	1	479.215.246	0	0	1	479.215.246	2	700.423.246	100	84,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	60	78.584.580	60	69.173.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	69.173.893	100	88,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Berdayanya Lembaga-lembaga yang ada di Desa**	**Persen**	**100**	**4.952.581.661**	**96,55**	**2.706.363.870**	**65,52**	**2.050.906.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,52**	**1.748.158.829**	**0**	**0**	**65,52**	**1.748.158.829**	**162,07**	**4.454.522.699**	**162,07**	**89,94**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**05**	**1**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yan**	-	**Persen**	**100**	**4.952.581.661**	**96,55**	**2.706.363.870**	**65,52**	**2.050.906.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,52**	**1.748.158.829**	**0**	**0**	**65,52**	**1.748.158.829**	**162,07**	**4.454.522.699**	**162,07**	**89,94**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	05	1	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	24	333.820.854	15	144.548.300	10	175.182.000	0	0	0	0	10	156.065.088	0	0	10	156.065.088	25	300.613.388	104,17	90,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	4	260.353.268	2	160.266.500	2	84.000.000	0	0	0	0	2	78.645.000	0	0	2	78.645.000	4	238.911.500	100	91,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	332.619.141	1	198.059.200	1	125.791.000	0	0	0	0	1	113.848.018	0	0	1	113.848.018	2	311.907.218	200	93,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	0	4.025.788.398	10	2.203.489.870	6	1.665.933.000	0	0	0	0	6	1.399.600.723	0	0	6	1.399.600.723	16	3.603.090.593	0	89,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**23.826.145.764**	**83,87**	**9.641.706.063**	**51,25**	**12.751.828.900**	**0**	**0**	**0,36**	**0**	**80,29**	**8.250.646.030**	**2,51**	**5.345.000**	**83,15**	**8.255.991.030**	**167,03**	**17.897.697.093**	**167,03**	**75,12**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**215.383.857**	**50**	**180.668.000**	**16,67**	**83.047.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,17**	**30.343.675**	**0**	**0**	**54,17**	**30.343.675**	**104,17**	**211.011.675**	**104,17**	**97,97**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	16.937.182	1	12.514.000	1	3.501.000	0	0	0	0	1	3.501.000	0	0	1	3.501.000	2	16.015.000	100	94,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.555.675	0	0	1	8.555.675	0	0	0	0	1	5.105.675	0	0	1	5.105.675	1	5.105.675	100	59,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	10.115.000	10	5.578.000	1	4.537.000	0	0	0	0	10	4.537.000	0	0	10	4.537.000	20	10.115.000	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	179.776.000	1	162.576.000	1	66.454.000	0	0	0	0	1	17.200.000	0	0	1	17.200.000	2	179.776.000	200	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**17.267.136.595**	**341,94**	**7.578.382.690**	**41,94**	**8.511.168.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325,81**	**5.893.887.552**	**16,13**	**5.345.000**	**341,94**	**5.899.232.552**	**683,87**	**13.477.615.242**	**683,87**	**78,05**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1	16.937.116.500	96	7.401.870.890	0	8.362.318.400	0	0	0	0	96	5.755.932.552	0	0	96	5.755.932.552	192	13.157.803.442	19.200,00	77,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	11.264.260	5	5.698.300	1	5.345.000	0	0	0	0	0	0	5	5.345.000	5	5.345.000	10	11.043.300	500	98,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	28	318.755.835	5	170.813.500	12	143.505.000	0	0	0	0	5	137.955.000	0	0	5	137.955.000	10	308.768.500	35,71	96,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**32.678.000**	**0**	**0**	**100**	**32.678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,67**	**32.678.000**	**0**	**0**	**16,67**	**32.678.000**	**16,67**	**32.678.000**	**16,67**	**100**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	32.678.000	0	0	12	32.678.000	0	0	0	0	2	32.678.000	0	0	2	32.678.000	2	32.678.000	16,67	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Kepegawaian yang di hasilkan dan tersedia**	**Persen**	**100**	**32.000.000**	**100**	**32.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**32.000.000**	**100**	**100**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12	
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	32.000.000	1	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32.000.000	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.056.382.669**	**63,64**	**838.765.835**	**63,64**	**2.979.852.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,09**	**1.230.011.363**	**0**	**0**	**59,09**	**1.230.011.363**	**122,73**	**2.068.777.198**	**122,73**	**51**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	45.158.341	12	20.875.800	12	21.952.500	0	0	0	0	12	21.952.500	0	0	12	21.952.500	24	42.828.300	100	94,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	209.943.675	2	113.818.200	2	92.762.500	0	0	0	0	2	92.304.500	0	0	2	92.304.500	4	206.122.700	100	98,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	302.661.177	2	143.195.200	2	159.258.565	0	0	0	0	2	159.124.500	0	0	2	159.124.500	4	302.319.700	100	99,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	23.749.000	12	15.849.000	12	18.700.000	0	0	0	0	12	13.300.000	0	0	12	13.300.000	24	29.149.000	400	122,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	471.385.000	2	166.820.000	2	304.360.000	0	0	0	0	2	185.425.500	0	0	2	185.425.500	4	352.245.500	100	74,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	3.003.485.476	12	378.207.635	12	2.382.819.000	0	0	0	0	9	757.904.363	0	0	9	757.904.363	21	1.136.111.998	87,5	37,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**umlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**1.074.552.161**	**54,55**	**503.297.181**	**45,45**	**567.376.000**	**0**	**0**	**9,09**	**0**	**18,18**	**549.976.000**	**18,18**	**0**	**45,45**	**549.976.000**	**100**	**1.053.273.181**	**100**	**98,02**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	530.000.000	1	0	1	530.000.000	0	0	0	0	1	514.400.000	0	0	1	514.400.000	2	514.400.000	100	97,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	61.494.311	1	61.494.311	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	61.494.311	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	203.729.350	1	163.564.870	1	37.376.000	0	0	0	0	1	35.576.000	0	0	1	35.576.000	2	199.140.870	100	97,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	71.500.000	2	71.250.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	71.250.000	100	99,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	207.828.500	1	206.988.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	206.988.000	100	99,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Persen**	**100**	**404.795.913**	**50**	**140.457.822**	**50**	**221.208.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**165.494.758**	**0**	**0**	**50**	**165.494.758**	**100**	**305.952.580**	**100**	**75,58**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	7.270.000	12	1.170.000	12	5.500.000	0	0	0	0	12	4.500.000	0	0	12	4.500.000	24	5.670.000	100	77,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	334.392.100	24	112.287.822	24	179.708.260	0	0	0	0	24	124.994.758	0	0	24	124.994.758	48	237.282.580	100	70,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	63.133.813	12	27.000.000	12	36.000.000	0	0	0	0	12	36.000.000	0	0	12	36.000.000	24	63.000.000	100	99,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**743.216.569**	**50**	**368.134.535**	**50**	**356.498.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**348.254.682**	**0**	**0**	**50**	**348.254.682**	**100**	**716.389.217**	**100**	**96,39**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	327.795.378	15	156.051.910	15	163.496.000	0	0	0	0	15	155.488.684	0	0	15	155.488.684	30	311.540.594	100	95,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	62.820.000	2	38.910.000	2	23.820.000	0	0	0	0	2	23.820.000	0	0	2	23.820.000	4	62.730.000	100	99,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	352.601.191	2	173.172.625	2	169.182.000	0	0	0	0	2	168.945.998	0	0	2	168.945.998	4	342.118.623	100	97,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																						
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi Yang Terpasang / Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terminal Tipe B**	**Persen**	**100**	**30.838.780.209**	**46,4**	**6.854.207.305**	**12,76**	**22.923.793.545**	**2,09**	**#######**	**2,09**	**######**	**5,8**	**5.135.426.370**	**2,09**	**15.893.517.750**	**12,06**	**21.426.262.120**	**58,47**	**28.280.469.425**	**58,47**	**91,7**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**02**	**1**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persen**	**100**	**951.047.000**	**0**		**100**	**951.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**798.634.350**	**0**	**0**	**100**	**798.634.350**	**100**	**798.634.350**	**100**	**83,97**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	15	951.047.000	0	0	15	951.047.000	0	0	0	0	15	798.634.350	0	0	15	798.634.350	15	798.634.350	100	83,97	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah terminal yang memiliki sarana prasana yang lengkap dan berfungsi**	**Persen**	**100**	**27.958.989.945**	**16,67**	**6.150.474.305**	**43,33**	**21.453.368.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,33**	**4.307.872.020**	**10**	**15.810.652.750**	**33,33**	**20.118.524.770**	**50**	**26.268.999.075**	**50**	**93,96**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	8	19.226.514.100	1	4.692.335.000	2	14.229.172.100	0	0	0	0	0	0	1	13.091.759.900	1	13.091.759.900	2	17.784.094.900	25	92,5	Dinas Perhubungan
2	15	02	1	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	19	6.010.426.845	4	1.458.139.305	8	4.502.147.445	0	0	0	0	7	4.307.872.020	0	0	7	4.307.872.020	11	5.766.011.325	57,89	95,93	Dinas Perhubungan
2	15	02	1	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	3	2.722.049.000	0	0	3	2.722.049.000	0	0	0	0	0	0	0	2	2.718.892.850	2	2.718.892.850	2	2.718.892.850	66,67	99,88	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,1**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Jumlah Pelaksaan MRLL untuk jaringan Jalan Provinsi**	**Persen**	**100**	**769.382.264**	**42,86**	**205.166.000**	**57,14**	**339.478.000**	**28,57**	**#######**	**28,57**	**######**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,14**	**339.478.000**	**100**	**544.644.000**	**100**	**70,79**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,1	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	21	769.382.264	9	205.166.000	12	339.478.000	6	########	6	######	0	0	0	0	12	339.478.000	21	544.644.000	100	70,79	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,1**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Persetujuan Hasil Andalalin untuk jalan provinsi**	**Persen**	**100**	**260.846.000**	**57,14**	**188.771.000**	**42,86**	**83.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,86**	**73.225.000**	**42,86**	**73.225.000**	**100**	**261.996.000**	**100**	**100,44**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	5	172.173.000	2	62.972.000	3	83.500.000	0	0	0	0	0	0	3	73.225.000	3	73.225.000	5	136.197.000	100	79,1	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,1	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	88.673.000	2	125.799.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	125.799.000	100	141,87	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,1**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi**	**Persen**	**100**	**261.697.000**	**38,89**	**149.386.000**	**66,67**	**96.400.000**	**16,67**	**#######**	**16,67**	**######**	**16,67**	**28.920.000**	**16,67**	**9.640.000**	**66,67**	**96.400.000**	**105,56**	**245.786.000**	**105,56**	**93,92**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,1	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	14	158.931.000	2	34.935.000	12	96.400.000	3	########	3	######	3	28.920.000	3	9.640.000	12	96.400.000	14	131.335.000	100	82,64	Dinas Perhubungan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	15	02	1,1	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor ProvinsiPelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor ProvinsiPelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan	2	62.531.000	2	48.863.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48.863.000	100	78,14	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,1	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	40.235.000	2	29.710.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29.710.000	100	73,84	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,1**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Persen**	**100**	**62.531.000**	**100**	**62.039.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**62.039.000**	**100**	**99,21**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,1	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Unit	87	62.531.000	87	62.039.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	62.039.000	100	99,21	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,1**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah izin trayek AKDP**	**Persen**	**100**	**67.399.000**	**42,23**	**56.788.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,23**	**56.788.000**	**42,23**	**84,26**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Laporan	206	67.399.000	87	56.788.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	56.788.000	42,23	84,26	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,2**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen tarif angkutan disetiap Kabupaten kota**	**Persen**	**100**	**66.888.000**	**100**	**41.583.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**41.583.000**	**100**	**62,17**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,2	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	66.888.000	1	41.583.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41.583.000	100	62,17	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Izin Pelayaran Diterbitkan / Persentase Pelabuhan Dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**100**	**91.830.885.912**	**34,05**	**66.888.750.825**	**58,13**	**21.740.671.757**	**0,09**	**#######**	**7,19**	**######**	**30,01**	**6.017.572.095**	**20,66**	**7.272.784.990**	**57,95**	**20.345.593.930**	**92**	**87.234.344.755**	**92**	**94,99**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**03**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Telah Memiliki Izin**	**Persen**	**100**	**84.867.000**	**44,44**	**28.152.000**	**55,56**	**49.500.000**	**0**	**0**	**13,89**	**######**	**27,78**	**14.344.200**	**13,89**	**2.808.000**	**55,56**	**19.503.200**	**100**	**47.655.200**	**100**	**56,15**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Dokumen	72	84.867.000	32	28.152.000	40	49.500.000	0	0	10	######	20	14.344.200	10	2.808.000	40	19.503.200	72	47.655.200	100	56,15	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	**Jumlah Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang memiliki izin**	**Persen**	**100**	**112.031.000**	**18**	**46.934.000**	**60**	**49.500.000**	**0**	**0**	**14**	**######**	**16**	**9.632.300**	**30**	**25.822.000**	**60**	**40.528.300**	**78**	**87.462.300**	**78**	**78,07**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Dokumen	50	112.031.000	9	46.934.000	30	49.500.000	0	0	7	######	8	9.632.300	15	25.822.000	30	40.528.300	39	87.462.300	78	78,07	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**126.431.000**	**29,03**	**42.957.000**	**70,97**	**63.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,71**	**27.994.000**	**32,26**	**26.007.000**	**70,97**	**54.001.000**	**100**	**96.958.000**	**100**	**76,69**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen	31	126.431.000	9	42.957.000	22	63.900.000	0	0	0	0	12	27.994.000	10	26.007.000	22	54.001.000	31	96.958.000	100	76,69	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Badan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang memiliki Izin**	**Persen**	**100**	**119.749.000**	**42,78**	**46.249.000**	**57,22**	**73.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,43**	**46.301.000**	**19,79**	**15.108.500**	**57,22**	**61.409.500**	**100**	**107.658.500**	**100**	**89,9**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	187	119.749.000	80	46.249.000	107	73.500.000	0	0	0	0	70	46.301.000	37	15.108.500	107	61.409.500	187	107.658.500	100	89,9	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**126.431.000**	**80**	**98.655.000**	**60**	**63.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**17.632.000**	**20**	**29.237.000**	**60**	**46.869.000**	**140**	**145.524.000**	**140**	**115,1**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	126.431.000	2	49.327.500	3	63.900.000	0	0	0	0	2	17.632.000	1	29.237.000	3	46.869.000	5	96.196.500	100	76,09	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Unit dan Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**90.547.527.912**	**33,33**	**66.483.943.825**	**55,56**	**21.058.971.757**	**3,7**	**#######**	**11,11**	**######**	**14,81**	**5.757.496.595**	**18,52**	**7.031.101.490**	**48,15**	**19.806.849.930**	**81,48**	**86.290.793.755**	**81,48**	**95,3**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	17	84.431.763.326	9	66.483.943.825	5	14.943.207.171	0	0	1	######	1	3.832.834.945	1	4.597.735.540	3	13.913.827.230	12	80.397.771.055	70,59	95,22	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	10	6.115.764.586	0	0	10	6.115.764.586	1	#######	2	######	3	1.924.661.650	4	2.433.365.950	10	5.893.022.700	10	5.893.022.700	100	96,36	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan dan Unit Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**117.503.000**	**36,87**	**27.236.000**	**49,31**	**72.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,26**	**45.394.000**	**17,05**	**20.800.000**	**49,31**	**66.194.000**	**86,18**	**93.430.000**	**86,18**	**79,51**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	187	117.503.000	80	27.236.000	107	72.400.000	0	0	0	0	70	45.394.000	37	20.800.000	107	66.194.000	187	93.430.000	100	79,51	Dinas Perhubungan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**15**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**72.400.000**	**0**		**100**	**72.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,62**	**45.394.000**	**37,38**	**20.800.000**	**100**	**66.194.000**	**100**	**66.194.000**	**100**	**91,43**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	02	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	107	72.400.000	0	0	107	72.400.000	0	0	0	0	67	45.394.000	40	20.800.000	107	66.194.000	107	66.194.000	100	91,43	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Laporan dan Unit Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**77.400.000**	**0**		**100**	**77.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**7.900.000**	**75**	**59.185.000**	**100**	**67.085.000**	**100**	**67.085.000**	**100**	**86,67**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	20	77.400.000	0	0	20	77.400.000	0	0	0	0	5	7.900.000	15	59.185.000	20	67.085.000	20	67.085.000	100	86,67	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,2**		**Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**175.473.000**	**50**	**48.547.000**	**50**	**86.800.000**	**0**	**0**	**12,82**	**######**	**24,36**	**35.484.000**	**12,82**	**27.636.000**	**50**	**77.400.000**	**100**	**125.947.000**	**100**	**71,78**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	156	175.473.000	78	48.547.000	78	86.800.000	0	0	20	######	38	35.484.000	20	27.636.000	78	77.400.000	156	125.947.000	100	71,78	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,2**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**161.073.000**	**34,06**	**66.077.000**	**51,53**	**72.400.000**	**0**	**0**	**17,47**	**######**	**16,59**	**10.000.000**	**17,47**	**14.280.000**	**51,53**	**39.560.000**	**85,59**	**105.637.000**	**85,59**	**65,58**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	229	161.073.000	78	66.077.000	118	72.400.000	0	0	40	######	38	10.000.000	40	14.280.000	118	39.560.000	196	105.637.000	85,59	65,58	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**62.299.697.430**	**49,5**	**26.690.419.554**	**50,41**	**32.407.462.930**	**0,01**	**#######**	**0,02**	**######**	**0,03**	**5.962.308.223**	**50,02**	**39.745.580.593**	**50,07**	**59.613.917.517**	**99,58**	**86.304.337.071**	**99,58**	**138,53**	**Dinas Perhubungan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**803.877.194**	**77,27**	**143.281.200**	**22,73**	**616.426.400**	**0**	**0**	**4,55**	**######**	**4,55**	**64.068.300**	**13,64**	**419.754.600**	**22,73**	**517.314.700**	**100**	**660.595.900**	**100**	**82,18**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	73.819.152	2	16.587.500	1	53.950.000	0	0	1	######	0	0	0	0	1	33.491.800	3	50.079.300	100	67,84	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	77.204.094	1	5.140.000	1	71.648.800	0	0	0	0	1	64.068.300	0	0	1	64.068.300	2	69.208.300	100	89,64	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	10.150.059	1	4.908.700	1	5.048.800	0	0	0	0	0	0	1	4.928.800	1	4.928.800	2	9.837.500	100	96,92	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	97.741.260	1	5.756.000	1	90.748.800	0	0	0	0	0	0	1	88.385.800	1	88.385.800	2	94.141.800	100	96,32	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	544.962.629	12	110.889.000	1	395.030.000	0	0	0	0	0	0	1	326.440.000	1	326.440.000	13	437.329.000	100	80,25	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu / Pemenuhan Gaji ASN Dinas Selama Setahun**	**Persen**	**100**	**37.678.518.888**	**50**	**18.227.596.141**	**50**	**19.355.544.971**	**5,77**	**#######**	**9,62**	**######**	**15,38**	**3.763.561.360**	**15,38**	**5.594.906.716**	**46,15**	**18.799.730.991**	**96,15**	**37.027.327.132**	**96,15**	**98,27**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	36.552.180.417	12	17.737.086.141	12	18.733.175.171	3	#######	3	######	3	3.508.961.360	3	5.337.776.716	12	18.250.920.991	24	35.988.007.132	100	98,46	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	24	1.105.697.757	12	484.760.000	12	612.480.000	0	0	2	######	5	254.600.000	5	257.130.000	12	548.810.000	24	1.033.570.000	100	93,48	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	12.466.260	1	2.875.000	1	5.613.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.875.000	50	23,06	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	8.174.454	1	2.875.000	1	4.276.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.875.000	50	35,17	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu**	**Persen**	**100**	**195.449.701**	**66,67**	**12.293.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**12.293.000**	**66,67**	**6,29**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	4.018.454	2	3.600.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.600.000	100	89,59	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	92.578.787	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	92.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	6.852.460	2	8.693.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.693.000	100	126,86	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**7.537.706**	**100**	**6.791.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**6.791.500**	**100**	**90,1**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	7.537.706	2	6.791.500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.791.500	100	90,1	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)**	**Persen**	**100**	**1.113.624.252**	**66,81**	**223.709.500**	**2,21**	**507.397.000**	**0**	**0**	**0,44**	**######**	**0,59**	**326.871.000**	**1,18**	**474.657.000**	**2,21**	**847.390.000**	**69,03**	**1.071.099.500**	**69,03**	**96,18**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	253	356.550.000	250	156.200.000	3	199.800.000	0	0	0	0	1	242.066.000	2	348.150.000	3	590.216.000	253	746.416.000	100	209,34	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	215	401.431.406	203	67.509.500	12	307.597.000	0	0	3	######	3	84.805.000	6	126.507.000	12	257.174.000	215	324.683.500	100	80,88	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	200.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	90.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	65.642.846	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Dinas**	**Persen**	**100**	**6.735.995.198**	**59,22**	**2.438.970.200**	**29,13**	**3.269.390.800**	**0**	**0**	**10,19**	**######**	**14,56**	**1.401.181.763**	**16,02**	**958.234.798**	**40,78**	**2.894.775.307**	**100**	**5.333.745.507**	**100**	**79,18**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	24	220.154.540	12	148.362.998	12	26.780.000	0	0	3	######	3	7.393.000	6	18.476.500	12	26.004.500	24	174.367.498	100	79,2	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	24	908.413.506	12	449.914.212	12	375.347.900	0	0	3	######	3	187.308.700	6	173.552.200	12	368.643.000	24	818.557.212	100	90,11	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	93.448.281	12	90.836.850			0	0	3	######	5	15.028.600	4	12.654.500	12	32.341.350	24	123.178.200	200	131,81	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	44.114.400	12	18.960.000			0	0	3	######	4	9.520.000	5	5.200.000	12	16.260.000	24	35.220.000	200	79,84	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bulan	24	817.785.900	12	428.513.250	12	324.690.900	0	0	3	######	5	152.937.600	4	128.609.300	12	324.690.900	24	753.204.150	100	92,1	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	24	25.740.000	12	4.500.000	12	9.300.000	0	0	3	######	4	3.050.000	5	4.450.000	12	9.300.000	24	13.800.000	100	53,61	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	62	4.626.338.571	50	1.297.882.890	12	2.533.272.000	0	0	3	######	6	1.025.943.863	3	615.292.298	12	2.117.535.557	62	3.415.418.447	100	73,83	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Ketersediaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor**	**Persen**	**100**	**7.028.627.329**	**21,64**	**2.425.575.655**	**80,7**	**4.281.656.385**	**8,19**	**#######**	**14,62**	**######**	**1,75**	**370.263.300**	**56,14**	**824.449.645**	**80,7**	**4.051.433.595**	**102,34**	**6.477.099.250**	**102,34**	**92,15**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	791.230.000	1	241.150.000	1	545.930.000	1	#######	0	0	0	0	0	0	1	489.500.000	2	730.650.000	100	92,34	Dinas Perhubungan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	13	1.479.530.000	0	0	13	1.479.530.000	11	#######	2	######	0	0	0	0	13	1.426.880.000	13	1.426.880.000	100	96,44	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	55.750.000	1	55.709.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55.709.000	100	99,93	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	123	1.279.165.890	14	339.775.000	109	925.881.640	2	#######	19	######	0	0	88	519.407.750	109	924.311.250	123	1.264.086.250	100	98,82	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	231.549.600	12	197.767.400	1	9.754.600	0	0	0	0	0	0	1	9.754.600	1	9.754.600	13	207.522.000	185,71	89,62	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	731.743.721	6	668.933.005	4	30.253.395	0	0	0	0	0	0	4	30.253.395	4	30.253.395	10	699.186.400	100	95,55	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	13	2.259.658.118	3	922.241.250	10	1.290.306.750	0	0	4	######	3	370.263.300	3	265.033.900	10	1.170.734.350	13	2.092.975.600	100	92,62	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**3.230.568.788**	**59,02**	**1.752.756.578**	**39,34**	**1.203.304.000**	**0**	**0**	**13,11**	**######**	**19,67**	**2.900.000**	**26,23**	**2.547.862.684**	**59,02**	**3.544.095.274**	**118,03**	**5.296.851.852**	**118,03**	**163,96**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	28.992.000	12	22.398.000	12	3.000.000	0	0	0	0	12	2.900.000	0	0	12	2.900.000	24	25.298.000	100	87,26	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	24	2.498.285.168	12	1.028.358.578	12	1.200.304.000	0	0	2	######	0	0	10	879.097.637	12	1.044.930.227	24	2.073.288.805	100	82,99	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	702.291.620	12	702.000.000			0	0	6	######	0	0	6	1.668.765.047	12	2.496.265.047	24	3.198.265.047	200	455,4	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebetuhan Gedung Kantor serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**	**Persen**	**100**	**5.505.498.374**	**49,47**	**1.459.445.780**	**50,53**	**3.173.743.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,01**	**33.462.500**	**50,17**	**28.925.715.150**	**50,18**	**28.959.177.650**	**99,65**	**30.418.623.430**	**99,65**	**552,51**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	67	834.500.000	25	39.504.180	42	94.500.000	0	0	0	0	21	33.462.500	21	68.315.000	42	101.777.500	67	141.281.680	100	16,93	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	150.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	24	58.700.000	12	5.940.000	12	40.850.000	0	0	0	0	0	0	12	35.000.000	12	35.000.000	24	40.940.000	100	69,74	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dioelihara/Direhabilitasi	Meter Perseoi	283000	4.446.438.374	140000	1.406.071.600	143000	3.030.463.374	0	0	0	0	0	0	142000	28.816.350.150	142000	28.816.350.150	282000	30.222.421.750	99,65	679,7	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	15.860.000	12	7.930.000	13	7.930.000	0	0	0	0	0	0	13	6.050.000	13	6.050.000	25	13.980.000	100	88,15	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																								
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	-	**Persen**	**100**	**20.294.488.200**	**7,5**	**14.260.752.263**	**50**	**10.216.153.200**	**2,5**	**#######**	**5**	**######**	**5**	**11.406.585.977**	**8,75**	**13.841.649.937**	**21,25**	**47.630.516.891**	**28,75**	**61.891.269.154**	**28,75**	**304,97**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**02**	**1**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**20.294.488.200**	**7,5**	**14.260.752.263**	**50**	**10.216.153.200**	**2,5**	**#######**	**5**	**######**	**5**	**11.406.585.977**	**8,75**	**13.841.649.937**	**21,25**	**47.630.516.891**	**28,75**	**61.891.269.154**	**28,75**	**304,97**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	02	1	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	4	935.824.000	0	0	2	333.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	224.503.000	1	30.705.000	1	187.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.705.000	50	13,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	659.096.000	2	210.366.819	2	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	210.366.819	50	31,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	6	633.646.800	3	239.800.000	3	324.550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	239.800.000	50	37,84	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	24	884.714.400	0	0	12	453.146.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	1.912.896.000	0	0	1	979.776.000	0	0	2	######	2	38.000.000	1	54.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	250	6,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	2	4.772.100.000	0	0	1	4.156.500.000	2	#######	2	######	2	200.000.000	2	1.650.000.000	8	2.150.000.000	8	2.150.000.000	400	45,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	2	2.050.000.000	2	11.000.000.000	1	1.050.000.000	2	#######	2	######	2	11.000.000.000	1	11.000.000.000	7	44.000.000.000	9	55.000.000.000	450	2.682,93	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	4	1.335.042.000	0	0	2	683.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	202.500.000	0	0	50	152.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	2	1.251.238.000	1	317.119.444	1	640.878.000	0	0	2	######	2	168.585.977	2	1.029.449.937	6	1.242.316.891	7	1.559.436.335	350	124,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	6	5.082.928.000	3	2.462.761.000	3	655.000.000	0	0	0	0	0	0	6	38.200.000	6	38.200.000	9	2.500.961.000	150	49,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	2	350.000.000	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	100	20	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	**Persen**	**100**	**9.493.022.540**	**4,29**	**842.475.897**	**51,43**	**4.971.324.340**	**1,43**	**#######**	**2,86**	**######**	**2,86**	**198.372.500**	**2,86**	**198.372.500**	**10**	**774.390.000**	**14,29**	**1.616.865.897**	**14,29**	**17,03**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**03**	**1**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**773.320.900**	**0**	**0**	**50**	**465.623.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	1	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	4	210.330.000	0	0	2	107.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	40	562.990.900	0	0	20	357.893.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	**1**		**Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**8.719.701.640**	**11,54**	**842.475.897**	**53,85**	**4.505.700.840**	**3,85**	**#######**	**7,69**	**######**	**7,69**	**198.372.500**	**7,69**	**198.372.500**	**26,92**	**774.390.000**	**38,46**	**1.616.865.897**	**38,46**	**18,54**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	1	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	2	122.475.800	1	26.185.000	1	91.999.800	0	0	1	######	1	19.100.000	1	19.100.000	3	57.300.000	4	83.485.000	200	68,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	617.779.062	0	0	1	316.423.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	490.412.070	1	351.246.297	1	251.186.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	351.246.297	50	71,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	2	131.700.000	0	0	1	77.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangka t Daerah	4	1.239.220.080	0	0	2	634.722.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	4	2.294.552.126	1	465.044.600	3	1.175.258.406	1	#######	1	######	1	179.272.500	1	179.272.500	4	717.090.000	5	1.182.134.600	125	51,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	1.210.887.522	0	0	1	620.210.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	642.810.546	0	0	2	329.244.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	16	03	1	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	1.609.396.452	0	0	1	824.325.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	2	360.467.982	0	0	1	184.629.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																								
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	**Persen**	**100**	**7.757.788.000**	**4,35**	**177.666.379**	**50,72**	**3.963.218.000**	**0**	**0**	**0,72**	######	**0,72**	**23.000.000**	**0,72**	**23.000.000**	**2,17**	**69.000.000**	**6,52**	**246.666.379**	**6,52**	**3,18**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**20**	**02**	**1**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**7.757.788.000**	**4,35**	**177.666.379**	**50,72**	**3.963.218.000**	**0**	**0**	**0,72**	######	**0,72**	**23.000.000**	**0,72**	**23.000.000**	**2,17**	**69.000.000**	**6,52**	**246.666.379**	**6,52**	**3,18**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	8	223.906.000	4	27.381.000	4	139.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	27.381.000	50	12,23	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100	379.240.000	0	0	50	160.000.000	0	0	1	######	1	23.000.000	1	23.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000	3	18,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1	03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2	332.100.000	0	0	1	170.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	20	358.668.000	0	0	10	183.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1	05	Pengembangan Infrastuktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	3	5.102.264.000	0	0	2	2.613.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5	1.361.610.000	2	150.285.379	3	697.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	150.285.379	40	11,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																								
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	**Persen**	**100**	**1.012.721.000**	**15,79**	**23.822.000**	**52,63**	**478.905.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,26**	**24.500.000**	**15,79**	**56.209.968**	**21,05**	**80.709.968**	**36,84**	**104.531.968**	**36,84**	**10,32**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**21**	**02**	**1**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**761.749.000**	**23,08**	**23.822.000**	**53,85**	**350.405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,69**	**24.500.000**	**23,08**	**56.209.968**	**30,77**	**80.709.968**	**53,85**	**104.531.968**	**53,85**	**13,72**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	1	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	3	155.816.000	0	0	2	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	2	294.708.000	0	0	1	111.000.000	0	0	0	0	0	0	1	21.950.000	1	21.950.000	1	21.950.000	50	7,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	6	191.675.000	3	23.822.000	3	98.175.000	0	0	0	0	1	24.500.000	2	34.259.968	3	58.759.968	6	82.581.968	100	43,08	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	2	119.550.000	0	0	1	61.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**	**02**	**1**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**250.972.000**	**0**		**50**	**128.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	1	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	6	250.972.000	0	0	3	128.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**22.907.006.817**	**53,39**	**7.696.615.852**	**50,44**	**11.793.539.009**	**28,02**	########	**37,17**	######	**61,36**	**5.653.582.549**	**72,57**	**8.357.827.305**	**199,12**	**19.493.145.632**	**252,51**	**27.189.761.484**	**252,51**	**118,7**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**243.666.000**	**47,06**	**60.240.000**	**50**	**106.675.000**	**0**	**0**	**29,41**	######	**32,35**	**17.439.000**	**88,24**	**87.180.000**	**150**	**153.953.000**	**197,06**	**214.193.000**	**197,06**	**87,9**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40.724.000	1	5.320.000	1	9.500.000	0	0	0	0	1	2.520.000	2	19.920.000	3	22.440.000	4	27.760.000	200	68,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	89.175.000	1	28.295.000	1	45.675.000	0	0	1	######	1	2.520.000	2	41.935.000	4	81.390.000	5	109.685.000	250	123	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	14.500.000	1	4.750.000	1	9.500.000	0	0	0	0	0	0	1	5.750.000	1	5.750.000	2	10.500.000	100	72,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	22.612.000	1	4.475.000	2	9.500.000	0	0	1	######	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	4	19.475.000	100	86,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	76.655.000	12	17.400.000	12	32.500.000	0	0	8	######	8	7.399.000	24	14.575.000	40	29.373.000	52	46.773.000	216,67	61,02	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**13.317.467.963**	**116,95**	**5.075.014.321**	**50,85**	**6.691.007.103**	**93,22**	########	**106,78**	######	**106,78**	**3.823.624.925**	**135,59**	**4.869.764.795**	**442,37**	**12.189.294.619**	**559,32**	**17.264.308.940**	**559,32**	**129,64**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	12.528.781.435	56	4.987.474.321	14	6.417.180.735	55	########	55	######	55	3.760.184.925	55	4.742.824.795	220	11.959.464.619	276	16.946.938.940	985,71	135,26	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	290.716.000	0	0	1	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	9.500.000	0	0	1	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	56.604.600	1	6.000.000	1	28.992.600	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	11.000.000	100	19,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	422.365.928	12	81.540.000	12	216.333.768	0	0	8	######	8	63.440.000	24	121.940.000	40	224.830.000	52	306.370.000	216,67	72,54	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	9.500.000	0	0	1	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**185.620.000**	**48,98**	**38.160.000**	**51,02**	**99.220.000**	**0**	**0**	**18,37**	######	**18,37**	**19.080.000**	**18,37**	**38.160.000**	**55,1**	**66.780.000**	**104,08**	**104.940.000**	**104,08**	**56,53**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	121.620.000	12	8.160.000	12	65.220.000	0	0	1	######	1	4.080.000	1	8.160.000	3	14.280.000	15	22.440.000	62,5	18,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	61.500.000	12	30.000.000	12	31.500.000	0	0	8	######	8	15.000.000	8	30.000.000	24	52.500.000	36	82.500.000	150	134,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.180.462.600**	**32,35**	**187.369.486**	**50**	**676.090.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,65**	**64.000.000**	**119,12**	**69.000.000**	**236,76**	**133.000.000**	**269,12**	**320.369.486**	**269,12**	**27,14**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	60.000.000	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	493.807.280	1	94.483.000	1	252.925.680	0	0	0	0	80	64.000.000	80	64.000.000	160	128.000.000	161	222.483.000	8,050.00	45,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	12.873.000	1	4.980.000	1	7.813.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	9.980.000	100	77,53	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	222.282.320	10	39.974.686	10	113.851.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	39.974.686	50	17,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	84.000.000	0	0	10	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	307.500.000	10	47.931.800	10	157.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	47.931.800	50	15,59	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**3.850.378.291**	**18,42**	**891.171.946**	**50**	**1.995.112.081**	**21,05**	########	**21,05**	######	**23,68**	**665.022.135**	**26,32**	**1.244.806.791**	**92,11**	**2.766.280.708**	**110,53**	**3.657.452.654**	**110,53**	**94,99**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	46.772.800	1	42.824.900	1	23.956.800	1	########	1	######	1	6.604.500	1	12.904.500	4	29.718.500	5	72.543.400	250	155,1	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	54.978.400	1	3.305.000	1	15.500.000	1	########	1	######	2	5.000.000	2	9.370.400	6	22.370.400	7	25.675.400	350	46,7	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	209.050.144	1	53.784.500	1	107.074.464	0	0	0	0	0	0	1	25.151.000	1	25.151.000	2	78.935.500	100	37,76	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	176.670.400	1	42.453.250	1	75.000.000	2	########	2	######	2	25.627.000	2	65.194.000	8	121.521.000	9	163.974.250	450	92,81	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	57.040.000	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	50	52,59	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	203.304.000	1	54.939.300	1	133.000.000	2	########	2	######	2	49.205.000	2	134.337.500	8	249.802.500	9	304.741.800	450	149,89	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	3.048.562.547	1	663.864.996	1	1.556.580.817	2	########	2	######	2	578.585.635	2	997.849.391	8	2.317.717.308	9	2.981.582.304	450	97,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	24	54.000.000	0	0	12	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.656.210.400**	**33,33**	**944.142.000**	**55,56**	**1.453.794.400**	**22,22**	**########**	**66,67**	**######**	**66,67**	**573.604.000**	**66,67**	**863.754.000**	**222,22**	**2.141.962.000**	**255,56**	**3.086.104.000**	**255,56**	**116,18**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.200.848.000	1	407.900.000	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	407.900.000	50	33,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	450.000.000	0	0	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	177.382.400	0	0	1	90.854.400	0	0	2	######	2	60.000.000	2	131.200.000	6	251.200.000	6	251.200.000	300	141,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	415.740.000	1	377.349.000	1	212.940.000	2	########	2	######	2	318.950.000	2	537.900.000	8	1.306.800.000	9	1.684.149.000	450	405,1	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	412.240.000	1	158.893.000	1	250.000.000	0	0	2	######	2	194.654.000	2	194.654.000	6	583.962.000	7	742.855.000	350	180,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**581.158.063**	**48,65**	**322.900.510**	**50**	**297.666.325**	**32,43**	**########**	**32,43**	**######**	**32,43**	**353.037.161**	**32,43**	**570.895.731**	**129,73**	**1.183.405.993**	**178,38**	**1.506.306.503**	**178,38**	**259,19**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8.869.120	12	4.000.000	12	4.542.720	8	########	8	######	8	2.500.000	8	4.000.000	32	8.500.000	44	12.500.000	183,33	140,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	229.488.480	12	75.900.510	12	117.542.880	8	########	8	######	8	69.370.695	8	135.645.731	32	287.906.295	44	363.806.805	183,33	158,53	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2	80.930.720	0	0	1	41.452.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	261.869.743	12	243.000.000	12	134.128.405	8	########	8	######	8	281.166.466	8	431.250.000	32	886.999.698	44	1.129.999.698	183,33	431,51	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**892.043.500**	**50**	**177.617.589**	**50**	**473.973.500**	**75**	**########**	**75**	**######**	**75**	**137.775.328**	**75**	**614.265.988**	**300**	**858.469.312**	**350**	**1.036.086.901**	**350**	**116,15**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	300.265.790	1	70.904.589	1	103.370.190	2	########	2	######	2	65.017.000	2	131.891.760	8	246.361.760	9	317.266.349	450	105,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	103.370.190	0	0	0	103.370.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	31.570.000	1	12.900.000	1	16.170.000	2	########	2	######	2	6.425.000	2	69.954.234	8	83.604.234	9	96.504.234	450	305,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	365.851.200	1	82.313.000	1	187.387.200	2	########	2	######	2	66.333.328	2	412.419.994	8	528.503.318	9	610.816.318	450	166,96	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	65.986.320	1	11.500.000	1	38.675.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.500.000	50	17,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																							
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**500.000.000**	**50**	**90.950.000**	**50**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,74**	**66.333.000**	**0**	**0**	**42,74**	**66.333.000**	**92,74**	**157.283.000**	**92,74**	**31,46**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**02**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**50**	**90.950.000**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**35.228.000**	**0**	**0**	**50**	**35.228.000**	**100**	**126.178.000**	**100**	**63,09**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	02	1	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	100	200.000.000	50	90.950.000	50	100.000.000	0	0	0	0	50	35.228.000	0	0	50	35.228.000	100	126.178.000	100	63,09	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**02**	**1**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**300.000.000**	**50**	**0**	**50**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,31**	**31.105.000**	**0**	**0**	**37,31**	**31.105.000**	**87,31**	**31.105.000**	**87,31**	**10,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	02	1	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	100	200.000.000	50	0	50	100.000.000	0	0	0	0	50	31.105.000	0	0	50	31.105.000	100	31.105.000	100	15,55	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	02	1	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab/Kota	34	100.000.000	17	0	17	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	50	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan kualitas Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**50**	**61.300.000**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**61.300.000**	**50**	**30,65**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**03**	**1**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**50**	**61.300.000**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**61.300.000**	**50**	**30,65**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	03	1	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	03	1	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	300	200.000.000	150	61.300.000	150	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	61.300.000	50	30,65	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**	**1**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	03	1	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Unit Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase peningkatan kualitas Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**50**	**51.050.000**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**30.804.000**	**0**	**0**	**50**	**30.804.000**	**100**	**81.854.000**	**100**	**40,93**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	04	1		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**50**	**51.050.000**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**30.804.000**	**0**	**0**	**50**	**30.804.000**	**100**	**81.854.000**	**100**	**40,93**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	04	1	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Unit Usaha	200	200.000.000	100	51.050.000	100	100.000.000	0	0	0	0	100	30.804.000	0	0	100	30.804.000	200	81.854.000	100	40,93	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	04	1	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi melalui Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**Persen**	**100**	**2.000.000.000**	**40**	**0**	**50**	**1.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**2.416.564.000**	**0**	**0**	**20**	**2.416.564.000**	**60**	**2.416.564.000**	**60**	**120,83**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	05	1		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.000.000.000**	**40**	**0**	**50**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**2.416.564.000**	**0**	**0**	**40**	**2.416.564.000**	**80**	**2.416.564.000**	**80**	**241,66**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	05	1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1000	1.000.000.000	400	0	500	500.000.000	0	0	0	0	400	2.416.564.000	0	0	400	2.416.564.000	800	2.416.564.000	80	241,66	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	05	1		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.000.000.000**	**40**	**0**	**50**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**40**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	05	1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	-	Orang	1000	1.000.000.000	400	0	500	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	40	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan kualitas Pemberdayaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**600.000.000**	**50**	**206.800.000**	**50**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,5**	**63.306.000**	**0**	**0**	**12,5**	**63.306.000**	**62,5**	**270.106.000**	**62,5**	**45,02**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	06	1		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**600.000.000**	**50**	**206.800.000**	**50**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,5**	**63.306.000**	**0**	**0**	**12,5**	**63.306.000**	**62,5**	**270.106.000**	**62,5**	**45,02**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	06	1	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Unit Usaha	100	300.000.000	50	84.600.000	50	150.000.000	0	0	0	0	50	63.306.000	0	0	50	63.306.000	100	147.906.000	100	49,3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	06	1	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	300	300.000.000	150	122.200.000	150	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	122.200.000	50	40,73	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**persentase peningkatan jumlah UMKM yang kondusif (%)**	**Persen**	**100**	**4.000.000.000**	**50**	**4.226.600.000**	**50**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**31.006.000**	**0**	**0**	**50**	**31.006.000**	**100**	**4.257.606.000**	**100**	**106,44**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	07	1		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persen**	**100**	**4.000.000.000**	**50**	**4.226.600.000**	**50**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**31.006.000**	**0**	**0**	**50**	**31.006.000**	**100**	**4.257.606.000**	**100**	**106,44**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	07	1	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	200	4.000.000.000	100	4.226.600.000	100	2.000.000.000	0	0	0	0	100	31.006.000	0	0	100	31.006.000	200	4.257.606.000	100	106,44	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM (%)**	**Persen**	**100**	**1.500.000.000**	**50**	**240.400.000**	**50**	**1.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2.734.920.000**	**0**	**0**	**50**	**2.734.920.000**	**100**	**2.975.320.000**	**100**	**198,35**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	08	1		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Berkembangnya Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Persen**	**100**	**1.500.000.000**	**50**	**240.400.000**	**50**	**1.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2.734.920.000**	**0**	**0**	**50**	**2.734.920.000**	**100**	**2.975.320.000**	**100**	**198,35**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	08	1	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	102	1.500.000.000	51	240.400.000	51	1.000.000.000	0	0	0	0	51	2.734.920.000	0	0	51	2.734.920.000	102	2.975.320.000	100	198,35	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien**	**Persen**	**100**	**14.238.000.000**	**44,33**	**14.276.017.860**	**49,6**	**12.905.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,09**	**3.574.960.808**	**19,23**	**6.587.928.500**	**43,32**	**10.162.889.308**	**87,65**	**24.438.907.168**	**87,65**	**171,65**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun dan Dievaluasi (%)**	**Persen**	**100**	**2.668.000.000**	**50**	**1.826.911.585**	**50**	**585.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**191.526.000**	**0**	**0**	**50**	**191.526.000**	**100**	**2.018.437.585**	**100**	**75,65**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menenoah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000	1	4.015.648	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	2	9.015.648	100	90,16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	50.000.000	1	22.780.399	1	20.000.000	0	0	0	0	1	87.505.000	0	0	1	87.505.000	2	110.285.399	100	220,57	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	15.000.000	1	3.068.399	1	10.000.000	0	0	0	0	1	4.658.000	0	0	1	4.658.000	2	7.726.399	100	51,51	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	60.000.000	1	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	4.550.000	0	0	1	4.550.000	2	4.550.000	100	7,58	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	15.000.000	1	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	4.185.000	0	0	1	4.185.000	2	4.185.000	100	27,9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	18.000.000	1	5.357.139	1	10.000.000	0	0	0	0	1	8.128.000	0	0	1	8.128.000	2	13.485.139	100	74,92	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2.500.000.000	1	1.791.690.000	1	500.000.000	0	0	0	0	1	77.500.000	0	0	1	77.500.000	2	1.869.190.000	100	74,77	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**1.810.000.000**	**50**	**6.738.516.280**	**50**	**7.200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,16**	**123.360.000**	**36,84**	**6.587.928.500**	**50**	**6.711.288.500**	**100**	**13.449.804.780**	**100**	**743,08**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	1.400.000.000	12	6.602.626.280	12	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	12	6.585.418.500	12	6.585.418.500	24	13.188.044.780	100	942	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	190.000.000	1	89.280.000	1	90.000.000	0	0	0	0	1	89.280.000	0	0	1	89.280.000	2	178.560.000	100	93,98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	40.000.000	1	0	1	20.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	40.000.000	1	0	1	20.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	10.000.000	1	1.730.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	2.510.000	1	2.510.000	2	4.240.000	100	42,4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	100.000.000	1	44.880.000	1	50.000.000	0	0	0	0	1	34.080.000	0	0	1	34.080.000	2	78.960.000	100	78,96	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	20.000.000	1	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**70.000.000**	**50**	**0**	**50**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**470.000.000**	**41,3**	**39.650.000**	**50**	**235.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,52**	**0**	**34,78**	**0**	**41,3**	**0**	**82,61**	**39.650.000**	**82,61**	**8,44**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	24	20.000.000	12	0	12	10.000.000	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	24	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	100.000.000	80	39.650.000	80	50.000.000	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	160	39.650.000	100	39,65	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	100.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	20.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	10.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	100.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	30.000.000	0	0	10	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	60.000.000	0	0	10	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**2.460.000.000**	**49,24**	**971.818.707**	**50**	**1.225.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**732.484.000**	**0,76**	**0**	**50,76**	**732.484.000**	**100**	**1.704.302.707**	**100**	**69,28**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	10.000.000	12	4.457.150	12	5.000.000	0	0	0	0	12	4.990.000	0	0	12	4.990.000	24	9.447.150	100	94,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	10.000.000	12	0	12	5.000.000	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	24	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	10.000.000	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	24	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	200.000.000	12	48.020.038	12	100.000.000	0	0	0	0	12	57.989.000	0	0	12	57.989.000	24	106.009.038	100	53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	100.000.000	12	42.222.250	12	50.000.000	0	0	0	0	12	49.750.000	0	0	12	49.750.000	24	91.972.250	100	91,97	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	30.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	0	0	0	0	1	12.000.000	0	0	1	12.000.000	2	24.000.000	100	80	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	2	10.000.000	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	60.000.000	1	29.120.000	1	30.000.000	0	0	0	0	1	24.600.000	0	0	1	24.600.000	2	53.720.000	100	89,53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2.000.000.000	1	830.999.269	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1	578.155.000	0	0	1	578.155.000	2	1.409.154.269	100	70,46	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	10.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	20.000.000	1	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**530.000.000**	**32,14**	**3.122.444.208**	**42,86**	**510.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,14**	**31.425.000**	**0**	**0**	**7,14**	**31.425.000**	**39,29**	**3.153.869.208**	**39,29**	**595,07**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	250.000.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	250.000.000	6	0	10	250.000.000	0	0	0	0	1	23.500.000	0	0	1	23.500.000	7	23.500.000	70	9,4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.500.000	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	315.961.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	315.961.590	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	2.789.982.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.789.982.618	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	7.925.000	0	0	1	7.925.000	1	7.925.000	100	79,25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**1.630.000.000**	**50**	**619.465.080**	**50**	**815.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**765.955.808**	**0**	**0**	**50**	**765.955.808**	**100**	**1.385.420.888**	**100**	**85**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	20.000.000	1	1.850.000	1	10.000.000	0	0	0	0	1	9.900.000	0	0	1	9.900.000	2	11.750.000	100	58,75	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	600.000.000	1	232.615.080	1	300.000.000	0	0	0	0	1	199.055.808	0	0	1	199.055.808	2	431.670.888	100	71,95	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	10.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.000.000.000	1	385.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	1	557.000.000	0	0	1	557.000.000	2	942.000.000	100	94,2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)**	**Persen**	**100**	**4.600.000.000**	**43,33**	**957.212.000**	**50**	**2.300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,33**	**1.730.210.000**	**0**	**0**	**43,33**	**1.730.210.000**	**86,67**	**2.687.422.000**	**86,67**	**58,42**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	200.000.000	12	87.180.000	12	100.000.000	0	0	0	0	12	96.650.000	0	0	12	96.650.000	24	183.830.000	100	91,92	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4.000.000.000	1	870.032.000	1	2.000.000.000	0	0	0	0	1	1.633.560.000	0	0	1	1.633.560.000	2	2.503.592.000	100	62,59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	100.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																							
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Kegiatan Penunjang Urusan Pemda**	**Persen**	**100**	**48.143.542.333**	**80,55**	**34.367.413.356**	**20,63**	**13.297.862.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,13**	**9.071.617.183**	**20,13**	**9.071.617.183**	**100,69**	**43.439.030.539**	**100,69**	**90,23**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun**	**Persen**	**100**	**441.737.434**	**79,31**	**323.587.434**	**20,69**	**185.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,14**	**213.857.580**	**24,14**	**213.857.580**	**103,45**	**537.445.014**	**103,45**	**121,67**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	230.422.434	8	185.422.434	2	45.000.000	0	0	0	0	0	0	2	180.277.030	2	180.277.030	10	365.699.464	100	158,71	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	32.515.000	4	25.015.000	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	2	7.974.950	2	7.974.950	6	32.989.950	120	101,46	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokmen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	7.500.000	4	0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	1	5.400.000	1	5.400.000	5	5.400.000	100	72	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	71.300.000	4	113.150.000	1	25.650.000	0	0	0	0	0	0	1	20.205.600	1	20.205.600	5	133.355.600	100	187,03	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	100.000.000	3	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**26.809.413.749**	**71,59**	**20.371.519.508**	**25,15**	**6.366.269.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,74**	**5.432.104.888**	**1,74**	**5.432.104.888**	**73,33**	**25.803.624.396**	**73,33**	**96,25**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4150	26.144.524.992	2915	20.031.299.308	950	6.118.210.197	0	0	0	0	0	0	53	5.181.303.488	53	5.181.303.488	2968	25.212.602.796	71,52	96,44	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	324	539.454.813	276	260.775.200	180	210.559.551	0	0	0	0	0	0	12	230.024.800	12	230.024.800	288	490.800.000	88,89	90,98	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	35.124.944	4	20.300.000	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	1	9.417.600	1	9.417.600	5	29.717.600	100	84,61	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	7.000.000	4	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	64	72.809.000	60	59.145.000	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	12	11.359.000	12	11.359.000	72	70.504.000	112,5	96,83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	10.500.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**225.001.666**	**79,75**	**201.361.240**	**21,52**	**28.640.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,99**	**0**	**18,99**	**0**	**98,73**	**201.361.240**	**98,73**	**89,49**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	5.000.000	4	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1	06	Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	195.001.666	3	181.361.240	1	13.640.426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	9	181.361.240	225	93	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9				10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	18	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	70	25.000.000	56	20.000.000	14	5.000.000	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	64	20.000.000	91,43	80	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**1.087.464.600**	**63,2**	**459.337.840**	**33,63**	**411.896.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,34**	**140.754.000**	**22,34**	**140.754.000**	**85,53**	**600.091.840**	**85,53**	**55,18**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	732	520.400.000	423	265.900.000	250	170.000.000	0	0	0	0	0	0	175	139.214.000	175	139.214.000	598	405.114.000	81,69	77,85	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	37.084.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	326.980.600	75	193.437.840	10	36.896.600	0	0	0	0	0	0	1	1.540.000	1	1.540.000	76	194.977.840	152	59,63	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	53.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	135.000.000	0	0	1	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi pelayanan umum**	**Persen**	**100**	**5.742.850.334**	**88,82**	**4.159.781.389**	**15,46**	**1.408.912.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**1.092.516.310**	**39**	**1.092.516.310**	**127,82**	**5.252.297.699**	**127,82**	**91,46**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	50.748.063	48	23.329.900	12	4.144.313	0	0	0	0	0	0	75	2.800.000	75	2.800.000	123	26.129.900	205	51,49	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	105	2.177.477.329	104	1.678.951.000	1	568.408.804	0	0	0	0	0	0	33	258.803.000	33	258.803.000	137	1.937.754.000	130,48	88,99	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	79.986.242	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	164.910.420	48	129.863.000	12	34.484.178	0	0	0	0	0	0	1490	24.406.000	1490	24.406.000	1538	154.269.000	2.563,33	93,55	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6200	347.449.750	5200	252.640.425	1000	71.875.000	0	0	0	0	0	0	700	69.680.000	700	69.680.000	5900	322.320.425	95,16	92,77	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	148	28.575.000	212	12.602.000	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	12	900.000	12	900.000	224	13.502.000	151,35	47,25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	820	493.850.000	990	349.199.550	100	95.000.000	0	0	0	0	0	0	600	76.347.000	600	76.347.000	1590	425.546.550	193,9	86,17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	220	2.324.853.530	160	1.713.195.514	40	500.000.000	0	0	0	0	0	0	59	659.580.310	59	659.580.310	219	2.372.775.824	99,55	102,06	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.950.030.867**	**89,13**	**1.266.333.300**	**19,57**	**2.495.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,07**	**142.149.800**	**7,07**	**142.149.800**	**96,2**	**1.408.483.100**	**96,2**	**35,66**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	755.853.000	7	579.580.000	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	1	22.650.000	1	22.650.000	8	602.230.000	200	79,68	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	172	649.527.867	157	686.753.300	28	170.000.000	0	0	0	0	0	0	2	21.249.800	2	21.249.800	159	708.003.100	92,44	109	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	463.500.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	10	98.250.000	10	98.250.000	10	98.250.000	500	21,2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	81.150.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000	0	0	3	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000	0	0	3	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.153.400.416**	**76,82**	**1.245.621.000**	**23,32**	**522.241.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,12**	**222.903.498**	**0,12**	**222.903.498**	**76,94**	**1.468.524.498**	**76,94**	**68,2**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3250	20.300.000	2500	8.600.000	750	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2501	13.600.000	76,95	67	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.069.787.136	48	853.276.810	12	289.667.750	0	0	0	0	0	0	3	217.903.498	3	217.903.498	51	1.071.180.308	85	100,13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	343.740.000	17	0	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	719.573.280	24	383.744.190	12	219.074.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	383.744.190	50	53,33	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**7.733.643.267**	**97,4**	**6.339.871.645**	**18,18**	**1.879.251.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,38**	**1.827.331.107**	**73,38**	**1.827.331.107**	**170,78**	**8.167.202.752**	**170,78**	**105,61**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	258.516.178	93	231.598.845	9	85.324.078	0	0	0	0	0	0	10	72.852.794	10	72.852.794	103	304.451.639	141,1	117,77	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2.000.000	0	0	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	61	772.429.500	48	703.950.800	12	34.327.500	0	0	0	0	0	0	98	30.600.013	98	30.600.013	146	734.550.813	239,34	95,1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3.364.778.379	3	4.754.820.000	3	1.687.600.063	0	0	0	0	0	0	0	990.935.800	0	990.935.800	3	5.745.755.800	25	170,76	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	370.018.230	5	529.502.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	2	732.942.500	2	732.942.500	7	1.262.444.500	233,33	341,18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1,1	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.965.900.980	1	120.000.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	4	120.000.000	133,33	4,05	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi**	**Persen**	**100**	**800.000.000**	**0**		**100**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**02**	**1**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**400.000.000**	**0**		**100**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	02	1	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**02**	**1**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Persen**	**100**	**400.000.000**	**0**		**100**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	02	1	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Daerah Provinsi	Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah media promosi penanaman modal**	**Persen**	**100**	**1.237.664.000**	**205**	**949.816.275**	**45**	**350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**3.027.637.830**	**0**	**0**	**25**	**3.027.637.830**	**230**	**3.977.454.105**	**230**	**321,37**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**03**	**1**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.237.664.000**	**205**	**949.816.275**	**45**	**350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**3.027.637.830**	**0**	**0**	**25**	**3.027.637.830**	**230**	**3.977.454.105**	**230**	**321,37**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	18	03	1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	19	1.037.664.000	41	949.816.275	8	150.000.000	0	0	0	0	4	3.027.637.830	0	0	4	3.027.637.830	45	3.977.454.105	236,84	383,31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PTSP**	**Persen**	**100**	**2.835.566.281**	**47,83**	**1.099.882.900**	**26,09**	**1.600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,486.96**	**780.609.486**	**47,83**	**152.079.900**	**4,534.78**	**932.689.386**	**4,582.61**	**2.032.572.286**	**4,582.61**	**71,68**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**04**	**1**		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota**	**Jumlah kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota**	**Persen**	**100**	**1.820.310.245**	**50**	**956.132.900**	**12,5**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,443.75**	**630.831.486**	**68,75**	**152.079.900**	**6,512.50**	**782.911.386**	**6,562.50**	**1.739.044.286**	**6,562.50**	**95,54**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	04	1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lintas daerah kabupaten/kota	Pelaku Usaha	6	1.165.510.245	5	895.582.900	1	200.000.000	0	0	0	0	1019	128.678.000	0	0	1019	128.678.000	1024	1.024.260.900	17,066.67	87,88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	0	234.800.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	11	152.079.900	11	152.079.900	11	152.079.900	0	64,77	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	206.000.000	3	60.550.000	1	200.000.000	0	0	0	0	12	502.153.486	0	0	12	502.153.486	15	562.703.486	150	273,16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/kota	Kegiatan Usaha	0	214.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**	**1**		**Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.015.256.036**	**42,86**	**143.750.000**	**57,14**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**149.778.000**	**0**	**0**	**14,29**	**149.778.000**	**57,14**	**293.528.000**	**57,14**	**28,91**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	04	1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku Usaha	4	343.750.000	3	143.750.000	1	200.000.000	0	0	0	0	1	149.778.000	0	0	1	149.778.000	4	293.528.000	100	85,39	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengloaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenagan Daerah Provinsi	Orang	1	271.506.036	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenagan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Proyek Penanaman Modal yang dipantau**	**Persen**	**100**	**1.248.753.000**	**50,94**	**598.753.000**	**49,06**	**650.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,83**	**138.188.000**	**7,53**	**230.336.140**	**17,36**	**368.524.140**	**68,31**	**967.277.140**	**68,31**	**77,46**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**05**	**1**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.248.753.000**	**50,94**	**598.753.000**	**49,06**	**650.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,83**	**138.188.000**	**7,53**	**230.336.140**	**17,36**	**368.524.140**	**68,31**	**967.277.140**	**68,31**	**77,46**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	05	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan	10	332.238.000	9	132.238.000	1	200.000.000	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	23	132.238.000	230	39,8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	914	546.606.000	464	296.606.000	450	250.000.000	0	0	0	0	0	0	72	230.336.140	72	230.336.140	536	526.942.140	58,64	96,4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan	Kegiatan	32	369.909.000	14	169.909.000	18	200.000.000	0	0	0	0	80	138.188.000	0	0	80	138.188.000	94	308.097.000	293,75	83,29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	**Jumlah Izin yang Diterbitkan**	**Persen**	**100**	**1.127.325.184**	**80**	**927.325.184**	**20**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**200.000.000**	**0**	**0**	**80**	**200.000.000**	**160**	**1.127.325.184**	**160**	**100**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**06**	**1**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.127.325.184**	**80**	**927.325.184**	**20**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**200.000.000**	**0**	**0**	**80**	**200.000.000**	**160**	**1.127.325.184**	**160**	**100**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	06	1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	1.127.325.184	4	927.325.184	1	200.000.000	0	0	0	0	4	200.000.000	0	0	4	200.000.000	8	1.127.325.184	160	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**47.487.592.333**	**73,75**	**30.599.813.356**	**22,9**	**13.292.862.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,3**	**5.279.282.748**	**0**	**0**	**17,3**	**5.279.282.748**	**91,05**	**35.879.096.104**	**91,05**	**75,55**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun**	**Persen**	**100**	**441.737.434**	**79,31**	**256.087.434**	**20,69**	**185.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,69**	**85.650.000**	**0**	**0**	**20,69**	**85.650.000**	**100**	**341.737.434**	**100**	**77,36**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	230.422.434	8	185.422.434	2	45.000.000	0	0	0	0	2	45.000.000	0	0	2	45.000.000	10	230.422.434	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	32.515.000	4	25.015.000	1	7.500.000	0	0	0	0	1	7.500.000	0	0	1	7.500.000	5	32.515.000	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	7.500.000	4	0	1	7.500.000	0	0	0	0	1	7.500.000	0	0	1	7.500.000	5	7.500.000	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	71.300.000	4	45.650.000	1	25.650.000	0	0	0	0	1	25.650.000	0	0	1	25.650.000	5	71.300.000	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	100.000.000	3	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**26.809.415.749**	**72,07**	**18.371.519.508**	**20,94**	**6.366.269.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,22**	**3.477.965.399**	**0**	**0**	**17,22**	**3.477.965.399**	**89,29**	**21.849.484.907**	**89,29**	**81,5**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4050	26.144.524.992	2915	18.031.299.308	850	6.118.210.197	0	0	0	0	700	3.353.582.999	0	0	700	3.353.582.999	3615	21.384.882.307	89,26	81,79	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	539.454.813	4	260.775.200	1	210.559.551	0	0	0	0	1	95.964.800	0	0	1	95.964.800	5	356.740.000	100	66,13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	35.124.944	4	20.300.000	1	7.500.000	0	0	0	0	1	9.417.600	0	0	1	9.417.600	5	29.717.600	100	84,61	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	7.000.000	3	0	1	7.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	80	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	66	72.811.000	54	59.145.000	12	20.000.000	0	0	0	0	9	19.000.000	0	0	9	19.000.000	63	78.145.000	95,45	107,33	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	10.500.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan administrasi barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**225.001.666**	**80,77**	**201.361.240**	**20,51**	**23.640.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,82**	**13.640.426**	**0**	**0**	**12,82**	**13.640.426**	**93,59**	**215.001.666**	**93,59**	**95,56**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	4	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	125	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	195.001.666	3	181.361.240	1	13.640.426	0	0	0	0	1	13.640.426	0	0	1	13.640.426	4	195.001.666	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	70	25.000.000	56	20.000.000	14	5.000.000	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	64	20.000.000	91,43	80	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**1.087.464.600**	**75,38**	**459.337.840**	**40,03**	**411.896.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,32**	**125.440.000**	**0**	**0**	**24,32**	**125.440.000**	**99,7**	**584.777.840**	**99,7**	**53,77**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1,1	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000	1	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	606	520.400.000	423	265.900.000	250	170.000.000	0	0	0	0	159	125.000.000	0	0	159	125.000.000	582	390.900.000	96,04	75,12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	37.084.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	326.980.600	75	193.437.840	10	36.896.600	0	0	0	0	2	440.000	0	0	2	440.000	77	193.877.840	154	59,29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	53.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	135.000.000	0	0	1	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi pelayanan umum**	**Persen**	**100**	**5.742.850.334**	**86,75**	**4.159.781.389**	**13,25**	**1.408.912.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,24**	**721.892.270**	**0**	**0**	**11,24**	**721.892.270**	**97,99**	**4.881.673.659**	**97,99**	**85**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1,1	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	50.748.063	48	23.329.900	12	4.144.313	0	0	0	0	12	800.000	0	0	12	800.000	60	24.129.900	100	47,55	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	105	2.177.477.329	104	1.678.951.000	1	568.408.804	0	0	0	0	1	187.673.000	0	0	1	187.673.000	105	1.866.624.000	100	85,72	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	79.986.242	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	164.910.420	48	129.863.000	12	34.484.178	0	0	0	0	12	20.056.000	0	0	12	20.056.000	60	149.919.000	100	90,91	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	347.449.750	4	252.640.425	1	71.875.000	0	0	0	0	1	34.075.000	0	0	1	34.075.000	5	286.715.425	100	82,52	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	28.575.000	4	12.602.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	4	13.102.000	80	45,85	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	493.850.000	4	349.199.550	1	95.000.000	0	0	0	0	1	31.945.000	0	0	1	31.945.000	5	381.144.550	100	77,18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2.324.853.530	4	1.713.195.514	1	500.000.000	0	0	0	0	1	446.843.270	0	0	1	446.843.270	5	2.160.038.784	100	92,91	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.950.030.867**	**73,66**	**1.266.333.300**	**17,74**	**2.495.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,53**	**132.149.800**	**0**	**0**	**7,53**	**132.149.800**	**81,18**	**1.398.483.100**	**81,18**	**35,4**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1,1	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	755.853.000	5	579.580.000	1	125.000.000	0	0	0	0	1	22.650.000	0	0	1	22.650.000	6	602.230.000	150	79,68	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	172	649.527.867	132	686.753.300	28	170.000.000	0	0	0	0	2	21.249.800	0	0	2	21.249.800	134	708.003.100	77,91	109	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	463.500.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	5	88.250.000	0	0	5	88.250.000	5	88.250.000	125	19,04	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	81.150.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000	0	0	3	1.000.000.000	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**2.153.400.416**	**60,8**	**1.245.521.000**	**29,6**	**522.241.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,2**	**310.197.059**	**0**	**0**	**15,2**	**310.197.059**	**76**	**1.555.718.059**	**76**	**72,24**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1,1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	20.300.000	4	8.600.000	1	3.500.000	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	5	13.600.000	100	67	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.069.787.136	48	853.176.810	12	289.667.750	0	0	0	0	9	145.197.059	0	0	9	145.197.059	57	998.373.869	95	93,32	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenokapaan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	343.740.000	0	0	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	719.573.280	24	383.744.190	12	219.074.080	0	0	0	0	9	160.000.000	0	0	9	160.000.000	33	543.744.190	68,75	75,56	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**7.077.691.267**	**96,77**	**4.639.871.645**	**20**	**1.879.251.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,19**	**412.347.794**	**0**	**0**	**14,19**	**412.347.794**	**110,97**	**5.052.219.439**	**110,97**	**71,38**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
X	XX	01	1,1	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	258.516.178	93	231.598.845	9	85.324.078	0	0	0	0	4	66.232.794	0	0	4	66.232.794	97	297.831.639	132,88	115,21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2.000.000	0	0	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	116.477.500	48	703.950.800	12	34.327.500	0	0	0	0	9	10.280.000	0	0	9	10.280.000	57	714.230.800	95	613,19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3.364.778.379	3	3.054.820.000	3	1.687.600.063	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	6	3.054.820.000	50	90,79	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	370.018.230	5	529.502.000	4	35.000.000	0	0	0	0	3	335.835.000	0	0	3	335.835.000	8	865.337.000	160	233,86	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
X	XX	01	1,1	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.965.900.980	1	120.000.000	1	35.000.000	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	4	120.000.000	133,33	4,05	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**19**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																							
2	**19**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif**	**Persen**	**100**	**2.159.127.750**	**0,33**	**649.997.901**	**100**	**2.159.127.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.158.234.250**	**0,33**	**2.511.565.000**	**100,33**	**4.669.799.250**	**100,67**	**5.319.797.151**	**100,67**	**246,39**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	**19**	**02**	**1**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan pemuda**	**Persen**	**100**	**2.159.127.750**	**0**		**100**	**2.159.127.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.158.234.250**	**0**	**1.511.565.000**	**100**	**3.669.799.250**	**100**	**3.669.799.250**	**100**	**169,97**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	02	1	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1	02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	250.000.000	0	0	100	250.000.000	0	0	0	0	100	250.000.000	0	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1	04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	100	1.257.870.000	0	0	100	1.257.870.000	0	0	0	0	100	1.256.976.500	0	1.261.565.000	100	2.518.541.500	100	2.518.541.500	100	200,22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	19	02	1	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	100	651.257.750	0	0	100	651.257.750	0	0	0	0	100	651.257.750	0	0	100	651.257.750	100	651.257.750	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	**1**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi yang di Tingkatkan**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**649.997.901**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000.000**	**0**	**1.000.000.000**	**0**	**1.649.997.901**	**0**	**0**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	02	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	0	0	1	649.997.901			0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	1.649.997.901	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasioanl**	**Persen**	**100**	**20.880.515.160**	**33,33**	**23.478.063.000**	**100**	**20.880.515.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,366.67**	**20.359.064.480**	**33,33**	**3.494.150.000**	**3,400.00**	**23.853.214.480**	**3,433.33**	**47.331.277.480**	**3,433.33**	**226,68**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraoa**
2	**19**	**03**	**1**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Siswa yang dibina**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Persen**	**100**	**16.866.365.160**	**100**	**23.478.063.000**	**100**	**16.866.365.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**16.865.514.480**	**0**	**0**	**100**	**16.865.514.480**	**200**	**40.343.577.480**	**200**	**239,2**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	1	23.478.063.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23.478.063.000	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1	16.866.365.160	0	0	1	16.866.365.160	0	0	0	0	1	16.865.514.480	0	0	1	16.865.514.480	1	16.866.365.160	100	99,99	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Nasional**	**Persen**	**100**	**3.494.150.000**	**0**		**100**	**3.494.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000.00**	**3.493.550.000**	**0**	**0**	**10,000.00**	**3.493.550.000**	**10,000.00**	**3.493.550.000**	**10,000.00**	**99,98**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	1	3.494.150.000	0	0	1	3.494.150.000	0	0	0	0	100	3.493.550.000	0	0	100	3.493.550.000	100	3.493.550.000	10,000.00	99,98	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina**	**Persen**	**100**	**520.000.000**	**0**		**100**	**520.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**100**	**3.494.150.000**	**100**	**3.494.150.000**	**100**	**671,95**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	520.000.000	0	0	1	520.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.494.150.000	1	3.494.150.000	1	3.494.150.000	100	671,95	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah Prestasi Kepramukaan**	**Persen**	**100**	**585.422.000**	**0**		**100**	**585.422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**585.422.000**	**0**	**0**	**100**	**585.422.000**	**100**	**585.422.000**	**100**	**100**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	**19**	**04**	**1**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Prestasi Kepramukaan**	**Persen**	**100**	**585.422.000**	**0**		**100**	**585.422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**585.422.000**	**0**	**0**	**100**	**585.422.000**	**100**	**585.422.000**	**100**	**100**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	04	1	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	585.422.000	0	0	1	585.422.000	0	0	0	0	1	585.422.000	0	0	1	585.422.000	1	585.422.000	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	1	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)**	**Persen**	**100**	**19.004.934.173**	**49,75**	**8.848.361.907**	**49,92**	**10.161.799.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,92**	**9.403.938.860**	**49,92**	**9.403.938.860**	**99,67**	**18.252.300.767**	**99,67**	**96,04**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**34.999.356**	**40**	**24.999.654**	**40**	**9.999.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**14.999.400**	**60**	**14.999.400**	**100**	**39.999.054**	**100**	**114,29**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	24.999.654	1	19.999.853	1	4.999.801	0	0	0	0	0	0	1	4.999.800	1	4.999.800	2	24.999.653	66,67	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	9.999.702	1	4.999.801	1	4.999.801	0	0	0	0	0	0	1	4.999.800	1	4.999.800	2	9.999.601	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu (dokumen)**	**Persen**	**100**	**15.279.453.402**	**48,75**	**7.218.040.506**	**50**	**7.674.318.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,75**	**8.024.241.265**	**48,75**	**8.024.241.265**	**97,5**	**15.242.281.771**	**97,5**	**99,76**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	14.582.249.600	14	6.872.540.605	14	7.299.874.800	0	0	0	0	0	0	14	7.634.441.565	14	7.634.441.565	28	14.506.982.170	100	99,48	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	290.400.000	12	153.840.000	13	157.200.000	0	0	0	0	0	0	12	146.640.000	12	146.640.000	24	300.480.000	92,31	103,47	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	9.999.802	1	4.999.901	1	4.999.901	0	0	0	0	0	0	1	4.999.900	1	4.999.900	2	9.999.801	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	396.804.000	12	186.660.000	12	212.244.000	0	0	0	0	0	0	12	238.159.800	12	238.159.800	24	424.819.800	100	107,06	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana/prasarana perkantoran yang dilaksanakan (kegiatan)**	**Persen**	**100**	**1.183.691.415**	**50**	**674.457.367**	**50**	**729.553.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**829.779.695**	**50**	**829.779.695**	**100**	**1.504.237.062**	**100**	**127,08**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	25.914.273	3	17.904.900	3	13.861.123	0	0	0	0	0	0	3	12.043.465	3	12.043.465	6	29.948.365	100	115,57	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	25.804.300	12	19.309.000	12	13.802.300	0	0	0	0	0	0	12	12.001.800	12	12.001.800	24	31.310.800	100	121,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	128.999.929	12	59.999.967	12	68.999.962	0	0	0	0	0	0	12	59.999.680	12	59.999.680	24	119.999.647	100	93,02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	91.552.913	3	61.337.500	3	48.970.163	0	0	0	0	0	0	3	42.582.750	3	42.582.750	6	103.920.250	100	113,51	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	210	10.320.000	105	2.640.000	105	5.520.000	0	0	0	0	0	0	105	2.160.000	105	2.160.000	210	4.800.000	100	46,51	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	140	158.400.000	70	92.200.000	70	98.400.000	0	0	0	0	0	0	70	60.000.000	70	60.000.000	140	152.200.000	100	96,09	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	742.700.000	16	421.066.000	16	480.000.000	0	0	0	0	0	0	16	640.992.000	16	640.992.000	32	1.062.058.000	100	143	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8										9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi (Unit)**	**Persen**	**100**	**1.212.240.000**	**50**	**244.250.000**	**50**	**963.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**100**	**244.250.000**	**100**	**20,15**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1.212.240.000	2	244.250.000	2	963.160.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	244.250.000	100	20,15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**312.572.820**	**50**	**195.186.000**	**50**	**174.118.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**214.748.800**	**50**	**214.748.800**	**100**	**409.934.800**	**100**	**131,15**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	20.700.000	3	6.000.000	3	18.000.000	0	0	0	0	0	0	3	7.000.000	3	7.000.000	6	13.000.000	100	62,8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	291.872.820	12	189.186.000	12	156.118.020	0	0	0	0	0	0	12	207.748.800	12	207.748.800	24	396.934.800	100	136	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**981.977.180**	**50**	**491.428.380**	**50**	**610.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**320.169.700**	**50**	**320.169.700**	**100**	**811.598.080**	**100**	**82,65**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	230.815.680	2	137.033.380	2	130.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.812.200	2	100.812.200	4	237.845.580	100	103,05	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	84.120.000	12	41.000.000	12	48.000.000	0	0	0	0	0	0	12	36.100.000	12	36.100.000	24	77.100.000	100	91,65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	667.041.500	11	313.395.000	11	432.650.000	0	0	0	0	0	0	11	183.257.500	11	183.257.500	22	496.652.500	100	74,46	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																								
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Cakupan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Desa**	**Persen**	**100**	**2.255.670.399**	**49,89**	**893.021.080**	**50,4**	**1.250.000.000**	**0,36**	**########**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,36**	**9.163.500**	**50,25**	**902.184.580**	**50,25**	**40**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**02**	**1**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksanya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.252.380.514**	**50,3**	**413.590.080**	**50**	**750.000.000**	**0,38**	**########**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,38**	**9.163.500**	**50,68**	**422.753.580**	**50,68**	**33,76**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	1	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Perpustakaan	2	208.656.913	5	92.562.000	1	100.000.000	5	########	0	0	0	0	0	0	5	9.163.500	10	101.725.500	500	48,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	2	179.990.703	1	23.896.380	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23.896.380	50	13,28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	1000	78.000.000	500	3.000.000	500	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	3.000.000	50	3,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	2	105.800.000	1	25.204.000	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.204.000	50	23,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudukan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	2	78.363.675	1	2.400.000	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.400.000	50	3,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	300	144.012.416	150	27.517.000	150	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	27.517.000	50	19,11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan	2	327.321.768	1	218.525.700	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	218.525.700	50	66,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2	70.001.039	1	18.985.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18.985.000	50	27,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provins	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2	60.234.000	1	1.500.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000	50	2,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	**1**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.003.289.885**	**41,27**	**479.431.000**	**58,73**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,27**	**479.431.000**	**41,27**	**47,79**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	1	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	2	585.589.885	1	477.536.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	477.536.000	50	81,55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	50	167.700.000	25	1.895.000	25	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1.895.000	50	1,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	10	100.000.000	0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Cakupan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Persen**	**100**	**353.295.257**	**33,87**	**88.632.768**	**66,13**	**240.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,87**	**88.632.768**	**33,87**	**25,09**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**03**	**1**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**99.300.000**	**50**	**38.946.304**	**50**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**38.946.304**	**50**	**39,22**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	2	99.300.000	1	38.946.304	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38.946.304	50	39,22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	**1**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Terlaksananya Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Persen**	**100**	**79.070.988**	**50**	**16.828.688**	**50**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**16.828.688**	**50**	**21,28**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	10	49.070.988	5	16.828.688	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16.828.688	50	34,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	10	30.000.000	5	0	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	50	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	**1**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**85.536.400**	**25**	**15.890.000**	**75**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**15.890.000**	**25**	**18,58**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	10	60.536.400	5	15.890.000	5	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15.890.000	50	26,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	10	25.000.000	0	0	10	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	**1**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah**	**Persen**	**100**	**89.387.869**	**25**	**16.967.776**	**75**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**16.967.776**	**25**	**18,98**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	10	69.387.869	5	16.967.776	5	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16.967.776	50	24,45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	10	20.000.000	0	0	10	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																								
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase arsip dinamis dan statis yang dikelola**	**Persen**	**100**	**326.533.057**	**12,77**	**60.550.102**	**55,32**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,77**	**60.550.102**	**12,77**	**18,54**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**24**	**02**	**1**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Persen**	**100**	**99.189.548**	**0**		**60**	**90.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	1	01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	10	32.924.821	0	0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1	02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	10	41.264.727	0	0	5	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1	03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan	5	25.000.000	0	0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**1**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**79.212.075**	**0**		**50**	**75.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	1	02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip	10	79.212.075	0	0	5	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**1**	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tinokat Provinsi**	**Persen**	**100**	**148.131.434**	**50**	**60.550.102**	**50**	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**60.550.102**	**50**	**40,88**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	1	01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Penggun a	10	48.686.000	5	22.106.402	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22.106.402	50	45,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1	02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	2	99.445.434	1	38.443.700	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38.443.700	50	38,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**Persen**	**100**	**303.234.127**	**35,29**	**70.285.300**	**50**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,29**	**70.285.300**	**35,29**	**23,18**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**03**	**1**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**173.307.662**	**50**	**57.639.400**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**57.639.400**	**50**	**33,26**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	1	01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	2	108.814.608	1	43.454.400	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	43.454.400	50	39,93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	1	02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip	2	24.500.000	1	4.495.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.495.000	50	18,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	1	03 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip	10	39.993.054	5	9.690.000	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9.690.000	50	24,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	**1**	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Terlaksananya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Persen**	**100**	**129.926.465**	**25**	**12.645.900**	**50**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**12.645.900**	**25**	**9,73**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	1	01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	10	64.945.907	5	12.645.900	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12.645.900	50	19,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	1	02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	10	64.980.558	0	0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**38.563.585.011**	**50,25**	**15.280.828.772**	**47,29**	**20.495.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,25**	**15.280.828.772**	**50,25**	**39,63**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	**XX**	**01**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**685.162.681**	**50**	**141.071.310**	**50**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**141.071.310**	**50**	**20,59**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	59.451.583	1	8.847.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.847.000	50	14,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	60.326.495	1	9.908.500	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.908.500	50	16,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	63.149.998	1	12.348.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.348.000	50	19,55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	59.997.581	1	9.608.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.608.000	50	16,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	65.126.845	1	9.771.750	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.771.750	50	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	179.349.918	1	64.104.960	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64.104.960	50	35,74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	197.760.261	1	26.483.100	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26.483.100	50	13,39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**Persen**	**100**	**19.418.993.398**	**49,15**	**8.935.043.195**	**49,15**	**10.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,15**	**8.935.043.195**	**49,15**	**46,01**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	18.952.631.700	12	8.723.066.420	12	9.793.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8.723.066.420	50	46,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	20.033.225	1	6.515.275	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.515.275	50	32,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	34.355.750	12	3.483.000	12	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.483.000	50	10,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	20.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15.246.896	1	2.232.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.232.000	50	14,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	16.446.652	1	5.340.000	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.340.000	50	32,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	347.279.219	1	187.407.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	187.407.000	50	53,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	12.999.956	1	6.999.500	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.999.500	50	53,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Barang dan Aset Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**225.978.433**	**28,57**	**10.171.500**	**50**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,57**	**10.171.500**	**28,57**	**4,5**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	44.999.769	1	3.053.500	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.053.500	50	6,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	34.999.919	1	3.700.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.700.000	50	10,57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	44.989.472	1	2.518.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.518.000	50	5,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	41.496.252	1	900.000	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	900.000	50	2,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	21.502.071	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	21.499.719	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	16.491.231	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.000.000**	**0**		**100**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**273.387.254**	**52,63**	**92.323.603**	**47,37**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,63**	**92.323.603**	**52,63**	**33,77**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	44.997.094	1	4.980.500	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.980.500	50	11,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	74.972.000	1	67.600.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67.600.000	100	90,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	10.988.133	1	988.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	988.000	50	8,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	21.996.672	1	1.936.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.936.000	50	8,8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	21.983.355	1	1.538.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.538.000	50	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	98.450.000	5	15.281.103	5	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15.281.103	50	15,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.768.354.656**	**52,91**	**716.432.849**	**47,09**	**950.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,91**	**716.432.849**	**52,91**	**40,51**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	14.998.000	12	4.998.000	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4.998.000	50	33,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	304.908.530	12	303.715.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	303.715.000	100	99,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	14.690.900	12	5.180.000	12	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5.180.000	50	35,26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	104.967.805	12	4.963.000	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4.963.000	50	4,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	16.200.000	12	5.837.012	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5.837.012	50	36,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	25.700.000	12	15.700.000	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15.700.000	50	61,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	24	90.900.000	12	20.959.500	12	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20.959.500	50	23,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	30.380.000	12	9.500.000	12	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9.500.000	50	31,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.104.870.000	12	319.791.337	12	710.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	319.791.337	50	28,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	60.739.421	1	25.789.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.789.000	50	42,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**13.873.925.000**	**40**	**5.066.832.800**	**30**	**7.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**5.066.832.800**	**40**	**36,52**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	398.600.000	1	106.750.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	106.750.000	100	26,78	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	600.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	44.400.000	1	43.600.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	43.600.000	100	98,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2.760.925.000	1	983.455.000	1	1.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	983.455.000	50	35,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.750.000.000	0	0	1	1.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	7.770.000.000	1	3.933.027.800	1	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.933.027.800	50	50,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.792.658.405**	**49,32**	**149.983.967**	**49,32**	**1.400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,32**	**149.983.967**	**49,32**	**8,37**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	34.396.710	12	3.216.000	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.216.000	50	9,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.117.761.695	12	107.767.967	12	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	107.767.967	50	9,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	230.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	410.500.000	12	39.000.000	12	370.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	39.000.000	50	9,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**520.125.184**	**50**	**168.969.548**	**30**	**290.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**168.969.548**	**50**	**32,49**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8						9			10(6+9)	11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	249.100.000	1	51.619.548	1	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51.619.548	50	20,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.583.184	1	17.530.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.530.000	50	94,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	112.470.000	1	10.220.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.220.000	50	9,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.972.000	1	14.820.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.820.000	100	98,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	74.780.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74.780.000	100	99,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																								
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Juta Hektar) / Jumlah Dokumen akses area perikanan berkelanjutan (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**4.395.000.000**	**34,67**	**5.079.004.391**	**100**	**4.365.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1.750.673.277**	**0**	**0**	**4**	**1.750.673.277**	**38,67**	**6.829.677.668**	**38,67**	**155,4**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**02**	**1**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**4.000.000.000**	**75**	**5.065.396.993**	**100**	**4.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**1.735.673.277**	**0**	**0**	**75**	**1.735.673.277**	**150**	**6.801.070.270**	**150**	**170,03**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	02	1	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	360.000.000	1	41.080.399	1	360.000.000	0	0	0	0	1	479.900.000	0	0	1	479.900.000	2	520.980.399	200	144,72	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	1	3.000.000.000	1	3.851.133.000	1	3.000.000.000	0	0	0	0	1	831.488.637	0	0	1	831.488.637	2	4.682.621.637	200	156,09	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	600.000.000	1	1.173.183.594	1	600.000.000	0	0	0	0	1	424.284.640	0	0	1	424.284.640	2	1.597.468.234	200	266,24	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**0**	**0**	**100**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	02	1	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil**	**Jumlah dokumen Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**345.000.000**	**32,86**	**13.607.398**	**100**	**315.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**32,86**	**28.607.398**	**32,86**	**8,29**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	02	1	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	23	15.000.000	23	13.607.398	23	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	23	28.607.398	100	190,72	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	1	110.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	23	110.000.000	0	0	23	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Sserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	23	110.000.000	0	0	23	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten /kota di wilayah / Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribu Ton) / Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkat Kapasitas**	**Persen**	**100**	**10.137.576.698**	**9,8**	**9.310.574.497**	**99,82**	**10.137.576.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,8**	**42.774.950.549**	**0**	**0**	**9,8**	**42.774.950.549**	**19,6**	**52.085.525.046**	**19,6**	**513,79**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**03**	**1**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**6.715.000.000**	**100**	**5.908.247.799**	**100**	**6.715.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**22.393.991.188**	**0**	**0**	**100**	**22.393.991.188**	**200**	**28.302.238.987**	**200**	**421,48**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	65.000.000	1	30.513.799	1	65.000.000	0	0	0	0	1	124.880.000	0	0	1	124.880.000	2	155.393.799	200	239,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4	4.550.000.000	4	5.507.744.000	4	4.550.000.000	0	0	0	0	4	21.908.894.490	0	0	4	21.908.894.490	8	27.416.638.490	200	602,56	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	48	2.100.000.000	48	369.990.000	48	2.100.000.000	0	0	0	0	48	360.216.698	0	0	48	360.216.698	96	730.206.698	200	34,77	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**0**	**0**	**100**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah dokumen izin usaha perikanan (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	300	50.000	0	0	300	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1,1	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	**25**	**03**	**1,1**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**3.402.326.698**	**100**	**3.402.326.698**	**100**	**3.402.326.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**20.380.959.361**	**0**	**0**	**100**	**20.380.959.361**	**200**	**23.783.286.059**	**200**	**699,03**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1	3.402.326.698	1	3.402.326.698	1	3.402.326.698	0	0	0	0	1	20.380.959.361	0	0	1	20.380.959.361	2	23.783.286.059	200	699,03	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	50	50.000	0	0	50	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,1**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen Penerbitan Izin (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	55	50.000	0	0	55	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,1**		**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	40	50.000	0	0	40	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,1**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Persen**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**100**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	50	50.000	0	0	50	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya / Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan (Juta Ekor)**	**Persen**	**100**	**5.555.000.000**	**90,91**	**8.848.211.856**	**100**	**5.555.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.625.174.774**	**0**	**0**	**0**	**4.625.174.774**	**90,91**	**13.473.386.630**	**90,91**	**242,55**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**04**	**1,1**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Jumlah Dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan dilaut**	**Persen**	**100**	**5.555.000.000**	**90,91**	**8.848.211.856**	**100**	**5.555.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.625.174.774**	**0**	**0**	**0**	**4.625.174.774**	**90,91**	**13.473.386.630**	**90,91**	**242,55**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	1,1	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	55.000.000	0	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,1	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	5.500.000.000	10	8.848.211.856	10	5.500.000.000	0	0	0	0	0	4.625.174.774	0	0	0	4.625.174.774	10	13.473.386.630	100	244,97	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,1	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana Balai Benih Perikanan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,1	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,1	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Pokmaswas yang telah mendapatkan Pembinaan (Kelompok) / Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran bidang kelautan dan Perikanan (Persen) / Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (Hari)**	**Persen**	**100**	**1.400.000.000**	**85,71**	**1.708.590.799**	**100**	**1.400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.341.567.423**	**0**	**0**	**100**	**1.341.567.423**	**185,71**	**3.050.158.222**	**185,71**	**217,87**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**05**	**1**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (WPP)**	**Persen**	**100**	**1.400.000.000**	**85,71**	**1.708.590.799**	**100**	**1.400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.341.567.423**	**0**	**0**	**100**	**1.341.567.423**	**185,71**	**3.050.158.222**	**185,71**	**217,87**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	05	1	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1.000.000.000	0	1.117.822.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1	14.384.423	0	0	1	14.384.423	1	1.132.206.423	100	113,22	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	150.000.000	1	298.574.799	1	150.000.000	0	0	0	0	1	276.611.000	0	0	1	276.611.000	2	575.185.799	200	383,46	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	5	250.000.000	5	292.194.000	5	250.000.000	0	0	0	0	5	1.050.572.000	0	0	5	1.050.572.000	10	1.342.766.000	200	537,11	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun) / Jumlah UPI (UPI) / Jumlah pembinaan terhadap pelaku pasar dan pengolah hasil perikanan (Pembinaan)**	**Persen**	**100**	**780.000.000**	**5,17**	**49.979.000**	**100**	**780.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,28**	**861.211.000**	**0**	**0**	**48,28**	**861.211.000**	**53,45**	**911.190.000**	**53,45**	**116,82**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**06**	**1**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**480.000.000**	**9,09**	**49.979.000**	**100**	**480.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,09**	**41.526.000**	**0**	**0**	**9,09**	**41.526.000**	**18,18**	**91.505.000**	**18,18**	**19,06**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	1	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	120	210.000.000	0	0	120	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	12	270.000.000	12	49.979.000	12	270.000.000	0	0	0	0	12	41.526.000	0	0	12	41.526.000	24	91.505.000	200	33,89	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**1**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan**	**Persen**	**100**	**300.000.000**	**0**	**0**	**100**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**819.685.000**	**0**	**0**	**100**	**819.685.000**	**100**	**819.685.000**	**100**	**273,23**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	1	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	100	300.000.000	0	0	100	300.000.000	0	0	0	0	100	819.685.000	0	0	100	819.685.000	100	819.685.000	100	273,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**19.947.970.000**	**91,62**	**18.685.141.696**	**106,15**	**19.888.370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,85**	**19.690.813.182**	**0**	**0**	**93,85**	**19.690.813.182**	**185,47**	**38.375.954.878**	**185,47**	**192,38**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**191.000.000**	**55,56**	**122.714.697**	**100**	**185.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**262.700.680**	**0**	**0**	**66,67**	**262.700.680**	**122,22**	**385.415.377**	**122,22**	**201,79**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	75.000.000	2	7.494.399	2	70.000.000	0	0	0	0	2	115.822.400	0	0	2	115.822.400	4	123.316.799	200	164,42	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	1	2.103.400	0	0	1	2.103.400	1	2.103.400	100	70,11	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	4.924.079	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.148.080	0	0	1	5.148.080	2	10.072.159	200	167,87	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	100.000.000	2	110.296.219	2	100.000.000	0	0	0	0	2	139.626.800	0	0	2	139.626.800	4	249.923.019	200	249,92	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)**	**Persen**	**100**	**18.259.190.000**	**85,71**	**16.785.128.440**	**139,29**	**18.259.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,71**	**17.325.267.763**	**0**	**0**	**85,71**	**17.325.267.763**	**171,43**	**34.110.396.203**	**171,43**	**186,81**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	18.000.000.000	12	16.519.978.440	12	18.000.000.000	0	0	0	0	12	17.071.187.763	0	0	12	17.071.187.763	24	33.591.166.203	200	186,62	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	2.000.000	0	0	12	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	251.190.000	12	265.150.000	12	251.190.000	0	0	0	0	12	254.080.000	0	0	12	254.080.000	24	519.230.000	200	206,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**66.580.000**	**0**	**0**	**100**	**66.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**68.073.000**	**0**	**0**	**75**	**68.073.000**	**75**	**68.073.000**	**75**	**102,24**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiolin Pegawai	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	41.580.000	0	0	1	41.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.000.000	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0	3	68.073.000	0	0	3	68.073.000	3	68.073.000	150	340,37	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi Umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**470.100.000**	**100**	**785.622.473**	**100**	**466.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.224.894.616**	**0**	**0**	**100**	**1.224.894.616**	**200**	**2.010.517.089**	**200**	**427,68**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.600.000	12	4.957.500	12	6.000.000	0	0	0	0	12	5.997.330	0	0	12	5.997.330	24	10.954.830	200	165,98	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	220.137.300	1	147.000.000	0	0	0	0	1	219.100.000	0	0	1	219.100.000	2	439.237.300	200	292,82	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.500.000	12	23.405.673	12	15.500.000	0	0	0	0	12	22.530.000	0	0	12	22.530.000	24	45.935.673	200	296,36	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	18.000.000	12	24.272.000	12	18.000.000	0	0	0	0	12	26.832.000	0	0	12	26.832.000	24	51.104.000	200	283,91	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	4.500.000	12	5.000.000	0	0	0	0	12	4.380.000	0	0	12	4.380.000	24	8.880.000	200	177,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.000.000	12	25.300.000	12	25.000.000	0	0	0	0	12	24.340.000	0	0	12	24.340.000	24	49.640.000	200	198,56	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	250.000.000	12	483.050.000	12	250.000.000	0	0	0	0	12	921.715.286	0	0	12	921.715.286	24	1.404.765.286	200	561,91	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**166.500.000**	**25**	**5.059.540**	**100**	**116.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**8.160.000**	**0**	**0**	**25**	**8.160.000**	**50**	**13.219.540**	**50**	**7,94**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	6.500.000	1	5.059.540	1	6.500.000	0	0	0	0	1	8.160.000	0	0	1	8.160.000	2	13.219.540	200	203,38	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**583.600.000**	**100**	**606.660.646**	**100**	**583.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**615.556.646**	**0**	**0**	**100**	**615.556.646**	**200**	**1.222.217.292**	**200**	**209,43**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.600.000	12	8.000.000	12	3.600.000	0	0	0	0	12	5.800.000	0	0	12	5.800.000	24	13.800.000	200	383,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	289.660.646	12	300.000.000	0	0	0	0	12	195.756.646	0	0	12	195.756.646	24	485.417.292	200	161,81	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	280.000.000	12	309.000.000	12	280.000.000	0	0	0	0	12	414.000.000	0	0	12	414.000.000	24	723.000.000	200	258,21	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**211.000.000**	**100**	**379.955.900**	**100**	**211.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**186.160.477**	**0**	**0**	**100**	**186.160.477**	**200**	**566.116.377**	**200**	**268,3**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	165.000.000	12	123.069.900	12	165.000.000	0	0	0	0	12	116.556.300	0	0	12	116.556.300	24	239.626.200	200	145,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	6.000.000	12	10.380.000	12	6.000.000	0	0	0	0	12	4.380.000	0	0	12	4.380.000	24	14.760.000	200	246	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	1	246.506.000	1	40.000.000	0	0	0	0	1	65.224.177	0	0	1	65.224.177	2	311.730.177	200	779,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																								
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN**	**Persen**	**100**	**4.498.479.000**	**148,08**	**6.444.006.550**	**34,62**	**1.288.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234,62**	**5.405.451.217**	**234,62**	**5.405.451.217**	**382,69**	**11.849.457.767**	**382,69**	**263,41**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**02**	**1**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**1.483.229.000**	**58,33**	**712.159.000**	**33,33**	**325.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,33**	**1.974.476.467**	**58,33**	**1.974.476.467**	**116,67**	**2.686.635.467**	**116,67**	**181,13**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	345.000.000	6	520.159.000	3	195.000.000	0	0	0	0	0	0	7	1.974.476.467	7	1.974.476.467	13	2.494.635.467	216,67	723,08	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3	739.229.000	1	192.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	192.000.000	33,33	25,97	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	3	399.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	26	02	1	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	26	02	1	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**2.231.760.000**	**218,75**	**5.731.847.550**	**34,38**	**715.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353,13**	**3.171.854.750**	**353,13**	**3.171.854.750**	**571,88**	**8.903.702.300**	**571,88**	**398,95**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	3	253.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	6	518.700.000	3	290.864.000	2	169.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	290.864.000	50	56,08	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	15	1.099.560.000	67	5.440.983.550	5	371.280.000	0	0	0	0	0	0	112	2.781.625.000	112	2.781.625.000	179	8.222.608.550	1,193.33	747,81	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	6	160.000.000	0	0	3	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provins	Laporan	2	200.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	390.229.750	1	390.229.750	1	390.229.750	50	195,11	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha**	**Persen**	**100**	**783.490.000**	**0**		**37,5**	**248.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**259.120.000**	**25**	**259.120.000**	**25**	**259.120.000**	**25**	**33,07**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3	420.400.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	2	259.120.000	2	259.120.000	2	259.120.000	66,67	61,64	Dinas Pariwisata
3	26	02	1	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	5	363.090.000	0	0	2	118.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN**	**Persen**	**100**	**10.241.323.000**	**23,08**	**4.457.870.980**	**38,46**	**3.440.312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119,23**	**9.397.226.774**	**119,23**	**9.397.226.774**	**142,31**	**13.855.097.754**	**142,31**	**135,29**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**03**	**1**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah**	**Persen**	**100**	**10.241.323.000**	**23,08**	**4.457.870.980**	**38,46**	**3.440.312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119,23**	**9.397.226.774**	**119,23**	**9.397.226.774**	**142,31**	**13.855.097.754**	**142,31**	**135,29**	**Dinas Pariwisata**
3	26	03	1	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	9	701.222.000	3	321.078.000	3	233.280.000	0	0	0	0	0	0	18	2.963.407.052	18	2.963.407.052	21	3.284.485.052	233,33	468,39	Dinas Pariwisata
3	26	03	1	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	14	9.301.965.000	2	4.072.500.580	6	3.127.810.000	0	0	0	0	0	0	12	6.404.976.722	12	6.404.976.722	14	10.477.477.302	100	112,64	Dinas Pariwisata
3	26	03	1	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	238.136.000	1	64.292.400	1	79.222.000	0	0	0	0	0	0	1	28.843.000	1	28.843.000	2	93.135.400	66,67	39,11	Dinas Pariwisata
3	26	03	1	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	1	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**JUMLAH USULAN PRODUK EKRAF YANG DIFASILITASI/MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persen**	**100**	**3.147.369.000**	**61,9**	**3.203.053.800**	**33,33**	**761.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133,33**	**10.290.465.830**	**133,33**	**10.290.465.830**	**195,24**	**13.493.519.630**	**195,24**	**428,72**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**1**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.007.125.000**	**64,71**	**2.175.357.800**	**35,29**	**714.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158,82**	**10.093.973.830**	**158,82**	**10.093.973.830**	**223,53**	**12.269.331.630**	**223,53**	**611,29**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	1	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	15	1.807.125.000	11	2.175.357.800	5	614.560.000	0	0	0	0	0	0	26	10.085.203.830	26	10.085.203.830	37	12.260.561.630	246,67	678,46	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	2	200.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	8.770.000	1	8.770.000	1	8.770.000	50	4,39	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**	**1**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan**	**Persen**	**100**	**1.140.244.000**	**50**	**1.027.696.000**	**25**	**46.656.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**196.492.000**	**25**	**196.492.000**	**75**	**1.224.188.000**	**75**	**107,36**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	1	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1.000.000.000	1	993.140.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	993.140.000	100	99,31	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	3	140.244.000	1	34.556.000	1	46.656.000	0	0	0	0	0	0	1	196.492.000	1	196.492.000	2	231.048.000	66,67	164,75	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**JUMLAH SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIBINA**	**Persen**	**100**	**1.638.000.000**	**20**	**311.162.000**	**33,33**	**475.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,33**	**1.136.326.638**	**53,33**	**1.136.326.638**	**73,33**	**1.447.488.638**	**73,33**	**88,37**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**1**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan**	**Persen**	**100**	**1.638.000.000**	**20**	**311.162.000**	**33,33**	**475.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,33**	**1.136.326.638**	**53,33**	**1.136.326.638**	**73,33**	**1.447.488.638**	**73,33**	**88,37**	**Dinas Pariwisata**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	26	05	1	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	300	922.000.000	40	118.271.000	100	275.000.000	0	0	0	0	0	0	160	572.920.750	160	572.920.750	200	691.191.750	66,67	74,97	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	150	358.000.000	80	192.891.000	50	100.000.000	0	0	0	0	0	0	160	563.405.888	160	563.405.888	240	756.296.888	160	211,26	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	150	358.000.000	0	0	50	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**	**1**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kratif yang mengalami peninokatan SDM**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	1	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persen**	**100**	**39.557.116.669**	**36,19**	**9.497.982.550**	**29,34**	**13.002.058.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,7**	**12.708.045.077**	**38,7**	**12.708.045.077**	**74,89**	**22.206.027.627**	**74,89**	**56,14**	**Dinas Pariwisata**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**1.092.320.000**	**30**	**81.498.440**	**30**	**418.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**242.749.533**	**30**	**242.749.533**	**60**	**324.247.973**	**60**	**29,68**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	253.000.000	3	17.165.000	2	105.000.000	0	0	0	0	0	0	3	9.425.400	3	9.425.400	6	26.590.400	85,71	10,51	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	724.320.000	2	61.998.440	2	258.000.000	0	0	0	0	0	0	2	213.993.673	2	213.993.673	4	275.992.113	80	38,1	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	15.000.000	1	2.335.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	19.330.460	1	19.330.460	2	21.665.460	66,67	144,44	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**26.859.620.100**	**34,71**	**7.860.602.623**	**32,8**	**8.953.125.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,71**	**8.313.406.725**	**34,71**	**8.313.406.725**	**69,43**	**16.174.009.348**	**69,43**	**60,22**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	270	26.370.137.100	96	7.690.938.623	90	8.790.045.700	0	0	0	0	0	0	96	8.157.856.725	96	8.157.856.725	192	15.848.795.348	71,11	60,1	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36	474.483.000	12	165.120.000	12	158.080.000	0	0	0	0	0	0	12	152.400.000	12	152.400.000	24	317.520.000	66,67	66,92	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	15.000.000	1	4.544.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.150.000	1	3.150.000	2	7.694.000	66,67	51,29	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**146.871.000**	**8,33**	**30.000.000**	**25**	**48.932.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,33**	**30.000.000**	**8,33**	**30.000.000**	**16,67**	**60.000.000**	**16,67**	**40,85**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	18	146.871.000	2	30.000.000	6	48.932.000	0	0	0	0	0	0	2	30.000.000	2	30.000.000	4	60.000.000	22,22	40,85	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiiakan Retribusi Daerah	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9				11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**382.849.000**	**12,82**	**5.140.000**	**16,67**	**140.888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,92**	**66.140.025**	**26,92**	**66.140.025**	**39,74**	**71.280.025**	**39,74**	**18,62**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	207.296.000	0	0	1	82.400.000	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	33,33	9,65	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	5	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	5	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	36	175.553.000	10	5.140.000	12	58.488.000	0	0	0	0	0	0	20	46.140.025	20	46.140.025	30	51.280.025	83,33	29,21	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.337.230.000**	**52,75**	**613.853.920**	**29,67**	**1.522.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,64**	**1.613.884.505**	**62,64**	**1.613.884.505**	**115,38**	**2.227.738.425**	**115,38**	**41,74**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	34.338.000	1	10.874.250	10	11.440.000	0	0	0	0	0	0	1	13.015.700	1	13.015.700	2	23.889.950	6,67	69,57	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	1.463.449.000	4	13.666.020	10	580.556.000	0	0	0	0	0	0	14	675.118.000	14	675.118.000	18	688.784.020	60	47,07	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1.048.436.000	3	41.836.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41.836.000	60	3,99	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	162.323.000	2	33.233.050	2	54.080.000	0	0	0	0	0	0	4	67.352.179	4	67.352.179	6	100.585.229	120	61,97	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	187.296.000	2	55.477.500	2	62.400.000	0	0	0	0	0	0	2	57.054.361	2	57.054.361	4	112.531.861	80	60,08	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	56.317.000	12	9.120.000	1	18.763.000	0	0	0	0	0	0	12	8.760.000	12	8.760.000	24	17.880.000	800	31,75	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	189.074.000	12	38.028.100	1	62.992.000	0	0	0	0	0	0	12	70.356.773	12	70.356.773	24	108.384.873	800	57,32	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.195.997.000	12	411.619.000	1	731.829.000	0	0	0	0	0	0	12	722.227.492	12	722.227.492	24	1.133.846.492	800	51,63	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**2.166.494.000**	**53,19**	**206.176.000**	**23,4**	**802.735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114,89**	**755.275.000**	**114,89**	**755.275.000**	**168,09**	**961.451.000**	**168,09**	**44,38**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	529.650.000	1	529.650.000	1	529.650.000	100	264,83	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	408.000.000	2	18.575.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18.575.000	100	4,55	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	162.000.000	18	160.101.000	5	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	160.101.000	120	98,83	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	1.396.494.000	5	27.500.000	5	547.735.000	0	0	0	0	0	0	53	225.625.000	53	225.625.000	58	253.125.000	414,29	18,13	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**1.026.041.000**	**250**	**301.658.893**	**30**	**342.172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**767.370.129**	**250**	**767.370.129**	**500**	**1.069.029.022**	**500**	**104,19**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	6.539.000	1	1.800.000	1	2.512.000	0	0	0	0	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	2	4.800.000	66,67	73,41	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	569.623.000	12	164.358.893	1	189.777.000	0	0	0	0	0	0	12	305.520.129	12	305.520.129	24	469.879.022	800	82,49	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	449.879.000	12	135.500.000	1	149.883.000	0	0	0	0	0	0	12	458.850.000	12	458.850.000	24	594.350.000	800	132,11	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**2.545.691.569**	**32,28**	**399.052.674**	**30,88**	**774.145.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,81**	**919.219.160**	**22,81**	**919.219.160**	**55,09**	**1.318.271.834**	**55,09**	**51,78**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	259.442.569	15	155.202.674	12	219.569	0	0	0	0	0	0	15	235.898.565	15	235.898.565	30	391.101.239	83,33	150,75	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	3	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	152.958.000	51	33.217.000	50	50.960.000	0	0	0	0	0	0	33	16.648.486	33	16.648.486	84	49.865.486	56	32,6	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	69	448.640.000	23	31.420.000	23	143.686.000	0	0	0	0	0	0	9	252.076.059	9	252.076.059	32	283.496.059	46,38	63,19	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	1.684.651.000	3	179.213.000	3	579.280.000	0	0	0	0	0	0	8	414.596.050	8	414.596.050	11	593.809.050	122,22	35,25	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian**	**Persen**	**100**	**22.101.997.910**	**2,99**	**18.273.557.910**	**50,16**	**6.386.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,16**	**17.917.171.700**	**3,16**	**17.917.171.700**	**6,15**	**36.190.729.610**	**6,15**	**163,74**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**02**	**1**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Persen**	**100**	**5.403.959.570**	**33,33**	**5.912.334.570**	**66,67**	**1.899.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**10.764.111.100**	**66,67**	**10.764.111.100**	**100**	**16.676.445.670**	**100**	**308,6**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan SebaranPupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kegiatan	2	5.254.959.570	1	5.912.334.570	1	1.750.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.587.864.100	1	10.587.864.100	2	16.500.198.670	100	313,99	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	1	149.000.000	0	0	1	149.000.000	0	0	0	0	0	0	1	176.247.000	1	176.247.000	1	176.247.000	100	118,29	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Persen**	**100**	**1.763.200.000**	**0,01**	**757.700.000**	**50**	**1.005.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,01**	**2.483.950.000**	**0,01**	**2.483.950.000**	**0,02**	**3.241.650.000**	**0,02**	**183,85**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Kegiatan	1	80.500.000	0	0	1	80.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pangan	Ha	10000	1.682.700.000	1	757.700.000	5000	925.000.000	0	0	0	0	0	0	1	2.483.950.000	1	2.483.950.000	2	3.241.650.000	0,02	192,65	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Tersedianya Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**358.000.000**	**0**		**100**	**358.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	112.000.000	0	0	1	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	146.500.000	0	0	1	146.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	10	99.500.000	0	0	10	99.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,1**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**12.081.238.340**	**48,57**	**10.966.623.340**	**51,43**	**1.265.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,57**	**713.709.600**	**48,57**	**713.709.600**	**97,14**	**11.680.332.940**	**97,14**	**96,68**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,1	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Kab/Kota	34	11.566.238.340	17	10.966.623.340	17	750.000.000	0	0	0	0	0	0	17	713.709.600	17	713.709.600	34	11.680.332.940	100	100,99	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,1	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Tersedianya Pakan Ternak di Kelompok Ternak	Paket	1	515.000.000	0	0	1	515.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,1**		**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Persen**	**100**	**199.300.000**	**0**		**100**	**199.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,1	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kegiatan	1	149.800.000	0	0	1	149.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,1	02	Perindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Tindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kegiatan	1	49.500.000	0	0	1	49.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,1**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan, Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Persen**	**100**	**2.296.300.000**	**48,62**	**636.900.000**	**51,38**	**1.659.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,38**	**3.955.401.000**	**51,38**	**3.955.401.000**	**100**	**4.592.301.000**	**100**	**199,99**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,1	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab/Kota	17	1.147.000.000	0	0	17	1.147.000.000	0	0	0	0	0	0	17	3.578.401.000	17	3.578.401.000	17	3.578.401.000	100	311,98	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,1	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Hijauan Pakan Ternak	Ha	600	1.149.300.000	300	636.900.000	300	512.400.000	0	0	0	0	0	0	300	377.000.000	300	377.000.000	600	1.013.900.000	100	88,22	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Populasi Ternak**	**Persen**	**100**	**5.999.875.000**	**22,22**	**3.824.175.000**	**88,89**	**4.360.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**10.402.968.750**	**33,33**	**10.402.968.750**	**55,56**	**14.227.143.750**	**55,56**	**237,12**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**03**	**1**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian**	**Persen**	**100**	**5.909.875.000**	**28,57**	**3.824.175.000**	**85,71**	**4.270.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,86**	**10.402.968.750**	**42,86**	**10.402.968.750**	**71,43**	**14.227.143.750**	**71,43**	**240,74**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	03	1	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	760.000.000	0	0	3	760.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani	Kegiatan	1	1.360.000.000	0	0	1	1.360.000.000	0	0	0	0	0	0	1	8.468.007.500	1	8.468.007.500	1	8.468.007.500	100	622,65	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Tersedianya Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	2	2.869.875.000	1	1.639.875.000	1	1.230.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.492.961.250	1	1.492.961.250	2	3.132.836.250	100	109,16	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kegiatan	1	920.000.000	1	2.184.300.000	1	920.000.000	0	0	0	0	0	0	1	442.000.000	1	442.000.000	2	2.626.300.000	200	285,47	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**03**	**1**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terkelolanya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**90.000.000**	**0**		**100**	**90.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	03	1	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	45.000.000	0	0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	1	45.000.000	0	0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Masyarakat Veteriner**	**Persen**	**100**	**1.210.321.490**	**34**	**216.187.806**	**66**	**992.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**329.280.000**	**34**	**329.280.000**	**68**	**545.467.806**	**68**	**45,07**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**04**	**1**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**Persen**	**100**	**805.721.490**	**47,22**	**216.187.806**	**52,78**	**588.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,22**	**329.280.000**	**47,22**	**329.280.000**	**94,44**	**545.467.806**	**94,44**	**67,7**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	04	1	01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tersedianya dan Terdistribusinya Obat-obatan dan Vaksin	Kab/Kota	34	472.421.490	17	216.187.806	17	255.000.000	0	0	0	0	0	0	17	329.280.000	17	329.280.000	34	545.467.806	100	115,46	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	04	1	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembebasan Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1	112.000.000	0	0	1	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	04	1	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Terpeliharanya Kesehatan dan Tercegahnya Penyakit Menular Ternak	Kegiatan	1	221.300.000	0	0	1	221.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**	**1**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Terlaksananya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Persen**	**100**	**250.200.000**	**0**		**100**	**250.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	04	1	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terpeliharanya kesehatan dan Tercegahnya Penyakit Menular pada Masyarakat Veteriner	Bulan	12	250.200.000	0	0	12	250.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	**27**	**04**	**1**		**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Terlaksananya Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persen**	**100**	**154.400.000**	**0**		**100**	**154.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	04	1	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Terlaksananya Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Kegiatan	1	78.100.000	0	0	1	78.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	04	1	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Kegiatan	1	76.300.000	0	0	1	76.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Areal Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman Pangan**	**Persen**	**100**	**395.700.000**	**25**	**150.450.000**	**75**	**289.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**125.800.000**	**25**	**125.800.000**	**50**	**276.250.000**	**50**	**69,81**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**05**	**1**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Persen**	**100**	**395.700.000**	**25**	**150.450.000**	**75**	**289.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**125.800.000**	**25**	**125.800.000**	**50**	**276.250.000**	**50**	**69,81**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	05	1	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya OPT pada Tanaman Pangan	Paket	2	216.200.000	1	150.450.000	1	110.000.000	0	0	0	0	0	0	1	125.800.000	1	125.800.000	2	276.250.000	100	127,78	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	05	1	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan	1	89.000.000	0	0	1	89.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	05	1	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kegiatan	1	90.500.000	0	0	1	90.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani**	**Persen**	**100**	**3.763.738.813**	**8,33**	**1.699.438.813**	**91,67**	**2.064.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,67**	**1.992.591.395**	**16,67**	**1.992.591.395**	**25**	**3.692.030.208**	**25**	**98,09**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**07**	**1**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian**	**Persen**	**100**	**312.300.000**	**0**		**100**	**312.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	07	1	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Kegiatan	6	155.000.000	0	0	6	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kegiatan	10	157.300.000	0	0	10	157.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**	**1**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Persen**	**100**	**3.073.281.008**	**33,33**	**1.619.281.008**	**66,67**	**1.454.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**1.190.860.395**	**66,67**	**1.190.860.395**	**100**	**2.810.141.403**	**100**	**91,44**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	07	1	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kegiatan	1	980.000.000	0	0	1	980.000.000	0	0	0	0	0	0	1	345.221.895	1	345.221.895	1	345.221.895	100	35,23	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kegiatan	2	2.093.281.008	1	1.619.281.008	1	474.000.000	0	0	0	0	0	0	1	845.638.500	1	845.638.500	2	2.464.919.508	100	117,75	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**	**1**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Persen**	**100**	**378.157.805**	**20**	**80.157.805**	**80**	**298.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**801.731.000**	**40**	**801.731.000**	**60**	**881.888.805**	**60**	**233,21**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	07	1	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Kegiatan	1	74.500.000	0	0	1	74.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Kegiatan	1	74.500.000	0	0	1	74.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Kegiatan	2	154.657.805	1	80.157.805	1	74.500.000	0	0	0	0	0	0	1	216.131.000	1	216.131.000	2	296.288.805	100	191,58	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuk dan Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kegiatan	1	74.500.000	0	0	1	74.500.000	0	0	0	0	0	0	1	585.600.000	1	585.600.000	1	585.600.000	100	786,04	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**93.706.171.809**	**10,12**	**41.914.110.938**	**90,15**	**50.270.608.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,87**	**30.917.551.247**	**10,87**	**30.917.551.247**	**20,99**	**72.831.662.185**	**20,99**	**77,72**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**406.270.612**	**47,06**	**95.132.318**	**52,94**	**314.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,29**	**84.624.537**	**35,29**	**84.624.537**	**82,35**	**179.756.855**	**82,35**	**44,25**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	6	151.048.982	3	62.048.982	3	89.000.000	0	0	0	0	0	0	1	47.753.156	1	47.753.156	4	109.802.138	66,67	72,69	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	Dokumen	2	12.699.716	1	5.499.716	1	7.200.000	0	0	0	0	0	0	1	5.535.900	1	5.535.900	2	11.035.616	100	86,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	12.699.716	1	5.499.716	1	7.200.000	0	0	0	0	0	0	1	5.535.900	1	5.535.900	2	11.035.616	100	86,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Dokumen	2	12.699.716	1	5.499.716	1	7.200.000	0	0	0	0	0	0	1	5.535.900	1	5.535.900	2	11.035.616	100	86,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	12.823.118	1	8.984.824	1	7.200.000	0	0	0	0	0	0	1	5.535.900	1	5.535.900	2	14.520.724	100	113,24	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	Dokumen	2	16.299.364	1	7.599.364	1	8.700.000	0	0	0	0	0	0	1	14.727.781	1	14.727.781	2	22.327.145	100	136,98	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	1	188.000.000	0	0	1	188.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**69.573.723.979**	**42,53**	**32.456.966.589**	**57,47**	**34.839.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,53**	**24.592.336.092**	**42,53**	**24.592.336.092**	**85,06**	**57.049.302.681**	**85,06**	**82**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanananya Pembayaran Gaji ASN	Bulan	24	69.026.984.690	12	32.182.437.300	12	34.563.490.000	0	0	0	0	0	0	12	24.356.889.992	12	24.356.889.992	24	56.539.327.292	100	81,91	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	24	82.999.812	12	51.499.812	12	31.500.000	0	0	0	0	0	0	12	12.657.300	12	12.657.300	24	64.157.112	100	77,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	72.000.000	0	0	12	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi SKPD	Dokumen	1	49.650.000	0	0	1	49.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	13.198.773	1	4.998.773	1	8.200.000	0	0	0	0	0	0	1	4.992.800	1	4.992.800	2	9.991.573	100	75,7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	Laporan	24	328.890.704	12	218.030.704	12	115.000.000	0	0	0	0	0	0	12	217.796.000	12	217.796.000	24	435.826.704	100	132,51	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**55.400.000**	**0**		**100**	**55.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	55.400.000	0	0	6	55.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.030.360.000**	**0,18**	**51.483.000**	**100**	**1.030.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,6**	**73.022.000**	**0,6**	**73.022.000**	**0,79**	**124.505.000**	**0,79**	**12,08**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya/Terpeliharanya Alat Prsensi Pegawai	Unit	10	75.600.000	0	0	10	75.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Korpri dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Set	1500	445.000.000	0	0	1500	445.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terbenahinya Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	47.160.000	0	0	12	47.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan	1	55.000.000	0	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional	Orang	10	165.400.000	3	51.483.000	10	165.400.000	0	0	0	0	0	0	10	73.022.000	10	73.022.000	13	124.505.000	130	75,28	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	53.200.000	0	0	1	53.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	114.000.000	0	0	120	114.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertatanya administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.117.369.156**	**41,18**	**1.439.129.119**	**58,82**	**2.713.408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,18**	**2.842.245.377**	**41,18**	**2.842.245.377**	**82,35**	**4.281.374.496**	**82,35**	**103,98**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	24	143.207.500	12	60.707.500	12	82.500.000	0	0	0	0	0	0	12	66.196.000	12	66.196.000	24	126.903.500	100	88,62	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	24	400.730.822	12	252.637.822	12	190.400.000	0	0	0	0	0	0	12	186.000.000	12	186.000.000	24	438.637.822	100	109,46	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	76.700.000	0	0	12	76.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	Bulan	24	348.554.834	12	102.906.797	12	245.648.000	0	0	0	0	0	0	12	140.169.156	12	140.169.156	24	243.075.953	100	69,74	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	24	316.649.000	12	132.649.000	12	184.000.000	0	0	0	0	0	0	12	124.813.421	12	124.813.421	24	257.462.421	100	81,31	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	24	36.680.000	12	16.020.000	12	20.660.000	0	0	0	0	0	0	12	20.304.000	12	20.304.000	24	36.324.000	100	99,03	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	24	396.960.000	12	146.160.000	12	250.800.000	0	0	0	0	0	0	12	159.080.000	12	159.080.000	24	305.240.000	100	76,89	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	2.205.187.000	12	728.048.000	12	1.470.000.000	0	0	0	0	0	0	12	2.145.682.800	12	2.145.682.800	24	2.873.730.800	100	130,32	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip SKPD	Bulan	12	97.500.000	0	0	12	97.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	95.200.000	0	0	12	95.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**9.010.764.066**	**18,42**	**2.424.395.916**	**85,53**	**7.193.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,42**	**1.012.955.350**	**18,42**	**1.012.955.350**	**36,84**	**3.437.351.266**	**36,84**	**38,15**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	600.900.000	0	0	1	600.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	15	1.431.000.000	3	590.000.000	15	1.431.000.000	0	0	0	0	0	0	3	680.000.000	3	680.000.000	6	1.270.000.000	40	88,75	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Unit	2	750.000.000	0	0	2	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	10	95.600.000	0	0	10	95.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	3.296.676.066	10	1.661.075.916	10	1.690.000.000	0	0	0	0	0	0	10	297.648.600	10	297.648.600	20	1.958.724.516	100	59,42	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	20	110.000.000	0	0	20	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2.230.000.000	0	0	2	2.230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	4	195.500.000	0	0	4	195.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	2	301.088.000	1	173.320.000	1	90.500.000	0	0	0	0	0	0	1	35.306.750	1	35.306.750	2	208.626.750	100	69,29	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**2.395.347.996**	**42,86**	**1.113.547.996**	**57,14**	**1.299.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,86**	**1.157.775.891**	**42,86**	**1.157.775.891**	**85,71**	**2.271.323.887**	**85,71**	**94,82**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	24	17.572.500	12	2.172.500	12	15.400.000	0	0	0	0	0	0	12	5.862.500	12	5.862.500	24	8.035.000	100	45,72	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	24	1.753.375.496	12	841.375.496	12	912.000.000	0	0	0	0	0	0	12	791.913.391	12	791.913.391	24	1.633.288.887	100	93,15	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	76.000.000	0	0	12	76.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	548.400.000	12	270.000.000	12	296.400.000	0	0	0	0	0	0	12	360.000.000	12	360.000.000	24	630.000.000	100	114,88	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**7.116.936.000**	**33,33**	**4.333.456.000**	**66,67**	**2.823.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,67**	**1.154.592.000**	**41,67**	**1.154.592.000**	**75**	**5.488.048.000**	**75**	**77,11**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	515.000.000	0	0	12	515.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	24	860.720.000	12	465.720.000	12	395.000.000	0	0	0	0	0	0	12	541.634.500	12	541.634.500	24	1.007.354.500	100	117,04	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bulan	12	115.600.000	0	0	12	115.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Bulan	12	51.000.000	0	0	12	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	121.200.000	0	0	12	121.200.000	0	0	0	0	0	0	12	24.750.000	12	24.750.000	12	24.750.000	100	20,42	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	24	2.427.521.000	12	2.017.841.000	12	450.000.000	0	0	0	0	0	0	12	574.316.000	12	574.316.000	24	2.592.157.000	100	106,78	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	24	1.018.520.000	12	37.820.000	12	980.700.000	0	0	0	0	0	0	12	13.050.000	12	13.050.000	24	50.870.000	100	4,99	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	24	2.007.375.000	12	1.812.075.000	12	195.300.000	0	0	0	0	0	0	12	841.500	12	841.500	24	1.812.916.500	100	90,31	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																							
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan unggulan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Jumah Produksi Hortikultura unggulan (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk, dan Durian)**	**Persen**	**100**	**26.811.935.995**	**45,7**	**16.235.189.867**	**34,44**	**4.326.779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,62**	**63.150.000**	**36,42**	**21.760.951.700**	**43,05**	**21.824.101.700**	**88,74**	**38.059.291.567**	**88,74**	**141,95**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**02**	**1**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan dan Hortikultura**	**Persen**	**100**	**2.324.923.700**	**20**	**641.054.000**	**30**	**620.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,67**	**7.666.912.000**	**36,67**	**7.666.912.000**	**56,67**	**8.307.966.000**	**56,67**	**357,34**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	02	1	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	1.260.000.000	0	0	2	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	02	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	26	1.064.923.700	6	641.054.000	7	20.000.000	0	0	0	0	0	0	11	7.666.912.000	11	7.666.912.000	17	8.307.966.000	65,38	780,15	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**02**	**1**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura**	**Persen**	**100**	**24.487.012.295**	**52,07**	**15.594.135.867**	**35,54**	**3.706.779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,26**	**63.150.000**	**36,36**	**14.094.039.700**	**44,63**	**14.157.189.700**	**96,69**	**29.751.325.567**	**96,69**	**121,5**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	02	1	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	30	251.171.819	10	49.143.750	10	50.000.000	0	0	0	0	10	63.150.000	0	0	10	63.150.000	20	112.293.750	66,67	44,71	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	02	1	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	30	5.080.661.565	10	2.124.235.500	10	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	19	3.772.449.500	19	3.772.449.500	29	5.896.685.000	96,67	116,06	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	02	1	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	61	19.155.178.911	43	13.420.756.617	23	2.356.779.000	0	0	0	0	0	0	25	10.321.590.200	25	10.321.590.200	68	23.742.346.817	111,48	123,95	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Luas Lahan Produktif Perkebunan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) Jumlah Luas Lahan Produktif Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk dan Durian)**	**Persen**	**100**	**8.120.236.000**	**0**	**0**	**57,6**	**3.866.779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55,2**	**16.931.165.151**	**55,2**	**16.931.165.151**	**55,2**	**16.931.165.151**	**55,2**	**208,51**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**03**	**1**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Paket Penataan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura**	**Persen**	**100**	**336.000.000**	**0**	**0**	**61,7**	**160.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,91**	**2.773.975.451**	**31,91**	**2.773.975.451**	**31,91**	**2.773.975.451**	**31,91**	**825,59**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	03	1	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	63.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	63.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	19	63.000.000	0	0	15	30.000.000	0	0	0	0	0	0	15	2.773.975.451	15	2.773.975.451	15	2.773.975.451	78,95	4.403,14	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	8	63.000.000	0	0	4	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	8	42.000.000	0	0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	8	42.000.000	0	0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan / Presentase luas areal pengendalian OPT Hortikultura**	**Persen**	**100**	**354.300.000**	**0,13**	**196.300.000**	**27,03**	**75.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,13**	**1.026.010.000**	**0,13**	**1.026.010.000**	**0,26**	**1.222.310.000**	**0,26**	**344,99**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**05**	**1**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan perkebunan**	**Persen**	**100**	**354.300.000**	**0,13**	**196.300.000**	**27,03**	**75.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,13**	**1.026.010.000**	**0,13**	**1.026.010.000**	**0,26**	**1.222.310.000**	**0,26**	**344,99**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	05	1	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	705	249.300.000	1	196.300.000	200	25.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.026.010.000	1	1.026.010.000	2	1.222.310.000	0,28	490,3	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	05	1	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	55	52.500.000	0	0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	05	1	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	2	52.500.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura**	**Persen**	**100**	**126.000.000**	**0**	**0**	**50**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**06**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura**	**Persen**	**100**	**126.000.000**	**0**	**0**	**50**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	06	1	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	42.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	06	1	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2	42.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	06	1	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	2	42.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang aktif**	**Persen**	**100**	**449.748.500**	**2,49**	**61.233.000**	**48,76**	**185.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,49**	**61.233.000**	**2,49**	**13,61**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**07**	**1**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang Dikembangkan**	**Persen**	**100**	**52.500.000**	**0**	**0**	**50**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	07	1	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	300	52.500.000	0	0	150	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**07**	**1**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian**	**Persen**	**100**	**84.000.000**	**0**	**0**	**50**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	07	1	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	42.000.000	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	07	1	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	32	42.000.000	0	0	16	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**07**	**1**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan**	**Persen**	**100**	**313.248.500**	**15,15**	**61.233.000**	**42,42**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,15**	**61.233.000**	**15,15**	**19,55**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	07	1	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	30	145.248.500	10	61.233.000	10	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	61.233.000	33,33	42,16	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	07	1	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan	12	84.000.000	0	0	6	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	07	1	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	24	84.000.000	0	0	12	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**73.573.418.561**	**33,71**	**19.039.303.450**	**34,75**	**25.097.516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,89**	**19.288.977.264**	**22,89**	**19.288.977.264**	**56,6**	**38.328.280.714**	**56,6**	**52,1**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedia Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja**	**Persen**	**100**	**586.517.122**	**31,82**	**87.642.250**	**31,82**	**221.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,82**	**166.155.850**	**31,82**	**166.155.850**	**63,64**	**253.798.100**	**63,64**	**43,27**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	57.793.094	4	11.838.500	4	16.500.000	0	0	0	0	0	0	4	28.154.850	4	28.154.850	8	39.993.350	61,54	69,2	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	16.549.471	2	3.707.750	2	5.500.000	0	0	0	0	0	0	2	4.929.000	2	4.929.000	4	8.636.750	66,67	52,19	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	512.174.557	1	72.096.000	1	199.000.000	0	0	0	0	0	0	1	133.072.000	1	133.072.000	2	205.168.000	66,67	40,06	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**60.716.043.388**	**34,88**	**16.385.649.370**	**33,28**	**20.868.533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,28**	**16.247.468.521**	**33,28**	**16.247.468.521**	**68,17**	**32.633.117.891**	**68,17**	**53,75**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	631	59.920.257.800	221	16.199.663.120	210	20.580.154.000	0	0	0	0	0	0	210	16.009.192.521	210	16.009.192.521	431	32.208.855.641	68,3	53,75	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	15.508.320	1	3.762.250	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	1	3.166.000	1	3.166.000	2	6.928.250	66,67	44,67	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	54	780.277.268	18	182.224.000	18	282.879.000	0	0	0	0	0	0	18	235.110.000	18	235.110.000	36	417.334.000	66,67	53,49	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Kepegawaian Daerah**	**Persen**	**100**	**765.000.000**	**28,3**	**127.342.050**	**35,85**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,3**	**127.342.050**	**28,3**	**16,65**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokaoannva	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokapan	Paket	675	450.000.000	225	127.342.050	225	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	127.342.050	33,33	28,3	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	105.000.000	0	0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	210.000.000	0	0	50	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.289.393.219**	**21,43**	**568.907.664**	**39,29**	**811.833.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,81**	**1.260.888.216**	**23,81**	**1.260.888.216**	**45,24**	**1.829.795.880**	**45,24**	**79,92**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	82.555.000	12	23.750.500	12	27.951.000	0	0	0	0	0	0	12	25.418.300	12	25.418.300	24	49.168.800	66,67	59,56	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	304.212.129	12	75.740.398	12	102.850.000	0	0	0	0	0	0	12	69.843.000	12	69.843.000	24	145.583.398	66,67	47,86	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	240.204.000	12	71.181.250	12	79.860.000	0	0	0	0	0	0	12	64.319.750	12	64.319.750	24	135.501.000	66,67	56,41	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	45.086.000	12	10.608.000	12	15.812.000	0	0	0	0	0	0	12	10.500.000	12	10.500.000	24	21.108.000	66,67	46,82	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	216.916.000	12	37.617.000	24	85.360.000	0	0	0	0	0	0	24	52.188.000	24	52.188.000	36	89.805.000	60	41,4	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	132	1.400.420.090	12	350.010.516	60	500.000.000	0	0	0	0	0	0	8	1.038.619.166	8	1.038.619.166	20	1.388.629.682	15,15	99,16	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**3.407.102.000**	**3,03**	**70.100.000**	**28,79**	**1.050.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,18**	**139.314.200**	**18,18**	**139.314.200**	**21,21**	**209.414.200**	**21,21**	**6,15**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	22	1.050.000.000	2	70.100.000	11	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	70.100.000	9,09	6,68	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	350.500.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	455.500.000	0	0	6	200.000.000	0	0	0	0	0	0	12	139.314.200	12	139.314.200	12	139.314.200	40	30,58	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	1.551.102.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.065.272.462**	**51,19**	**548.639.625**	**33,33**	**686.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**584.298.072**	**33,33**	**584.298.072**	**84,52**	**1.132.937.697**	**84,52**	**54,86**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	600	50.744.000	320	12.203.000	200	18.150.000	0	0	0	0	0	0	200	10.366.240	200	10.366.240	520	22.569.240	86,67	44,48	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.488.728.462	12	347.436.625	12	500.000.000	0	0	0	0	0	0	12	321.931.832	12	321.931.832	24	669.368.457	66,67	44,96	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	525.800.000	12	189.000.000	12	168.000.000	0	0	0	0	0	0	12	252.000.000	12	252.000.000	24	441.000.000	66,67	83,87	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**Persen**	**100**	**3.744.090.370**	**27,33**	**1.251.022.491**	**34,78**	**1.160.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,78**	**890.852.405**	**34,78**	**890.852.405**	**62,11**	**2.141.874.896**	**62,11**	**57,21**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	23	998.511.650	1	229.889.471	11	350.000.000	0	0	0	0	0	0	11	231.857.155	11	231.857.155	12	461.746.626	52,17	46,24	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	288	219.960.000	84	49.720.000	96	80.000.000	0	0	0	0	0	0	96	51.760.000	96	51.760.000	180	101.480.000	62,5	46,14	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	2.525.618.720	3	971.413.020	5	730.000.000	0	0	0	0	0	0	5	607.235.250	5	607.235.250	8	1.578.648.270	72,73	62,51	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**																								
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**- Dokumen RPHJP, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Produksi Hasil Hutan Kayu, Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**	**Persen**	**100**	**39.183.089.098**	**0,55**	**11.158.373.390**	**31,02**	**18.851.234.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,34**	**15.528.857.461**	**14,34**	**15.528.857.461**	**14,89**	**26.687.230.851**	**14,89**	**68,11**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**03**	**1**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**- Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**945.738.798**	**25**	**216.761.190**	**25**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**178.352.711**	**25**	**178.352.711**	**50**	**395.113.901**	**50**	**41,78**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	1	45.738.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	3	900.000.000	1	216.761.190	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1	178.352.711	1	178.352.711	2	395.113.901	66,67	43,9	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**- Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**Persen**	**100**	**156.910.000**	**0**	**0**	**50**	**6.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**6.910.000**	**50**	**6.910.000**	**50**	**6.910.000**	**50**	**4,4**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	156.910.000	0	0	1	6.910.000	0	0	0	0	0	0	1	6.910.000	1	6.910.000	1	6.910.000	50	4,4	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Persen**	**100**	**690.000.000**	**14,29**	**20.080.500**	**14,29**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**47.600.000**	**14,29**	**47.600.000**	**28,57**	**67.680.500**	**28,57**	**9,81**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2	250.000.000	1	20.080.500	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	47.600.000	1	47.600.000	2	67.680.500	100	27,07	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH secara berkala	Laporan	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	- Jumlah laporan Hasil Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan /atau Jasa Lingkungan	Laporan	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**- Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**Persen**	**100**	**28.831.836.500**	**32,69**	**9.101.735.700**	**56,58**	**15.309.720.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,31**	**12.278.903.000**	**41,31**	**12.278.903.000**	**74**	**21.380.638.700**	**74**	**74,16**	**Dinas Kehutanan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	28	03	1	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2	750.854.000	1	237.028.125	1	450.854.000	0	0	0	0	0	0	1	247.830.000	1	247.830.000	2	484.858.125	100	64,57	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	1295	10.209.931.500	400	2.701.845.875	670	5.209.931.500	0	0	0	0	0	0	645	4.975.700.250	645	4.975.700.250	1045	7.677.546.125	80,69	75,2	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijauakan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	823	12.198.935.000	375	6.026.618.700	673	9.198.935.000	0	0	0	0	0	0	335	6.754.725.000	335	6.754.725.000	710	12.781.343.700	86,27	104,77	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	- Jumlah sumber benih/bibit tanaman kehutanan yang tersediadidibanaun	Ha	5	472.116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	2	700.000.000	1	136.243.000	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	1	300.647.750	1	300.647.750	2	436.890.750	100	62,41	Dinas Kehutanan
3	28	03	1	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	250	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,1**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**- Jumlah Laporan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Persen**	**100**	**7.393.603.800**	**0,02**	**1.687.205.000**	**30,6**	**2.919.603.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,9**	**2.820.972.750**	**13,9**	**2.820.972.750**	**13,91**	**4.508.177.750**	**13,91**	**60,97**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,1	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	144056	2.061.660.000	0	0	44056	61.660.000	0	0	0	0	0	0	20000	46.660.000	20000	46.660.000	20000	46.660.000	13,88	2,26	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	03	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	2	12.000.000	0	0	2	12.000.000	0	0	0	0	0	0	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	250	100	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	51	3.565.094.300	26	1.200.156.000	26	2.091.094.300	0	0	0	0	0	0	26	2.045.847.250	26	2.045.847.250	52	3.246.003.250	101,96	91,05	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	52	1.754.849.500	1	487.049.000	26	754.849.500	0	0	0	0	0	0	1	716.465.500	1	716.465.500	2	1.203.514.500	3,85	68,58	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,1**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Unit Managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**03**	**1,1**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun**	**- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Persen**	**100**	**150.000.000**	**50**	**36.220.000**	**50**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**45.565.000**	**50**	**45.565.000**	**100**	**81.785.000**	**100**	**54,52**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,1	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	150.000.000	1	36.220.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	45.565.000	1	45.565.000	2	81.785.000	100	54,52	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,1**		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**- Jumlah Laporan Perbenihan Tanaman Hutan**	**Persen**	**100**	**1.015.000.000**	**10**	**96.371.000**	**10**	**165.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**150.554.000**	**10**	**150.554.000**	**20**	**246.925.000**	**20**	**24,33**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,1	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	2	365.000.000	1	96.371.000	1	165.000.000	0	0	0	0	0	0	1	150.554.000	1	150.554.000	2	246.925.000	100	67,65	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,1	06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	5	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**- Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**Persen**	**100**	**4.749.233.764**	**32,64**	**2.816.398.811**	**47,91**	**1.114.634.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,12**	**5.596.490.929**	**48,12**	**5.596.490.929**	**80,75**	**8.412.889.740**	**80,75**	**177,14**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**04**	**1**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**- Jumlah Laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.385.000.000**	**23,62**	**514.401.611**	**3,15**	**1.110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,94**	**1.048.065.929**	**3,94**	**1.048.065.929**	**27,56**	**1.562.467.540**	**27,56**	**65,51**	**Dinas Kehutanan**
3	28	04	1	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	- Jumlah laporan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Laporan	2	350.000.000	1	90.800.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	1	222.530.000	1	222.530.000	2	313.330.000	100	89,52	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	2	550.000.000	13	139.420.000	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	2	384.809.000	2	384.809.000	15	524.229.000	750	96,31	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	15	225.000.000	15	128.772.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	128.772.112	100	57,23	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Diterdak Lanjuti	Permohonan	1	50.000.000	1	155.409.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155.409.499	100	310,82	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	07	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	2	185.000.000	0	0	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	1	81.190.282	1	81.190.282	1	81.190.282	50	43,89	Dinas Kehutanan
3	28	04	1	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen	2	425.000.000	0	0	1	375.000.000	0	0	0	0	0	0	1	359.536.647	1	359.536.647	1	359.536.647	50	84,6	Dinas Kehutanan
3	**28**	**04**	**1**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**- Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola**	**Persen**	**100**	**2.364.233.764**	**35,9**	**2.301.997.200**	**64,1**	**4.634.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,1**	**4.548.425.000**	**64,1**	**4.548.425.000**	**100**	**6.850.422.200**	**100**	**289,75**	**Dinas Kehutanan**
3	28	04	1	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha	351	2.364.233.764	126	2.301.997.200	225	4.634.764	0	0	0	0	0	0	225	4.548.425.000	225	4.548.425.000	351	6.850.422.200	100	289,75	Dinas Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**- Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya dan Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**Persen**	**100**	**4.975.000.000**	**57,16**	**6.162.620.910**	**49,94**	**2.300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,15**	**1.951.574.101**	**50,15**	**1.951.574.101**	**107,31**	**8.114.195.011**	**107,31**	**163,1**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**05**	**1**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**- Jumlah Laporan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Persen**	**100**	**4.975.000.000**	**57,16**	**6.162.620.910**	**49,94**	**2.300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,15**	**1.951.574.101**	**50,15**	**1.951.574.101**	**107,31**	**8.114.195.011**	**107,31**	**163,1**	**Dinas Kehutanan**
3	28	05	1	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	108	475.000.000	57	224.495.450	53	250.000.000	0	0	0	0	0	0	51	177.129.251	51	177.129.251	108	401.624.701	100	84,55	Dinas Kehutanan
3	28	05	1	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	51	3.450.000.000	25	5.136.684.300	15	1.250.000.000	0	0	0	0	0	0	4	838.571.850	4	838.571.850	29	5.975.256.150	56,86	173,2	Dinas Kehutanan
3	28	05	1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	20000	1.050.000.000	11440	801.441.160	10000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	10055	935.873.000	10055	935.873.000	21495	1.737.314.160	107,48	165,46	Dinas Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**- Evaluasi Pengelolaan DAS**	**Persen**	**100**	**1.760.730.000**	**14,29**	**120.892.500**	**71,43**	**1.360.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,43**	**1.348.760.750**	**71,43**	**1.348.760.750**	**85,71**	**1.469.653.250**	**85,71**	**83,47**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**- Jumlah Laporan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.760.730.000**	**14,29**	**120.892.500**	**71,43**	**1.360.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,43**	**1.348.760.750**	**71,43**	**1.348.760.750**	**85,71**	**1.469.653.250**	**85,71**	**83,47**	**Dinas Kehutanan**
3	28	06	1	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	5	1.455.730.000	0	0	4	1.205.730.000	0	0	0	0	0	0	4	1.205.730.000	4	1.205.730.000	4	1.205.730.000	80	82,83	Dinas Kehutanan
3	28	06	1	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	- Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Laporan	2	305.000.000	1	120.892.500	1	155.000.000	0	0	0	0	0	0	1	143.030.750	1	143.030.750	2	263.923.250	100	86,53	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**- Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**195.711.236.072**	**27,72**	**51.233.778.003**	**24,59**	**67.202.059.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,25**	**54.560.393.526**	**27,25**	**54.560.393.526**	**54,97**	**105.794.171.529**	**54,97**	**54,06**	**Dinas Kehutanan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**674.650.467**	**41,18**	**21.490.000**	**41,18**	**326.259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,18**	**297.602.500**	**41,18**	**297.602.500**	**82,35**	**319.092.500**	**82,35**	**47,3**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.379.322	1	0	1	2.880.000	0	0	0	0	0	0	1	14.987.500	1	14.987.500	2	14.987.500	66,67	73,54	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2.999.000	1	0	1	499.000	0	0	0	0	0	0	1	499.000	1	499.000	2	499.000	100	16,64	Dinas Kehutanan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2.500.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2.500.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2.500.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	10.508.792	1	0	1	2.880.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	66,67	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	633.263.353	1	21.490.000	1	320.000.000	0	0	0	0	0	0	1	282.116.000	1	282.116.000	2	303.606.000	66,67	47,94	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**183.640.467.504**	**34,75**	**49.542.262.924**	**31,71**	**63.337.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,02**	**50.451.140.350**	**32,02**	**50.451.140.350**	**66,77**	**99.993.403.274**	**66,77**	**54,45**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1848	182.556.324.069	643	49.349.912.924	585	63.000.000.000	0	0	0	0	0	0	590	49.952.386.450	590	49.952.386.450	1233	99.302.299.374	66,72	54,4	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	300.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	90.725.000	1	90.725.000	1	90.725.000	50	30,24	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	5.893.435	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	66,67	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	2.500.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	200	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	54	775.750.000	18	192.350.000	18	187.000.000	0	0	0	0	0	0	18	408.028.900	18	408.028.900	36	600.378.900	66,67	77,39	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**105.000.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	200	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	100.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	200	0	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**- Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**571.900.000**	**0**	**0**	**0,15**	**100.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.171.000**	**0**	**92.171.000**	**0**	**92.171.000**	**0**	**16,12**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	643	321.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kineria Pegawai	Dokumen	3	250.400.000	0	0	1	100.400.000	0	0	0	0	0	0	0	92.171.000	0	92.171.000	0	92.171.000	0	36,81	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.474.265.611**	**290,48**	**683.642.683**	**33,33**	**1.211.095.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357,14**	**1.726.139.334**	**357,14**	**1.726.139.334**	**647,62**	**2.409.782.017**	**647,62**	**69,36**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	31.669.000	2	1.994.816	1	1.880.000	0	0	0	0	0	0	7	6.347.400	7	6.347.400	9	8.342.216	300	26,34	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	541.922.500	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	9	219.443.940	9	219.443.940	9	219.443.940	300	40,49	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	289.951.215	28	83.327.513	1	36.817.198	0	0	0	0	0	0	28	79.004.820	28	79.004.820	56	162.332.333	1.866,67	55,99	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	225.598.075	28	59.667.233	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	28	74.475.600	28	74.475.600	56	134.142.833	1.866,67	59,46	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	7.208.500	1	1.200.000	1	3.998.500	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	2	2.200.000	66,67	30,52	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	19.460.000	1	8.220.000	1	1.240.000	0	0	0	0	0	0	1	5.430.000	1	5.430.000	2	13.650.000	66,67	70,14	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.358.456.321	1	529.233.121	1	867.160.000	0	0	0	0	0	0	1	1.340.437.574	1	1.340.437.574	2	1.869.670.695	66,67	79,28	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**2.327.000.000**	**0**	**0**	**80**	**677.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**643.566.550**	**40**	**643.566.550**	**40**	**643.566.550**	**40**	**27,66**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	530.000.000	0	0	1	530.000.000	0	0	0	0	0	0	1	517.020.000	1	517.020.000	1	517.020.000	100	97,55	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	260.000.000	0	0	1	110.000.000	0	0	0	0	0	0	1	101.121.000	1	101.121.000	1	101.121.000	50	38,89	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1.537.000.000	0	0	6	37.000.000	0	0	0	0	0	0	2	25.425.550	2	25.425.550	2	25.425.550	28,57	1,65	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.661.963.000**	**30**	**673.419.416**	**30**	**943.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**962.072.942**	**30**	**962.072.942**	**60**	**1.635.492.358**	**60**	**61,44**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	38.104.000	1	3.986.000	1	10.200.000	0	0	0	0	0	0	1	2.760.000	1	2.760.000	2	6.746.000	66,67	17,7	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	719.859.000	1	156.433.416	1	205.000.000	0	0	0	0	0	0	1	272.512.942	1	272.512.942	2	428.946.358	66,67	59,59	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1.876.000.000	1	513.000.000	1	728.000.000	0	0	0	0	0	0	1	686.800.000	1	686.800.000	2	1.199.800.000	66,67	63,96	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**1.374.314.490**	**20,5**	**152.234.164**	**31,68**	**457.104.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,16**	**387.700.850**	**34,16**	**387.700.850**	**54,66**	**539.935.014**	**54,66**	**39,29**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	400.400.000	28	124.447.818	28	125.000.000	0	0	0	0	0	0	37	126.547.150	37	126.547.150	65	250.994.968	77,38	62,69	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	28.500.000	3	1.647.300	15	7.530.000	0	0	0	0	0	0	12	5.190.000	12	5.190.000	15	6.837.300	50	23,99	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	435.414.490	2	26.139.046	7	74.574.490	0	0	0	0	0	0	5	47.791.700	5	47.791.700	7	73.930.746	18,42	16,98	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	1	208.172.000	1	208.172.000	1	208.172.000	33,33	69,39	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**- Jumlah BLUD**	**Persen**	**100**	**881.675.000**	**33,33**	**160.728.816**	**33,33**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**160.728.816**	**33,33**	**18,23**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	881.675.000	1	160.728.816	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	160.728.816	33,33	18,23	Dinas Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**																								
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Jumlah Peta Konservasi Air tanah dalam daerah provinsi dan Jumlah Perda/Pergub terkait Zonasi Kawasan Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**488.015.084**	**231,53**	**254.141.000**	**97,14**	**183.701.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140,54**	**110.038.000**	**140,54**	**110.038.000**	**372,08**	**364.179.000**	**372,08**	**74,62**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**02**	**1**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**340.989.563**	**177,19**	**210.932.000**	**98,06**	**107.976.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,63**	**44.800.000**	**59,63**	**44.800.000**	**236,83**	**255.732.000**	**236,83**	**75**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	02	1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	2	157.010.646	83,1	105.524.000	1	30.033.000	0	0	0	0	0	0	30,71	20.865.000	30,71	20.865.000	113,81	126.389.000	5.690,50	80,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	101	183.978.917	99,41	105.408.000	100	77.943.000	0	0	0	0	0	0	30,71	23.935.000	30,71	23.935.000	130,12	129.343.000	128,83	70,3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	**1**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Tertetapkannya Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**147.025.521**	**3,030.00**	**43.209.000**	**50**	**75.725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,307.50**	**65.238.000**	**4,307.50**	**65.238.000**	**7,337.50**	**108.447.000**	**7,337.50**	**73,76**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	02	1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	147.025.521	60,6	43.209.000	1	75.725.000	0	0	0	0	0	0	86,15	65.238.000	86,15	65.238.000	146,75	108.447.000	7,337.50	73,76	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Jumlah Kontribusi Penerimaan Daerah Bidang ESDM**	**Persen**	**100**	**400.000.000**	**0**		**100**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**03**	**1**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**0**		**100**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	-	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**0**		**100**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,1**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,1	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,1**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	03	1,1	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,1**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,1**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,1**		**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,1	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penetapan Harga Patokan Batuan**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Bauran Energi Baru Terbarukan Terhadap Ketenagalistrikan**	**Persen**	**100**	**642.920.828**	**57,14**	**212.503.000**	**42,86**	**355.706.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,43**	**93.299.000**	**0**	**0**	**6,43**	**93.299.000**	**63,57**	**305.802.000**	**63,57**	**47,56**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**05**	**1**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Persen**	**100**	**642.920.828**	**57,14**	**212.503.000**	**42,86**	**355.706.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,43**	**93.299.000**	**0**	**0**	**6,43**	**93.299.000**	**63,57**	**305.802.000**	**63,57**	**47,56**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	05	1	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	2	119.465.064	1	0	1	108.185.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	50	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah laporan Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Laporan	2	61.809.154	1	0	1	40.744.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	50	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi dan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	461.646.610	2	212.503.000	1	206.776.360	0	0	0	0	0,45	93.299.000	0	0	0,45	93.299.000	2,45	305.802.000	81,67	66,24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang teraliri listrik**	**Persen**	**100**	**4.112.011.130**	**0**	**167.806.250**	**56,25**	**2.659.570.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,75**	**2.100.637.400**	**0**	**0**	**24,75**	**2.100.637.400**	**24,75**	**2.268.443.650**	**24,75**	**55,17**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**06**	**1**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**270.449.610**	**0**	**167.806.250**	**50**	**96.754.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**50.728.500**	**0**	**0**	**26**	**50.728.500**	**26**	**218.534.750**	**26**	**80,8**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	06	1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	270.449.610	0	167.806.250	1	96.754.360	0	0	0	0	0,52	50.728.500	0	0	0,52	50.728.500	0,52	218.534.750	26	80,8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**	**1,1**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	-	**Persen**	**100**	**81.131.360**	**0**		**100**	**81.131.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**68.948.400**	**0**	**0**	**85**	**68.948.400**	**85**	**68.948.400**	**85**	**84,98**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	06	1,1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	1	81.131.360	0	0	1	81.131.360	0	0	0	0	0,85	68.948.400	0	0	0,85	68.948.400	0,85	68.948.400	85	84,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**	**1,1**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	-	**Persen**	**100**	**3.760.430.160**	**0**		**53,85**	**2.481.684.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,92**	**1.980.960.500**	**0**	**0**	**19,92**	**1.980.960.500**	**19,92**	**1.980.960.500**	**19,92**	**52,68**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	06	1,1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	104.742.500	0	0	1	104.742.500	0	0	0	0	0,59	104.742.500	0	0	0,59	104.742.500	0,59	104.742.500	59	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1,1	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	4	83.454.860	0	0	4	83.454.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1,1	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	1	1.650.000.000	0	0	1	1.650.000.000	0	0	0	0	0,65	1.650.000.000	0	0	0,65	1.650.000.000	0,65	1.650.000.000	65	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1,1	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	7	1.922.232.800	0	0	1	643.487.000	0	0	0	0	1,35	226.218.000	0	0	1,35	226.218.000	1,35	226.218.000	19,29	11,77	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**49.354.099.302**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**414.783.183**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	16.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	11.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	57.570.436	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	329.712.747	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**8.447.497.190**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	8.321.082.440	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	126.414.750	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**84.697.800**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	42.348.900	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	42.348.900	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**260.879.300**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	109	70.620.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	190.259.300	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.355.214.251**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	461.116.810	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	77.923.120	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	16.621.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.804.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	62.964.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	673.785.321	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**37.487.723.500**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	79.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	212.850.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	37.195.673.500	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.014.364.078**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.600.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	441.982.884	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	565.781.194	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**288.940.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.400.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	13.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	203.137.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5.203.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																							
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah rekomendasi dan perizinan**	**Persen**	**100**	**284.000.000**	**0**		**43,33**	**284.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,17**	**34.380.000**	**14,17**	**34.380.000**	**14,17**	**34.380.000**	**14,17**	**12,11**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**02**	**1**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	-	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	02	1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	34	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**	**1**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	-	**Persen**	**100**	**250.000.000**	**0**		**50**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	02	1	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	34	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	34	250.000.000	0	0	17	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**	**1**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	-	**Persen**	**100**	**34.000.000**	**0**		**5,56**	**34.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,44**	**34.380.000**	**94,44**	**34.380.000**	**94,44**	**34.380.000**	**94,44**	**101,12**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	02	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	18	34.000.000	0	0	1	34.000.000	0	0	0	0	0	0	17	34.380.000	17	34.380.000	17	34.380.000	94,44	101,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Provinsi**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**42,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**03**	**1**		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**42,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	03	1	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	1	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	1	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Nilai Perdagangan Antar Pulau**	**Persen**	**100**	**342.619.000**	**19,54**	**185.162.000**	**51,15**	**150.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,31**	**2.880.549.000**	**29,31**	**2.880.549.000**	**48,85**	**3.065.711.000**	**48,85**	**894,79**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**04**	**1**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**3.500.000**	**0**		**100**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,44**	**34.380.000**	**94,44**	**34.380.000**	**94,44**	**34.380.000**	**94,44**	**982,29**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0	17	34.380.000	17	34.380.000	17	34.380.000	1,700.00	982,29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	**1**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**-**	**Persen**	**100**	**339.119.000**	**62,96**	**185.162.000**	**37,04**	**147.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,96**	**2.846.169.000**	**62,96**	**2.846.169.000**	**125,93**	**3.031.331.000**	**125,93**	**893,88**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	1	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	27	112.292.000	17	101.792.000	10	10.500.000	0	0	0	0	0	0	17	10.500.000	17	10.500.000	34	112.292.000	125,93	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	27	226.827.000	17	83.370.000	10	136.600.000	0	0	0	0	0	0	17	2.835.669.000	17	2.835.669.000	34	2.919.039.000	125,93	1,286.90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	**1**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilavah Kerianva**	**-**	**Persen**	**100**	**0**	**0**		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	1	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	34	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	34	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penoawasan Puouk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	34	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdaoanaan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor**	**Persen**	**100**	**843.850.680**	**62,5**	**120.994.000**	**37,5**	**575.878.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,13**	**0**	**62,5**	**541.887.660**	**65,63**	**541.887.660**	**128,13**	**662.881.660**	**128,13**	**78,55**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**05**	**1**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**843.850.680**	**62,5**	**120.994.000**	**37,5**	**575.878.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,13**	**0**	**62,5**	**541.887.660**	**65,63**	**541.887.660**	**128,13**	**662.881.660**	**128,13**	**78,55**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	05	1	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	328.539.000	2	0	1	224.600.000	0	0	0	0	0	0	1	201.337.660	1	201.337.660	3	201.337.660	100	61,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	2	293.820.000	1	59.999.000	1	233.820.000	0	0	0	0	0	0	1	228.820.000	1	228.820.000	2	288.819.000	100	98,3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	1	35.000.000	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	1	29.272.000	1	29.272.000	1	29.272.000	100	83,63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	25	186.491.680	17	60.995.000	8	82.458.000	0	0	0	0	0	0	17	82.458.000	17	82.458.000	34	143.453.000	136	76,92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi**	**Persen**	**100**	**1.461.331.585**	**78,99**	**237.398.665**	**21,01**	**1.016.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,49**	**523.248.800**	**0**	**0**	**18,49**	**523.248.800**	**97,48**	**760.647.465**	**97,48**	**52,05**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**Persen**	**100**	**115.212.000**	**34,48**	**40.513.000**	**65,52**	**47.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,62**	**47.400.000**	**0**	**0**	**58,62**	**47.400.000**	**93,1**	**87.913.000**	**93,1**	**76,31**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	06	1	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindunaan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masvarakat (LPKSM) vang Aktif	LPKSM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	27	115.212.000	10	40.513.000	17	47.400.000	0	0	0	0	17	47.400.000	0	0	17	47.400.000	27	87.913.000	100	76,31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**Persen**	**100**	**621.481.800**	**94,44**	**111.829.880**	**5,56**	**369.448.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,17**	**369.448.800**	**0**	**0**	**4,17**	**369.448.800**	**98,61**	**481.278.680**	**98,61**	**77,44**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	06	1	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	9	168.409.000	8	84.633.000	1	47.400.000	0	0	0	0	1	47.400.000	0	0	1	47.400.000	9	132.033.000	100	78,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	61	309.280.800	60	27.196.880	1	178.256.800	0	0	0	0	1	178.256.800	0	0	1	178.256.800	61	205.453.680	100	66,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	1	143.792.000	0	0	1	143.792.000	0	0	0	0	1	143.792.000	0	0	1	143.792.000	1	143.792.000	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**Persen**	**100**	**724.637.785**	**88,89**	**85.055.785**	**11,11**	**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,11**	**106.400.000**	**0**	**0**	**11,11**	**106.400.000**	**100**	**191.455.785**	**100**	**26,42**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	06	1	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	16	395.376.000	15	55.794.000	1	300.000.000	0	0	0	0	1	63.200.000	0	0	1	63.200.000	16	118.994.000	100	30,1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	2	329.261.785	1	29.261.785	1	300.000.000	0	0	0	0	1	43.200.000	0	0	1	43.200.000	2	72.461.785	100	22,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan porduk dalam negeri**	**Persen**	**100**	**1.465.000.000**	**21,43**	**82.500.000**	**35,71**	**1.300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**275.000.000**	**0**	**0**	**14,29**	**275.000.000**	**35,71**	**357.500.000**	**35,71**	**24,4**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**07**	**1**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**-**	**Persen**	**100**	**291.250.000**	**50**	**41.250.000**	**50**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**200.000.000**	**0**	**0**	**50**	**200.000.000**	**100**	**241.250.000**	**100**	**82,83**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	07	1	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provins	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Unit	2	291.250.000	1	41.250.000	1	250.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	2	241.250.000	100	82,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**	**1**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**-**	**Persen**	**100**	**291.250.000**	**66,67**	**41.250.000**	**33,33**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**75.000.000**	**0**	**0**	**33,33**	**75.000.000**	**100**	**116.250.000**	**100**	**39,91**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	30	07	1	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Unit	3	291.250.000	2	41.250.000	1	250.000.000	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	3	116.250.000	100	39,91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**	**1**		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**-**	**Persen**	**100**	**882.500.000**	**0**		**33,33**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	07	1	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Laporan	3	291.250.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	3	291.250.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	3	300.000.000	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																							
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah**	**Persen**	**100**	**7.621.530.716**	**13,41**	**511.062.000**	**86,59**	**7.050.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82,93**	**5.051.790.000**	**0**	**0**	**82,93**	**5.051.790.000**	**96,34**	**5.562.852.000**	**96,34**	**72,99**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**	**02**	**1**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**7.621.530.716**	**13,41**	**511.062.000**	**86,59**	**7.050.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82,93**	**5.051.790.000**	**0**	**0**	**82,93**	**5.051.790.000**	**96,34**	**5.562.852.000**	**96,34**	**72,99**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	02	1	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	24	429.114.000	7	45.320.000	17	350.000.000	0	0	0	0	17	39.500.000	0	0	17	39.500.000	24	84.820.000	100	19,77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	19	601.187.000	2	201.187.000	17	400.000.000	0	0	0	0	17	167.460.000	0	0	17	167.460.000	19	368.647.000	100	61,32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	17	5.000.000.000	0	0	17	5.000.000.000	0	0	0	0	17	4.490.000.000	0	0	17	4.490.000.000	17	4.490.000.000	100	89,8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	17	500.000.000	0	0	17	500.000.000	0	0	0	0	17	354.830.000	0	0	17	354.830.000	17	354.830.000	100	70,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	791.229.716	2	264.555.000	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	264.555.000	50	33,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait penerbit izin usaha industri**	**Persen**	**100**	**720.862.000**	**85,71**	**71.605.000**	**14,29**	**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**86.900.000**	**0**	**0**	**14,29**	**86.900.000**	**100**	**158.505.000**	**100**	**21,99**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**	**03**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**720.862.000**	**85,71**	**71.605.000**	**14,29**	**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,29**	**86.900.000**	**0**	**0**	**14,29**	**86.900.000**	**100**	**158.505.000**	**100**	**21,99**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	03	1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah	Dokumen	7	349.950.000	6	29.154.000	1	300.000.000	0	0	0	0	1	47.400.000	0	0	1	47.400.000	7	76.554.000	100	21,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	370.912.000	6	42.451.000	1	300.000.000	0	0	0	0	1	39.500.000	0	0	1	39.500.000	7	81.951.000	100	22,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah Pendataan pada sistem informasi Industri Nasional**	**Persen**	**100**	**1.246.596.720**	**90,91**	**98.298.360**	**9,09**	**1.050.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,91**	**98.298.360**	**90,91**	**7,89**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**	**04**	**1**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**-**	**Persen**	**100**	**1.246.596.720**	**90,91**	**98.298.360**	**9,09**	**1.050.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,91**	**98.298.360**	**90,91**	**7,89**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	04	1	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	16	498.298.360	15	98.298.360	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	98.298.360	93,75	19,73	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	250.000.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	16	498.298.360	15	0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	93,75	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**Persen**	**100**	**29.920.150.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**317.200.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	156.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	10.400.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	130.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**15.804.750.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	15.600.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	175.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	13.650.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**172.250.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	78.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	86.450.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**374.400.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	32.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	130.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	32.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundano-Undanoan	Orang	10	78.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	78.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**1.981.850.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	26.650.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	32.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	32.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	260.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	110.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	10.400.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	32.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	234.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.235.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**8.619.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.040.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	234.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20	195.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	260.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.500.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	195.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	195.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**1.089.400.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	13.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	455.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	130.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	491.400.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**1.561.300.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	338.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	260.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	19.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	20.800.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	715.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	104.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	104.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**																							

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8										9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
4	01	02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terbentuknya OPD dan tersedianya ABK, Anjab di setiap OPD	Persen	100	1.616.923.822	50,39	941.297.437	49,61	664.943.100	0	0	0	0	0	0	39,53	489.259.752	39,53	489.259.752	89,92	1.430.557.189	89,92	88,47	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terbentuknya OPD dan tersedianya ABK, Anjab di setiap OPD	Persen	100	597.332.039	62,28	392.703.958	37,72	249.232.100	0	0	0	0	0	0	32,34	286.737.244	32,34	286.737.244	94,61	679.441.202	94,61	113,75	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	49	199.215.837	44	176.377.189	5	83.167.000	0	0	0	0	0	0	18	81.352.200	18	81.352.200	62	257.729.389	126,53	129,37	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembaaaan Kabuoaten/Kota	Dokumen	22	199.041.447	12	109.607.769	10	83.040.100	0	0	0	0	0	0	18	79.940.244	18	79.940.244	30	189.548.013	136,36	95,23	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	96	199.074.755	48	106.719.000	48	83.025.000	0	0	0	0	0	0	18	125.444.800	18	125.444.800	66	232.163.800	68,75	116,62	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja	Persen	100	1.019.591.783	41,36	548.593.479	58,64	415.711.000	0	0	0	0	0	0	45	202.522.508	45	202.522.508	86,36	751.115.987	86,36	73,67	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	43	223.040.758	5	138.664.309	38	83.108.950	0	0	0	0	0	0	36	57.192.100	36	57.192.100	41	195.856.409	95,35	87,81	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	62	215.711.775	24	117.364.913	38	83.048.650	0	0	0	0	0	0	28	48.778.250	28	48.778.250	52	166.143.163	83,87	77,02	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	66	158.761.634	28	54.123.705	38	83.257.000	0	0	0	0	0	0	30	59.574.800	30	59.574.800	58	113.698.505	87,88	71,62	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	38	233.090.598	28	128.787.050	10	83.108.550	0	0	0	0	0	0	3	18.050.358	3	18.050.358	31	146.837.408	81,58	63	Sekretariat Daerah
4	01	02	1	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	11	188.987.018	6	109.653.502	5	83.187.850	0	0	0	0	0	0	2	18.927.000	2	18.927.000	8	128.580.502	72,73	68,04	Sekretariat Daerah
4	01	03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah yang baik	Persen	100	4.099.315.589	43,75	2.366.233.861	56,25	2.390.327.000	0	0	0	0	0	0	39,58	2.467.574.492	39,58	2.467.574.492	83,33	4.833.808.353	83,33	117,92	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya Tugas yang baik Pemerintahan	Persen	100	1.732.779.181	50	848.279.970	50	947.027.000	0	0	0	0	0	0	38,89	165.554.650	38,89	165.554.650	88,89	1.013.834.620	88,89	58,51	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	24	457.096.013	12	209.756.520	12	215.488.000	0	0	0	0	0	0	8	59.403.800	8	59.403.800	20	269.160.320	83,33	58,88	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	24	965.422.598	12	560.526.450	12	524.039.000	0	0	0	0	0	0	8	57.517.500	8	57.517.500	20	618.043.950	83,33	64,02	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	24	310.260.570	12	77.997.000	12	207.500.000	0	0	0	0	0	0	12	48.633.350	12	48.633.350	24	126.630.350	100	40,81	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Otonomi Daerah	Persen	100	1.442.036.408	50	1.217.953.891	50	818.800.000	0	0	0	0	0	0	33,33	2.214.839.642	33,33	2.214.839.642	83,33	3.432.793.533	83,33	238,05	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	24	372.164.678	12	842.090.150	12	202.900.000	0	0	0	0	0	0	8	1.981.440.235	8	1.981.440.235	20	2.823.530.385	83,33	758,68	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	24	355.146.281	12	128.102.700	12	173.800.000	0	0	0	0	0	0	8	65.493.307	8	65.493.307	20	193.596.007	83,33	54,51	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	24	714.725.449	12	247.761.041	12	442.100.000	0	0	0	0	0	0	8	167.906.100	8	167.906.100	20	415.667.141	83,33	58,16	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Kerja Sama Daerah	Persen	100	924.500.000	25	300.000.000	75	624.500.000	0	0	0	0	0	0	50	87.180.200	50	87.180.200	75	387.180.200	75	41,88	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	24	745.700.000	12	300.000.000	12	445.700.000	0	0	0	0	0	0	8	38.361.400	8	38.361.400	20	338.361.400	83,33	45,38	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	12	84.000.000	0	0	12	84.000.000	0	0	0	0	0	0	8	30.526.800	8	30.526.800	8	30.526.800	66,67	36,34	Sekretariat Daerah
4	01	03	1	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	12	94.800.000	0	0	12	94.800.000	0	0	0	0	0	0	8	18.292.000	8	18.292.000	8	18.292.000	66,67	19,3	Sekretariat Daerah
4	01	04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pembinaan Mental Spiritual dan Pecembangan Keseiahteraan Rakvat	Persen	100	438.087.015.204	50	403.983.627.251	50	24.374.375.740	0	0	0	0	0	0	40,48	37.873.986.248	40,48	37.873.986.248	90,48	441.857.613.499	90,48	100,86	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Mental dan Spiritual	Persen	100	24.595.082.987	50	18.663.836.149	50	17.433.674.360	0	0	0	0	0	0	33,33	26.311.392.148	33,33	26.311.392.148	83,33	44.975.228.297	83,33	182,86	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	24	15.004.628.450	12	6.467.431.000	12	11.830.128.450	0	0	0	0	0	0	8	12.757.607.601	8	12.757.607.601	20	19.225.038.601	83,33	128,13	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	24	9.590.454.537	12	12.196.405.149	12	5.603.545.910	0	0	0	0	0	0	8	13.553.784.547	8	13.553.784.547	20	25.750.189.696	83,33	268,5	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persen	100	412.640.503.237	50	385.112.779.252	50	6.395.773.380	0	0	0	0	0	0	33,33	10.855.806.440	33,33	10.855.806.440	83,33	395.968.585.692	83,33	95,96	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	24	407.932.700.000	12	383.906.616.152	12	2.340.000.000	0	0	0	0	0	0	8	6.598.097.100	8	6.598.097.100	20	390.504.713.252	83,33	95,73	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	24	4.555.099.237	12	1.151.461.600	12	3.978.729.380	0	0	0	0	0	0	8	4.181.774.351	8	4.181.774.351	20	5.333.235.951	83,33	117,08	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	24	152.704.000	12	54.701.500	12	77.044.000	0	0	0	0	0	0	8	75.934.989	8	75.934.989	20	130.636.489	83,33	85,55	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persen	100	851.428.980	50	207.011.850	50	544.928.000	0	0	0	0	0	0	58,33	706.787.660	58,33	706.787.660	108,33	913.799.510	108,33	107,33	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	24	552.662.980	12	103.199.050	12	398.202.000	0	0	0	0	0	0	8	422.894.902	8	422.894.902	20	526.093.952	83,33	95,19	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	24	298.766.000	12	103.812.800	12	146.726.000	0	0	0	0	0	0	8	219.388.826	8	219.388.826	20	323.201.626	83,33	108,18	Sekretariat Daerah
4	01	04	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	12	64.503.932	12	64.503.932	12	64.503.932	0	0	Sekretariat Daerah
4	01	05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Hukum	Persen	100	3.851.393.993	70,14	1.313.234.520	51,11	2.391.530.642	0	0	0	0	0	0	68,26	2.356.107.893	68,26	2.356.107.893	138,4	3.669.342.413	138,4	95,27	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Penyusunan Perundang-Undangan yang Terfasilitasi	Persen	100	1.589.487.822	70,3	812.384.520	50,96	750.842.292	0	0	0	0	0	0	67,89	723.279.543	67,89	723.279.543	138,18	1.535.664.063	138,18	96,61	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	115	777.720.555	101	504.377.100	60	269.725.000	0	0	0	0	0	0	66	269.725.000	66	269.725.000	167	774.102.100	145,22	99,53	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	1000	35.656.894	756	19.704.000	500	14.810.000	0	0	0	0	0	0	739	14.559.500	739	14.559.500	1495	34.263.500	149,5	96,09	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	1200	367.140.260	857	247.549.450	600	110.512.500	0	0	0	0	0	0	805	110.505.750	805	110.505.750	1662	358.055.200	138,5	97,53	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	550	408.970.113	300	40.753.970	300	355.794.792	0	0	0	0	0	0	335	328.489.293	335	328.489.293	635	369.243.263	115,45	90,29	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Terfasilitasi	Persen	100	2.261.906.171	61,54	500.850.000	59,62	1.640.688.350	0	0	0	0	0	0	88,46	1.632.828.350	88,46	1.632.828.350	150	2.133.678.350	150	94,33	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	2	1.549.970.871	2	393.080.000	1	1.041.253.050	0	0	0	0	0	0	1	1.037.203.050	1	1.037.203.050	3	1.430.283.050	150	92,28	Sekretariat Daerah
4	01	05	1	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	50	711.935.300	30	107.770.000	30	599.435.300	0	0	0	0	0	0	45	595.625.300	45	595.625.300	75	703.395.300	150	98,8	Sekretariat Daerah
4	01	06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pengelolaan Kebijakan Administrasi Perekonomian	Persen	100	3.137.992.371	12,77	668.680.820	87,23	2.318.039.057	0	0	0	0	0	0	87,23	2.153.385.691	87,23	2.153.385.691	100	2.822.066.511	100	89,93	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Persen	100	1.672.740.803	50	394.554.080	50	1.206.417.648	0	0	0	0	0	0	50	1.132.882.521	50	1.132.882.521	100	1.527.436.601	100	91,31	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	1.477.420.579	1	306.241.080	1	1.114.269.940	0	0	0	0	0	0	1	1.048.379.744	1	1.048.379.744	2	1.354.620.824	100	91,69	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	195.320.224	1	88.313.000	1	92.147.708	0	0	0	0	0	0	1	84.502.777	1	84.502.777	2	172.815.777	100	88,48	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan Sumber Dava Alam	Persen	100	600.443.020	50	145.054.500	50	409.893.020	0	0	0	0	0	0	50	365.675.420	50	365.675.420	100	510.729.920	100	85,06	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	183.255.000	1	85.361.500	1	78.800.000	0	0	0	0	0	0	1	76.032.000	1	76.032.000	2	161.393.500	100	88,07	Sekretariat Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8										9				10(6+9)		11(10/5*100)		12
4	01	06	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	262.833.020	1	20.955.000	1	235.993.020	0	0	0	0	0	0	1	206.992.420	1	206.992.420	2	227.947.420	100	86,73	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	2	154.355.000	1	38.738.000	1	95.100.000	0	0	0	0	0	0	1	82.651.000	1	82.651.000	2	121.389.000	100	78,64	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	**1**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Persen**	**100**	**864.808.548**	**2,7**	**129.072.240**	**97,3**	**701.728.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,3**	**654.827.750**	**97,3**	**654.827.750**	**100**	**783.899.990**	**100**	**90,64**	**Sekretariat Daerah**
4	01	06	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	163.080.159	1	129.072.240			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.072.240	100	79,15	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	12	107.301.460	0	0	12	107.301.460	0	0	0	0	0	0	12	99.817.460	12	99.817.460	12	99.817.460	100	93,03	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	12	248.662.924	0	0	12	248.662.924	0	0	0	0	0	0	12	234.664.785	12	234.664.785	12	234.664.785	100	94,37	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
4	01	06	1	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	12	345.764.005	0	0	12	345.764.005	0	0	0	0	0	0	12	320.345.505	12	320.345.505	12	320.345.505	100	92,65	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien**	**Persen**	**100**	**5.046.473.509**	**50**	**1.946.452.243**	**50**	**2.730.380.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,21**	**1.499.235.520**	**34,21**	**1.499.235.520**	**84,21**	**3.445.687.763**	**84,21**	**68,28**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**07**	**1**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**2.513.250.810**	**50**	**902.056.690**	**50**	**1.356.877.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,14**	**649.143.000**	**32,14**	**649.143.000**	**82,14**	**1.551.199.690**	**82,14**	**61,72**	**Sekretariat Daerah**
4	01	07	1	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	105.061.113	1	39.116.093	1	55.001.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39.116.093	50	37,23	Sekretariat Daerah
4	01	07	1	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	24	2.243.683.232	12	808.397.432	12	1.230.093.300	0	0	0	0	0	0	8	612.187.000	8	612.187.000	20	1.420.584.432	83,33	63,31	Sekretariat Daerah
4	01	07	1	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penpadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	164.506.465	1	54.543.165	1	71.783.300	0	0	0	0	0	0	1	36.956.000	1	36.956.000	2	91.499.165	100	55,62	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	**1**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Persen**	**100**	**1.825.039.129**	**50**	**725.411.063**	**50**	**1.022.088.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,24**	**648.281.900**	**38,24**	**648.281.900**	**88,24**	**1.373.692.963**	**88,24**	**75,27**	**Sekretariat Daerah**
4	01	07	1	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	24	1.522.241.217	12	643.184.788	12	945.239.600	0	0	0	0	0	0	8	586.211.900	8	586.211.900	20	1.229.396.688	83,33	80,76	Sekretariat Daerah
4	01	07	1	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	45.017.638	2	33.417.138	2	9.528.500	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	33.417.138	100	74,23	Sekretariat Daerah
4	01	07	1	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	6	257.780.274	3	48.809.137	3	67.320.000	0	0	0	0	0	0	3	62.070.000	3	62.070.000	6	110.879.137	100	43,01	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	**1**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**708.183.570**	**50**	**318.984.490**	**50**	**351.414.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,57**	**201.810.620**	**28,57**	**201.810.620**	**78,57**	**520.795.110**	**78,57**	**73,54**	**Sekretariat Daerah**
4	01	07	1	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	2	175.989.656	1	79.912.796	1	92.433.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	79.912.796	50	45,41	Sekretariat Daerah
4	01	07	1	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	6	485.903.410	3	229.054.490	3	235.907.420	0	0	0	0	0	0	2	192.810.620	2	192.810.620	5	421.865.110	83,33	86,82	Sekretariat Daerah
4	01	07	1	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	6	46.290.504	3	10.017.204	3	23.073.300	0	0	0	0	0	0	2	9.000.000	2	9.000.000	5	19.017.204	83,33	41,08	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Cakupan Pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Administrasi Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**4.959.833.711**	**48,91**	**2.098.196.686**	**50**	**2.740.303.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,43**	**1.231.530.996**	**30,43**	**1.231.530.996**	**79,35**	**3.329.727.682**	**79,35**	**67,13**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**08**	**1**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembanounan Daerah**	**Terlaksananya pengendalian administrasi oembanounan daerah**	**Persen**	**100**	**749.790.742**	**48,72**	**330.470.672**	**50**	**289.966.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,21**	**119.845.600**	**28,21**	**119.845.600**	**76,92**	**450.316.272**	**76,92**	**60,06**	**Sekretariat Daerah**
4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	34	227.045.410	17	66.814.700	17	141.346.000	0	0	0	0	0	0	10	62.497.600	10	62.497.600	27	129.312.300	79,41	56,95	Sekretariat Daerah
4	01	08	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	34	130.987.923	17	52.674.500	17	68.296.000	0	0	0	0	0	0	10	34.891.000	10	34.891.000	27	87.565.500	79,41	66,85	Sekretariat Daerah
4	01	08	1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	10	391.757.409	4	210.981.472	5	80.324.000	0	0	0	0	0	0	2	22.457.000	2	22.457.000	6	233.438.472	60	59,59	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	**1**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**4.210.042.969**	**50**	**1.767.726.014**	**50**	**2.450.337.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,86**	**1.111.685.396**	**42,86**	**1.111.685.396**	**92,86**	**2.879.411.410**	**92,86**	**68,39**	**Sekretariat Daerah**
4	01	08	1	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	6	2.707.479.933	3	1.144.463.309	3	1.697.247.135	0	0	0	0	0	0	3	948.611.433	3	948.611.433	6	2.093.074.742	100	77,31	Sekretariat Daerah
4	01	08	1	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	6	1.133.751.105	3	450.835.393	3	597.624.165	0	0	0	0	0	0	2	107.885.705	2	107.885.705	5	558.721.098	83,33	49,28	Sekretariat Daerah
4	01	08	1	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	368.811.931	1	172.427.312	1	155.466.400	0	0	0	0	0	0	1	55.188.258	1	55.188.258	2	227.615.570	100	61,72	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**324.273.597.358**	**48,54**	**147.139.056.938**	**52,32**	**163.934.759.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,3**	**81.987.258.084**	**34,3**	**81.987.258.084**	**82,85**	**229.126.315.022**	**82,85**	**70,66**	**Sekretariat Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**	**451.483.914**	**48,15**	**172.064.276**	**51,85**	**275.551.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**93.781.200**	**33,33**	**93.781.200**	**81,48**	**265.845.476**	**81,48**	**58,88**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	284.034.293	1	137.388.073	1	148.405.200	0	0	0	0	0	0	1	70.463.800	1	70.463.800	2	207.851.873	100	73,18	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	132.449.621	12	34.676.203	12	92.146.768	0	0	0	0	0	0	8	23.317.400	8	23.317.400	20	57.993.603	83,33	43,79	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perengkat Daerah**	**Persen**	**100**	**130.950.868.727**	**44,44**	**57.039.098.200**	**55,56**	**63.389.990.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,04**	**36.569.595.994**	**37,04**	**36.569.595.994**	**81,48**	**93.608.694.194**	**81,48**	**71,48**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	119.841.306.000	12	48.221.091.663	12	57.789.217.800	0	0	0	0	0	0	8	33.822.692.594	8	33.822.692.594	20	82.043.784.257	83,33	68,46	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	9.218.912.973	12	8.038.376.670	12	4.534.469.500	0	0	0	0	0	0	8	2.322.266.500	8	2.322.266.500	20	10.360.643.170	83,33	112,38	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.000.000	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	8	12.076.900	8	12.076.900	8	12.076.900	66,67	24,15	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	24	72.998.845	12	23.685.486	12	53.410.900	0	0	0	0	0	0	8	1.050.000	8	1.050.000	20	24.735.486	83,33	33,88	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	1.767.650.909	12	755.944.381	12	962.892.190	0	0	0	0	0	0	8	411.510.000	8	411.510.000	20	1.167.454.381	83,33	66,05	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**824.664.641**	**50**	**369.291.109**	**50**	**407.629.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**113.794.700**	**30**	**113.794.700**	**80**	**483.085.809**	**80**	**58,58**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	379.868.418	3	148.942.250	3	189.946.900	0	0	0	0	0	0	1	39.784.700	1	39.784.700	4	188.726.950	66,67	49,68	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	444.796.223	12	220.348.859	12	217.682.600	0	0	0	0	0	0	8	74.010.000	8	74.010.000	20	294.358.859	83,33	66,18	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.451.000.298**	**50**	**1.529.282.345**	**50**	**1.642.364.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,5**	**403.401.309**	**37,5**	**403.401.309**	**87,5**	**1.932.683.654**	**87,5**	**56**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	30.000.000	0	0	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	8	7.965.000	8	7.965.000	8	7.965.000	66,67	26,55	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	24	1.249.450.000	12	1.006.731.800	12	627.000.000	0	0	0	0	0	0	8	258.239.200	8	258.239.200	20	1.264.971.000	83,33	101,24	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	24	175.642.245	12	65.483.200	12	83.323.500	0	0	0	0	0	0	8	32.504.300	8	32.504.300	20	97.987.500	83,33	55,79	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	24.784.253	12	9.168.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9.168.000	100	36,99	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	1.971.123.800	12	447.899.345	12	902.040.800	0	0	0	0	0	0	12	104.692.809	12	104.692.809	24	552.592.154	100	28,03	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**49.367.991.378**	**50**	**23.457.470.148**	**50**	**29.392.542.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**20.800.029.842**	**33,33**	**20.800.029.842**	**83,33**	**44.257.499.990**	**83,33**	**89,65**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	312.761.309	12	185.426.700	12	182.369.500	0	0	0	0	0	0	8	91.252.450	8	91.252.450	20	276.679.150	83,33	88,46	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1.823.531.216	0	578.973.100	0	1.211.318.100	0	0	0	0	0	0	0	128.618.400	0	128.618.400	0	707.591.500	0	38,8	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	1.490.157.730	12	1.002.975.560	12	863.434.240	0	0	0	0	0	0	8	329.618.150	8	329.618.150	20	1.332.593.710	83,33	89,43	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	1.256.442.834	12	560.348.308	12	768.905.299	0	0	0	0	0	0	8	277.042.715	8	277.042.715	20	837.391.023	83,33	66,65	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	21.678.000	12	12.054.000	12	9.624.000	0	0	0	0	0	0	8	3.864.000	8	3.864.000	20	15.918.000	83,33	73,43	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	10.164.031.500	12	6.695.334.375	12	7.318.346.000	0	0	0	0	0	0	8	6.322.119.975	8	6.322.119.975	20	13.017.454.350	83,33	128,07	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	34.239.396.975	12	14.381.127.105	12	19.008.551.975	0	0	0	0	0	0	8	13.639.529.152	8	13.639.529.152	20	28.020.656.257	83,33	81,84	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	24	59.991.814	12	41.231.000	12	29.993.000	0	0	0	0	0	0	8	7.985.000	8	7.985.000	20	49.216.000	83,33	82,04	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang di adakan**	**Persen**	**100**	**60.792.666.978**	**50**	**20.521.598.865**	**50**	**27.855.248.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**7.369.773.754**	**33,33**	**7.369.773.754**	**83,33**	**27.891.372.619**	**83,33**	**45,88**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	4.708.000.000	12	1.886.367.250	12	2.380.400.000	0	0	0	0	0	0	8	1.729.000.000	8	1.729.000.000	20	3.615.367.250	83,33	76,79	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24	869.727.850	12	1.436.566.169	12	535.100.000	0	0	0	0	0	0	8	295.000.000	8	295.000.000	20	1.731.566.169	83,33	199,09	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	3.188.350.378	12	3.462.709.100	12	2.781.159.450	0	0	0	0	0	0	8	647.564.349	8	647.564.349	20	4.110.273.449	83,33	128,92	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	52.026.588.750	12	13.735.956.346	12	22.158.588.750	0	0	0	0	0	0	8	4.698.209.405	8	4.698.209.405	20	18.434.165.751	83,33	35,43	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**23.008.402.613**	**50**	**9.652.199.300**	**50**	**13.927.704.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**7.173.704.251**	**33,33**	**7.173.704.251**	**83,33**	**16.825.903.551**	**83,33**	**73,13**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	96.868.000	12	82.682.715	12	52.898.000	0	0	0	0	0	0	8	29.282.000	8	29.282.000	20	111.964.715	83,33	115,58	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	6.966.839.440	12	3.074.866.585	12	3.606.711.722	0	0	0	0	0	0	8	1.620.472.251	8	1.620.472.251	20	4.695.338.836	83,33	67,4	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.914.700.000	12	1.328.150.000	12	2.247.100.000	0	0	0	0	0	0	8	1.031.450.000	8	1.031.450.000	20	2.359.600.000	83,33	80,96	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	13.029.995.173	12	5.166.500.000	12	8.020.995.275	0	0	0	0	0	0	8	4.492.500.000	8	4.492.500.000	20	9.659.000.000	83,33	74,13	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang teroelihara**	**Persen**	**100**	**39.532.314.143**	**42,86**	**17.802.207.501**	**53,57**	**20.891.955.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,57**	**7.040.346.361**	**28,57**	**7.040.346.361**	**71,43**	**24.842.553.862**	**71,43**	**62,84**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	8.154.657.760	12	4.411.564.381	12	3.964.185.750	0	0	0	0	0	0	8	2.446.846.995	8	2.446.846.995	20	6.858.411.376	83,33	84,1	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	1.586.650.000	12	641.933.320	12	826.150.000	0	0	0	0	0	0	8	105.825.016	8	105.825.016	20	747.758.336	83,33	47,13	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	19.430.060.000	12	10.821.830.525	12	9.230.060.000	0	0	0	0	0	0	8	3.600.082.750	8	3.600.082.750	20	14.421.913.275	83,33	74,22	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3.516.380.570	12	1.926.879.275	12	3.516.380.570	0	0	0	0	0	0	8	887.591.600	8	887.591.600	20	2.814.470.875	166,67	80,04	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	3.489.386.493	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	12	3.355.179.320	0	0	12	3.355.179.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Adminitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persen**	**100**	**5.127.717.448**	**50**	**2.914.058.594**	**50**	**2.810.397.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**751.568.573**	**33,33**	**751.568.573**	**83,33**	**3.665.627.167**	**83,33**	**71,49**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	3.477.717.448	12	1.917.108.594	12	1.985.397.528	0	0	0	0	0	0	8	147.818.573	8	147.818.573	20	2.064.927.167	83,33	59,38	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	24	1.650.000.000	12	996.950.000	12	825.000.000	0	0	0	0	0	0	8	603.750.000	8	603.750.000	20	1.600.700.000	83,33	97,01	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.271.890.595**	**50**	**3.114.451.400**	**50**	**2.558.635.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**1.372.665.800**	**33,33**	**1.372.665.800**	**83,33**	**4.487.117.200**	**83,33**	**85,11**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	24	3.124.697.180	12	1.749.699.600	12	1.403.443.200	0	0	0	0	0	0	8	709.409.600	8	709.409.600	20	2.459.109.200	83,33	78,7	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	24	2.031.539.072	12	1.115.739.300	12	1.089.541.300	0	0	0	0	0	0	8	598.457.800	8	598.457.800	20	1.714.197.100	83,33	84,38	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	24	115.654.343	12	249.012.500	12	65.651.000	0	0	0	0	0	0	8	64.798.400	8	64.798.400	20	313.810.900	83,33	271,34	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Dokumen meteri dan komunikasi Pimpinan yang disiapkan**	**Persen**	**100**	**965.381.929**	**33,33**	**562.484.000**	**66,67**	**430.412.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,44**	**144.105.000**	**44,44**	**144.105.000**	**77,78**	**706.589.000**	**77,78**	**73,19**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	46.482.100	0	0	12	46.482.100	0	0	0	0	0	0	8	5.105.000	8	5.105.000	8	5.105.000	66,67	10,98	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	24	918.899.829	12	562.484.000	12	383.930.320	0	0	0	0	0	0	8	139.000.000	8	139.000.000	20	701.484.000	83,33	76,34	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan**	**Persen**	**100**	**4.529.214.694**	**68,42**	**10.004.851.200**	**63,16**	**352.326.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,11**	**154.491.300**	**42,11**	**154.491.300**	**110,53**	**10.159.342.500**	**110,53**	**224,31**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	2	956.878.448	2	548.364.500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	548.364.500	100	57,31	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	3.183.625.000	12	9.315.006.500	12	123.300.000	0	0	0	0	0	0	8	34.200.000	8	34.200.000	20	9.349.206.500	166,67	293,67	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	24	388.711.246	12	141.480.200	12	229.026.500	0	0	0	0	0	0	8	120.291.300	8	120.291.300	20	261.771.500	83,33	67,34	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**																								
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**	**Persen**	**100**	**95.540.023.335**	**36,88**	**27.733.698.720**	**49,46**	**54.316.929.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,46**	**49.887.668.735**	**49,46**	**49.887.668.735**	**86,33**	**77.621.367.455**	**86,33**	**81,24**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**02**	**1**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**-**	**Persen**	**100**	**24.565.133.671**	**50**	**3.350.950.735**	**40,91**	**14.500.048.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,91**	**12.624.268.730**	**40,91**	**12.624.268.730**	**90,91**	**15.975.219.465**	**90,91**	**65,03**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	11	4.136.678.064	4	957.106.212	5	2.379.975.540	0	0	0	0	0	0	5	2.204.460.089	5	2.204.460.089	9	3.161.566.301	81,82	76,43	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	17	19.044.817.076	10	2.353.344.523	7	11.173.009.000	0	0	0	0	0	0	7	9.545.870.141	7	9.545.870.141	17	11.899.214.664	100	62,48	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	14	1.328.638.531	8	40.500.000	6	947.064.412	0	0	0	0	0	0	6	873.938.500	6	873.938.500	14	914.438.500	100	68,83	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	2	55.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**-**	**Persen**	**100**	**3.960.431.000**	**35,71**	**662.790.500**	**50**	**2.824.431.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2.812.065.067**	**50**	**2.812.065.067**	**85,71**	**3.474.855.567**	**85,71**	**87,74**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	4	226.900.000	0	0	4	226.900.000	0	0	0	0	0	0	4	226.900.000	4	226.900.000	4	226.900.000	100	100	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	82.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	6	1.279.622.000	5	662.790.500	1	308.622.000	0	0	0	0	0	0	1	306.676.200	1	306.676.200	6	969.466.700	100	75,76	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	82.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	2	2.288.909.000	0	0	2	2.288.909.000	0	0	0	0	0	0	2	2.278.488.867	2	2.278.488.867	2	2.278.488.867	100	99,54	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**-**	**Persen**	**100**	**19.800.402.669**	**50**	**7.619.363.034**	**50**	**11.732.794.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**11.264.668.221**	**50**	**11.264.668.221**	**100**	**18.884.031.255**	**100**	**95,37**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24	3.415.768.000	12	1.066.611.901	12	1.937.532.000	0	0	0	0	0	0	12	1.882.463.447	12	1.882.463.447	24	2.949.075.348	100	86,34	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24	3.897.893.033	12	1.580.961.033	12	2.316.932.000	0	0	0	0	0	0	12	2.250.561.952	12	2.250.561.952	24	3.831.522.985	100	98,3	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24	4.813.373.406	12	1.817.841.159	12	2.995.532.247	0	0	0	0	0	0	12	2.979.523.078	12	2.979.523.078	24	4.797.364.237	100	99,67	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	24	4.872.353.999	12	1.664.533.999	12	3.207.820.000	0	0	0	0	0	0	12	3.139.637.369	12	3.139.637.369	24	4.804.171.368	100	98,6	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	24	1.900.361.231	12	1.108.875.442	12	770.460.000	0	0	0	0	0	0	12	630.232.075	12	630.232.075	24	1.739.107.517	100	91,51	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2	101.598.000	1	38.920.000	1	61.848.000	0	0	0	0	0	0	1	27.000.000	1	27.000.000	2	65.920.000	100	64,88	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	4	799.055.000	2	341.619.500	2	442.670.000	0	0	0	0	0	0	2	355.250.300	2	355.250.300	4	696.869.800	100	87,21	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**-**	**Persen**	**100**	**12.518.074.500**	**25,27**	**3.483.610.304**	**53,76**	**6.834.688.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,76**	**5.938.609.962**	**53,76**	**5.938.609.962**	**79,03**	**9.422.220.266**	**79,03**	**75,27**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	1.000.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	90	1.243.008.000	7	68.010.553	45	391.880.000	0	0	0	0	0	0	45	388.302.578	45	388.302.578	52	456.313.131	57,78	36,71	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	16	2.486.650.000	4	946.250.000	12	1.313.700.000	0	0	0	0	0	0	12	1.290.920.000	12	1.290.920.000	16	2.237.170.000	100	89,97	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	24	2.841.498.000	12	859.012.462	12	1.957.446.000	0	0	0	0	0	0	12	1.950.270.336	12	1.950.270.336	24	2.809.282.798	100	98,87	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	24	1.894.458.000	12	938.333.733	12	913.926.000	0	0	0	0	0	0	12	895.798.423	12	895.798.423	24	1.834.132.156	100	96,82	Sekretariat DPRD
4	02	02	1	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	24	1.873.648.000	12	672.003.556	12	1.078.924.000	0	0	0	0	0	0	12	991.751.245	12	991.751.245	24	1.663.754.801	100	88,8	Sekretariat DPRD

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
4	02	02	1	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	7	1.178.812.500	0	0	7	1.178.812.500	0	0	0	0	0	0	7	421.567.380	7	421.567.380	7	421.567.380	100	35,76	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,1**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-	**Persen**	**100**	**26.777.899.863**	**33,33**	**10.729.927.888**	**33,33**	**13.305.815.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**12.357.404.469**	**33,33**	**12.357.404.469**	**66,67**	**23.087.332.357**	**66,67**	**86,22**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,1	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	15	5.781.863.600	3	2.817.031.054	3	2.865.195.600	0	0	0	0	0	0	3	2.858.410.975	3	2.858.410.975	6	5.675.442.029	40	98,16	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	6	861.347.556	3	238.963.600	3	600.635.592	0	0	0	0	0	0	3	584.531.074	3	584.531.074	6	823.494.674	100	95,61	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	6	20.134.688.707	3	7.673.933.234	3	9.839.984.340	0	0	0	0	0	0	3	8.914.462.420	3	8.914.462.420	6	16.588.395.654	100	82,39	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,1**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	-	**Persen**	**100**	**1.522.332.000**	**60**	**313.939.391**	**35**	**981.203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**833.866.795**	**35**	**833.866.795**	**95**	**1.147.806.186**	**95**	**75,4**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,1	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	55.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	19	1.467.332.000	12	313.939.391	7	981.203.000	0	0	0	0	0	0	7	833.866.795	7	833.866.795	19	1.147.806.186	100	78,22	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,1**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	-	**Persen**	**100**	**660.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,1	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	5	110.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	2	550.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,1**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	-	**Persen**	**100**	**5.735.749.632**	**32,43**	**1.573.116.868**	**64,86**	**4.137.948.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,86**	**4.056.785.491**	**64,86**	**4.056.785.491**	**97,3**	**5.629.902.359**	**97,3**	**98,15**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,1	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	24	5.560.149.632	12	1.573.116.868	12	3.972.348.632	0	0	0	0	0	0	12	3.965.512.641	12	3.965.512.641	24	5.538.629.509	100	99,61	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	165.600.000	0	0	12	165.600.000	0	0	0	0	0	0	12	91.272.850	12	91.272.850	12	91.272.850	100	55,12	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,1	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**152.963.682.972**	**47,03**	**61.072.083.754**	**47,34**	**85.795.425.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,09**	**80.463.070.724**	**46,09**	**80.463.070.724**	**93,12**	**141.535.154.478**	**93,12**	**92,53**	**Sekretariat DPRD**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.654.067.700**	**38,1**	**512.026.650**	**47,62**	**2.079.433.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,62**	**1.871.173.132**	**47,62**	**1.871.173.132**	**85,71**	**2.383.199.782**	**85,71**	**89,79**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.057.950.100	3	453.155.650	3	1.574.290.100	0	0	0	0	0	0	3	1.385.349.082	3	1.385.349.082	6	1.838.504.732	100	89,34	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	61.532.500	3	14.971.000	5	44.558.500	0	0	0	0	0	0	5	43.131.250	5	43.131.250	8	58.102.250	100	94,43	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	504.585.100	2	43.900.000	2	460.585.100	0	0	0	0	0	0	2	442.692.800	2	442.692.800	4	486.592.800	100	96,43	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**27.438.041.279**	**48,08**	**12.420.990.255**	**48,08**	**14.588.996.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,08**	**14.193.540.568**	**48,08**	**14.193.540.568**	**96,15**	**26.614.530.823**	**96,15**	**97**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	25.668.615.679	14	12.073.038.005	14	13.198.421.379	0	0	0	0	0	0	14	12.818.407.749	14	12.818.407.749	28	24.891.445.754	100	96,97	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanoan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuanoan SKPD	Dokumen	24	145.500.000	12	85.500.000	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	12	60.000.000	12	60.000.000	24	145.500.000	100	100	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	5.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	24	9.240.000	12	4.990.000	12	4.250.000	0	0	0	0	0	0	12	4.250.000	12	4.250.000	24	9.240.000	100	100	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	1.586.485.600	12	257.462.250	12	1.326.325.600	0	0	0	0	0	0	12	1.310.882.819	12	1.310.882.819	24	1.568.345.069	100	98,86	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**707.080.300**	**46,15**	**216.000.000**	**46,15**	**281.040.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,15**	**278.306.100**	**46,15**	**278.306.100**	**92,31**	**494.306.100**	**92,31**	**69,91**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	200.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	502.080.300	12	216.000.000	12	281.040.300	0	0	0	0	0	0	12	278.306.100	12	278.306.100	24	494.306.100	100	98,45	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.046.578.000**	**54,22**	**356.418.800**	**45,04**	**565.308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,04**	**561.680.742**	**45,04**	**561.680.742**	**99,26**	**918.099.542**	**99,26**	**87,72**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	930	838.600.000	509	320.031.000	421	508.500.000	0	0	0	0	0	0	421	507.351.000	421	507.351.000	930	827.382.000	100	98,66	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11	137.978.000	5	36.387.800	6	56.808.000	0	0	0	0	0	0	6	54.329.742	6	54.329.742	11	90.717.542	100	65,75	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**6.984.614.567**	**50,39**	**2.791.462.458**	**49,61**	**4.136.407.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,61**	**4.103.931.990**	**49,61**	**4.103.931.990**	**100**	**6.895.394.448**	**100**	**98,72**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	51	371.331.388	35	143.764.138	16	227.567.250	0	0	0	0	0	0	16	226.507.267	16	226.507.267	51	370.271.405	100	99,71	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	648.322.400	3	314.522.400	3	333.800.000	0	0	0	0	0	0	3	331.489.500	3	331.489.500	6	646.011.900	100	99,64	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	139	860.377.295	55	378.265.416	84	471.850.800	0	0	0	0	0	0	84	468.077.510	84	468.077.510	139	846.342.926	100	98,37	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	438.450.400	8	225.294.000	6	211.850.400	0	0	0	0	0	0	6	208.044.150	6	208.044.150	14	433.338.150	100	98,83	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	92.952.000	3	88.406.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	88.406.000	100	95,11	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	1.494.040.000	12	548.677.750	4	904.830.000	0	0	0	0	0	0	4	887.196.201	4	887.196.201	16	1.435.873.951	100	96,11	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.904.141.084	12	1.092.532.754	12	1.811.508.627	0	0	0	0	0	0	12	1.808.257.362	12	1.808.257.362	24	2.900.790.116	100	99,88	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	175.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	0	0	1	174.360.000	1	174.360.000	1	174.360.000	100	99,63	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**16.060.322.723**	**43,3**	**2.996.562.000**	**56,7**	**11.906.656.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,7**	**10.292.411.608**	**56,7**	**10.292.411.608**	**100**	**13.288.973.608**	**100**	**82,74**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	4.190.060.000	0	0	7	4.190.060.000	0	0	0	0	0	0	7	3.591.880.000	7	3.591.880.000	7	3.591.880.000	100	85,72	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	56	2.613.572.526	19	773.082.000	37	1.749.330.000	0	0	0	0	0	0	37	1.179.215.460	37	1.179.215.460	56	1.952.297.460	100	74,7	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	4.317.055.060	5	1.137.350.500	5	2.129.900.000	0	0	0	0	0	0	5	2.104.583.050	5	2.104.583.050	10	3.241.933.550	100	75,1	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	4.939.635.137	18	1.086.129.500	6	3.837.366.200	0	0	0	0	0	0	6	3.416.733.098	6	3.416.733.098	24	4.502.862.598	100	91,16	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**5.581.094.488**	**49,52**	**1.263.670.971**	**50**	**4.244.111.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,95**	**3.645.209.877**	**46,95**	**3.645.209.877**	**96,47**	**4.908.880.848**	**96,47**	**87,96**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1000	11.000.000	495	5.935.000	500	5.000.000	0	0	0	0	0	0	468	4.680.000	468	4.680.000	963	10.615.000	96,3	96,5	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	2.456.094.488	12	825.735.971	12	1.557.111.344	0	0	0	0	0	0	12	1.047.029.877	12	1.047.029.877	24	1.872.765.848	100	76,25	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	3.114.000.000	12	432.000.000	12	2.682.000.000	0	0	0	0	0	0	12	2.593.500.000	12	2.593.500.000	24	3.025.500.000	100	97,16	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**22.904.704.075**	**21,03**	**9.273.470.313**	**43,08**	**12.156.765.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,08**	**11.227.552.459**	**43,08**	**11.227.552.459**	**64,1**	**20.501.022.772**	**64,1**	**89,51**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	3.655.021.390	7	1.547.119.613	5	2.007.685.000	0	0	0	0	0	0	5	1.903.980.776	5	1.903.980.776	12	3.451.100.389	100	94,42	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	600.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	27.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	497.130.000	4	226.928.900	30	246.200.000	0	0	0	0	0	0	30	244.951.200	30	244.951.200	34	471.880.100	100	94,92	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	7.484.542.088	12	3.255.075.300	5	3.941.289.776	0	0	0	0	0	0	5	3.660.274.781	5	3.660.274.781	17	6.915.350.081	100	92,4	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	883.229.000	3	342.000.000	3	480.309.000	0	0	0	0	0	0	3	479.180.100	3	479.180.100	6	821.180.100	100	92,97	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	56	9.757.281.597	15	3.902.346.500	41	5.481.281.597	0	0	0	0	0	0	41	4.939.165.602	41	4.939.165.602	56	8.841.512.102	100	90,61	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,2**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	-	**Persen**	**100**	**64.307.179.840**	**23,81**	**29.480.567.037**	**50**	**32.836.706.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,83**	**31.305.208.544**	**46,83**	**31.305.208.544**	**70,63**	**60.785.775.581**	**70,63**	**94,52**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,2	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	28	62.566.939.840	14	28.825.096.987	14	31.966.586.840	0	0	0	0	0	0	14	30.634.567.944	14	30.634.567.944	28	59.459.664.931	100	95,03	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,2	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	8	1.035.000.000	4	507.375.000	4	517.500.000	0	0	0	0	0	0	4	513.760.500	4	513.760.500	8	1.021.135.500	100	98,66	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,2	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	90	705.240.000	12	148.095.050	45	352.620.000	0	0	0	0	0	0	41	156.880.100	41	156.880.100	53	304.975.150	58,89	43,24	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,2**		**Layanan Administrasi DPRD**	-	**Persen**	**100**	**5.280.000.000**	**4,65**	**1.760.915.270**	**9,3**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,3**	**2.984.055.704**	**9,3**	**2.984.055.704**	**13,95**	**4.744.970.974**	**13,95**	**89,87**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,2	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	5	200.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,2	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	8	80.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,2	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	24	200.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,2	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	6	4.800.000.000	2	1.760.915.270	4	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	4	2.984.055.704	4	2.984.055.704	6	4.744.970.974	100	98,85	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
5	**01**				**PERENCANAAN**																								
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**	**5.875.448.830**	**50**	**2.790.113.318**	**50**	**2.725.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.875.857.081**	**0**	**0**	**50**	**1.875.857.081**	**100**	**4.665.970.399**	**100**	**79,41**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	**01**	**02**	**1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan selama 1 tahun**	**Persen**	**100**	**4.550.037.357**	**50**	**2.257.154.502**	**50**	**2.089.176.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.570.656.214**	**0**	**0**	**50**	**1.570.656.214**	**100**	**3.827.810.716**	**100**	**84,13**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	1	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	69.513.558	1	51.520.100	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	51.520.100	100	74,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	740.295.343	1	407.012.000	1	302.080.000	0	0	0	0	1	276.016.499	0	0	1	276.016.499	2	683.028.499	100	92,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	75.024.000	3	25.200.000	3	49.824.000	0	0	0	0	3	31.865.000	0	0	3	31.865.000	6	57.065.000	100	76,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2	1.200.127.462	1	516.142.980	1	648.912.000	0	0	0	0	1	617.134.581	0	0	1	617.134.581	2	1.133.277.561	100	94,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	2.465.076.994	5	1.257.279.422	5	1.088.360.250	0	0	0	0	5	645.640.134	0	0	5	645.640.134	10	1.902.919.556	100	77,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	**1**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Data dan Informasi Bidang Perencanaan**	**Persen**	**100**	**384.954.214**	**50**	**169.729.000**	**50**	**169.689.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**63.712.278**	**0**	**0**	**50**	**63.712.278**	**100**	**233.441.278**	**100**	**60,64**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	1	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	2	211.554.666	1	97.515.000	1	89.525.000	0	0	0	0	1	49.154.500	0	0	1	49.154.500	2	146.669.500	100	69,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	2	118.749.681	1	36.325.000	1	80.164.500	0	0	0	0	1	14.557.778	0	0	1	14.557.778	2	50.882.778	100	42,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	2	54.649.867	1	35.889.000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	35.889.000	100	65,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	**1**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**	**Persen**	**100**	**940.457.259**	**50**	**363.229.816**	**50**	**466.384.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**241.488.589**	**0**	**0**	**50**	**241.488.589**	**100**	**604.718.405**	**100**	**64,3**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	1	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	54.876.081	1	30.736.382	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	30.736.382	100	56,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	507.890.003	4	182.836.934	4	290.640.000	0	0	0	0	4	169.986.089	0	0	4	169.986.089	8	352.823.023	100	69,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	01	02	1	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	12	377.691.175	6	149.656.500	6	175.744.250	0	0	0	0	6	71.502.500	0	0	6	71.502.500	12	221.159.000	100	58,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**	**10.398.174.502**	**50**	**4.047.068.586**	**50**	**5.749.999.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2.997.401.499**	**0**	**0**	**50**	**2.997.401.499**	**100**	**7.044.470.085**	**100**	**67,75**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	**01**	**03**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terlaksananya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat**	**Persen**	**100**	**4.150.000.756**	**50**	**953.640.607**	**50**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.673.229.557**	**0**	**0**	**50**	**1.673.229.557**	**100**	**2.626.870.164**	**100**	**63,3**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	03	1	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	196.230.452	1	50.019.893	1	105.209.000	0	0	0	0	1	80.238.624	0	0	1	80.238.624	2	130.258.517	100	66,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3.953.770.304	1	903.620.714	1	2.894.791.000	0	0	0	0	1	1.592.990.933	0	0	1	1.592.990.933	2	2.496.611.647	100	63,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Persen**	**100**	**4.184.991.675**	**50**	**2.088.722.623**	**50**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**710.834.211**	**0**	**0**	**50**	**710.834.211**	**100**	**2.799.556.834**	**100**	**66,9**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	03	1	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	1.218.323.978	3	1.083.332.750	3	125.000.000	0	0	0	0	3	74.677.031	0	0	3	74.677.031	6	1.158.009.781	100	95,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	1.675.565.433	2	548.050.250	2	1.124.952.000	0	0	0	0	2	77.789.637	0	0	2	77.789.637	4	625.839.887	100	37,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	886.697.000	1	382.563.411	1	444.129.750	0	0	0	0	1	330.373.180	0	0	1	330.373.180	2	712.936.591	100	80,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	404.405.264	1	74.776.212	1	305.918.250	0	0	0	0	1	227.994.363	0	0	1	227.994.363	2	302.770.575	100	74,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**100**	**2.063.182.071**	**50**	**1.004.705.356**	**50**	**749.999.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**613.337.731**	**0**	**0**	**50**	**613.337.731**	**100**	**1.618.043.087**	**100**	**78,42**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	03	1	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	109.204.239	1	26.453.500	1	62.507.000	0	0	0	0	1	32.667.574	0	0	1	32.667.574	2	59.121.074	100	54,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktu	Perangkat Daerah	2	359.422.686	1	27.581.000	1	312.510.000	0	0	0	0	1	305.475.884	0	0	1	305.475.884	2	333.056.884	100	92,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	791.239.685	1	558.768.296	1	62.499.000	0	0	0	0	1	53.782.957	0	0	1	53.782.957	2	612.551.253	100	77,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	115.702.685	1	26.597.400	1	62.467.750	0	0	0	0	1	54.803.058	0	0	1	54.803.058	2	81.400.458	100	70,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	111.709.474	1	23.693.500	1	62.521.000	0	0	0	0	1	45.116.471	0	0	1	45.116.471	2	68.809.971	100	61,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	111.613.492	1	34.290.560	1	62.516.250	0	0	0	0	1	43.335.662	0	0	1	43.335.662	2	77.626.222	100	69,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	4	351.981.020	2	263.588.600	2	62.478.800	0	0	0	0	2	48.978.960	0	0	2	48.978.960	4	312.567.560	100	88,8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	112.308.790	2	43.732.500	2	62.500.100	0	0	0	0	2	29.177.165	0	0	2	29.177.165	4	72.909.665	100	64,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**30.521.729.957**	**49,92**	**13.595.381.922**	**50,08**	**15.697.978.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,08**	**11.133.289.307**	**0**	**0**	**50,08**	**11.133.289.307**	**100**	**24.728.671.229**	**100**	**81,02**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya sistem perencanaan, penganggaran da evaluasi dengan baik**	**Persen**	**100**	**32.485.751**	**57,14**	**16.786.975**	**42,86**	**12.462.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,86**	**7.373.500**	**0**	**0**	**42,86**	**7.373.500**	**100**	**24.160.475**	**100**	**74,37**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	22.223.165	3	12.113.325	2	7.224.000	0	0	0	0	2	3.400.000	0	0	2	3.400.000	5	15.513.325	100	69,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10.262.586	1	4.673.650	1	5.238.250	0	0	0	0	1	3.973.500	0	0	1	3.973.500	2	8.647.150	100	84,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik**	**Persen**	**100**	**20.696.540.718**	**50**	**9.518.957.698**	**50**	**10.695.881.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**7.667.126.746**	**0**	**0**	**50**	**7.667.126.746**	**100**	**17.186.084.444**	**100**	**83,04**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	20.484.094.800	14	9.423.060.698	14	10.583.228.600	0	0	0	0	14	7.586.366.746	0	0	14	7.586.366.746	28	17.009.427.444	100	83,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	9.998.918	1	4.550.000	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	4.550.000	100	45,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	202.447.000	1	91.347.000	1	107.653.000	0	0	0	0	1	80.760.000	0	0	1	80.760.000	2	172.107.000	100	85,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik**	**Persen**	**100**	**75.942.361**	**50**	**36.000.000**	**50**	**39.731.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**29.711.000**	**0**	**0**	**50**	**29.711.000**	**100**	**65.711.000**	**100**	**86,53**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	75.942.361	1	36.000.000	1	39.731.000	0	0	0	0	1	29.711.000	0	0	1	29.711.000	2	65.711.000	100	86,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik**	**Persen**	**100**	**347.693.000**	**50**	**142.973.000**	**50**	**157.951.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**78.240.000**	**0**	**0**	**50**	**78.240.000**	**100**	**221.213.000**	**100**	**63,62**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	280	162.000.000	140	83.700.000	140	78.000.000	0	0	0	0	140	77.800.000	0	0	140	77.800.000	280	161.500.000	100	99,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	185.693.000	20	59.273.000	20	79.951.000	0	0	0	0	20	440.000	0	0	20	440.000	40	59.713.000	100	32,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.185.803.196**	**50**	**1.845.643.388**	**50**	**2.032.883.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.517.499.831**	**0**	**0**	**50**	**1.517.499.831**	**100**	**3.363.143.219**	**100**	**80,35**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kant	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	59.394.966	12	35.620.400	12	22.616.250	0	0	0	0	12	6.058.600	0	0	12	6.058.600	24	41.679.000	100	70,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	321.438.480	12	140.497.650	12	137.201.300	0	0	0	0	12	59.230.662	0	0	12	59.230.662	24	199.728.312	100	62,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	396.874.750	1	171.968.250	1	179.649.750	0	0	0	0	1	169.869.550	0	0	1	169.869.550	2	341.837.800	100	86,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	32	27.048.000	16	12.000.000	16	12.288.000	0	0	0	0	16	5.900.000	0	0	16	5.900.000	32	17.900.000	100	66,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	347.110.000	1	145.051.000	1	191.520.000	0	0	0	0	1	72.203.000	0	0	1	72.203.000	2	217.254.000	100	62,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.284.117.000	12	1.071.020.946	12	1.053.985.000	0	0	0	0	12	920.562.107	0	0	12	920.562.107	24	1.991.583.053	100	87,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	749.820.000	1	269.485.142	1	435.623.000	0	0	0	0	1	283.675.912	0	0	1	283.675.912	2	553.161.054	100	73,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**1.798.333.030**	**42,86**	**866.367.800**	**57,14**	**742.360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,14**	**684.462.864**	**0**	**0**	**57,14**	**684.462.864**	**100**	**1.550.830.664**	**100**	**86,24**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	712.000.000	4	484.700.000	4	190.000.000	0	0	0	0	4	172.500.000	0	0	4	172.500.000	8	657.200.000	100	92,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Paket	2	114.250.000	0	0	2	114.250.000	0	0	0	0	2	113.587.000	0	0	2	113.587.000	2	113.587.000	100	99,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	323.147.530	1	274.380.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	274.380.000	100	84,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	249.560.500	0	0	1	249.560.500	0	0	0	0	1	249.411.000	0	0	1	249.411.000	1	249.411.000	100	99,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	399.375.000	1	107.287.800	1	188.550.000	0	0	0	0	1	148.964.864	0	0	1	148.964.864	2	256.252.664	100	64,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.561.084.489**	**50**	**437.321.628**	**50**	**1.055.874.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**825.116.883**	**0**	**0**	**50**	**825.116.883**	**100**	**1.262.438.511**	**100**	**80,87**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	6.800.000	1	3.512.000	1	2.900.000	0	0	0	0	1	2.086.000	0	0	1	2.086.000	2	5.598.000	100	82,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.130.706.100	12	258.309.628	12	818.703.050	0	0	0	0	12	666.859.883	0	0	12	666.859.883	24	925.169.511	100	81,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	423.578.389	12	175.500.000	12	234.271.000	0	0	0	0	12	156.171.000	0	0	12	156.171.000	24	331.671.000	100	78,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.823.847.412**	**50**	**731.331.433**	**50**	**960.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**323.758.483**	**0**	**0**	**50**	**323.758.483**	**100**	**1.055.089.916**	**100**	**57,85**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	576.935.412	30	216.353.433	30	288.500.000	0	0	0	0	30	169.334.319	0	0	30	169.334.319	60	385.687.752	100	66,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	103.150.000	1	28.736.000	1	46.100.000	0	0	0	0	1	11.856.500	0	0	1	11.856.500	2	40.592.500	100	39,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.049.832.000	1	438.630.000	1	599.935.000	0	0	0	0	1	133.257.664	0	0	1	133.257.664	2	571.887.664	100	54,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	93.930.000	1	47.612.000	1	26.300.000	0	0	0	0	1	9.310.000	0	0	1	9.310.000	2	56.922.000	100	60,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	02				**KEUANGAN**																							
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan keuangan**	**Persen**	**100**	**1.287.733.041.567**	**50,97**	**520.676.772.510**	**42,86**	**729.582.810.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,64**	**93.120.769.700**	**33,64**	**93.120.769.700**	**84,61**	**613.797.542.210**	**84,61**	**47,66**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	**02**	**02**	**1**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD**	**Persen**	**100**	**6.115.006.922**	**82,03**	**2.204.301.350**	**4,69**	**2.706.660.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,69**	**2.423.723.866**	**4,69**	**2.423.723.866**	**86,72**	**4.628.025.216**	**86,72**	**75,68**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	429.662.084	1	185.460.200	1	221.618.572	0	0	0	0	0	0	1	211.518.000	1	211.518.000	2	396.978.200	100	92,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	408.477.667	1	200.862.800	1	203.324.722	0	0	0	0	0	0	1	193.256.000	1	193.256.000	2	394.118.800	100	96,48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	5	121.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	5	121.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7						8						9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	02	02	1	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	145.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	3	145.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2.056.686.235	1	860.810.950	1	1.035.542.697	0	0	0	0	0	0	1	862.005.531	1	862.005.531	2	1.722.816.481	100	83,77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	1.851.428.639	1	743.040.400	1	934.057.434	0	0	0	0	0	0	1	888.479.935	1	888.479.935	2	1.631.520.335	100	88,12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	337.738.163	1	127.487.000	1	183.035.112	0	0	0	0	0	0	1	139.574.400	1	139.574.400	2	267.061.400	100	79,07	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	101	498.614.134	100	86.640.000	1	129.082.360	0	0	0	0	0	0	1	128.890.000	1	128.890.000	101	215.530.000	100	43,23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jamulah laporan dan dokumen evaluasi kabupaten/ kota**	**Persen**	**100**	**3.460.649.948**	**49,51**	**1.090.712.806**	**50**	**1.933.599.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.657.471.854**	**50**	**1.657.471.854**	**99,51**	**2.748.184.660**	**99,51**	**79,41**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	34	492.674.848	17	213.414.200	17	277.250.885	0	0	0	0	0	0	17	254.880.999	17	254.880.999	34	468.295.199	100	95,05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	493.255.616	17	203.562.400	17	278.093.571	0	0	0	0	0	0	17	257.635.156	17	257.635.156	34	461.197.556	100	93,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	394.258.089	17	152.644.911	17	240.749.078	0	0	0	0	0	0	17	238.111.101	17	238.111.101	34	390.756.012	100	99,11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	34	556.756.700	17	145.700.617	17	277.341.060	0	0	0	0	0	0	17	209.155.610	17	209.155.610	34	354.856.227	100	63,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1	190.347.791	0	0	1	190.347.791	0	0	0	0	0	0	1	145.145.760	1	145.145.760	1	145.145.760	100	76,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	34	952.182.770	17	289.091.466	17	449.835.228	0	0	0	0	0	0	17	411.671.228	17	411.671.228	34	700.762.694	100	73,6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	34	381.174.134	17	86.299.212	17	219.982.000	0	0	0	0	0	0	17	140.872.000	17	140.872.000	34	227.171.212	100	59,6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah dokumen pengelolaan kas daerah**	**Persen**	**100**	**5.107.129.579**	**30,93**	**1.062.779.500**	**36,08**	**3.238.151.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,08**	**2.773.363.141**	**36,08**	**2.773.363.141**	**67,01**	**3.836.142.641**	**67,01**	**75,11**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	1.418.125.308	0	0	2	1.418.125.308	0	0	0	0	0	0	2	1.266.123.341	2	1.266.123.341	2	1.266.123.341	100	89,28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2	253.663.610	0	0	2	253.663.610	0	0	0	0	0	0	2	148.441.000	2	148.441.000	2	148.441.000	100	58,52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	34	716.668.220	17	244.846.000	17	395.466.062	0	0	0	0	0	0	17	324.341.800	17	324.341.800	34	569.187.800	100	79,42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	363.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2	1.787.453.341	1	797.722.000	1	976.726.674	0	0	0	0	0	0	1	922.167.000	1	922.167.000	2	1.719.889.000	100	96,22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	24	88.802.389	12	20.211.500	12	44.753.365	0	0	0	0	0	0	12	34.171.000	12	34.171.000	24	54.382.500	100	61,24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	149.416.711	0	0	1	149.416.711	0	0	0	0	0	0	1	78.119.000	1	78.119.000	1	78.119.000	100	52,28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	30	330.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan daerah**	**Persen**	**100**	**3.683.756.068**	**36,54**	**1.384.093.545**	**40,38**	**1.722.474.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,38**	**1.426.425.094**	**40,38**	**1.426.425.094**	**76,92**	**2.810.518.639**	**76,92**	**76,29**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	24	38.816.925	12	13.296.000	12	24.992.204	0	0	0	0	0	0	12	6.641.400	12	6.641.400	24	19.937.400	100	51,36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	4	365.186.650	2	180.073.200	2	183.511.497	0	0	0	0	0	0	2	183.497.400	2	183.497.400	4	363.570.600	100	99,56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	429.727.513	1	216.801.200	1	212.268.871	0	0	0	0	0	0	1	211.812.800	1	211.812.800	2	428.614.000	100	99,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	6	1.505.324.930	3	743.058.150	3	749.890.333	0	0	0	0	0	0	3	715.069.534	3	715.069.534	6	1.458.127.684	100	96,86	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	363.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8										9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	02	02	1	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	134.930.000	0	0	1	134.930.000	0	0	0	0	0	0	1	24.970.000	1	24.970.000	1	24.970.000	100	18,51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	140.111.027	0	0	1	140.111.027	0	0	0	0	0	0	1	100.776.000	1	100.776.000	1	100.776.000	100	71,93	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	2	585.659.023	1	230.864.995	1	276.771.000	0	0	0	0	0	0	1	183.657.960	1	183.657.960	2	414.522.955	100	70,78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	10	121.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1,1**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persen**	**100**	**1.269.366.499.050**	**49,34**	**514.934.885.309**	**49,83**	**719.981.922.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,22**	**84.839.785.745**	**33,22**	**84.839.785.745**	**82,56**	**599.774.671.054**	**82,56**	**47,25**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1,1	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,1	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,1	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	200	179.486.322.982	100	40.798.919.502	100	127.608.250.000	0	0	0	0	0	0	100	84.783.253.652	100	84.783.253.652	200	125.582.173.154	100	69,97	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,1	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	200	20.903.019.527	100	238.208.325	100	13.472.970.637	0	0	0	0	0	0	100	56.532.093	100	56.532.093	200	294.740.418	100	1,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,1	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	200	1.068.977.156.541	97	473.897.757.482	100	578.900.702.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	473.897.757.482	48,5	44,33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Jumlah dokumen dan laporan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**9.642.279.481**	**147,3**	**3.201.096.323**	**31,08**	**4.548.378.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,32**	**2.301.249.420**	**24,32**	**2.301.249.420**	**171,62**	**5.502.345.743**	**171,62**	**57,06**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	**02**	**03**	**1**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah dokumen dan laporan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**9.642.279.481**	**147,3**	**3.201.096.323**	**31,08**	**4.548.378.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,32**	**2.301.249.420**	**24,32**	**2.301.249.420**	**171,62**	**5.502.345.743**	**171,62**	**57,06**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	03	1	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	524.489.730	1	81.892.000	1	442.595.000	0	0	0	0	0	0	1	418.370.450	1	418.370.450	2	500.262.450	100	95,38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	32.750.000	0	0	1	32.750.000	0	0	0	0	0	0	1	32.750.000	1	32.750.000	1	32.750.000	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	522.653.800	0	0	1	522.653.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	24	1.918.545.703	100	718.546.100	12	1.197.654.500	0	0	0	0	0	0	12	1.179.511.700	12	1.179.511.700	112	1.898.057.800	466,67	98,93	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	4.957.336.779	1	2.018.717.755	1	1.705.954.500	0	0	0	0	0	0	1	250.231.240	1	250.231.240	2	2.268.948.995	100	45,77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	8	547.178.100	4	283.060.276	4	219.161.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	283.060.276	50	51,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	626.810.894	1	51.237.192	1	292.739.800	0	0	0	0	0	0	1	285.599.030	1	285.599.030	2	336.836.222	100	53,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	4	182.514.475	2	47.643.000	2	134.870.000	0	0	0	0	0	0	2	134.787.000	2	134.787.000	4	182.430.000	100	99,95	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	30	330.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**233.224.088.000**	**50,02**	**97.165.917.250**	**49,63**	**120.828.225.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,41**	**92.380.671.640**	**27,41**	**92.380.671.640**	**77,43**	**189.546.588.890**	**77,43**	**81,27**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**208.002.000**	**28,57**	**19.952.000**	**57,14**	**175.176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,43**	**179.922.500**	**71,43**	**179.922.500**	**100**	**199.874.500**	**100**	**96,09**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	29.860.000	1	14.960.000	1	14.900.000	0	0	0	0	0	0	1	14.900.000	1	14.900.000	2	29.860.000	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12.874.000	0	0			0	0	0	0	0	0	1	12.840.750	1	12.840.750	1	12.840.750	100	99,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.874.000	0	0	1	12.874.000	0	0	0	0	0	0	1	10.643.750	1	10.643.750	1	10.643.750	100	82,68	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	9.954.000	1	4.992.000	1	4.962.000	0	0	0	0	0	0	1	4.962.000	1	4.962.000	2	9.954.000	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	142.440.000	0	0	1	142.440.000	0	0	0	0	0	0	1	136.576.000	1	136.576.000	1	136.576.000	100	95,88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**216.492.955.269**	**45,45**	**91.386.660.140**	**48,48**	**111.306.516.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,48**	**85.475.299.731**	**48,48**	**85.475.299.731**	**93,94**	**176.861.959.871**	**93,94**	**81,69**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	215.588.945.269	12	91.108.060.140	12	110.901.106.887	0	0	0	0	0	0	12	85.069.889.731	12	85.069.889.731	24	176.177.949.871	100	81,72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	110.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	110.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	40	684.010.000	18	278.600.000	20	405.410.000	0	0	0	0	0	0	20	405.410.000	20	405.410.000	38	684.010.000	95	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Persen**	**100**	**116.820.000**	**50**	**59.160.000**	**50**	**56.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**56.160.000**	**50**	**56.160.000**	**100**	**115.320.000**	**100**	**98,72**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	116.820.000	12	59.160.000	12	56.160.000	0	0	0	0	0	0	12	56.160.000	12	56.160.000	24	115.320.000	100	98,72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Lamporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.121.947.368**	**60**	**776.220.000**	**4,71**	**944.751.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,71**	**396.554.832**	**4,71**	**396.554.832**	**64,71**	**1.172.774.832**	**64,71**	**55,27**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	442.000.000	2	196.020.000	2	244.000.000	0	0	0	0	0	0	2	231.000.000	2	231.000.000	4	427.020.000	100	96,61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	65.689.035	0	0	1	65.689.035	0	0	0	0	0	0	1	62.268.800	1	62.268.800	1	62.268.800	100	94,79	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	330.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9				10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	1.284.258.333	49	580.200.000	1	635.062.090	0	0	0	0	0	0	1	103.286.032	1	103.286.032	50	683.486.032	100	53,22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7.864.986.553**	**50**	**2.506.310.315**	**50**	**4.988.824.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,23**	**3.646.282.652**	**27,23**	**3.646.282.652**	**77,22**	**6.152.592.967**	**77,22**	**78,23**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	46.413.294	12	17.039.750	12	28.206.647	0	0	0	0	0	0	12	28.162.000	12	28.162.000	24	45.201.750	100	97,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	1.246.055.975	12	589.876.600	12	627.910.258	0	0	0	0	0	0	12	522.571.300	12	522.571.300	24	1.112.447.900	100	89,28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	624.145.000	12	229.718.350	12	358.170.000	0	0	0	0	0	0	12	187.523.700	12	187.523.700	24	417.242.050	100	66,85	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10080	646.432.400	5040	196.120.000	5040	333.600.000	0	0	0	0	0	0	2671	176.655.000	2671	176.655.000	7711	372.775.000	76,5	57,67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	662.000.000	12	253.722.750	12	310.600.000	0	0	0	0	0	0	12	126.468.400	12	126.468.400	24	380.191.150	100	57,43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	3.291.658.840	12	904.169.125	12	2.297.750.000	0	0	0	0	0	0	12	1.753.614.642	12	1.753.614.642	24	2.657.783.767	100	80,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200	883.862.044	100	315.663.740	100	568.168.760	0	0	0	0	0	0	100	519.505.410	100	519.505.410	200	835.169.150	100	94,49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	464.419.000	0	0	1	464.419.000	0	0	0	0	0	0	1	331.782.200	1	331.782.200	1	331.782.200	100	71,44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**2.964.949.060**	**50**	**1.347.360.000**	**20**	**1.320.048.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**1.101.169.500**	**20**	**1.101.169.500**	**70**	**2.448.529.500**	**70**	**82,58**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	80.000.000	2	77.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	77.000.000	100	96,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	220.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2.091.097.860	1	794.327.000	1	1.270.398.200	0	0	0	0	0	0	1	1.059.707.000	1	1.059.707.000	2	1.854.034.000	100	88,66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	188.000.000	1	179.900.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	179.900.000	100	95,69	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	336.201.200	1	296.133.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	296.133.000	100	88,08	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49.650.000	0	0	1	49.650.000	0	0	0	0	0	0	1	41.462.500	1	41.462.500	1	41.462.500	100	83,51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**1.431.192.800**	**50**	**392.882.100**	**50**	**844.816.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**743.963.961**	**33,33**	**743.963.961**	**83,33**	**1.136.846.061**	**83,33**	**79,43**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	42.312.000	12	8.215.500	12	15.656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8.215.500	50	19,42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	480.490.800	12	37.326.600	12	296.020.800	0	0	0	0	0	0	12	250.491.037	12	250.491.037	24	287.817.637	100	59,9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	908.390.000	12	347.340.000	12	533.140.000	0	0	0	0	0	0	12	493.472.924	12	493.472.924	24	840.812.924	100	92,56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**2.023.234.950**	**48,19**	**677.372.695**	**51,81**	**1.191.931.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,17**	**781.318.464**	**42,17**	**781.318.464**	**90,36**	**1.458.691.159**	**90,36**	**72,1**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	41	996.805.800	12	366.443.020	29	592.345.500	0	0	0	0	0	0	22	453.537.964	22	453.537.964	34	819.980.984	82,93	82,26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	19.821.750	12	19.290.675			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19.290.675	100	97,32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	157.120.000	12	11.790.000	12	71.000.000	0	0	0	0	0	0	12	39.878.000	12	39.878.000	24	51.668.000	100	32,88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	454.055.000	3	246.900.000	1	199.955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	246.900.000	75	54,38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	395.432.400	1	32.949.000	1	328.631.200	0	0	0	0	0	0	1	287.902.500	1	287.902.500	2	320.851.500	100	81,14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
5	**02**				**KEUANGAN**																								
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentasi Peningkatan PAD**	**Persen**	**100**	**5.309.614.194**	**78,52**	**1.208.176.680**	**21,48**	**3.951.378.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,48**	**3.452.610.700**	**21,48**	**3.452.610.700**	**100**	**4.660.787.380**	**100**	**87,78**	**Badan Pendapatan Daerah**
5	**02**	**04**	**1**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persen**	**100**	**5.309.614.194**	**78,52**	**1.208.176.680**	**21,48**	**3.951.378.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,48**	**3.452.610.700**	**21,48**	**3.452.610.700**	**100**	**4.660.787.380**	**100**	**87,78**	**Badan Pendapatan Daerah**
5	02	04	1	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	5	233.172.082	0	0	5	233.172.082	0	0	0	0	0	0	5	182.867.000	5	182.867.000	5	182.867.000	100	78,43	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Paiak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	302	431.076.000	300	3.850.000	2	401.076.000	0	0	0	0	0	0	2	244.045.000	2	244.045.000	302	247.895.000	100	57,51	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	04	Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasaran a	13	1.309.000.000	0	0	13	1.309.000.000	0	0	0	0	0	0	13	1.264.073.000	13	1.264.073.000	13	1.264.073.000	100	96,57	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	89.560.000	0	0	12	89.560.000	0	0	0	0	0	0	12	53.533.000	12	53.533.000	12	53.533.000	100	59,77	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13	126.250.000	0	0	13	126.250.000	0	0	0	0	0	0	13	108.948.200	13	108.948.200	13	108.948.200	100	86,3	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapa n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	24	1.516.963.115	12	700.797.024	12	816.000.000	0	0	0	0	0	0	12	700.656.000	12	700.656.000	24	1.401.453.024	100	92,39	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	21	165.884.199	4	33.760.000	17	120.500.000	0	0	0	0	0	0	17	107.990.500	17	107.990.500	21	141.750.500	100	85,45	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	10	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	24	399.372.798	12	45.616.000	12	243.724.000	0	0	0	0	0	0	12	187.062.000	12	187.062.000	24	232.678.000	100	58,26	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Perset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Dokumen LHP	5	1.038.336.000	1	424.153.656	4	612.096.000	0	0	0	0	0	0	4	603.436.000	4	603.436.000	5	1.027.589.656	100	98,97	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	02	04	1	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**134.680.114.832**	**21,63**	**61.018.294.556**	**62,78**	**68.507.126.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,49**	**66.269.318.012**	**62,49**	**66.269.318.012**	**84,12**	**127.287.612.568**	**84,12**	**94,51**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**314.386.141**	**46,67**	**91.911.250**	**46,67**	**191.961.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,67**	**187.197.800**	**46,67**	**187.197.800**	**93,33**	**279.109.050**	**93,33**	**88,78**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	156.617.014	2	45.741.750	2	100.653.200	0	0	0	0	0	0	2	99.507.200	2	99.507.200	4	145.248.950	100	92,74	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.328.452	1	4.384.000	1	6.390.000	0	0	0	0	0	0	1	6.054.000	1	6.054.000	2	10.438.000	100	84,67	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	11.380.413	1	4.120.000	1	5.445.000	0	0	0	0	0	0	1	4.975.000	1	4.975.000	2	9.095.000	66,67	79,92	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	11.964.079	1	4.425.000	1	5.970.000	0	0	0	0	0	0	1	4.620.000	1	4.620.000	2	9.045.000	66,67	75,6	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	122.096.183	2	33.240.500	2	73.503.600	0	0	0	0	0	0	2	72.041.600	2	72.041.600	4	105.282.100	133,33	86,23	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**101.416.450.304**	**9,41**	**45.794.101.264**	**90,59**	**52.856.830.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,51**	**51.335.098.415**	**86,51**	**51.335.098.415**	**95,93**	**97.129.199.679**	**95,93**	**95,77**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	342	99.747.076.265	12	45.091.093.264	330	51.939.053.940	0	0	0	0	0	0	314	50.423.544.815	314	50.423.544.815	326	95.514.638.079	95,32	95,76	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	1.514.160.000	12	694.560.000	12	797.280.000	0	0	0	0	0	0	12	794.530.000	12	794.530.000	24	1.489.090.000	100	98,34	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	84.975.000	0	0	1	84.975.000	0	0	0	0	0	0	1	81.502.000	1	81.502.000	1	81.502.000	100	95,91	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	10.239.039	1	4.448.000	1	5.521.600	0	0	0	0	0	0	1	5.521.600	1	5.521.600	2	9.969.600	100	97,37	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	60.000.000	12	4.000.000	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	12	30.000.000	12	30.000.000	24	34.000.000	100	56,67	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**129.950.000**	**0**	**0**	**100**	**129.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**128.568.000**	**100**	**128.568.000**	**100**	**128.568.000**	**100**	**98,94**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	129.950.000	0	0	1	129.950.000	0	0	0	0	0	0	1	128.568.000	1	128.568.000	1	128.568.000	100	98,94	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan PAD diluar pajak**	**Persen**	**100**	**193.548.020**	**96,15**	**18.042.000**	**3,85**	**167.581.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,81**	**165.783.000**	**4,81**	**165.783.000**	**100,96**	**183.825.000**	**100,96**	**94,98**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	141.890.000	0	0	1	141.890.000	0	0	0	0	0	0	1	140.092.000	1	140.092.000	1	140.092.000	100	98,73	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	103	51.658.020	100	18.042.000	3	25.691.000	0	0	0	0	0	0	3	25.691.000	3	25.691.000	103	43.733.000	100	84,66	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM**	**Persen**	**100**	**101.800.000**	**820**	**0**	**100**	**101.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100.652.000**	**100**	**100.652.000**	**920**	**100.652.000**	**920**	**98,87**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	50	101.800.000	0	0	50	101.800.000	0	0	0	0	0	0	50	100.652.000	50	100.652.000	50	100.652.000	100	98,87	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran**	**Persen**	**100**	**7.652.452.844**	**28,39**	**3.583.087.047**	**71,61**	**3.888.291.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,61**	**3.791.048.213**	**71,61**	**3.791.048.213**	**100**	**7.374.135.260**	**100**	**96,36**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	212	250.344.100	200	137.087.000	12	80.184.000	0	0	0	0	0	0	12	80.123.250	12	80.123.250	212	217.210.250	100	86,76	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1000	1.640.794.791	500	947.050.001	500	686.491.500	0	0	0	0	0	0	500	686.159.290	500	686.159.290	1000	1.633.209.291	100	99,54	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	62	682.109.953	40	259.291.094	22	422.312.203	0	0	0	0	0	0	22	395.164.365	22	395.164.365	62	654.455.459	100	95,95	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1810	20.700.000	10	9.560.000	1800	10.800.000	0	0	0	0	0	0	1800	9.900.000	1800	9.900.000	1810	19.460.000	100	94,01	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	1.700.004.000	1	962.225.000	1	700.004.000	0	0	0	0	0	0	1	644.577.500	1	644.577.500	2	1.606.802.500	100	94,52	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30	747.800.000	12	305.648.952	18	419.000.000	0	0	0	0	0	0	18	407.084.000	18	407.084.000	30	712.732.952	100	95,31	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1566	2.610.700.000	566	962.225.000	1000	1.569.500.000	0	0	0	0	0	0	1000	1.568.039.808	1000	1.568.039.808	1566	2.530.264.808	100	96,92	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Persen**	**100**	**14.016.482.143**	**14,86**	**6.932.858.876**	**85,14**	**5.669.479.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,14**	**5.283.695.003**	**85,14**	**5.283.695.003**	**100**	**12.216.553.879**	**100**	**87,16**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	1.947.600.000	0	0	20	1.947.600.000	0	0	0	0	0	0	20	1.940.692.000	20	1.940.692.000	20	1.940.692.000	100	99,65	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	13	2.426.617.525	10	1.265.348.748	3	305.695.525	0	0	0	0	0	0	3	305.012.100	3	305.012.100	13	1.570.360.848	100	64,71	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	108	4.990.726.280	10	3.587.424.980	98	1.001.400.000	0	0	0	0	0	0	98	994.272.000	98	994.272.000	108	4.581.696.980	100	91,8	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	4.651.538.338	2	2.080.085.148	5	2.414.784.338	0	0	0	0	0	0	5	2.043.718.903	5	2.043.718.903	7	4.123.804.051	100	88,65	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	**4.199.580.460**	**0,89**	**1.674.289.564**	**50**	**2.250.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2.030.983.810**	**50**	**2.030.983.810**	**50,89**	**3.705.273.374**	**50,89**	**88,23**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4000	54.000.000	12	7.396.000	2000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	2000	12.458.000	2000	12.458.000	2012	19.854.000	50,3	36,77	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.795.080.460	12	679.893.564	12	907.800.000	0	0	0	0	0	0	12	758.525.810	12	758.525.810	24	1.438.419.374	100	80,13	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.350.500.000	12	987.000.000	12	1.314.000.000	0	0	0	0	0	0	12	1.260.000.000	12	1.260.000.000	24	2.247.000.000	100	95,6	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**6.655.464.920**	**36,35**	**2.924.004.555**	**63,65**	**3.250.431.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61,61**	**3.246.291.771**	**61,61**	**3.246.291.771**	**97,96**	**6.170.296.326**	**97,96**	**92,71**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	172	696.386.400	71	270.013.200	101	371.612.400	0	0	0	0	0	0	101	371.493.000	101	371.493.000	172	641.506.200	100	92,12	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	161	451.350.000	84	181.079.472	77	256.500.000	0	0	0	0	0	0	77	255.737.988	77	255.737.988	161	436.817.460	100	96,78	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	264	749.080.000	50	314.141.727	214	433.300.000	0	0	0	0	0	0	214	431.686.550	214	431.686.550	264	745.828.277	100	99,57	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	52	3.180.906.000	26	1.264.674.528	26	1.575.906.000	0	0	0	0	0	0	12	1.575.800.140	12	1.575.800.140	38	2.840.474.668	73,08	89,3	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	1.577.742.520	18	894.095.628	18	613.113.000	0	0	0	0	0	0	18	611.574.093	18	611.574.093	36	1.505.669.721	100	95,43	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**																							
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pelayanan urusan kepegawaian**	**Persen**	**100**	**6.182.750.275**	**3,15**	**1.535.013.637**	**96,85**	**4.690.798.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143,55**	**2.781.431.198**	**143,55**	**2.781.431.198**	**146,7**	**4.316.444.835**	**146,7**	**69,81**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	**03**	**02**	**1**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persen**	**100**	**2.851.728.838**	**33,33**	**522.780.943**	**66,67**	**2.303.738.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**	**1.140.970.506**	**66,67**	**1.140.970.506**	**100**	**1.663.751.449**	**100**	**58,34**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	1.401.753.704	1	369.117.867	4	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	4	360.696.401	4	360.696.401	5	729.814.268	100	52,06	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2	217.450.826	1	46.948.800	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	92.878.334	1	92.878.334	2	139.827.134	100	64,3	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	737.500.000	0	0	1	737.500.000	0	0	0	0	0	0	1	522.204.542	1	522.204.542	1	522.204.542	100	70,81	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	187.707.826	1	47.099.248	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	78.051.133	1	78.051.133	2	125.150.381	100	66,67	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	307.316.482	1	59.615.028	1	266.238.406	0	0	0	0	0	0	1	87.140.096	1	87.140.096	2	146.755.124	100	47,75	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	**Persen**	**100**	**1.735.527.319**	**28,57**	**810.531.528**	**71,43**	**1.080.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,43**	**1.083.348.413**	**71,43**	**1.083.348.413**	**100**	**1.893.879.941**	**100**	**109,12**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	5	719.273.704	1	186.891.279	4	500.000.000	0	0	0	0	0	0	4	268.069.176	4	268.069.176	5	454.960.455	100	63,25	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	1.016.253.615	1	623.640.249	1	580.000.000	0	0	0	0	0	0	1	815.279.237	1	815.279.237	2	1.438.919.486	100	141,59	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persen**	**100**	**859.665.902**	**13,33**	**100.020.136**	**86,67**	**775.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**329.982.950**	**20**	**329.982.950**	**33,33**	**430.003.086**	**33,33**	**50,02**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	10	500.000.000	0	0	10	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	2	143.611.076	1	55.510.237	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	12.164.000	1	12.164.000	2	67.674.237	100	47,12	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	100	300	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	2	166.054.826	1	44.509.899	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	1	167.818.950	1	167.818.950	2	212.328.849	100	127,87	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	**03**	**02**	**1**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persen**	**100**	**735.828.216**	**0,95**	**101.681.030**	**99,05**	**532.060.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153,97**	**227.129.329**	**153,97**	**227.129.329**	**154,92**	**328.810.359**	**154,92**	**44,69**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2	279.110.076	1	2.337.500	1	195.000.000	0	0	0	0	0	0	1	44.983.000	1	44.983.000	2	47.320.500	100	16,95	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	10	75.000.000	0	0	10	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	301	184.120.314	1	29.600.130	300	142.060.157	0	0	0	0	0	0	483	61.180.989	483	61.180.989	484	90.781.119	160,8	49,31	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2	197.597.826	1	69.743.400	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1	120.965.340	1	120.965.340	2	190.708.740	100	96,51	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**39.043.579.927**	**10,04**	**15.425.668.894**	**89,76**	**19.843.705.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,15**	**127.104.000**	**47,45**	**18.305.538.499**	**47,6**	**18.432.642.499**	**57,64**	**33.858.311.393**	**57,64**	**86,72**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**188.399.749**	**25**	**24.960.500**	**50**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,33**	**33.400.000**	**41,67**	**28.498.102**	**50**	**61.898.102**	**75**	**86.858.602**	**75**	**46,1**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	24.999.830	2	19.972.500	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	18.498.200	2	18.498.200	4	38.470.700	100	153,88	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	50	0	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.999.950	1	4.999.950	1	4.999.950	50	50	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	9.999.919	1	4.988.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.999.950	1	4.999.950	2	9.987.950	100	99,88	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	133.400.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	33.400.000	0	0	1	33.400.000	1	33.400.000	50	25,04	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**32.154.243.101**	**50**	**11.501.879.198**	**50**	**16.285.621.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,85**	**5.000.000**	**48,15**	**12.302.786.188**	**50**	**12.307.786.188**	**100**	**23.809.665.386**	**100**	**74,05**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	31.966.652.200	14	11.403.667.448	14	16.191.826.100	0	0	0	0	0	0	14	12.177.194.188	14	12.177.194.188	28	23.580.861.636	100	73,77	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	9.999.909	1	4.996.750	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	2	9.996.750	100	99,97	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	177.590.992	12	93.215.000	12	88.795.496	0	0	0	0	0	0	12	125.592.000	12	125.592.000	24	218.807.000	100	123,21	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**76.536.992**	**50**	**38.425.000**	**50**	**38.268.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**44.582.000**	**100**	**44.582.000**	**150**	**83.007.000**	**150**	**108,45**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	76.536.992	12	38.425.000	12	38.268.496	0	0	0	0	0	0	24	44.582.000	24	44.582.000	36	83.007.000	150	108,45	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**599.593.000**	**1,43**	**268.242.400**	**98,57**	**323.620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,06**	**88.704.000**	**41,15**	**689.491.000**	**41,22**	**778.195.000**	**42,64**	**1.046.437.400**	**42,64**	**174,52**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	167.500.000	2	180.928.000	1	100.500.000	0	0	0	0	1	88.704.000	0	0	1	88.704.000	3	269.632.000	100	160,97	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	340.593.000	20	87.314.400	20	131.620.000	0	0	0	0	0	0	35	438.396.271	35	438.396.271	55	525.710.671	137,5	154,35	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1500	91.500.000	0	0	1500	91.500.000	0	0	0	0	0	0	600	251.094.729	600	251.094.729	600	251.094.729	40	274,42	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.505.108.519**	**50**	**1.303.119.337**	**50**	**1.251.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**3.220.698.108**	**50**	**3.220.698.108**	**100**	**4.523.817.445**	**100**	**180,58**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	94.999.117	12	56.181.100	12	55.000.000	0	0	0	0	0	0	12	39.640.500	12	39.640.500	24	95.821.600	100	100,87	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	88.473.750	12	59.822.750	12	49.000.000	0	0	0	0	0	0	12	37.800.000	12	37.800.000	24	97.622.750	100	110,34	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.984.000	12	1.840.000	12	2.400.000	0	0	0	0	0	0	12	1.600.000	12	1.600.000	24	3.440.000	100	86,35	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	39.996.000	12	3.892.000	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	12	19.992.000	12	19.992.000	24	23.884.000	100	59,72	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.459.655.826	12	761.657.347	12	795.000.000	0	0	0	0	0	0	12	2.849.238.957	12	2.849.238.957	24	3.610.896.304	100	247,38	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	817.999.826	1	419.726.140	1	330.000.000	0	0	0	0	0	0	1	272.426.651	1	272.426.651	2	692.152.791	100	84,62	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.159.732.000**	**10,81**	**1.301.351.400**	**86,49**	**632.632.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197,3**	**782.030.160**	**197,3**	**782.030.160**	**208,11**	**2.083.381.560**	**208,11**	**179,64**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	110.000.000	1	152.000.000	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	152.000.000	33,33	138,18	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	82.132.000	1	456.000.000	12	27.632.000	0	0	0	0	0	0	29	322.765.000	29	322.765.000	30	778.765.000	230,77	948,19	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	350.000.000	1	233.060.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	233.060.000	50	66,59	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	417.600.000	1	460.291.400	16	345.000.000	0	0	0	0	0	0	43	348.244.000	43	348.244.000	44	808.535.400	258,82	193,61	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	111.021.160	1	111.021.160	1	111.021.160	50	55,51	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.080.401.866**	**50**	**436.550.539**	**50**	**545.813.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**563.896.233**	**50**	**563.896.233**	**100**	**1.000.446.772**	**100**	**92,6**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	21.222.000	12	3.385.000	12	16.224.000	0	0	0	0	0	0	12	2.720.000	12	2.720.000	24	6.105.000	100	28,77	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	578.002.874	12	176.077.539	12	289.001.437	0	0	0	0	0	0	12	218.504.233	12	218.504.233	24	394.581.772	100	68,27	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	481.176.992	12	257.088.000	12	240.588.496	0	0	0	0	0	0	12	342.672.000	12	342.672.000	24	599.760.000	100	124,64	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.279.564.700**	**26,09**	**551.140.520**	**73,91**	**646.349.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,22**	**673.556.708**	**65,22**	**673.556.708**	**91,3**	**1.224.697.228**	**91,3**	**95,71**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	276.599.500	12	164.065.463	25	135.192.000	0	0	0	0	0	0	25	180.275.847	25	180.275.847	37	344.341.310	100	124,49	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	76	103.650.000	12	62.953.000	64	54.000.000	0	0	0	0	0	0	64	48.564.500	64	48.564.500	76	111.517.500	100	107,59	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	884.315.200	12	324.122.057	1	442.157.600	0	0	0	0	0	0	1	444.716.361	1	444.716.361	13	768.838.418	100	86,94	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000	0	0	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																								
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Serta Meningkatnya Kompetensi dan Professionalisme Aparatur PEMDA Melalui Uji Sertifikasi/Uji Kompetensi dan Pengembagan K**	**Persen**	**100**	**48.061.469.424**	**20,89**	**3.639.866.492**	**35,13**	**17.591.469.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,99**	**4.858.864.886**	**10,99**	**4.858.864.886**	**31,87**	**8.498.731.378**	**31,87**	**17,68**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	**04**	**02**	**1**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persen**	**100**	**6.567.659.020**	**0**		**0,35**	**167.659.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,35**	**142.757.800**	**0,35**	**142.757.800**	**0,35**	**142.757.800**	**0,35**	**2,17**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	04	02	1	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	110.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	2.445.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	281	4.012.659.020	0	0	1	167.659.020	0	0	0	0	0	0	1	142.757.800	1	142.757.800	1	142.757.800	0,36	3,56	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**	**1**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi, Kelembagaan dan PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persen**	**100**	**41.493.810.404**	**22,25**	**3.639.866.492**	**37,4**	**17.423.810.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,68**	**4.716.107.086**	**11,68**	**4.716.107.086**	**33,93**	**8.355.973.578**	**33,93**	**20,14**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	04	02	1	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	465.000.000	1	120.771.334			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120.771.334	50	25,97	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	1	220.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	120	750.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	3	2.946.499.000	1	115.099.947	1	586.499.000	0	0	0	0	0	0	1	188.913.660	1	188.913.660	2	304.013.607	66,67	10,32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	4196	36.837.311.404	960	3.403.995.211	1616	16.837.311.404	0	0	0	0	0	0	504	4.527.193.426	504	4.527.193.426	1464	7.931.188.637	34,89	21,53	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	1	275.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Peningkatan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**61.766.785.971**	**23,94**	**2.070.200.460**	**27,79**	**15.238.832.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,33**	**2.884.119.305**	**23,33**	**2.884.119.305**	**47,26**	**4.954.319.765**	**47,26**	**8,02**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**370.000.000**	**23,08**	**45.599.500**	**23,08**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,08**	**196.745.000**	**23,08**	**196.745.000**	**46,15**	**242.344.500**	**46,15**	**65,5**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000	1	9.999.608	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	87.095.000	1	87.095.000	2	97.094.608	66,67	485,47	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20.000.000	1	4.999.892	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	9.999.892	66,67	50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	290.000.000	1	30.600.000	1	140.000.000	0	0	0	0	0	0	1	104.650.000	1	104.650.000	2	135.250.000	66,67	46,64	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**30.054.051.733**	**32,04**	**204.507.987**	**31,69**	**10.310.098.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,69**	**284.237.424**	**31,69**	**284.237.424**	**63,73**	**488.745.411**	**63,73**	**1,63**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	277	29.250.251.733	89	174.108.000	88	10.170.698.400	0	0	0	0	0	0	88	260.337.424	88	260.337.424	177	434.445.424	63,9	1,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	768.800.000	1	22.400.000	1	134.400.000	0	0	0	0	0	0	1	22.400.000	1	22.400.000	2	44.800.000	66,67	5,83	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	25.000.000	1	7.999.987	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	2	9.499.987	66,67	38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**8.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	8.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**800.000.000**	**8,33**	**164.670.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,33**	**164.670.000**	**8,33**	**20,58**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	300.000.000	1	164.670.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	164.670.000	50	54,89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	500.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**3.949.199.766**	**33,33**	**648.567.731**	**33,33**	**1.150.199.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,33**	**228.616.925**	**33,33**	**228.616.925**	**66,67**	**877.184.656**	**66,67**	**22,21**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	35.000.400	1	5.070.000	1	10.000.400	0	0	0	0	0	0	1	9.107.500	1	9.107.500	2	14.177.500	66,67	40,51	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	130.000.020	1	3.970.000	1	40.000.020	0	0	0	0	0	0	1	18.570.000	1	18.570.000	2	22.540.000	66,67	17,34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	189.998.929	1	15.015.787	1	59.998.929	0	0	0	0	0	0	1	16.345.000	1	16.345.000	2	31.360.787	66,67	16,51	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	222.998.517	1	43.100.000	1	72.998.517	0	0	0	0	0	0	1	49.120.000	1	49.120.000	2	92.220.000	66,67	41,35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	57.996.000	1	1.125.000	1	3.996.000	0	0	0	0	0	0	1	750.000	1	750.000	2	1.875.000	66,67	3,23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	650.000.000	1	54.608.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	1	43.526.000	1	43.526.000	2	98.134.000	66,67	15,1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.663.205.900	1	525.678.944	1	713.205.900	0	0	0	0	0	0	1	91.198.425	1	91.198.425	2	616.877.369	66,67	23,16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**15.775.627.000**	**18,87**	**656.980.000**	**22,64**	**2.075.627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,87**	**1.600.986.605**	**18,87**	**1.600.986.605**	**37,74**	**2.257.966.605**	**37,74**	**14,31**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	1.350.000.000	5	144.880.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	144.880.000	50	10,73	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia	Unit	1	300.000.000	1	262.100.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	262.100.000	100	87,37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	11	225.000.000	0	0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	45,45	11,11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1.433.000.000	2	80.000.000	3	283.000.000	0	0	0	0	0	0	2	19.600.000	2	19.600.000	4	99.600.000	26,67	6,95	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	11.477.627.000	0	0	1	1.477.627.000	0	0	0	0	0	0	2	1.109.017.305	2	1.109.017.305	2	1.109.017.305	33,33	9,66	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	790.000.000	0	0	3	290.000.000	0	0	0	0	0	0	1	447.369.300	1	447.369.300	1	447.369.300	12,5	56,63	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	2	170.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	170.000.000	100	85	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**2.080.772.172**	**33,33**	**64.601.542**	**33,33**	**528.772.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,22**	**60.457.371**	**22,22**	**60.457.371**	**55,56**	**125.058.913**	**55,56**	**6,01**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	12.960.000	1	660.000	1	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	660.000	33,33	5,09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1.179.812.172	1	30.441.542	1	329.812.172	0	0	0	0	0	0	1	27.457.371	1	27.457.371	2	57.898.913	66,67	4,91	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	888.000.000	1	33.500.000	1	198.000.000	0	0	0	0	0	0	1	33.000.000	1	33.000.000	2	66.500.000	66,67	7,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	Persen	100	8.729.135.300	3	285.273.700	22	1.024.135.300	0	0	0	0	0	0	3	513.075.980	3	513.075.980	6	798.349.680	6	9,15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	51	1.095.497.800	1	50.097.300	17	245.497.800	0	0	0	0	0	0	1	48.471.530	1	48.471.530	2	98.568.830	3,92	9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	5.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6.741.687.500	1	209.026.400	2	741.687.500	0	0	0	0	0	0	1	457.823.450	1	457.823.450	2	666.849.850	33,33	9,89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	636.950.000	1	26.150.000	3	36.950.000	0	0	0	0	0	0	1	6.781.000	1	6.781.000	2	32.931.000	18,18	5,17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	150.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	05				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																							
5	05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	-	Persen	100	17.733.362.608	54,12	8.194.306.124	13,53	3.453.261.219	0	0	0	0	14,71	1.690.815.545	0,59	431.987.670	15,29	2.122.803.215	69,41	10.317.109.339	69,41	58,18	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
5	05	02	1		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	-	Persen	100	3.597.118.760	44,44	657.918.260	29,63	1.416.972.000	0	0	0	0	51,85	697.582.379	0	0	51,85	697.582.379	96,3	1.355.500.639	96,3	37,68	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
5	05	02	1	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	13	988.375.000	9	262.099.500	3	575.000.000	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	18	262.099.500	138,46	26,52	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	135.540.800	0	0	1	135.540.800	1	135.540.800	100	135,54	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	3	700.000.000	0	0	2	450.000.000	0	0	0	0	2	251.124.830	0	0	2	251.124.830	2	251.124.830	66,67	35,87	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	10	1.808.743.760	3	395.818.760	2	291.972.000	0	0	0	0	2	310.916.749	0	0	2	310.916.749	5	706.735.509	50	39,07	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	-	Persen	100	4.117.571.669	70,97	2.485.645.454	12,9	669.029.219	0	0	0	0	6,45	166.028.642	3,23	431.987.670	9,68	598.016.312	80,65	3.083.661.766	80,65	74,89	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
5	05	02	1	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	13	1.373.282.219	9	797.831.026	1	73.282.219	0	0	0	0	0	0	1	431.987.670	1	431.987.670	10	1.229.818.696	76,92	89,55	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	18	2.744.289.450	13	1.687.814.428	3	595.747.000	0	0	0	0	2	166.028.642	0	0	2	166.028.642	15	1.853.843.070	83,33	67,55	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	-	Persen	100	4.880.163.821	66,67	2.869.560.643	13,33	1.110.347.000	0	0	0	0	10	488.168.780	0	0	10	488.168.780	76,67	3.357.729.423	76,67	68,8	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
5	05	02	1	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	22	2.752.144.000	18	2.390.442.643	2	85.394.000	0	0	0	0	2	66.742.000	0	0	2	66.742.000	20	2.457.184.643	90,91	89,28	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	5	853.066.821	2	479.118.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	479.118.000	40	56,16	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	3	1.274.953.000	0	0	1	874.953.000	0	0	0	0	1	421.426.780	0	0	1	421.426.780	1	421.426.780	33,33	33,05	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	-	Persen	100	5.138.508.358	46,34	2.181.181.767	8,54	256.913.000	0	0	0	0	7,32	339.035.744	0	0	7,32	339.035.744	53,66	2.520.217.511	53,66	49,05	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
5	05	02	1	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	24	1.840.904.944	20	1.119.243.121	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1.119.243.121	83,33	60,8	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	16	1.432.127.571	11	673.159.288	1	64.439.000	0	0	0	0	1	64.389.000	0	0	1	64.389.000	12	737.548.288	75	51,5	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	18	1.120.211.479	1	284.928.904	2	13.466.000	0	0	0	0	2	123.708.744	0	0	2	123.708.744	3	408.637.648	16,67	36,48	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	23	495.264.364	6	103.850.454	3	89.008.000	0	0	0	0	3	150.938.000	0	0	3	150.938.000	9	254.788.454	39,13	51,44	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	1	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	Laporan	1	250.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	Persen	100	42.820.218.793	51,37	19.200.361.005	21,97	8.816.146.781	0	0	0	0	22,69	8.236.146.781	0,14	3.653.300	22,84	8.239.800.081	74,21	27.440.161.086	74,21	64,08	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	Persen	100	118.576.503	45,45	43.999.609	13,64	43.577.000	0	0	0	0	29,55	13.577.000	4,55	3.653.300	34,09	17.230.300	79,55	61.229.909	79,55	51,64	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	33.033.894	4	19.000.000	2	8.534.000	0	0	0	0	12	8.534.000	0	0	12	8.534.000	16	27.534.000	200	83,35	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1	02	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	15.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	3.653.300	2	3.653.300	2	3.653.300	50	24,36	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.542.785	3	14.999.785	1	5.043.000	0	0	0	0	1	5.043.000	0	0	1	5.043.000	4	20.042.785	80	78,47	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	27	44.999.824	13	9.999.824	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9.999.824	48,15	22,22	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**28.127.260.141**	**52,87**	**14.814.872.253**	**23,57**	**5.853.336.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,57**	**5.853.336.500**	**0**	**0**	**30,57**	**5.853.336.500**	**83,44**	**20.668.208.753**	**83,44**	**73,48**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	27.463.715.020	36	14.477.258.623	12	5.666.126.000	0	0	0	0	12	5.666.126.000	0	0	12	5.666.126.000	48	20.143.384.623	80	73,35	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	36	341.117.991	12	111.294.000	12	138.603.000	0	0	0	0	12	138.603.000	0	0	12	138.603.000	24	249.897.000	66,67	73,26	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	28.712.341	3	14.999.841	1	8.712.500	0	0	0	0	12	8.712.500	0	0	12	8.712.500	15	23.712.341	300	82,59	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	56	293.714.789	32	211.319.789	12	39.895.000	0	0	0	0	12	39.895.000	0	0	12	39.895.000	44	251.214.789	78,57	85,53	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**504.247.000**	**38,65**	**124.669.936**	**21,47**	**59.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,04**	**59.562.000**	**0**	**0**	**11,04**	**59.562.000**	**49,69**	**184.231.936**	**49,69**	**36,54**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	308	163.790.000	120	70.950.000	66	27.200.000	0	0	0	0	12	27.200.000	0	0	12	27.200.000	132	98.150.000	42,86	59,92	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	231.276.000	4	24.252.000	2	18.181.000	0	0	0	0	12	18.181.000	0	0	12	18.181.000	16	42.433.000	160	18,35	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	109.181.000	2	29.467.936	2	14.181.000	0	0	0	0	12	14.181.000	0	0	12	14.181.000	14	43.648.936	175	39,98	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**2.960.601.483**	**58,47**	**1.437.202.775**	**20,29**	**585.519.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,91**	**585.519.082**	**0**	**0**	**22,91**	**585.519.082**	**81,38**	**2.022.721.857**	**81,38**	**68,32**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	26.234.846	36	15.647.500	12	5.000.232	0	0	0	0	12	5.000.232	0	0	12	5.000.232	48	20.647.732	80	78,7	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	37.439.850	25	24.662.300	12	1.997.500	0	0	0	0	12	1.997.500	0	0	12	1.997.500	37	26.659.800	61,67	71,21	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	100.501.147	36	49.850.350	12	39.116.600	0	0	0	0	12	39.116.600	0	0	12	39.116.600	48	88.966.950	80	88,52	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	175.749.940	36	78.570.687	12	60.000.000	0	0	0	0	12	60.000.000	0	0	12	60.000.000	48	138.570.687	80	78,85	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	52	67.529.500	28	33.744.000	12	14.250.000	0	0	0	0	12	14.250.000	0	0	12	14.250.000	40	47.994.000	76,92	71,07	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan / Material Kegiatan Kantor	Paket	1	250.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	185.690.000	36	77.033.500	12	75.920.000	0	0	0	0	12	75.920.000	0	0	12	75.920.000	48	152.953.500	80	82,37	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.757.005.500	36	1.085.895.688	12	353.184.000	0	0	0	0	12	353.184.000	0	0	12	353.184.000	48	1.439.079.688	80	81,91	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	360.450.700	12	71.798.750	1	36.050.750	0	0	0	0	12	36.050.750	0	0	12	36.050.750	24	107.849.500	400	29,92	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**7.175.712.123**	**16,67**	**865.028.455**	**59,09**	**1.159.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,58**	**609.344.000**	**0**	**0**	**57,58**	**609.344.000**	**74,24**	**1.474.372.455**	**74,24**	**20,55**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	800.000.000	1	223.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	223.000.000	50	27,88	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	800.000.000	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	25	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	17	214.553.371	2	99.246.091	12	6.054.000	0	0	0	0	12	6.054.000	0	0	12	6.054.000	14	105.300.091	82,35	49,08	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1.159.808.310	5	303.788.364	12	539.990.000	0	0	0	0	12	539.990.000	0	0	12	539.990.000	17	843.778.364	85	72,75	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Paket	1	1.000.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2.924.482.302	1	74.094.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74.094.000	50	2,53	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	276.868.140	2	164.900.000	12	63.300.000	0	0	0	0	12	63.300.000	0	0	12	63.300.000	14	228.200.000	77,78	82,42	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**1.995.865.316**	**57,65**	**916.243.298**	**21,18**	**499.717.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,18**	**499.717.199**	**0**	**0**	**21,18**	**499.717.199**	**78,82**	**1.415.960.497**	**78,82**	**70,94**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	8.500.000	36	4.700.000	12	2.500.000	0	0	0	0	12	2.500.000	0	0	12	2.500.000	48	7.200.000	80	84,71	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	42	682.615.316	18	289.093.298	12	100.967.199	0	0	0	0	12	100.967.199	0	0	12	100.967.199	30	390.060.497	71,43	57,14	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	68	1.304.750.000	44	622.450.000	12	396.250.000	0	0	0	0	12	396.250.000	0	0	12	396.250.000	56	1.018.700.000	82,35	78,08	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**1.937.956.227**	**63,11**	**998.344.679**	**15,53**	**615.091.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,3**	**615.091.000**	**0**	**0**	**23,3**	**615.091.000**	**86,41**	**1.613.435.679**	**86,41**	**83,25**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	703.531.507	27	397.473.669	7	126.400.000	0	0	0	0	12	126.400.000	0	0	12	126.400.000	39	523.873.669	95,12	74,46	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	66	36.500.000	42	26.500.000	12	3.500.000	0	0	0	0	12	3.500.000	0	0	12	3.500.000	54	30.000.000	81,82	82,19	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	39	1.113.124.720	36	532.810.010	1	453.691.000	0	0	0	0	12	453.691.000	0	0	12	453.691.000	48	986.501.010	123,08	88,62	Badan Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	84.800.000	25	41.561.000	12	31.500.000	0	0	0	0	12	31.500.000	0	0	12	31.500.000	37	73.061.000	61,67	86,16	Badan Penelitian dan Pengembangan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**																								
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**-**	**Persen**	**100**	**596.400.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	07	02	1	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	-	**Persen**	**100**	**596.400.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
5	07	02	1	02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	1	241.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
5	07	02	1	03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	1	241.200.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
5	07	02	1	04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	1	57.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
5	07	02	1	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	1	57.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**14.481.715.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	**XX**	**01**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**4.949.851**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.949.851	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**6.922.342.700**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	6.778.175.940	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	26.280.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.966.760	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	112.920.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**349.500.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,1	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	90	104.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	110.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	10	50.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	85.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**604.972.980**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,1	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.977.700	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.995.280	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	225.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	325.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**3.171.600.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,1	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	650.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	359	204.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	312.500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.925.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	85	80.100.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.353.000.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	225.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	610.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	350.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	168.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.045.349.469**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,1	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	840.196.269	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	25.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	17.000.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,1	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.163.153.200	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
6				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																							
6	**01**			**INSPEKTORAT DAERAH**																							
6	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (persen)**	**Persen**	**100**	**13.439.270.891**	**67,27**	**5.428.387.090**	**50**	**7.208.255.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,03**	**6.078.829.117**	**23,03**	**118.925.000**	**133,06**	**6.197.754.117**	**200,33**	**11.626.141.207**	**200,33**	**86,51**	**Inspektorat**
6	**01**	**02**	**1**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan Pengawasan Intrenal secara Berkala**	**Persen**	**100**	**11.073.773.176**	**66,86**	**4.851.441.290**	**50**	**5.533.744.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,06**	**4.671.129.762**	**0**	**0**	**107,06**	**4.671.129.762**	**173,92**	**9.522.571.052**	**173,92**	**85,99**	**Inspektorat**

Kode				Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
													Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1				2	3	4	5		6		7		8								9			10(6+9)		11(10/5*100)		12
6	01	02	1	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	240	6.858.302.682	240	3.076.326.388	120	3.491.981.420	0	0	0	0	378	3.416.094.126	0	0	378	3.416.094.126	618	6.492.420.514	257,5	94,67	Inspektorat
6	01	02	1	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	96	563.387.026	65	181.219.000	48	286.925.000	0	0	0	0	67	267.282.500	0	0	67	267.282.500	132	448.501.500	137,5	79,61	Inspektorat
6	01	02	1	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	102	788.054.000	14	334.100.000	51	317.450.000	0	0	0	0	49	277.433.000	0	0	49	277.433.000	63	611.533.000	61,76	77,6	Inspektorat
6	01	02	1	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2	384.400.000	1	135.490.000	1	182.600.000	0	0	0	0	1	166.420.000	0	0	1	166.420.000	2	301.910.000	100	78,54	Inspektorat
6	01	02	1	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	64	1.236.642.219	18	564.595.052	32	590.102.000	0	0	0	0	48	543.900.136	0	0	48	543.900.136	66	1.108.495.188	103,13	89,64	Inspektorat
6	01	02	1	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	54.550.860	1	41.721.250	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	41.721.250	100	76,48	Inspektorat
6	01	02	1	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	1.188.436.389	2	517.989.600	2	664.686.000	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	517.989.600	100	43,59	Inspektorat
6	**01**	**02**	**1**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu**	**Persen**	**100**	**2.365.497.715**	**69,39**	**576.945.800**	**50**	**1.674.510.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125,51**	**1.407.699.355**	**142,86**	**118.925.000**	**268,37**	**1.526.624.355**	**337,76**	**2.103.570.155**	**337,76**	**88,93**	**Inspektorat**
6	01	02	1	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	24	412.268.837	24	151.663.400	12	211.485.000	0	0	0	0	0	0	140	118.925.000	140	118.925.000	164	270.588.400	683,33	65,63	Inspektorat
6	01	02	1	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	74	1.953.228.878	44	425.282.400	37	1.463.025.816	0	0	0	0	123	1.407.699.355	0	0	123	1.407.699.355	167	1.832.981.755	225,68	93,84	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Peningkatan Kualitas APIP dalam Rangka Profesionalisme Pengawasan Intenal Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.896.571.235**	**60,42**	**801.592.100**	**50**	**1.045.425.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**968.917.163**	**0**	**0**	**150**	**968.917.163**	**210,42**	**1.770.509.263**	**210,42**	**93,35**	**Inspektorat**
6	**01**	**03**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persen**	**100**	**344.398.471**	**133,33**	**153.780.350**	**50**	**176.077.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533,33**	**147.770.253**	**0**	**0**	**533,33**	**147.770.253**	**666,67**	**301.550.603**	**666,67**	**87,56**	**Inspektorat**
6	01	03	1	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	40.000.000	1	0	1	40.000.000	0	0	0	0	25	39.445.473	0	0	25	39.445.473	26	39.445.473	1,300.00	98,61	Inspektorat
6	01	03	1	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	304.398.471	7	153.780.350	2	136.077.650	0	0	0	0	7	108.324.780	0	0	7	108.324.780	14	262.105.130	350	86,11	Inspektorat
6	**01**	**03**	**1**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.552.172.764**	**50**	**647.811.750**	**50**	**869.348.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,24**	**821.146.910**	**0**	**0**	**95,24**	**821.146.910**	**145,24**	**1.468.958.660**	**145,24**	**94,64**	**Inspektorat**
6	01	03	1	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	42	1.552.172.764	21	647.811.750	21	869.348.200	0	0	0	0	40	821.146.910	0	0	40	821.146.910	61	1.468.958.660	145,24	94,64	Inspektorat
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)**	**Persen**	**100**	**37.625.458.288**	**48,68**	**17.847.604.941**	**50**	**18.354.046.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,63**	**17.538.018.000**	**0**	**0**	**45,63**	**17.538.018.000**	**94,31**	**35.385.622.941**	**94,31**	**94,05**	**Inspektorat**
X	**XX**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**79.403.009**	**50**	**54.774.600**	**50**	**21.124.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**3.638.700**	**0**	**0**	**50**	**3.638.700**	**100**	**58.413.300**	**100**	**73,57**	**Inspektorat**
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	39.524.738	2	20.341.000	2	15.845.103	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	20.341.000	100	51,46	Inspektorat
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	20.614.638	1	16.821.600	1	3.729.000	0	0	0	0	1	2.513.700	0	0	1	2.513.700	2	19.335.300	100	93,79	Inspektorat
X	XX	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	19.263.633	3	17.612.000	3	1.550.000	0	0	0	0	3	1.125.000	0	0	3	1.125.000	6	18.737.000	100	97,27	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**26.462.126.775**	**50**	**12.095.884.587**	**50**	**13.640.756.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**13.271.443.606**	**0**	**0**	**50**	**13.271.443.606**	**100**	**25.367.328.193**	**100**	**95,86**	**Inspektorat**
X	XX	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	26.236.282.074	14	11.981.681.637	14	13.529.345.694	0	0	0	0	14	13.164.789.906	0	0	14	13.164.789.906	28	25.146.471.543	100	95,85	Inspektorat
X	XX	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	13.022.543	1	7.824.000	1	5.000.200	0	0	0	0	1	5.000.200	0	0	1	5.000.200	2	12.824.200	100	98,48	Inspektorat
X	XX	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	212.822.158	12	106.378.950	12	106.411.000	0	0	0	0	12	101.653.500	0	0	12	101.653.500	24	208.032.450	100	97,75	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah /Aset (Persen)**	**Persen**	**100**	**77.134.604**	**50**	**37.769.800**	**50**	**39.225.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**38.160.000**	**0**	**0**	**50**	**38.160.000**	**100**	**75.929.800**	**100**	**98,44**	**Inspektorat**
X	XX	01	1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	77.134.604	12	37.769.800	12	39.225.800	0	0	0	0	12	38.160.000	0	0	12	38.160.000	24	75.929.800	100	98,44	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**2.307.215.169**	**44,81**	**925.490.822**	**50**	**994.613.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,81**	**766.722.228**	**0**	**0**	**44,81**	**766.722.228**	**89,61**	**1.692.213.050**	**89,61**	**73,34**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	324.500.000	2	72.732.400	2	200.000.000	0	0	0	0	2	196.544.231	0	0	2	196.544.231	4	269.276.631	100	82,98	Inspektorat
X	XX	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	266.731.656	1	24.789.400	2	191.776.508	0	0	0	0	1	187.661.000	0	0	1	187.661.000	2	212.450.400	50	79,65	Inspektorat
X	XX	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	1.559.231.513	100	783.484.822	100	549.280.200	0	0	0	0	100	360.819.495	0	0	100	360.819.495	200	1.144.304.317	100	73,39	Inspektorat
X	XX	01	1,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	156.752.000	35	44.484.200	50	53.557.000	0	0	0	0	35	21.697.502	0	0	35	21.697.502	70	66.181.702	70	42,22	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**2.665.557.187**	**50**	**1.276.260.730**	**50**	**1.373.448.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.334.940.202**	**0**	**0**	**50**	**1.334.940.202**	**100**	**2.611.200.932**	**100**	**97,96**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	155.794.325	12	56.267.950	12	96.504.125	0	0	0	0	12	96.283.950	0	0	12	96.283.950	24	152.551.900	100	97,92	Inspektorat
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	266.601.360	12	159.935.300	12	104.508.825	0	0	0	0	12	103.654.224	0	0	12	103.654.224	24	263.589.524	100	98,87	Inspektorat
X	XX	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	235.327.502	12	102.940.000	12	130.296.752	0	0	0	0	12	105.929.000	0	0	12	105.929.000	24	208.869.000	100	88,76	Inspektorat
X	XX	01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	28.752.000	12	13.000.000	12	15.000.000	0	0	0	0	12	6.000.000	0	0	12	6.000.000	24	19.000.000	100	66,08	Inspektorat
X	XX	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	224.616.000	12	101.828.000	12	122.016.000	0	0	0	0	12	120.992.000	0	0	12	120.992.000	24	222.820.000	100	99,2	Inspektorat
X	XX	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.754.466.000	12	842.289.480	12	905.123.000	0	0	0	0	12	902.081.028	0	0	12	902.081.028	24	1.744.370.508	100	99,42	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**4.144.553.379**	**58,57**	**2.671.905.016**	**50**	**1.248.601.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,71**	**1.136.370.486**	**0**	**0**	**25,71**	**1.136.370.486**	**84,29**	**3.808.275.502**	**84,29**	**91,89**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	211.133.024	2	127.325.000	2	80.000.000	0	0	0	0	2	78.699.000	0	0	2	78.699.000	4	206.024.000	100	97,58	Inspektorat
X	XX	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	1.077.721.747	36	270.647.157	30	802.982.850	0	0	0	0	13	773.853.150	0	0	13	773.853.150	49	1.044.500.307	81,67	96,92	Inspektorat
X	XX	01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.115.700.108	1	948.897.925	1	84.790.010	0	0	0	0	1	4.830.000	0	0	1	4.830.000	2	953.727.925	100	85,48	Inspektorat
X	XX	01	1,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	742.398.850	1	456.801.840	1	280.828.850	0	0	0	0	1	278.988.336	0	0	1	278.988.336	2	735.790.176	100	99,11	Inspektorat
X	XX	01	1,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	997.599.650	1	868.233.094	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	868.233.094	100	87,03	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Persen**	**100**	**570.213.124**	**50**	**233.139.562**	**50**	**335.057.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**291.342.640**	**0**	**0**	**50**	**291.342.640**	**100**	**524.482.202**	**100**	**91,98**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	25.960.000	12	9.960.000	12	16.000.000	0	0	0	0	12	9.448.000	0	0	12	9.448.000	24	19.408.000	100	74,76	Inspektorat
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	354.699.114	12	168.255.762	12	184.439.352	0	0	0	0	12	159.494.640	0	0	12	159.494.640	24	327.750.402	100	92,4	Inspektorat
X	XX	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	189.554.010	12	54.923.800	12	134.618.000	0	0	0	0	12	122.400.000	0	0	12	122.400.000	24	177.323.800	100	93,55	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aset Milik Deerah yang terpelihara (unit)**	**Persen**	**100**	**1.319.255.041**	**50**	**552.379.824**	**50**	**701.218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**695.400.138**	**0**	**0**	**50**	**695.400.138**	**100**	**1.247.779.962**	**100**	**94,58**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	673.175.041	12	251.436.449	12	394.718.000	0	0	0	0	12	391.604.672	0	0	12	391.604.672	24	643.041.121	100	95,52	Inspektorat

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4						
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	504.800.000	12	276.333.375	12	200.000.000	0	0	0	0	12	197.295.466	0	0	12	197.295.466	24	473.628.841	100	93,83	Inspektorat
X	XX	01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	141.280.000	12	24.610.000	12	106.500.000	0	0	0	0	12	106.500.000	0	0	12	106.500.000	24	131.110.000	100	92,8	Inspektorat

Bab III
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan perkiraan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Kondisi tersebut mempertimbangkan isu yang berkembang secara lokal, regional, nasional maupun secara global. Kerangka pendanaan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini (tahun 2023) dan proyeksi yang terjadi di tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menentukan kebijakan terkait penganggaran dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2024.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2024 mendukung tujuan pembangunan daerah Tahun 2024-2026, yaitu:

1) Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Kompetitif
2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik
3) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan
4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Mutu Pendidikan;
2) Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Mutu Kesehatan;
3) Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat;
4) Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat;
5) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan;
6) Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan;
7) Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja;
8) Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;
9) Meningkatnya konektivitas antarwilayah;
10) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
11) Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana;
12) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta berpedoman pada beberapa regulasi yang harus segera dilaksanakan, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial, mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar yang dijabarkan dalam program/kegiatan OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 dipengaruhi atas pencapaian pembangunan ekonomi 2022, proyeksi pencapaian 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi daerah akan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp 41,01 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 25,50 triliun. Perekonomian Sulawesi Tenggara triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,48 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,21 persen. Perekonomi Sulawesi Tenggara triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 7,43 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar 29,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 35,46 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 24,06 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontribusi paling dominan terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 48,25 persen.

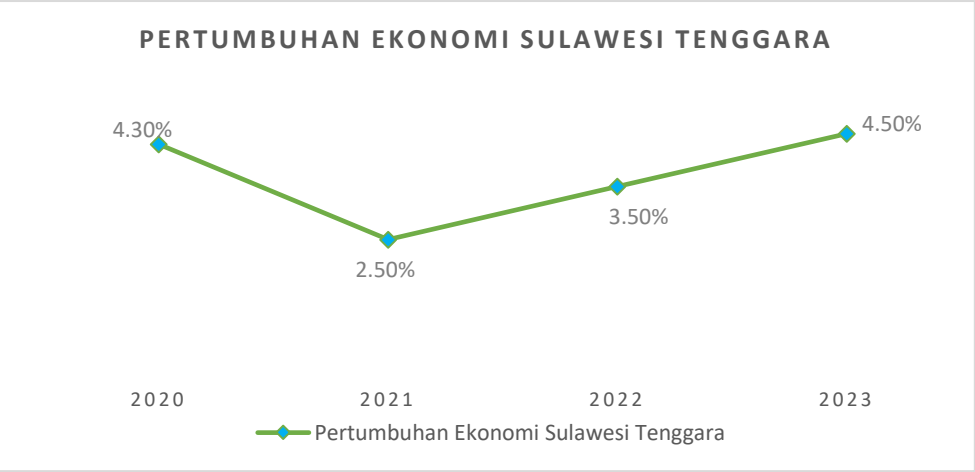

Sumber: BPS, 2023.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara y on y Triwulan I-2020 -Triwulan I-2023

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diasumsikan dan ditargetkan dapat bertumbuh secara konsisten dan dapat melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 11,27 persen, naik 0,10 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,47 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 314,74 ribu orang, naik 4,95 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 8,52 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,22 persen, naik 0,27 persen poin terhadap Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,60 persen, naik 0,03 persen poin dari Maret 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 3,77 ribu orang (dari 69,94 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 73,71 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 1,19 ribu orang (dari 239,85 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 241,04 ribu orang pada September 2022). Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 432.464,-/ kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 326.264,- (75,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 106.200,- (24,56 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,27 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.279.085,-/rumah tangga miskin/bulan.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2022 mencapai 314,74 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin naik 4,95 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,52 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 11,27 persen, naik 0,10 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,47 persen poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,77 ribu orang, dan di perdesaan naik sebesar 1,19 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik 0,27 persen poin dari 6,95 persen menjadi 7,22 persen. Sementara itu, di perdesaan naik 0,03 persen poin dari 13,57 persen menjadi 13,60 persen.

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2021	71,02	7,14
Maret 2022	69,94	6,95
September 2022	73,71	7,22
Perdesaan		
September 2021	252,25	14,34
Maret 2022	239,85	13,57
September 2022	241,04	13,60

Sumber: BPS, 2023.

Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dengan adanya kenaikan harga BBM skala nasional di bulan September

2022; terjadinya inflasi antara Maret 2022 terhadap September 2022 sebesar 5.33 persen. IHK Maret 2022 = 108,54 dan IHK September 2022 = 114,33; menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,89 persen dan menjadi dibawah 100. NTP Maret 2022 = 100,58 dan NTP September 2022 = 99,68; produksi Ikan di Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) menurun hingga 24% antara triwulan I dengan triwulan III Tahun 2022. Volume produksi ikan di PIT triwulan I th. 2022 = 113.675,48 kwintal dan volume produksi ikan di PIT triwulan III Th. 2022 = 86.054,63 kwintal; adanya kenaikan beberapa harga komoditas pokok naik; dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada BPNT dan PKH di Tahun 2022 sempat menurun, walaupun kemudian kembali berangsur naik tapi tetap lebih kecil dari triwulan pertama.

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.331,36 ribu orang, naik 50 ribu orang dibanding Februari 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,23 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.282,63 ribu orang, meningkat sebanyak 50,72 ribu orang dari Februari 2022 atau turun sebanyak 40,61 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan Pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dari Februari 2022 adalah kategori Industri Pengolahan (1,64 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Jasa Pendidikan (1,53 persen poin). Sebanyak 806,41 ribu orang (62,87 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,88 persen poin dari Februari 2022. Setengah penganggur turun 0,99 persen poin dan persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 2,60 persen poin dibandingkan Februari 2022. Terdapat 16,83 ribu orang (0,85 persen terhadap penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,05 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1,22 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (15,56 ribu orang). Pada kelompok sementara tidak bekerja karena COVID-19 sudah tidak terdapat Penduduk Usia Kerja yang terdampak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,66 persen, turun 0,56 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021 atau turun 0,20 persen poin terhadap Februari 2022. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 3,66 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Selama setahun TPT Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin. Apabila dilihat perubahan antara Februari 2022 terhadap Februari 2021, terjadi penurunan sebesar 0,36 persen poin. Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 3,61 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,74 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,14 persen poin dan 0,30 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,20 persen) pada Februari 2023 lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan (2,86 persen). Dibandingkan Februari 2022, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,53 persen poin dan 0,09 persen poin. Namun jika dibandingkan perubahan antara Februari 2022 terhadap Februari 2021, TPT perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen poin, sedangkan TPT perkotaan turun sebesar 2,62 persen poin.

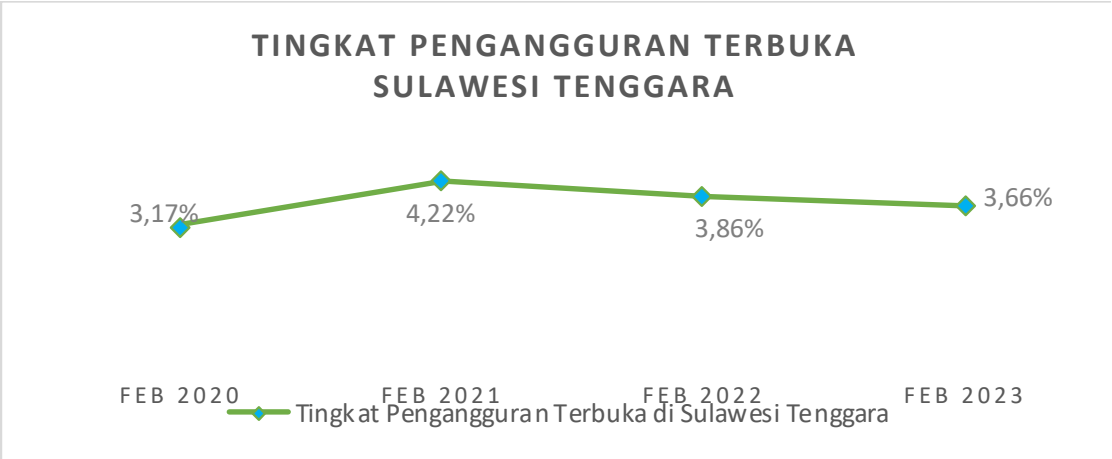

Sumber: BPS, 2023.

Gambar 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Februari 2020-Februari 2023

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Pada April 2023 terjadi Inflasi gabungan 2 kota IHK *year on year (yoy)* 5,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,19. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 6,75 persen dengan IHK sebesar 121,12 dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen dengan IHK sebesar 114,15. I nflasi *year on year (yoy)* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok transportasi sebesar 17,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 8,00 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,87 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,34 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,74 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,45 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,92 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen. Tingkat inflasi gabungan 2 kota IHK *month to month (mtm)* sebesar 0,43 persen dan tingkat inflasi *year to date (ytd)* April 2023 sebesar 0,29 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi *yoy* antara lain angkutan udara, bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, mobil, angkutan dalam kota, akademi/perguruan tinggi, rokok putih serta angkutan antar kota. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi *yoy* antara lain Ikan teri, ikan cakalang/ikan sisik, ikan layang/ikan benggol, bayam, cabai rawit, daging ayam ras, daun kelor, ikan rambe, pepaya muda serta terong.

Tabel 3.2. Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Sulawesi Tenggara (Kendari dan Baubau) Tahun 2021-2023

Tingkat Inflasi	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
***Month to Month (mtm)* April**	0,35	1,65	0,43
***Year to Date (ytd)* April**	0,06	2,28	0,29
***Year on Year (yoy)* April**	2,06	4,87	5,30

Sumber: BPS, 2023.

3.1.1.5 Neraca Perdagangan (Ekspor dan Impor)

Neraca perdagangan merupakan selisih dari nilai ekspor dan nilai impor. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan segala potensi sumber daya alam mempunyai peluang dalam perdagangan luar negeri yang tercermin dalam statistik ekspor. Data Statistik Ekspor diperoleh dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Bea dan Cukai, komoditi yang selama ini menjadi andalan Sulawesi Tenggara antara lain besi dan baja serta bermacam hasil laut, sedangkan negara tujuan ekspor tersebar di benua Asia hingga Amerika. Nilai ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 mencapai US$431,76 juta atau naik 26,85 persen dibanding ekspor Februari 2023 yang tercatat US$340,36 juta. Sementara, volume ekspor Maret 2023 tercatat 217,77 ribu ton atau naik 36,16 persen dibanding volume ekspor Februari 2023 yang tercatat 159,94 ribu ton. Peningkatan terbesar Ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 terjadi pada komoditas Besi dan Baja senilai US$90,52 juta (naik 26,83 persen) dimana pada bulan Februari sebesar US$337,33 juta naik menjadi US$427,86 juta di bulan Maret. Menurut Sektor, Ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 didominasi oleh sektor industry pengolahan sebesar US$431,13 juta (99,85 persen). Ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$426,83 juta, disusul Amerika Serikat senilai US$2,15 juta, dan India senilai US$1,38 juta.

Nilai impor Sulawesi Tenggara Maret 2023 mencapai US$255,36 juta, naik 67,74 persen dibandingkan Februari 2023 atau turun 43,31 persen dibandingkan Maret 2022. Volume impor Maret 2023 senilai 555,07 ribu ton, naik 89,45 persen dibandingkan Februari 2023 atau turun 18,93 persen dibandingkan Maret 2022. Peningkatan impor golongan barang terbesar Maret 2023 dibandingkan Februari 2023 adalah Garam, Belerang, Kapur (25) yaitu sebesar US$5,85 juta (naik 329.799,19 persen). Tiga negara pemasok barang impor terbesar selama Maret 2023 adalah Tiongkok senilai US$131,84 juta (naik 53,70 persen), Singapura senilai US$39,17 juta (naik 2,98 persen) dan Afrika Selatan senilai US$31,35 juta. Menurut golongan penggunaan barang, impor Maret 2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan 43,41 persen yakni nilai bahan baku/ penolong mengalami penurunan sebesar US$23,34 juta (turun 44,52 persen) dan barang konsumsi pun turun sebesar 32,18 persen atau senilai US$0,04 juta. Selanjutnya golongan barang modal turun 3,93 persen atau turun senilai US$47,82 juta. Neraca perdagangan Sulawesi Tenggara Maret 2023 mengalami surplus US$176,40 juta.

Tabel 3.3. Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara Januari 2021-Maret 2023

Periode	Ekspor (Juta US$)	Impor (Juta US$)	Neraca Perdagangan (Juta US$)
Tahun 2021			
Januari	206,85	*191,61*	15,25
Februari	231,63	*71*	160,63
Maret	342,58	*168,45*	174,13
April	432,89	*135,73*	297,16
Mei	210,11	*142,57*	67,54
Juni	481,51	*190,09*	291,41
Juli	382,73	*118,28*	264,25
Agustus	307,27	*109,91*	197,36
September	347,41	*383,5*	-36,09

Periode	Ekspor (Juta US$)	Impor (Juta US$)	Neraca Perdagangan (Juta US$)
Oktober	590,68	*270,73*	319,95
November	337,13	*195,4*	141,73
Desember	555,1	*119,31*	435,79
Jan-Des 2022	**4.425,89**	**2.096,58**	**2.329,31**
Tahun 2022			
Januari	400,19	202,20	197,99
Februari	314,15	74,57	239,57
Maret	411,54	451,22	-39,68
April	563,51	156,19	407,32
Mei	678,17	208,68	469,50
Juni	485,70	272,49	213,21
Juli	353,24	189,89	163,35
Agustus	501,22	394,86	106,35
September	553,02	160,41	392,60
Oktober	569,84	121,94	447,90
November	497,67	204,02	293,65
Desember	503,42	110,86	392,57
Jan-Des 2022	**5.831,67**	**2.547,33**	**3.284,34**
Tahun 2023			
Januari	369,37	249,26	120,11
Februari	340,36	152,24	188,12
Maret	431,76	255,36	176,40
Jan-Mar 2023	**1.141,49**	**656,86**	**484,63**

Sumber: BPS, 2023.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Menurut Bank Indonesia, Pada triwulan IV 2022, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh positif sebesar 5,57% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,40% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) pada periode laporan. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada lapangan usaha pertambangan dan perbaikan pada lapangan usaha konstruksi. Kendati demikian, terjadi perlambatan pada lapangan usaha lainnya di antaranya lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Adapun peningkatan pertumbuhan didorong oleh adanya perbaikan permintaan industri pengolahan domestik maupun dari mitra Sulawesi Tengah serta percepatan realisasi pembangunan proyek pemerintah. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara didorong oleh meningkatnya konsumsi pemerintah seiring percepatan realisasi di akhir tahun dan PMTB. Kendati demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan harga pangan maupun energi dan pertumbuhan impor yang masih terakselerasi. Secara tahunan, perekonomian Sulawesi Tenggara meningkat sebesar 5,53% (ctc) meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4.10% (ctc).

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,31% (ctc) pada tahun laporan. Pertumbuhan dari sisi penawaran didorong oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pertanian sedangkan dari sisi permintaan didorong oleh seluruh komponen pengeluaran dengan kontribusi tertinggi yaitu ekspor, Konsumsi RT, dan Konsumsi Pemerintah. Adapun akselerasi pertumbuhan didorong oleh adanya peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan di tahun 2022 dan realisasi berbagai bantuan pengendalian inflasi.

Perekonomian Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024, diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Namun hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan maupun faktor perlambatan yang terlihat baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Faktor pertumbuhan dari sisi penawaran, antara lain: Pembangunan pabrik baterai dan baja di Kabupaten Kolaka Utara oleh PT. Terra Paradisaea dengan investasi Rp130Triliun; Pembangunan 3 Kawasan Industri yang juga menjadi project strategis nasional dimana target 2024 sudah berproduksi. Kawasan yang telah berjalan yaitu IKIP; Beroperasinya FDNI ditengah pertambahan kapasitas terpasang OSS; Meningkatnya permintaan komoditas unggulan Sultra (antara lain nikel, CPO dan kakao, dan perikanan budaya) di pasar Internasional. Sedangkan faktor perlambatan dari sisi penawaran antara lain: Berakhirnya beberapa proyek strategis pemeritah provinsi Sulawesi Tenggara dan penurunan anggaran Bina Marga dari 600M menjadi 200M berpotensi memperlambat sektor konstruksi; Adanya pergeseran musim dimana musim hujan akan memuncak pada bulan Maret sesuai prediksi BMKG dan potensi terjadinya kemarau panjang akibat El Nino usai berakhirnya La Nina pada bulan Juni; Pengetatan pelaksanaan WPP 714 memperlambat pertumbuhan dari sisi perikanan. Dari sisi permintaan, faktor pertumbuhan antara lain: Berakhirnya periode PPKM dan persiapan pemilu berpotensi meningkatkan mobilitas dan konsumsi masyarakat dengan diadakannya berbagai event; Perwujudan investasi beberapa Kawasan industri diantaranya terdapat di konawe dengan investasi sebesar Rp58 triliun dan di Kendari sebesar Rp 14 triliun; Terakumulasinya investasi yang tidak tercatat di akhir 2022 sehingga meningkatkan nilai investasi dengan nilai yang cukup besar. Sedangkan faktor perlambatan dari sisi permintaan adalah Perlambatan konsumsi untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai respons kenaikan BI7DRR menjadi 5,50% di tahun 2022 dan masih berpotensi naik serta Perlambatan ekonomi global di tahun 2023 berpotensi menurunkan permintaan luar negeri yang berpengaruh pada kinerja ekspor

Indikator makro ekonomi daerah yang terkendali di posisi meningkat dan menurun, akan berpengaruh positif terhadap keuangan rumah tangga dan masyarakat. Jika kemampuan masyarakat meningkat maka kapasitas keuangan daerah Sulawesi Tenggara juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan social ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini, angka mempengaruhi pencapaian Tingkat pembangunan manusia (IPM). IPM Sulawesi Tenggara juga diasumsikan akan terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi makro.

Dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian daerah terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain; a) Mendorong diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor untuk mengurangi dampak ketidakpastian pada sektor pertambangan dan pengolahan logam dasar; b) Mendorong produksi dan produktivitas komoditas dengan tujuan pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor; c) Mendorong digitalisasi ekonomi Sulawesi Tenggara; d) Mendorong investasi; e) Mendorong pengembangan *quality tourism* yang berbasiskan UMKM melalui sinergi lintas

stakeholder dalam meningkatkan kualitas 4A *(Attraction, Accessibility, Amenity dan Ancilliary)* dan 2P (Promosi dan Pelaku Usaha/SDM).

Tabel 3.4. Realisasi Indikator Makro Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2024 Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi (%)		Proyeksi (%)	
		2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,50	3,50	5,5-6,5	6,0-6,5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,66	11,17	11,30-11,40	10,00-11,00
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,22	3,86	3,50-3,90	2,75-3,00
4.	IPM (Nilai)	71,66	72,23	73,00-73,30	73,00-73,30
5.	Rasio Gini	0,390	0,390	0,366-0,375	0,366-0,375

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target indikator makro dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan produksi dan produktifitas sumber daya alam berupa pertanian dan pertambangan. Selain itu peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan pertambangan melalui industri pengolahan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian Sulawesi Tenggara.
2) Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara yang mampu mendukung kegiatan mobilitas barang dan manusia. Dengan demikian membuka peluang investasi yang lebih luas dapat membuka peluang yang lebih tinggi dalam meningkatkan perekonomian Sulawesi Tenggara.
3) Kerjasama antar daerah untuk mengurai disparitas harga komoditas dan produk sektor berbasis SDA. Disparitas harga pemicu capaian indikator sosial ekonomi.
4) Peningkatan kinerja sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru yang berbasis SDA melalui peningkatan investasi dan pengembangan SDM pendukung pariwisata.
5) Penyelesaian mega proyek prioritas berupa Rumah Sakit Jantung dan Pembangunan Perpustakaan bertaraf internasional.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2024. Kebijakan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2024 akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan

transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada tahun anggaran 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara akan fokus pada penyelesaian proyek-proyek strategis yang belum tuntas dari Kepala Daerah periode sebelumnya yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2021-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19. Dalam mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui program pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2024, Pendapatan Daerah pada aspek Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Di sisi lain, Pendapatan Daerah masih bergantung dengan Transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 -2022

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
1	**Pendapatan Asli daerah**	**1.373.793.724.628,50**	**1 .419.667.152.161,09**
1.1	Pajak Daerah	1.052.629.511.015,00	1 .094.436.342.274,00
1.2	Retribusi Daerah	34.672.223.312,00	4 2.617.552.364,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	66.150.050.423,00	7 5.522.983.759,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	220.341.939.878,50	2 07.090.273.764,09
2	**Pendapatan Transfer**	**3.119.960.554.389,00**	**2 .979.353.296.423,00**
2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	440.637.413.046,00	7 34.217.716.261,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.456.620.465.000,00	1 .452.553.358.151,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	314.866.100.371,00	2 81.014.372.659,00

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	876.377.898.972,00	4 75.101.444.352,00
2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	31.458.677.000,00	3 6.466.405.000,00
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**35.496.874.787,00**	**98.932.714.356,00**
3.1	Pendapatan Hibah	35.496.874.787,00	98.932.714.356,00
JUMLAH PENDAPATAN		**4.529.251.153.804,50**	**4 .497.953.162.940,09**

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah direalisasikan mengalami penurunan, yakni pada tahun 2021 total sebesar 4,529 triliun rupiah, turun menjadi 4,497 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,419 triliun rupiah yang semula sebesar 1,373 triliun rupiah (2021). Peningkatan PAD tersebut meliputi: Pajak Daerah sebesar 1,094 triliun rupiah (2022) dari semula sebesar 1,052 triliun rupiah (2021), Retribusi Daerah sebesar 42,617 milyar rupiah (2022) yang semula sebesar 34,672 milyar rupiah (2021) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 75,522 milyar rupiah (2022) yang semula sebesar 66,150 milyar rupiah (2021). Peningkatan PAD tersebut tidak diikuti dengan pendapatan dari transfer. Hal ini disebabkan karena pendapatan bersumber dari transfer pusat ke daerah mengalami penurunan dari total 3,119 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,979 triliun rupiah pada tahun 2022. Penurunan Pendapatan Transfer disebabkan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu: pada tahun 2021 sebesar 1,456 triliun rupiah menjadi sebesar 1,452 triliun rupiah pada tahun 2022. Demikian pula pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula sebesar 314 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 281 milyar rupiah pada tahun 2022. Sementara DAK Non Fisik semula sebesar 876 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 475 milyar rupiah pada tahun 2022. Disisi lain, pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan, yang semula sebesar 440 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 734 milyar rupiah pada tahun 2022. Demikian pula pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 36,466 milyar rupiah dari semula sebesar 31,458 milyar rupiah. Pada sumber lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar 98,932 milyar rupiah pada tahun 2022 dari semula sebesar 35,496 milyar rupiah pada tahun 2021.

Tabel 3.6. Target dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
1	**Pendapatan Asli daerah**	**1.625.581.261.248**	**1.668.498.552.000**
1.1	Pajak Daerah	1.340.534.498.345	1.340.534.498.000
1.2	Retribusi Daerah	46.614.586.075	63.540.805.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	64.694.885.668	78.280.811.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	173.737.291.160	186.142.438.000
2	**Pendapatan Transfer**	**2.930.074.487.050**	**2.930.074.487.000**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.930.074.487.050	2.930.074.487.000
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.483.085.800**	**1.483.085.000**
3.1	Pendapatan Hibah	1.483.085.800	1.483.085.000
JUMLAH PENDAPATAN		**4.557.138.834.098**	**4.600.056.124.000**

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Proyeksi pendapatan pada tabel di atas diasumsikan jika kondisi makro ekonomi nasional dan daerah semakin membaik pasca dihapusnya status Pandemi Covid-19 yang berarti kehidupan sosial-ekonomi masyarakat giat kembali, sehingga Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan mencapai 4,557 triliun rupiah dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2024 mencapai 4,600 triliun rupiah. Komponen Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 direncanakan mencapai 1,625 triliun dan pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat sebesar 1,668 triliun rupiah. PAD dari pajak daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun 2023, sementara pendapatan dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan. Adapun Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023 direncanakan akan diperoleh sebesar sebesar 2,930 triliun rupiah. Namun, Pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 belum dapat dipastikan hingga RKPD ini ditetapkan, sehingga dapat diasumsikan beberapa komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan jumlah yang direalisasikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, maka pada tahun 2024 diproyeksikan penerimaan DTU-DBH sebesar 534,044 miliar rupiah, DTU-DAU sebesar 1,507 triliun rupiah, DTK-DAK (Fisik dan Non Fisik) sebesar 888 miliar rupiah, maka total Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dapat diproyeksikan sebesar 2,930 triliun rupiah. Demikian pula pendapatan daerah dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2023 mencapai 1,483 miliar rupiah dan diproyeksikan sama pada tahun 2024.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut diyakini berasal dari adanya peningkatan dari semua sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di asumsikan bahwa Pajak tetap akan berkontribusi paling besar pada komponen Pendapatan Asli Daerah karena merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari daerah, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah daerah melalui kebijakan keuangan daerah. Demikian pula retribusi daerah diharapkan dapat mengalami peningkatan seiring dengan upaya optimasi retribusi yang bersumber dari pelayanan dan penggunaan aset pemerintah daerah.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara menerapan strategi kebijakan peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, yaitu: 1) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 3) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 5) Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan 6) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun komponen dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat di asumsikan juga akan terus meningkat. Komponen ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya kebijakan keuangan negara ke depan, untuk mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Khususnya DAU pada tahun 2023 mengalami perubahan kebijakan terkait penggunaan anggaran tersebut, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, antara lain: penggunaan bagian DAU untuk pengganjian formasi PPPK dan penggunaan bagian DAU bidang

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, khususnya yang dilakukan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar, sehingga kebijakan penggunaan anggaran yang bersumber dari DAU pada tahun 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024 dana perimbangan khususnya DAK Fisik diperkirakan meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam menuntaskan semua prioritas pembangunan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan karena pada tahun 2024 merupakan tahun akhir periode RPJMN 2020-2024.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah. Instrumen menjadi strategis karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah daerah dapat secara langsung memanfaatkan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
	BELANJA	**4.495.870.207.049**	**4.862.530.576.022**
1.	**BELANJA OPERASI**	**2.754.858.067.032**	**2.693.121.520.974**
1.1	Belanja Pegawai	1.475.632.390.431	1.549.812.011.845
1.2	Belanja Barang dan Jasa	770.685.412.031	939.037.070.368
1.3	Belanja Bunga	20.692.768.602	50.724.644.713
1.4	Belanja Hibah	483.094.420.968	139.639.044.048
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.753.075.000	13.908.750.000
2.	**BELANJA MODAL**	**1.246.770.023.310**	**1.599.982.654.743**
2.1	Belanja Modal Tanah	31.766.122.103	16.028.077.002
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.029.032.823	301.517.985.503
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.517.578.611	584.374.195.137
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	535.296.261.162	679.027.941.541
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.161.028.611	19.034.455.560
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**238.208.325**	**56.532.093**
3.1.	Belanja Tidak Terduga	238.208.325	56.532.093
4.	**BELANJA TRANSFER**	**494.003.908.382**	**569.369.868.212**
4.1	Belanja Bagi Hasil	473.897.757.482	535.311.259.273
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	20.106.150.900	34.058.608.939
	Jumlah Belanja	**4.495.870.207.049**	**4.862.530.576.022**

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Secara umum, belanja daerah telah direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer, maupun yang dilaksanakan di luar rencana karena kondisi kedaruratan/mendesak atau kondisi tertentu melalui belanja tidak terduga. Penggunaan anggaran tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan direalisasikan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan target-target pembangunan yang telah direncanakan, terutama pada target-target pembangunan yang belum tercapai dan menjadi prioritas nasional.

Pada tahun 2021 dan 2022 pendapatan daerah menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Realisasi belanja pada tahun 2022 meningkat mencapai 4,862 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2021 mencapai 4,495 triliun rupiah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian masyarakat mulai meningkat, meskipun dalam kondisi tertentu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih memperhatikan protokol kesehatan, namun bukan menjadi kendala karena telah beradaptasi pada kebiasaan baru atau kondisi “new normal”. Pada komponen belanja operasi, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 2,754 triliun rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 2,693 triliun rupiah. Pada komponen Belanja Modal pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 1,599 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1,246 triliun rupiah. Pada komponen Belanja Transfer mengalami peningkatan dari semula sebesar 494 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 569 miliar rupiah pada tahun 2022, belanja ini diperuntukkan bagi kabupaten dan kota dan masyarakat melalui Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Sementara komponen Belanja Tidak Terduga direalisasikan dalam kondisi tertentu atau darurat/mendesak sesuai dengan peruntukkannya. Pada tahun 2022 Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar 56 juta rupiah, lebih kecil dari tahun 2021 sebesar 238 juta rupiah.

Tabel 3.8. Target dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
	BELANJA	**4.912.167.261.707**	**4.943.718.934.500**
1.	**BELANJA OPERASI**	**2.827.157.725.878**	**2.825.789.270.000**
1.1	Belanja Pegawai	1.628.831.274.282	1.448.399.015.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.042.042.508.305	1.146.246.759.000
1.3	Belanja Bunga	60.000.000.000	70.000.000.000
1.4	Belanja Hibah	90.135.943.291	154.380.696.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.148.000.000	6.762.800.000
2.	**BELANJA MODAL**	**1.309.429.678.987**	**1.413.465.709.000**
2.1	Belanja Modal Tanah	2.780.409.119	3.058.450.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.642.963.375	233.907.259.000
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	678.978.438.076	721.000.000.000
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.451.405.417	435.500.000.000
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.576.463.000	20.000.000.000
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**23.856.826.000**	**25.000.000.000**
3.1.	Belanja Tidak Terduga	23.856.826.000	25.000.000.000
4.	**BELANJA TRANSFER**	**751.723.030.842**	**679.463.955.500**
4.1	Belanja Bagi Hasil	677.723.030.842	677.723.030.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	74.000.000.000	1.740.925.500
	Jumlah Belanja	**4.912.167.261.707**	**4.943.718.934.500**

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Kebijakan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belanja Daerah diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada

urusan-urusan pemerintahan daerah baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi terkait bidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), serta memenuhi ketentuan dalam belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberlakuan kebijakan penggunaan DAU yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagaimana tahun anggaran 2023. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebagai aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2024 untuk merealisasikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2024. Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2024 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang belum dituntaskan pada tahun sebelumnya. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, berdasarkan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya merekomendasikan beberapa program prioritas pembangunan akan terus dilanjutkan karena belum mencapai target-target pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Selain itu, belanja tahun 2024 difokuskan pula pada tugas-tugas mandatori sesuai peraturan perundang-undangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis nasional dan daerah, seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan *stunting*, penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Besaran anggaran yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas-tugas mandatori adalah sebagai berikut; untuk pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); untuk kesehatan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, dimana telah direncanakan penganggaran melalui dua tahapan yaitu 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yang bersumber dari (1) pelampauan penerimaan dana perimbangan, baik itu bagi hasil pajak maupun DAU, (2) pelampauan penerimaan lain lain pendapatan yang sah berasal dari hibah pemerintah pusat dan (3) Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang

berasal dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tak terduga, dan melakukan penerimaan pinjaman daerah.

Pada tahun 2024 APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada struktur Pembiayan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari (1) Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 -2024

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
1	**Penerimaan pembiayaan**	**816.223.101.702**	**1.293.103.189.002**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.472.473.491	824.604.048.457
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	457.750.628.211	468.499.140.545
2	**Pengeluaran pembiayaan**	**25.000.000.000**	**48.656.923.392**
2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	0
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	48.656.923.392
	Jumlah Pembiayaan Netto	**791.223.101.702**	**1.244.446.265.610**

Sumber: Bappeda, 2023 diolah.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Pada tahun 2021 terealisasi sebesar 816 miliar rupiah dan tahun 2022 sebesar 1,293 triliun rupiah. Penerimaan dari SiLPA tahun 2021 mencapai 357 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 824 miliar rupiah, sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari pihak PT. SMI yang diberikan secara bertahap, pada tahun 2021 mencapai 457 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 468 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah khususnya pada Bank Sultra dan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pada tahun 2021 pengeluaran pembiayaan hanya diperuntukkan pada penyertaan modal daerah sebesar 25 miliar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 diperuntukkan pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 48 miliar rupiah. Pembiayaan Netto diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan belanja yang belum tercukupi dari pendapatan daerah.

Tabel 3.10. Target dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
1	**Penerimaan pembiayaan**	**630.028.427.609**	**688.662.810.500**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	533.817.790.526	688.662.810.500
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	96.210.637.083	0
2	**Pengeluaran pembiayaan**	**275.000.000.000**	**345.000.000.000**

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
2.1	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	255.000.000.000	325.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	**355.028.427.609**	**343.662.810.500**

Sumber: Bappeda, 2023 diolah.

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan SiLPA dari komponen Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 533 miliar, bersumber dari pelampuan penerimaan PAD sebesar 26 miliar rupiah, pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar 455 miliar rupiah, pelampauan penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 13 miliar rupiah, dan penghematan belanja sebesar 26 miliar rupiah. Pada tahun 2024 penerimaan SiLPA diproyeksikan sebesar 688 miliar rupiah, sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat atau PT. SMI pada tahun 2023 sebesar 96 miliar dan merupakan tahun terakhir penyaluran pinjaman tersebut. Pada komponen Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal Daerah sebesar 20 miliar tetap direncanakan pada tahun 2023 dan 2024. Untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan pada tahun 2023 sebesar 255 miliar rupiah dan tahun 2024 sebesar 325 miliar rupiah.

Bab IV
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Untuk mencapai hal-hal tersebut, perlu adanya keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk keselarasan perencanaan pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) dan Program Prioritas Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tema dari RKP 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ."** Dari tema tersebut, terdapat tujuh arahan presiden terkait Prioritas Nasional dalam RKP 2024 yaitu 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh Prioritas Nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tema RKP Tahun 2024.

Sebagai bentuk sinkronisasi dengan RKP Tahun 2024, maka tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah **"Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif."** Wujud dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RKPD tersebut tentunya harus sesuai dengan kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sejalan dengan sasaran dan target nasional maka sasaran dan target pembangunan Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,57 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,98 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,28 persen. Untuk target tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diperkirakan sebesar 6,0-6,5 persen.
2) Persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara pada September 2022 sebesar 11,27 persen (314.740 jiwa), meningkat dibandingkan Maret 2022 sebesar 11,17 persen (309.790 jiwa), maka target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024 diperkirakan menurun sebesar 10,00-11,00 persen.
3) Pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 mencapai 72,23. Capaian tersebut naik dibandingkan dengan pencapaian IPM tahun 2021 yaitu 71,66. Sementara itu, target IPM untuk Tahun 2024 adalah sebesar 73,00 - 73,30.
4) Angka Gini Rasio pada September 2022 mengalami penurunan sebesar 0,370 Maret 2022 sebesar 0,390. Target Gini Rasio untuk Tahun 2024 adalah sebesar 0,366 –0,375.
5) Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Agustus 2022 adalah sebesar 3.36 persen menurun dari 3,86 persen pada Februari 2022 dan 3,92 persen pada Agustus 2021. Target Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebesar 2,75-3,00 persen.

Penyusunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2024 mempertimbangkan potensi, isu dan permasalahan, dan hasil analisis serta evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD Tahun 2024 juga mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2024 dan menjadi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tujuan RPD 2024-2026 *(Tahun Perencanaan 2024)* /RKPD Tahun 2024	**Sasaran RPD 2024-2026 *(Tahun Perencanaan 2024)* /RKPD Tahun 2024**
Tujuan1: ***Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul & Kompetitif*** **Indikator:** ***Indeks Pembangunan Manusia***	Sasaran 1. *Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan* Indikator: • *Rata-Rata Lama Sekolah* • *Harapan Lama Sekolah*
	Sasaran 2. *Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan* Indikator: *Angka Harapan Hidup Saat Lahir*
Tujuan 2: ***Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik***	Sasaran 3. *Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat* Indikator:

Tujuan RPD 2024-2026 *(Tahun Perencanaan 2024)* /RKPD Tahun 2024	Sasaran RPD 2024-2026 *(Tahun Perencanaan 2024)* /RKPD Tahun 2024
Indikator: ***Persentase Penduduk Miskin***	*Pengeluaran Perkapita Disesuaikan*
	Sasaran 4. *Menurunnya Kesejangan Pendapatan Masyarakat* Indikator: *Gini Rasio*
	Sasaran 5. *Meningkatnya Ketersediaan, Akses, & Kualitas Konsumsi Pangan* Indikator: • *Skor Pola Harapan Pangan* • *Prevalensi Stunting*
Tujuan 3: ***Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan*** **Indikator:** ***Laju Pertumbuhan Ekonomi***	Sasaran 6. *Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan* Indikator: • *Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan* • *Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertambangan dan Penggalian* • *Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan*
	Sasaran 7. *Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lap. Kerja* Indikator: *Tingkat Pengangguran Terbuka*
	Sasaran 8. *Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi* Indikator: *Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)*
	Sasaran 9. *Meningkatnya konektivitas antarwilayah* Indikator: *Indeks Infrastruktur*
	Sasaran 10. *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* Indikator: *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*
	Sasaran 11. *Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana* Indikator: *Indeks Resiko Bencana*
Tujuan 4: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***	Sasaran 12. *Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*

Tujuan RPD 2024-2026 *(Tahun Perencanaan 2024)* /RKPD Tahun 2024	Sasaran RPD 2024-2026 *(Tahun Perencanaan 2024)* /RKPD Tahun 2024
Indikator: ***Indeks Reformasi Birokrasi***	Indikator: • *Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah* • *Opini Laporan Keuangan*
	Sasaran 13. *Meningkatnya Kualitas Layanan Publik* Indikator: *Indeks Pelayanan Publik*

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra Tahun 2024-2026.

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 harus bersinergi dengan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
   - peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
   - peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
   - peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
   - pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).

b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
   - pengelolaan hutan berkelanjutan;
   - penyediaan air untuk pertanian;
   - penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
   - pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
   - pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
   - peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
   - peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
   - peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
   - peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
   - peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
   - peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

- peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
- peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
- peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
- peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
- peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- pengembangan industri halal.

g) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- pengelolaan impor;
- peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
- peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
- peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan pendalaman sektor keuangan;
- optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;

- peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
- peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
- peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. pengentasan kemiskinan; dan
g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
   - percepatan cakupan administrasi kependudukan;
   - integrasi sistem administrasi kependudukan;
   - pendampingan dan layanan terpadu; dan

- pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - sistem jaminan sosial nasional;
   - bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   - kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   - percepatan perbaikan gizi masyarakat;
   - peningkatan pengendalian penyakit;
   - penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
   - penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
     - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
     - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
     - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
     - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
     - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
   - pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
   - peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
   - penjaminan mutu pendidikan; dan
   - peningkatan tata kelola pendidikan.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - pemenuhan hak dan perlindungan anak;
   - peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
   - kualitas pemuda.

b) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
   - keperantaraan usaha dan dampak sosial;
   - reforma agraria; dan
   - perhutanan sosial.

c) Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;

- penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
- prestasi olahraga.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
   - revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
   - revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
   - penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
   - pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
   - pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   - pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
   - pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
   - pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
   - pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
   - penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
   - penyelarasan relasi agama dan budaya;
   - peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
   - pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - peningkatan budaya literasi;
   - pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   - pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   - penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
   - penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
   - pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
   - keselamatan dan keamanan transportasi;
   - ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
   - waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.

b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   - konektivitas jalan;
   - konektivitas kereta api;

- konektivitas laut;
- konektivitas udara; dan
- konektivitas darat.

c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- transportasi perkotaan; dan
- infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
- akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
- kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
- fasilitas pendukung transformasi digital.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- penanggulangan bencana; dan
- peningkatan ketahanan iklim.

c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- pembangunan energi berkelanjutan;

- pemulihan lahan berkelanjutan; dan
- pengembangan industri hijau

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
   c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
   a. Konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      - penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
      - penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
      - peningkatan kualitas komunikasi publik.
   b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      - penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
      - penguatan kerjasama pembangunan internasional.
   c. Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      - penguatan implementasi manajemen ASN;
      - transformasi pelayanan publik;
      - penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
      - reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
   d. Menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      - penguatan keamanan dalam negeri;
      - penguatan keamanan laut; dan
      - penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Prioritas pembangunan merupakan strategi dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan isu/permasalahan yang dihadapi baik secara nasional maupun lingkup kewilayahan dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah. Berikut merupakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024:

1. Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif

Fokus Pada:

1) Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menengah.
2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional dan tetap fokus pada permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas daerah, al: Penanganan *Stunting.*

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik

   Fokus Pada:

   1) Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
   2) Meningkatkan kapasitas sektor riil & menciptakan iklim usaha kondusif.
   3) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bg masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan

   Fokus Pada:

   1) Mendorong transformasi ekonomi pada Sektor Pariwisata, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
   2) Peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

   Fokus Pada:

   1) Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan SPBE (SIPD, SDI, dll).
   2) Optimalisasi inovasi daerah.

Bab V
Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Penjabaran dari strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam suatu arahan kebijakan yang berisikan mengenai kerangka pikir atau kerangka kerja yang bertujuan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Arahan kebijakan tersebut, disusun secara bertahap yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
   e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;

- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Selain itu, arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Tabel 5.1. Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Mutu Pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas	• Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. • Meningkatkan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. • Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja. • Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi. • Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. • Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik.

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 2: Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Mutu Kesehatan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan	• Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. • Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar • Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Sasaran 3: Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.	• Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan • Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
	Sasaran 4 : Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Menciptakan iklim usaha kondusif.	• Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
	Sasaran 5: Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat	• Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan;
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Penerapan teknologi tepat guna & hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam.	• Peningkatan produksi & produktivitas pertanian,kehutanan & perikanan. • Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga	Memperluas kesempatan kerja &peluang usaha	• Meningkatkan kapasitas dan

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja		keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital & teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Optimalisasi pengelolaan potensi investasi	• Meningkatkan promosi investasi & memperbanyak sumber & jenis investasi
	Sasaran 9 : Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antarwilayah , kawasan strategis dan simpul-simpul trasportasi untuk menunjang ekonomi masyarakat.	• Peningkatan kualitas jalan & jembatan menuju/dalam kawasan strategis & antar kab/kota. • Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan & Pelabuhan Pengumpan Regional
	Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	• Pengendalian pencemaran & kerusakan lingkungan hidup darat, laut & udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup.
	Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Mengurangi risiko bencana.	• Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat & pasca bencana.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sasaran 12: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	• Melakukan penataan & penguatan organisasi yang efektif & efisien. • Meningkatkan profesionalisme aparatur. • Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.
	Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
			• Meningkatkan pengawasan pembinaan aparatur & penerapan budaya kerja yang bersih & bebas KKN. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan & inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra Tahun 2024-2026.

5.2. PENGEMBANGAN WILAYAH

Ketimpangan wilayah dapat dilihat beberapa indikator kunci pada aspek sosial dan ekonomi, diantaranya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Gini Ratio Maret 2023 berada pada angka 0,371, berdasarkan data tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan 0,005 poin jika dibandingkan dengan periode September 2022 yang sebesar 0,366, namun turun 0,016 poin dibandingkan periode Maret 2022 yang sebesar 0,387. Kondisi juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu wilayah sehingga untuk periode Maret 2022 – Maret 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat digambarkan melalui pendekatan kewilayahan sesuai karateristik wilayah yaitu antara wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi ketimpangan tersebut dapat ditunjukkan dengan data kinerja pembangunan masing-masing kabupaten dan kota berdasarkan indikator makro pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB Perkapita, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Diharapkan indikator tersebut akan memberikan gambaran secara utuh terkait dengan kondisi ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.2. Data Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten dan Kota

Kab/Kota	2021						2022					
	TPT	Kemiskinan*		IPM	LPE** (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	TPT	Kemiskinan*		IPM	LPE** (%)	**PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)**
		Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)					Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)			
Buton	4,74	14,25	13,92	66,32	2,62	24,326	2,99	13,612	13,27	67,23	5,76	25,229
Muna	4,97	30,54	13,54	69,17	3,16	23,88	3,11	30,475	13,41	69,61	5,9	24,799
Konawe	4,56	32,46	13,03	71,48	7,78	30,463	2,73	32,087	12,75	72,04	15,38	34,465
Kolaka	3,62	33,45	12,43	73,56	4,02	78,571	4,17	31,555	11,51	73,98	2,42	78,91
Konawe Selatan	2,14	36,17	11,34	68,58	4,76	27,662	2,95	35,794	11,08	69,36	5,85	28,804
Bombana	3,17	19,73	10,76	66,25	3,49	32,08	1,47	19,211	10,26	66,81	5,11	33,413

Kab/Kota	2021						2022					
	TPT	Kemiskinan*		IPM	LPE** (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	TPT	Kemiskinan*		IPM	LPE** (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
		Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)					Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)			
Wakatobi	2,3	15,3	14,91	69,87	4,02	28,473	3,53	15,005	14,55	70,86	4,8	29,279
Kolaka Utara	3,18	21,36	13,79	69,5	2,68	46,903	2,86	20,631	13,08	70,39	3,85	48,046
Buton Utara	3	9,45	14,89	68,08	4,08	34,595	2,1	9,132	14,26	69	5,01	35,626
Konawe Utara	3,36	9,26	14,32	70,23	4,59	42,899	2,01	9,022	13,72	71,1	5,07	44,2
Kolaka Timur	3,44	20,03	14,35	67,76	4,83	28,222	2,22	19,327	13,57	68,73	4,47	29,439
Konawe Kepulauan	1,83	5,98	17,81	65,73	2,3	28,457	1,85	5,472	16,15	66,69	3,23	28,808
Muna Barat	2,84	11,55	13,96	65,48	3,96	22,696	2,4	11,563	13,85	66,21	4,08	23,587
Buton Tengah	3,77	14,73	15,8	64,55	3,12	15,094	2,63	13,923	14,9	65,29	3,86	15,373
Buton Selatan	3,92	11,71	14,62	64,99	2,29	21,789	4,18	11,571	14,41	65,44	3,9	22,605
Kota Kendari	5,19	19,46	4,87	84,15	3,86	49,006	5,23	18,717	4,57	84,51	4,94	50,492
Kota Baubau	6,87	13,3	7,78	76,26	4,15	42,420	5,39	12,69	7,31	76,67	5,28	43,948
Sulawesi Tenggara	**3,92**	**318,7**	**11,66**	**71,66**	**4,1**	**36,8**	**3,36**	**309,79**	**11,17**	**72,23**	**5,53**	**XXX**

Sumber: BPS,2023 (diolah)
* referensi waktu maret
** angka sementara
*** angka sangat sementara

Gambaran ketimpangan pembangunan yang ditunjukkan dengan data kinerja pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 memiliki kecenderungan yang sama, dimana data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan pada wilayah daratan dan kepulauan khususnya untuk 5 (empat) indikator sosial dan ekonomi, dimana data kinerja pada Tahun 2022 untuk wilayah daratan dan kepulauan yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja semua indikator pada wilayah daratan berada di atas capaian kinerja daerah di wilayah kepulauan, walaupun pada indikator kemiskinan yang menunjukkan jumlah jiwa angka kemiskinan lebih banyak di wilayah daratan, namun dari data persentase angka kemiskinan menunjukkan kinerja yang sebaliknya. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 5.2. serta untuk gambaran ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (daratan dan kepulauan) dapat dilihat pada Gambar 5.1.

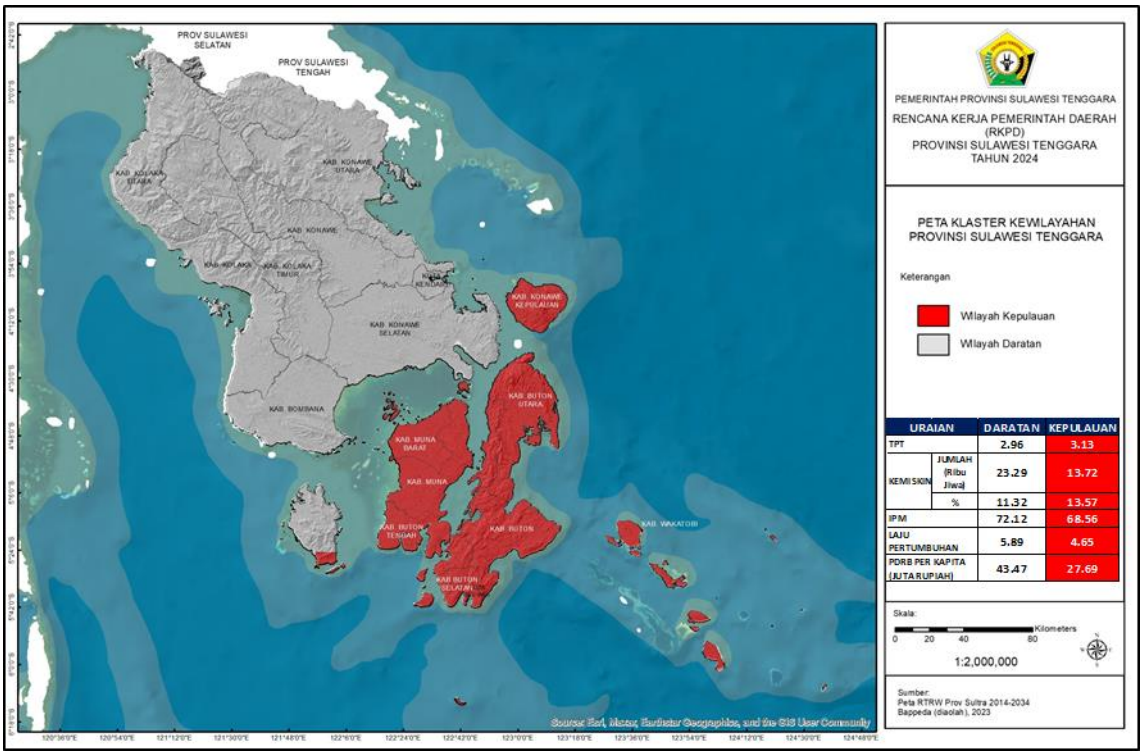

Sumber: Bappeda Prov, Sultra, 2023

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Wilayah Kepulauan
Wilayah Daratan

Gambar 5.1.
Peta Gambaran Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai Indikator Makro Pada Tahun 2022

Tabel 5.3. Data Rata-Rata Kinerja Indikator Makro Kabupaten/Kota pada Wilayah Daratan dan Kepulauan Tahun 2022

Wilayah	TPT	Kemiskinan*		IPM	Pertumbuhan Ekonomi**	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)***
		Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)			
DARATAN	2.96	23.29	11.32	72.12	5.89	43.47
KEPULAUAN	3.13	13.72	13.57	68.56	4.65	27.69

Sumber: Bappeda 2023 (Data Diolah)

* referensi waktu maret
** angka sementara
*** angka sangat sementara

5.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2024

Berdasarkan kondisi ketimpangan tersebut, pendekatan perencanaan kewilayahan dirumuskan menjadi 2 klaster wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan konsep arahan pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah Daratan

   Fokus strategis pengembangan di wilayah daratan mencakup beberapa hal yaitu:

   1) Mengembangan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lahan sawah dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional dengan sistem

perkotaan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan perwujudan peningkatan ekonomi di wilayah perdesaan. Dengan arah pengembangan:

- Menetapkan lahan sawah pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan sebagai sentra produksi hasil pertanian;
- Menetapkan pusat pengolahan pertanian di Kabupaten Kolaka Timur dengan dukungan produksi dari wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan; dan
- Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.

2) Mengembangan kawasan pesisir Kota Kendari dan Kabupaten Konawe dengan fungsi sebagai pusat pengolahan industri perikanan dan kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan arah pengembangan:
   - Mengembangkan destisasi wisata potensial di wilayah pesisir dan pulau kecil termasuk di sekitar Jembatan Teluk Kendari dan sepanjang jaringan jalan Kendari – Toronipa;
   - Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di wilayah Kota Kendari yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pelabuhan Perikanan Samudera);
   - Mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah darat, pesisir dan pulau kecil yang dapat berpotensi menghambat pengembangan destinasi wisata dan menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap; dan
   - Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata khususnya di wilayah pulau kecil
3) Mengembangan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan. Dengan arah pengembangan:
   - Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan;
   - Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan;
   - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung.

2. Wilayah Kepulauan

   Fokus strategis pengembangan di wilayah daratan mencakup beberapa hal yaitu:

   1) Mengembangan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan arah pengembangan:
      - Menetapkan kawasan sentra produksi perikanan tangkap di wilayah perairan Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau Wawonii serta sentra produksi perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Menetapkan kawasan pusat pengolahan komoditas perikanan di wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kota Baubau, dan Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
- Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.

2) Mengembangan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil. Dengan arah pengembangan:
   - Menetapkan kawasan pengembangan akomodasi pariwisata di Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko;
   - Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan Wangi-Wangi;
   - Mengembangkan destinasi wisata buatan di wilayah darat yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata laut; dan
   - Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut pada kawasan konservasi Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi.
3) Mengembangan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan. Dengan arah pengembangan:
   - Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan;
   - Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan;
   - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung.

Gambar 5.2. Konsep Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara

Bab VI
Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024. Penetapan program dan kegiatan prioritas berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan mengacu pada arah kebijakan pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2024.

Usulan program dan kegiatan berimplikasi pada penganggaran yang bersifat indikatif dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 diuraikan pada matriks berikut ini :

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1	**01**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**						**1.365.813.296.908**	**1.492.021.068.245**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.360.612.268.603**	**1.486.299.937.109**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			**630.184.858.158**	**689.818.677.170**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.856.516.549**	**2.068.575.244**
1	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	101.057.000	111.162.700
1	*01*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	721.237.049	793.360.754
1	*01*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	101.057.000	137.569.740
1	*01*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	633.165.500	696.482.050
1	**01**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**613.629.456.602**	**671.581.328.417**
1	*01*	*01*	*1,02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*6567 Orang/ Bulan*	611.532.591.462	670.044.776.762
1	*01*	*01*	*1,02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	800.000.000	110.000.000
1	*01*	*01*	*1,02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	545.413.140	599.954.455
1	*01*	*01*	*1,02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	19.800.000	21.780.000
1	*01*	*01*	*1,02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	97.603.000	107.363.300
1	*01*	*01*	*1,02*	*06*	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*	*01*	*1,02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	434.049.000	477.453.900
1	*01*	*01*	*1,02*	*08*	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**213.139.300**	**234.453.230**
1	*01*	*01*	*1,03*	*01*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 laporan*	*213.139.300*	*234.453.230*
1	**01**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.103.947.090**	**1.214.341.800**
1	*01*	*01*	*1,05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 dokumen*	45.978.900	50.576.790
1	*01*	*01*	*1,05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 dokumen*	820.498.558	902.548.414
1	*01*	*01*	*1,05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*1 orang*	237.469.632	261.216.596
1	**01**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.386.502.855**	**2.625.153.141**
1	*01*	*01*	*1,06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	707.356.485	778.092.134
1	*01*	*01*	*1,06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	222.647.370	244.912.107
1	*01*	*01*	*1,06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	254.947.000	280.441.700
1	*01*	*01*	*1,06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 dokumen*	107.052.000	117.757.200
1	*01*	*01*	*1,06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	1.094.500.000	1.203.950.000
1	**01**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**5.018.443.100**	**5.520.287.410**
1	*01*	*01*	*1,07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 unit*	509.388.000	560.326.800
1	*01*	*01*	*1,07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 unit*	4.509.055.100	4.959.960.610
1	**01**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.482.883.062**	**2.731.171.368**
1	*01*	*01*	*1,08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 laporan*	22.000.000	24.200.000
1	*01*	*01*	*1,08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 laporan*	688.707.162	757.577.878
1	*01*	*01*	*1,08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	1.772.175.900	1.949.393.490

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**3.493.969.600**	**3.843.366.560**
1	*01*	*01*	*1,09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 unit*	543.697.000	598.066.700
1	*01*	*01*	*1,09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 unit*	200.970.000	221.067.000
1	*01*	*01*	*1,09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*	2.749.302.600	3.024.232.860
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Angka Partisipasi Anak Usia 16 -18 Tahun Angka Partisipasi Anak Usia 4-18 Tahun Angka Partisipasi Murni SLTA Sederajad Angka Partisipasi Kasar SLTA Sederajad**	**100 % 100 % 100 % 100 %**	**595.775.355.599**	**655.352.891.159**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Angka Partisipasi Kasar SMA Angka Partisipasi Murni SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional**	**100 % 63,60 % 100 % 53,35 % 89,3 % 88,63 % 83,12 %**	**331.907.657.070**	**365.098.422.777**
1	*01*	*02*	*1.01*	*01*	*Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	13.120.144.986	14.432.159.485
1	*01*	*02*	*1.01*	*03*	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*50 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*10*	*Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*11*	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	*50 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*12*	*Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	436.256.700	479.882.370
1	*01*	*02*	*1.01*	*13*	*Pembangunan Asrama Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*14*	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	125.635.383.874	138.198.922.261
1	*01*	*02*	*1.01*	*15*	*Pembangunan Fasilitas Parkir*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	114.538.600	125.992.460
1	*01*	*02*	*1.01*	*16*	*Pembangunan Kantin Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*19*	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*20 Ruang*	1.589.901.720	1.748.891.892
1	*01*	*02*	*1.01*	*20*	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*20 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*22*	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	500 Paket	1.000.000.000	1.100.000.000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	2.507.560.000	2.758.316.000
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	3.982.453.750	4.380.699.125
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	6.876.995.840	7.564.695.424
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	350 Satuan Pendidikan	170.733.607.000	187.806.967.700
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	350 Orang	440.000.000	484.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	55	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	56	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	50 orang	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 orang	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 konten digital	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 orang	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01	2	1.01	63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	17 Komunitas	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	64	Penyediaan infrastruktur TIK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	100 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100 Kegiatan	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	66	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima Peserta Didik	50 Buku	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	47 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	71	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.270.814.600	1.397.896.060
1	01	2	1.01	73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	74	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	75	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	76	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang telah Ditata	1 Ruang	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*	*2*	*1.01*	*77*	*Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.01*	*78*	*Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian*	*1 Satuan Pendidikan*	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Angka Partisipasi Kasar SMK Angka Partisipasi Murni SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**		**235.937.275.579**	**259.531.003.137**
1	*01*	*02*	*1.02*	*01*	*Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*03*	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*04*	*Pembangunan Ruang Praktik Siswa*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun*	*100 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*05*	*Pembangunan Ruang Laboratorium*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*06*	*Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*07*	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*08*	*Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*09*	*Pembangunan Asrama Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*10*	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*30 Unit*	151.665.533.690	166.832.087.059
1	*01*	*02*	*1.02*	*11*	*Pembangunan Fasilitas Parkir*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*12*	*Pembangunan Kantin Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*16*	*Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*18*	*Rehabilitasi Ruang Laboratorium*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*19*	*Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi*	*1 Ruang*	2.009.172.677	2.210.089.945
1	*01*	*02*	*1.02*	*28*	*Pengadaan Mebel Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	*1 Paket*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*29*	*Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*	*1 Paket*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.02*	*30*	*Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	*1000 Paket*	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	478.304.200	526.134.620
1	01	02	1.02	48	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	49	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	385.488.400	424.037.240
1	01	02	1.02	56	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendidik SMK yang mendapat setifikat kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	58	Penyedia infrastruktur TIK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	60	Fasilitasi sertifikasi kompetensi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta didik yang memiliki kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima Peserta Didik	1 Buku	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	3.340.782.571	3.674.860.828
1	01	02	1.02	63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	421.066.041	463.172.645
1	01	02	1.02	64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	72.736.928.000	80.010.620.800
1	01	02	1.02	65	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	66	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	67	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	68	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang telah Ditata	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	70	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitas sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	71	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	74	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	75	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	*02*	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.**	**59,58 % 95,40 % 71,41 % 88,52 % 52,78 % 59,40 % 83,34 % 68,61 % 91,94 % 58,87 % 90,41 % 86,43 % 88,51 % 82,74 % 100 %**	**27.930.422.950**	**30.723.465.245**
1	*01*	*02*	*1.03*	*01*	*Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*03*	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*04*	*Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*05*	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*06*	*Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*07*	*Pembangunan Asrama Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*08*	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*09*	*Pembangunan Fasilitas Parkir*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*10*	*Pembangunan Kantin Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*12*	*Pembangunan Ruang Laboratorium*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*13*	*Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*15*	*Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	54	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	55	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	62	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidikan Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik Satuan Pendidik Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	63	Penyediaan infrastruktur TIK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	64	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	65	Fasilitasi sertifikasi kompetensi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	68	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepaa Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.361.804.950	1.497.985.445
1	01	02	1.03	69	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	100 Ruang	20.968.618.000	23.065.479.800
1	01	02	1.03	71	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	72	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	74	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	75	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitas sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*	*02*	*1.03*	*76*	*Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*77*	*Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*02*	*1.03*	*78*	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*1 Ruang*	100.000.000	110.000.000
1	**01**	*03*			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**600.000.000**	**715.000.000**
1	**01**	*03*	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**350.000.000**	**385.000.000**
1	*01*	*03*	*1.01*	*02*	*Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*03*	*1.01*	*03*	*Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Mener*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia*	*50 Buku*	50.000.000	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.01*	*04*	*Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menen*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya*	*50 Orang*	50.000.000	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.01*	*05*	*Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendid*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah*	*100 Buku*	50.000.000	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.01*	*06*	*Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Mene*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun*	*1 Dokumen*	50.000.000	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.01*	*07*	*Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lo*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun*	*1 Dokumen*	50.000.000	55.000.000
1	**01**	*03*	**1.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**250.000.000**	**330.000.000**
1	*01*	*03*	*1.02*	*02*	*Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yangTersusun*	*1 Dokumen*	50.000.000	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.02*	*03*	*Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusu*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia*	*100 Buku*	0	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.02*	*04*	*Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menen*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyusun Kurikulumc Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya*	*50 Orang*	50.000.000	55.000.000
1	*01*	*03*	*1.02*	*05*	*Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendid*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah*	*100 Buku*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*03*	*1.02*	*06*	*Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusu*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan khusus yang tersusun*	*1 Dokumen*	50.000.000	55.000.000
1	**01**	*04*			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Guru Penggerak SMA/SMK/SLB Persentase Guru sertifikasi SMA/SMK/SLB**	**0.59 persen 43.06 persen**	**133.952.054.846**	**140.303.368.780**
1	**01**	*04*	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**133.952.054.846**	**140.303.368.780**
1	*01*	*04*	*1.01*	*01*	*Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*	*1 Dokumen*	133.676.265.046	140.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*		*1.01*	*02*	*Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*	*1 laporan*	275.789.800	303.368.780
1	**01**	***05***			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**100.000.000**	**110.000.000**
1	**01**	*05*	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**100.000.000**	**110.000.000**
1	*01*	*05*	*1.01*	*01*	*Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*1 Dokumen*	50.000.000	55.000.000
1	*01*		*1.01*	*02*	*Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*1 Dokumen*	50.000.000	55.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.201.028.305**	**5.721.131.136**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.939.396.471**	**3.233.336.118**
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.694.264.171**	**1.863.690.588**
2	*22*	*02*	*1.01*	*01*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	903.906.300	994.296.930
2	*22*	*02*	*1.01*	*02*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	690.357.871	759.393.658
2	*22*	*02*	*1.01*	*03*	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	110.000.000
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
2	*22*	*02*	*1.02*	*01*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	100.000.000	110.000.000
2	*22*	*02*	*1.02*	*02*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
2	*22*	*02*	*1.02*	*03*	*Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	100.000.000	110.000.000
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**945.132.300**	**1.039.645.530**
2	*22*	*02*	*1.03*	*01*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	22	02	1.03	02	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang	100.000.000	110.000.000
2	22	02	1.03	03	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	745.132.300	819.645.530
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**503.831.834**	**554.215.018**
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**503.831.834**	**554.215.018**
2	22	03	1.01	01	*Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1 Orang	303.831.834	334.215.018
2	22	03	1.01	02	*Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	1 Sertifikat	100.000.000	110.000.000
2	22	03	1.01	03	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	100.000.000	110.000.000
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**957.800.000**	**1.053.580.000**
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**957.800.000**	**1.053.580.000**
2	22	04	1.01	01	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*1 Orang*	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.01	02	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*	*1 Unit*	657.800.000	723.580.000
2	22	04	1.01	03	*Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.01	04	*Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penulisan Sejarah Lokal* *Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**550.000.000**	**605.000.000**
2	**22**	**05**	**1.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**200.000.000**	**220.000.000**
2	22	05	1.01	01	*Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*	*1 Objek*	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.01	02	*Penetapan Cagar Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*1 Objek*	100.000.000	110.000.000
2	**22**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**250.000.000**	**275.000.000**
2	22	05	1.02	01	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi*	*1 Objek*	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.02	02	*Pengembangan Cagar Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*	*1 Objek*	50.000.000	55.000.000
2	22	05	1.02	03	*Pemanfaatan Cagar Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan*	*1 Objek*	50.000.000	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*22*	*04*	*1.02*	*04*	*Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya*	*100 Orang*	50.000.000	55.000.000
2	**22**	**05**	**1.03**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**100.000.000**	**110.000.000**
2	*22*	*05*	*1.03*	*01*	*Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi*	*1 Objek*	50.000.000	55.000.000
2	*22*	*04*	*1.03*	*02*	*Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi*	*1 Objek*	50.000.000	55.000.000
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**250.000.000**	**275.000.000**
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**250.000.000**	**275.000.000**
2	*22*	*06*	*1.01*	*01*	*Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*22*	*06*	*1.01*	*02*	*Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya*	*100 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*22*	*06*	*1.01*	*03*	*Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*22*	*06*	*1.01*	*04*	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*22*	*06*	*1.01*	*05*	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
					UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS						**3.694.551.965**	**4.039.686.052**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.694.551.965**	**4.039.686.052**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.270.307.174**	**2.484.016.782**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**49.764.000**	**54.740.400**
1	*01*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	49.764.000	54.740.400
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**448.362.794**	**479.877.964**
1	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.180.245*	*1.298.269*
1	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*31.090.549*	*34.199.605*
1	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*25.901.700*	*28.491.870*
1	*01*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*13.464.500*	*1.481.040*
1	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*13.094.400*	*14.403.840*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*363.631.400*	400.003.340
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.472.180.380**	**1.619.398.418**
1	*01*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	2.640.000	*2.904.000*
1	*01*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	63.919.680	*70.311.648*
1	*01*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*1.405.620.700*	1.546.182.770
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	*01*		*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*100.000.000*	110.000.000
1	*01*		*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	110.000.000
1	*01*		*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	110.000.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.424.244.791**	**1.555.669.270**
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.424.244.791**	**1.555.669.270**
2	*22*	*06*	*1.01*	*51*	*Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Managemen*	*1 Satuan Pendidikan*	1.424.244.791	1.555.669.270
					UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA						**5.598.999.650**	**5.937.277.114**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.755.961.000**	**1.709.934.599**
1	*01*	*01*			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.755.961.000**	**1.709.934.599**
	01	*01*	*1.02*		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**62.832.000**	**69.115.200**
	01	*01*	*1.02*	*02*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*1 Dokumen*	62.832.000	69.115.200
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**284.506.872**	**312.957.559**
1	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	33.901.065	37.291.171
1	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	79.117.137	87.028.851
1	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	43.108.670	47.419.537
1	*01*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*7.920.000*	8.712.000
1	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*20.460.000*	22.506.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**175.886.128**	**193.474.740**
1	*01*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	5.500.000	6.050.000
1	*01*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	96.334.128	105.967.540
1	*01*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	74.052.000	81.457.200
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**1.232.736.000**	**1.134.387.100**
1	*01*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	100.000.000	110.000.000
1	*01*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*1.031.261.000*	1.134.387.100
1	*01*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*101.475.000*	111.622.500
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.843.038.650**	**4.227.342.515**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.764.646.400**	**1.941.111.040**
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**1.073.406.400**	**1.180.747.040**
2	*22*	*02*	*1.01*	*01*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan*	1 Objek	903.906.300	994.296.930
2	*22*	*02*	*1.01*	*02*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	1 Orang	169.500.100	186.450.110
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**691.240.000**	**760.364.000**
2	*22*	*02*	*1.02*	*01*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	1 Objek	352.851.400	388.136.540
2	*22*	*02*	*1.02*	*02*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	1 Laporan	338.388.600	372.227.460
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**2.078.392.250**	**2.286.231.475**
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**2.078.392.250**	**2.286.231.475**
2	*22*	*06*	*1.01*	*06*	*Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum*	*1 Unit*	2.078.392.250	2.286.231.475
					UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**1.215.999.267**	**1.296.499.193**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.215.999.267**	**1.296.499.193**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**120.966.854**	**133.963.539**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**38.214.000**	**42.035.400**
1	**01**	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	38.214.000	42.035.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**71.202.854**	**79.223.139**
1	**01**	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	1 Paket	30.202.854	33.223.139
1	**01**	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	1 Paket	5.000.000	5.500.000
1	**01**	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan*	12 Paket	12.000.000	13.500.000
1	**01**	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12.000.000	13.500.000
1	**01**	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitas Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12.000.000	13.500.000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	**'- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**11.550.000**	**12.705.000**
1	**01**	*01*	*1.03*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	11.550.000	12.705.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.095.032.413**	**1.162.535.654**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**745.032.413**	**819.535.654**
1	**01**	*02*	*1.01*	*59*	*Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	745.032.413	819.535.654
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**250.000.000**	**233.000.000**
1	**01**	*02*	*1.02*	*52*	*Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	100 Orang	250.000.000	233.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	**Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**100.000.000**	**110.000.000**
1	**01**	*04*	*1.03*	*58*	*Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	*81 Orang*	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Bombana						**1.782.484.737**	**1.960.433.211**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.782.484.737**	**1.960.433.211**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**520.543.737**	**572.898.111**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	**01**	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**460.326.760**	**506.359.436**
1	**01**	*01*	*1.06*	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*64.325.360*	70.757.896
1	01	01	1.06	05	*Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.171.000*	6.788.100
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	110.000.000
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*100.000.000*	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*89.830.400*	98.813.440
1	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**20.628.977**	**22.691.875**
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	17.878.977	19.666.875
1	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**12.000.000**	**13.500.000**
1	01	01	1.09	09	*Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	12.000.000	13.500.000
1	01	02			***PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN***			***'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**		**1.261.941.000**	**1.387.535.100**
1	01	02	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**561.941.000**	**617.535.100**
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	33.970.500	36.767.550
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	327.970.500	360.767.550
1	01	02	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	**01**	*02*	*1.03*	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	*02*	*1.03*	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	*02*	*1.03*	73	*Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Buton						**2.105.831.600**	**2.316.714.760**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.105.831.600**	**2.316.714.760**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.005.831.600**	**1.106.714.760**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	**01**	01	**1.02**	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**954.882.580**	**1.050.370.838**
1	**01**	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	65.401.380	71.941.518
1	**01**	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	6.402.000	7.042.200
1	**01**	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	583.079.200	641.387.120
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**11.361.020**	**12.497.122**
1	**01**	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	**01**	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	**01**	**01**	**1.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**12.000.000**	**13.500.000**
1	**01**	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	**01**	**02**			***PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN***	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.100.000.000**	**1.210.000.000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**500.000.000**	**550.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	37	*Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Buton Utara						**1.909.837.030**	**2.100.820.733**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.909.837.030**	**2.100.820.733**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa			**541.444.280**	**595.588.708**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**502.495.260**	**552.744.786**
1	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.649.860	71.114.846

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	131.674.400	144.841.840
1	**01**	**01**	**1.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**11.361.020**	**12.497.122**
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**1.368.392.750**	**1.505.232.025**
1	**01**	**02**	**1.01**		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**668.392.750**	**735.232.025**
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	368.392.750	405.232.025
1	**01**	**02**	**1.02**		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**400.000.000**	**440.000.000**
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		***Pengelolaan Pendidikan Khusus***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Kolaka Timur							
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.714.632.380**	**1.886.095.618**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**492.048.780**	**541.253.658**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa**			**483.481.760**	**531.829.936**
1	**01**	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.313.960	75.145.356
1	**01**	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	3.091.000	3.400.100
1	**01**	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	112.076.800	123.284.480
1	**01**	**01**	**1.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**8.567.020**	**9.423.722**
1	**01**	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	2.420.000
1	**01**	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.367.020	7.003.722
1	**01**	**02**			***PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN***	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*			**1.222.583.600**	**1.344.841.960**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa**			**650.995.600**	**716.095.160**
1	**01**	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	66.000.000	72.600.000
1	**01**	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	384.995.600	423.495.160
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa**			**344.000.000**	**378.400.000**
1	**01**	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	44.000.000	48.400.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa**			**227.588.000**	**250.346.800**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	27.588.000	30.346.800
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Kolaka Utara						**1.672.912.000**	**1.840.203.200**
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.672.912.000**	**1.840.203.200**
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**590.426.500**	**649.469.150**
1	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**460.748.500**	**506.823.350**
1	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.474.800	77.522.280
1	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.402.000	7.042.200
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83.871.700	92.258.870
1	01	01	1.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**102.090.000**	**112.299.000**
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.090.000	2.299.000
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**02**			***PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN***	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**1.082.485.500**	**1.190.734.050**
1	**01**	**02**	**1.01**		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**460.485.500**	**506.534.050**
1	**01**	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	33.000.000	36.300.000
1	**01**	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	227.485.500	250.234.050
1	**01**	**02**	**1.02**		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**322.000.000**	**354.200.000**
1	**01**	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	22.000.000	24.200.000
1	**01**	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		***Pengelolaan Pendidikan Khusus***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**300.000.000**	**330.000.000**
1	**01**	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Konawe Utara						**2.485.910.860**	**2.734.801.946**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.485.910.860**	**2.734.801.946**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.485.910.860**	**1.634.801.946**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**100.000.000**	**110.000.000**
1	01	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.323.944.460**	**1.456.338.906**
k,f	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	292.465.360	321.711.896
1	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.326.000	8.058.600
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	724.153.100	796.568.410
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**22.378.400**	**24.616.240**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.400.000	4.840.000
1	**01**	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.978.400	19.776.240
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.000.000**	**13.500.000**
1	**01**	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.000.000.000**	**1.100.000.000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	**01**	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	20000 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**200.000.000**	**220.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Konawe Kepulauan						**1.569.810.210**	**1.859.091.220**
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.569.810.210**	**1.859.091.220**
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**321.478.610**	**463.926.460**
1	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**269.765.970**	**406.742.556**
1	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.765.360	10.741.896
1	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	53.829.600	59.212.560
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.124.640**	**13.337.104**
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.374.640	10.312.104
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.000.000**	**13.500.000**
1	01	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			**1.248.331.600**	**1.395.164.760**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**548.331.600**	**614.164.760**
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	121.000.000
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	248.331.600	273.164.760
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**451.000.000**
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	121.000.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Konawe Selatan						**2.430.835.080**	**2.673.918.588**
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.430.835.080**	**2.673.918.588**
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.330.835.080**	**1.463.918.588**
1	01	01	1.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			**27.588.000**	**30.346.800**
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**1.291.886.060**	**1.421.074.666**
1	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	290.485.360	319.533.896
1	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.402.000	7.042.200
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	694.998.700	764.498.570
1	01	01	1.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**11.361.020**	**12.497.122**
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.100.000.000**	**1.210.000.000**
1	01	02	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	**01**	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	**01**	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Muna						**2.055.463.280**	**2.261.009.608**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.055.463.280**	**2.261.009.608**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**562.977.880**	**619.275.668**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	**01**	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**524.028.860**	**576.431.746**
1	**01**	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.649.860	71.114.846
1	**01**	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	**01**	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	**01**	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	153.208.000	168.528.800
1	**01**	**01**	**1.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**11.361.020**	**12.497.122**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.492.485.400**	**1.641.733.940**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**792.485.400**	**871.733.940**
1	**01**	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	492.485.400	541.733.940
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	**01**	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	**01**	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Wakatobi						**1.940.293.930**	**2.134.623.323**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.940.293.930**	**2.134.623.323**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**553.911.780**	**609.602.958**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**502.962.760**	**553.259.036**
1	***01***	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	***01***	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*64.765.360*	*71.241.896*
1	***01***	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.171.000*	*6.788.100*
1	***01***	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	***01***	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	***01***	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*132.026.400*	*145.229.040*
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**11.361.020**	**12.497.122**
1	**01**	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	**01**	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.000.000**	**13.500.000**
1	**01**	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.386.382.150**	**1.525.020.365**
1	**01**	**02**	**1.01**		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**686.382.150**	**755.020.365**
1	**01**	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	386.382.150	425.020.365
1	**01**	**02**	**1.02**		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan***	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**400.000.000**	**440.000.000**
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud BauBau - Kab. Buton Selatan						**1.920.077.743**	**2.112.085.518**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.920.077.743**	**2.112.085.518**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daera**	**-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**820.077.743**	**902.085.518**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**690.905.743**	**759.996.318**
1	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.050.083	20.955.092

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.224.260	9.046.686
1	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	363.631.400	399.994.540
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**101.584.000**	**111.742.400**
1	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.584.000	1.742.400
1	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.100.000.000**	**1.210.000.000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**400.000.000**	**440.000.000**
1	01	02	1.02	31	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*'-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Rayon Kab.Muna Barat - Kab. Buton Tengah						**1.757.063.360**	**1.932.769.696**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.757.063.360**	**1.932.769.696**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**673.552.960**	**740.908.256**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.588.000**	**30.346.800**
1	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**629.579.360**	**692.537.296**
1	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*110.745.360*	*121.819.896*
1	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.326.000*	*8.058.600*
1	*01*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*211.508.000*	*232.658.800*
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**16.385.600**	**18.024.160**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.750.000*	*3.025.000*
1	*01*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*13.635.600*	*14.999.160*
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.000.000**	**13.500.000**
1	01	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.083.510.400**	**1.191.861.440**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**363.949.400**	**400.344.340**
1	01	02	1.01	39	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta didik	66.000.000	72.600.000
1	01	02	1.01	54	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas*	1 Orang	22.781.000	25.059.100
1	01	02	1.01	75	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Orang	175.168.400	192.685.240
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**419.561.000**	**461.517.100**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*01*	*02*	*1.02*	*31*	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	*1 Paket*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	*01*	*02*	*1.02*	*37*	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*1 Peserta didik*	*113.025.000*	*124.327.500*
1	*01*	*02*	*1.02*	*47*	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan*	*1 Orang*	*20.504.000*	*22.554.400*
1	*01*	*02*	*1.02*	*73*	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*1 Orang*	*186.032.000*	*204.635.200*
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**300.000.000**	**330.000.000**
1	01	02	1.03	38	*Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	100.000.000	110.000.000
1	**01**				**Urusan Kesehatan**						**891.524.944.110**	**943.035.117.329**
1	**02**				**Dinas Kesehatan**						**55.417.582.900**	**61.078.532.190**
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Provinsi**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**37.140.719.900**	**40.987.891.890**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**12 Dokumen**	**1.745.304.000**	**1.919.834.400**
1	*02*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun*	*4 Dokumen*	*1.331.000.000*	*1.464.100.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*12.100.000*	*13.310.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*9.922.000*	*10.914.200*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*9.922.000*	*10.914.200*
1	*02*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*6.050.000*	*6.655.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	*3 Laporan*	*363.000.000*	*399.300.000*
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daera**	**75 Dokumen**	**25.302.631.400**	**27.965.994.540**
1	*02*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan Bulanan*	*423 Orang/Bulan*	*24.872.718.400*	*27.493.090.240*
1	*02*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*	*1 Dokumen*	*66.550.000*	*73.205.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen penataushaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD*	*12 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	*19 Laporan*	*6.655.000*	*7.320.500*
1	*02*	*01*	*1.02*	*06*	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*38 Laporan*	*303.468.000*	*333.814.800*
1	*02*	*01*	*1.02*	*08*	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosisi realisasi angggaran*	*3 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34 Dokumen**	**193.957.500**	**213.353.250**
1	*02*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah rencana kebutuhan barang milik daearah SKPD*	*3 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.03*	*02*	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD*	*2 Dokumen*	*55.950.400*	*61.545.440*
1	*02*	*01*	*1.03*	*03*	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumalah laporan hasul penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD*	*6 Laporan*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.03*	*04*	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Laporan Hasil pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*30.401.800*	*33.441.980*
1	*02*	*01*	*1.03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD*	*9 Laporan*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	*02*	*01*	*1.03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	*9 Laporan*	*54.365.300*	*59.801.830*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*01*	*1.03*	*07*	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD*	*4 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**685.600.000**	**754.160.000**
1	*02*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin pegawai*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah dokumen pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan*	*1 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumnlah Dokumen pendataan dan pengelolaak administrasi kepegawaian*	*1 Dokumen*	*54.450.000*	*59.895.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen hasil koodinasi dan pelaksanaan sisten informasi kepegawaian*	*1 Dokumen*	*36.300.000*	*39.930.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai*	*2 Dokumen*	*42.350.000*	*46.585.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan palatihan*	*30 Orang*	*242.000.000*	*266.200.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah orng yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*	*30 Orang*	*30.250.000*	*33.275.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah orng yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peratiran perundang-undangan*	*30 Orang*	*30.250.000*	*33.275.000*
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**194 Laporan**	**2.575.357.000**	**2.832.892.700**
1	*02*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor yang tersedia*	*3 Paket*	*22.627.000*	*24.889.700*
1	*02*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantior yang disediakan*	*1 Paket*	*121.000.000*	*133.100.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*1 Paket*	*60.500.000*	*66.550.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logsitik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*1 Paket*	*229.900.000*	*252.890.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan*	*1 Paket*	*181.500.000*	*199.650.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*	*1 Dokumen*	*21.780.000*	*23.958.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*07*	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah paket bahan/material yang disediakan*	*1 Paket*	*2.050.000*	*2.255.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitas Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	*25 Laporan*	*242.000.000*	*266.200.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*160 Laporan*	*1.694.000.000*	*1.863.400.000*
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**6 Unit**	**4.280.900.000**	**4.708.990.000**
1	*02*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*400.000.000*	*440.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*01*	*1.07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan*	*1 Unit*	*52.000.000*	*57.200.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah paket mebel yang disediakan*	*1 Paket*	*400.000.000*	*440.000.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	*40 Unit*	*653.400.000*	*718.740.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah unit gedung kantor atau bagunan lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*1.200.000.000*	*1.320.000.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bagunan lainnya yang disediakan*	*5 Unit*	*1.028.500.000*	*1.131.350.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantoratau bagunan lainnya yang disediakan*	*2 Unit*	*547.000.000*	*601.700.000*
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**15 Laporan**	**1.318.010.000**	**1.449.811.000**
1	*02*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)*	*1 Laporan*	*54.450.000*	*59.895.000*
1	*02*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)*	*12 Laporan*	*1.220.000.000*	*1.342.000.000*
1	*02*	*01*	*1.08*	*03*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*14.520.000*	*15.972.000*
1	*02*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)*	*1 Laporan*	*29.040.000*	*31.944.000*
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Dinkes**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**102 Unit**	**1.038.960.000**	**1.142.856.000**
1	*02*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)*	*6 Unit*	*61.710.000*	*67.881.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)*	*40 Unit*	*60.500.000*	*66.550.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)*	*4 Unit*	*151.250.000*	*166.375.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*4 unit*	*423.500.000*	*465.850.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dinkes*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*342.000.000*	*376.200.000*
1	***02***	***02***			**PROGRAM PEMENUHANA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**PROVINSI**	**PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LENGKAP**	**80%**	**12.320.318.000**	**13.537.340.800**
									INSIDENSI HIV (Per 100.000 Penduduk)	0,18%		
									CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN TBC (TREATMENT COVERAGE)	70%		
									PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA ANAK USIA 12-23 BULAN	92%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MERESPON PERINGATAN DINI KLB (ALERT SYSTEM) MINIMAL 80%	100%		
									PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA > 18 TAHUN	30%		
									PERSENTASE KAB/KOTA YANG DIBINA DAN DIPERSIAPKAN AKREDITASINYA	100%		
1	***02***	***02***	***1.01***		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan**	**3 Unit**	**5.953.670.000**	**6.540.028.000**
1	*02*	*02*	*1.01*	*02*	*Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar*	*2 Unit*	*2.025.000.000*	*2.227.500.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*04*	*Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Persentase pemanfaatan balai laboratorium*	*1 Unit*	*205.000.000*	*225.500.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*06*	*Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Pelayanan kesehatan di DTPK (Pelayanan kesehatan Bergerak, gugus pulau, Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pengembangan*	*5 Layanan*	*81.070.000*	*89.177.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*07*	*Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Unit pemeliharaan fasiltas kesehatan Regional/ regional maintainance center yang dilakuakan pengembangan*	*1 Unit*	*1.300.000.000*	*1.430.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*08*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi*	*2 Unit*	*442.000.000*	*486.200.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*10*	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan*	*4 Unit*	*284.000.000*	*312.400.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*13*	*Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah unit Alat Kalibrasi yang desediakan dan dipelihara*	*6 Unit*	*302.500.000*	*332.750.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*17*	*Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Set Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasyankes yang dipelihara*	*1 Unit*	*242.000.000*	*266.200.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*21*	*Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya*	*2 Dokumen*	*509.100.000*	*551.001.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*22*	*Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan*	*3 Paket*	*563.000.000*	*619.300.000*
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Layanan UKP dan UKM Rujukan**	**6 Dokumen**	**5.367.067.000**	**5.897.773.700**
1	*02*	*02*	*1.02*	*01*	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Penduduk yang mendapatkan Layanan Kesehatan yang terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sesuai standar (0rang/Kab/Kota)*	*4020 Orang*	*140.360.000*	*154.396.000*
1	*02*	*02*	*1.02*	*02*	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan*	*3770 Orang*	*242.000.000*	*266.200.000*
1	*02*	*02*	*1.02*	*03*	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*	*6 Dokumen*	*696.080.000*	*765.688.000*
1	*02*	*02*	*1.02*	*04*	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif*	*2 Dokumen*	*96.800.000*	*106.480.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	96.800.000	106.480.000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	733.930.000	807.323.000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	532.480.000	585.728.000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	389.620.000	428.582.000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Laporan pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan	3 Dokumen	199.650.000	219.615.000
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	145.200.000	159.720.000
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	78.650.000	86.515.000
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		jumlah Jamaah Haji Yang Mendapatkan Pengukuran Kebugaran	1 Dokumen	96.800.000	106.480.000
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	145.200.000	159.720.000
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	20 Orang	35.937.000	39.530.700
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	423.500.000	465.850.000
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	193.600.000	212.960.000
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	181.500.000	199.650.000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	125.840.000	138.424.000
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	54.450.000	53.895.000
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.500.000	66.550.000
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang di distribusikan	1 Paket	96.800.000	106.480.000
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen hasil upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	1 Paket	145.200.000	159.720.000
1	02	02	1.02	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		JJumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Dokumen	456.170.000	501.787.000
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Infromasi dan Data Program Kesehatan yang Efektif**	**1 Dokumen**	**267.531.000**	**294.284.100**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*02*	*1.03*	*02*	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*	*11 Dokumen*	*267.531.000*	*294.284.100*
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu**	**1 Dokumen**	**732.050.000**	**805.255.000**
1	*02*	*02*	*1.04*	*01*	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*jumlah rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar*	*30 Unit*	*157.300.000*	*173.030.000*
1	*02*	*02*	*1.04*	*02*	*Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan*	*30 Unit*	*242.000.000*	*266.200.000*
1	*02*	*02*	*1.04*	*03*	*Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan*	*17 Unit*	*332.750.000*	*366.025.000*
1	***02***	***03***			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**PROVINSI**	**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR**	**35%**	**4.612.375.000**	**5.073.612.500**
1	***02***	***03***	***1.01***		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**2754 Orng**	**102.850.000**	**113.135.000**
1	*02*	*03*	*1.01*	*01*	*Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi stndar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)*	*2754 Orang*	*42.350.000*	*46.585.000*
1	*02*	*03*	*1.01*	*02*	*Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Standar Sumber daya manusia kesehatan yang terdistribusi*	*2754 Orang*	*60.500.000*	*66.550.000*
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK**	**1 Dokumen**	**4.509.525.000**	**4.960.477.500**
1	*02*	*03*	*1.02*	*01*	*Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat*	*240 Orang*	*4.235.000.000*	*4.658.500.000*
1	*02*	*03*	*1.02*	*02*	*Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*1 Dokumen*	*274.525.000*	*301.977.500*
1	*02*	*04*			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	**PROVINSI**	**PERSENTASE PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT) YANG MEMENUHI KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA**	**80%**	**72.600.000**	**79.860.000**
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Penerbitan Pengakuan PBF dan PAK**	**1 Dokumen**	**36.300.000**	**39.930.000**
1	*02*	*04*	*1.01*	*01*	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumalah PBF cabang dan cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan*	*20 Sarana*	*36.300.000*	*39.930.000*
1	**02**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin UKOT**	**1 Dokumen**	**36.300.000**	**39.930.000**
1	*02*	*04*	*1.02*	*01*	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lajut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (sarana)*	*10 Sarana*	*36.300.000*	*39.930.000*
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**PROVINSI**	**Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)**	**85%**	**1.271.570.000**	**1.399.827.000**
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan Lintas Sektor Dalam Upaya Germas**	**1 Dokuemen**	**526.560.000**	**580.316.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*05*	*1.01*	*01*	*Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi*	*5 Dokumen*	*526.560.000*	*580.316.000*
1	***02***	***05***	***1.02***		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS**	**1 Dokuemen**	**624.010.000**	**686.411.000**
1	*02*	*05*	*1.02*	*01*	*Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku hidup bersih dan sehat*	*5 Dokumen*	*624.010.000*	*686.411.000*
1	***02***	***05***	***1.03***		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**1 Dokumen**	**121.000.000**	**133.100.000**
1	*02*	*05*	*1.03*	*01*	*Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM*	*2 Dokumen*	*121.000.000*	*133.100.000*
1	**02**				**Rumah Sakit Jiwa**		`				**151.928.244.310**	**133.561.297.639**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**	**100%**	**41.172.000.000**	**33.767.000.000**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**6 Dokumen**	**75.000.000**	**60.000.000**
1	*02*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*45.000.000*	*30.000.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**16 Dokumen**	**26.941.604.000**	**27.941.604.000**
1	*02*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*230 orang/bulan*	*26.931.604.000*	*27.931.604.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*14 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**5.000.000**	**5.000.000**
1	*02*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*6 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**46 Dokumen**	**950.000.000**	**209.000.000**
1	*02*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*4 Unit*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian dinas berserta Atribut Kelengkapan / Jumlah pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS. Jiwa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*500.000.000*	*-*
1	*02*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*21 Orang*	*150.000.000*	*29.500.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*19 Orang*	*150.000.000*	*29.500.000*
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87 Dokumen**	**1.850.000.000**	**1.300.000.000**
1	*02*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*300.000.000*	*200.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*250.000.000*	*150.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*10 dokumen*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	*02*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*60 Laporan*	*600.000.000*	*250.000.000*
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**36 Unit**	**3.470.000.000**	**1.290.000.000**
1	*02*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RS Jiwa***	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*4 Unit*	*1.400.000.000*	*0*
1	*02*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*980.000.000*	*500.000.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*20 Unit*	*600.000.000*	*300.000.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*07*	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*40.000.000*	*40.000.000*
1	*02*	*01*	*1.07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*450.000.000*	*450.000.000*
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**38 Laporan**	**2.520.000.000**	**1.160.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*02*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*350.000.000*	*350.000.000*
1	*02*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*2.160.000.000*	*800.000.000*
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RS Jiwa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**66 Unit**	**5.360.396.000**	**1.801.396.000**
1	*02*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*7 Unit*	*200.396.000*	*200.396.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*20 Unit*	*510.000.000*	*350.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*8 Unit*	*2.500.000.000*	*151.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RS Jiwa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*30 unit*	*2.050.000.000*	*1.000.000.000*
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100%**	**109.281.244.310**	**98.594.297.639**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan**	**38 Unit**	**96.718.244.310**	**83.034.821.419**
1	*02*	*02*	*1.01*	*09*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit*	*4 Unit*	*45.000.000.000*	*73.994.297.639*
1	*02*	*02*	*1.01*	*10*	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*2.127.920.000*	*4.430.523.780*
1	*02*	*02*	*1.01*	*16*	*Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan*	*8 Unit*	*5.000.000*	*190.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*17*	*Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	*30 Unit*	*80.000.000*	*200.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*26*	*Pengembangan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	*1 Unit*	*45.330.324.310*	-
1	*02*	*02*	*1.01*	*27*	*Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	*3 Paket*	*4.175.000.000*	*4.220.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**5 Dokumen**	**10.062.000.000**	**12.999.476.220**
1	*02*	*02*	*1.02*	*13*	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)*	*4 Dokumen*	*269.000.000*	*270.000.000*
1	*02*	*02*	*1.02*	*22*	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	*1 Dokumen*	*9.793.000.000*	*12.729.476.220*
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Jumlah Unit yang tersedia Sistem Informasi terintegrasi**	**1 Unit**	**1.000.000**	**60.000.000**
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	1.000.000	60.000.000
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya**	**24 Unit**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
1	02	**02**	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	24 unit	2.500.000.000	2.500.000.000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Persentase Jumlah Tenaga yang bersertifikat**	**100%**	**1.200.000.000**	**900.000.000**
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RS Jiwa**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Mutu dan Standar Kompetensi Teknis**	***133 Orang***	**1.200.000.000**	**900.000.000**
1	*02*	*03*	*1.02*	*01*	*Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumberdaya Manusia Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RS Jiwa*	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Mutu dan Standar Kompetensi Teknis*	*133 Orang*	*1.200.000.000*	*900.000.000*
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RS Jiwa**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan**	**100%**	**275.000.000**	**300.000.000**
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RS Jiwa**	**Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**2 Dokumen**	**275.000.000**	**300.000.000**
1	*02*	*05*	*1.02*	*01*	*Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*RS Jiwa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadara dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	*2 Dokumen*	*275.000.000*	*300.000.000*
1	**02**				**Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas**						**316.631.420.000**	**351.405.062.000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSUD Bahteramas**	**Persentase capaian pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**89.631.420.000**	**98.605.062.000**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***RSUD Bahteramas***	**Terlaksanaya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**210.000.000**	**241.500.000**
1	*02*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	6 dokumen	57.000.000	65.550.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 laporan	153.000.000	175.950.000
1	**02**	*01*	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSUD Bahteramas**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**88.146.200.000**	**96.960.820.000**
1	*02*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	902 orang/bulan	88.056.000.000	96.861.600.000
1	*02*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD*	24 laporan	90.200.000	99.220.000
1	**02**	*01*	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSUD Bahteramas**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**77 Dokumen**	**33.220.000**	**36.542.000**
1	*02*	*01*	*1.03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	17 laporan	33.220.000	36.542.000
1	**02**	*01*	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**-**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**450.000.000**	**495.000.000**
1	*02*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	*Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan*	1 unit	450.000.000	495.000.000
1	**02**	***01***	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSUD Bahteramas**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 Laporan**	**792.000.000**	**871.200.000**
1	*02*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	12 laporan	792.000.000	871.200.000
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSUD Bahteramas**	**Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarkat**	**100%**	**227.000.000.000**	**252.800.000.000**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSUD Bahteramas**	**Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi**	**4 Unit**	**62.000.000.000**	**71.300.000.000**
1	***02***	*02*	*1.01*	*04*	*Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	*6.000.000.000*	*6.900.000.000*
1	***02***	*02*	*1.01*	*09*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit*	*1 unit*	*20.000.000.000*	*23.000.000.000*
1	***02***	*02*	*1.01*	*10*	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan*	*1 unit*	*30.000.000.000*	*34.500.000.000*
1	***02***	*02*	*1.01*	*16*	*Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Jumlah Barang Penunjang*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*RSUD Bahteramas*	*Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan*	1 Unit	*6.000.000.000*	*6.900.000.000*
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**4 Dokumen**	**165.000.000.000**	**181.500.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**02**	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	4 dokumen	165.000.000.000	181.500.000.000
1	**02**				**Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yi Koo**						**367.547.696.900**	**396.990.225.500**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSJPDO**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100 Persen**	**243.561.696.900**	**273.754.225.500**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSJPDO**	**Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah**	**4 Kegiatan**	**45.000.000**	**45.000.000**
1	*02*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*02*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*2 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***	***Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	**RSJPDO**	**Jumlah kegiatan administrasi perangkat daerah**	**4 Kegiatan**	**71.249.696.900**	**79.662.225.500**
1	*02*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan Bulanan (0rang)*	*558 Orang*	*70.989.696.900*	*79.402.225.500*
1	*02*	*01*	*1.02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*5 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*02*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD*	*19 Laporan*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah SKPD**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSJPDO**	**Jumlah kegiatan administrasi BMD SKPD**	**2 Kegiatan**	**35.000.000**	**35.000.000**
1	*02*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*RSJPDO*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*02*	*01*	*1.03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*4 Laporan*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSJPDO**	**Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**3 Kegiatan**	**982.000.000**	**1.082.000.000**
1	*02*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*2 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*02*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*312.000.000*	*312.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*50 Orang*	*600.000.000*	*700.000.000*
1	02	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*2 Orang*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***	***Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Kegiatan**	**4.350.000.000**	**5.100.000.000**
1	02	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*150.000.000*
1	02	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*250.000.000*
1	02	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*300.000.000*	*200.000.000*
1	02	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*500.000.000*	*550.000.000*
1	02	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*300.000.000*	*350.000.000*
1	02	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*20 Dokumen*	*50.000.000*	*100.000.000*
1	02	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*4 Laporan*	*1.300.000.000*	*1.700.000.000*
1	02	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.700.000.000*	*1.800.000.000*
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***	***Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6 Kegiatan**	**4.860.000.000**	**4.260.000.000**
1	02	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*4 Unit*	*2.500.000.000*	*1.500.000.000*
1	02	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*750.000.000*	*750.000.000*
1	02	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	02	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*20 Unit*	*300.000.000*	*200.000.000*
1	02	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	02	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*1.000.000.000*	*1.500.000.000*
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***	***Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	**RSJPDO**	**Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**3 Kegiatan**	**9.910.000.000**	**10.910.000.000**
1	02	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*30.000.000*	*30.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*3 Laporan*	*5.000.000.000*	*6.000.000.000*
1	*02*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*2 Laporan*	*4.880.000.000*	*4.880.000.000*
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***	***Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6 Kegiatan**	**2.130.000.000**	**2.660.000.000**
1	*02*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*4 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*3 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Mebel Yang Dipelihara*	*5 Unit*	*25.000.000*	*30.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara*	*12 Unit*	*15.000.000*	*20.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*7 Unit*	*1.500.000.000*	*2.000.000.000*
1	*02*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*550.000.000*	*570.000.000*
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1 Kegiatan**	**150.000.000.000**	**170.000.000.000**
1	*02*	*01*	*1.10*	*01*	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	***RSJPDO***	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1 Unit Kerja*	*150.000.000.000*	*170.000.000.000*
1	*02*	*02*			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSJPDO**	**Persentase cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100 Persen**	**121.810.000.000**	**120.910.000.000**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**9 Kegiatan**	**117.700.000.000**	**115.700.000.000**
1	*02*	*02*	*1.01*	*09*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit*	*5 unit*	*5.000.000.000*	*3.000.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*10*	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan*	*20 Unit*	*50.000.000.000*	*55.000.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*16*	*Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan*	*17 Unit*	*10.750.000.000*	*1.000.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*17*	*Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	*15 Unit*	*550.000.000*	*600.000.000*
1	*02*	*02*	*1.01*	*20*	*Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*	*5 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*02*	*02*	*1.01*	*26*	*Pengembangan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	*1 Unit*	*1.000.000.000,00*	*1.000.000.000,00*
1	*02*	*02*	*1.01*	*27*	*Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan*	*2 Paket*	*50.300.000.000,00*	*55.000.000.000,00*
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**2 Kegiatan**	**3.100.000.000**	**4.200.000.000**
1	*02*	*02*	*1.02*	*16*	*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat*	*2 Dokumen*	*100.000.000*	*200.000.000*
1	*02*	*02*	*1.02*	*22*	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	*10 Dokumen*	*3.000.000.000*	*4.000.000.000*
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**1 Kegiatan**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
1	*02*	*02*	*1.03*	*02*	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Unit Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia*	*1 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**1 Kegiatan**	**10.000.000**	**10.000.000**
1	*02*	*02*	*1.04*	*03*	*Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	***RSJPDO***	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan*	*3 Unit*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RSJPDO**	**Persentase cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan**	**100 Persen**	**1.876.000.000**	**1.976.000.000**
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi**	**1 Kegiatan**	**1.176.000.000**	**1.176.000.000**
1	*02*	*03*	*1.01*	*01*	*Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kehatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	***RSJPDO***	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*14 Orang*	*1.176.000.000*	*1.176.000.000*
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1 Kegiatan**	**700.000.000**	**800.000.000**
1	*02*	*03*	*1.02*	*01*	*Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kehatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	***RSJPDO***	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat*	*70 Orang*	*700.000.000*	*800.000.000*
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RSJPDO**	**Persentase cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**100%**	**300.000.000**	**350.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**RSJPDO**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Provinsi**	**1 Kegiatan**	**300.000.000**	**350.000.000**
1	*02*	*05*	*1.02*	*01*	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	**RSJPDO**	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	300.000.000	350.000.000
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.172.147.448.500**	**1.265.848.200.900**
1	**03**				**DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG**						**316.663.348.000**	**403.923.015.400**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			**13.713.348.000**	**14.398.015.400**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**		**32 Dokumen**	**596.468.000**	**626.291.400**
1	*03*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*12 Laporan*	*15.000.000*	*15.750.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*12 Laporan*	*556.468.000*	*584.291.400*
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**107 Dokumen**	**8.242.320.000**	**8.654.436.000**
1	*03*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*94 Orang/Bulan*	*8.045.000.000*	*8.447.250.000*
1	*03*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.250.000*
1	*03*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*192.320.000*	*201.936.000*
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24 Dokumen**	**67.560.000**	**70.938.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*37.560.000*	*39.438.000*
1	03	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*30.000.000*	*31.500.000*
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**180.000.000**	**188.000.000**
1	03	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*150.000.000*	*157.500.000*
1	03	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	03	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	03	01	1.05	07	*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*2 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	03	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*10.000.000*	*10.500.000*
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1223 Laporan**	**1.757.000.000**	**1.844.850.000**
1	03	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*60.000.000*	*63.000.000*
1	03	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*70.000.000*	*73.500.000*
1	03	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1173 Dokumen*	*7.000.000*	*7.350.000*
1	03	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*20.000.000*	*21.000.000*
1	03	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.500.000.000*	*1.575.000.000*
1	03	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**187 Unit**	**1.160.000.000**	**1.218.000.000**
1	03	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*4 Unit*	*500.000.000*	*525.000.000*
1	03	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*13 Unit*	*650.000.000*	*682.500.000*
1	03	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*170 Unit*	*10.000.000*	*10.500.000*
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**36 Laporan**	**1.150.000.000**	**1.207.500.000**
1	03	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*6.000.000*	*6.300.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*460.000.000*	*483.000.000*
1	03	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*684.000.000*	*718.200.000*
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**82 Unit**	**560.000.000**	**588.000.000**
1	03	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*19 Unit*	*300.000.000*	*315.000.000*
1	03	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*59 Unit*	*10.000.000*	*10.500.000*
1	03	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*200.000.000*	*210.000.000*
1	03	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi* *Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*50.000.000*	*52.500.000*
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.000.000.000**	**1.750.000.000**
1	03	03	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.000.000.000**	**1.750.000.000**
1	03	03	1.01	14	*Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	*1 Kabupaten/ Kota*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	03	03	1.01	15	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*	*1 Dokumen*	*750.000.000*	*1.500.000.000*
1	**03**	**04**			**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**		**100 Persen**	**500.000.000**	**0**
1	03	04	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**		**100 Persen**	**500.000.000**	**0**
1	03	04	1.01	09	*Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*	*2 Kabupaten/ Kota*	*500.000.000*	*0*
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.000.000.000**	**13.200.000.000**
1	03	07	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**12.000.000.000**	**13.200.000.000**
1	*3*	*07*	*1.01*	*07*	*Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun*	*1 Ton/hari*	*2.000.000.000*	*2.200.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*3*	*07*	*1.01*	*09*	*Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar*	*100 Rumah Tangga*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*10*	*Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan*	*1 Ton/hari*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*11*	*Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan*	*10 M³/Hari*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*19*	*Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun*	*10 M³/Hari*	*2.000.000.000*	*2.200.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*26*	*Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun*	*5 Liter/Detik*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*27*	*Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi*	*10 Unit*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*29*	*Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun*	*10 Unit*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*30*	*Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi*	*10 Unit*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	*03*	*07*	*1.01*	*31*	*Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi*	*50 SR*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**248.600.000.000**	**328.500.000.000**
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**248.600.000.000**	**328.500.000.000**
1	*03*	*08*	*1.01*	*12*	*Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat*	*5 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000,00*
1	*03*	*08*	*1.01*	*16*	*Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan*	*10 Bangunan Gedung*	*7.500.000.000*	*7.500.000.000*
1	*03*	*08*	*1.01*	*19*	*Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi*	*6 Dokumen*	*240.000.000.000*	*320.000.000.000*
1	*03*	*08*	*1.01*	*20*	*Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala*	*5 Bangunan Gedung*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**21.950.000.000**	**25.450.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**21.950.000.000**	**25.450.000.000**
1	*03*	*09*	*1.01*	*08*	*Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata*	*25 Kawasan*	*17.500.000.000*	*21.000.000.000*
1	*03*	*09*	*1.01*	*09*	*Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun*	*25 Dokumen*	*2.500.000.000*	*2.500.000.000*
1	*03*	*09*	*1.01*	*10*	*Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan*	*15 Dokumen*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	*03*	*09*	*1.01*	*12*	*Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan*	*50 Kabupaten/Kota*	*950.000.000*	*950.000.000*
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**7.400.000.000**	**7.525.000.000**
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelengaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**4.150.000.000**	**4.150.000.000**
1	*03*	*11*	*1.01*	*09*	*Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan*	*30 Orang*	*400.000.000*	*400.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*10*	*Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan*	*2 Dokumen*	*800.000.000*	*800.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*11*	*Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih*	*60 Orang*	*800.000.000*	*800.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*12*	*Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya*	*30 Lembaga*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*13*	*Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan*	*3 Dokumen*	*775.000.000*	*775.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*14*	*Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi*	*60 Orang*	*275.000.000*	*275.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*15*	*Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya*	*2 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*03*	*11*	*1.01*	*16*	*Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya*	*1 Lembaga*	*700.000.000*	*700.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.750.000.000**	**1.875.000.000**
1	*03*	*11*	*1.02*	*06*	*Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan*	*2 Layanan Informasi*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	*03*	*11*	*1.02*	*07*	*Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan*	*2 Perangkat Pendukung*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	*03*	*11*	*1.02*	*08*	*Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan*	*4 Dokumen*	*950.000.000*	*1.045.000.000*
1	*03*	*11*	*1.02*	*09*	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*72 Orang*	*300.000.000*	*330.000.000*
1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
1	*03*	*11*	*1.03*	*04*	*Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*	*2 Paket Pekerjaan*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*11*	*1.03*	*07*	*Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha*	*2 Badan Usaha*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*11*	*1.03*	*08*	*Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	**03**	**12**			**Program Penyelengaraan Penataan Ruang**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.200.000.000**	**1.900.000.000**
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**800.000.000**	**600.000.000**
1	*03*	*12*	*1.01*	*07*	*Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi*	*1 Dokumen*	*700.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*12*	*1.01*	*09*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi*	*1 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**650.000.000**	**550.000.000**
1	*03*	*12*	*1.02*	*04*	*Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*03*	*12*	*1.02*	*09*	*Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*50.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	12	1.02	13	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*400.000.000*
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**200.000.000**	**200.000.000**
1	03	12	1.03	04	*Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	03	12	1.03	06	*Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**550.000.000**	**550.000.000**
1	03	12	1.04	03	*Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang*	*1 Kasus*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	03	12	1.04	04	*Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	*1 Dokumen*	*350.000.000*	*350.000.000*
1	03	12	1.04	08	*Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif*	*1 Kasus*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**03**	**04**			**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.000.000.000**	**0**
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.000.000.000**	**0**
1	*03*	*04*	*1.01*	*16*	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun*	*2 Dokumen*	*1.000.000.000*	*0*
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**500.000.000**	**0**
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**500.000.000**	**0**
1	*03*	*05*	*1.01*	*15*	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*0*
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**7.800.000.000**	**11.200.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**7.800.000.000**	**11.200.000.000**
1	*03*	*06*	*1.01*	*08*	*Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan*	*15 Unit*	*3.000.000.000*	*4.000.000.000*
1	*03*	*06*	*1.01*	*12*	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan*	*8 Dokumen*	*3.200.000.000*	*4.800.000.000*
1	*03*	*06*	*1.01*	*13*	*Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan*	*Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan*	*8 Dokumen*	*1.600.000.000*	*2.400.000.000*
1	**03**				**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA**						**855.484.100.500**	**861.925.185.500**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**		**Persen**	**49.386.065.500**	**49.675.185.500**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**		**7 Dokumen**	**780.000.000**	**825.000.000**
1	*03*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*0 Dokumen*	*220.000.000*	*250.000.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*20.000.000*	*25.000.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*20.000.000*	*25.000.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*20.000.000*	*25.000.000*
1	*03*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Laporan*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	**03**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**26.016.065.500**	**26.150.185.500**
1	*03*	*01*	*1,02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*303 orang/ bulan*	*24.265.185.500*	*24.265.185.500*
1	*03*	*01*	*1,02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*1.500.000.000*	*1.600.000.000*
1	*03*	*01*	*1,02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*17.000.000*	*20.000.000*
1	*03*	*01*	*1,02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*12.000.000*	*15.000.000*
1	*03*	*01*	*1,02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*221.880.000*	*250.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**03**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**350.000.000**	**350.000.000**
1	*03*	*01*	*1,05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*03*	*01*	*1,05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*03*	*01*	*1,05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*10 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**03**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**2.070.000.000**	**2.170.000.000**
1	*03*	*01*	*1,06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*3 Dokumen*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*07*	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan*	*2 Paket*	*100.000.000*	*150.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*120.000.000*	*150.000.000*
1	*03*	*01*	*1,06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.200.000.000*	*1.200.000.000*
1	**03**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**73 Unit**	**15.500.000.000**	**15.500.000.000**
1	*03*	*01*	*1,07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*7 Unit*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*
1	*03*	*01*	*1,07*	*03*	*Pengadaan Alat Besar*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	*1 Unit*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*
1	*03*	*01*	*1,07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*01*	*1,07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*3.000.000.000*	*3.000.000.000*
1	*03*	*01*	*1,07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*8.000.000.000*	*8.000.000.000*
1	**03**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**12 Laporan**	**1.170.000.000**	**1.180.000.000**
1	*03*	*01*	*1,08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*20.000.000*	*30.000.000*
1	*03*	*01*	*1,08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*750.000.000*	*750.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*03*	*01*	*1,08*	*03*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*03*	*01*	*1,08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	**03**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**56 Unit**	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**
1	*03*	*01*	*1,09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*12 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	*03*	*01*	*1,09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*12 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	*03*	*01*	*1,09*	*03*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	*18 Unit*	*450.000.000*	*450.000.000*
1	*03*	*01*	*1,09*	*09*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*7 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	*03*	*01*	*1,09*	*10*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*7 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Dalam Kondisi Baik**		**188.250.000.000**	**188.750.000.000**
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase perlindungan terhadap banjir dan abrasi kewenangan provinsi**		**127.650.000.000**	**127.750.000.000**
1	*03*	*02*	*1.01*	*09*	*Pembangunan Tanggul Sungai*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*	*3 KM*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*75*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi*	*3 Lembaga*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*77*	*Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi*	*2 KM*	*31.000.000.000*	*31.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*79*	*Normalisasi/Restorasi Sungai*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	*2 KM*	*7.500.000.000*	*7.500.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*82*	*Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara*	*2 KM*	*2.500.000.000*	*2.500.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*86*	*Pembangunan Breakwater*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Breakwater yang Dibangun*	*2 KM*	*21.200.000.000*	*21.200.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*87*	*Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi*	*3 Dokumen*	*50.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*03*	*02*	*1.01*	*90*	*Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan*	*3 Lembaga*	*450.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*107*	*Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara*	*2 KM*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*117*	*Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun*	*3 Dokumen*	*4.500.000.000*	*4.500.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*118*	*Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun*	*3 KM*	*40.000.000.000*	*40.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*119*	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun*	*3 Dokumen*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*120*	*Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun*	*1 Unit*	*10.000.000.000*	*10.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1.01*	*121*	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*	*3 Dokumen*	*2.150.000.000*	*2.150.000.000*
1	**03**	**02**	**1,02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**		**60.600.000.000**	**61.000.000.000**
1	*03*	*02*	*1,02*	*14*	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*	*10 KM*	*45.000.000.000*	*45.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1,02*	*17*	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi*	*4 KM*	*6.000.000.000*	*6.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1,02*	*21*	*Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*	*150 KM*	*8.000.000.000*	*8.000.000.000*
1	*03*	*02*	*1,02*	*32*	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun*	*5 Dokumen*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*02*	*1,02*	*34*	*Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi*	*5 Lembaga*	*1.100.000.000*	*1.500.000.000*
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap**		**617.433.035.000**	**623.000.000.000**
1	**03**	**10**	**1,01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase penambahan jaringan jalan**		**617.433.035.000**	**623.000.000.000**
1	*03*	*10*	*1,01*	*25*	*Rehabilitasi Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi*	*40 Jembatan*	*350.000.000*	*500.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*03*	*10*	*1,01*	*26*	*Pemeliharaan Rutin Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	*100 Jembatan*	*1.000.000.000*	*2.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*27*	*Pemeliharaan Berkala Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala*	*50 Jembatan*	*500.000.000*	*1.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*30*	*Rehabilitasi Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*	*30 KM*	*300.000.000.000*	*300.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*31*	*Rekonstruksi Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*	*40 KM*	*200.000.000.000*	*200.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*32*	*Pembangunan Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Jembatan yang Dibangun*	*60 Jembatan*	*21.000.000.000*	*21.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*33*	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	*150 KM*	*10.000.000.000*	*10.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*36*	*Penggantian Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Jembatan yang Diganti*	*115 Jembatan*	*41.083.035.000*	*45.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*38*	*Pemeliharaan Berkala Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*	*30 KM*	*30.000.000.000*	*30.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*41*	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*	*2 Dokumen*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*42*	*Pembangunan Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jalan yang Dibangun*	*1 KM*	*6.000.000.000*	*6.000.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*43*	*Survey Kondisi Jalan/Jembatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	*2 KM*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*03*	*10*	*1,01*	*44*	*Pengelolaan Leger Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola*	*1 Dokumen*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase SDM yang kompeten dan profesional di bidang konstruksi**		**415.000.000**	**500.000.000**
1	**03**	**11**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya konektivitas antarwilayah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah kelas pelatihan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi yang diselenggarakan**		**415.000.000**	**500.000.000**
1	*03*	*11*	*1,01*	*12*	*Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya konektivitas antarwilayah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya*	*50 Lembaga*	*415.000.000*	*500.000.000*
1	**04**				**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**						**104.970.000.000**	**58.453.500.000**
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**63.258.500.000**	**55.703.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**				**14.768.500.000**	**14.763.500.000**
1	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**11 Dokumen**	**305.000.000**	**300.000.000**
1	*04*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	*25.000.000*	*25.000.000*
1	*04*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*0*
1	*04*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*2 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	**04**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9 Kegiatan**	**10.150.000.000**	**10.150.000.000**
1	*04*	*01*	*1,02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*90 Orang/Bulan*	*10.000.000.000*	*10.000.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*06*	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*25.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*01*	*1,02*	*08*	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**04**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**85.000.000**	**85.000.000**
1	*04*	*01*	*1,03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,03*	*02*	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,03*	*03*	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,03*	*04*	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*01*	*1,03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*04*	*01*	*1,03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,03*	*07*	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	**04**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**605.000.000**	**605.000.000**
1	*04*	*01*	*1,05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*01*	*1,05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*100 Paket*	*75.000.000*	*75.000.000*
1	*04*	*01*	*1,05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
		1	*1,05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*01*	*1,05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*10 Orang*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*01*	*1,05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*20 Orang*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*04*	*01*	*1,05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*20 Orang*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	**04**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.473.500.000**	**1.473.500.000**
1	04	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
1	*04*	*01*	*1,06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*500.000.000*	*500.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*04*	*01*	*1,06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*3.500.000*	*3.500.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,06*	*11*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	**04**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**22 Unit**	**975.000.000**	**975.000.000**
1	*04*	*01*	*1,07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*2 Unit*	*700.000.000*	*700.000.000*
1	*04*	*01*	*1,07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*5 Paket*	*75.000.000*	*75.000.000*
1	*04*	*01*	*1,07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*4 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*01*	*1,07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*04*	*01*	*1,07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	**04**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jassa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**385.000.000**	**385.000.000**
1	*04*	*01*	*1,08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	*04*	*01*	*1,08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*01*	*1,08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*180.000.000*	*180.000.000*
1	**04**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara**	**33 Unit**	**790.000.000**	**790.000.000**
1	*04*	*01*	*1,09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	*350.000.000*	*350.000.000*
1	*04*	*01*	*1,09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*01*	*1,09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*5 Unit*	*10.000.000*	*10.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*04*	*01*	*1,09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*25.000.000*	*25.000.000*
1	*04*	*01*	*1,09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*275.000.000*	*275.000.000*
1	*04*	*01*	*1,09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*25.000.000*	*25.000.000*
1	*04*	*01*	*1,09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**		**Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program**		**26.250.000.000**	**18.700.000.000**
1	**04**	**02**	**1,01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**		**Dokumen Pendataan yang tersedia**		**1.200.000.000**	**1.300.000.000**
1	*04*	*02*	*1,01*	*02*	*Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*02*	*1,01*	*03*	*Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*02*	*1,01*	*06*	*Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*02*	*1,01*	*07*	*Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*02*	*1,01*	*08*	*Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*02*	*1,01*	*09*	*Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*04*	*02*	*1,01*	*11*	*Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**04**	**02**	**1,02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**		**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**		**600.000.000**	**600.000.000**
1	*04*	*02*	*1,02*	*01*	*Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana*	*30 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*02*	*1,02*	*04*	*Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih*	*20 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*02*	*1,02*	*06*	*Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*04*	*02*	*1,02*	*08*	*Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi*	*1 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*02*	*1,02*	*09*	*Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan*	*30 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*02*	*1,02*	*10*	*Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan*	*30 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**04**	**02**	**1,03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**		**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**50 Unit**	**24.150.000.000**	**16.500.000.000**
1	*04*	*02*	*1,03*	*01*	*Rehabilitasi Rumah Bagi Korban bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi*	*20 Unit Rumah*	*3.150.000.000*	*3.150.000.000*
1	*04*	*02*	*1,03*	*04*	*Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun*	*30 Unit Rumah*	*6.750.000.000*	*6.750.000.000*
1	*04*	*02*	*1,03*	*06*	*Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan*	*30 Rumah*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*04*	*02*	*1,03*	*09*	*Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun*	*3 Unit Rumah*	*600.000.000*	*600.000.000*
1	*04*	*02*	*1,03*	*11*	*Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi*	*30 Unit Rumah*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*
1	*04*	*02*	*1,03*	*12*	*Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi*	*30 Unit Rumah*	*8.500.000.000*	*850.000.000*
1	**04**	**02**	**1,04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**		**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**		**300.000.000**	**300.000.000**
1	*04*	*02*	*1,04*	*06*	*Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah*	*2 Rumah Tangga*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*04*	*02*	*1,04*	*07*	*Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi*	*2 Dokumen*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Tertatanya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**		**15.140.000.000**	**15.140.000.000**
1	**04**	**03**	**1,01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)Ha**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**		**490.000.000**	**490.000.000**
1	*04*	*03*	*1,01*	*08*	*Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi*	*1 Dokumen*	*350.000.000*	*350.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*04*	*03*	*1,01*	*14*	*Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina*	*1 Kelompok Masyarakat*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*03*	*1,01*	*15*	*Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Perema jaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*03*	*1,01*	*16*	*Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemuga ran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah*	*1 Rumah Tangga*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	*04*	*03*	*1,01*	*17*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*03*	*1,01*	*18*	*Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*	*1 Orang*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	**04**	**03**	**1,02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**50 Ha**	**14.650.000.000**	**14.650.000.000**
1	*04*	*03*	*1,02*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*3 Laporan*	*250.000.000*	*250.000.000*
1	*04*	*03*	*1,02*	*03*	*Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki*	*272 Unit Rumah*	*6.800.000.000*	*6.800.000.000*
1	*04*	*03*	*1,02*	*05*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*04*	*03*	*1,02*	*13*	*Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan*	*1 Hektar*	*4.500.000.000*	*4.500.000.000*
1	*04*	*03*	*1,02*	*14*	*Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar*	*1 Ha*	*3.000.000.000*	*3.000.000.000*
1	**04**	**05**			**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU**	**156 Kawasan**	**7.100.000.000**	**7.100.000.000**
1	**04**	**05**	**1,01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Jumlah Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU**	**50 Unit**	**7.100.000.000**	**7.100.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*04*	*05*	*1,01*	*01*	*Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman*	*7 Dokumen*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*
1	*04*	*05*	*1,01*	*02*	*Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman*	*25 Lokasi*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*
1	*04*	*05*	*1,01*	*03*	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**41.711.500.000**	**2.750.000.000**
2	**10**	**03**			**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**				**200.000.000**	**200.000.000**
2	**10**	**03**	**1,01**		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Jumlah Penetapan Lokasi**	**2 Lokasi**	**200.000.000**	**200.000.000**
2	*10*	*03*	*1,01*	*01*	*Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*	*2 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
2	**10**	**05**			**Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**				**41.061.500.000**	**2.100.000.000**
2	**10**	**05**	**1,01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah**		**41.061.500.000**	**2.100.000.000**
2	*10*	*05*	*1,01*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
2	*10*	*05*	*1,01*	*02*	*Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan*	*5 Laporan*	*40.961.500.000*	*2.000.000.000*
2	**10**	**07**			**Program Penetapan Tanah Ulayat**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**				**450.000.000**	**450.000.000**
2	**10**	**07**	**1,01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**Penetapan Tanah Ulayat**		**450.000.000**	**450.000.000**
2	*10*	*07*	*1,01*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*3 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
2	*10*	*07*	*1,01*	*02*	*Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur*	*3 Dokumen*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**42.199.115.413**	**44.745.765.011**
1	**05**				**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**						**20.920.000.000**	**21.170.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**BPBD PROV.SULTRA**		**100%**	**11.770.000.000**	**11.770.000.000**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**BPBD PROV.SULTRA**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**DOKUMEN**	**290.000.000**	**290.000.000**
1	*05*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*3 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD*	*1 Dokumen*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koorsinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*8 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*17 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	***05***	***01***	***1.02***		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***BPBD PROV.SULTRA***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***5.305.000.000***	***5.305.000.000***
1	*05*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PNS;*	*49 Orang/Bulan*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*
1	*05*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*05*	*01*	*1.02*	***03***	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;*	*2 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Hasil koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD*	*5 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*4 Laporan*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*05*	*01*	*1.02*	*06*	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjud Pemeriksaan*	*4 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*4 Laporan*	*40.000.000*	*40.000.000*
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***BPBD PROV.SULTRA***	***Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**400.000.000**	**400.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*10 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*02*	*Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*5 Paket*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*12 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*4 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*12 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Orang*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*5 Orang*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*05*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*5 Orang*	*15.000.000*	*15.000.000*
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah;**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***BPBD PROV.SULTRA***	***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**1.290.000.000**	**1.290.000.000**
1	*05*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan*	*10 Paket*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*20.000.000*	*20.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*07*	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu;*	*12 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;*	*12 Laporan*	*700.000.000*	*700.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*11*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***BPBD PROV.SULTRA***	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia***		**3.300.000.000**	**3.300.000.000**
1	*05*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*2 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*01*	*1.07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan*	*2 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*03*	*Pengadaan Alat Besar*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit alat besar yang disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*04*	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan;*	*10 Paket*	*200.000.000*	*200.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*5 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*07*	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit aset tetap lainnya yang disediakan*	*0 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*08*	*Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Aset Tetap Tak Berwujud yang disediakan*	*0 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***BPBD PROV.SULTRA***	***Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan***		**235.000.000**	**235.000.000**
1	05	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat;*	*600 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
1	05	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	*12 Laporan*	*50.000.000*	*50.000.000*
1	05	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*12 Laporan*	*30.000.000*	*30.000.000*
1	05	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	*12 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***BPBD PROV.SULTRA***	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara***		**950.000.000**	**950.000.000**
1	05	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	2 Unit	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya*	10 Unit	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*03*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinanya*	1 Unit	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*04*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinanya*	2 Unit	*50.000.000*	*50.000.000*
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel;	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Mebel yang di Pelihara*	2 Unit	*50.000.000*	*50.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara*	10 Unit	*50.000.000*	*50.000.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/direhabilitasi*	2 Unit	*200.000.000*	*200.000.000*
1	05	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi*	2 Unit	*200.000.000*	*200.000.000*
1	05	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*	*Tata kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi*	1 Unit	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**	**BPBD PROV.SULTRA**	**Persentasi meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dalam pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan serta tanggap darurat dan pasca bencana**		**9.150.000.000**	**9.400.000.000**
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**	**BPBD PROV.SULTRA**	**Jumlan laporan informasi rawan bencana provinsi**	**Laporan**	**1.900.000.000**	**2.000.000.000**
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana);	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD dan Instansi TERKAIT*	*Jumlah Orang yang Tersedia Untuk Melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kab/Kota*	*350 Orang*	*700.000.000*	*700.000.000*
1	05	03	1.01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan*	*1 Dokumen*	*1.200.000.000*	*1.300.000.000*
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**	**BPBD PROV.SULTRA**	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**		**3.200.000.000**	**3.350.000.000**
1	*05*	*03*	*1.02*	*12*	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan*	*1 Dokumen*	*1.200.000.000*	*1.200.000.000*
1	05	03	1.02	*13*	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	*5 Kawasan*	*500.000.000*	*400.000.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*14*	*Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	05	03	1.02	*15*	*Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	*50 Orang*	*300.000.000*	*400.000.000*
1	05	03	1.02	*16*	*Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana*	*150.000 Orang*	*200.000.000*	*200.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	1.02	*17*	*Penyusunan Rencana Kontijensi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas*	*2 Dokumen*	*100.000.000*	*150.000.000*
1	05	03	1.02	*18*	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	*400.000.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*19*	*Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD PROV.SULTRA*	*Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana*	*2 Orang*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	05	03	1.02	*20*	*Pengelolaan Risiko Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Se-Sultra*	*Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani*	*1 Kegiatan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*21*	*Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD Se-Sultra*	*Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	*100 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**	**BPBD PROV.SULTRA**	**Jumlah laporan penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana**	**Laporan**	**3.100.000.000**	**3.100.000.000**
1	05	03	1.03	01	*Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas;*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD DAN OPD TERKAIT*	Jumlah Laporan hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	05	03	1.03	02	*Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD PROV.SULTRA*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	*17 Laporan*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	05	03	1.03	03	*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD DAN OPD TERKAIT*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	*17 Laporan*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	05	03	1.03	04	*Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD PROV.SULTRA*	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*1 Orang*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	05	03	1.03	05	*Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD DAN OPD TERKAIT*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*1 Laporan*	*500.000.000*	*500.000.000*
1	05	03	1.03	06	*Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	*BPBD DAN OPD TERKAIT*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*1 Laporan*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**	**BPBD PROV.SULTRA**	**Jumlah laporan pelaksanaan sisten dasar penanggulangan bencana**	**Laporan**	**950.000.000**	**950.000.000**
1	05	03	1.04	06	*Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD Prov.Sultra	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	*40 Keluarga*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	05	03	1.04	07	*Penanganan Pasca Bencana Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD Prov.Sultra	*Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun*	*6 Dokumen*	*150.000.000*	*150.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	1.04	16	*Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD dan OPD Terkait	*Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	*3 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	05	03	1.04	17	*Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD Se-Sultra	*Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	*300.000.000*
1	05	03	1.04	18	*Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD Se-Sultra	*Jumlah Dokumen yang dilegalkan*	*2 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	05	03	1.04	19	*Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangar*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD Prov.Sultra	*Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)*	*2 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	05	03	1.04	20	*Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minir*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*	BPBD Prov.Sultra	*Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota*	*17 Kabupaten/ Kota*	*100.000.000*	*100.000.000*
1	**05**				**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**						**21.279.115.413**	**23.575.765.011**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**15.997.749.329**	**17.597.524.262**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kendari	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**1 Dokumen**	**165.000.000**	**181.500.000**
1	*05*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*33.000.000*	*36.300.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	*Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	*Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*23.100.000*	*25.410.000*
1	*05*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	*Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*93.500.000*	*102.850.000*
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Kendari**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**2 Laporan**	**8.010.079.000**	**8.811.086.900**
1	*05*	*01*	*1.02*	*01*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 Orang/ Bulan	7.805.039.000	8.585.542.900
1	*05*	*01*	*1.02*	*02*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	550.000	605.000
1	*05*	*01*	*1.02*	*03*	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen penataushaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	187.000.000	205.700.000
1	*05*	*01*	*1.02*	*04*	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	1 Dokumen	550.000	605.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*01*	*1.02*	*05*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.700.000	8.470.000
1	*05*	*01*	*1.02*	*06*	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	770.000	847.000
1	*05*	*01*	*1.02*	*07*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.700.000	8.470.000
1	*05*	*01*	*1.02*	*08*	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi angggaran	1 Dokumen	770.000	847.000
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah SKPD**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kendari**	**Jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah**	**7 Dokumen**	**97.350.000**	**107.085.000**
1	*05*	*01*	*1.03*	*01*	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	770.000	847.000
1	*02*	*01*	*1.03*	*02*	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000	2.420.000
1	*05*	*01*	*1.03*	*03*	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.200.000	2.420.000
1	*05*	*01*	*1.03*	*04*	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.650.000	1.815.000
1	*05*	*01*	*1.03*	*05*	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.650.000	1.815.000
1	*05*	*01*	*1.03*	*06*	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	88.000.000	96.800.000
1	*05*	*01*	*1.03*	*07*	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	880.000	968.000
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kendari	**Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**596.624.244**	**656.286.668**
1	*02*	*01*	*1.05*	*01*	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Unit	1.100.000	1.210.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*02*	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	498.591.904	548.451.094
1	*05*	*01*	*1.05*	*03*	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	550.000	605.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*04*	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.982.340	4.380.574
1	*05*	*01*	*1.05*	*05*	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	550.000	605.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*06*	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	1.650.000	1.815.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*07*	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	550.000	605.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*08*	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	2 Orang	1.650.000	1.815.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*01*	*1.05*	*09*	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	44.000.000	48.400.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*10*	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	22.000.000	24.200.000
1	*05*	*01*	*1.05*	*11*	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	22.000.000	24.200.000
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Kendari**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**1.230.671.538**	**1.353.738.692**
1	*05*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*22.000.000*	*24.200.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*33.000.000*	*36.300.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*1 Paket*	*11.000.000*	*12.100.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logsitik Kantor*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*1 Paket*	*113.291.538*	*124.620.692*
1	*05*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan*	*1 Paket*	*110.000.000*	*121.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*	*1 Dokumen*	*22.000.000*	*24.200.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*07*	*Penyediaan Bahan/Material*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah paket bahan/material yang disediakan*	*1 Paket*	*550.000*	*605.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitas Kunjungan Tamu*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*143.000.000*	*157.300.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*770.000.000*	*847.000.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*330.000*	*363.000*
1	*05*	*01*	*1.06*	*11*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kendari	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan**	**160 Unit**	**634.453.600**	**697.898.960**
1	*05*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*20 Unit*	*55.000.000*	*60.500.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan*	*100 Unit*	*525.553.600*	*578.108.960*
1	*05*	*01*	*1.07*	*03*	*Pengadaan Alat Besar*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	*5 Unit*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*04*	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*10 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah paket mebel yang disediakan*	*1 Paket*	*2.750.000*	*3.025.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	*20 Unit*	*11.000.000*	*12.100.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*01*	*1.07*	*08*	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*20 Unit*	*550.000*	*605.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah unit gedung kantor atau bagunan lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*11.000.000*	*12.100.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bagunan lainnya yang disediakan*	*20 Unit*	*11.000.000*	*12.100.000*
1	*05*	*01*	*1.07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*20 Unit*	*11.000.000*	*12.100.000*
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan**	**4 Laporan**	**4.353.124.179**	**4.788.436.597**
1	*05*	*01*	*1.08*	*01*	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.864.000	7.550.400
1	*05*	*01*	*1.08*	*02*	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	107.119.584	117.831.542
1	*05*	*01*	*1.08*	*03*	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47.361.600	52.097.760
1	*05*	*01*	*1.08*	*04*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.191.778.995	4.610.956.895
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kendari**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara**	**247 Unit**	**910.446.768**	**1.001.491.445**
1	*05*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*29 Unit*	*246.417.600*	*271.059.360*
1	*05*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*31 Unit*	*397.425.600*	*437.168.160*
1	*05*	*01*	*1.09*	*03*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	*5 Unit*	*550.000*	*605.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*04*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	*5 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*40 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*07*	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*08*	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*15 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*228.653.568*	*251.518.925*
1	*05*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*50 Unit*	*3.300.000*	*3.630.000*
1	*05*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*50 Unit*	*3.300.000*	*3.630.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*01*	*1.09*	*12*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kendari*	*Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi*	*1 Ha*	*3.300.000*	*3.630.000*
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**4.944.716.434**	**5.615.926.134**
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan**	**100%**	**4.600.522.034**	**5.237.312.294**
1	*05*	*02*	*1.01*	*08*	*Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*02*	*1.01*	*13*	*Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia*	*50 Unit*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*02*	*1.01*	*14*	*Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi*	*1 Dokumen*	*2.200.000*	*2.420.000*
1	*05*	*02*	*1.01*	*15*	*Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada*	*1 Laporan*	*2.200.000*	*2.420.000*
1	*05*	*02*	*1.01*	*16*	*Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*1 Laporan*	*232.177.834*	*256.395.617*
1	*05*	*02*	*1.01*	*17*	*Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan*	*1 Laporan*	*770.000*	*185.585.057*
1	*05*	*02*	*1.01*	*18*	*Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja*	*10 Orang*	*90.090.000*	*90.099.000*
1	*05*	*02*	*1.01*	*19*	*Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	*200 Laporan*	*4.259.884.200*	*4.685.872.620*
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Yang Ditegakkan**	**85%**	**109.780.000**	**120.758.000**
1	*05*	*02*	*1.02*	*01*	*Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur*	*1 Laporan*	*3.850.000*	*4.235.000*
1	*05*	*02*	*1.02*	*02*	*Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur*	*1 Laporan*	*102.960.000*	*113.256.000*
1	*05*	*02*	*1.02*	*03*	*Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP*	*1 Laporan*	*2.200.000*	*2.420.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*02*	*1.02*	*09*	*Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda*	*1 Dokuman*	*770.000*	*847.000*
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**1 Dokumen**	**234.414.400**	**257.855.840**
1	*05*	*02*	*1.03*	*01*	*Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda*	*1 Laporan*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*02*	*1.03*	*04*	*Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*	*1 Dokumen*	*228.914.400*	*251.805.840*
1	***05***	***03***			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Cakupan Kabupaten Kota Yang Tanggap Bencana**	**3 Kab/Kota**	**100.580.000**	**110.638.000**
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Rawan Bencana Provinsi**	**1 Dokumen**	**2.200.000**	**2.420.000**
1	*05*	*03*	*1.01*	*02*	*Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota*	*100 Orang*	*2.200.000*	*2.420.000*
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Siaga dan Tanggap Bencana**	**17 Kab/Kota**	**10.560.000**	**11.616.000**
1	*05*	*03*	*1.02*	*12*	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan*	*1 Dokumen*	*770.000*	*847.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*13*	*Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	*1 Kawasan*	*2.750.000*	*3.025.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*14*	*Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana*	*1 Dokumen*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*15*	*Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	*5 Orang*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*16*	*Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana*	*10 Orang*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*17*	*Penyusunan Rencana Kontijensi*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas*	*1 Dokumen*	*770.000*	*847.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*03*	*1.02*	*18*	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan*	*1 Dokumen*	*770.000*	*847.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*19*	*Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana*	*100 Orang*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.02*	*21*	*Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	*50 Unit*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	05	03	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Sultra	**Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	100%	**6.270.000**	**6.897.000**
1	*05*	*03*	*1.03*	*01*	*Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas*	*1 Laporan*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.03*	*02*	*Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana*	*1 Laporan*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.03*	*03*	*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana*	*1 Laporan*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.03*	*04*	*Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*100 Orang*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.03*	*05*	*Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana*	*1 Laporan*	*770.000*	*847.000*
1	*05*	*03*	*1.03*	*06*	*Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit*	*1 Laporan*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	05	03	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Sultra	**Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	1 Dokumen	**81.550.000**	**89.705.000**
1	*05*	*03*	*1.04*	*06*	*Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	*5 Keluarga*	*50.000.000*	*55.000.000*
1	*05*	*03*	*1.04*	*07*	*Penanganan Pasca Bencana Provinsi*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun*	*1 Dokumen*	*20.000.000*	*22.000.000*
1	*05*	*03*	*1.04*	*16*	*Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*03*	*1.04*	*17*	*Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*	*1 Dokumen*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*03*	*1.04*	*18*	*Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen yang dilegalkan*	*1 Dokumen*	*2.200.000*	*2.420.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*03*	*1.04*	*19*	*Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)*	*1 Dokumen*	*550.000*	*605.000*
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Sultra**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**	**100%**	**236.069.650**	**251.676.615**
1	*05*	*04*	*1.01*		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Sultra	**Tersedianya peta rawan kebakaran**	1 Dokumen	**225.069.650**	**239.576.615**
1	*05*	*04*	*1.01*	*02*	*Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*04*	*Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan*	*1 Dokumen*	*2.200.000*	*2.420.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*06*	*Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal*	*1 Dokumen*	*770.000*	*847.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*07*	*Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	*1 Dokumen*	*770.000*	*847.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*09*	*Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)*	*50 Orang*	*4.400.000*	*4.840.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*12*	*Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*13*	*Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*	*10 Keluarga*	*100.000.000*	*110.000.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*18*	*Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*22*	*Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal*	*1 Dokumen*	*7.700.000*	*8.470.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*23*	*Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota*	*1 Laporan*	*550.000*	*605.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*24*	*Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*1 Dokumen*	*80.079.650*	*80.087.615*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*05*	*04*	*1.01*	*25*	*Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi*	*4 Kabupaten/Kota*	*1.100.000*	*1.210.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*26*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	*50 Unit*	*3.850.000*	*4.235.000*
1	*05*	*04*	*1.01*	*27*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait*	*50 Unit*	*550.000*	*605.000*
1	*05*	*04*	*1.02*		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Sultra	**Jumlah kab/kota yang tanggap penanggulangan kebakaran dan non kebakaran**	*6 Kabupaten/ Kota*	**11.000.000**	**12.100.000**
1	*05*	*04*	*1.02*	*02*	*Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*1 Laporan*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	*05*	*04*	*1.02*	*04*	*Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*1 Laporan*	*5.500.000*	*6.050.000*
1	**06**				**Urusan Sosial**						**22.144.266.000**	**23.383.821.000**
1	**06**				**Dinas Sosial**						**22.200.866.000**	**23.395.998.000**
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi**	**100 persen**	**15.929.466.000**	**18.820.834.000**
1	**06**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**1 Dokumen**	**717.520.000**	**1.135.690.000**
1	*06*	*01*	*1,01*	*01*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	468.400.000	680.000.000
1	*06*	*01*	*1,01*	*02*	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	109.200.000	200.000.000
1	*06*	*01*	*1,01*	*03*	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	20.400.000	35.000.000
1	*06*	*01*	*1,01*	*04*	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	10.800.000	20.000.000
1	*06*	*01*	*1,01*	*05*	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	8.640.000	15.940.000
1	*06*	*01*	*1,01*	*06*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	11.232.000	20.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	*06*	*01*	*1,01*	*07*	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	88.848.000	164.000.000
1	**06**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**10.775.937.000**	**10.793.712.000**
1	06	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Orang/Bulan	10.262.668.000	10.262.712.000
1	06	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	237.600.000	250.000.000
1	06	01	1,02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	5.616.000	6.000.000
1	06	01	1,02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	270.053.000	275.000.000
1	**06**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**6 Dokumen**	**326.880.000**	**358.000.000**
1	06	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	6.480.000	8.000.000
1	06	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	187.200.000	200.000.000
1	06	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	1 Laporan	58.320.000	65.000.000
1	06	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	36.000.000	40.000.000
1	06	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	21.600.000	25.000.000
1	06	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.280.000	20.000.000
1	**06**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**68.720.000**	**35.500.000**
1	06	01	1,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	1 Dokumen	39.360.000	17.500.000
1	06	01	1,04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah*	1 Laporan	24.320.000	8.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	1,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Semua	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Laporan	5.040.000	10.000.000
1	**06**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Lamporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4 Kegiatan**	**662.400.000**	**745.000.000**
1	06	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	1 Unit	64.800.000	75.000.000
1	06	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	150 Paket	216.000.000	250.000.000
1	06	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	122.400.000	125.000.000
1	06	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	120 Orang	194.400.000	200.000.000
1	06	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	64.800.000	95.000.000
1	**06**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**9 laporan**	**1.147.452.000**	**1.914.304.000**
1	06	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket	14.515.000	26.781.000
1	06	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	90.000.000	166.050.000
1	06	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	78.000.000	143.910.000
1	06	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	31.104.000	57.387.000
1	06	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	20.736.000	38.258.000
1	06	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	19.356.000	35.712.000
1	06	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	2.160.000	3.985.000
1	06	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	68.429.000	126.251.000
1	06	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	818.832.000	1.308.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.320.000	7.970.000
1	**06**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia***	**7 Paket**	**859.427.000**	**1.401.143.000**
1	06	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	0,00	0,00
1	06	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	0,00	0,00
1	06	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Paket	101.827.000	187.871.000
1	06	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	21.600.000	39.852.000
1	06	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	36.000.000	66.420.000
1	06	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	370.000.000	498.150.000
1	06	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	108.000.000	199.260.000
1	06	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	222.000.000	409.590.000
1	**06**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		***Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan***	**4 laporan**	**478.330.000**	**790.269.000**
1	06	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	160.010.000	295.219.000
1	06	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	174.000.000	321.030.000
1	06	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	108.320.000	107.600.000
1	06	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	36.000.000	66.420.000
1	**06**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara***	**8 unit**	**892.800.000**	**1.647.216.000**
1	06	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit	108.000.000	199.260.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	180.000.000	332.100.000
1	06	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	12 Unit	7.200.000	13.284.000
1	06	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	10.800.000	19.926.000
1	06	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	10.800.000	19.926.000
1	06	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	122.400.000	225.828.000
1	06	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	216.000.000	398.520.000
1	06	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	237.600.000	438.372.000
1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**				**6.214.800.000**	**4.562.987.000**
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan**	**5 kegiatan**	**936.000.000**	**1.170.000.000**
1	**06**	**02**	**1,01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		***Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan***	**1 Dokumen**	**96.000.000**	**160.000.000**
1	06	02	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*	1 Dokumen	96.000.000	160.000.000
1	**06**	**02**	**1,02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		***Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan***	**4 Kegiatan**	**840.000.000**	**1.010.000.000**
1	06	02	1,02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi*	40 Orang	152.400.000	165.000.000
1	06	02	1,02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat	40 Orang	342.000.000	350.000.000
1	06	02	1,02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi*	20 Keluarga	216.000.000	350.000.000
1	06	02	1,02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	6 Lembaga	129.600.000	145.000.000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		***Jumlah Fasilitasi Warga Negara Pekerja Migran Korban tindak Kekerasan yang dilaksanakan***	**1 kegiatan**	**115.000.000**	**143.750.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**06**	**03**	**1,01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***		***Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang dipulangkan***	**5 Orang**	**115.000.000**	**143.750.000**
1	06	03	1,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota*	5 Orang	115.000.000	143.750.000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar dalam Panti yang memperoleh layanan dan Rehabilitasi Jumlah orang yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**3500 jiwa**	**753.800.000**	**844.237.000**
1	**06**	**04**	**1,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***		***Jumlah orang yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti***	**6 Orang**	**183.400.000**	**161.738.000**
1	06	04	1,01	01	Penyediaan Permakanan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi*	40 Orang	55.400.000	29.963.000
1	06	04	1,01	02	Penyediaan Sandang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi*	40 Orang	57.200.000	13.636.000
1	06	04	1,01	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi*	40 Orang	7.632.000	14.081.000
1	06	04	1,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi*	60 Orang	21.168.000	26.568.000
1	06	04	1,01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar*	1 Dokumen	42.000.000	77.490.000
1	**06**	**04**	**1,02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Lanjut usia yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti***	**50 Orang**	**300.000.000**	**241.363.000**
1	06	04	1,03	01	Penyediaan Permakanan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi*	50 Orang	62.000.000	32.140.000
1	06	04	1,03	02	Penyediaan Sandang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi*	50 Orang	56.000.000	11.070.000
1	06	04	1,03	04	Penyediaan Alat Bantu	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi*	25 Orang	68.000.000	33.210.000
1	06	04	1,03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi*	50 Orang	32.400.000	14.391.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	04	1,03	12	Pemulasaraan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi*	50 Orang	9.600.000	17.712.000
1	06	04	1,03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi*	1 Dokumen	72.000.000	132.840.000
1	**06**	**04**	**1,04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***		***Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti***	**30 Orang**	**150.000.000**	**218.998.000**
1	06	04	1,04	01	Penyediaan Permakanan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi*	30 Orang	25.000.000	19.225.000
1	06	04	1,04	02	Penyediaan Sandang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi*	30 Orang	25.000.000	18.225.000
1	06	04	1,04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi*	30 Orang	14.400.000	26.568.000
1	06	04	1,04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi*	30 Orang	6.600.000	9.225.000
1	06	04	1,04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi*	30 Orang	10.000.000	18.450.000
1	06	04	1,04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi*	10 Orang	15.000.000	27.675.000
1	06	04	1,04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti*	1 Dokumen	54.000.000	99.630.000
1	**06**	**04**	**1,05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***		***Jumlah orang yang mengkuti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti***	**10 Orang**	**120.400.000**	**222.138.000**
1	06	04	1,05	01	Penyediaan Permakanan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi*	10 Orang	4.000.000	7.380.000
1	06	04	1,05	02	Penyediaan Sandang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi*	10 Orang	5.000.000	9.225.000
1	06	04	1,05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi*	10 Orang	10.000.000	18.450.000
1	06	04	1,05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi*	10 Orang	8.400.000	15.498.000
1	06	04	1,05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi*	10 Orang	15.000.000	27.675.000
1	06	04	1,05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal*	5 Orang	12.000.000	22.140.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	04	1,05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA*	1 Dokumen	66.000.000	121.770.000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**56.600.000**	**12.177.000**
1	**06**	**04**	**1,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah orang yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti***	**6 Orang**	**56.600.000**	**12.177.000**
3	08	06	3,03	15	Penyediaan Alat Bantu	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi*	10 Orang	56.600.000	12.177.000
					UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA						**7.359.368.000**	**2.833.676.000**
1	**06**	**04**	**1,02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***		***Jumlah orang yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti***	**70 Orang**	**2.059.368.000**	**2.280.176.000**
1	06	04	1,02	01	Pengasuhan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi*	70 Orang	150.000.000	200.000.000
1	06	04	1,02	02	Penyediaan Makanan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi*	70 Orang	1.189.440.000	1.189.440.000
1	06	04	1,02	03	Penyediaan Sandang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi*	70 Orang	98.640.000	181.991.000
1	06	04	1,02	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi*	70 Orang	58.608.000	65.000.000
1	06	04	1,02	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi*	70 Orang	72.000.000	95.000.000
1	06	04	1,02	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi*	70 Orang	109.680.000	125.000.000
1	06	04	1,02	07	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi*	70 Orang	14.400.000	20.000.000
1	06	04	1,02	08	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi*	70 Orang	237.600.000	250.000.000
1	06	04	1,02	09	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi*	70 Orang	18.000.000	20.000.000
1	06	04	1,02	10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi*	70 Orang	12.000.000	22.140.000
1	06	04	1,02	11	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi*	70 Orang	9.000.000	16.605.000
1	06	04	1,02	12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti*	1 Dokumen	90.000.000	95.000.000
1	06	04	1,02	13	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi*	70 Orang	5.300.000.000	553.500.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		***Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan Sosial***	**1500 kk**	**642.000.000**	**1.165.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**06**	**05**	**1,01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah anak yang mengikuti Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal***	**2 Orang**	**65.000.000**	**109.435.000**
1	06	05	1,01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi*	10 Orang	25.000.000	35.635.000
1	06	05	1,01	01	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi*	10 Orang	40.000.000	73.800.000
1	**06**	**05**	**1,02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***		***Jumlah laporan pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi***	**3 keluarga**	**577.000.000**	**1.055.565.000**
1	06	05	1,02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi*	15 Keluarga	200.000.000	360.000.000
1	06	05	1,02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota*	15 Keluarga	190.000.000	350.550.000
1	06	05	1,02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi*	10 Orang	187.000.000	345.015.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		***Persentase Korban bencana yang memproleh Penanganan***	**100 persen**	**2.588.000.000**	**765.000.000**
1	**06**	**06**	**1,01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah korban bencana yang Terlindunginya Kebutuhan Sosial nya.***	**5 Orang**	**2.588.000.000**	**765.000.000**
1	06	06	1,01	01	Penyediaan Permakanan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi*	100 Orang	895.000.000	259.775.000
1	06	06	1,01	02	Penyediaan Sandang	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi*	100 Orang	580.000.000	232.100.000
1	06	06	1,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi*	10 Unit	245.000.000	83.025.000
1	06	06	1,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi*	100 Orang	450.000.000	156.890.000
1	06	06	1,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi*	100 Orang	418.000.000	33.210.000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik**	**Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat**		***Jumlah Taman makam Pahlawan Nasional yang dikelola dan memperoleh Pemeliharaan***	**2 unit**	**1.180.000.000**	**475.000.000**
1	**06**	**07**	**1,01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	***Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik***	***Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat***	**- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan***	**2 Unit**	**1.180.000.000**	**475.000.000**
1	06	07	1,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi*	1 Dokumen	860.000.000	195.200.000
1	06	07	1,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi*	1 Makam	220.000.000	177.800.000
1	06	07	1,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik*	*Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat*	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi*	1 Laporan	100.000.000	102.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**07**				**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**						**4.991.500.000**	**21.155.000.000**
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.041.500.000**	**19.955.000.000**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**		**15.452.000.000**
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**305.000.000**	**315.000.000**
2	*07*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*210.000.000*
2	*07*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
X	*XX*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**11.981.000.000**	**11.981.000.000**
2	*07*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*14 Orang/ Bulan*	*11.500.000.000*	*11.500.000.000*
2	*07*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*255.000.000*	*255.000.000*
2	*07*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	*07*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*221.000.000*	*221.000.000*
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**55.000.000**	**105.000.000**
2	*07*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	*07*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*50.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**909.500.000**	**1.225.000.000**
2	*07*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	*07*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*119.500.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*40.000.000*	*50.000.000*
2	*07*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*400.000.000*	*500.000.000*
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**450.000.000**	**600.000.000**
2	*07*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**208.000.000**	**258.500.000**
2	*07*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*8.000.000*	*8.500.000*
2	*07*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*200.000.000*	*250.000.000*
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**740.000.000**	**967.500.000**
2	*07*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*13 Unit*	*15.000.000*	*17.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*07*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*13 Unit*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*20 Unit*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*7 Unit*	*300.000.000*	*350.000.000*
2	*07*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*7 Unit*	*125.000.000*	*200.000.000*
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**605.000.000**	**760.000.000**
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n**	**60 Orang**	**525.000.000**	**675.000.000**
2	*07*	*03*	*1.01*	*01*	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n*	*60 Orang*	*525.000.000*	*675.000.000*
2	**07**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**80.000.000**	**85.000.000**
2	*07*	*03*	*1.02*	*01*	*Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi*	*25 LPK*	*80.000.000*	*85.000.000*
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**1.136.250.000**	**1.297.500.000**
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**288.750.000**	**302.500.000**
2	*07*	*04*	*1.01*	*05*	*Perluasan Kesempatan Kerja*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja*	*100 Orang*	*288.750.000*	*302.500.000*
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**360.000.000**	**420.000.000**
2	*07*	*04*	*1.03*	*02*	*Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)*	*17000 Orang*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	*07*	*04*	*1.03*	*03*	*Job Fair/Bursa Kerja*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	*2000 Orang*	*210.000.000*	*220.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**07**	**04**	**1.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**337.500.000**	**375.000.000**
2	*07*	*04*	*1.04*	*01*	*Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*	*50 Orang*	*75.000.000*	*100.000.000*
2	*07*	*04*	*1.04*	*04*	*Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan*	*50 Orang*	*262.500.000*	*275.000.000*
2	**07**	**04**	**1.05**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	***Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja***		**-**	**-**	**150.000.000**	**200.000.000**
2	*07*	*04*	*1.05*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Buton, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA*	*40 Orang*	*150.000.000*	*200.000.000*
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**1.239.750.000**	**1.334.500.000**
2	**07**	**05**	**1.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**409.500.000**	**429.000.000**
2	*07*	*05*	*1.01*	*01*	*Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online*	*30 Perusahaan*	*136.500.000*	*143.000.000*
2	*07*	*05*	*1.01*	*02*	*Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online*	*30 Perusahaan*	*136.500.000*	*143.000.000*
2	*07*	*05*	*1.01*	*03*	*Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek*	*1 Laporan*	*136.500.000*	*143.000.000*
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**530.250.000**	**555.500.000**
2	*07*	*05*	*1.02*	*01*	*Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*50 Perkara*	*136.500.000*	*143.000.000*
2	*07*	*05*	*1.02*	*02*	*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*	*25 Perkara*	*78.750.000*	*82.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*07*	*05*	*1.02*	*04*	*Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina*	*1 Lembaga*	*178.500.000*	*187.000.000*
2	*07*	*05*	*1.02*	*05*	*Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi*	*25 Perusahaan*	*136.500.000*	*143.000.000*
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**300.000.000**	**350.000.000**
2	*07*	*05*	*1.03*	*01*	*Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penetapan UMP*	*1 Surat Keputusan*	*300.000.000*	*350.000.000*
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**1.060.500.000**	**1.111.000.000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		-	-	**1.060.500.000**	**1.111.000.000**
2	*07*	*06*	*1.01*	*01*	*Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)*	*500 Perusahaan*	*525.000.000*	*550.000.000*
2	*07*	*06*	*1.01*	*02*	*Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan*	*50 Kasus*	*168.000.000*	*176.000.000*
2	*07*	*06*	*1.01*	*03*	*Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3*	*150 Perusahaan*	*367.500.000*	*385.000.000*
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**950.000.000**	**1.200.000.000**
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**150.000.000**	**200.000.000**
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**150.000.000**	**200.000.000**
3	*32*	*02*	*1.01*	*01*	*Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain*	*2 Dokumen*	*75.000.000*	*100.000.000*
3	*32*	*02*	*1.01*	*03*	*Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*24 Hektar*	*75.000.000*	*100.000.000*
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**500.000.000**	**650.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*		**-**	**-**	**500.000.000**	**650.000.000**
3	*32*	*03*	*1.01*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*4 Laporan*	*200.000.000*	*250.000.000*
3	*32*	*03*	*1.01*	*02*	*Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)*	*4 Dokumen*	*150.000.000*	*200.000.000*
3	*32*	*03*	*1.01*	*04*	*Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Transmigran yang Ditempatkan*	*200 Kepala Keluarga*	*150.000.000*	*200.000.000*
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan**	**Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja**		**-**	**-**	**300.000.000**	**350.000.000**
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*		**-**	**-**	**300.000.000**	**350.000.000**
3	*32*	*03*	*1.01*	*02*	*Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan*	*Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*4 Satuan Permukiman*	*300.000.000*	*350.000.000*
2	**08**				**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**12.868.240.100**	**14.200.312.000**
2	**08**				**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.277.471.600**	**12.499.279.300**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**8.651.632.300**	**9.666.296.300**
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)**	**10**	**244.423.100**	**268.865.700**
2	*08*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	*64.584.300*	*71.042.800*
2	*08*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)*	*1*	*14.378.500*	*19.816.500*
2	*08*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)*	*1*	*8.247.200*	*9.071.900*
2	*08*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)*	*1*	*3.306.300*	*3.637.000*
2	*08*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)*	*1*	*3.306.300*	*3.637.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)*	*3*	*15.600.500*	*16.660.500*
2	08	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1*	*135.000.000*	*145.000.000*
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**31**	**6.183.541.400**	**6.801.895.600**
2	08	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)*	*840*	*6.013.584.700*	*6.614.943.200*
2	08	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)*	*12*	*109.824.000*	*120.806.400*
2	08	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)*	*1*	*6.626.700*	*7.289.400*
2	08	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)*	*18*	*53.506.000*	*58.856.600*
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**3**	**177.552.400**	**195.307.600**
2	08	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)*	*1*	*49.000.000*	*53.900.000*
2	08	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*5*	*45.000.000*	*49.500.000*
2	08	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan (orang)*	*50*	*83.552.400*	*91.907.600*
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah**	**8**	**773.680.400**	**851.048.300**
2	08	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)*	*8*	*9.273.000*	*10.200.300*
2	08	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*5*	*5.720.000*	*6.292.000*
2	08	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)*	*10*	*9.273.000*	*10.200.300*
2	08	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)*	*17*	*40.637.900*	*44.701.600*
2	08	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)*	*7*	*28.077.500*	*30.885.200*
2	08	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)*	*180*	*4.008.000*	*4.408.800*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)*	*12*	*27.324.000*	*30.056.400*
2	08	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)*	*50*	*649.367.000*	*714.303.700*
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (unit)**	**16**	**435.000.000**	**850.000.000**
2	08	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)*	*2*	*80.000.000*	*80.000.000*
2	08	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)*	*1*	*40.000.000*	*40.000.000*
2	08	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)*	*1*	*45.000.000*	*50.000.000*
2	08	01	1.07	07	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)*	*10*	*85.000.000*	*90.000.000*
2	08	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*1*	*0,00*	*500.000.000*
2	08	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*1*	*100.000.000*	*0,00*
2	08	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*1*	*85.000.000*	*90.000.000*
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah laporan jasa penunjang urusan (laporan)**	**3**	**278.300.000**	**302.130.000**
2	08	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)*	*1*	*3.300.000*	*3.630.000*
2	08	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)*	*12*	*185.000.000*	*203.500.000*
2	08	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	*12*	*90.000.000*	*95.000.000*
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (unit)**	**9**	**559.135.000**	**397.049.100**
2	08	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*6*	*132.225.000*	*145.448.100*
2	08	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)*	*3*	*46.910.000*	*51.601.000*
2	08	01	1.09	05	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*75.000.000*	*80.000.000*
2	08	01	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*10 Unit*	*30.000.000*	*35.000.000*
2	08	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*25.000.000*	*30.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*200.000.000*	*0,00*
2	08	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**08**	**02**			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan PPRG**	**21%**	**698.608.000**	**761.535.000**
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (laporan)**	**3**	**244.939.000**	**279.432.600**
2	08	02	1.01	05	*Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Kendari*	*Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi*	*1*	*70.000.000*	*85.000.000*
2	08	02	1.01	06	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi*	*1*	*86.320.600*	*96.952.600*
2	08	02	1.01	07	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG*	*50*	*88.618.400*	*97.480.000*
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (Laporan)**	**2**	**268.669.000**	**282.102.400**
2	08	02	1.02	03	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (dokumen)*	*1*	*131.000.000*	*137.550.000*
2	08	02	1.02	04	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota (organisasi)*	*100*	*137.669.000*	*144.552.400*
2	**08**	**02**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (laporan)**	**3**	**185.000.000**	**200.000.000**
2	08	02	1.03	04	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)*	*40*	*90.000.000*	*95.000.000*
2	08	02	1.03	05	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)*	*40*	*95.000.000*	*105.000.000*
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Persentase perempuan anak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi**	**100%**	**460.122.000**	**495.837.500**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)**	**2**	**165.841.000**	**174.133.000**
2	*08*	*03*	*1.01*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (dokumen)*	*1*	*80.091.000*	*84.095.500*
2	*08*	*03*	*1.01*	*02*	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)*	*34*	*85.750.000*	*90.037.500*
2	**08**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)**	**2**	**80.091.000**	**84.095.500**
2	*08*	*03*	*1.02*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (layanan)*	*20*	*80.091.000*	*84.095.500*
2	**08**	**02**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)**	**3**	**214.190.000**	**237.609.000**
2	*08*	*03*	*1.03*	*01*	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (laporan)*	*1*	*53.790.000*	*59.169.000*
2	*08*	*03*	*1.03*	*02*	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)*	*34*	*95.400.000*	*106.940.000*
2	*08*	*03*	*1.03*	*04*	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)*	*1*	*65.000.000*	*71.500.000*
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk**	**28%**	**421.063.600**	**456.669.900**
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (laporan)**	**2**	**156.063.600**	**171.669.900**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	04	1.01	01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (laporan)*	*50*	*86.063.600*	*86.669.900*
2	08	04	1.01	03	*Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (laporan)*	*1*	*70.000.000*	*85.000.000*
2	**08**	**04**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (laporan)**	**3**	**200.000.000**	**215.000.000**
2	08	04	1.02	01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)*	*50*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	08	04	1.02	02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)*	*40*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	08	04	1.02	03	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (dokumen)*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**08**	**04**	**1.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia (layanan)**	**1**	**65.000.000**	**70.000.000**
2	08	04	1.03	01	*Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*		*Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (layanan)*	*1*	*65.000.000*	*70.000.000*
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Persentase perangkat daerah yang mengelola data terpilah gender dan anak**	**31%**	**230.750.000**	**242.287.500**
2	**08**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (laporan)**	**2**	**230.750.000**	**242.287.500**
2	08	05	1.01	01	*Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia (dokumen)*	*1*	*85.750.000*	*90.037.500*
2	08	05	1.01	02	*Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (dokumen)*	*2*	*145.000.000*	*152.250.000*
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk minimal 2 Forum Anak Tingkat Kecamatan dan 2 Forum Anak Desa/Kelurahan**	**41%**	**391.795.700**	**418.303.100**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**08**	**06**	**1.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (laporan)**	**2**	**136.878.500**	**146.065.100**
2	*08*	*06*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (dokumen)*	*1*	*46.854.500*	*51.539.900*
2	*08*	*06*	*1.01*	*03*	*Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi*	*50*	*90.024.000*	*94.525.200*
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (laporan)**	**3**	**254.917.200**	**272.238.000**
2	*08*	*06*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (orang)*	*50*	*78.500.000*	*87.000.000*
2	*08*	*06*	*1.02*	*05*	*Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)*	*1*	*96.781.000*	*101.620.000*
2	*08*	*06*	*1.02*	*06*	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi*	*1*	*79.636.200*	*83.618.000*
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Persentase anak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi**	**100%**	**423.500.000**	**458.350.000**
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)**	**2**	**115.000.000**	**125.000.000**
2	*08*	*07*	*1.01*	*03*	*Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi*	*100*	*65.000.000*	*70.000.000*
2	*08*	*07*	*1.01*	*04*	*Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**3**	**130.000.000**	**140.000.000**
2	*08*	*07*	*1.02*	*05*	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi*	*15*	*65.000.000*	*70.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*08*	*07*	*1.02*	*06*	*Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi*	*15*	*65.000.000*	*70.000.000*
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)**	**2**	**178.500.000**	**193.350.000**
2	*08*	*07*	*1.03*	*04*	*Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi*	*1*	*85.000.000*	*90.000.000*
2	*08*	*07*	*1.03*	*08*	*Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibiltas dan kualitas pendidikan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi*	*34*	*93.500.000*	*103.350.000*
2	**14**				**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.590.768.500**	**1.701.032.700**
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)**	**56%**	**460.824.000**	**491.860.100**
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi**	**3**	**325.824.000**	**346.860.100**
2	*14*	*02*	*1.01*	*02*	*Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (dokumen)*	*1*	*95.000.000*	*100.000.000*
2	*14*	*02*	*1.01*	*03*	*Advokasi dan Sosialisasi GDPK*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (laporan)*	*1*	*136.591.500*	*143.421.000*
2	*14*	*02*	*1.01*	*017*	*Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	*1*	*94.232.500*	*103.439.100*
2	**14**	**02**	**1.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi (laporan)**	**2**	**135.000.000**	**145.000.000**
2	*14*	*02*	*1.02*	*02*	*Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga (dokumen)*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*14*	*02*	*1.02*	*010*	*Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*	*1*	*85.000.000*	*90.000.000*
2	**14**	**02**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* /mCPR)**	**48,76%**	**476.538.000**	**513.941.800**
									Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	**29,20**		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah laporan hasil pengembangan deain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan lokal (laporan)**	**6**	**372.500.000**	**400.000.000**
2	*14*	*03*	*1.01*	*06*	*Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi*	*1*	*75.000.000*	*80.000.000*
2	*14*	*03*	*1.01*	*07*	*Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (dokumen)*	*1*	*67.500.000*	*70.000.000*
2	*14*	*03*	*1.01*	*010*	*Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	*1*	*55.000.000*	*60.000.000*
2	*14*	*03*	*1.01*	*011*	*Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*14*	*03*	*1.01*	*012*	*Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja*	*1*	*75.000.000*	*80.000.000*
2	*14*	*3*	*1.01*	*013*	*Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**14**	**03**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (laporan)**	**2**	**104.038.000**	**113.941.800**
2	*14*	*03*	*1.02*	*02*	*Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)*	*40*	*49.038.000*	*53.941.800*
2	*14*	*03*	*1.01*	*04*	*Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	*40*	*55.000.000*	*60.000.000*
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai)**	**54,36**	**653.406.500**	**695.230.800**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi (laporan)**	**7**	**503.106.500**	**540.230.800**
2	*14*	*04*	*1.01*	*03*	*Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)*	*1*	*72.500.000*	*76.125.000*
2	*14*	*04*	*1.01*	*15*	*Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (unit)*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*14*	*04*	*1.01*	*17*	*Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK*	*1*	*88.728.000*	*93.164.400*
2	*14*	*04*	*1.01*	*19*	*Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana*	*60*	*72.500.000*	*76.125.000*
2	*14*	*04*	*1.01*	*21*	*Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)*	*40*	*80.000.000*	*85.000.000*
2	*14*	*04*	*1.01*	*23*	*Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*	*1*	*89.378.500*	*99.816.400*
2	*14*	*04*	*1.01*	*25*	*Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	*Prov/Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*	*1*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**14**	**04**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan**		**Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (laporan)**	**2**	**150.300.000**	**155.000.000**
2	14	04	1.02	06	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	65.300.000	65.000.000
2	14	04	1.02	08	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	85.000.000	90.000.000
					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)						**394.184.000**	**396.393.000**
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi**	**100%**	**299.184.000**	**296.393.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**299.184.000**	**296.393.000**
2	*08*	*03*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	Sultra	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat*	***130 Orang***	**299.184.000**	**296.393.000**
2	**11**	**11**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi**	**100%**	**95.000.000**	**100.000.000**
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**3 Laporan**	**95.000.000**	**100.000.000**
2	*11*	*11*	*1.01*	*06*	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	Sultra	*Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan*	***150 Orang***	**95.000.000**	**100.000.000**
2	**09**				**URUSAN PANGAN**						**13.320.960.367**	**17.039.970.367**
2	**09**				**DINAS KETAHANAN PANGAN**						**13.320.960.367**	**17.039.970.367**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Nilai Akip Perangkat Daerah**	**73,70%**	**9.835.982.467**	**10.230.992.467**
2	**09**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**255.200.000**	**263.400.000**
2	*09*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*4 Dokumen*	*3.000.000*	*3.500.000*
2	*09*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	*1 Dokumen*	*70.000.000*	*72.000.000*
2	*09*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.200.000*
2	*09*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.200.000*
2	*09*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.200.000*
2	*09*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*1.200.000*	*1.300.000*
2	*09*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah loporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*175.000.000*	*180.000.000*
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**7.439.252.467**	**7.452.312.467**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*75 orang/14 bulan*	*7.245.812.467*	*7.245.812.467*
2	09	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
	09	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	*0*	*0*
	09	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*1.500.000*	*1.650.000*
2	09	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	*1 Laporan*	*1.500.000*	*1.650.000*
2	09	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.100.000*
2	09	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*178.440.000*	*190.000.000*
2	09	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.100.000*
2	**09**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**3.500.000**	**7.000.000**
2	09	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*1 Laporan*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan rekonsiliasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*1 Laporan*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*1 Laporan*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD*	*1 Dokumen*	*500.000*	*1.000.000*
2	**09**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**96.000.000**	**114.200.000**
2	09	01	1.05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	*1.000.000*	*2.000.000*
2	09	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*80 Paket*	*51.000.000*	*56.100.000*
2	09	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*500.000*	*1.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000	1.000.000
2	09	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	20.000.000	22.000.000
2	09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	12.000.000	20.000.000
2	09	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah orang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	10.000.000	11.000.000
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10 Laporan**	**725.300.000**	**748.100.000**
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	12.000.000	13.200.000
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2.000.000	2.200.000
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	70.000.000	77.000.000
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	55.000.000	61.000.000
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.300.000	3.500.000
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	500.000	550.000
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	76.000.000	84.000.000
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	505.000.000	505.000.000
2	09	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	550.000
2	09	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10 Unit**	**630.000.000**	**901.500.000**
2	09	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas Atau kendaraan dinas jabatanyang disediakan	Unit	0	555.000.000
2	09	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan	3 Unit roda 2, 1 Unit roda 4	400.000.000	75.000.000
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket Mebel yang disediakan	1 Paket	100.000.000	120.000.000
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Paket	60.000.000	70.000.000
2	09	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*5.000.000*	*6.000.000*
2	09	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*2 Unit*	*60.000.000*	*70.000.000*
2	09	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**285.200.000**	**298.000.000**
2	09	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat*	*1 Laporan*	*4.200.000*	*5.000.000*
2	09	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*1 Laporan*	*190.000.000*	*200.000.000*
2	09	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*3.000.000*
2	09	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*90.000.000*	*90.000.000*
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**91 Unit**	**401.530.000**	**446.480.000**
2	09	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya*	*1 Unit*	*25.000.000*	*30.000.000*
2	09	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya*	*29 Unit*	*170.000.000*	*185.000.000*
2	09	01	1.09	05	*Pemeliharaan Meubel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Meubel yang dipelihara*	*1 Unit*	*500.000*	*1.000.000*
2	09	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	*33 Unit*	*24.000.000*	*26.450.000*
2	09	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	*0*	*0*
2	09	01	1.09	09	*Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi*	*2 Unit*	*166.000.000*	*185.000.000*
2	09	01	1.09	10	*Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi*	*23 Unit*	*14.030.000*	*14.030.000*
2	09	01	1.09	11	*Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi*	*2 Unit*	*2.000.000*	*5.000.000*
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**1. Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)**	**303.562**	**294.000.000**	**490.000.000**
									2. Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari)	**3.200**		
									3. Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)	**64**		
2	09	02	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi**	**1 keg**	**294.000.000**	**490.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	02	1.01	03	*Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia*	*1 unit*	*50.000.000*	*80.000.000*
2	09	02	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*	*2 Laporan*	*100.000.000*	*200.000.000*
2	09	02	1.01	06	*Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia*	*5 Unit*	*144.000.000*	*210.000.000*
2	**09**	**03**		****	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**1. Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah, kedelai) (CV)**	**CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤**	**2.120.977.900**	**2.868.977.900**
									2. Konsumsi Energi (Kkl/Kap/hari)	**2.075,9**		
									4. Konsumsi Protein (Gr/kap/hari)	**62,0**		
2	09	03	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**Tersedianya dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**1 keg**	**600.000.000**	**950.000.000**
2	09	03	1.01	02	*Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.01	03	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.01	06	*Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen hasil peningkatan ketahanan pangan keluarga*	*1 dokumen*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.01	07	*Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.01	08	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis*	*1 Laporan*	*230.000.000*	*350.000.000*
2	09	03	1.01	09	*Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.01	10	*Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.01	11	*Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*100.000.000*
2	09	03	1.01	12	*Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi*	*1 Laporan*	*85.000.000*	*100.000.000*
2	09	03	1.01	13	*Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	*1 Dokumen*	*85.000.000*	*100.000.000*
2	09	03	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**6 Dokumen**	**1.113.977.900**	**1.268.977.900**
2	09	03	1.02	02	*Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Rencana kebutuhan pangan lokal*	*1 Dokumen*	*55.000.000*	*110.000.000*
2	09	03	1.02	04	*Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara*	*88,3 ton*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.02	05	*Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara*	*88,3 ton*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	09	03	1.02	06	*Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*88,3 ton*	*25.000.000*	*50.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*09*	*03*	*1.02*	*07*	*Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara*	*88,3 ton*	*958.977.900*	*958.977.900*
2	*09*	*03*	*1.02*	*08*	*Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	**09**	**03**	**1.03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Laporan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**1 Laporan**	**55.000.000**	**100.000.000**
2	*09*	*03*	*1.03*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal*	*1 Laporan*	*55.000.000*	*100.000.000*
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**1 keg**	**352.000.000**	**550.000.000**
2	*09*	*03*	*1.04*	*01*	*Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*1 dokumen*	*124.000.000*	*150.000.000*
2	*09*	*03*	*1.04*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)*	*1 laporan*	*84.000.000*	*150.000.000*
2	*09*	*03*	*1.04*	*03*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun*	*1 Laporan*	*120.000.000*	*200.000.000*
2	*09*	*03*	*1.04*	*04*	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi*	*1 Laporan*	*24.000.000*	*50.000.000*
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN (%)**	**15,76%**	**250.000.000**	**500.000.000**
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	**Prov. Sultra**	**Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	**50.000.000**
2	*09*	*04*	*1.01*	*01*	*Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang dimutakhirkan*	*1 dokumen*	*25.000.000*	*25.000.000*
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	**Prov. Sultra**	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**4 Dokumen**	**225.000.000**	**450.000.000**
2	*09*	*04*	*1.02*	*02*	*Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*150.000.000*
2	*09*	*04*	*1.02*	*03*	*Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	*09*	*04*	*1.02*	*04*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*200.000.000*
2	*09*	*04*	*1.02*	*05*	*Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi**	**Prov. Sultra**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan**	**82,35%**	**820.000.000**	**2.950.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Prov. Sultra**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**6 Dokumen**	**820.000.000**	**2.950.000.000**
2	*09*	*05*	*1.01*	*06*	*Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*21 Sertifikat*	*80.000.000*	*100.000.000*
2	*09*	*05*	*1.01*	*07*	*Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*2.000.000.000*
2	*09*	*05*	*1.01*	*08*	*Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*200.000.000*
2	*09*	*05*	*1.01*	*09*	*Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*1 Dokumen*	*390.000.000*	*400.000.000*
2	*09*	*05*	*1.01*	*10*	*Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*100.000.000*
2	*09*	*05*	*1.01*	*11*	*Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*150.000.000*
2	**11**				**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**						**15.500.000.000**	**19.177.327.290**
2	**11**				**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**						**15.500.000.000**	**19.177.327.290**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari dan Luar Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)**	**-**	**10.195.000.000**	**12.484.077.290**
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Cakupan keterpenuhan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD (%)**	**-**	**255.000.000**	**281.000.000**
2	*11*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah*	*4 Dokumen*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	*11*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	***11.500.000***
2	*11*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	
2	*11*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	***11.500.000***
2	*11*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	***11.500.000***
2	*11*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*2 Laporan*	*60.000.000*	***69.000.000***
2	*11*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Cakupan keterpenuhan administrasi keuangan (%)**	**-**	**6.004.950.000**	**7.706.869.790**
2	*11*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*70 orang*	*5.826.350.000*	*7.504.479.790*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*	*1 Dokumen*	*123.600.000*	*142.140.000*
2	11	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	11	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	11	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000*	***28.750.000***
2	11	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	11	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*10.000.000*	***11.500.000***
2	11	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**		-	*85.000.000*	*95.500.000*
2	11	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	11	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*17.250.000*
2	11	01	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*28.750.000*
2	11	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*15.000.000*	*17.250.000*
2	11	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*15.000.000*	*17.250.000*
2	11	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	11	01	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**		-	*75.000.000*	*84.750.000*
2	11	01	1.04	01	*Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	11	01	1.04	02	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*17.250.000*
2	11	01	1.04	03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	11	01	1.04	07	*Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	*Kota Kendari*	**Cakupan keterpenuhan SDM aparatur yang memenuhi standar disiplin aparatur (%)**	**-**	**310.000.000**	**354.250.000**
2	*11*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	1 Unit	***25.000.000***	*28.750.000*
2	*11*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*60.000.000*	***69.000.000***
2	*11*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	*11*	*01*	*1.05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	*11*	*01*	*1.05*	*05*	*Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring ,Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	*11*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan*	*6 Orang*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	*11*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*30 orang*	*30.000.000*	*34.500.000*
2	*11*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*30 orang*	*30.000.000*	*34.500.000*
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran (%)**	**-**	**1.100.000.000**	**1.263.500.000**
2	*11*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*1 Paket*	*15.000.000*	***17.250.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000*	***57.500.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000*	***40.250.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000*	***34.500.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*3 Dokumen*	*175.000.000*	***201.250.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*07*	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000*	***40.250.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*25.000.000*	***28.750.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari dan Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*725.000.000*	***833.750.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	***5.000.000***
2	*11*	*01*	*1.06*	*11*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	***5.000.000***
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kota Kendari	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)**	**-**	**1.340.000.000**	**1.541.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*600.000.000*	*690.000.000*
2	11	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*350.000.000*	*402.500.000*
2	11	01	1.07	04	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*1 Unit*	*30.000.000*	*34.500.000*
2	11	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000*	*34.500.000*
2	11	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*2 Unit*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	11	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*30.000.000*	*34.500.000*
2	11	01	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*150.000.000*	*172.500.000*
2	11	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	11	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kota Kendari	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan perkantoran (%)**	**-**	**502.000.000**	**555.700.000**
2	11	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.750.000*
2	11	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	*1 Laporan*	*275.000.000*	*316.250.000*
2	11	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*78.000.000*	*89.700.000*
2	11	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*144.000.000*	*144.000.000*
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kota Kendari	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)**	**-**	**523.050.000**	**601.507.500**
2	11	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	*1 Unit*	*30.150.000*	***34.672.500***
2	11	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*	*2 Unit*	*102.900.000*	***118.335.000***
2	11	01	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*20 Unit*	*50.000.000*	***57.500.000***
2	11	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	*10 Unit*	*50.000.000*	***57.500.000***
2	11	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*50.000.000*	***57.500.000***
2	11	01	1.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*2 Unit*	*90.000.000*	***103.500.000***

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*11*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)*	*2 Unit*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan keterpenuhan dokumen perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup (%)**	**-**	**1.750.000.000**	**1.972.500.000**
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan keterpenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)**	**-**	**550.000.000**	**772.500.000**
2	*11*	*02*	*1.01*	*02*	*Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)*	*17 Dokumen*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	*11*	*02*	*1.01*	*04*	*Penyusunan RPPLH Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	***400.000.000***
2	*11*	*02*	*1.01*	*05*	*Penetapan RPPLH Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	***200.000.000***
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	*Kendari*	**Cakupan keterpenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)**	**-**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
2	*11*	*02*	*1.02*	*02*	*Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Kendari*	*Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun (dokumen)*	*2 Dokumen*	*600.000.000*	*600.000.000*
2	*11*	*02*	*1.02*	*05*	*Pembinaan Penyelenggaraan KLHS*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Kendari*	*Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan*	*1 Dokumen*	*0,00*	*0.00*
		02	*1.02*	*08*	*Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*	*1 Dokumen*	*600.000.000*	*600.000.000*
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)**	**-**	**1.600.000.000**	**1.990.000.000**
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)**	**-**	**350.000.000**	**402.500.000**
2	*11*	*03*	*1.01*	*01*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	***230.000.000***
2	*11*	*03*	*1.01*	*02*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	**11**	**03**	**1.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)**	**-**	**1.000.000.000**	**1.150.000.000**
2	*11*	*03*	*1.02*	*01*	*Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*375.000.000*	***431.250.000***
2	*11*	*03*	*1.02*	*02*	*Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi*	*1 Lokasi*	*375.000.000*	***431.250.000***
2	*11*	*03*	*1.02*	*03*	*Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*	*1 Titik*	*250.000.000*	***287.500.000***

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)**	**-**	**250.000.000**	**437.500.000**
2	*11*	*03*	*1.03*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*06*	*Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan*	*1 Kegiatan*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*07*	*Pelaksanaan rehabilitasi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi*	*1 Ha*	*0,00*	*50.000.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*08*	*Pelaksanaan Restorasi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi*	*1 Ha*	*0,00*	*50.000.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*09*	*Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan*	*1 Kegiatan*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*10*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota*	*1 Kegiatan*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*12*	*Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan*	*1 Kegiatan*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	*11*	*03*	*1.03*	*13*	*Pelaksanaan Remediasi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi*	*1 Ha*	*0,00*	*50.000.000*
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan Pengelolaan Taman Keanekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (%)**	**-**	**550.000.000**	**602.500.000**
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan Pengelolaan Taman Keanekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau Provinsi (%)**	**-**	**550.000.000**	**602.500.000**
2	*11*	*04*	*1.01*	*01*	*Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	*1 Dokumen*	**200.000.000**	**0,00**
2	*11*	*04*	*1.01*	*04*	*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Kota Kendari*	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)*	*2 Ha*	*0,00*	***200.000.000***
2	*11*	*04*	*1.01*	*08*	*Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Kota Kendari*	*Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi*	*2 Unit*	*200.000.000*	***230.000.000***
2	*11*	*04*	*1.01*	*09*	*Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)*	*1 Unit*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (%)**	**-**	**200.000.000**	**230.000.000**
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan keterpenuhan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)**	**-**	**200.000.000**	**230.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	05	1.01	01	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Kota Kendari*	*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)*	*2 Dokumen*	*50.000.000*	***57.500.000***
2	11	05	1.01	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*KLHK dan Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**		Sultra	**Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (%)**	**-**	**250.000.000**	**690.000.000**
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)**	**-**	**250.000.000**	**690.000.000**
2	11	06	1.01	01	*Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*KLHK dan Sultra*	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*230.000.000*
2	11	06	1.01	05	*Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya*	*1 Orang*	*50.000.000*	*57.500.000*
2	11	06	1.01	06	*Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	*70 Badan Usaha*	*0,00*	***402.500.000***
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)**	**-**	**100.000.000**	**125.000.000**
2	**11**	**07**	**1.01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)**	**-**	**50.000.000**	**62.500.000**
2	11	07	1.01	01	*Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	***62.500.000***
	11	**07**	**1.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**		**-**	***50.000.000***	***62.500.000***

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	11	07	1.02	01	*Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	***62.500.000***
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup bagi masyarakat (%)**	**-**	**430.000.000**	**494.500.000**
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat**	**-**	**430.000.000**	**494.500.000**
	11	*08*	*1.01*	*02*	*Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	*11*	*08*	*1.01*	*03*	*Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (orang)*	*50 Orang*	*100.000.000*	***115.000.000***
	11	*08*	*1.01*	*04*	*Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat*	*30 Keluarga*	*30.000.000*	***34.500.000***
	11	*08*	*1.01*	*05*	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	*2 Lembaga*	*150.000.000*	***172.500.000***
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Peningkatan persentase jumlah penghargaan lingkungan hidup (%)**	**-**	**250.000.000**	**287.500.000**
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan (penghargaan)**	**-**	**250.000.000**	**287.500.000**
2	*11*	*09*	*1.01*	*01*	*Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)*	*110 Entitas*	*250.000.000*	***287.500.000***
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)**	**-**	**175.000.000**	**301.250.000**
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (%)**	**-**	**175.000.000**	**301.250.000**
2	*11*	*10*	*1.01*	*03*	*Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi*	*1 Perkara*	*25.000.000*	***28.750.000***
2	*11*	*10*	*1.01*	*05*	*Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi*	*1 Perkara*	*0,00*	***50.000.000***
2	*11*	*10*	*1.01*	*06*	*Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi*	*1 Perkara*	*0,00*	***50.000.000***
2	*11*	*10*	*1.01*	*07*	*Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani*	*100 Pengaduan*	*150.000.000*	***172.500.000***
					UPTD Laboraturium Lingkungan						**500.000.000**	**575.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)**	**-**	**500.000.000**	**575.000.000**
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Sultra	**Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)**	**-**	**500.000.000**	**575.000.000**
2	*11*	*03*	*1.01*	*15*	*Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	*Sultra*	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	*3 Dokumen*	*500.000.000*	***575.000.000***
					UPTD Persampahan						**0,00**	**1.600.000.000**
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**	**Cakupan pengelolaan persampahan regional (%)**	**-**	**0'00**	**1.600.000.000**
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Sultra**	**Cakupan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)**	**-**	**0'00**	**1.600.000.000**
2	*11*	*11*	*1.01*	*06*	*Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	Sultra	*Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan (Ton)*	***0 Ton***	*0'00*	***100.000.000***
2	*11*	*11*	*1.01*	*07*	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional*	*Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	Sultra	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedian (unit)*	*0 Unit*	*0'00*	***1.500.000.000***
2	**12**				**URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**10.176.590.000**	**10.986.800.000**
2	**12**				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**10.176.590.000**	**10.986.800.000**
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	***Kendari***	**Cakupan pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi**	**-**	**8.279.590.000**	**8.839.550.000**
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	***Kendari***	***Jumlah kegiatan perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana***	**-**	**271.000.000**	**314.000.000**
2	*12*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*1 Dok*	*100.000.000*	*120.000.000*
2	*12*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dok*	*7.000.000*	*8.000.000*
2	*12*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*2 Dok*	*7.000.000*	*8.000.000*
2	*12*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Lap*	*7.000.000*	*8.000.000*
2	*12*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Lap*	*150.000.000*	*170.000.000*
2	**12**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana**	**-**	**5.486.790.000**	**5.607.200.000**
2	*12*	*01*	*1,02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*50 Org/Bulan*	*5.300.000.000*	*5.406.000.000*
2	*12*	*01*	*1,02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun pJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah*	*1 Lap*	*5.790.000*	*6.200.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*12*	*01*	*1,02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Lap*	*181.000.000*	*195.000.000*
2	**12**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terlaksana**	**-**	**20.000.000**	**29.800.000**
2	*12*	*01*	*1,03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*15 Lap*	*20.000.000*	*29.800.000*
2	**12**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**-**	**602.600.000**	**740.450.000**
2	*12*	*01*	*1,05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*4 Paket*	*169.600.000*	*180.200.000*
2	*12*	*01*	*1,05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dok*	*98.000.000*	*140.250.000*
2	*12*	*01*	*1,05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dok*	*100.000.000*	*120.000.000*
2	*12*	*01*	*1,05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dok*	*75.000.000*	*100.000.000*
2	*12*	*01*	*1,05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*68 Orang*	*80.000.000*	*100.000.000*
2	*12*	*01*	*1,05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*68 Orang*	*80.000.000*	*100.000.000*
2	**12**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**-**	**841.000.000**	**949.700.000**
2	*12*	*01*	*1,06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*15 Paket*	*11.000.000*	*16.700.000*
2	*12*	*01*	*1,06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*23 Paket*	*30.000.000*	*50.000.000*
2	*12*	*01*	*1,06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*55 Paket*	*57.000.000*	*70.000.000*
2	*12*	*01*	*1,06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*20 Paket*	*70.000.000*	*74.000.000*
2	*12*	*01*	*1,06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*25 Dok*	*27.000.000*	*35.000.000*
2	*12*	*01*	*1,06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*50 Lap*	*46.000.000*	*54.000.000*
2	*12*	*01*	*1,06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*100 Lap*	*600.000.000*	*650.000.000*
2	**12**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**-**	**282.000.000**	**341.000.000**
2	*12*	*01*	*1,07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*2 Unit*	*56.000.000*	*56.000.000*
2	*12*	*01*	*1,07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*5 Paket*	*50.000.000*	*50.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	01	1,07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*80.000.000*	*80.000.000*
2	12	01	1,07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*96.000.000*	*155.000.000*
2	**12**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Pe**	**-**	**169.500.000**	**191.000.000**
2	12	01	1,08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*100 lap*	*7.500.000*	*9.000.000*
2	12	01	1,08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*100 lap*	*130.000.000*	*150.000.000*
2	12	01	1,08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Lap*	*32.000.000*	*32.000.000*
2	**12**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah kegiatan Pemeliharaan Baran**	**-**	**606.700.000**	**666.400.000**
2	12	01	1,09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*9 Unit*	*85.000.000*	*98.900.000*
2	12	01	1,09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*60 Unit*	*25.000.000*	*30.000.000*
2	12	01	1,09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*400.000.000*	*425.000.000*
2	12	01	1,09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*96.700.000*	*112.500.000*
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk di Provinsi**	**-**	**592.000.000**	**673.250.000**
2	**12**	**02**	**1,01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	-	**142.000.000**	**157.000.000**
2	12	02	1,01	01	*Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan*	*17 Dok*	*32.000.000*	*32.000.000*
2	12	02	1,01	02	*Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi*	*17 Dok*	*25.000.000*	*30.000.000*
2	12	02	1,01	03	*Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi*	*17 Dok*	*25.000.000*	*30.000.000*
2	12	02	1,01	04	*Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan*	*2 Dok*	*20.000.000*	*25.000.000*
2	12	02	1,01	05	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun*	*17 Dok*	*40.000.000*	*40.000.000*
2	**12**	**02**	**1,02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**-**	**300.000.000**	**348.250.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	02	1,02	01	*Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk*	*17 Lap*	*25.000.000*	*27.000.000*
2	12	02	1,02	02	*Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk*	*1 Lap*	*65.000.000*	*81.250.000*
2	12	02	1,02	03	*Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk*	*5 Dok*	*50.000.000*	*60.000.000*
2	12	02	1,02	04	*Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk*	*5 Lap*	*110.000.000*	*110.000.000*
2	12	02	1,02	05	*Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*15 Lap*	*50.000.000*	*70.000.000*
2	**12**	**02**	**1,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	-	**150.000.000**	**168.000.000**
2	12	02	1,03	01	*Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk*	*68 Lap*	*60.000.000*	*60.000.000*
2	12	02	1,03	02	*Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk*	*51 Lap*	*90.000.000*	*108.000.000*
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Persentase Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil bagi Aparatur Disdukcapil**	**-**	**695.000.000**	**777.000.000**
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah Kegiatan pelayanan pencatatan sipil**	-	**290.000.000**	**331.000.000**
2	12	03	1.01	01	*Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan*	*17 Dok*	*15.000.000*	*18.000.000*
2	12	03	1.01	02	*Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi*	*1 Dok*	*65.000.000*	*75.000.000*
2	12	03	1.01	03	*Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting*	*2 Dok*	*35.000.000*	*40.000.000*
2	12	03	1.01	04	*Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota*	*1 Lap*	*90.000.000*	*108.000.000*
2	12	03	1.01	05	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun*	*17 Dok*	*85.000.000*	*90.000.000*
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**-**	**280.000.000**	**316.000.000**
2	12	03	1.02	01	*Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil*	*17 Lap*	*60.000.000*	*60.000.000*
2	12	03	1.02	02	*Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil*	*1 Lap*	*65.000.000*	*75.000.000*
2	12	03	1.02	03	*Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil*	*5 Dok*	*25.000.000*	*31.000.000*
2	12	03	1.02	04	*Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil*	*5 Dok*	*80.000.000*	*90.000.000*
2	12	03	1.02	05	*Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*15 Lap*	*50.000.000*	*60.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**12**	**03**	**1.03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Jumlah Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**-**	**125.000.000**	**130.000.000**
2	*12*	*03*	*1.03*	*01*	*Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil*	*68 Lap*	*50.000.000*	*50.000.000*
2	*12*	*03*	*1.03*	*02*	*Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil*	*2 Lap*	*75.000.000*	*80.000.000*
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dengan baik**	**-**	**540.000.000**	**622.000.000**
2	**12**	**04**	**1,01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah Kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara tertib**	-	**120.000.000**	**120.000.000**
2	*12*	*04*	*1,01*	*01*	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*17 Dok*	*120.000.000*	*120.000.000*
2	**12**	**04**	**1,02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	-	**240.000.000**	**282.000.000**
2	*12*	*04*	*1,02*	*01*	*Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan*	*5 Lap*	*100.000.000*	*120.000.000*
2	*12*	*04*	*1,02*	*02*	*Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan*	*2 Lap*	*90.000.000*	*110.000.000*
2	*12*	*04*	*1,02*	*05*	*Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan*	*10 Dok*	*50.000.000*	*52.000.000*
2	**12**	**04**	**1,03**		***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi***	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	***Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi***	**-**	***180.000.000***	***220.000.000***
2	*12*	*04*	*1,03*	*01*	*Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*17 Lap*	*90.000.000*	*110.000.000*
2	*12*	*04*	*1,03*	*02*	*Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*	*68 Orang*	*90.000.000*	*110.000.000*
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Persentase pengelolaan Proafil Kependudukan**	**-**	**70.000.000**	**75.000.000**
2	**12**	**05**	**1,01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kependudukan yang disediakan**	-	**70.000.000**	**75.000.000**
2	*12*	*05*	*1,01*	*01*	*Penyediaan Data Kependudukan Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi*	*2 Dok*	*20.000.000*	*25.000.000*
2	*12*	*05*	*1,01*	*02*	*Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain*	*1 Dok*	*50.000.000*	*50.000.000*
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**17.072.414.405**	**18.791.002.872**
2	**13**				**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**17.072.414.405**	**18.791.002.872**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**96 PERSEN**	**13.692.587.565**	**15.061.846.322**
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**10 Dokumen**	**292.000.000**	**306.600.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*15.000.000*	*15.750.000*
2	13	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*7.000.000*	*7.350.000*
2	13	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
2	13	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.100.000*
2	13	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.500.000*
2	13	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*3 Laporan*	*250.000.000*	*262.500.000*
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**7.854.587.565**	**8.931.946.322**
2	13	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*84 Orang/Bulan*	*7.692.587.565*	*8.761.846.322*
2	13	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.250.000*
2	13	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*145.000.000*	*152.250.000*
2	13	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**33.000.000**	**34.650.000**
2	13	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Dokumen*	*30.000.000*	*31.500.000*
2	13	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**148.000.000**	**155.400.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.500.000*
2	13	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*1 Orang*	*10.000.000*	*10.500.000*
2	13	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*1 Orang*	*15.000.000*	*15.750.000*
2	13	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*1 Orang*	*10.000.000*	*10.500.000*
2	13	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10 Laporan**	**751.000.000**	**788.550.000**
2	13	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000*	*10.500.000*
2	13	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000*	*52.500.000*
2	13	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*70.000.000*	*73.500.000*
2	13	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*18.000.000*	*18.900.000*
2	13	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*95.000.000*	*99.750.000*
2	13	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*3 Laporan*	*500.000.000*	*525.000.000*
2	13	01	1.06	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
2	**13**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**10 Unit**	**3.721.000.000**	**3.907.050.000**
2	13	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*550.000.000*	*577.500.000*
2	13	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*565.000.000*	*593.250.000*
2	13	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*3.000.000*	*3.150.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000.000*	*1.050.000.000*
2	13	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000.000*	*1.050.000.000*
2	13	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*400.000.000*	*420.000.000*
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**4 Laporan**	**241.000.000**	**253.050.000**
2	13	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.100.000*
2	13	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*210.000.000*
2	13	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	13	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*36.000.000*	*37.800.000*
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**23 Unit**	**652.000.000**	**684.600.000**
2	13	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*14 Unit*	*150.000.000*	*157.500.000*
2	13	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*28.000.000*	*29.400.000*
2	13	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*2.000.000*	*2.100.000*
2	13	01	1.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*1 Unit*	*2.000.000*	*2.100.000*
2	13	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*170.000.000*	*178.500.000*
2	13	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prov. Sultra**	**PERSENTASE PENATAUSAHAAN PEMERINTAHAN DESA**	**30 PERSEN**	**250.000.000**	**262.500.000**
2	**13**	**02**	**1.01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**3 Dokumen**	**250.000.000**	**262.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	02	1.01	01	*Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	02	1.01	02	*Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	13	02	1.01	03	*Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*17 kab/kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*52.500.000*
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK**	**MENURUNNYA KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT**	**Prov. Sultra**	**JUMLAH KERJA SAMA DESA**	**17 DOKUMEN**	**198.444.440**	**208.366.620**
2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik**	**Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**17 Dokumen**	**198.444.440**	**208.366.620**
2	13	03	1.01	01	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*17 kab/kota*	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*98.444.440*	*103.366.620*
2	13	03	1.01	03	*Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*	*15 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prov. Sultra**	**CAKUPAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**85 PERSEN**	**675.385.800**	**776.693.670**
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**26 Dokumen**	**675.385.800**	**776.693.670**
2	13	04	1.01	01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*17 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*12.000.000*
2	13	04	1.01	02	*Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 Kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa*	*2 Dokumen*	*75.385.800*	*76.693.670*
2	13	04	1.01	03	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	04	*Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	05	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	*1 Dokumen*	*45.000.000*	*50.000.000*
2	13	04	1.01	06	*Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*	*2 Dokumen*	*45.000.000*	*50.000.000*
2	13	04	1.01	07	*Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	*10 Orang*	*21.000.000*	*22.000.000*
2	13	04	1.01	08	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*17 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*2 Dokumen*	*200.000.000*	*240.000.000*
2	13	04	1.01	09	*Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*17 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan*	*1 Dokumen*	*21.000.000*	*22.000.000*
2	13	04	1.01	10	*Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina*	*100 Orang*	*100.000.000*	*120.000.000*
2	13	04	1.01	11	*Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD*	*10 Orang*	*11.000.000*	*12.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	04	1.01	12	*Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	13	*Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	14	*Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	15	*Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	16	*Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	*2 Dokumen*	*20.000.000*	*40.000.000*
2	13	04	1.01	17	*Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	18	*Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	19	*Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	20	*Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi*	*1 Desa*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	21	*Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	13	04	1.01	22	*Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*15 kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK**	**MENURUNNYA KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT**	**Prov. Sultra**	**CAKUPAN PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT DESA, LEMBAGA EKONOMI DESA, KELOMPOK USAHA EKONOMI MASYARAKAT**	**90 PERSEN**	**2.255.996.600**	**2.481.596.260**
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik**	**Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat**	**Prov. Sultra**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**90 Persen**	**2.255.996.600**	**2.481.596.260**
2	13	05	1.01	01	*Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*250.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*13*	*05*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*30 Lembaga*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*250.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*03*	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*30 Lembaga*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya*	*20 Lembaga*	*200.000.000*	*250.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*04*	*Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*10 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*05*	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*15 Kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*	*3 Dokumen*	*255.996.600*	*281.596.260*
2	*13*	*05*	*1.01*	*06*	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*15 Kab*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*150.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*07*	*Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*50.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*08*	*Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*50.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*09*	*Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	*1 Laporan*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*10*	*Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*	*1 Keluarga*	*50.000.000*	*50.000.000*
2	*13*	*05*	*1.01*	*11*	*Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	*Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik*	*Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah*	*1 Keluarga*	*50.000.000*	*50.000.000*
2					**Urusan Perhubungan**						**46.378.767.492**	**51.070.644.241**
2					**Dinas Perhubungan**						**46.378.767.492**	**51.070.644.241**
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Kantor Dinas/ UPTD	**cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**	**100 %**	**28.315.392.028**	**31.146.931.231**
2	**15**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**10 Laporan**	**804.410.400**	**884.851.440**
2	*15*	*01*	*1,01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*200.987.600*	*221.086.360*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	1,01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*129.862.600*	*142.848.860*
2	15	01	1,01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*129.882.600*	*142.870.860*
2	15	01	1,01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*5 Laporan*	*154.227.600*	*169.650.360*
2	15	01	1,01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*189.450.000*	*208.395.000*
2	15	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**	**17.946.055.448**	**19.740.660.993**
2	15	01	1,02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*210 Bulan*	*17.595.358.098*	*19.354.893.908*
2	15	01	1,02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*10 Dokumen*	*344.077.400*	*378.485.140*
2	15	01	1,02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*3.331.150*	*3.664.265*
2	15	01	1,02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*3.288.800*	*3.617.680*
2	**15**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu**	**2 Dokumen**	**232.137.600**	**255.351.360**
2	15	01	1,03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*2 Dokumen*	*2.255.000*	*2.480.500*
2	15	01	1,03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*2 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	15	01	1,03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*2 Dokumen*	*129.882.600*	*142.870.860*
2	**15**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu**	**2 Dokumen**	**12.255.000**	**13.480.500**
2	15	01	1,04	07	*Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*8 Laporan*	*12.255.000*	*13.480.500*
2	**15**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)**	**210 SKP**	**582.112.000**	**640.323.200**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	1,05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*320 Unit*	*147.900.000*	*162.690.000*
2	15	01	1,05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*320 Paket*	*147.900.000*	*162.690.000*
2	15	01	1,05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*320 Dokumen*	*128.156.000*	*140.971.600*
2	15	01	1,05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*12 Dokumen*	*128.156.000*	*140.971.600*
2	15	01	1,05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*320 Orang*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	15	01	1,05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*320 Orang*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	15	01	1,05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*320 Orang*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	*15*	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Dinas**	**12 Bulan**	**2.949.858.350**	**3.244.844.185**
2	15	01	1,06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*9 Paket*	*42.568.750*	*46.825.625*
2	15	01	1,06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*9 Paket*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	15	01	1,06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*9 Paket*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	15	01	1,06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*9 Paket*	*383.921.600*	*422.313.760*
2	15	01	1,06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*9 Paket*	*87.390.000*	*96.129.000*
2	15	01	1,06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*10 Dokumen*	*20.778.000*	*22.855.800*
2	15	01	1,06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*9 Paket*	*191.680.000*	*210.848.000*
2	15	01	1,06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*4 Laporan*	*22.320.000*	*24.552.000*
2	15	01	1,06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*4 Laporan*	*2.001.200.000*	*2.201.320.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**15**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Ketersedian Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor**	**12 Bulan**	**798.253.230**	**878.078.553**
2	*15*	*01*	*1,07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*10 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*01*	*1,07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*9 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*01*	*1,07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*9 Paket*	*85.113.950*	*93.625.345*
2	*15*	*01*	*1,07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*20 Unit*	*116.000.000*	*127.600.000*
2	*15*	*01*	*1,07*	*08*	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*01*	*1,07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*01*	*1,07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*197.139.280*	*216.853.208*
2	*15*	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Jumlah Laporan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**3.040.360.000**	**3.344.396.000**
2	*15*	*01*	*1,08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*13.000.000*	*14.300.000*
2	*15*	*01*	*1,08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*1.290.360.000*	*1.419.396.000*
2	*15*	*01*	*1,08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*1.737.000.000*	*1.910.700.000*
2	*15*	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Dinas/ UPTD**	**Pemenuhan Kebetuhan Gedung Kantor serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**	**12 Bulan**	**1.949.950.000**	**2.144.945.000**
2	*15*	*01*	*1,09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*59 Unit*	*103.500.000*	*113.850.000*
2	*15*	*01*	*1,09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*30 Unit*	*16.450.000*	*18.095.000*
2	*15*	*01*	*1,09*	*08*	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*1 Unit*	*15.000.000*	*16.500.000*
2	*15*	*01*	*1,09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*14 Unit*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*15*	*01*	*1,09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kantor Dinas/ UPTD*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*30 Unit*	*815.000.000*	*896.500.000*
2	*15*	**01**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi Yang Terpasang**	**82,50%**	**2.705.326.600**	**2.975.859.260**
									Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terminal Tipe B	**52,94%**	**3.112.646.016**	**3.423.910.617**
									Cakupan Pelayanan Terminal Type B	**100%**	**400.000.000**	**440.000.000**
2	**15**	**02**	**1,01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen Rencana Jaringan LLAJ Prov**	**1 Dokumen**	**264.577.600**	**291.035.360**
2	*15*	*02*	*1,01*	*02*	*Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi*	*1 Dokumen*	*82.288.800*	*90.517.680*
2	*15*	*02*	*1,01*	*04*	*Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*02*	*1,01*	*06*	*Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi*	*66 Laporan*	*82.288.800*	*90.517.680*
2	**15**	**02**	**1,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**3300 Unit**	**1.306.449.000**	**1.437.093.900**
2	*15*	*02*	*1,02*	*01*	*Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun*	*2 Unit*	*553.224.500*	*608.546.950*
2	*15*	*02*	*1,02*	*02*	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia*	*3300 Unit*	*553.224.500*	*608.546.950*
2	*15*	*02*	*1,02*	*03*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara*	*2 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*02*	*1,02*	*04*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara*	*3300 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	**15**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah terminal yang memiliki sarana prasana yang lengkap dan berfungsi**	**11 Unit**	**2.148.246.016**	**2.363.070.617**
									Jumlah kendaraan Roda Empat Yang Terlayani	**42500 Unit**	**300.000.000**	**330.000.000**
2	*15*	*02*	*1,03*	*06*	*Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi*	*11 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*02*	*1,03*	*07*	*Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang*	*11 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
2	*15*	*02*	*1,03*	*08*	*Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B*	*11 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*15*	*02*	*1,03*	*09*	*Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*6 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	1,03	10	*Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang*	*11 Unit*	*1.448.246.016*	*1.593.070.617*
2	15	02	1,03	11	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*11 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	**15**	**02**	**1,05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Pelaksaan MRLL untuk jaringan Jalan Provinsi**	**1 Dokumen**	**572.000.000**	**629.200.000**
2	15	02	1,05	01	*Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*165.000.000*
2	15	02	1,05	03	*Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi*	*1 Dokumen*	*70.000.000*	*77.000.000*
2	15	02	1,05	04	*Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi*	*32 Laporan*	*70.000.000*	*77.000.000*
2	15	02	1,05	05	*Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi*	*66 Laporan*	*132.000.000*	*145.200.000*
2	15	02	1,05	07	*Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan*	*3986 Unit*	*150.000.000*	*165.000.000*
2	**15**	**02**	**1,06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Persetujuan Hasil Andalalin untuk jalan provinsi.**	**1 Dokumen**	**305.200.000**	**335.720.000**
2	15	02	1,06	02	*Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	15	02	1,06	03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*	*1 Laporan*	*110.200.000*	*121.220.000*
2	15	02	1,06	04	*Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi*	*52 Laporan*	*95.000.000*	*104.500.000*
2	**15**	**02**	**1,07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi.**	**104 Laporan**	**257.100.000**	**282.810.000**
									Jumlah kendaraan Roda Empat Yang Telah diinspeksi Keselamatan	**104 Laporan**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	15	02	1,07	01	*Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	15	02	1,07	04	*Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	*12 Laporan*	*62.900.000*	*69.190.000*
2	15	02	1,07	05	*Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas*	*32 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*15*	*02*	*1,07*	*15*	*Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*	*16 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*02*	*1,07*	*15*	*Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi*	*4 Dokumen*	*94.200.000*	*103.620.000*
2	**15**	**02**	**1,08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**7 Dokumen**	**175.800.000**	**193.380.000**
2	*15*	*02*	*1,08*	*01*	*Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*80 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*02*	*1,08*	*02*	*Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi*	*80 Laporan*	*125.800.000*	*138.380.000*
2	**15**	**02**	**1,09**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi**	**7 Dokumen**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	*15*	*02*	*1,09*	*01*	*Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*02*	*1,09*	*02*	*Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*17 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**15**	**02**	**1,10**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah jaringan trayek AKDP**	**8 Dokumen**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	*15*	*02*	*1,10*	*01*	*Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi*	*8 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*02*	*1,10*	*02*	*Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi*	*17 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**15**	**02**	**1,11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah jaringan trayek AKDP**	**8 Dokumen**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	*15*	*02*	*1,11*	*01*	*Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi*	*8 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*02*	*1,11*	*02*	*Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi*	*17 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**15**	**02**	**1,12**		**Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah izin operasional Taxi On Line**	**4 Dokumen**	**100.000.000**	**110.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	1,12	01	*Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*5 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	15	02	1,12	02	*Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi*	*17 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**15**	**02**	**1,13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah izin trayek AKDP**	**8 Dokumen**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	15	02	1,13	01	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan*	*80 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	15	02	1,13	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi*	*17 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**15**	**02**	**1,14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Izin Penyelenggaraan Taxi**	**4 Dokumen**	**125.700.000**	**138.270.000**
2	15	02	1,14	03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi*	*17 Laporan*	*75.700.000*	*83.270.000*
2	15	02	1,14	04	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan*	*21 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**15**	**02**	**1,15**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen tarif angkutan disetiap Kabupaten kota**	**7 Dokumen**	**162.900.000**	**179.190.000**
2	15	02	1,15	01	*Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	15	02	1,15	02	*Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	15	02	1,15	03	*Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*62.900.000*	*69.190.000*
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas &**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Persentase Izin Pelayaran Diterbitkan**	**100%**	**595.900.000**	**655.490.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemerataan Pembangunan			**Persentase Pelabuhan Dalam Kondisi Mantap**	**34,62%**	**8.322.194.299**	**9.154.413.729**
									Cakupan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	**100%**	**2.927.308.550**	**3.274.039.405**
2	***15***	**03**	**1,01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Telah Memiliki Izin**	**2 Dokumen**	**103.600.000**	**113.960.000**
2	*15*	*03*	*1,01*	*01*	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan*	*2 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,01*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi*	*6 Laporan*	*53.600.000*	*58.960.000*
2	***15***	**03**	**1,02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam DaerahProvinsi,PelabuhanAntarDaerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang memiliki izin**	**4 Dokumen**	**103.600.000**	**113.960.000**
2	*15*	*03*	*1,02*	*01*	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan*	*50 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,02*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi*	*4 Laporan*	*53.600.000*	*58.960.000*
2	***15***	**03**	**1,05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**17 Dokumen**	**112.900.000**	**124.190.000**
2	*15*	*03*	*1,05*	*01*	*Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi*	*17 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,05*	*02*	*Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi*	*8 Laporan*	*62.900.000*	*69.190.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	***15***	**03**	**1,06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Badan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang memiliki Izin**	**164 Izin**	**112.900.000**	**124.190.000**
2	*15*	*03*	*1,06*	*01*	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*164 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,06*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas*	*8 Laporan*	*62.900.000*	*69.190.000*
2	***15***	**03**	**1,07**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerahKabupaten/KotadalamDaerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang telah ditetapkan**	**1 Dokumen**	**162.900.000**	**179.190.000**
2	*15*	*03*	*1,07*	*01*	*Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota*	*4 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,07*	*02*	*Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota*	*15 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,07*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota*	*6 Laporan*	*62.900.000*	*69.190.000*
2	***15***	**03**	**1,08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen / Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**21 Dokumen**	**330.000.000**	**363.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*15*	*03*	*1,08*	*01*	*Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional*	*7 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	*15*	*03*	*1,08*	*02*	*Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional*	*7 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,08*	*03*	*Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional*	*7 Laporan*	*80.000.000*	*88.000.000*
2	**15**	**03**	**1,09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Kondisi Layak**	**2 Unit**	**4.417.606.299**	**4.859.366.929**
2	*15*	*03*	*1,09*	*01*	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian*	*7 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,09*	*03*	*Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara*	*2 Unit*	*4.198.206.299*	*4.618.026.929*
2	*15*	*03*	*1,09*	*04*	*Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional*	*2 Laporan*	*69.400.000*	*76.340.000*
2	*15*	*03*	*1,09*	*05*	*Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia*	*2 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	***15***	**03**	**1,10**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**7 Unit**	**2.916.388.000**	**3.208.026.800**
									Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan	***18552 Trip***	***2.927.308.550***	***3.274.039.405***
2	*15*	*03*	*1,10*	*01*	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan*	*15 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,10*	*02*	*Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun*	*15 Unit*	*2.866.388.000*	*3.153.026.800*
2	*15*	*03*	*1,10*	*03*	*Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan*	*15 Unit*	*2.717.308.550*	*2.989.039.405*
2	*15*	*03*	*1,10*	*04*	*Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia*	*15 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**15**	**03**	**1,11**		**Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**15 Laporan**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	*15*	*03*	*1,11*	*01*	*Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi*	*6 Orang*	*60.000.000*	*120.000.000*
2	*15*	*03*	*1,11*	*02*	*Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional*	*28 Dokumen*	*119.400.000*	*131.340.000*
2	*15*	**03**	**1,12**		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**14 Dokumen**	**50.000.000**	**55.000.000**
2	*15*	*03*	*1,12*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional*	*14 Laporan*	*69.400.000*	*76.340.000*
2	*15*	*03*	*1,12*	*02*	*Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*14 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	***15***	**03**	**1,13**		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**7 Dokumen**	**50.000.000**	**55.000.000**
2	*15*	*03*	*1,13*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*7 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,13*	*02*	*Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*14 Laporan*	*119.400.000*	*131.340.000*
2	***15***	**03**	**1,14**		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**7 Unit**	**50.000.000**	**55.000.000**
2	*15*	*03*	*1,14*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional*	*7 Laporan*	*69.400.000*	*76.340.000*
2	*15*	*03*	*1,14*	*02*	*Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*6 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**15**	**03**	**1,15**		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**3 Dokumen**	**50.000.000**	**55.000.000**
2	*15*	*03*	*1,15*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*3 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,15*	*02*	*Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*6 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	**15**	**03**	**1,16**		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**3 Dokumen**	**50.000.000**	**55.000.000**
2	*15*	*03*	*1,16*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional*	*3 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*15*	*03*	*1,16*	*02*	*PenerbitanIzinPengelolaanTerminaluntuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional*	*16 Laporan*	*119.400.000*	*131.340.000*
2	**15**	**03**	**1,16**		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah**	**Provinsi SULTRA**	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**8 Dokumen**	**50.000.000**	**55.000.000**
2	*15*	*03*	*1,16*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah*	*Provinsi SULTRA*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional*	*8 Laporan*	*69.400.000*	*76.340.000*
					Dinas Komunikasi dan Informatika						**21.442.300.000**	**22.514.414.500**
2	**16**				**Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika**						**20.024.000.000**	**21.025.199.500**
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Kendari***	**Cakupan pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**9.931.000.000**	**10.427.550.000**
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	***Kendari***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu***	**7 Dok**	**42.000.000**	**44.100.000**
2	*16*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*1 Dok*	*5.500.000*	*5.775.000*
2	*16*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dok*	*5.500.000*	*5.775.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dok*	*5.500.000*	*5.775.000*
2	16	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dok*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	16	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dok*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	16	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Lap*	*5.500.000*	*5.775.000*
2	16	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Lap*	*15.000.000*	*15.750.000*
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan yang Tersedia**	**3 Dok**	**5.518.500.000**	**5.794.425.000**
2	16	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*53 Orang*	*5.350.000.000*	*5.617.500.000*
2	16	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dok*	*150.000.000*	*157.500.000*
2	16	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dok*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	16	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun pJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah*	*1 Lap*	*5.500.000*	*5.775.000*
2	16	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dok*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	16	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Lap*	*5.500.000*	*5.775.000*
2	16	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dok*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	**16**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang Tersedia**	**1 Dok**	**41.000.000**	**43.050.000**
2	16	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dok*	*3.500.000*	*3.675.000*
2	16	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dok*	*30.000.000*	*31.500.000*
2	16	01	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Lap*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	16	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Lap*	*2.500.000*	*2.625.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*16*	*01*	*1.03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Lap*	*2.500.000*	*2.625.000*
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersedia**	**1 Dok**	**284.500.000**	**298.725.000**
2	*16*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	*5.000.000*	*5.250.000*
2	*16*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*120.000.000*	*126.000.000*
2	*16*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dok*	*3.000.000*	*3.150.000*
2	*16*	*01*	*1.05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dok*	*5.500.000*	*5.775.000*
	16	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*1 Orang*	*40.000.000*	*42.000.000*
2	*16*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*55.000.000*	*57.750.000*
2	*16*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*4 Orang*	*56.000.000*	*58.800.000*
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia**	**1 Dok**	**1.037.500.000**	**1.089.375.000**
2	*16*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000*	*5.250.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*2 Paket*	*5.000.000*	*5.250.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*52.500.000*	*55.125.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*4 Paket*	*25.000.000*	*26.250.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dok*	*10.000.000*	*10.500.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Lap*	*65.000.000*	*68.250.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Luar Daerah dan Dalam Daerah Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Lap*	*850.000.000*	*892.500.000*
2	*16*	*01*	*1.06*	*11*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dok*	*25.000.000*	*26.250.000*
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan**	**5 Paket**	**1.370.000.000**	**1.438.500.000**
2	*16*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000*	*315.000.000*
2	*16*	*01*	*1.07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000*	*315.000.000*
2	*16*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*120.000.000*	*126.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	262.500.000
2	16	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	315.000.000
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	105.000.000
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pe**	**12 Lap**	**1.220.000.000**	**1.281.000.000**
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	300.000.000	315.000.000
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	910.000.000	955.500.000
2	16	**01**	**1.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Kendari**	***Jumlah Laporan Pemeliharaan Baran***	**2 Lap**	***417.500.000***	***438.375.000***
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	80.000.000	84.000.000
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	15.000.000	15.750.000
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	10.500.000
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12.500.000	13.125.000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	157.500.000
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	157.500.000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik**	**1 Lap**	**6.723.350.000**	**7.059.517.000**
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Daerah Provinsi**	**1 Dok**	**6.723.350.000**	**7.059.517.000**
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dok	63.500.000	66.675.000
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dok	5.000.000	5.250.000
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	150.000.000	157.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	02	1.01	04	*Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik*	*1 Dok*	*15.000.000*	*15.750.000*
2	16	02	1.01	05	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	*2 Dok*	*69.000.000*	*72.450.000*
2	16	02	1.01	06	*Pelayanan Informasi Publik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*	*3 Dok*	*115.500.000*	*121.275.000*
2	16	02	1.01	07	*Layanan Hubungan Media*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)*	*Jumlah Layanan Hubungan Media*	*3 Layanan*	*1.200.000.000*	*1.260.000.000*
2	16	02	1.01	08	*Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan*	*2 Dok*	*1.339.850.000*	*1.406.842.000*
2	16	02	1.01	09	*Manajemen Komunikasi Krisis*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis*	*1 Dok*	*65.000.000*	*68.250.000*
2	16	02	1.01	10	*Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya*	*30 Orang*	*92.500.000*	*97.125.000*
2	16	02	1.01	11	*Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah*	*1 Dok*	*1.500.000.000*	*1.575.000.000*
2	16	02	1.01	12	*Penyelengaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan*	*1 Dok*	*66.000.000*	*69.300.000*
2	16	02	1.01	13	*Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi*	*2 Unit*	*2.042.000.000*	*2.144.100.000*
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	**Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**3 Unit**	**3.369.650.000**	**3.538.132.500**
2	**16**	**03**	**1.01**		***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi***	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	Kendari	***Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Layanan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi***	70%	***2.351.000.000***	***2.468.550.000***
2	16	03	1.01	02	*Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi*	*2 Dok*	*251.000.000*	*263.550.000*
2	16	03	1.01	03	*Peyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	*1 Unit*	*2.100.000.000*	*2.205.000.000*
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**20%**	**1.018.650.000**	**1.069.582.500**
2	16	03	1.02	01	*Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelengaraan Pemerintah Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi*	*2 Dok*	*330.000.000*	*346.500.000*
2	16	03	1.02	02	*Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*	*1 Dok*	*32.500.000*	*34.125.000*
2	16	03	1.02	03	*Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola*	*1 Unit*	*20.000.000*	*21.000.000*
2	16	03	1.02	04	*Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah*	*2 Dok*	*82.500.000*	*86.625.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	03	1.02	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi*	*1 Dok*	*19.500.000*	*20.475.000*
2	16	03	1.02	06	*Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik*	*49 OPD*	*19.500.000*	*20.475.000*
2	16	03	1.02	07	*Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*52.500.000*
2	16	03	1.02	08	*Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah*	*2 Layanan*	*78.000.000*	*81.900.000*
2	16	03	1.02	09	*Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City*	*1 Dok*	*73.750.000*	*77.437.500*
2	16	03	1.02	10	*Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	*1 Dok*	*85.300.000*	*89.565.000*
2	16	03	1.02	11	*Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)*	*1 Dok*	*32.500.000*	*34.125.000*
2	16	03	1.02	12	*Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE*	*1 Dok*	*195.100.000*	*204.855.000*
2	**20**				**Urusan Bidang Statistik**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**				**716.700.000**	**752.535.000**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	***Kendari***	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraaan Statistik Sektoral**	**1 Dok**	**716.700.000**	**752.535.000**
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evalauasi Pembangunan Daerah**	**30%**	**716.700.000**	**752.535.000**
2	20	02	1.01	01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	*1 Dok*	*35.500.000*	*37.275.000*
2	20	02	1.01	02	*Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi*	*59 Orang*	*120.000.000*	*126.000.000*
2	20	02	1.01	03	*Membangun Meta Data Statistik Sektoral*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun*	*2 Dok*	*79.300.000*	*83.265.000*
2	20	02	1.01	04	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral*	*3 Orang*	*46.800.000*	*49.140.000*
2	20	02	1.01	05	*Pengembangan Infrastuktur*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Infrastruktur Statistik*	*1 Unit*	*120.000.000*	*126.000.000*
2	20	02	1.01	06	*Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun*	*3 Dok*	*315.100.000*	*330.855.000*
2	**21**				**Urusan Bidang Persandian**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**				**701.600.000**	**736.680.000**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	***Kendari***	**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**30%**	**701.600.000**	**736.680.000**
2	21	02	1.01		*Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah*	*20%*	*619.100.000*	*650.055.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	21	02	1.01	01	*Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan*	*2 Dok*	*127.000.000*	*133.350.000*
2	21	02	1.01	02	*Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*	*3 Lap*	*156.500.000*	*164.325.000*
2	21	02	1.01	03	*Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kota Kendari, Kota Baubau dan Kab. Kolaka*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*3 Lap*	*257.600.000*	*270.480.000*
2	21	02	1.01	04	*Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	*10 OPD*	*78.000.000*	*81.900.000*
2	**21**	***02***	***1.02***		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Kendari**	**Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi**	**20%**	**82.500.000**	**86.625.000**
2	21	02	1.02	01	*Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Kendari*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi*	*10 OPD*	*82.500.000*	*86.625.000*
02	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**19.993.000.000**	**21.526.000.000**
					DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH						**19.993.000.000**	**21.526.000.000**
02	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PROVINSI**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100 Persen**	**12.826.000.000**	**12.826.000.000**
02	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	*Kendari*	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**7 Dokumen**	**595.000.000**	**595.000.000**
02	17	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	17	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*25.000.000*
02	17	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
02	17	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
02	17	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
02	17	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*15.000.000*	*15.000.000*
02	17	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*500.000.000*	*500.000.000*
02	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**7.659.000.000**	**7.659.000.000**
02	17	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*100 Orang/Bulan*	*7.500.000.000*	*7.500.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*90.000.000*	*90.000.000*
02	17	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*50.000.000*
02	17	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**14.000.000**	**14.000.000**
02	17	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	**17**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**12.000.000**	**12.000.000**
02	17	01	1.04	01	*Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.04	02	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.04	03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.04	04	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.04	05	*Pengolahan Data Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.04	06	*Penetapan Wajib Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**79.000.000**	**79.000.000**
02	17	01	1.05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*10 Unit*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*100 Paket*	*40.000.000*	*40.000.000*
02	17	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.000.000*
02	17	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.000.000*
02	17	01	1.05	07	*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*5 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.05	08	*Pemindahan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan*	*5 Orang*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	17	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**875.000.000**	**875.000.000**
02	17	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	17	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	17	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000*	*50.000.000*
02	17	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000*	*50.000.000*
02	17	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*12.000.000*	*12.000.000*
02	17	01	1.06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*30.000.000*	*30.000.000*
02	17	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*700.000.000*	*700.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.06	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.000.000*
02	17	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**11 Unit**	**960.000.000**	**960.000.000**
02	17	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000*	*300.000.000*
02	17	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*5 Unit*	*150.000.000*	*150.000.000*
02	17	01	1.07	04	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*2 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
02	17	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*20.000.000*	*20.000.000*
02	17	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	17	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	17	01	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
02	17	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
02	17	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*200.000.000*	*200.000.000*
02	17	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
02	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**4 Laporan**	**252.000.000**	**252.000.000**
02	17	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.000.000*	*2.000.000*
02	17	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*240.000.000*	*240.000.000*
02	17	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**10 Unit**	**2.380.000.000**	**2.380.000.000**
02	17	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
02	17	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*4 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*10 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
02	17	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
02	17	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*1 Unit*	*5.000.000*	*5.000.000*
02	17	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*
02	17	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
02	17	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
02	17	01	1.09	12	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi*	*1 Ha*	*10.000.000*	*10.000.000*
02	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Persentase koperasi yang memperoleh izin usaha**	**100 Persen**	**1.000.000.000**	**1.100.000.000**
02	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Jumlah Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah**	**1 Dokumen**	**500.000.000**	**550.000.000**
02	17	02	1.01	01	*Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam*	*100 Unit Usaha*	*500.000.000*	*550.000.000*
02	**17**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1 Dokumen**	**500.000.000**	**550.000.000**
02	17	02	1.02	01	*Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*100 Unit Usaha*	*500.000.000*	*550.000.000*
02	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Persentase koperasi aktif**	**100 Persen**	**1.000.000.000**	**1.250.000.000**
02	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2 Dokumen**	**300.000.000**	**500.000.000**
02	17	03	1.01	03	*Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*	*300 Unit Usaha*	*300.000.000*	*500.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	**17**	**03**	**1.02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1 Dokumen**	**700.000.000**	**750.000.000**
02	*17*	*03*	*1.02*	*02*	*Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	*300 Unit Usaha*	*700.000.000*	*750.000.000*
02	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Persentase koperasi sehat**	**100 Persen**	**600.000.000**	**650.000.000**
02	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2 Dokumen**	**600.000.000**	**650.000.000**
02	*17*	*04*	*1.01*	*03*	*Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan*	*150 Unit Usaha*	*600.000.000*	*650.000.000*
02	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**600 Orang**	**1.300.000.000**	**1.500.000.000**
02	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1 Dokumen**	**1.300.000.000**	**1.500.000.000**
02	*17*	*05*	*1.01*	*01*	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	*600 Orang*	*1.300.000.000*	*1.500.000.000*
02	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Persentase koperasi yang memperoleh dukungan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan**	**100 Persen**	**530.000.000**	**660.000.000**
02	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**3 Dokumen**	**530.000.000**	**660.000.000**
02	*17*	*06*	*1.01*	*02*	*Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*	*100 Unit Usaha*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	*17*	*06*	*1.01*	*03*	*Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	*200 Keluarga*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	*17*	*06*	*1.01*	*04*	*Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan*	*100 Kelompok Masyarakat*	*200.000.000*	*250.000.000*
02	*17*	*06*	*1.01*	*06*	*Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya*	*200 Unit Usaha*	*30.000.000*	*50.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	06	1.01	07	*Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya*	*100 Unit Usaha*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	17	06	1.01	08	*Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya*	*100 Unit Usaha*	*100.000.000*	*120.000.000*
02	17	06	1.01	09	*Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan*	*150 Unit Usaha*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**		**Persentase UMKM yang memperoleh dukungan fasilitasi pemberdayaan**	**100 Persen**	**2.407.000.000**	**3.140.000.000**
02	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Jumlah Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**2 Dokumen**	**2.407.000.000**	**3.140.000.000**
02	17	07	1.01	01	*Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan*	*200 Unit Usaha*	*750.000.000*	*800.000.000*
02	17	07	1.01	02	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan*	*600 Orang*	*350.000.000*	*600.000.000*
02	17	07	1.01	03	*Pemulihan Usaha-Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*150 Unit Usaha*	*200.000.000*	*250.000.000*
02	17	07	1.01	04	*Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*10 Unit Usaha*	*100.000.000*	*200.000.000*
02	17	07	1.01	05	*Penyusunan Basis Data Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata*	*500 Unit Usaha*	*100.000.000*	*120.000.000*
02	17	07	1.01	06	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan*	*200 Orang*	*200.000.000*	*250.000.000*
02	17	07	1.01	07	*Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*100 Unit Usaha*	*100.000.000*	*130.000.000*
02	17	07	1.01	08	*Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*100 Unit Usaha*	*100.000.000*	*130.000.000*
02	17	07	1.01	09	*Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*20 Unit Usaha*	*400.000.000*	*530.000.000*
02	17	07	1.01	10	*Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*50 Unit Usaha*	*30.000.000*	*40.000.000*
02	17	07	1.01	11	*Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*50 Unit Usaha*	*30.000.000*	*40.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	07	1.01	12	*Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*50 Unit Usaha*	*47.000.000*	*50.000.000*
02	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Persentase usaha kecil dengn orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah**	**100 Persen**	**330.000.000**	**400.000.000**
02	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sultra**	**Berkembanganya Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**2 Dokumen**	**330.000.000**	**400.000.000**
02	17	08	1.01	01	*Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*	*50 Unit Usaha*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	17	08	1.01	02	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum*	*50 Orang*	*30.000.000*	*40.000.000*
02	17	08	1.01	03	*Pengembangan Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*50 Unit Usaha*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	17	08	1.01	04	*Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi*	*50 Lembaga*	*100.000.000*	*120.000.000*
02	17	08	1.01	05	*Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Wirausaha yang Difasilitasi*	*50 Orang*	*50.000.000*	*60.000.000*
02	17	08	1.01	06	*Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sultra*	*Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi*	*50 Unit Usaha*	*50.000.000*	*60.000.000*
					UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI						**58.960.097.933**	**78.362.975.686**
02	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PROVINSI**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100 Persen**	**48.096.113.045**	**66.407.400.000**
02	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**44.516.424.395**	**61.928.900.000**
02	17	01	1.05	06	*Pemulangan Pegawai yan Pensiun*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan*	*5 Orang*	*5.000.000*	*5.000.000*
2	**18**				**Urusan Penanaman Modal**						**16.310.694.431**	**22.421.300.000**
2	**18**				**Dinas Penanaman Modal & PTSP**						**16.310.694.431**	**22.421.300.000**
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Dalam dan Luar Daerah**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persen**	**10.983.430.781**	**16.001.300.000**
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun**	**6 Dokumen**	**466.134.751**	**565.000.000**
2	18	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*13 Dokumen*	*196.270.001*	*250.000.000*
2	18	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*10 Dokumen*	*94.200.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	18	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*4 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	18	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Laporan*	*25.664.750*	*50.000.000*
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**27 Dokumen**	**5.395.627.581**	**8.068.500.000**
2	18	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*60 orang*	*5.160.747.731*	*7.700.000.000*
2	18	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*	*60 Dokumen*	*194.880.000*	*275.000.000*
2	18	01	1.02	05	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	*5 Laporan*	*7.500.000*	*27.500.000*
2	18	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	18	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD*	*50 Laporan*	*22.499.850*	*55.000.000*
2	18	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah**	**3 Dokumen**	**24.214.499**	**16.500.000**
2	18	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*5 Dokumen*	*14.214.499*	*5.500.000*
2	18	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	18	1	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**18**	**1**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan**	**102.260.000**	**459.800.000**
2	18	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*12 paket*	*31.800.000*	*184.800.000*
2	18	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	18	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	18	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*50 Orang*	*20.230.000*	*220.000.000*
2	18	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*	*10 orang*	*20.000.000*	*22.000.000*
2	18	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*50 orang*	*20.230.000*	*22.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**717.650.000**	**1.353.000.000**
2	18	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*8 Paket*	*100.000.000*	*165.000.000*
2	18	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*10 paket*	*300.000.000*	*330.000.000*
2	18	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*5 paket*	*37.550.000*	*110.000.000*
2	18	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*25 paket*	*6.500.000*	*55.000.000*
2	18	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	*60 paket*	*15.500.000*	*55.000.000*
2	18	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*	*12 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	18	01	1.06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000*	*11.000.000*
2	18	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	*60 Laporan*	*18.200.000*	*55.000.000*
2	18	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*250 Laporan*	*209.900.000*	*550.000.000*
2	18	01	1.06	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	18	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**18**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Unit**	**779.825.350**	**973.500.000**
2	18	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*12 unit*	*52.000.000*	*66.000.000*
2	18	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket mebel yang disediakan*	*10 paket*	*83.219.050*	*66.000.000*
2	18	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*10 unit*	*210.000.000*	*275.000.000*
2	18	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*1 unit*	*15.000.000*	*16.500.000*
2	18	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan*	*5 unit*	*419.606.300*	*550.000.000*
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**12 Laporan**	**690.043.600**	**973.500.000**
2	18	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	*10 laporan*	*10.400.000*	*16.500.000*
2	18	01	1.08	02	*Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*5 Laporan*	*305.643.600*	*550.000.000*
2	18	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*20.000.000*	*22.000.000*
2	18	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*5 Laporan*	*354.000.000*	*385.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	**Kendari**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**29 unit**	**2.807.675.000**	**3.591.500.000**
2	*18*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*106.805.000*	*275.000.000*
2	*18*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah mebel yang dipelihara*	*5 Unit*	*15.000.000*	*16.500.000*
2	*18*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*60 unit*	*45.870.000*	*50.000.000*
2	*18*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pelihara/ Rehabilitasi*	*1 Unit*	*1.500.000.000*	*1.650.000.000*
2	*18*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi*	*5 Unit*	*140.000.000*	*500.000.000*
2	*18*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan*	*1 Paket*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi**	**4 investor**	**762.125.000**	**935.000.000**
2	**18**	**02**	**1.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1 Kegiatan**	**350.000.000**	**385.000.000**
2	*18*	*02*	*1.01*	*01*	*Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*1 Perda*	*350.000.000*	*385.000.000*
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Potensi Investasi Unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan**	**Potensi Unggulan**	**412.125.000**	**550.000.000**
2	*18*	*02*	*1.02*	*01*	*Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	*Perda RUPMP*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	*18*	*02*	*1.02*	*05*	*Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi*	*Peta Potensi*	*212.125.000*	*330.000.000*
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah media promosi penanaman modal**	**4 media**	**2.042.000.000**	**2.350.000.000**
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**4 kegiatan**	**2.042.000.000**	**2.350.000.000**
2	*18*	*03*	*1.01*	*02*	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Provinsi*	*4 Dokumen*	*250.000.000*	*2.000.000.000*
2	*18*	*03*	*1.01*	*03*	*Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*1.792.000.000*	*350.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan**	**Nilai**	**1.373.138.650**	**1.870.000.000**
2	**18**	**04**	**1.01**		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Regulasi Terkait Penyelenggaraan Perizinan yang Disusun**	**2 Dokumen**	**973.138.650**	**1.210.000.000**
2	*18*	*04*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*60 Dokumen*	*600.000.000*	*660.000.000*
2	*18*	*04*	*1.01*	*06*	*Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*4000 Pelaku Usaha*	*140.177.500*	*220.000.000*
2	*18*	*04*	*1.01*	*07*	*Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah*	*50 Kegiatan Usaha*	*232.961.150*	*330.000.000*
2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang Dilaksanakan**	**1 Izin**	**400.000.000**	**660.000.000**
2	*18*	*04*	*1.02*	*06*	*Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi*	*60 Pelaku Usaha*	*400.000.000*	*660.000.000*
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN**	**Rp. 21.73 Triliun**	**1.050.000.000**	**1.155.000.000**
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN**	**Rp. 21.73 Triliun**	**1.050.000.000**	**1.155.000.000**
2	*18*	*05*	*1.01*	*04*	*Pengawasan Penanaman Modal*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*17 Kabupaten/ Kota Se-Sultra*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	*171 Kegiatan Usaha*	*600.000.000*	*660.000.000*
2	*18*	*05*	*1.01*	*05*	*Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*17 Kabupaten/ Kota Se-Sultra*	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	*1784 Kegiatan Usaha*	*450.000.000*	*495.000.000*
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**		**Jumlah izin yang diterbitkan**	**500 izin**	**100.000.000**	**110.000.000**
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**	**Dalam dan Luar Daerah**	**Jumlah Paket Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**500 Dokumen**	**100.000.000**	**110.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	06	1.01	01	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*	*Dalam dan Luar Daerah*	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan*	*500 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**25.000.000.000**	**27.815.392.309**
2	**19**				**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**25.000.000.000**	**27.815.392.309**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kendari**			**10.535.540.888**	**11.594.287.286**
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kendari**			**82.000.000**	**90.200.000**
2	19	01	1,01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun*	*2 Dokumen*	*52.000.000*	*57.200.000*
2	19	01	1,01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	19	01	1,01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	19	01	1,01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	19	01	1,01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	19	01	1,01	06	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	19	01	1,01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kendari**			**8.506.295.781**	**9.362.117.668**
2	19	01	1,02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*81 Orang/bulan*	*7.858.656.376*	*8.644.214.322*
2	19	01	1,02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*196.944.000*	*216.638.400*
2	19	01	1,02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	*55.000.000*	*60.500.000*
2	19	01	1,02	04	*Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD*	*12 Dokumen*	*15.405.275*	*22.445.803*
2	19	01	1,02	05	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 laporan*	*55.000.000*	*60.500.000*
2	19	01	1,02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan*	*2 Dokumen*	*11.000.220*	*12.100.242*
2	19	01	1,02	07	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD*	*18 laporan*	*265.100.110*	*291.610.121*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	*19*	*01*	*1,02*	*08*	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi angaran*	*1 Dokumen*	*49.189.800*	*54.108.780*
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**			**10.000.000**	**11.000.000**
2	*19*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	*19*	*01*	*1.03*	*06*	*Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**19**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**			**286.532.390**	**315.185.629**
2	*19*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai*	*1 Unit*	*5.582.390*	*6.140.629*
2	*19*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya*	*1 Paket*	*77.000.000*	*84.700.000*
2	*19*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*10 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*19*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan*	*7 Orang*	*103.950.000*	*114.345.000*
2	**19**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**			**637.286.757**	**701.015.433**
2	*19*	*01*	*06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*26.403.487*	*29.043.836*
2	*19*	*01*	*06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	*1 Paket*	*46.200.000*	*50.820.000*
2	*19*	*01*	*06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*95.156.300*	*104.671.930*
2	*19*	*01*	*06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*75.264.970*	*82.791.467*
2	*19*	*01*	*06*	*06*	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*365 Dokumen*	*3.762.000*	*4.138.200*
2	*19*	*01*	*06*	*08*	*Fasilitas kunjungan Tamu*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah maknan dan minuman yang disediakan*	*1 laporan*	*99.000.000*	*108.900.000*
2	*19*	*01*	*06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*275.000.000*	*302.500.000*
2	*19*	*01*	*06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokum Penatausahaan dinamis yang disediakan*	*1 Dokumen*	*16.500.000*	*18.150.000*
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**			**109.285.000**	**120.213.500**
2	*19*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah paket mebel yang disediakan*	*1 Paket*	*46.750.000*	*51.425.000*
2	*19*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*2 Unit*	*62.535.000*	*68.788.500*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**19**	**01**	**08**		**Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**			**377.133.960**	**414.847.356**
2	*19*	*01*	*08*	*01*	*Penyediaan jasa Surat Menyurat*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	*1 Laporan*	*6.600.000*	*7.260.000*
2	*19*	*01*	*08*	*02*	*Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	*1 Laporan*	*365.533.960*	*402.087.356*
2	*19*	*01*	*08*	*03*	*Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor lainnya*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
2	**19**	**01**	**09**		**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**			**527.007.000**	**579.707.700**
2	*19*	*01*	*09*	*01*	*Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeihara dan dibayarkan pajaknya*	*2 Unit*	*165.825.000*	*182.407.500*
2	*19*	*01*	*09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	*10 Unit*	*61.182.000*	*67.300.200*
2	*19*	*01*	*09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeihara/rehabilitasi*	*3 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	*19*	*01*	*09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi*	*10 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*19*	*01*	*09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah*	*Tata kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Luas tanah uang dilakukan pemeliharaan rehabilitasi*	*10 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**			**1.860.000.000**	**2.156.000.000**
2	**19**	**02**	**01**		**Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**			**760.000.000**	**836.000.000**
2	*19*	*02*	*1.01*	*03*	*Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda kader provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya*	*50 orang*	*150.000.000*	*165.000.000*
2	*19*	*02*	*1.01*	*10*	*Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah yang menerima penghargaan pemuda*	*1 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	*19*	*02*	*1.01*	*11*	*Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi*	*2 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	*19*	*02*	*1.01*	*12*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda*	*50 Persentase*	*150.000.000*	*165.000.000*
2	*19*	*02*	*1.01*	*13*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	*2 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*19*	*02*	*1.01*	*15*	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	*50 Orang*	*110.000.000*	*121.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	**Sultra**			**1.100.000.000**	**1.320.000.000**
2	*19*	*02*	*1.02*	*03*	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda*	*100 Persentase*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	*19*	*02*	*1.02*	*04*	*Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi*	*1 Organisasi*	*1.000.000.000*	*1.210.000.000*
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**			**11.954.459.112**	**13.350.105.023**
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaa dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	**Sultra**			**400.000.000**	**440.000.000**
2	*19*	*03*	*1.01*	*01*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan pusat pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh masyarakat dan Dunia Usaha*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah pusat pembinaan dan pengembangan olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan*	*1 Unit*	*150.000.000*	*165.000.000*
2	*19*	*03*	*1.01*	*02*	*Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan, Perkumpulan Olahraga dan Penyelnggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh kumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus*	*1 Dokumen*	*250.000.000*	*275.000.000*
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	***Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan***	**Sultra**			**7.854.250.000**	**8.639.675.000**
2	*19*	*03*	*1.01*	*04*	*Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga*	*250 Orang*	*654.250.000*	*719.675.000*
2	*19*	*03*	*1.01*	*05*	*Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi*	*1 Kegiatan*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	*19*	*03*	*1.01*	*06*	*Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara*	*1 Kegiatan*	*7.000.000.000*	*7.700.000.000*
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**			**1.650.000.000**	**1.815.000.000**
2	*19*	*03*	*1.03*	*01*	*Seleksi Atlet Daerah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	*150 Orang*	*400.000.000*	*440.000.000*
2	*19*	*03*	*1.03*	*06*	*Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	*20 Orang*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	*19*	*03*	*1.01*	*07*	*Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	*100 Pelatda*	*840.000.000*	*924.000.000*
2	*19*	*03*	*1.01*	*08*	*Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi*	*17 Dokumen*	*110.000.000*	*121.000.000*
2	*19*	*03*	*1.01*	*09*	*Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*	*50 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**			**2.050.209.112**	**2.455.430.023**
2	*19*	*03*	*1.04*	*03*	*Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait*		*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*		*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait*	*1 Dokumen*	*2.000.209.112*	*2.400.430.023*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	19	03	1.04	05	*Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**	**Jumlah Prestasi kepramukaan**	**100%**	**650.000.000**	**715.000.000**
2	**19**	**04**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**Sultra**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**100%**	**650.000.000**	**715.000.000**
2	19	04	1.01	02	*Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi*		*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*		*Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya*	*1 Organisasi*	*400.000.000*	*440.000.000*
2	19	04	1.01	03	*Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas*	*1 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
2	19	04	1.01	05	*Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*	*Sultra*	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi*	*1 laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	**23**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**						**25.000.000.000**	**28.950.000.000**
2	**23**				**Urusan Perpustakaan**						**24.200.000.000**	**27.895.000.000**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)**	**31,08-%**	**22.500.000.000**	**25.615.000.000**
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi OPD**	**100 Persen**	**410.000.000**	**505.000.000**
2	23	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*80.000.000*
2	23	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
2	23	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*30.000.000*	*40.000.000*
2	23	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*2 Dokumen*	*50.000.000*	*65.000.000*
2	23	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*2 Dokumen*	*30.000.000*	*40.000.000*
2	23	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja*	*2 Laporan*	*75.000.000*	*100.000.000*
2	23	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*125.000.000*
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Dukungan terhadap Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**11.225.000.000**	**11.760.000.000**
2	23	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan*	*110 Orang/Bulan*	*11.000.000.000*	*11.500.000.000*
2	23	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*30.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksanaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	75.000.000	80.000.000
2	23	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	**23**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**105.000.000**	**122.500.000**
2	23	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporam	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000
2	**23**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah**	**100 Persen**	**5.000.000**	**7.500.000**
2	23	01	1.04		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	7.500.000
2	**23**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**100 Persen**	**455.000.000**	**550.000.000**
2	23	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30.000.000	35.000.000
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	250.000.000
2	23	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	175.000.000
2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**1.335.000.000**	**1.570.000.000**
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	60.000.000
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	100.000.000	150.000.000
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	30.000.000
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	75.000.000	100.000.000
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	845.000.000	900.000.000
2	23	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000	80.000.000
2	**23**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Penyediaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor**	**100 Persen**	**6.900.000.000**	**8.550.000.000**
2	23	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	300.000.000
2	23	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionala atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.000.000.000	1.250.000.000
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	750.000.000	1.000.000.000
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	3.000.000.000	3.500.000.000
2	23	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	50 Unit	1.000.000.000	1.250.000.000
2	23	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumkah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	3 Unit	200.000.000	250.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*2 Unit*	*500.000.000*	*750.000.000*
2	23	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*200.000.000*	*250.000.000*
2	**23**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**1.450.000.000**	**1.780.000.000**
2	23	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*25.000.000*	*30.000.000*
2	23	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	*1 Laporan*	*1.250.000.000*	*1.500.000.000*
2	23	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*150.000.000*
2	23	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*75.000.000*	*100.000.000*
2	**23**	**01**	**1.09**	**1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**615.000.000**	**770.000.000**
2	23	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*15 Unit*	*100.000.000*	*150.000.000*
2	23	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kendaraan Perorangan DinasOperasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*30.000.000*	*40.000.000*
2	23	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	*40 Unit*	*60.000.000*	*65.000.000*
2	23	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara*	*1 Unit*	*25.000.000*	*30.000.000*
2	23	01	1.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara*	*1 Unit*	*50.000.000*	*60.000.000*
2	23	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
2	23	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	23	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Desa**	**28,24%**	**1.350.000.000**	**1.765.000.000**
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksanya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara**	**63,94%**	**975.000.000**	**1.290.000.000**
2	23	02	1.01	02	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	***Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan***	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Provinsi sesuai Kewenangannya.*	*40 Perpustakaan*	*150.000.000*	*175.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jamlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Provinsi yang dikembangkan	40 Eksamplar	25.000.000	30.000.000
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	250.000.000	300.000.000
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	100.000.000	150.000.000
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	150.000.000
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Deposit yang dikembangkan	17 Perpustakaan	50.000.000	85.000.000
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dkembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	50.000 Eksamplar	50.000.000	75.000.000
2	23	02	1.01	15	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	10 Perpustakaan	200.000.000	250.000.000
2	23	02	1.01	16	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	75.000.000
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan**	**Prov. Sultra**	**Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif**	**100 Persen**	**375.000.000**	**475.000.000**
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	17 Lokus	75.000.000	100.000.000
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30 Orang	75.000.000	100.000.000
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Layanan Perpustakaan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang dikembangkan	17 Perpustakaan	150.000.000	175.000.000
2	23	02	1.02	06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	75.000.000	100.000.000
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan**	**Prov. Sultra**	**Cakupan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**28,65%**	**350.000.000**	**515.000.000**
2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan**	**Prov. Sultra**	**Tersedianya Informasi dan Usaha Karya Cetak dan Karya Rekam bagi Masyarakat**	**100 Persen**	**50.000.000**	**65.000.000**
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Koleksi KCKR yang dihimpun dan Dikelola serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	1 Eksamplar	50.000.000	65.000.000
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan**	**Prov. Sultra**	**Tersedianya Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Masyarakat**	**100 Persen**	**100.000.000**	**150.000.000**
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Dokuman KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	2 Entry	50.000.000	75.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	03	1.02	02	*Penerbitan Katalog Bibliografi Daerah*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan*	*1 Naskah*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	**23**	**03**	**1.03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**100 Persen**	**150.000.000**	**200.000.000**
2	23	03	1.03	01	*Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno*	*100 Orang*	*75.000.000*	*100.000.000*
2	23	03	1.03	02	*Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan*	*100 Eksamplar*	*75.000.000*	*100.000.000*
2	**23**	**03**	**1.04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah**	**Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif**	**Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan**	**Prov. Sultra**	**Tersedia dan Terolahnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100.000.000**
2	23	03	1.04	01	*Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan Pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi*	*100 Eksamplar*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	23	03	1.04	02	*Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara*	*Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif*	*Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi*	*100 Eksamplar*	*25.000.000*	*50.000.000*
2	**24**				**Urusan Kearsipan**			**Prov. Sultra**			**800.000.000**	**1.055.000.000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Jumlah arsip dinamis dan statis yang dikelola**	**27,83%**	**500.000.000**	**655.000.000**
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Arsip Dinamis Daerah yang Dikelola**	**100 Persen**	**200.000.000**	**270.000.000**
2	24	02	1.01	03	*Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi*	*18 Laporan*	*100.000.000*	*150.000.000*
2	24	02	1.01	04	*Penyusutan Arsip Dinamis*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeiharaan dan Penyusutan*	*1 Arsip*	*50.000.000*	*60.000.000*
2	24	02	1.01	06	*Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daftar Arsip Dinamis*	*1 Arsip*	*50.000.000*	*60.000.000*
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya**	**100 Persen**	**50.000.000**	**60.000.000**
2	24	02	1.02	05	*Akuisisi Arsip Statis*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi*	*100 Arsip*	*50.000.000*	*60.000.000*
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah**	**100 Persen**	**250.000.000**	**325.000.000**
2	24	02	1.03	01	*Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JKN*	*381 Pengguna*	*200.000.000*	*250.000.000*
2	24	02	1.03	02	*Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan tarnsparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**27,03%**	**300.000.000**	**400.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**24**	**03**	**1.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran, Pemekaran Organisasi**	**100 Persen**	**150.000.000**	**200.000.000**
2	*24*	*03*	*1.03*	*01*	*Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah provinsi*	*5 Daftar*	*50.000.000*	*60.000.000*
2	*24*	*03*	*1.03*	*02*	*Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah provinsi*	*500 Arsip*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	*24*	*03*	*1.03*	*03*	*Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota*	*500 Arsip*	*50.000.000*	*65.000.000*
2	**24**	**03**	**1.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah**	**Prov. Sultra**	**Melindungi Fisik Arsip Asli**	**12 Bulan**	**150.000.000**	**200.000.000**
2	*24*	*03*	*1.04*	*01*	*Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang dinilai dan Ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip*	*500 Arsip*	*50.000.000*	*75.000.000*
2	*24*	*03*	*1.04*	*02*	*Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip*	*1.250 Arsip*	*100.000.000*	*125.000.000*
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**88.700.000.000**	**93.041.360.463**
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**88.700.000,000**	**93.041.360,463**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**DKP Prov Sultra**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**20.758.361.841**	**21.900.229.734**
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Dok**	**268.960.714**	**386.358.750**
3	*25*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*113.738.520*	*119.425.446*
3	*25*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*105.000.000*
3	*25*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*2.208.570*	*2.318.999*
3	*25*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.405.484*	*5.675.758*
3	*25*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*146.608.140*	*153.938.547*
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat**	**200 Orang**	**18.191.531.151**	**19.101.107.509**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*200 Orang/ Bulan*	*17.924.747.151*	*18.820.984.509*
3	25	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*266.784.000*	*280.123.000*
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**7.000.000**	**7.350.000**
3	25	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	**25**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**22.000.000**	**23.100.000**
3	25	01	1.04	01	*Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
3	25	01	1.04	02	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*3.000.000*	*3.150.000*
3	25	01	1.04	03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*4.000.000*	*4.200.000*
3	25	01	1.04	04	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.250.000*
3	25	01	1.04	07	*Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.250.000*
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**100.476.650**	**105.500.483**
3	25	01	1.05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	*71.476.650*	*75.050.483*
3	25	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.050.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	06	*Pemulangan Pegawai yang Pensiun*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan*	*1 Orang*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	07	*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	08	*Pemindahan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan*	*5 Orang*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*30 Orang*	*20.000.000*	*21.000.000*
3	25	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*30 Orang*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*30 Orang*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**1.272.489.347**	**1.336.113.814**
3	25	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.297.197*	*6.612.056*
3	25	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*237.405.000*	*249.275.250*
3	25	01	1.06	04	*Penyediaan bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*23.656.500*	*24.839.325*
3	25	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*28.173.600*	*29.582.280*
3	25	01	1.06	06	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*4.599.000*	*4.828.950*
3	25	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*25.557.000*	*26.834.850*
3	25	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*946.801.050*	*994.141.103*
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**1 Unit**	**52.568.000**	**55.196.400**
3	25	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*35.000.000*	*36.750.000*
3	25	1	1.07	03	*Pengadaan Alat Besar*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	04	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*8.568.000*	*8.996.400*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	25	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**646.334.478**	**678.651.202**
3	25	01	1.08	01	*Penyediaan jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*6.090.000*	*6.394.500*
3	25	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*205.544.478*	*215.821.702*
3	25	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*434.700.000*	*456.435.000*
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**				**197.001.501**	**206.851.576**
3	25	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*122.384.115*	*128.503.321*
3	25	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*6.132.000*	*6.438.600*
3	25	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*68.485.386*	*71.909.655*
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui. Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**		**Luas Kawasan Perairan Laut Yang Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**	**302953,66 Ha**	**1.881.706.941**	**1.974.292.288**
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelaolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelaolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelaolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**16 Kab / Kota**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**1 Dokumen**	**1.852.456.941**	**1.943.579.788**
3	25	02	1.01	01	*Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K*	*1 Dokumen*	*503.895.000*	*529.089.750*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*25*	*02*	*1.01*	*02*	*Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat*	*16 Kab / Kota*	*Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulai-Pulau Kecil yang Terkelola*	*301644,49 Ha*	*873.063.069*	*916.716.222*
3	*25*	*02*	*1.01*	*03*	*Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil*	*16 Kab / Kota*	*Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi*	*1 Ha*	*445.498.872*	*467.773.816*
3	*25*	*02*	*1.01*	*04*	*Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil*	*20 Orang*	*30.000.000*	*30.000.000*
3	**25**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawa 12 Mil Di Luar Minyak dan Bumi Gas**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawa 12 Mil Di Luar Minyak dan Bumi Gas**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan 'Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawa 12 Mil Di Luar Minyak dan Bumi Gas**	**16 Kab / Kota**			**1.000.000**	**1.050.000**
3	*25*	*02*	*1.02*	*01*	*Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawa 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawa 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawa 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi*		*Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Rekomendasi*	*1.000.000*	*1.050.000*
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**16 Kab / Kota**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**1 Laporan**	**28.250.000**	**29.662.500**
3	*25*	*02*	*1.03*	*01*	*Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	*20 Orang*	*15.750.000*	*16.537.500*
3	*25*	*02*	*1.03*	*02*	*Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*10 Kelompok*	*5.000.000*	*5.250.000*
3	*25*	*02*	*1.03*	*03*	*Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*30 Orang*	*5.000.000*	*5.250.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*25*	*02*	*1.03*	*04*	*Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*30 Kelompok*	*2.500.000*	*2.625.000*
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Program Pengeloaan Perikanan Tangkap**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**16 Kab / Kota**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan**	**259 Ton 104 NTN**	**53.891.307.889**	**56.585.862.981**
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**1 Laporan**	**32.491.200.560**	**34.115.750.285**
3	*25*	*03*	*1.01*	*01*	*Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	*1 Dokumen*	*131.124.000*	*137.680.200*
3	*25*	*03*	*1.01*	*02*	*Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	*100 Unit*	*31.981.839.215*	*33.580.931.175*
3	*25*	*03*	*1.01*	*03*	*Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*16 Kab / Kota*	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	*10 Unit*	*378.237.345*	*397.138.910*
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Prov Sultra**	**Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**13 Pelabuhan**	**21.400.107.329**	**22.470.112.696**
3	*25*	*03*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan*	*Prov Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia*	*10 Unit*	*21.400.007.329*	*22.470.007.696*
3	*25*	*03*	*1.06*	*03*	*Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan*	*Prov Sultra*	*Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana*	*1 Layanan*	*100.000*	*105.000*
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**DKP Prov Sultra**	**Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**37 Juta Ekor 410000 Ton**	**10.196.032.594**	**10.509.755.188**
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut**	**DKP Prov Sultra**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**1 Laporan**	**4.866.433.513**	**5.109.755.188**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	04	1.05	02	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Laut*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Laut*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Laut*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Prasarana Pembudidaya Yang Terbangun*	*100 Unit*	*4.856.433.513*	*5.099.255.188*
3	25	04	1.05	06	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab / Kota*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab / Kota*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab / Kota*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang dikembangkan (Kelompok)*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.500.000*
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**				**Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**1 Laporan**	**5.329.599.081**	**5.400.000.000**
3	25	04	1.06	01	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*50 Unit*	*1.000.100.000*	*1.000.000.000*
3	25	04	1.06	02	*Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*100 Unit*	*4.329.499.081*	*4.400.000.000*
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SDKP**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Program Pengawasan**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengawasan SDKP**	**Prov Sultra**	**Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP**	**153 Kelompok**	**1.438.645.794**	**1.510.578.084**
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengasawan SDKP Sampai Dengan 12 Mil**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengasawan SDKP Sampai Dengan 12 Mil**	**Prov Sultra**	**Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**1 Laporan**	**1.408.645.794**	**1.479.078.084**
3	25	05	1.01	01	*Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil*	*1 Dokumen*	*15.103.644*	*15.858.826*
3	25	05	1.01	02	*Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil*	*1 Dokumen*	*290.441.550*	*304.963.628*
3	25	05	1.01	04	*Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS)*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS)*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif*	*50 Kelompok*	*1.103.100.600*	*1.158.255.630*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan SDKP Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan SDKP Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi**	**Prov Sultra**	**Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**30.000.000**	**31.500.000**
3	*25*	*05*	*1.02*	*01*	*Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.500.000*
3	*25*	*05*	*1.02*	*02*	*Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.500.000*
3	*25*	*05*	*1.02*	*03*	*Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.500.000*
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**Prov Sultra**	**Jumlah Konsumsi Ikan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)**	**70,95 Kg / Kap / Tahun**	**533.944.941**	**560.642.188**
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Prov Sultra**	**ragam produk olahan bernilai tambah dan penguatan pangsa pasar yang meningkat**	**1 Laporan**	**43.602.300**	**45.782.415**
3	*25*	*06*	*1.02*	*02*	*Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Di Konsumsi Atau Digunakan dan Berdaya Saing*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Di Konsumsi Atau Digunakan dan Berdaya Saing*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*	*26 Unit Usaha*	*43.602.300*	*45.782.415*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	490.342.641	514.859.773
3	*25*	*06*	*1.03*	*02*	*Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi*	*30 Unit Usaha*	*490.342.641*	*514.859.773*
					UPTD BALAI PELAYANAN JASA USAHA, DOCK DAN PERBENGKELAN						**100.000.000**	**105.000.000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelayanan Jasa Usaha, Dock dan Perbengkelan**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pelayanan Jasa Usaha, Dock dan Perbengkelan**				**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**				**100.000.000**	**105.000.000**
3	*25*	*03*	*1.01*	*03*	*Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	*215 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
					UPTD BALAI BENIH PERIKANAN						**100.000.000**	**105.000.000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Balai Benih Perikanan (BPP)**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Balai Benih Perikanan (BPP)**		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**		**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**		**100.000.000**	**105.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*25*	*04*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air T awar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air T awar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*2 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
					UPTD BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						**100.000.000**	**105.000.000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Penerapan Mutu Hasil Perikanan**		**Jumlah Konsumsi Ikan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)**	**70,95 Kg / Kap / Tahun 1636 UPPI**	**100.000.000**	**105.000.000**
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**		**Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**105.000.000**
3	*25*	*06*	*1.02*	*02*	*Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi T erhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*	*Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi T erhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*	*DKP Prov Sultra*	*Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*	*30 Unit Usaha*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**26**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						**34.751.344.988**	**36.161.922.608**
					DINAS PARIWISATA						**34.751.344.988**	**36.161.922.608**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**13.219.390.988**	**13.553.372.608**
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**3 Dokumen**	***252.386.000***	***265.006.000***
3	*26*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*20.000.000*	*21.000.000*
3	*26*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*227.136.000*	*238.493.000*
3	*26*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.250.000*	*5.513.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**108 Dokumen**	**8.352.535.988**	**8.443.175.608**
3	*26*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*90 Orang/Bulan*	*8.174.662.988*	*8.256.408.608*
3	*26*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*172.623.000*	*181.254.000*
3	*26*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.250.000*	*5.513.000*
3	**26**	**01**	**1.0**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**53.433.000**	**56.105.000**
3	*26*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*6 Dokumen*	*53.433.000*	*56.105.000*
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**132.010.000**	**138.610.000**
3	*26*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*95 Paket*	*68.141.000*	*71.547.000*
3	*26*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*15.967.000*	*16.766.000*
3	*26*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*31.935.000*	*33.531.000*
3	*26*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*12 Orang*	*15.967.000*	*16.766.000*
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50 Laporan**	**1.703.964.000**	**1.789.162.000**
3	*26*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*12.492.000*	*13.117.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*500.000.000*	*525.000.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*2 Paket*	*400.000.000*	*420.000.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*59.055.000*	*62.008.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*2 Paket*	*68.141.000*	*71.548.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*20.489.000*	*21.513.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitas Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*68.787.000*	*72.226.000*
3	*26*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*575.000.000*	*603.750.000*
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**19 Unit**	**1.615.527.000**	**1.696.303.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*478.000.000*	*501.900.000*
3	26	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	26	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	26	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*289.400.000*	*303.870.000*
3	26	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*598.127.000*	*628.033.000*
3	**26**	**01**	**1.08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**25 Laporan**	**373.651.000**	**392.333.000**
3	26	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.743.000*	*2.880.000*
3	26	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*207.236.000*	*217.597.000*
3	26	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*163.672.000*	*171.856.000*
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**35 Unit**	**735.884.000**	**772.678.000**
3	26	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 Unit*	*59.590.000*	*62.570.000*
3	26	01	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*10 Unit*	*55.648.000*	*58.430.000*
3	26	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*50.000.000*	*52.500.000*
3	26	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*50.646.000*	*53.178.000*
3	26	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*3 Unit*	*520.000.000*	*546.000.000*
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Sulawesi Tenggara**	**Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan**	**7,63 Hari**	**15.066.403.000**	**15.819.722.000**
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola**	**2 Lokasi**	***776.190.000***	***815.000.000***
3	26	02	1.01	01	*Penepatan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	*2 Lokasi*	*776.190.000*	*815.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola**	**2 Lokasi**	***13.781.314.000***	***14.470.378.000***
3	*26*	*02*	*1.03*	*02*	*Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*2 Dokumen*	*204.750.000*	*214.986.000*
3	*26*	*02*	*1.03*	*04*	*Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara*	*5 Unit*	*13.006.629.000*	*13.656.960.000*
3	*26*	*02*	*1.03*	*07*	*Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*2 Lokasi*	*230.685.000*	*242.219.000*
3	*26*	*02*	*1.03*	*10*	*Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan*	*100 Orang*	*250.000.000*	*262.500.000*
3	*26*	*02*	*1.03*	*12*	*Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi*	*2 Laporan*	*89.250.000*	*93.713.000*
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha**	**5 Industri**	***508.899.000***	***534.344.000***
3	*26*	*02*	*1.04*	*07*	*Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021*	*5 Usaha*	*161.479.000*	*169.553.000*
3	*26*	*02*	*1.04*	*10*	*Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*210.000.000*
3	*26*	*02*	*1.04*	*13*	*Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha*	*1 Laporan*	*147.420.000*	*154.791.000*
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**6.666.000 Orang**	**4.087.091.000**	**4.291.445.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**26**	03	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah**	**10 Laporan**	**4.087.091.000**	**4.291.445.000**
3	*26*	*03*	*1.01*	*01*	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*3 Dokumen*	*264.359.000*	*277.576.000*
3	*26*	*03*	*1.01*	*05*	*Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata*	*2 Dokumen*	*139.838.000*	*146.830.000*
3	*26*	*03*	*1.01*	*06*	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*5 Kegiatan*	*3.682.894.000*	*3.867.039.000*
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasiltasi /Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**1 Usulan**	**1.695.960.000**	**1.780.758.000**
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi**	**5 Laporan**	**965.960.000**	**1.014.258.000**
3	*26*	*04*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif*	*2 Laporan*	*172.409.000*	*181.029.000*
3	*26*	*04*	*1.01*	*06*	*Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik*	*2 Dokumen*	*793.551.000*	*833.229.000*
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan**	**4 Dokumen**	**730.000.000**	**766.500.000**
3	*26*	*04*	1.02	*05*	*Pengembangan Sistem Pemasaran*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif*	*2 Dokumen*	*200.000.000*	*210.000.000*
3	*26*	*04*	1.02	*10*	*Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*	*1 Dokumen*	*30.000.000*	*31.500.000*
3	*26*	*04*	1.02	*12*	*Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*210.000.000*
3	*26*	*04*	1.02	*15*	*Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah*	*1 Lembaga*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	*26*	*04*	1.02	*18*	*Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*	*2 Produk*	*200.000.000*	*215.000.000*
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina**	**200 Orang**	**682.500.000**	**716.625.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik**	**Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat**	**Sulawesi Tenggara**	**Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan**	**200 Orang**	**682.500.000**	**716.625.000**
3	*26*	*05*	*1.01*	*04*	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*50 Orang*	*123.850.000*	*130.043.000*
3	*26*	*05*	*1.01*	*12*	*Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)*	*40 Orang*	*133.400.000*	*140.070.000*
3	*26*	*05*	*1.01*	*14*	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*40 Orang*	*56.700.000*	*59.535.000*
3	*26*	*05*	*1.01*	*16*	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*40 Orang*	*155.925.000*	*163.721.000*
3	*26*	*05*	*1.01*	*17*	*Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	*40 Orang*	*155.925.000*	*163.721.000*
3	*26*	*05*	*1.01*	*18*	*Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*	*Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	*Sulawesi Tenggara*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	*5 Laporan*	*56.700.000*	*59.535.000*
3	**27**				**Urusan Pertanian**						**151.018.280.700**	**156.520.378.770**
					DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN						**98.942.300.000**	**99.267.300.000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100 Persen (%)**	**47.153.700.000**	**47.153.700.000**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13 Dokumen**	**73.500.000**	**73.500.000**
3	*27*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*40.000.000*	*40.000.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.500.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.500.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.500.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.500.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*06*	*Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*5 Laporan*	*6.000.000*	*6.000.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*5.500.000*	*5.500.000*
3	**27**	**01**	**1.02**		**Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**36.312.600.000**	**36.312.600.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	375 Orang/ Bulan	36.000.000.000	36.000.000.000
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	290.000.000	290.000.000
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.300.000	5.300.000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1 dokumen**	**5.300.000**	**5.300.000**
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.300.000	5.300.000
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.300.000**	**5.300.000**
3	27	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.300.000	5.300.000
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**355.000.000**	**355.000.000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Pegawai yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	200.000.000	200.000.000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	150.000.000	150.000.000
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	5.000.000	5.000.000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10 laporan**	**2.387.000.000**	**2.387.000.000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.000.000	42.000.000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	150.000.000
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	50.000.000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	110.000.000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	110.000.000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	170.000.000	170.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*27*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*5 Laporan*	*1.700.000.000*	*1.700.000.000*
3	*27*	*01*	*1.06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*20.000.000*	*20.000.000*
3	*27*	*01*	*1.06*	*11*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**26 Unit**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
3	*27*	*01*	*1.07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*03*	*Pengadaan Alat Besar*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	*2 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*	*10 Unit*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*1.500.000.000*	*1.500.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
3	*27*	*01*	*1.07*	*11*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**1.365.000.000**	**1.365.000.000**
3	*27*	*01*	*1.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
3	*27*	*01*	*1.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*800.000.000*	*800.000.000*
3	*27*	*01*	*1.08*	*03*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	*27*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*360.000.000*	*360.000.000*
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Distannak Prov. Sultra**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**170 Unit**	**1.650.000.000**	**1.650.000.000**
3	*27*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*50 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
3	*27*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*30 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.09	03	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	*30 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
3	27	01	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*30 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
3	27	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*30 Unit*	*50.000.000*	*50.000.000*
3	27	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*10 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
3	27	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*10 Unit*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	27	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Distannak Prov. Sultra*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*10 Unit*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**JUMLAH LAPORAN SARANA PERTANIAN YANG TERSEDIA DAN DIKEMBANGKAN**	**6 Laporan**	**17.145.000.000**	**16.875.000.000**
3	**27**	**02**	**1,01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Sarana Pertanian yang Peredarannya Diawasi**	**5 Laporan**	**13.215.000.000**	**13.215.000.000**
3	27	02	1,01	01	*Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestlsida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian*	*4 Laporan*	*13.045.000.000*	*13.045.000.000*
3	27	02	1,01	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*	*1 Laporan*	*170.000.000*	*170.000.000*
3	**27**	**02**	**1,02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yang Diawasi**	**2 Laporan**	**1.100.000.000**	**830.000.000**
3	27	02	1,02	01	*Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Sertifikat Benih*	*75 Sertifikat*	*300.000.000*	*30.000.000*
3	27	02	1,02	05	*Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga*	*1 Laporan*	*800.000.000*	*800.000.000*
3	**27**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yang Dikelola**	**4 Laporan**	**650.000.000**	**650.000.000**
3	27	02	1,03	02	*Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai*	*1 Varietas Unggul Baru (VUB)*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	27	02	1,03	03	*Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan*	*1 Laporan*	*300.000.000*	*300.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*27*	*02*	*1,03*	*04*	*Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme*	*2 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
3	*27*	*02*	*1,03*	*06*	*Penilaian galur SDG Hewan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah galur SDG hewan yang dinilai*	*1 Galur*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	**27**	**02**	**1,04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengalami Peningkatan**	**2 Laporan**	**68.000.000**	**68.000.000**
3	*27*	*02*	*1,04*	*01*	*Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	*1 Laporan*	*50.000.000*	*50.000.000*
3	*27*	*02*	*1,04*	*04*	*Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	*1 Laporan*	*18.000.000*	*18.000.000*
3	**27**	**02**	**1,05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Dikendalikan dan Diawasi**	**1 Laporan**	**18.000.000**	**18.000.000**
3	*27*	*02*	*1,05*	*04*	*Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi*	*1 Laporan*	*18.000.000*	*18.000.000*
3	**27**	**02**	**1,07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang Tersedia**	**2 Laporan**	**2.094.000.000**	**2.094.000.000**
3	*27*	*02*	*1,07*	*02*	*Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain*	*100 Ton*	*648.000.000*	*648.000.000*
3	*27*	*02*	*1,07*	*04*	*Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain*	*120 Ekor*	*1.446.000.000*	*1.446.000.000*
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**JUMLAH LAPORAN PRASARANA PERTANIAN YANG TERSEDIA DAN DIKEMBANGKAN**	**1 Laporan**	**23.548.600.000**	**23.548.600.000**
3	**27**	**03**	**1,01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Tertata**	**9 Dokumen**	**23.548.600.000**	**23.548.600.000**
3	*27*	*03*	*1,01*	*01*	*Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan komoditas Pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan komoditas Pertanian*	*3 Dokumen*	*3.000.000.000*	*3.000.000.000*
3	*27*	*03*	*1,01*	*03*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani*	*1 Dokumen*	*15.300.000.000*	*15.300.000.000*
3	*27*	*03*	*1,01*	*04*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani*	*1 Dokumen*	*1.090.000.000*	*1.090.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*27*	*03*	*1,01*	*09*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*1 Dokumen*	*1.158.600.000*	*1.158.600.000*
3	*27*	*03*	*1,01*	*13*	*Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*	*3 Ha*	*3.000.000.000*	*3.000.000.000*
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	**Prov. Sultra**	**JUMLAH LAPORAN KASUS KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER YANG DIKENDALIKAN**	**5 Laporan**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
3	**27**	**04**	**1,01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	Prov. Sultra	**Jumlah Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terjamin**	**5 Laporan**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
3	*27*	*04*	*1,01*	*03*	*Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali*	*2 Laporan*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
3	**27**	**04**	**1,02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	Prov. Sultra	**Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang Terawasi**	**5 Laporan**	**500.000.000**	**500.000.000**
3	*27*	*04*	*1,02*	*04*	*Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM*	*2 Laporan*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	*27*	*04*	*1,02*	*05*	*Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya*	*2 Laporan*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	*27*	*04*	*1,02*	*07*	*Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	**27**	**04**	**1,03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	Prov. Sultra	**Jumlah Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang Diterapkan**	**2 Laporan**	**550.000.000**	**550.000.000**
3	*27*	*04*	*1,03*	*01*	*Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi*	*1 Unit*	*250.000.000*	*250.000.000*
3	*27*	*04*	*1,03*	*02*	*Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	*27*	*04*	*1,03*	*03*	*Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
3	**27**	**04**	**1,04**		**Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	Prov. Sultra	**Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner**	**2 Laporan**	**250.000.000**	**250.000.000**
3	*27*	*04*	*1,04*	*03*	*Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM*	*2 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*27*	*04*	*1,04*	*04*	*Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi*	*7 Orang*	*150.000.000*	*150.000.000*
3	**27**	**04**	**1,05**		**Kesejahteraan Hewan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Kesejahteraan Hewan yang Terlaksana**	**2 Laporan**	**200.000.000**	**200.000.000**
3	*27*	*04*	*1,05*	*02*	*Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani*	*1 Kasus*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	*27*	*04*	*1,05*	*03*	*Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)*	*2 Sertifikat*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**JUMLAH LAPORAN KASUS BENCANA PERTANIAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGGULANGI**	**1 Laporan**	**6.250.000.000**	**6.250.000.000**
3	**27**	**05**	**1,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Bencana Pertanian Provinsi yang Dikendalikan dan Ditanggulangi**	**3 Laporan**	**6.250.000.000**	**6.250.000.000**
3	*27*	*05*	*1,01*	*01*	*Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	*10.000 Ha*	*5.500.000.000*	*5.500.000.000*
3	*27*	*05*	*1,01*	*02*	*Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*1.000 Ha*	*600.000.000*	*600.000.000*
3	*27*	*05*	*1,01*	*05*	*Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**PERSENTASE PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI**	**5 Persen (%)**	**2.345.000.000**	**2.940.000.000**
3	**27**	**07**	**1,01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Penyuluh yang Telah Mengikuti Uji Kompotensi**	**200 Orang**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**
3	*27*	*07*	*1,01*	*03*	*Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya*	*50 Unit*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	*27*	*07*	*1,01*	*04*	*Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	*150 Orang*	*1.500.000.000*	*1.500.000.000*
3	**27**	**07**	**1,02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian**	**2 Laporan**	**150.000.000**	**745.000.000**
3	*27*	*07*	*1,02*	*01*	*Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian*	*24 Dokumen*	*50.000.000*	*475.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*27*	*07*	*1,02*	*02*	*Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan*	*14.000 Kelompok*	*100.000.000*	*270.000.000*
3	**27**	**07**	**1,03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Prov. Sultra**	**Jumlah Kelembagaan Pertanian yang Dikembangkan**	**4 Laporan**	**595.000.000**	**595.000.000**
3	*27*	*07*	*1,03*	*05*	*Pendampingan dan pengawalan korporasi petani*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah korporasi petani yang didampingi*	*17 Unit*	*340.000.000*	*340.000.000*
3	*27*	*07*	*1,03*	*06*	*Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Prov. Sultra*	*Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi*	*17 Unit*	*255.000.000*	*255.000.000*
					DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA						**52.075.980.700**	**57.253.078.770**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**100%**	**28.309.980.700**	**31.140.978.770**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**9 Dokumen**	**140.000.000**	**154.000.000**
3	*27*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
3	*27*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*2 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
3	*27*	*1*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**19.069.230.700**	**20.976.153.770**
3	*27*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*208 Orang/Bulan*	*18.709.230.700*	*20.580.153.770*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
3	27	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
3	27	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*18 Laporan*	*350.000.000*	*385.000.000*
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**264 Laporan**	**413.750.000**	**455.125.000**
3	27	01	1.05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
3	27	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*225 Paket*	*168.750.000*	*185.625.000*
3	27	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000,0*	*5.500.000*
3	27	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000,0*	*5.500.000*
3	27	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
3	27	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Orang*	*75.000.000*	*82.500.000*
3	27	1	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*25 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
3	27	1	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan*	*5 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
3	**27**	**1**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**137 Laporan**	**1.239.000.000**	**1.362.900.000**
3	27	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*60.000.000*	*66.000.000*
3	27	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*20.000.000*	*22.000.000*
3	27	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*120.000.000*	*132.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*120.000.000*	*132.000.000*
3	27	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*18.000.000*	*19.800.000*
3	27	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*24 Laporan*	*96.000.000*	*105.600.000*
3	27	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*60 Laporan*	*800.000.000*	*880.000.000*
3	27	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,0*	*5.500.000*
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34 Unit**	**4.900.000.000**	**5.390.000.000**
3	27	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*2 Unit*	*1.500.000.000*	*1.650.000.000*
3	27	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan*	*10 Unit*	*400.000.000*	*440.000.000*
3	27	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	27	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	27	1	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	27	1	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	27	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*2.000.000.000*	*2.200.000.000*
3	27	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan*	*4 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	27	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*4 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37 Laporan**	**1.100.000.000**	**1.210.000.000**
3	27	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyedian Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*40.000.000*	*44.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*720.000.000*	*792.000.000*
3	27	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	27	1	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*240.000.000*	*264.000.000*
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Keloka Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**126 Unit**	**1.448.000.000**	**1.592.800.000**
3	27	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*11 Unit*	*275.000.000*	*302.500.000*
3	27	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*5 Unit*	*125.000.000*	*137.500.000*
3	27	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara*	*100 Unit*	*48.000.000*	*52.800.000*
3	27	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
3	27	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*5 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan**	**18 Laporan**	**14.800.000.000**	**16.280.000.000**
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan**	**9 Laporan**	**1.600.000.000**	**1.760.000.000**
3	27	02	1.01	01	*Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Pengawasan, Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	27	02	1.01	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*	*2 Dokumen*	*300.000.000*	*330.000.000*
3	27	02	1.01	03	*Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan*	*2 Laporan*	*400.000.000*	*440.000.000*
3	27	02	1.01	05	*Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan*	*2 Laporan*	*400.000.000*	*440.000.000*
3	27	02	1.01	06	*Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	27	02	1.01	07	*Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*220.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	***Sultra***	**Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura**	**9 Laporan**	**13.200.000.000**	**14.520.000.000**
3	*27*	*02*	*1.02*	*01*	*Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Sertifikat Benih*	*12 Sertifikat*	*1.200.000.000*	*1.320.000.000*
3	*27*	*02*	*1.02*	*05*	*Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga*	*1 Laporan*	*8.400.000.000*	*9.240.000.000*
3	*27*	*02*	*1.03*	*06*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan*				*Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan*	*10000 Anakan*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	*27*	*02*	*1.04*	*07*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang*				*Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak*	*200000 Batang*	*2.000.000.000*	*2.200.000.000*
3	*27*	*02*	*1.05*	*08*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh*				*Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh*	*1000 Mata*	*10.000.000*	*11.000.000*
3	*27*	*02*	*1.06*	*10*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek*				*Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek*	*1000 Setek*	*10.000.000*	*11.000.000*
3	*27*	*02*	*1.07*	*11*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji*				*Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji*	*1000 Gram*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	*27*	*02*	*1.08*	*12*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang*				*Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang*	*118000 Batang*	*1.180.000.000*	*1.298.000.000*
3	*27*	*02*	*1.09*	*14*	*Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi*				*Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak*	*2 Ton*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan**	**11 Laporan**	**6.000.000.000**	**6.600.000.000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah penataan prasarana yang dilaksanakan**	**11 Laporan**	**6.000.000.000**	**6.600.000.000**
3	*27*	*03*	*1.01*	*01*	*Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	*27*	*03*	*1.01*	*03*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani*	*15 Dokumen*	*3.000.000.000*	*3.300.000.000*
3	*27*	*03*	*1.01*	*04*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	*27*	*03*	*1.01*	*07*	*Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara*	*1 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	*27*	*03*	*1.01*	*09*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	*27*	*03*	*1.01*	*10*	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangung, Dipelihara dan Direhabilitasi*	*4 Unit*	*400.000.000*	*440.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	03	1.01	11	*Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura*				*Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*2 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	27	03	1.01	13	*Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian*				*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*	*100 Ha*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
3	27	03	1.01	14	*Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura*				*Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*2 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	27	03	1.01	17	*Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan*				*Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*3 Unit*	*300.000.000*	*330.000.000*
3	27	03	1.01	20	*Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan*				*Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*2 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan**	**4 Laporan**	**2.100.000.000**	**2.310.000.000**
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura**	**4 Laporan**	**2.100.000.000**	**2.310.000.000**
3	27	05	1.01	01	*Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	*10 Ha*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
3	27	05	1.01	02	*Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*5 Ha*	*500.000.000*	*550.000.000*
3	27	05	1.01	03	*Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	*5 Ha*	*500.000.000*	*550.000.000*
3	27	05	1.01	05	*Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura**	**3 Laporan**	**300.000.000**	**300.000.000**
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit**	**3 Laporan**	**300.000.000**	**300.000.000**
3	27	06	1.01	01	*Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	27	06	1.01	02	*Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	27	06	1.01	05	*Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*100.000.000*
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Pesentase Peningkatan Kemampuan kelompok tani**	**6 Laporan**	**566.000.000**	**622.100.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang kompoten**	**2 Laporan**	**116.000.000**	**127.100.000**
3	*27*	*07*	*1.01*	*03*	*Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya*	*10 Unit*	*66.000.000*	*72.100.000*
3	*27*	*07*	*1.01*	*04*	*Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	*50 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan**	**2 Laporan**	**100.000.000**	**110.000.000**
3	*27*	*07*	*1.02*	*01*	*Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian*	*2 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
3	*27*	*07*	*1.02*	*02*	*Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan*	*2 Kelompok*	*50.000.000*	*55.000.000*
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan**	**2 Laporan**	**350.000.000**	**385.000.000**
3	*27*	*07*	*1.03*	*05*	*Pendampingan dan pengawalan korporasi petani*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah korporasi petani yang didampingi*	*9 Unit*	*225.000.000*	*247.500.000*
3	*27*	*07*	*1.03*	*06*	*Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani*	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	*Sultra*	*Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi*	*5 Unit*	*125.000.000*	*137.500.000*
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**119.538.412.000,00**	**115.625.154.000,00**
3	**28**				**DINAS KEHUTANAN**						**62.692.260.000,00**	**68.030.861.000,00**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**55.370.860.000,00**	**60.358.321.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**165.000.000,00**	**181.500.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**52.588.610.000,00**	**57.847.471.000,00**
3	28	1	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*7020 Orang/ Bulan*	*52.313.610.000,00*	*5.754.971.000*
3	28	1	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*-*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*175.000.000,00*	*192.500.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**51.000.000,00**	**56.100.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Laporan**	**1.038.750.000,00**	**660.000.000,00**
3	28	1	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*438.750.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*20 Orang*	*400.000.000,00*	*440.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**715.000.000,00**	**786.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Mandonga, Korumba*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*500.000.000,00*	*550.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**270.000.000,00**	**230.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*120.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**252.500.000,00**	**277.750.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*250.000.000,00*	*275.000.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**14 Unit**	**290.000.000,00**	**319.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*200.000.000,00*	*220.000.000,00*
3	28	1	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu**	**1215 Ha 1 Persen 5 Dokumen 40000 M3 500 Ton**	**3.901.400.000,00**	**75.540.000**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**800.000.000,00**	**580.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*6 Dokumen*	*500.000.000,00*	*250.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**348.000.000,00**	**382.800.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	03	*Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Analisi dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*5 Dokumen*	*328.000.000,00*	*360.800.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**1250 Hektar**	**990.000.000,00**	**1.089.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*388.000.000,00*	*426.800.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*602.000.000,00*	*662.200.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**1.500.000.000,00**	**1.650.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*100000 Ha*	*500.000.000,00*	*550.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*500.000.000,00*	*550.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*500.000.000,00*	*550.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Unit Managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**4 Unit Managemen**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	02	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani*	*2 Unit Managemen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*2 Unit Managemen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**25 Unit Managemen**	**183.400.000,00**	**285.740.000,00**
3	28	3	1.07	01	*Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah*	*20 Unit Managemen*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*60.000.000,00*	*150.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07	03	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani*	*5 Unit Managemen*	*23.400.000,00*	*25.740.000,00*
3	**28**	**4**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**100 Hektar**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
3	28	4	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola**	**100 Hektar**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
3	28	4	1.03	06	*Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola*	*100 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 KTH**	**2.700.000.000,00**	**2.970.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**2.700.000.000,00**	**2.970.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*55 Orang*	*500.000.000,00*	*550.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*10 Kelompok*	*1.000.000.000,00*	*1.100.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*3000 Ha*	*1.200.000.000,00*	*1.320.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 DAS**	**620.000.000,00**	**517.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**620.000.000,00**	**517.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*470.000.000,00*	*517.000.000,00*
3	28	6	1.01	05	*Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS*	*1 Lembaga*	*150.000.000,00*	*0,00*
					UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA						**2.031.060.000,00**	**2.233.166.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**601.060.000,00**	**661.166.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**32.760.000,00**	**36.036.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*3.600.000,00*	*3.960.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**2.500.000,00**	**2.750.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**umlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**66.000.000,00**	**72.600.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.000.000,00*	*6.600.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*6.000.000,00*	*6.600.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*9.000.000,00*	*9.900.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**4 Unit**	**410.000.000,00**	**451.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*88.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**			**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**1.500.000**	**15.950.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*1.000.000*	*15.400.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**10 Unit**	**40.300.000,00**	**4.330.000**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*9 Unit*	*35.300.000,00*	*38.830.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu**	**1215 Hektar 5 Dokumen 1 Persen 500 Ton 40000 M3**	**380.000.000,00**	**418.000.000,00**
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**32 Hektar**	**380.000.000,00**	**418.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*15 Ha*	*180.000.000,00*	*198.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	04	*Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari Barat, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa*	*Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara*	*12 Ha*	*90.000.000,00*	*99.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*5 Ha*	*105.000.000,00*	*115.500.000,00*
3	**28**	**4**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**100 Ha**	**1.050.000.000,00**	**115.000.000**
3	28	4	1.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**1 Laporan**	**1.050.000.000,00**	**115.000.000**
3	28	4	1.01	02	*Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari Barat, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa*	*Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi*	*6 Operasi*	*210.000.000,00*	*231.000.000,00*
3	28	4	1.01	03	*Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi*	*10 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	4	1.01	05	*Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa*	*Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem*	*10 Ha*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	4	1.01	06	*Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti*	*4 Permohonan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	4	1.01	07	*Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi*	*4 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	4	1.01	08	*Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Kendari, Mangga Dua - Kota Kendari, Kendari Barat, Watu-Watu*	*Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif*	*2 Desa*	*420.000.000,00*	*462.000.000,00*
3	28	4	1.01	11	*Perencanaan Pengelolaan TAHURA*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari Barat, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan*	*1 Dokumen*	*110.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	**28**				**UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**						**2.861.710.000,00**	**1.603.356.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**2.026.710.000,00**	**68.856.000**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**3.160.000**	**37.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**206.800.000,00**	**227.480.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*65 Orang*	*88.400.000,00*	*97.240.000,00*
3	28	1	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*65 Orang*	*88.400.000,00*	*97.240.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**200.000.000,00**	**86.000.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*165.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.000.000,00*	*6.600.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*25.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**15 Unit**	**1.470.000.000,00**	**190.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*450.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*12 Unit*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	1	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*920.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**20.500.000,00**	**20.550.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*20.000.000,00*	*20.000.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**7 Unit**	**80.250.000,00**	**106.750.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*3 Unit*	*5.250.000,00*	*2.250.000*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Kayu**	**1 Persen 5 Dokumen 500 Ton 1215 Hektar 40000 M3**	**835.000.000,00**	**918.500.000,00**
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1250 Hektar**	**300.000.000,00**	**330.000.000,00**
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Laporan Perlaksanaan Perbenihan Tanaman**	**1 Laporan**	**535.000.000,00**	**588.500.000,00**
3	28	3	1.09	01	*Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi*	*135 Unit Usaha*	*135.000.000,00*	*148.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.09	02	*Sertifikasi Sumber Benih*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan*	*12 Sertifikat*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.09	03	*Sertifikasi Mutu Benih*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan*	*12 Sertifikat*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.09	04	*Sertifikasi Mutu Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan*	*12 Sertifikat*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI**						**2.138.660.000,00**	**132.826.000**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.101.160.000,00**	**419.576.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**75.000.000,00**	**82.500.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**99.000.000,00**	**105.900.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**7 Unit**	**840.000.000,00**	**133.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*90.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*60.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**8.000.000,00**	**11.100.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*7.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**4 Unit**	**17.500.000,00**	**19.250.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*0 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*0 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Dokumen RPHJP**	**40000 M3 1 Persen 1215 Hektar 500 Ton 5 Dokumen**	**802.500.000,00**	**646.750.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**130.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**7.500.000,00**	**8.250.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**38 Hektar**	**550.000.000,00**	**479.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.04	04	*Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara*	*3 Ha*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*10 Ha*	*210.000.000,00*	*105.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**2 Unit Managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*2 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 KTH**	**230.000.000,00**	**253.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**230.000.000,00**	**253.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*200.000.000,00*	*220.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 DAS**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU**						**2.735.060.000,00**	**1.800.066.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.080.060.000,00**	**453.066.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**103.500.000,00**	**110.850.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*16.000.000,00*	*17.600.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.000.000,00*	*7.700.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*8.000.000,00*	*8.800.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**6 Unit**	**820.000.000,00**	**170.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*20.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**18.400.000,00**	**20.240.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*17.400.000,00*	*19.140.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**2 Unit**	**46.500.000,00**	**51.150.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*36.500.000,00*	*40.150.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**	**500 Ton 40000 M3 5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen**	**1.545.000.000,00**	**1.226.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**350.000.000,00**	**55.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**50 Hektar**	**955.000.000,00**	**907.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*25 Ha*	*525.000.000,00*	*525.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**1 Laporan**	**130.000.000,00**	**143.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*20000 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*0 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA**						**2.427.910.000,00**	**2.010.501.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**757.910.000,00**	**579.501.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**83.500.000,00**	**88.850.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.000.000,00*	*6.600.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**13 Unit**	**500.000.000,00**	**296.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*4 Unit*	*160.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*60.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*6 Unit*	*100.000.000,00*	*18.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*180.000.000,00*	*198.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**13.000.000,00**	**1.300.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.000.000,00*	*13.200.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**5 Unit**	**59.750.000,00**	**68.525.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*57.750.000,00*	*63.525.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*2.000.000,00*	*5.000.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*0 Unit*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu**	**5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen 500 Ton 40000 M3**	**1.540.000.000,00**	**1.288.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**550.000.000,00**	**220.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*2 Unit*	*200.000.000,00*	*220.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**35 Hektar**	**740.000.000,00**	**793.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*450.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*220.000.000,00*	*122.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*10 Ha*	*210.000.000,00*	*210.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**175.000.000,00**	**192.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*28000 Ha*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*2 Kelompok*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI**						**1.485.160.000,00**	**1.047.176.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**385.160.000,00**	**279.676.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**65.000.000,00**	**68.500.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**210.000.000,00**	**90.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**8.500.000,00**	**9.350.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**2 Unit**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP**	**1 Persen 40000 M3 500 Ton 1215 Hektar 5 Dokumen**	**1.020.000.000,00**	**679.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**320.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*10.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**30 Hektar**	**535.000.000,00**	**487.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*5 Ha*	*105.000.000,00*	*105.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**130.000.000,00**	**143.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI**						**2.542.910.000,00**	**1.556.701.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.210.410.000,00**	**623.451.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**49.160.000,00**	**5.076.000**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Orang*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**120.000.000,00**	**129.000.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**825.000.000,00**	**202.500.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**17.000.000,00**	**18.700.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.000.000,00*	*13.200.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**5 unit**	**131.750.000,00**	**14.925.000**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*750.000*	*5.225.000,00*
3	28	1	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu**	**1215 Hektar 5 Dokumen 40000 M3 1 Persen 500 Ton**	**1.265.000.000,00**	**859.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**370.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Lea-Lea, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Kokalukuna, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Bungi, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Betoambari, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**150.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Lea-Lea, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Kokalukuna, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Betoambari, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Bungi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**35 Hektar**	**505.000.000,00**	**465.500.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	04	*Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara*	*10 Ha*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*125.000.000,00*	*77.500.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**200.000.000,00**	**217.500.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*52.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**4 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Batupoaro, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Bungi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**60.000.000,00**	**66.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**60.000.000,00**	**66.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**7.500.000,00**	**8.250.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**7.500.000,00**	**8.250.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA**						**52.080.000**	**3.541.788.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 persen**	**1.602.080.000,00**	**1.369.288.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**40.080.000,00**	**4.088.000**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*25.080.000,00*	*27.588.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*10 Orang*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**117.000.000,00**	**125.700.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.000.000,00*	*7.700.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**10 Unit**	**1.025.000.000,00**	**802.500.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*500.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**22.500.000,00**	**2.750.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**29 Unit**	**280.000.000,00**	**243.000.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*20 Unit*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*150.000.000,00*	*100.000.000,00*
3	28	1	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu**	**5 Dokumen 1215 Ha 1 Persen 500 Ton 40000 M3**	**1.895.000.000,00**	**1.809.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**270.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*250.000.000,00*	*0,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Tongkuno, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Kontu Kowuna, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*7 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**55 Ha**	**985.000.000,00**	**1.083.500.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*30 Ha*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*230.000.000,00*	*253.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*30 Ha*	*445.000.000,00*	*489.500.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**450.000.000,00**	**495.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Tongkuno, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Napabalano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Bone, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Parigi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Kontunaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Tongkuno, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lohia, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*1 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Ha**	**515.000.000,00**	**319.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**515.000.000,00**	**319.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*15 Orang*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Kontunaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Napabalano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Kabawo, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lohia, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*5 Kelompok*	*375.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Kontunaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*200 Ha*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 unt**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA**						**3.677.660.000,00**	**2.615.926.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.072.660.000,00**	**338.926.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**65.000.000,00**	**68.500.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**6 Unit**	**880.000.000,00**	**130.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**26.000.000,00**	**28.600.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**2 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**	**40000 M3 1215 Ha 5 Dokumen 500 Ton 1 Persen**	**2.525.000.000,00**	**2.189.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**310.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**150 Ha**	**2.005.000.000,00**	**1.958.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*125 Ha*	*1.575.000.000,00*	*1.575.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**0,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Ha**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA**						**3.765.800.000,00**	**2.817.680.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**1.043.300.000,00**	**382.930.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**9.000.000**	**100.200.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**4 Unit**	**800.000.000,00**	**135.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**30.640.000,00**	**1.720.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*28.140.000,00*	*145.000*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**4 unit**	**17.000.000,00**	**18.700.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*2 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan**	**1 Persen 40000 M3 500 Ton 5 Dokumen 1215 Hektar**	**2.597.500.000,00**	**2.297.250.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**300.000.000,00**	**0,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**7.500.000,00**	**8.250.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**125 Hektar**	**1.970.000.000,00**	**1.937.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*125 Ha*	*600.000.000,00*	*600.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*260.000.000,00*	*116.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*50 Ha*	*1.100.000.000,00*	*1.210.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit Mangemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*1 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**110.000.000,00**	**121.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**110.000.000,00**	**121.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA**						**2.200.910.000,00**	**2.433.296.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 persen**	**505.910.000,00**	**1.091.296.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**60.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Orang*	*50.000.000,00*	*60.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**1**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**90.200.000,00**	**9.070.000**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.500.000,00*	*2.000.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*-*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*0 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.200.000,00*	*1.320.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**245.000.000,00**	**795.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*120.000.000,00*	*750.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*75.000.000,00*	*25.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*20.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**3.500.000,00**	**3.850.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	**28**	**1**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**10 Unit**	**55.550.000,00**	**70.550.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*7 Unit*	*25.550.000,00*	*37.550.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Kayu dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan**	**40000 M3 5 Dokumen 500 Ton 1 persen 1215 Hektar**	**1.560.000.000,00**	**1.193.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**300.000.000,00**	**0,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Mata Usu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**40 Hektar**	**945.000.000,00**	**847.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*450.000.000,00*	*450.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*170.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*15 Ha*	*315.000.000,00*	*315.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	*- Kab. Bombana, Poleang Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**2 Unit Managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Poleang, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*2 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya** **Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit** **3000 Hektar**	**95.000.000,00**	**10.500.000**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**95.000.000,00**	**10.500.000**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*0 Orang*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
						-		- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	7 Orang	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa* *- Kab. Bombana, Mata Usu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*4 Kelompok*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa* *- Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa* *- Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa* *- Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN**						**277.160.000**	**1.831.676.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 persen**	**125.160.000**	**58.676.000**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa* *- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**105.000.000,00**	**115.500.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*60.000.000,00*	*66.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*8.000.000,00*	*8.800.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**6 Unit**	**905.000.000,00**	**235.500.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*80.000.000,00*	*88.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**13.500.000,00**	**1.850.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.500.000,00*	*1.650.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.000.000,00*	*13.200.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**23 Unit**	**139.000.000,00**	**118.000.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*16 Unit*	*60.000.000,00*	*66.000.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*4 Unit*	*000.000,00*	*2.000.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*75.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu**	**5 Dokumen 40000 M3 1 Persen 1215 Hektar 500 Ton**	**1.390.000.000,00**	**110.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**3**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**325.000.000,00**	**27.500.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	**28**	**3**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**3**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	3	1.03	03	*Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Analisi dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**3**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**40 Hektar**	**745.000.000,00**	**697.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Watubangga, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*15 Ha*	*315.000.000,00*	*315.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**210.000.000,00**	**258.500.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*60.000.000,00*	*93.500.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Watubangga, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**110.000.000,00**	**121.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**110.000.000,00**	**121.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*2 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Toari, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA**						**2.740.700.000,00**	**1.795.616.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.125.700.000,00**	**461.116.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**15.000.000,00**	**13.750.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*7.500.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**9.000.000**	**102.900.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.500.000,00*	*1.650.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**850.000.000,00**	**175.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**12.940.000,00**	**20.240.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*11.940.000,00*	*19.140.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**15 Unit**	**6.600.000**	**51.150.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*14 Unit*	*5.600.000*	*40.150.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dokumen RPHJP**	**40000 M3 1 persen 1215 Hektar 500 Ton 5 Dokumen**	**1.360.000.000,00**	**105.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**470.000.000,00**	**187.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Laporan**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Mowewe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**35 Hektar**	**640.000.000,00**	**592.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*10 Ha*	*210.000.000,00*	*210.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Mowewe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**235.000.000,00**	**258.500.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**235.000.000,00**	**258.500.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*175.000.000,00*	*192.500.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI**						**2.235.160.000,00**	**184.226.000**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**600.660.000,00**	**457.726.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**145.000.000,00**	**109.500.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*100.000.000,00*	*60.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**8 Unit**	**205.000.000,00**	**162.500.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**1.000.000**	**15.400.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.000.000,00*	*13.200.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**9 Unit**	**135.000.000,00**	**58.500.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*7 Unit*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*100.000.000,00*	*20.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**1.420.000.000,00**	**1.172.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**320.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Mowewe, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Uluiwoi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tinondo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**95.000.000,00**	**10.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**50 Hektar**	**730.000.000,00**	**743.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*50 Ha*	*600.000.000,00*	*660.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*75.000.000,00*	*82.500.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*5 Orang*	*55.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*2 Kelompok*	*55.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*55.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**49.500.000,00**	**49.500.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**49.500.000,00**	**49.500.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*49.500.000,00*	*49.500.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA**						**2.055.660.000,00**	**1.131.226.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.050.660.000,00**	**355.726.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**85.000.000,00**	**9.050.000**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**850.000.000,00**	**135.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**2.500.000,00**	**2.200.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*1.500.000,00*	*1.650.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**9 Unit**	**31.500.000,00**	**3.650.000**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*8 Unit*	*2.000.000*	*26.400.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**905.000.000,00**	**665.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**340.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**25 Hektar**	**425.000.000,00**	**467.500.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*132.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**1 unit managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN**						**2.151.300.000,00**	**2.455.680.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**521.300.000,00**	**1.115.180.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**10.000.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*20.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**91.000.000,00**	**100.100.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**230.000.000,00**	**805.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*750.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**28.340.000,00**	**3.117.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*26.340.000,00*	*2.897.000*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**4 Unit**	**82.800.000,00**	**91.080.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*3 Unit*	*32.800.000,00*	*36.080.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**1.530.000.000,00**	**1.230.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**475.000.000,00**	**192.500.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	-	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Lambai, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Rante Angin, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Katoi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Wawo, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**65 Hektar**	**745.000.000,00**	**697.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Watunohu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*50 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Watunohu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Watunohu, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*15 Ha*	*315.000.000,00*	*315.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA**						**1.778.160.000,00**	**2.136.476.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**363.160.000,00**	**1.020.976.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*20.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**91.000.000,00**	**100.100.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Unit**	**155.000.000,00**	**805.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*750.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*25.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**1.500.000,00**	**1.650.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**9 Unit**	**2.000.000**	**26.400.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*8 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*1.000.000*	*15.400.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**1.295.000.000,00**	**983.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**375.000.000,00**	**82.500.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1 Laporan**	**60.000.000,00**	**66.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**35 Hektar**	**640.000.000,00**	**593.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	-	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*0 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Tinuna*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Lelewawo*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*10 Ha*	*210.000.000,00*	*210.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**200.000.000,00**	**220.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*5000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Porehu, Larui*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial** **Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar** **10 Unit**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa* *- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT**						**1.777.660.000,00**	**1.250.426.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.002.660.000,00**	**397.926.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa* *- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**77.500.000,00**	**85.250.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.500.000,00*	*1.650.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**815.000.000,00**	**191.500.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**8.500.000,00**	**9.350.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**2 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	-	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan**	**500 Ton 40000 M3 5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen**	**665.000.000,00**	**731.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**25 Hektar**	**325.000.000,00**	**357.500.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Routa, Tira Wonua*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Routa, Tira Wonua*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Routa, Tira Wonua*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**200.000.000,00**	**220.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*-*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*0 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	01	*Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan*	*0 Dokumen*	*0,00*	*0,00*
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Routa, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA**						**2.416.000.000,00**	**1.541.566.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.026.000.000,00**	**393.566.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**umlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**87.500.000,00**	**96.250.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**4 Unit**	**800.000.000,00**	**135.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*80.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**9.340.000,00**	**20.240.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*8.340.000,00*	*19.140.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**13 Unit**	**37.500.000,00**	**41.250.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*1 Unit*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Kerusakan kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu**	**5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen 500 Ton 40000 M3**	**1.150.000.000,00**	**88.000.000**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**400.000.000,00**	**110.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**umlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**35 Hektar**	**540.000.000,00**	**543.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*10 Ha*	*210.000.000,00*	*210.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 unit managemen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**210.000.000,00**	**231.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**210.000.000,00**	**231.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH**						**1.173.600.000,00**	**1.532.391.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**383.600.000,00**	**1.053.391.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**umlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**7.500.000**	**81.950.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**4 Unit**	**160.000.000,00**	**805.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*750.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**16.190.000,00**	**20.240.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*15.190.000,00*	*19.140.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**12 Unit**	**41.250.000,00**	**45.375.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*21.250.000,00*	*23.375.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu**	**5 Dokumen 1215 Hektar 40000 M3 1 Persen 500 Ton**	**760.000.000,00**	**446.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**350.000.000,00**	**55.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*2 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1 Hektar**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**300.000.000,00**	**330.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA**						**1.332.710.000,00**	**1.759.981.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**602.710.000,00**	**1.181.981.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**31.660.000,00**	**3.826.000**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**2.500.000,00**	**2.750.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**73.500.000,00**	**80.850.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*6.000.000,00*	*6.600.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**7 Unit**	**360.000.000,00**	**915.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*750.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**13.100.000,00**	**1.410.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.600.000,00*	*13.860.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**6 Unit**	**76.950.000,00**	**8.645.000**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*4 Unit*	*26.950.000,00*	*29.645.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Rehabilitasi Hutan dan Lahan dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan**	**1215 Hektar 5 Dokumen 40000 M3 500 Ton 1 Persen**	**560.000.000,00**	**391.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**170.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*150.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**umlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1 Hektar**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggaberi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pondidaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Sampara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Morosi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggalomoare, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggaberi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pondidaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Morosi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Sampara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggalomoare, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggaberi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Morosi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pondidaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggalomoare, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Sampara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Anggaberi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 KTH**	**170.000.000,00**	**187.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**170.000.000,00**	**187.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*9 Orang*	*90.000.000,00*	*99.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*6 Kelompok*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Anggaberi, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII**						**2.029.160.000,00**	**2.318.576.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**53.160.000**	**113.576.000**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**6 Unit**	**260.000.000,00**	**833.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*750.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000,00*	*50.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.000.000,00*	*13.200.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**7 Unit**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*5 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Persentase Kerusakan Kawasan Hutan dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan**	**1 Persen 5 Dokumen 500 Ton 40000 M3 1215 Hektar**	**1.400.000.000,00**	**1.079.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**340.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Selatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**835.000.000,00**	**788.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Utara, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Tengah, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*50 Ha*	*600.000.000,00*	*600.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Tengah, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Timur Laut, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*5 Ha*	*105.000.000,00*	*105.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**200.000.000,00**	**220.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*110.000.000,00*	*121.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		-	-	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Hektar 10 Unit**	**75.000.000,00**	**82.500.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**75.000.000,00**	**82.500.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI**						**1.185.660.000,00**	**919.226.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**160.660.000,00**	**176.726.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*1 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**60.500.000,00**	**66.550.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**6 Unit**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*3 Unit*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*		*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Kayu**	**5 Dokumen 500 Ton 1 Persen 1215 Hektar 40000 M3**	**950.000.000,00**	**660.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**360.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	3	1.03	02	*Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Tomia, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**25 Hektar**	**320.000.000,00**	**352.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Tomia Timur, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Tomia Timur, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Tomia Timur, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**230.000.000,00**	**253.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*2000 Ha*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI**						**1.881.160.000,00**	**2.310.276.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**266.160.000,00**	**95.776.000**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**6.500.000**	**70.950.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**3 Unit**	**100.000.000,00**	**772.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*750.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**3.500.000,00**	**3.850.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*500.000,00*	*550.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**3 Unit**	**16.500.000,00**	**18.150.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*1.500.000,00*	*1.650.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**1.020.000.000,00**	**701.000.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**380.000.000,00**	**88.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**3**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**3**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**60.000.000,00**	**66.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*40.000.000,00*	*4.000.000*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**3**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**25 Hektar**	**430.000.000,00**	**382.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	**28**	**3**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**130.000.000,00**	**143.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
3	28	3	1.09	05	*Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	*0 Laporan*	*0,00*	*0,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**4**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**100 Hektar**	**535.000.000,00**	**588.500.000,00**
3	28	4	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Kawasan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang di kelola**	**25 Hektar**	**535.000.000,00**	**588.500.000,00**
3	28	4	1.03	03	*Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	4	1.03	04	*Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa*	*Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani*	*25 Ha*	*525.000.000,00*	*577.500.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Dokumen**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA**						**2.615.950.000,00**	**2.606.465.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**703.450.000,00**	**645.215.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*9 Orang*	*90.000.000,00*	*99.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**83.500.000,00**	**89.350.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*6.000.000,00*	*6.600.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*25.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**1**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**6 Unit**	**230.000.000,00**	**141.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*120.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*10.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	**28**	**1**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**35.240.000,00**	**3.876.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*3.240.000*	*3.766.000*
3	**28**	**1**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**-**	**-**	**103.050.000,00**	**99.275.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*12 Unit*	*57.250.000,00*	*62.975.000,00*
3	28	1	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*40 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*9 Unit*	*12.800.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Poasia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Angata, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Konda, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Kolono, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Moramo Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*8 Unit*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.010		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah BLUD**	**1 Unit**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
3	28	1	1.010	01	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1 Unit Kerja*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**1.737.500.000,00**	**1.768.750.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**350.000.000,00**	**385.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*330.000.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**7.500.000,00**	**8.250.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**-**	**-**	**965.000.000,00**	**919.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*45 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*120.000.000,00*	*72.000.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*50 Ha*	*525.000.000,00*	*525.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*35000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**3 Unit**	**15.000.000,00**	**16.500.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe Selatan, Konda, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Ranomeeto, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*3 Unit Managemen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Poasia, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Abeli, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Kolono,*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Angata, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Andoolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Palangga, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Landono, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Konda, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Ranomeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Moramo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Palangga Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Moramo Utara, Semua Kel/Desa				
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**10 Unit 3000 Hektar**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*4 Orang*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*2 Kelompok*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 Unit**	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	**28**				**UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA**						**2.919.660.000,00**	**1.845.126.000,00**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**1.199.660.000,00**	**430.626.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**6.500.000**	**67.950.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**7 Unit**	**1.000.000.000,00**	**170.000.000,00**
3	28	1	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*750.000.000,00*	*120.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*150.000.000,00*	*50.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*100.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**6.000.000,00**	**6.600.000,00**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**9 Unit**	**37.500.000,00**	**35.750.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*4 Unit*	*11.000.000,00*	*12.100.000,00*
3	28	1	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*1 Unit*	*5.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 Unit*	*1.500.000,00*	*1.650.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Produksi Hasil Hutan Buan kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan**	**500 ton 1 Persen 5 Dokumen 40000 m3 1215 Ha**	**1.650.000.000,00**	**1.337.500.000,00**
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**320.000.000,00**	**22.000.000,00**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Tengah, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Talaga Raya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Talaga Raya, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Tengah, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**50 Hektar**	**1.010.000.000,00**	**963.500.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*25 Ha*	*300.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*175.000.000,00*	*127.500.000,00*
3	28	3	1.04	09	*Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa*	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	*35 Ha*	*525.000.000,00*	*525.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**250.000.000,00**	**275.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Tengah, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Talaga Raya, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*10000 Ha*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*100.000.000,00*	*110.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*-*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*0 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Ha 10 Unit**	**40.000.000,00**	**4.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**4.000.000**
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*1 Orang*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*1 Kelompok*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*20.000.000,00*	*22.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**3 unit**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Dokumen**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**				**UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI**						**2.357.532.000,00**	**182.878.000**
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**473.460.000,00**	**463.306.000,00**
3	28	1	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**12.500.000,00**	**13.750.000,00**
3	28	1	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*7.500.000,00*	*8.250.000,00*
3	28	1	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**4.160.000**	**48.576.000,00**
3	28	1	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000,00*	*16.500.000,00*
3	28	1	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*29.160.000,00*	*32.076.000,00*
3	28	1	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**
3	28	1	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**
3	28	1	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Orang*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	1	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**78.000.000,00**	**83.300.000,00**
3	28	1	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*38.500.000,00*
						Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*		*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*					
3	28	1	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*
3	28	1	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*25.000.000,00*	*25.000.000,00*
3	28	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**166.000.000,00**	**127.600.000,00**
3	28	1	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*56.000.000,00*	*61.600.000,00*
3	28	1	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*0,00*
3	28	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**13.000.000,00**	**1.300.000**
3	28	1	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.000.000,00*	*1.100.000,00*
3	28	1	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*12.000.000,00*	*13.200.000,00*
3	28	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangterpelihara**	**23 unit**	**10.800.000**	**115.280.000,00**
3	28	1	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*14 Unit*	*67.250.000,00*	*73.975.000,00*
3	28	1	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*1 Unit*	*2.000.000,00*	*2.200.000,00*
3	28	1	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*3.050.000,00*	*3.355.000,00*
3	28	1	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	1	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*	*- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*2.500.000,00*	*2.750.000,00*
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu**	**1215 Hektar 1 Persen 5 Dokumen 500 Ton 40000 M3**	**166.072.000**	**1.119.572.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**359.072.000,00**	**6.072.000**
3	28	3	1.01	01	*Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembute, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*0,00*
3	28	3	1.01	03	*Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun*	*1 Unit*	*9.072.000,00*	*9.072.000,00*
3	28	3	1.01	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
3	28	3	1.02	01	*Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**2 Dokumen**	**75.000.000,00**	**82.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	3	1.03	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*27.500.000,00*
3	28	3	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**50 Ha**	**810.000.000,00**	**511.000.000,00**
3	28	3	1.04	01	*Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	*2 Dokumen*	*10.000.000,00*	*11.000.000,00*
3	28	3	1.04	02	*Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa*	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	*50 Ha*	*600.000.000,00*	*300.000.000,00*
3	28	3	1.04	08	*Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	*1 Laporan*	*200.000.000,00*	*200.000.000,00*
3	28	3	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2 Laporan**	**350.000.000,00**	**385.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	*Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembute, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan*	*Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan*	*50000 Ha*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembute, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan*	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembute, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan*	*Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	*1 Laporan*	*150.000.000,00*	*165.000.000,00*
3	28	3	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah unit managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1 Unit Managemen**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	3	1.06	04	*Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH*	*1 Unit Managemen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	28	3	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**33.000.000,00**
3	28	3	1.07	02	*Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*30.000.000,00*	*33.000.000,00*
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya**	**3000 Ha 10 unit**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**
3	28	5	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	*2 Orang*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	02	*Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	*5 Kelompok*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	28	5	1.01	03	*Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	*100 Ha*	*50.000.000,00*	*55.000.000,00*
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Evaluasi Pengelolaan DAS**	**2 Unit**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	6	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**70.000.000,00**	**77.000.000,00**
3	28	6	1.01	02	*Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*	*Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*	*- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembute, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS*	*1 Dokumen*	*70.000.000,00*	*77.000.000,00*
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**54.900.000.000**	**57.742.796.305**
3	29				**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**54.900.000.000**	**57.742.796.305**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**23.207.867.288**	**24.422.807.249**
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**1.151.745.061**	**1.264.302.729**
3	*29*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*382.396.713*	*420.636.384*
3	*29*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*16.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*16.500.000*
3	29	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*16.500.000*
3	29	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000.000*	*16.500.000*
3	29	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*52.336.760*	*54.953.598*
3	29	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan Monitoring dan Evaluasi Program, dokumen statistik bidang ESDM dan Pameran promosi ESDM*	*2 laporan*	*657.011.588*	*722.712.747*
3	**29**	**01**	**1.02**		**Admisitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**7.810.211.525,00**	**8.052.156.101,25**
3	29	01	1.02	01	*Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*105 Orang/bulan*	*7.564.620.400*	*7.794.285.420*
3	29	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*120.668.625*	*126.702.056*
3	29	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporn Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.500.000*
3	29	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*18 Laporan*	*114.922.500*	*120.668.625*
3	**29**	**01**	**1.03**		**Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**38.499.000**	**40.423.950**
3	29	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*38.499.000*	*40.423.950*
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**350.963.000**	**368.511.150**
3	29	01	1.05	02	*Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*78.000.000*	*81.900.000*
3	29	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*75 Orang*	*172.963.000*	*181.611.150*
3	29	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan*	*10 Orang*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**1.535.036.300**	**1.695.038.115**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	419.197.100	440.156.955
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan serta perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 Paket	100.000.000	150.000.000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Paket Penyediaan Bahan logistik kantor yang diadakan	1 Paket	70.839.200	74.381.160
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	70.000.000	75.000.000
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	16.500.000
3	29	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjangan Tamu yang disediakan	1 Laporan	85.000.000	86.500.000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	775.000.000	852.500.000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**1 Paket**	**10.619.263.240**	**11.174.189.564**
3	29	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	90.000.000	92.000.000
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	10 Unit	529.263.240	582.189.564
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	10.000.000.000	10.500.000.000
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**922.749.162**	**1.007.829.140**
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	1 Laporan	6.600.000	6.930.000
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan penyediaan jasa publikasi, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	401.802.622	421.892.753
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana	1 Laporan	514.346.540	579.006.387
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**35 Unit**	**779.400.000**	**820.356.500**
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	305.000.000	320.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Mebel yang dipelihara*	*150 Unit*	*15.000.000*	*16.500.000*
3	*29*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*100 Unit*	*184.670.000*	*193.903.500*
3	*29*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*1 Unit*	*250.000.000*	*262.500.000*
3	*29*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*2 Unit*	*24.730.000*	*27.203.000*
3	**29**	**02**			**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Perda/Pergub terkait Zonasi Kawasan Konservasi Air tanah dalam Daerah Provinsi Peta Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1 Dokumen 1 Dokumen**	**610.725.000**	**646.797.500**
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab/Kota Se-Sultra	**Jumlah Laporan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**210.000.000**
3	*29*	*02*	*1.01*	*01*	*Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*		*Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*02*	*1.01*	*02*	*Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Terlaksananya penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*02*	*1.01*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan zoan konservasi air tanah pada cekungan Air tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Terkendalinya dan terawasinya pemanfataan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Terkumpulnya dan terolahnya data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1 Dokumen**	**410.725.000**	**436.797.500**
3	*29*	*02*	*1.03*	*01*	*Pengumpulan dan Pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Terkumpulnya dan terolahnya data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul*	*1 Dokumen*	*110.725.000*	*121.797.500*
3	*29*	*02*	*1.03*	*02*	*Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Terlaksananya penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*02*	*1.03*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Terkendalinya dan terawasinya implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi.*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	**29**	**03**			**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Meningkatnya Konstribusi Penerimaan Daerah Bidang ESDM Persentase Peningkatan Kepatuhan Pemegang IUP dalam Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan**		**5.255.000.000**	**5.502.750.000**
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil.**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil.**	**3 Dokumen**	**350.000.000**	**367.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*03*	*1.01*	*01*	*Pengumpulan dan Pengolahan data dan informasi wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen data dan informasi wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentudan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 Mil*	*1 dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.01*	*02*	*Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.*	*1 dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.01*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**5 Laporan**	**300.000.000**	**315.000.000**
3	*29*	*03*	*1.03*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah Pertambangan oleh pemerintah pusat*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapatan wilayah pertambangan oleh pemerintah Pusat*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.02*	*03*	*Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.02*	*05*	*Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil pengawasan kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan kaidah pengusahaan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.04**		**Penatausahan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam , dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Laporan Penatausahan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam , dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**2 Laporan**	**285.000.000**	**294.250.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*03*	*1.04*	*03*	*Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*	*1 Dokumen*	*185.000.000*	*189.250.000*
3	*29*	*03*	*1.04*	*04*	*Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.06**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama**	**2 Dokumen**	**285.000.000**	**294.250.000**
3	*29*	*03*	*1.06*	*02*	*Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*185.000.000*	*189.250.000*
3	*29*	*03*	*1.06*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.07**		**Penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah laporan penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**3 Dokumen**	**460.000.000**	**478.000.000**
3	*29*	*03*	*1.07*	*01*	*Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*1 Dokumen*	*125.000.000*	*131.250.000*
3	*29*	*03*	*1.07*	*02*	*Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*1 Dokumen*	*185.000.000*	*189.250.000*
3	*29*	*03*	*1.07*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	**29**	**03**	**1.12**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada wiayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah aut sampai dengan 12 Mil Laut.**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada wiayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**4 Laporan**	**550.000.000**	**577.500.000**
3	*29*	*03*	*1.12*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penentapan Wilayah Pertambangan Oleh pemrintah Pusat*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*03*	*1.12*	*02*	*Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai denngan 12 Mil Laut.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai denngan 12 Mil Laut.*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.12*	*03*	*Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ermasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ermasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*03*	*1.12*	*04*	*Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut*	*Laporan*	*200.000.000*	*210.000.000*
3	**29**	**03**	**1.13**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai 12 Mil laut**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai 12 Mil laut**	**4 Dokumen**	**650.000.000**	**682.500.000**
3	*29*	*03*	*1.13*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyususnan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyususnan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*210.000.000*
3	*29*	*03*	*1.13*	*02*	*Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertamabnagn Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertamabnagn Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*03*	*1.13*	*03*	*Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambnagan Batuan dalam Ragka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambnagan Batuan dalam Ragka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*03*	*1.13*	*04*	*Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	**29**	**03**	**1.14**		**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	**2 Laporan**	**200.000.000**	**210.000.000**
3	*29*	*03*	*1.14*	*01*	*Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.14*	*02*	*Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.15**		**Penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu yang terkumpul dan terolah**	**3 Dokumen**	**400.000.000**	**420.000.000**
3	*29*	*03*	*1.15*	*01*	*Pengumpulan dan pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu yang terkumpul dan terolah*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*03*	*1.15*	*02*	*Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu yang telah ditentukan dan ditetapkan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*03*	*1.15*	*03*	*Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.16**		**Penetapan Harga Patokan Batuan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Harga Patokan Batuan**	**3 Dokumen**	**300.000.000**	**315.000.000**
3	*29*	*03*	*1.16*	*01*	*Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Terkumpulnya dan terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Batuan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.16*	*02*	*Penentuan dan penetapan Harga Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*03*	*1.16*	*03*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.17**		**Penatausahaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam**	**2 Dokumen**	**250.000.000**	**262.500.000**
3	*29*	*03*	*1.17*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*157.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*03*	*1.17*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.18**		**Penatausahaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.18*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*78.750.000*
3	*29*	*03*	*1.18*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu*	*1 laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.19**		**Penatausahaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Batuan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.19*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Batuan*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*78.750.000*
3	*29*	*03*	*1.19*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Batuan*	*1 laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.20**		**Penatausahaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen Penatausahaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.20*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*78.750.000*
3	*29*	*03*	*1.20*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi*	*1 laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.21**		**Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.21*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*78.750.000*
3	*29*	*03*	*1.21*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam*	*1 laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.22**		**Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	***Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan***	***Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan***	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah dokumen penatausahaan izin usaha pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.22*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*78.750.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*03*	*1.22*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Janis Tertentu*	*1 laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.23**		**Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.23*	*01*	*Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan*	*1 Dokumen*	*75.000.000*	*78.750.000*
3	*29*	*03*	*1.23*	*02*	*Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan*	*1 laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**03**	**1.24**		**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan**	**2 Dokumen**	**175.000.000**	**183.750.000**
3	*29*	*03*	*1.24*	*01*	*Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan*	*1 Laporan*	*75.000.000*	*78.750.000*
3	*29*	*03*	*1.24*	*02*	*Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Izin Usaha Pertambangan hasil pengawasan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	**29**	**05**			**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**				**913.552.720**	**959.230.356**
3	**29**	**05**	**1.01**		**Penatausahaan izin, pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**	**Kab/Kota Se-Sultra**	**Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Prosedur persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan**	**3 Laporan**	**456.776.360**	**479.615.178**
3	*29*	*05*	*1.01*	*01*	*Penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang ditetapkan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*05*	*1.01*	*02*	*Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*05*	*1.01*	*03*	*Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*	*1 Laporan*	*206.776.360*	*217.115.178*
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan izin, Pembinaan, dan Pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah laporan Penatausahaan izin, Pembinaan, dan Pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun**	**3 Laporan**	**456.776.360**	**479.615.178**
3	*29*	*05*	*1.03*	*01*	*Penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun yang ditetapkan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*05*	*1.03*	*02*	*Penyusunan Rekomendasi Perizininan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*05*	*1.03*	*03*	*Pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun*	*1 Laporan*	*206.776.360*	*217.115.178*
3	**29**	**06**			**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**				**24.912.854.992**	**26.211.211.200**
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan lain usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah dokumen Penatausahaan lain usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi**	**3 Dokumen**	**290.263.080**	**304.776.232**
3	*29*	*06*	***1.01***	*01*	*Penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan pelaksanaan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan*	*1 Dokumen*	*96.754.360*	*101.592.076*
3	*29*	*06*	***1.01***	*02*	*Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi*	*1 Dokumen*	*96.754.360*	*101.592.078*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*06*	***1.01***	*03*	*Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi*	*1 Laporan*	*96.754.360*	*101.592.078*
3	**29**	**06**	**1.04**		**Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Dokumen Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**	**3 Laporan**	**290.263.080**	**304.776.234**
3	*29*	*06*	*1.04*	*01*	*Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen dan informasi terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi*	*1 Dokumen*	*96.754.360*	*101.592.078*
3	*29*	*06*	*1.04*	*02*	*Penentuan dan penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen pemberian rekomendasi persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi*	*1 Dokumen*	*96.754.360*	*101.592.078*
3	*29*	*06*	*1.04*	*03*	*Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil penegndalian dan pengawasan pelaksanaan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi*	*1 Laporan*	*96.754.360*	*101.592.078*
3	**29**	**06**	**1.05**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**3 Dokumen**	**243.394.080**	**255.563.784**
3	*29*	*06*	*1.05*	*01*	*Penetapan prosedur dan persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen kebijakan terkait Penetapan prosedur dan persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*	*1 Dokumen*	*81.131.360*	*85.187.928*
3	*29*	*06*	*1.05*	*02*	*Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah surat rekomendasi perizinan dan informasi izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*	*1 Dokumen*	*81.131.360*	*85.187.928*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*29*	*06*	*1.05*	*03*	*Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*	*1 Laporan*	*81.131.360*	*85.187.928*
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**		**Jumlah Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**7 Laporan**	**24.088.934.752**	**25.346.094.950**
3	*29*	*06*	*1.06*	*01*	*Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*165.000.000*
3	*29*	*06*	*1.06*	*02*	*Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu*	*1700 Keluarga*	*150.000.000*	*157.500.000*
3	*29*	*06*	*1.06*	*03*	*Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*198.000.000*
3	*29*	*06*	*1.06*	*04*	*Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrk Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah dokumen yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrk Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	*1 Dokumen*	*94.273.420*	*103.700.762*
3	*29*	*06*	*1.06*	*05*	*Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga Isitrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga Isitrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*105.000.000*
3	*29*	*06*	*1.06*	*06*	*Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah laporan pembangunan Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	*1702 Unit*	*22.801.174.332*	*23.941.232.838*
3	*29*	*06*	*1.06*	*07*	*Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan*	*Kab/Kota Se-Sultra*	*Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan*	*1 Laporan*	*643.487.000*	*675.661.350*
3	**30**				**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**						**53.262.455.000**	**69.241.191.500**
3	**30**				**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						**40.262.455.000**	**52.341.191.500**
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Persentase penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**7 Kegiatan**	**28.919.455.000**	**37.595.291.500**
3	**30**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5 Dok**	**625.300.000**	**812.890.000**
3	30	*01*	*1.01*	*01*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	16.900,000	21.970.000
3	30	*01*	*1.01*	*02*	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	202.800,000	263.640.000
3	30	*01*	*1.01*	*03*	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	202.800,000	263.640.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.140,000	13.182.000
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.140,000	13.182.000
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.520,000	17.576.000
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	169.000,000	219.700.000
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana**	**3 Dokumen**	**13.301.315.000**	**17.291.709.500**
3	*30*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*100 orang/bulan*	*13.000.000,000*	*16.900.000.000*
3	*30*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*228.150,000*	*296.595.000*
3	*30*	*01*	*1.02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000,000*	*13.000,000*
3	*30*	*01*	*1.02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*15.000,000*	*19.500,000*
3	*30*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah*	*1 Laporan*	*17.745,000*	*23.068.500*
3	*30*	*01*	*1.02*	*06*	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*10.140,000*	*13.182.000*
3	*30*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Lap*	*10.140,000*	*13.182.000*
3	*30*	*01*	*1.02*	*08*	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*10.140,000*	*13.182.000*
3	**30**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Laporan Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**259.925.000**	**337.902.500**
3	*30*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*6.000.000*	*7.800.000*
3	*30*	*01*	*1.03*	*02*	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*13.000.000*
3	*30*	*01*	*1.03*	*03*	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*13.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*101.400.000*	*131.820.000*
3	30	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*13.000.000*
3	30	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.140.000*	*13.182.000*
3	30	01	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*112.385.000*	*146.100.500*
3	**30**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Laporan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**486.720.000**	**632.736.000**
3	30	01	1.05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	*42.250.000*	*54.925.000*
3	30	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*169.000.000*	*219.700.000*
3	30	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*10.140.000*	*13.182.000*
3	30	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*10.140.000*	*13.182.000*
3	30	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*10.140.000*	*13.182.000*
3	30	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*8 Orang*	*42.250.000*	*54.925.000*
3	30	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan*	*100 Orang*	*101.400.000*	*131.820.000*
3	30	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan*	*20 Orang*	*101.400.000*	*131.820.000*
3	***30***	***01***	***1.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***	***Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***	***Kendari***	***Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana***	***12 Laporan***	***2.596.405.000***	***3.375.326.500***
3	30	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*34.645,000*	*45.038.500*
3	30	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*42.250,000*	*54.925.000*
3	30	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*42.250.000*	*54.925.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*338.000,000*	*439.400.000*
3	30	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*143.650,000*	*186.745.000*
3	30	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*13.520,000*	*17.576.000*
3	30	01	1.06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*1 Paket*	*42.250.000*	*54.925.000*
3	30	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*304.200,000*	*395.460.000*
3	30	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*1.605.500,000*	*2.087.150.000*
3	30	01	1.06	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*10.140,000*	*13.182.000*
3	30	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*20.000,000*	*26.000.000*
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	**Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**81 Unit**	**8.204.700.000**	**10.666.110.000**
3	30	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*6 Unit*	*1.352.000,000*	*1.757.600.000*
3	30	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*5 Unit*	*304.200,000*	*395.460.000*
3	30	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*253.500,000*	*329.550.000*
3	30	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*20 Unit*	*338.000,000*	*439.400.000*
3	30	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*5.450.000,000*	*7.085.000.000*
3	30	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*20 Unit*	*253.500,000*	*329.550.000*
3	30	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*20 Unit*	*253.500,000*	*329.550.000*
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	***Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Pe***	**4 Laporan**	**1.415.400,000**	**1.840.020,000**
3	30	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*16.900.000*	*21.970.000*
3	30	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	*1 Laporan*	*591.500.000*	*768.950.000*
3	30	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*169.000.000*	*219.700.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*30*	*01*	*1.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	*1 Laporan*	*638.000.000*	*829.400.000*
3	**30**	**01**	**1.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**	***Jumlah LaporanPenyelesaianPemelih***	**100 Unit**	**2.029.690.000**	**2.638.597.000**
3	*30*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*20 Unit*	*439.400.000*	*571.220.000*
3	*30*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*20 Unit*	*338.000.000*	*439.400.000*
3	*30*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*50 Unit*	*25.350.000*	*32.955.000*
3	*30*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*20 Unit*	*27.040.000*	*35.152.000*
3	*30*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*929.500.000*	*1.208.350.000*
3	*30*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*20 Unit*	*135.200.000*	*175.760.000*
3	*30*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*20 Unit*	*135.200.000*	*175.760.000*
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	Kendari	**Persentase Penyelesaian Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**50%**	**600.000.000**	**780.000.000**
3	**30**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	Kendari	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik**	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**260.000.000**
3	*30*	*02*	*1.01*	*01*	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	***Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi***	*Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan*	*Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*260.000.000*
3	**30**	**02**	**1.03**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perdagangan Bahan Berbahaya**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**520.000.000**
3	*30*	*02*	*1.03*	*02*	*Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	***Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi***	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission Jumlah Dokumen PKPBerbahaya*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*260.000.000*
3	*30*	*02*	*1.03*	*03*	*Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	***Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi***	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*260.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**50%**	**550.000.000**	**715.000.000**
3	30	03	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Provinsi**	**1 Dokumen**	**550.000.000**	**715.000.000**
3	*30*	*03*	*1.01*	*02*	*Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah LaporanPenyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*325.000.000*
3	*30*	*03*	*1.01*	*03*	*Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi*	*40 Orang*	*300.000.000*	*390.000.000*
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Kendari**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**80%**	**2.264.000.000**	**2.943.200.000**
3	**30**	**04**	**1.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok**	**2 Laporan**	**500.000.000**	**650.000.000**
3	*30*	*04*	*1.01*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok diTingkat Distributor dan Sub Distributor*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*325.000.000*
3	*30*	*04*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*325.000.000*
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Jumlah Dokumen Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**1 Dokumen**	**1.014.000.000**	**1.318.200.000**
3	*30*	*04*	*1.02*	*01*	*Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang LintasKabupaten/Kota*	*1 Laporan*	*507.000.000*	*659.100.000*
3	*30*	*04*	*1.02*	*02*	*Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*507.000.000*	*659.100.000*
3	**30**	**04**	**1.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi**	**3 Laporan**	**750.000.000**	**975.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	04	1.03	02	*Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*325.000.000*
3	30	04	1.03	03	*Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*325.000.000*
3	30	04	1.03	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPupuk Bersubsidi dan Pestisida*	*1 Laporan*	*250.000.000*	*325.000.000*
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Persentase Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas**	**80%**	**1.774.500.000**	**2.306.850.000**
3	***30***	***05***	***1.01***		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**5 Laporan**	**1.774.500.000**	**2.306.850.000**
3	30	05	1.01	01	*Pameran Dagang Internasional/Nasional*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Luar Sultra*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*	*20 Pelaku Usaha*	*676.000.000*	*878.800.000*
3	30	05	1.01	02	*Pameran Dagang Lokal*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal*	*15 Pelaku Usaha*	*338.000.000*	*439.400.000*
3	30	05	1.01	03	*Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Luar Sultra*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan*	*5 Pelaku Usaha*	*338.000.000*	*439.400.000*
3	30	05	1.01	04	*Peningkatan Citra Produk Ekspor*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Luar Sultra*	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi*	*20 Produk*	*422.500.000*	*549.250.000*
3	***30***	***06***			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**		**Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**80%**	**3.957.500.000**	**5.144.750.000**
3	***30***	***06***	***1.01***		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Konsumne di seluruh Daerah Kab/Kota**	**3 Laporan**	**1.191.500.000**	**1.548.950.000**
3	30	06	1.01	01	*Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif*	*1 BPSK*	*350.000.000*	*455.000.000*
3	30	06	1.01	02	*Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif*	*1 LPKSM*	*250.000.000*	*325.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*30*	*06*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani*	*10 Pengaduan*	*591.500.000*	*768.950.000*
3	***30***	***06***	***1.02***		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengujian, sertifikasi dan Kalibrasi**	**4 Dokumen**	**1.752.000.000**	**2.277.600.000**
3	*30*	*06*	*1.02*	*04*	*Pengembangan Layanan Kalibrasi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan*	*10 Sertifikat*	*645.000.000*	*838.500.000*
3	*30*	*06*	*1.02*	*05*	*Pengembangan Layanan Pengujian*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang*	*10 Dokumen*	*507.000.000*	*659.100.000*
3	*30*	*06*	*1.02*	*06*	*Pemantauan Mutu Produk*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau*	*10 Produk*	*300.000.000*	*390.000.000*
3	*30*	*06*	*1.02*	*07*	*Pengembangan Layanan sertifikasi/Lembaga Inspeksi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan*	*5 Sertifikat*	*300.000.000*	*390.000.000*
3	***30***	***06***	***1.03***		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan / atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota**	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**1.014.000.000**	**1.318.200.000**
3	*30*	*06*	*1.03*	*01*	*Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi*	*1 Laporan*	*507.000.000*	*659.100.000*
3	*30*	*06*	*1.03*	*02*	*Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Kasus yang Ditangani*	*5 Kasus*	*507.000.000*	*659.100.000*
3	***30***	***07***			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemasaran Produk Unggulan Daerah**	**80%**	**2.197.000.000**	**2.856.100.000**
3	***30***	***07***	***1.01***		**Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Kab/Kota**	**Jumlah Laporan Promosi Produk Dalam Negeri**	**1 Laporan**	**422.500.000**	**549.250.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	07	1.01	01	*Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri*	*20 UMKM*	*422.500.000*	*549.250.000*
3	***30***	***07***	***1.02***		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Kab/Kota**	**Jumlah Laporan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**1 Laporan**	**422.500.000**	**549.250.000**
3	30	07	1.02	01	*Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi*	*20 UMKM*	*422.500.000*	*549.250.000*
3	***30***	***07***	***1.03***		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Kab/Kota**	**Jumlah dokumen penggunaan produk dalam negeri**	**1 Dokumen**	**1.352.000.000**	**1.757.600.000**
3	30	07	1.03	02	*Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	*1 Laporan*	*422.500.000*	*549.250.000*
3	30	07	1.03	04	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri*	*50 Orang*	*507.000.000*	*659.100.000*
3	30	07	1.03	05	*Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer*	*1 Laporan*	*422.500.000*	*549.250.000*
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**13.000.000.000**	**16.900.000.000**
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Kab/Kota**	**Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah**	**3%**	**11.050.000.000**	**14.365.000.000**
									Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri yang mengolah sumber daya daerah	**30,12%**		
3	31	2	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyusunan , Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provins**	**5 Dokrmen**	**11.050.000.000**	**14.365.000.000**
3	31	2	1.01	01	*Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	*390.000.000*
3	31	2	1.01	02	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*650.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*31*	*2*	*1.01*	*03*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*650.000.000*
3	*31*	*2*	*1.01*	*04*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	*1 Dokumen*	*8.450.000.000*	*10.985.000.000*
3	*31*	*2*	*1.01*	*05*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	*1 Dokumen*	*650.000.000*	*845.000.000*
3	*31*	*2*	*1.01*	*06*	*Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	*1 Dokumen*	*650.000.000*	*845.000.000*
3	31	3			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri**	**50 Persen**	**800.000.000**	**1.040.000.000**
3	31	3	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**1 Laporan**	**800.000.000**	**1.040.000.000**
3	*31*	*3*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi*	*1 Dokumen*	*400.000.000*	*520.000.000*
3	*31*	*3*	*1.01*	*04*	*Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Kab/Kota*			*400.000.000*	*520.000.000*
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**80 Persen**	**1.150.000.000**	**1.495.000.000**
3	31	4	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan**	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**1 Dokumen**	**1.150.000.000**	**1.495.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	*31*	*4*	*1.01*	*01*	*Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	*1 Dokumen*	*350.000.000*	*455.000.000*
3	*31*	*4*	*1.01*	*02*	*Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	*390.000.000*
3	*31*	*4*	*1.01*	*03*	*Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas*	*Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan*	*Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi*	*Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*650.000.000*
04					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
04	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							
					BIRO PEMERINTAHAN						**3.261.163.807**	**3.588.277.751**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			**1.461.211.800**	**1.608.330.548**
04	**01**	**01**	**1. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**3.058.000**	**3.363.800**
04	01	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*1.529.000*	*1.681.900*
04	01	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*1.529.000*	*1.681.900*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**94.061.000**	**103.467.100**
04	*01*	*01*	*1. 02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*1.529.000*	*1.681.900*
04	*01*	*01*	*1. 02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*18 Laporan*	*92.532.000*	*101.785.200*
04	**01**	**01**	**1. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**22.176.000**	**24.393.600**
04	*01*	*01*	*1. 03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*2 Laporan*	*22.176.000*	*24.393.600*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**105.325.000**	**115.857.500**
04	*01*	*01*	*1. 05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*90.475.000*	*99.522.500*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*3 Orang*	*14.850.000*	*16.335.000*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**864.885.300**	**952.371.398**
04	*01*	*01*	*1. 06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.375.000*	*1.512.500*
04	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*18.398.050*	*20.237.855*
04	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*128.236.570*	*141.060.227*
04	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*180.000.000*	*198.997.568*
04	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*536.875.680*	*590.563.248*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**209.687.500**	**230.656.250**
04	*01*	*01*	*1. 07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*38.500.000*	*42.350.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*171.187.500*	*188.306.250*
04	***01***	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**63.426.000**	**69.768.600**
04	*01*	*01*	*1. 08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*1.100.000*	*1.210.000*
04	*01*	*01*	*1. 08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*62.326.000*	*68.558.600*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**98.593.000**	**108.452.300**
04	*01*	*01*	*1. 09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*96.580.000*	*106.238.000*
04	*01*	*01*	*1. 09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*2.013.000*	*2.214.300*
04	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**CAKUPAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1 Dokumen**	**1.799.952.007**	**1.979.947.203**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**TERLAKSANANYA PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN**	**1 Dokumen**	**658.936.300**	**724.829.930**
04	*01*	*03*	*1.01*	*01*	*Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan*	*12 Dokumen*	*282.668.100*	*310.934.910*
04	*01*	*03*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum*	*1 Dokumen*	*289.065.700*	*317.972.270*
04	*01*	*03*	*1.01*	*03*	*Fasilitasi Penataan Wilayah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah*	*2 Dokumen*	*87.202.500*	*95.922.750*
04	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**499.028.207**	**548.931.020**
04	*01*	*03*	*1.02*	*01*	*Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD*	*17 Dokumen*	*123.515.707*	*135.867.270*
04	*01*	*03*	*1.02*	*02*	*Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan*	*4 Dokumen*	*91.450.700*	*100.595.770*
04	*01*	*03*	*1.02*	*03*	*Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan*	*1 Laporan*	*284.061.800*	*312.467.980*
04	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**641.987.500**	**706.186.253**
04	*01*	*03*	*1.03*	*01*	*Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi*	*45 Dokumen*	*428.913.100*	*471.804.410*
04	*01*	*03*	*1.03*	*02*	*Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi*	*15 Dokumen*	*94.585.700*	*104.044.273*
04	*01*	*03*	*1.03*	*03*	*Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kerjasama yang dievaluasi*	*1 Laporan*	*118.488.700*	*130.337.570*
					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN						**44.060.449.695**	**49.472.757.794**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.685.834.575**	**3.960.632.162**
04	**01**	**01**	**1. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**171.149.000**	**256.723.500**
04	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*76.515.000*	*114.772.500*
04	*01*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*11.550.000*	*17.325.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*83.084.000*	*124.626.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**278.548.500**	**349.703.050**
04	*01*	*01*	*1. 02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*75.688.500*	*45.413.050*
04	*01*	*01*	*1. 02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*202.860.000*	*304.290.000*
04	**01**	**01**	**1. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**32.518.500**	**48.777.750**
04	*01*	*01*	*1. 03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*32.518.500*	*48.777.750*
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**369.834.000**	**554.751.000**
04	*01*	*01*	*1. 05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*76.642.500*	*114.963.750*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*1 Orang*	*293.191.500*	*439.787.250*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.129.387.500**	**1.694.081.250**
04	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*25.140.000*	*37.710.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*24.037.500*	*36.056.250*
04	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*172.335.000*	*258.502.500*
04	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*907.875.000*	*1.361.812.500*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**339.937.500**	**509.906.250**
04	*01*	*01*	*1. 07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*201.187.500*	*301.781.250*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*138.750.000*	*208.125.000*
04	***01***	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**34.980.000**	**52.470.000**
04	*01*	*01*	*1. 08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*15.000.000*	*22.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	*01*	*01*	*1. 08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*19.980.000*	*29.970.000*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**329.479.575**	**494.219.362**
04	*01*	01	1. 09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*1 Unit*	*267.829.575*	*401.744.362*
04	*01*	01	1. 09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*61.650.000*	*92.475.000*
04	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**41.374.615.120**	**45.512.125.632**
04	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**28.792.362.423**	**31.671.598.665**
04	*01*	*04*	*1.01*	*01*	*Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola*	*8 Unit*	*13.514.631.823*	*14.866.095.005*
04	*01*	*04*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	300 Lembaga	15.277.730.600	16.805.503.660
04	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**11.931.830.197**	**13.125.002.217**
04	*01*	*04*	*1.02*	*01*	*Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan*	*7 Dokumen*	*8.161.434.820,00*	*8.977.578.302*
04	*01*	*04*	*1.02*	*02*	*Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan*	*6 Dokumen*	*3.478.604.877*	*3.826.465.365*
04	*01*	*04*	*1.02*	*03*	*Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial*	*5 Dokumen*	*291.790.500*	*320.958.550*
04	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**650.422.500,00**	**715.524.750,00**
04	*01*	*04*	*1.03*	*01*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata*	*5 Dokumen*	*266.810.500*	*293.491.550*
04	*01*	*04*	*1.03*	*02*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*	*5 Dokumen*	*289.030.500*	*317.993.550*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	*01*	*04*	*1.03*	*03*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan*	*4 Dokumen*	*94.581.500*	*104.039.650*
					BIRO HUKUM						**10.026.431.510**	**14.012.257.283**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.686.963.765**	**5.345.289.900**
04	**01**	**01**	**1. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**13.103.565**	**42.350.000**
04	01	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*6.000.000*	*24.200.000*
04	01	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*7.103.565*	*18.150.000*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**56.160.000**	**142.271.800**
04	*01*	*01*	*1. 02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*57.571.800*
04	*01*	*01*	*1. 02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*51.160.000*	*84.700.000*
04	**01**	**01**	**1. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**29.500.000**	**32.450.000**
04	*01*	*01*	*1. 03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*29.500.000*	*32.450.000*
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**185.570.000**	**572.000.000**
04	*01*	*01*	*1. 05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*3 Paket*	*77.330.000*	*132.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*18 Orang*	*108.240.000*	*198.000.000*
04	*01*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*240 Orang*	*0*	*242.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.187.317.200**	**1.911.831.000**
04	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*0*	*35.860.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	151.065.200	566.500.000
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	77.500.000	85.250.000
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	76.530.000	84.183.000
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	178.823.000	330.000.000
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 Laporan	703.399.000	773.738.000
04	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	36.300.000
04	**01**	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**966.950.000**	**1.983.277.000**
04	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	580.470.000
04	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	220.000.000
04	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3 Unit	500.000.000	550.000.000
04	01	01	1. 07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	275.279.000	302.807.000
04	01	01	1. 07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	191.671.000	330.000.000
04	**01**	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**33.341.000**	**36.675.100**
04	01	01	1. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.363.000	12.499.300
04	01	01	1. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.978.000	24.175.800
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**215.022.000**	**624.435.000**
04	01	01	1. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	167.667.000	184.435.000
04	01	01	1. 09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	47.355.000	264.000.000
04	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	176.000.000
04	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**7.339.467.745**	**8.666.967.383**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.523.986.910**	**3.667.058.048**
04	*01*	*05*	*1.01*	*01*	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun*	*130 Dokumen*	*992.797.000*	*1.420.597.100*
04	*01*	*05*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun*	*900 Dokumen*	*249.689.700*	*421.975.593*
04	*01*	*05*	*1.01*	*03*	*Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya*	*570 Dokumen*	*406.500.210*	*686.985.355*
04	*01*	*05*	*1.01*	*04*	*Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya*	*500 Dokumen*	*875.000.000*	*1.137.500.000*
04	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**4.815.480.835**	**4.999.909.335**
04	*01*	*05*	*1.01*	*01*	*Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan*	*20 Kasus*	*4.345.530.035*	*4.388.985.335*
04	*01*	*05*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan*	*20 Kasus*	*469.950.800*	*610.924.000*
					BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN						**4.257.498.797**	**4.673.290.392**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.229.203.627**	**2.442.165.705**
04	**01**	**01**	**1. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**27.883.240**	**30.671.564**
04	01	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*10 Dokumen*	*20.430.740*	*22.473.814*
04	01	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*6 Laporan*	*7.452.500*	*8.197.750*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**98.579.250**	**108.437.175**
04	*01*	*01*	*1. 02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*9.938.500*	*10.932.350*
04	*01*	*01*	*1. 02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*88.640.750*	*97.504.825*
04	**01**	**01**	**1. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**26.528.700**	**19.181.570**
04	*01*	*01*	*1. 03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*26.528.700*	*19.181.570*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**231.727.100**	**254.899.810**
04	*01*	*01*	*1. 05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*67.650.000*	*74.415.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*10 Orang*	*164.077.100*	*180.484.810*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.368.724.337**	**1.505.638.486**
04	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*3 Paket*	*76.325.714*	*84.000.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*2 Paket*	*37.527.710*	*41.280.481*
04	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*72.760.600*	*80.036.660*
04	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*100 Laporan*	*1.182.110.313*	*1.300.321.345*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**290.950.000**	**320.045.000**
04	*01*	*01*	*1. 07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*		*30.250.000*	*33.275.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*133.100.000*	*146.410.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*127.600.000*	*140.360.000*
04	***01***	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**29.766.000**	**32.742.600**
04	*01*	*01*	*1. 08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*5.610.000*	*6.171.000*
04	*01*	*01*	*1. 08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*24.156.000*	*26.571.600*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**155.045.000**	**170.549.500**
04	*01*	01	1. 09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*134.948.000*	*148.442.800*
04	*01*	01	1. 09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*20 Unit*	*20.097.000*	*22.106.700*
04	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.028.295.170**	**2.231.124.687**
04	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**1.433.456.970**	**1.576.802.667**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	*01*	*06*	*1.01*	*01*	*Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro*	*2 Dokumen*	*1.223.323.970*	*1.345.656.367*
04	*01*	*06*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro*	*2 Dokumen*	*210.133.000*	*231.146.300*
04	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**247.841.000**	**272.625.100**
04	*01*	*06*	*1.02*	*01*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro*	*2 Dokumen*	*83.248.000*	*91.572.800*
04	*01*	*06*	*1.02*	*02*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro*	*2 Dokumen*	*82.445.000*	*90.689.500*
04	*01*	*06*	*1.02*	*03*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro*	*2 Dokumen*	*82.148.000*	*90.362.800*
04	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**346.997.200**	**381.696.920**
04	*01*	*06*	*1.03*	*01*	*Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha*	*2 Dokumen*	*218.726.200*	*240.598.820*
04	*01*	*06*	*1.03*	*05*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD*	*2 Dokumen*	*128.271.000*	*141.098.100*
					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**5.810.276.370**	**6.056.776.370**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.356.500.000**	**2.503.000.000**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**418.500.000**	**453.500.000**
04	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*23.000.000*	*25.000.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*35.000.000*	*40.000.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*7.500.000*	*10.000.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*12.000.000*	*15.000.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.500.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*6.000.000*	*6.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	*01*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*12 Laporan*	*330.000.000,00*	*350.000.000,00*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**130.000.000**	**140.000.000**
04	*01*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*12 Laporan*	*35.000.000*	*40.000.000*
04	*01*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*95.000.000*	*100.000.000*
04	**01**	**01**	**1.03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**22.000.000**	**25.000.000**
04	*01*	*01*	*1.03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*22.000.000*	*25.000.000*
04	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**473.500.000**	**487.000.000**
04	*01*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*80.000.000*	*80.000.000*
04	*01*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*6.500.000*	*7.000.000*
04	*01*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*19 Orang*	*387.000.000*	*400.000.000*
04	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**925.000.000**	**990.000.000**
04	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*30.000.000*	*35.000.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*				*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*40.000.000*	*45.000.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*2 Laporan*	*55.000.000*	*60.000.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*2 Laporan*	*800.000.000*	*850.000.000*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**90.000.000**	**100.000.000**
04	*01*	*01*	*1. 07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000*	*35.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*4 Unit*	*60.000.000*	*65.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**30.000.000**	**30.000.000**
04	*01*	*01*	*1. 08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*20.000.000*	*20.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**					**267.500.000**	**277.500.000**
04	*01*	*01*	*1. 09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*12 Unit*	*235.000.000*	*240.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*20 Unit*	*7.500.000*	*10.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*15 Unit*	*25.000.000*	*27.500.000*
04	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**3.453.776.370**	**3.553.776.370**
04	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**924.325.000**	**924.325.000**
04	*01*	*08*	*1.01*	*01*	*Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD*	*1 Laporan*	*425.000.000*	*425.000.000*
04	*01*	*08*	*1.01*	*02*	*Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN*	*1 Laporan*	*323.500.000*	*323.500.000*
04	*01*	*08*	*1.01*	*03*	*Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	*1 Laporan*	*175.825.000*	*175.825.000*
04	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.529.451.370**	**2.629.451.370**
04	*01*	*08*	*1.02*	*01*	*Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan*	*2 Dokumen*	*1.750.000.000*	*1.850.000.000*
04	*01*	*08*	*1.02*	*02*	*Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	*3 Laporan*	*557.572.018*	*557.572.018*
04	*01*	*08*	*1.02*	*03*	*Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah*	*2 Dokumen*	*221.879.352*	*221.879.352*
					BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH						**5.794.932.600**	**5.794.932.600**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.784.932.600**	**2.784.932.600**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**10.657.800**	**10.657.800**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*6.142.800*	*6.142.800*
04	01	01	1.01	02	*Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*1.505.000*	*1.505.000*
04	01	01	1.01	03	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*1.505.000*	*1.505.000*
04	01	01	1.01	06	*Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*#REF!*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*1.505.000*	*1.505.000*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**44.968.000**	**44.968.000**
04	01	01	1. 02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*2.568.000*	*2.568.000*
04	01	01	1. 02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*18 Laporan*	*42.400.000*	*42.400.000*
04	**01**	**01**	**1. 03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**21.082.800**	**21.082.800**
04	01	01	1. 03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*21.082.800*	*21.082.800*
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**369.600.000**	**369.600.000**
04	01	01	1. 05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*62 Paket*	*43.400.000*	*43.400.000*
04	01	01	1. 05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*23 Orang*	*326.200.000*	*326.200.000*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**686.624.000**	**686.624.000**
04	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*130.000.000*	*130.000.000*
04	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*15.000.000*	*15.000.000*
04	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1104 Dokumen*	*6.624.000*	*6.624.000*
04	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*85.000.000*	*85.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*450.000.000*	*450.000.000*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**850.000.000**	**850.000.000**
04	01	01	1. 07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*500.000.000*	*500.000.000*
04	01	01	1. 07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit mebel yang Disediakan*	*4 Paket*	*100.000.000*	*100.000.000*
04	01	01	1. 07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*15 Unit*	*250.000.000*	*250.000.000*
04	***01***	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**607.000.000**	**607.000.000**
04	01	01	1. 08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*7.000.000*	*7.000.000*
04	01	01	1. 08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*600.000.000*	*600.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**					**195.000.000**	**195.000.000**
04	01	01	1. 09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*165.000.000*	*165.000.000*
04	01	01	1. 09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*15 Unit*	*30.000.000*	*30.000.000*
04	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**3.010.000.000**	**3.010.000.000**
04	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.320.000.000**	**1.320.000.000**
04	01	07	1.01	01	*Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*	*1 Laporan*	*60.000.000*	*60.000.000*
04	01	07	1.01	02	*Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*12 Laporan*	*1.200.000.000*	*1.200.000.000*
04	01	07	1.01	03	*Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*2 Laporan*	*60.000.000*	*60.000.000*
04	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.100.000.000**	**1.100.000.000**
04	01	07	1.02	01	*Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*	*2 Laporan*	*890.000.000*	*890.000.000*
04	01	07	1.02	02	*Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*2 Laporan*	*60.000.000*	*60.000.000*
04	01	07	1.02	03	*Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*3 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**590.000.000**	**590.000.000**
04	*01*	*07*	*1.03*	*01*	*Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa*	*50 Orang*	*150.000.000*	*150.000.000*
04	*01*	*07*	*1.03*	*02*	*Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*3 Dokumen*	*390.000.000*	*390.000.000*
04	*01*	*07*	*1.03*	*03*	*Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa*	*3 Dokumen*	*50.000.000*	*50.000.000*
					BIRO ORGANISASI						**4.957.612.800**	**5.453.374.080**
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**3.952.612.800**	**4.347.874.080**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**91.124.000**	**100.236.400**
04	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*22.000.000*	*24.200.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*6.864.000*	*7.550.400*
04	*01*	*01*	*1.01*	*06*	*Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*#REF!*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*3 Laporan*	*16.500.000*	*18.150.000*
04	*01*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*13 Laporan*	*45.760.000*	*50.336.000*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**129.338.000**	**142.271.800**
04	*01*	*01*	*1. 02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*52.338.000*	*57.571.800*
04	*01*	*01*	*1. 02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*5 Laporan*	*77.000.000*	*84.700.000*
04	**01**	**01**	**1. 03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**49.500.000**	**54.450.000**
04	*01*	*01*	*1. 03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*22.000.000*	*24.200.000*
04	*01*	*01*	*1. 03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*24 Laporan*	*27.500.000*	*30.250.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.170.450.800**	**1.287.495.880**
04	*01*	*01*	*1. 05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*3 Unit*	*82.368.000*	*90.604.800*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*712.082.800*	*783.291.080*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*6 Dokumen*	*125.000.000*	*137.500.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*11.000.000*	*12.100.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*4 Dokumen*	*30.000.000*	*33.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*10 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*250 Orang*	*110.000.000*	*121.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.159.200.000**	**1.275.120.000**
04	*01*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*3 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*2 Paket*	*55.000.000*	*60.500.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*77.000.000*	*84.700.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*2 Paket*	*24.200.000*	*26.620.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*33.000.000*	*36.300.000*
04	*01*	*01*	*1.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*24 Laporan*	*770.000.000*	*847.000.000*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.259.000.000**	**1.384.900.000**
04	*01*	*01*	*1. 07*	*01*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*4 Unit*	*154.000.000*	*169.400.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*02*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*605.000.000*	*665.500.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*6 Unit*	*200.000.000*	*220.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 07*	*08*	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	***01***	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**31.000.000**	**34.100.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	*01*	*01*	*1. 08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*300 Laporan*	*1.000.000*	*1.100.000*
04	*01*	*01*	*1. 08*	*03*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*30.000.000*	*33.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**63.000.000**	**69.300.000**
04	*01*	*01*	*1. 09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*2 Unit*	*15.000.000*	*16.500.000*
04	*01*	*01*	*1. 09*	*05*	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah mebel yang Dipelihara*	*4 Unit*	*20.000.000*	*22.000.000*
04	*01*	*01*	*1. 09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*14 Unit*	*28.000.000*	*30.800.000*
04	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.005.000.000**	**1.105.500.000**
04	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**375.000.000**	**412.500.000**
04	*01*	*02*	*1.01*	*01*	*Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*	*6 Dokumen*	*125.000.000*	*137.500.000*
04	*01*	*02*	*1.01*	*02*	*Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*	*6 Dokumen*	*125.000.000*	*137.500.000*
04	*01*	*02*	*1.01*	*03*	*Penataan Analisis Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis BebanKerja, dan Evaluasi Jabatan*	*6 Dokumen*	*125.000.000*	*137.500.000*
04	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**630.000.000**	**693.000.000**
04	*01*	*02*	*1.02*	*01*	*Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*	*6 Dokumen*	*130.000.000*	*143.000.000*
04	*01*	*02*	*1.02*	*02*	*Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*	*6 Dokumen*	*130.000.000*	*143.000.000*
04	*01*	*02*	*1.02*	*03*	*Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis BebanKerja, dan Evaluasi Jabatan*	*6 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	*01*	*02*	*1.02*	*04*	*Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan*	*6 Dokumen*	*140.000.000*	*154.000.000*
04	*01*	*02*	*1.02*	*05*	*Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik*	*2 Dokumen*	*130.000.000*	*143.000.000*
					BIRO UMUM							
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1 DOKUMEN**	**166.498.104.986**	**183.293.415.126**
	01	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan**	**1 DOKUMEN**	**217.000.000**	**238.700.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*33.000.000*	*36.300.000*
04	01	01	1.01	02	*Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1.01	03	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*38.500.000*	*42.350.000*
04	01	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1.01	06	*Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.500.000*	*6.050.000*
04	01	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*110.000.000,00*	*121.000.000,00*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**73.086.357.689**	**80.394.993.457**
04	01	01	1. 02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*300 Orang/bulan*	*59.565.595.569*	*65.522.155.125*
04	01	01	1. 02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	12.907.922.500	14.198.714.750
04	01	01	1. 02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1 Dokumen*	*55.000.000*	*60.500.000*
04	01	01	1. 02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1. 02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*25.441.240*	*27.985.364*
04	01	01	1. 02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1. 02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*502.398.380*	*552.638.218*
04	01	01	1. 02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**385.407.970**	**418.998.767**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1. 03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*9.240.000*	*10.164.000*
04	01	01	1. 03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*294.851.590*	*324.336.749*
04	01	01	1. 03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1. 03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1. 03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*46.316.380*	*50.948.018*
04	01	01	1. 03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1. 03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*550.000*
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.571.130.000**	**1.723.293.000**
04	01	01	1. 05	01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*300 Unit*	*33.000.000*	*36.300.000*
04	01	01	1. 05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*3 Paket*	*933.130.000*	*1.026.443.000*
04	01	01	1. 05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*550.000*
04	01	01	1. 05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*100 Orang*	*500.000.000*	*550.000.000*
04	01	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
04	01	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**22.579.464.708**	**24.837.811.179**
04	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*143.017.006*	*157.318.707*
04	01	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	*699.600.000*	*769.560.000*
04	01	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*				*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*10 Paket*	*50.000.000*	*55.000.000*
04	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	*443.391.025*	*487.730.128*
04	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*50 Paket*	*525.178.830*	*577.696.713*
04	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*6.000.000*	*7.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.070.145.000	14.377.159.500
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.599.140.547	8.359.054.601
04	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	32.992.300	36.291.530
04	**01**	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**30.323.304.830**	**33.455.635.314**
04	01	01	1. 07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.611.378.000	2.872.515.800
04	01	01	1. 07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000	2.200.000.000
04	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3 Unit	500.000.000	550.000.000
04	01	01	1. 07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	10 Paket	1.566.191.000	1.722.810.100
04	01	01	1. 07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.576.571.525	2.834.228.678
04	01	01	1. 07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	55.000.000
04	01	01	1. 07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000	1.200.000.000
04	01	01	1. 07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000	2.200.000.000
04	01	01	1. 07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.009.164.305	19.810.080.736
04	**01**	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**14.594.827.799**	**16.054.310.220**
04	01	01	1.08	01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	115.494.500	127.043.950
04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.072.779.294	3.380.057.224
04	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.048.860.000	2.253.746.000
04	01	01	1. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.357.694.005	10.293.463.046
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**					**14.577.623.047**	**16.090.385.352**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1. 09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*50 Unit*	*8.966.675.795*	*9.863.343.375*
04	01	01	1. 09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*50 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
04	01	01	1.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*100 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	01	01	1. 09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*50 Unit*	*1.062.270.000*	*1.168.497.000*
04	01	01	1.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*0*	*55.000.000*
04	01	01	1. 09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Terwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*1 Unit*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	01	01	1. 09	09	*Peeliharaa/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*4.088.677.252*	*4.497.544.977*
04	01	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	01	01	1. 09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	01	01	1. 09	12	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Luas Tanah yang Dilakukan Dipelihara/Direhabilitasi*	*10 Ha*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**					**4.079.473.769**	**4.487.421.146**
04	01	01	1. 11	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2 Orang/Bulan*	*2.166.473.769*	*2.383.121.146*
04	01	01	1. 11	02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*7 Paket*	*913.000.000*	*1.004.300.000*
04	01	01	1. 11	03	*Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2 Orang*	*500.000.000*	*550.000.000*
04	01	01	1. 11	04	*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah h Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2 Orang/Bulan*	*500.000.000*	*550.000.000*
04	**01**	**01**	**1. 12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**					**5.083.515.174**	**5.591.866.691**
04	01	01	1. 12	01	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	*1 Paket*	*3.269.676.911*	*3.596.644.602*
04	01	01	1. 12	02	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.184.742.763*	*1.303.217.039*
04	01	01	1. 12	03	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	*1 Paket*	*629.095.500*	*692.005.050*
					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						**37.177.703.941**	**41.217.154.587**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**23.206.597.743**	**25.848.937.769**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*			**37.992.955**	**363.472.505**
04	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*32.492.955*	*357.422.505*
04	*01*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*5.500.000*	*6.050.000*
04	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**160.115.615**	**176.127.176**
04	*01*	*01*	*1. 02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*15.442.240*	*16.986.464*
04	*01*	*01*	*1. 02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*144.673.375*	*159.140.712*
04	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**32.599.325**	**35.859.257**
04	*01*	*01*	*1. 03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*2 Laporan*	*32.599.325*	*35.859.257*
04	**01**	**01**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.268.960.000**	**1.395.856.000**
04	*01*	*01*	*1. 05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*4 Paket*	*695.750.000*	*765.325.000*
04	*01*	*01*	*1. 05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*50 Orang*	*573.210.000*	*630.531.000*
04	**01**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**15.305.938.543**	**16.836.532.397**
04	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*32.618.850*	*35.880.735*
04	*01*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*2 Paket*	*213.125.000*	*234.437.500*
04	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*3 Paket*	*283.426.550*	*311.769.205*
04	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*337.177.445*	*370.895.189*
04	*01*	*01*	*1.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*3 Laporan*	*468.484.500*	*515.332.950*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*3 Laporan*	*13.971.106.198*	*15.368.216.818*
04	***01***	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**2.212.676.350**	**2.433.943.985**
04	01	01	1. 07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
04	01	01	1. 07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit mebel yang Disediakan*	*5 Paket*	*574.640.000*	*632.104.000*
04	01	01	1. 07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*30 Unit*	*1.138.036.350*	*1.251.839.985*
04	**01**	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.278.860.000,00**	**1.406.746.000,00**
04	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*16.500.000,00*	*18.150.000,00*
04	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*2 Laporan*	*142.560.000*	*156.816.000*
04	01	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*184.800.000*	*203.280.000*
04	01	01	1. 08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*935.000.000*	*1.028.500.000*
04	**01**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.248.378.175**	**1.373.215.992**
04	01	01	1. 09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 Unit*	*130.707.500*	*143.778.250*
04	01	01	1. 09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*38.500.000*	*42.350.000*
04	**01**	**01**	**1. 13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**1.079.170.675**	**1.187.087.742**
04	01	01	1. 13	01	*Penyiapan Materi Pimpinan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan*	*2 Dokumen*	*58.803.800*	*64.684.180*
04	01	01	1. 13	02	*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	*2 Laporan*	*1.020.366.875*	*1.122.403.562*
04	**01**	**01**	**1. 14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**581.906.105**	**640.096.715**
04	01	01	1. 14	01	*Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara*	*2 Laporan*	*216.907.955*	*238.598.750*
04	01	01	1. 14	02	*Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2 Laporan*	*105.626.400*	*116.189.040*
04	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan	259.371.750	285.308.925
04	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**130.952.154.172**	**145.612.633.186**
04	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**130.952.154.172**	**145.612.633.186**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**69.941.064.559,00**	**76.934.445.014,00**
04	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.188.228.625,00**	**2.407.051.487,00**
04	02	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*871.843.225*	*959.027.547*
04	02	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*591.492.000*	*650.641.200*
04	02	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*356.621.100*	*392.283.210*
04	02	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*53.625.000*	*58.987.500*
04	02	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*49.225.000*	*54.147.500*
04	02	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*8 Laporan*	*196.342.300*	*215.976.530*
04	02	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*12 Laporan*	*69.080.000*	*75.988.000*
04	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**13.674.142.600,00**	**15.040.830.860,00**
04	02	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*154 Orang*	*12.741.714.500*	*14.015.885.950*
04	02	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	*75.240.000*	*82.764.000*
04	02	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*12 Dokumen*	*77.474.100*	*85.221.510*
04	02	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*7.260.000*	*7.260.000*
04	02	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	02	01	1.02	07	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*12 Laporan*	*714.384.000*	*785.822.400*
04	02	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*12 Dokumen*	*48.070.000*	*52.877.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**176.549.725,00**	**194.204.697,00**
04	02	01	1.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*4 Dokumen*	*105.049.725*	*115.554.697*
04	02	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*4 Laporan*	*71.500.000*	*78.650.000*
04	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		**493.063.800,00**	**542.370.180,00**
04	02	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*309 Paket*	*150.000.000*	*165.000.000*
04	02	01	1.05	04	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Dokumen*	*20.000.000*	*22.000.000*
04	02	01	1.05	05	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*3 Dokumen*	*20.000.000*	*22.000.000*
04	02	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*6 Orang*	*147.034.800*	*161.738.280*
04	02	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*5 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
04	02	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*10 Orang*	*106.029.000*	*116.631.900*
04	**02**	**01**	**1.06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**4.585.706.895,00**	**5.044.277.584,00**
04	02	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*35 Paket*	*325.392.375*	*357.931.612*
04	02	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*153.417.000*	*168.758.700*
04	02	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*10 Paket*	*55.000.000*	*60.500.000*
04	02	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	*402.878.520*	*443.166.372*
04	02	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*10 Paket*	*242.550.000*	*266.805.000*
04	02	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2 Dokumen*	*660.000.000*	*726.000.000*
04	02	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*1.536.469.000*	*1.690.115.900*
04	02	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.100.000.000*	*1.210.000.000*
04	02	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*2 Dokumen*	*110.000.000*	*121.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	**02**	**01**	***1.07***		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	***Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***			***1.963.170.456,00***	***2.159.487.502,00***
04	02	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*2 Unit*	*172.458.000*	*189.703.800*
04	02	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 Unit*	*172.458.000*	*189.703.800*
04	02	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*5 Paket*	*77.550.000*	*85.305.000*
04	02	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*110.000.000*	*121.000.000*
04	02	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*110.000.000*	*121.000.000*
04	02	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*471.832.350*	*519.015.585*
04	02	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*5 Unit*	*848.872.106*	*933.759.317*
04	**02**	**01**	***1.08***		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Cakupan Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah***	**100%**	***5.312.221.478,00***	***5.843.443.626,00***
04	02	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*10 Laporan*	*11.000.000*	*12.100.000*
04	02	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*5 Laporan*	*2.063.821.478*	*2.270.203.626*
04	02	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*3 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	02	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*3.227.400.000*	*3.550.140.000*
04	**02**	**01**	***1.09***		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			***5.076.012.140,00***	***5.583.613.354,00***
04	02	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*7 Unit*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	02	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*47 Unit*	*2.606.395.000*	*2.867.034.500*
04	02	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan & Mesin lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*187.220.000*	*205.942.000*
04	02	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*9 Unit*	*856.292.800*	*941.922.080*
04	02	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*1.323.673.340*	*1.456.040.674*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*2.431.000*	*2.674.100*
04	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Kota Kendari**			**32.871.968.840,00**	**36.159.165.724,00**
04	02	01	1.15	01	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*45 Orang/Bulan*	*31.966.586.840*	*35.163.245.524*
04	02	01	1.15	02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*3 Paket*	*517.500.000*	*569.250.000*
04	02	01	1.15	03	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*45 Orang*	*387.882.000*	*426.670.200*
04	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Kota Kendari**			**3.600.000.000,00**	**3.960.000.000,00**
04	**02**	01	1.16	01	*Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD*	*45 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000,00*
04	**02**	01	1.16	02	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	*8 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000,00*
04	**02**	01	1.16	03	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*2 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000,00*
04	**02**	01	1.16	04	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*	*4 Paket*	*3.300.000.000*	*3.630.000.000,00*
04	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**61.011.089.613,20**	**68.678.188.172,12**
04	**02**	**02**	**1.01**		**PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**22.798.872.999,00**	**26.523.749.896,50**
04	02	02	1.01	01	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*2 Dokumen*	*380.678.771*	*418.746.648*
04	02	02	1.01	02	*Pembahasan Rancangan Perda*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda*	*7 Dokumen*	*3.004.386.880*	*3.304.825.568*
04	02	02	1.01	03	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*8 Dokumen*	*17.613.047.375*	*3.304.825.568*
04	02	02	1.01	04	*Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*7 Dokumen*	*1.790.759.973*	*19.374.352.112,50*
04	02	02	1.01	05	*Penyusunan Tata Tertib DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000,00*
04	02	02	1.01	06	*Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah*	*45 Orang*	-	*110.000.000,00*
04	**02**	**02**	**1.02**		**PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**2.778.939.850,00**	**3.056.833.835,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	02	1.02	01	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*1 Dokumen*	*710.155.000*	*781.170.500*
04	02	02	1.02	02	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPA*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*2 Dokumen*	*202.800.000*	*223.080.000*
04	02	02	1.02	03	*Pembahasan APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*1 Dokumen*	*202.800.000*	*223.080.000*
04	02	02	1.02	04	*Pembahasan Perubahan APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD*	*1 Dokumen*	*204.784.850*	*225.263.335*
04	02	02	1.02	05	*Pembahasan Laporan Semester*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester*	*1 Dokumen*	*729.200.000*	*802.120.000*
04	02	02	1.02	06	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*4 Dokumen*	*729.200.000*	*802.120.000*
04	**02**	**02**	**1.03**		**PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**			**10.979.312.609,00**	**12.077.243.869,90**
04	02	02	1.03	01	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*288 Laporan*	*2.145.035.200*	*2.359.538.720*
04	02	02	1.03	02	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*240 Laporan*	*1.870.035.200*	*2.057.038.720*
04	02	02	1.03	03	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*432 Laporan*	*2.200.035.409*	*2.420.038.949,90*
04	02	02	1.03	04	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*360 Laporan*	*2.145.035.200*	*2.359.538.720*
04	02	02	1.03	05	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*	*120 Laporan*	*880.000.000*	*968.000.000*
04	02	02	1.03	06	*Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*1 Dokumen*	*780.089.200*	*858.098.120*
04	02	02	1.03	07	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*12 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	02	02	1.03	08	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*1 Dokumen*	*859.082.400*	*944.990.640,00*
04	**02**	**02**	**1.04**		**PENINGKATAN KAPASITAS DPRD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Kendari, Kab/Kota Se-Sultra**			**6.152.899.100,00**	**6.768.189.010,00**
04	02	02	1.04	01	*Orientasi DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD*	*45 Dokumen*	*1.100.000.000*	*1.210.000.000*
04	02	02	1.04	02	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*45 Dokumen*	*1.215.519.800*	*1.337.071.780*
04	02	02	1.04	04	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*21 Orang*	*972.457.200*	*1.069.702.920*
04	02	02	1.04	05	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 Orang*	*840.985.200*	*925.083.720*
04	02	02	1.04	06	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*12 Dokumen*	*544.196.400*	*598.616.040*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	02	1.04	07	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*2 Dokumen*	*620.790.500*	*682.869.550*
04	02	02	1.04	08	*Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*7 Dokumen*	*858.950.000*	*944.845.000*
04	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Kendari, Kab/Kota Se-Sultra**			**13.883.022.925,20**	**15.271.325.217,72**
04	02	02	1.05	01	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*120 Laporan*	*2.675.142.800*	*2.942.657.080*
04	02	02	1.05	02	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	*45 Dokumen*	*383.897.351,20*	*422.287.086,32*
04	02	02	1.05	03	*Pelaksanaan Reses*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota-SeSultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*135 Dokumen*	*10.823.982.774*	*11.906.381.051,40*
04	**02**	**02**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah, Kota Kendari**			**1.089.323.300,00**	**1.198.255.630,00**
04	02	02	1.06	01	*Penyusunan Kode Etik DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000,00*
04	02	02	1.06	02	*Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	*12 Laporan*	*1.079.323.300*	*1.187.255.630*
04	**02**	**02**	**1.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah**			**357.689.880,00**	**393.458.868,00**
04	02	02	1.07	01	*Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
04	02	02	1.07	02	*Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun*	*2 Dokumen*	*347.689.880*	*382.458.868*
04	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	***Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***	***Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah***	**Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah**			**2.971.028.950,00**	**3.389.131.845,00**
04	02	02	1.08	01	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*90 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	02	02	1.08	02	*Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	*8 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
04	02	02	1.08	03	*Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*	*12 Dokumen*	*491.902.950*	*541.093.245*
04	02	02	1.08	04	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*144 Dokumen*	*2.279.126.000*	*2.507.038.600*
04	02	02	1.08	05	*Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus*	*2 Dokumen*	-	*121.000.000*
5	**01**				**URUSAN PERENCANAAN**						**25.239.379.801**	**27.494.785.836**
5	**01**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**25.239.379.801**	**27.494.785.836**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**17.777.640.751**	**19.286.872.951**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**33.796.730**	**37.176.403**
5	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Kambu, Kambu*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*28.184.530*	*31.002.983*
5	*01*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.612.200*	*6.173.420*
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**11.154.969.471**	**12.270.466.418**
5	*01*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*123 Orang/ Bulan*	*10.989.545.476*	*12.088.500.023*
5	*01*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.502.695*	*6.052.965*
5	*01*	*01*	*1.02*	*07*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	159.921.300	175.913.430
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**43.326.800**	**47.659.480**
5	*01*	*01*	*1.03*	*05*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*43.326.800*	*47.659.480*
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**			**-**	**-**	**307.340.000**	**69.212.000**
5	*01*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*		*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*275.880.000*	*34.606.000*
5	*01*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*4 Orang*	*31.460.000*	*34.606.000*
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**2.366.198.650**	**2.602.818.600**
5	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*19.734.550*	*21.708.000*
5	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*3 Paket*	*139.560.600*	*153.516.700*
5	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*312.244.800*	*343.469.300*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2 Dokumen*	*14.322.000*	*15.754.200*
5	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*64.515.000*	*70.966.500*
5	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.364.616.000*	*1.501.077.600*
5	01	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*451.205.700*	*496.326.300*
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**1.387.100.000**	**1.525.810.000**
5	01	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*5 Unit*	*878.900.000*	*966.790.000*
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	60.500.000
5	01	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*7 Unit*	*281.600.000*	*309.760.000*
5	01	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	01	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*61.600.000*	*67.760.000*
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**952.591.500**	**1.048.180.700**
5	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*3.000.000*	*3.630.000*
5	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*709.965.300*	*780.961.900*
5	01	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*239.626.200*	*263.588.800*
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**1.532.317.600**	**1.685.549.350**
5	01	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*30 Unit*	*336.737.500*	*370.411.250*
5	01	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*60 Unit*	*42.240.000*	*46.464.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*1.133.210.100*	*1.246.531.100*
5	01	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*50 Unit*	*20.130.000*	*22.143.000*
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100 %**	**4.413.100.150**	**4.854.410.160**
5	**1**	**2**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen/Laporan dan Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**5/3 Dok/Lap. BA**	**2.892.705.100**	**3.181.975.610**
5	1	2	1.01	02	*Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	*1 Dokumen*	*426.140.000*	*468.754.000*
5	1	2	1.01	04	*Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	*2 Berita Acara*	*48.981.900*	*53.880.100*
5	1	2	1.01	05	*Pelaksanaan Musrenbang Provinsi*	-	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi*	*1 Berita Acara*	*681.847.100*	*750.031.810*
5	1	2	1.01	06	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	*4 Dokumen*	*1.735.736.100*	*1.909.309.700*
5	**1**	**2**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**229.459.000**	**252.404.900**
5	1	2	1.02	01	*Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	*1 Dokumen*	*229.459.000*	*252.404.900*
5	**1**	**2**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**1.290.936.050**	**1.420.029.650**
5	1	2	1.03	03	*Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	*1 Laporan*	*827.694.100*	*910.463.500*
5	1	2	1.03	04	*Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi*	*2 Dokumen*	*463.241.950*	*509.566.150*
5	**1**	**3**	**1.01**		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**3.048.638.900**	**3.353.502.725**
5	**1**	**3**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**1.079.100.125**	**1.187.010.100**
5	1	3	1.01	01	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*1 Dokumen*	*82.696.200*	*90.965.800*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	*1*	*3*	*1.01*	*05*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*1 Dokumen*	*996.403.925*	*1.096.044.300*
5	**1**	**3**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		-	-	**1.339.239.050**	**1.473.162.950**
5	*1*	*3*	*1.02*	*01*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*1 Dokumen*	*845.339.500*	*929.873.450*
5	*1*	*3*	*1.02*	*04*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*	*1 Laporan*	*177.649.550*	*195.414.500*
5	*1*	*3*	*1.02*	*05*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*1 Dokumen*	*156.750.000*	*172.425.000*
5	*1*	*3*	*1.02*	*08*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	*1 Laporan*	*159.500.000*	*175.450.000*
5	**1**	**3**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		-	-	**630.299.725**	**693.329.675**
5	*1*	*3*	*1.03*	*01*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*1 Dokumen*	*128.498.850*	*141.348.750*
5	*1*	*3*	*1.03*	*02*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*1 Laporan*	*124.955.425*	*137.450.950*
5	*1*	*3*	*1.03*	*04*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*	*1 Laporan*	*126.935.700*	*139.629.250*
5	*1*	*3*	*1.03*	*05*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*1 Dokumen*	*124.914.550*	*137.406.025*
5	*1*	*3*	*1.03*	*07*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*1 Laporan*	*124.995.200*	*137.494.700*
5	**02**				**KEUANGAN**						**1.086.929.590.757**	**1.195.453.264.833**
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**985.429.290.757**	**1.083.928.719.833**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kendari**			**164.394.838.136**	**180.575.821.950**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**431.000.000**	**505.600.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*120.000.000*	*165.000.000*
5	02	01	1.01	02	*Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
5	02	01	1.01	03	*Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan PKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*10.000.000*
5	02	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*4 Laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*
5	02	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Laporan*	*286.000.000*	*314.600.000*
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Kota Kendari	_		**150.870.000.000**	**165.957.000.000**
5	02	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*95 Orang/Bulan*	*150.000.000.000*	*165.000.000.000*
5	02	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	02	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	02	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*5 Laporan*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	02	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*5 Laporan*	*550.000.000*	*605.000.000*
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Kota Kendari	_		**910.000.000**	**1.001.000.000**
5	02	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
5	02	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*220.000.000*
5	02	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*2 Laporan*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	02	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*220.000.000*
5	02	01	1.03	07	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kendari**	_		**1.430.000.000**	**1.513.000.000**
5	02	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*330 Paket*	*200.000.000*	*200.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.05	03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
5	02	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*200.000.000*
5	02	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*40 Orang*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	02	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*40 Orang*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kendari**	_		**5.494.500.000**	**5.813.950.000**
5	02	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*30.000.000*	*33.000.000*
5	02	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*770.000.000*	*847.000.000*
5	02	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*550.000.000*	*605.000.000*
5	02	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*270 Paket*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	02	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*544.500.000*	*598.950.000*
5	02	01	1.05	09	*Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*2.300.000.000*	*2.300.000.000*
5	02	01	1.05	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*8 Dokumen*	*600.000.000*	*660.000.000*
5	02	01	1.05	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	*330.000.000*
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Kota Kendari	_		**2.253.500.000**	**2.478.850.000**
5	02	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*5 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	02	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*3 Unit*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	02	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*36 Unit*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
5	02	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*36 Unit*	*423.500.000*	*465.850.000*
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kendari**	_		**1.175.838.136**	**1.293.421.950**
5	02	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*20.838.136*	*22.921.950*
5	02	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*385.000.000*	*423.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*770.000.000*	*847.000.000*
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Kota Kendari	_		**1.830.000.000**	**2.013.000.000**
5	02	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*33 Unit*	*600.000.000*	*660.000.000*
5	02	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*33 Unit*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	02	01	1.08	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	*6 Unit*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	01	1.08	09	*Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*550.000.000*	*605.000.000*
5	02	01	1.08	10	*Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*350.000.000*	*385.000.000*
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**kendari/ Kab/Kota**	**Cakupan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan daerah**	**100 PERSEN**	**805.219.524.689**	**886.016.477.158**
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	kendari/ Kab/Kota	**Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Dokumen/Orang 12/101**	**5.325.000.000**	**5.857.500.000**
5	02	02	1.01	01	*Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS*	*1 Dokumen*	*275.000.000*	*302.500.000*
5	02	02	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	*1 Dokumen*	*275.000.000*	*302.500.000*
5	02	02	1.01	03	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	*1 Dokumen*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	02	1.01	04	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	*1 Dokumen*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	02	1.01	05	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi*	*1 Dokumen*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	02	1.01	06	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi*	*1 Dokumen*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	02	1.01	07	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD*	*1 Dokumen*	*1.210.000.000*	*1.331.000.000*
5	02	02	1.01	08	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*1 Dokumen*	*1.155.000.000*	*1.270.500.000*
5	02	02	1.01	09	*Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	*1 Dokumen*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	02	02	1.01	11	*Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	*1 Dokumen*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	02	02	1.01	12	*Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	*2 dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	*02*	*02*	*1.01*	*13*	*Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi*	*30 Orang*	*300.000.000*	*330.000.000*
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	kendari/ Kab/Kota	**Jumlah Dokumen dan laporan Evaluasi Kabupaten/Kota**	**Dokumen/Laporan 206**	**2.435.649.420**	**2.679.214.362**
5	*02*	*02*	*1.02*	*02*	*Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota*	*17 Laporan*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	*02*	*02*	*1.02*	*03*	*Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota*	*17 Laporan*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	*02*	*02*	*1.02*	*04*	*Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*17 Laporan*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	*02*	*02*	*1.02*	*05*	*Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi*	*1 Dokumen*	*385.000.000*	*423.500.000*
5	*02*	*02*	*1.02*	*06*	*Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan*	*1 Laporan*	*242.000.000*	*266.200.000*
5	*02*	*02*	*1.02*	*11*	*Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota*	*34 Orang*	*488.649.420*	*537.514.362*
5	*02*	*02*	*1.02*	*12*	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah*	*1 Dokumen*	*330.000.000*	*363.000.000*
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi & Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	kendari/ Kab/Kota	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Dokumen/Laporan/Org 24/13/150**	**4.363.643.251**	**4.800.007.576**
5	*02*	*02*	*1.03*	*01*	*Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	*3 Dokumen*	*1.500.000.000*	*1.650.000.000*
5	*02*	*02*	*1.03*	*03*	*Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	*2 Dokumen*	*300.000.000*	*330.000.000*
5	*02*	*02*	*1.03*	*05*	*Koordinasi , Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring & evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	*17 Dokumen*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	*02*	*02*	*1.03*	*06*	*Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Bukan Bank*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	*1 Dokumen*	*363.000.000*	*399.300.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	02	1.03	07	*Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	*1 Laporan*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
5	02	02	1.03	09	*Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	*12 Dokumen*	*50.643.251*	*55.707.576*
5	02	02	1.03	10	*Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	02	02	1.03	11	*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*1 Orang*	*600.000.000*	*660.000.000*
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koodinasi & Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	kendari/ Kab/Kota	**Jumlah Dokumen Lporan Keuangan Pemerintah daerah**	**Dokumen/Kegiatan 27/1**	**2.555.232.018**	**3.085.755.220**
5	02	02	1.04	02	*Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	*12 Dokumen*	*71.068.374*	*78.175.211*
5	02	02	1.04	03	*Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	*2 Laporan*	*263.163.644*	*289.480.009*
5	02	02	1.04	04	*Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	*1 Laporan*	-	*275.000.000*
5	02	02	1.04	05	*Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi*	*3 Dokumen*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
5	02	02	1.04	06	*Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
5	02	02	1.04	07	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*220.000.000*
5	02	02	1.04	09	*Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*165.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	02	1.04	10	*Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	02	02	1.04	11	*Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi*	*190 Orang*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	02	02	1.04	12	*Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina*	*1 Lembaga*	*121.000.000*	*133.100.000*
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuda**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	kendari/ Kab/Kota	**Jumlah Laporan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**44 Laporan**	**790.540.000.000**	**869.594.000.000**
5	02	02	1.05	04	*Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	*4 Laporan*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	02	1.05	06	*Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah*	*12 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	02	02	1.05	08	*Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	*12 Laporan*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	02	1.05	09	*Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	*12 Laporan*	*40.000.000.000*	*44.000.000.000*
5	02	02	1.05	10	*Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi*	*4 Laporan*	*750.000.000.000*	*825.000.000.000*
5	**02**	**03**	**1.01**		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**kendari/ Kab/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik daerah**	**100 PERSEN**	**15.814.927.932**	**17.336.420.725**
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**kendari/ Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen, Laporan dan Orang yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik daerah**	**Dokumen/Laporan/Org 9/46/3**	**15.814.927.932**	**17.336.420.725**
5	02	03	1.01	01	*Penyusunan Standar Harga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	*2 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	02	03	1.01	03	*Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	*2 Dokumen*	*44.000.000*	*48.400.000*
5	02	03	1.01	05	*Penatausahaan Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	*1 Laporan*	*600.000.000*	*600.000.000*
5	02	03	1.01	06	*Inventarisasi Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	*1 Laporan*	*1.815.000.000*	*1.996.500.000*
5	02	03	1.01	07	*Pengamanan Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	*1 Laporan*	*11.140.727.633*	*12.254.800.396*
5	02	03	1.01	08	*Penilaian Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	*1 Laporan*	*300.000.000*	*330.000.000*
5	02	03	1.01	09	*Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*42 Laporan*	*440.200.299*	*484.220.329*
5	02	03	1.01	10	*Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	*1 Dokumen*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	02	03	1.01	12	*Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	*2 Laporan*	*75.000.000*	*82.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	03	1.01	13	*Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*kendari/ Kab/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	*34 Orang*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**02**				**BADAN PENDAPATAN DAERAH**						**101.500.300.000**	**111.524.545.000**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**96.880.300.000**	**106.442.545.000**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**10 Dokumen**	**583.000.000**	**641.300.000**
5	*02*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*154.000.000*	*169.400.000*
5	*02*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*44.000.000*	*48.400.000*
5	*02*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*44.000.000*	*48.400.000*
5	*02*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*12.100.000*
5	*02*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*12.100.000*
5	*02*	*01*	*1.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*2 Laporan*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	*02*	*01*	*1.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*209.000.000*	*229.900.000*
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**75 Dokumen**	**63.228.000.000**	**69.550.800.000**
5	*02*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*330 Orang/Bulan*	*61.666.000.000*	*67.832.600.000*
5	*02*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*924.000.000*	*1.016.400.000*
5	*02*	*01*	*1.02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*2 Dokumen*	*275.000.000*	*302.500.000*
5	*02*	*01*	*1.02*	*04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*1 Dokumen*	*66.000.000*	*72.600.000*
5	*02*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*33.000.000*	*36.300.000*
5	*02*	*01*	*1.02*	*06*	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*12 Dokumen*	*66.000.000*	*72.600.000*
5	*02*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*34 Laporan*	*187.000.000*	*205.700.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	*02*	*01*	*1.02*	*08*	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*11.000.000*	*12.100.000*
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34 Dokumen**	**403.150.000**	**443.465.000**
5	*02*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*2 Dokumen*	*66.000.000*	*72.600.000*
5	*02*	*01*	*1.03*	*02*	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*12 Dokumen*	*33.000.000*	*36.300.000*
5	*02*	*01*	*1.03*	*03*	*Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*2 Laporan*	*36.300.000*	*39.930.000*
5	*02*	*01*	*1.03*	*04*	*Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*36.300.000*	*39.930.000*
5	*02*	*01*	*1.03*	*05*	*Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*4 Laporan*	*60.500.000*	*66.550.000*
5	*02*	*01*	*1.03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*165.000.000*	*181.500.000*
5	*02*	*01*	*1.03*	*07*	*Pemanfaatan barang milik daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*6.050.000*	*6.655.000*
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**61 Dokumen**	**1.147.850.000**	**1.147.850.000**
5	*02*	*01*	*1.04*	*01*	*Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	*4 Dokumen*	*748.000.000*	*748.000.000*
5	*02*	*01*	*1.04*	*02*	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis sertaPengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	*12 Dokumen*	*36.300.000*	*36.300.000*
5	*02*	*01*	*1.04*	*03*	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*2 Laporan*	*121.000.000*	*121.000.000*
5	*02*	*01*	*1.04*	*04*	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	*1 Dokumen*	*121.000.000*	*121.000.000*
5	*02*	*01*	*1.04*	*05*	*Pengolahan Data Retribusi daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah*	*1 Laporan*	*60.500.000*	*60.500.000*
5	*02*	*01*	*1.04*	*06*	*Penetapan Wajib Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah*	*5 Dokumen*	*55.000.000*	*55.000.000*
5	*02*	*01*	*1.04*	*07*	*Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*36 Laporan*	*6.050.000*	*6.050.000*
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**442 Laporan**	**2.464.000.000**	**2.710.400.000**
5	*02*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*10 Unit*	*242.000.000*	*266.200.000*
5	*02*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*450 Paket*	*1.100.000.000*	*1.210.000.000*
5	*02*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*50 Dokumen*	*154.000.000*	*169.400.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.05	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*36 Dokumen*	*99.000.000*	*108.900.000*
5	02	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*345 Dokumen*	*121.000.000*	*133.100.000*
5	02	01	1.05	06	*Pemulangan Pegawai yang Pensiun*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan*	*10 Orang*	*60.500.000*	*66.550.000*
5	02	01	1.05	07	*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*5 Laporan*	*60.500.000*	*66.550.000*
5	02	01	1.05	08	*Pemindahan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan*	*20 Orang*	*60.500.000*	*66.550.000*
5	02	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*329 Pegawai*	*220.000.000*	*242.000.000*
5	02	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*302.500.000*	*332.750.000*
5	02	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	*44.000.000*	*48.400.000*
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64 Laporan**	**6.009.300.000**	**6.599.230.000**
5	02	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*484.000.000*	*532.400.000*
5	02	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*200 Paket*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	02	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*100 Paket*	*110.000.000*	*110.000.000*
5	02	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*500 Paket*	*1.650.000.000*	*1.815.000.000*
5	02	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*22 Paket*	*385.000.000*	*423.500.000*
5	02	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*22.000.000*	*24.200.000*
5	02	01	1.06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*1 Paket*	*1.100.000.000*	*1.210.000.000*
5	02	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*18 Laporan*	*385.000.000*	*423.500.000*
5	02	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.298.000.000*	*1.427.800.000*
5	02	01	1.06	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*36.300.000*	*39.930.000*
5	02	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*26 Dokumen*	*429.000.000*	*471.900.000*
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**884 Unit**	**16.126.000.000**	**17.738.600.000**
5	02	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*10 Unit*	*1.815.000.000*	*1.996.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.100.000.000	1.210.000.000
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	550.000.000	605.000.000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.408.000.000	1.548.800.000
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Asset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	242.000.000	266.200.000
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Asset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	1.210.000.000	1.331.000.000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	3.751.000.000	4.126.100.000
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500 unit	3.630.000.000	3.993.000.000
5	02	01	1.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250 unit	2.420.000.000	2.662.000.000
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100%**	**2.948.000.000**	**3.242.800.000**
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.000.000	36.300.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000	1.210.000.000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	363.000.000	399.300.000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.452.000.000	1.597.200.000
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**222 Unit**	**3.971.000.000**	**4.368.100.000**
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	98 Unit	396.000.000	435.600.000
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	253.000.000	278.300.000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	429.000.000	471.900.000
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan asset tak berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit	363.000.000	399.300.000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	1.298.000.000	1.427.800.000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	605.000.000	665.500.000
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	627.000.000	689.700.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Persentasi Peningkatan Pendapatan Daerah**	**5 persen**	**4.620.000.000**	**5.082.000.000**
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**141 Dokumen**	**4.620.000.000**	**5.082.000.000**
5	*02*	*04*	*1.01*	*01*	*Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*	*5 Dokumen*	*352.000.000*	*387.200.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*02*	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	*4 Laporan*	*726.000.000*	*798.600.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*03*	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	*2 Laporan*	*308.000.000*	*338.800.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*04*	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	*5 Sarana dan Prasarana*	*550.000.000*	*605.000.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*05*	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*110.000.000*	*121.000.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*06*	*Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*13 Laporan*	*88.000.000*	*96.800.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*07*	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*	*12 Dokumen Ketetapan*	*88.000.000*	*96.800.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*08*	*Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.*	*12 Laporan*	*913.000.000*	*1.053.800.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*09*	*Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*	*17 Dokumen*	*66.000.000*	*72.600.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*10*	*Penagihan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.*	*12 Dokumen SSPD*	*121.000.000*	*133.100.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*11*	*Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti*	*12 Dokumen Surat Pertujuan/Penolakan*	*121.000.000*	*133.100.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*12*	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*4 Laporan*	*990.000.000*	*1.039.500.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*13*	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*30 Laporan*	*121.000.000*	*133.100.000*
5	*02*	*04*	*1.01*	*14*	*Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*1 Laporan*	*66.000.000*	*72.600.000*
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**27.400.000.000**	**30.140.000.000**
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**27.400.000.000**	**30.140.000.000**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**22.000.000.000**	**24.200.000.000**
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**125.000.000**	**137.500.000**
5	*03*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	*03*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	1.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	03	01	1.01	05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	03	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	03	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**10.971.884.000**	**12.069.072.400**
5	03	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*105 Orang/ Bulan*	*10.828.134.000*	*11.910.947.400*
5	03	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	03	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	138.750.000	*152.625.000*
5	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**39.480.000**	**43.428.000**
5	03	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*39.480.000*	*43.428.000*
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**580.000.000**	**638.000.000**
5	03	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*1 Paket*	*180.000.000*	*198.000.000*
5	03	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*14 Orang*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	03	01	1.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*300 Orang*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**2.097.736.000**	**2.307.509.600**
5	03	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*50.000.000*	*55.000.000*
5	03	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*25.000.000*	*27.500.000*
5	03	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – undangan yang Disediakan*	*576 Dokumen*	*2.736.000*	*3.009.600*
5	03	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*20.000.000*	*22.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.500.000.000*	*1.650.000.000*
5	03	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**35 Unit**	**6.550.000.000**	**7.205.000.000**
5	03	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	03	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*12 Unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	03	01	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
5	03	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*5.000.000.000*	*5.500.000.000*
5	03	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*20 unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	03	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Laporan**	**765.900.000**	**842.490.000**
5	03	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	03	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	03	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*360.900.000*	*396.990.000*
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**102 Unit**	**870.000.000**	**957.000.000**
5	03	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya*	*25 Unit*	*170.000.000*	*187.000.000*
5	03	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Dipelihara /Direhabilitasi*	*64 Unit*	*80.000.000*	*88.000.000*
5	03	01	1.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*1 Unit*	*20.000.000*	*22.000.000*
5	03	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Dipelihara /Direhabilitasi*	*1 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	03	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Dipelihara /Direhabilitasi*	*12 Unit*	*80.000.000*	*88.000.000*
5	03	01	1.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*20.000.000*	*22.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian**	**100%**	**5.400.000.000**	**5.940.000.000**
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**3.050.000.000**	**3.355.000.000**
5	*03*	*02*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	*4 Dokumen*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
5	*03*	*02*	*1.01*	*06*	*Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	*03*	*02*	*1.01*	*08*	*Fasilitasi Lembaga Profesi ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*	*1 Lembaga*	*1.700.000.000*	*1.870.000.000*
5	*03*	*02*	*1.01*	*10*	*Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	*03*	*02*	*1.01*	*11*	*Pengelolaan Data Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	**100%**	**1.650.000.000**	**1.815.000.000**
5	*03*	*02*	*1.02*	*02*	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	*4 Laporan*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	*03*	*02*	*1.02*	*03*	*Pengelolaan Promosi ASN Jumlah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	*1 Dokumen*	*1.400.000.000*	*1.540.000.000*
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**100%**	**300.000.000**	**330.000.000**
5	*03*	*02*	*1.03*	*01*	*Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*	*10 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
5	*03*	*02*	*1.03*	*03*	*Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	*03*	*02*	*1.03*	*04*	*Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
5	*03*	*02*	*1.03*	*14*	*Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	*03*	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100%**	**400.000.000**	**440.000.000**
5	*03*	*02*	*1.04*	*02*	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	*03*	*02*	*1.04*	*04*	*Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	*10 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
5	*03*	*02*	*1.04*	*05*	*Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa*	*300 Orang*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	*03*	*02*	*1.04*	*08*	*Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	*1 Laporan*	*100.000.000*	*110.000.000*
5	**04**				**Pendidikan dan Pelatihan**						**37.985.350.000**	**32.062.500.000**
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**37.985.350.000**	**32.062.500.000**
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**28.140.350.000**	**21.812.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**04**	**01**	**1.01.**		**Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi**	7 Dokumen	**160.000.000**	**185.000.000**
5	*04*	*01*	*1.01.*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*30.000.000*
5	*04*	*01*	*1.01.*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	*04*	*01*	*1.01.*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	*04*	*01*	*1.01.*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	*04*	*01*	*1.01.*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	*04*	*01*	*1.01.*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	*04*	*01*	*1.01.*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 laporan*	*110.000.000*	*120.000.000*
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**9.944.400.000**	**2.164.000.000**
5	*04*	*01*	*1.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*100 Org/Bulan*	*9.800.000.000*	*2.000.000.000*
5	*04*	*01*	*1.02*	*02*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*134.400.000*	*150.000.000*
5	*04*	*01*	*1.02*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	*04*	*01*	*1.02*	*07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	**04**	**01**	**1.03**	**01**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**5.000.000**	**7.000.000**
5	*04*	*01*	*1.03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1 Dokumen*	*5.000.000*	*7.000.000*
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**650.000.000**	**715.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	04	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	04	01	1.05	09	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*11 Orang*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**11.810.000.000**	**12.920.000.000**
5	04	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.500.000.000*	*11.500.000.000*
5	04	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*56.000.000*	*60.000.000*
5	04	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*75.000.000*	*75.000.000*
5	04	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*125.000.000*	*130.000.000*
5	04	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*4.000.000*	*5.000.000*
5	04	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 Laporan*	*300.000.000*	*350.000.000*
5	04	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Dalam & Luar Daerah*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 Laporan*	*750.000.000*	*800.000.000*
5	**04**	**01**	**1.07.**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**26 Unit**	**3.750.000.000**	**3.955.000.000**
5	04	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*6 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
5	04	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*6 Paket*	*50.000.000*	*55.000.000*
5	04	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*7 Unit*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	04	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*1.400.000.000*	*1.500.000.000*
5	04	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*800.000.000*	*850.000.000*
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**3 Laporan**	**530.950.000**	**546.000.000**
5	04	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*1 Laporan*	*950.000*	*1.000.000*
5	04	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 Laporan*	*330.000.000*	*335.000.000*
5	04	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*210.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**35 Unit**	**1.290.000.000**	**1.320.500.000**
5	*04*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*17 Unit*	*260.000.000*	*265.000.000*
5	*04*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*17 Unit*	*100.000.000*	*105.000.000*
5	*04*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan Meubel*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*5 Unit*	*10.000.000*	*10.500.000*
5	*04*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*20.000.000*	*25.000.000*
5	*04*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*300.000.000*	*305.000.000*
5	*04*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*300.000.000*	*305.000.000*
5	*04*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*300.000.000*	*305.000.000*
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**			**-**	**9.845.000.000**	**10.250.000.000**
5	**04**	**02**	**1.01.**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**950.000.000**	**1.150.000.000**
5	*04*	*02*	*1.01.*	*01*	*Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun*	*1 Dokumen*	*200.000.000*	*250.000.000*
5	*04*	*02*	*1.01.*	*02*	*Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam negeri, kompetensi teknis umum, inti dan pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun*	*1 Dokumen*	*250.000.000*	*300.000.000*
5	*04*	*02*	*1.01.*	*03*	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerntahan umum*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	*240 Orang*	*400.000.000*	*500.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	*04*	*02*	*1.01.*	*04*	*Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisa Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
5	**04**	**02**	**1.02.**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi, Kelembagaan dan PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100%**	**8.895.000.000**	**9.100.000.000**
5	*04*	*02*	*1.02.*	*01*	*Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan fungsional*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,*	*1 Dokumen*	*450.000.000*	*500.000.000*
5	*04*	*02*	*1.02.*	*02*	*Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi*	*1 Dokumen*	*220.000.000*	*250.000.000*
5	*04*	*02*	*1.02.*	*03*	*Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi*	*155 Orang*	*750.000.000*	*750.000.000*
5	*04*	*02*	*1.02.*	*04*	*Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar*	*1 Laporan*	*2.200.000.000*	*2.300.000.000*
5	*04*	*02*	*1.02.*	*07*	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	*1650 Orang*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*
5	*04*	*02*	*1.02.*	*08*	*Pembinaan, Pengkoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*	*Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	*1 Dokumen*	*275.000.000*	*300.000.000*
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**20.000.000.000**	**21.984.810.132**
					BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**20.000.000.000**	**21.984.810.132**
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100 Persen**	**7.831.645.575**	**8.614.810.132**
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**25.000.000**	**27.500.000**
5	05	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	05	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	05	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**5.892.142.260**	**6.481.356.486**
5	05	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*45 Orang/ Bulan*	*5.765.542.260*	*6.342.096.486*
5	05	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD*	*12 Dokumen*	*80.100.000*	*88.110.000*
5	05	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	05	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*41.500.000*	*45.650.000*
5	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**219.600.000**	**241.560.000**
5	05	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*1 Paket*	*39.600.000*	*43.560.000*
5	05	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*2 Orang*	*120.000.000*	*132.000.000*
5	05	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*2 Orang*	*60.000.000*	*66.000.000*
5	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**673.765.740**	**741.142.314**
5	05	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	05	01	1.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*12 Paket*	*5.000.000*	*5.500.000*
5	05	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*15.000.000*	*16.500.000*
5	05	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*31.365.740*	*34.502.314*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*14.400.000*	*15.840.000*
5	05	01	1.06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*1 Paket*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	05	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*25.000.000*	*27.500.000*
5	05	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*338.000.000*	*371.800.000*
5	05	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*3 Dokumen*	*90.000.000*	*99.000.000*
5	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11 Unit**	**170.237.575**	**187.261.332**
5	05	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*25.000.000*	*27.500.000*
5	05	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*102.737.575*	*113.011.332*
5	05	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*3 Unit*	*36.750.000*	*40.425.000*
5	05	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*5.750.000*	*6.325.000*
5	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**429.400.000**	**472.340.000**
5	05	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*900.000*	*990.000*
5	05	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*186.000.000*	*204.600.000*
5	05	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*242.500.000*	*266.750.000*
5	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**32 Unit**	**421.500.000**	**463.650.000**
5	05	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya2*	*7 Unit*	*150.000.000*	*165.000.000*
5	05	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*12 Unit*	*6.500.000*	*7.150.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	05	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*12 Unit*	*15.000.000*	*16.500.000*
5	**05**	**02**	**.0**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan**	**100 Persen**	**12.168.354.425**	**13.370.000.000**
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100 Persen**	**3.600.000.000**	**3.960.000.000**
5	05	02	1.01	01	*Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*	*3 Laporan*	*750.000.000*	*825.000.000*
5	05	02	1.01	03	*Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan*	*3 Laporan*	*800.000.000*	*880.000.000*
5	05	02	1.01	04	*Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi*	*2 Laporan*	*400.000.000*	*440.000.000*
5	05	02	1.01	05	*Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi*	*3 Laporan*	*750.000.000*	*825.000.000*
5	05	02	1.01	13	*Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan*	*3 Rekomendasi*	*600.000.000*	*660.000.000*
5	05	02	1.01	14	*Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*	*1 Laporan*	*300.000.000*	*330.000.000*
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**100 Persen**	**2.300.000.000**	**2.530.000.000**
5	05	02	1.02	01	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*	*2 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	05	02	1.02	03	*Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*	*4 Dokumen*	*800.000.000*	*880.000.000*
5	05	02	1.02	05	*Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*	*3 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	02	1.02	06	*Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*	*2 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100 Persen**	**3.750.000.000**	**4.125.000.000**
5	05	02	1.03	01	*Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*3 Dokumen*	*750.000.000*	*825.000.000*
5	05	02	1.03	02	*Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	*2 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	05	02	1.03	04	*Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	*3 Dokumen*	*750.000.000*	*825.000.000*
5	05	02	1.03	05	*Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*	*3 Dokumen*	*750.000.000*	*825.000.000*
5	05	02	1.03	06	*Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral*	*1 Dokumen*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	05	02	1.03	07	*Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	*1 Dokumen*	*250.000.000*	*275.000.000*
5	05	02	1.03	12	*Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan*	*1 Dokumen*	*500.000.000*	*550.000.000*
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Inovasi**	**100 Persen**	**2.518.354.425**	**2.755.000.000**
5	05	02	1.04	01	*Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*4 Dokumen*	*1.000.000.000*	*1.100.000.000*
5	05	02	1.04	02	*Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*	*3 Laporan*	*300.000.000*	*330.000.000*
5	05	02	1.04	03	*Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	*3 Laporan*	*450.000.000*	*495.000.000*
5	05	02	1.04	04	*Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	*3 Laporan*	*500.000.000*	*550.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	02	1.04	05	*Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	*3 Laporan*	*268.354.425*	*280.000.000*
5	**07**				**Urusan Pengelolaan Penghubung**						**50.734.698.793**	**53.068.507.877**
5	**07**				**Badan Penghubung**						**50.734.698.793**	**53.068.507.877**
5	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**20.807.106.793**	**21.937.322.597**
5	**01**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**		**Renja, Renstra SKPD**	**3 dokumen**	**5.782.060**	**6.013.342**
5	*01*	*01*	*1,01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 dokumen*	*5.782.060*	*6.013.342*
5	**01**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**6.958.732.098**	**7.237.081.382**
5	01	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	6.788.504.589	7.060.044.773
5	01	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.156.475	30.322.734
5	01	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 dokumen	5.801.812	6.033.884
5	01	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	135.269.222	140.679.991
5	**01**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**		**Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesau kebutuhan dan tepat guna**	**12 dokumen**	**35.043.840**	**36.445.594**
5	*01*	*01*	*1,03*	*01*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*12 dokumen*	*35.043.840*	*36.445.594*
5	**01**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**		**Terlaksananya peningkatan kapasitas kedisiplinan aparatur serta terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur**		**384.916.480**	**400.313.139**
5	*01*	*01*	*1,05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*90 paket*	*116.596.480*	*121.260.339*
5	*01*	*01*	*1,05*	*06*	*Pemulangan Pegawai yang Pensiun*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan*	*5 orang*	*54.080.000*	*56.243.200*
5	*01*	*01*	*1,05*	*07*	*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*5 laporan*	*108.160.000*	*112.486.400*
5	*01*	*01*	*1,05*	*08*	*Pemindahan Tugas ASN*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan*	*5 orang*	*54.080.000*	*56.243.200*
5	*01*	*01*	*1,05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*90 orang*	*52.000.000*	*54.080.000*
5	**01**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**		**Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah yg tepat sasaran pada Perangkat Daerah**		**2.286.494.621**	**2.469.414.191**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	6.270.468	6.772.106
5	01	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.292.615	6.796.024
5	01	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	272.457.518	294.254.120
5	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.008.110	18.368.759
5	01	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	2.494.230	2.693.768
5	01	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.487.971.680	1.607.009.414
5	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	494.000.000	533.520.000
5	**01**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**		**Tersedianya perlengkapan srana dan prasarana berikut pemeliharaannya**		**4.341.740.793**	**4.689.081.137**
5	01	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	604.052.366	652.377.635
5	01	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12paket	577.057.161	623.221.734
5	01	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	102.343.024	110.530.466
5	01	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	2.010.960.000	2.171.836.800
5	01	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	523.664.121	565.557.251
5	01	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	523.664.121	565.557.251
5	**01**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**2.522.864.969**	**2.656.580.602**
5	01	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.355.892.544	1.410.128.246
5	01	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	858.456.841	892.795.114
5	01	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.504.384	36.445.594
5	01	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	305.011.200	317.211.648
5	**01**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**		**Tersedianya Barang Milik Daerah yg senantiasa layak guna sebagai sarana dan parasarana penunjang**		**4.271.531.932**	**4.442.393.210**
5	01	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	2.804.354.800	2.916.528.992

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1,09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*100 unit*	*21.632.000*	*22.497.280*
5	01	01	1,09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*25 unit*	*11.891.543*	*12.367.205*
5	01	01	1,09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*10 unit*	*909.989.468*	*946.389.047*
5	01	01	1,09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*10 unit*	*523.664.121*	*544.610.686*
5	**01**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**29.927.592.000**	**31.131.185.280**
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**Tata Kelola pemerintahan yang baik**	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah**				**1.044.992.000**	**1.093.281.280**
5	07	02	1.01	01	*Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan*	*5 laporan*	*324.480.000*	*337.459.200*
5	07	02	1.01	02	*Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat*	*12 laporan*	*270.400.000*	*281.216.000*
5	07	02	1.01	03	*Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan*	*1 laporan*	*104.000.000*	*108.160.000*
5	07	02	1.01	04	*Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya*	*1 laporan*	*183.872.000*	*191.226.880*
5	07	02	1.01	05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung*	*Tata Kelola pemerintahan yang baik*	*Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*	*BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung*	*1 laporan*	*162.240.000*	*175.219.200*
6	**01**				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.882.600.000**	**30.037.904.000**
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**28.882.600.000**	**30.037.904.000**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**20.104.600.000**	**20.908.784.000**
6	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**13.200.000**	**13.728.000**
6	01	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*1.200.000*	*1.248.000*
6	01	01	1.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*2 Dokumen*	*3.000.000*	*3.120.000*
6	01	01	1.01	04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*2 Dokumen*	*3.000.000*	*3.120.000*
6	01	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*3 Laporan*	*2.500.000*	*2.600.000*
6	01	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Laporan*	*3.500.000*	*3.640.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14 Dokumen**	**14.397.500.000**	**14.973.400.000**
6	01	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*132 Orang/Bulan*	*14.300.000.000*	*14.872.000.000*
6	01	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*3.500.000*	*3.640.000*
6	01	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*94.000.000*	*97.760.000*
6	01	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**38.000.000**	**39.520.000**
6	01	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*38.000.000*	*39.520.000*
6	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**955.000.000**	**993.200.000**
6	01	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	*105.000.000*	*109.200.000*
6	01	01	1.05	05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*2 Dokumen*	*195.000.000*	*202.800.000*
6	01	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*100 Orang*	*410.000.000*	*426.400.000*
6	01	01	1.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*75 Orang*	*245.000.000*	*254.800.000*
6	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**1.482.000.000**	**1.541.280.000**
6	01	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*147.000.000*	*152.880.000*
6	01	01	1.06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*194.000.000*	*201.760.000*
6	01	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*105.000.000*	*109.200.000*
6	01	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*11.000.000*	*11.440.000*
6	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*275.000.000*	*286.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*750.000.000*	*780.000.000*
6	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25 Unit**	**2.315.000.000**	**2.407.600.000**
6	01	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*	*400.000.000*	*416.000.000*
6	01	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*300.000.000*	*312.000.000*
6	01	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*215.000.000*	*223.600.000*
6	01	01	1.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*12 Unit*	*450.000.000*	*468.000.000*
6	01	01	1.07	09	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*400.000.000*	*416.000.000*
6	01	01	1.07	10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*300.000.000*	*312.000.000*
6	01	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*250.000.000*	*260.000.000*
6	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36 Laporan**	**225.900.000**	**234.936.000**
6	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*9.900.000*	*10.296.000*
6	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*158.000.000*	*164.320.000*
6	01	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*58.000.000*	*60.320.000*
6	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		-	-	**678.000.000**	**705.120.000**
6	01	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*9 Unit*	*35.000.000*	*36.400.000*
6	01	01	1.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*21 Unit*	*205.000.000*	*213.200.000*
6	01	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*70 Unit*	*150.000.000*	*156.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	01	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Unit*	*200.000.000*	*208.000.000*
6	01	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 Unit*	*88.000.000*	*91.520.000*
6	**01**	**02**	**.0**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**98 persen**	**7.198.000.000**	**7.485.920.000**
6	01	02	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**		**6.103.000.000**	**6.347.120.000**
6	01	02	1.01	01	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	*150 Laporan*	*3.350.000.000*	*3.484.000.000*
6	01	02	1.01	02	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	*40 Laporan*	*460.000.000*	*478.400.000*
6	01	02	1.01	03	*Reviu Laporan Kinerja*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	*36 Laporan*	*415.000.000*	*431.600.000*
6	01	02	1.01	04	*Reviu Laporan Keuangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	*1 Laporan*	*285.000.000*	*296.400.000*
6	01	02	1.01	05	*Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota*	*45 Laporan*	*843.000.000*	*876.720.000*
6	01	02	1.01	06	*Kerjasama Pengawasan Internal*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*	*1 Kesepakatan*	*100.000.000*	*104.000.000*
6	01	02	1.01	07	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	*3 Dokumen*	*650.000.000*	*676.000.000*
6	01	02	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**		**1.095.000.000**	**1.138.800.000**
6	01	02	1.02	01	*Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	*5 Laporan*	*145.000.000*	*150.800.000*
6	01	02	1.02	02	*Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*95 Laporan*	*950.000.000*	*988.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	**01**	**03**	**.0**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Meningkatnya Kualitas APIP dalam Rangka Profesionalisme Pengawasan Internal Pemerintah Daerah**	**93 persen**	**1.580.000.000**	**1.643.200.000**
6	01	03	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**		**400.000.000**	**416.000.000**
6	01	03	1.01	01	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	*1 Rekomendasi*	*130.000.000*	*135.200.000*
6	01	03	1.01	02	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*	*5 Rekomendasi*	*270.000.000*	*280.800.000*
6	01	03	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**-**		**1.180.000.000**	**1.227.200.000**
6	01	03	1.02	01	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	*48 Perangkat Daerah*	*850.000.000*	*884.000.000*
6	01	03	1.02	02	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	*48 Perangkat Daerah*	*175.000.000*	*182.000.000*
6	01	03	1.02	03	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	*2 Kegiatan*	*155.000.000*	*161.200.000*
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**25.000.000.000**	**27.392.190.500**
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**25.000.000.000**	**27.392.190.500**
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**25.000.000.000**	**27.392.190.500**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**KOTA KENDARI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100 PERSEN**	**18.629.810.000**	**20.014.491.000**
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**10 Dokumen**	**570.000.000**	**625.000.000**
8	*01*	*01*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*40.000.000*	*45.000.000*
8	*01*	*01*	*1.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*155.000.000*
8	*01*	*01*	*1.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	*01*	*01*	*1.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	*01*	*01*	*1.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*1 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	01	1.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*2 laporan*	*30.000.000*	*35.000.000*
8	01	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	*200.000.000*	*225.000.000*
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75 Dokumen**	**5.436.810.000**	**5.927.241.000**
8	01	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*50 Orang/Bulan*	*5.050.000.000*	*5.505.000.000*
8	01	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*20.000.000*	*28.800.000*
8	01	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*2 Dokumen*	*20.000.000*	*28.800.000*
8	01	01	1.02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*12 Dokumen*	*20.000.000*	*28.800.000*
8	01	01	1.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 laporan*	*150.000.000*	*155.000.000*
8	01	01	1.02	06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*13.500.000*	*16.200.000*
8	01	01	1.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*38 Laporan*	*150.000.000*	*150.000.000*
8	01	01	1.02	08	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*2 Dokumen*	*13.310.000*	*14.641.000*
8	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**34 Dokumen**	**81.000.000**	**85.800.000**
8	01	01	1.03	01	*Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*3 Dokumen*	*10.000.000*	*12.000.000*
8	01	01	1.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*3 Dokumen*	*15.000.000*	*15.000.000*
8	01	01	1.03	03	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*6 Laporan*	*13.000.000*	*14.300.000*
8	01	01	1.03	04	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*
8	01	01	1.03	05	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*10.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	*01*	*01*	*1.03*	*06*	*Penata Usahaan Barang Milik daerah pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	*10.000.000*	*11.000.000*
8	*01*	*01*	*1.03*	*07*	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*4 Dokumen*	*13.000.000*	*13.500.000*
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Laporan**	**699.000.000**	**745.450.000**
8	*01*	*01*	*1.05*	*01*	*Peningkatan sarana dan prasaran disiplin pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*2 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*4 Paket*	*200.000.000*	*210.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*03*	*Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*20.000.000*	*25.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*04*	*koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*150.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*05*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*2 Dokumen*	*30.000.000*	*35.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*06*	*Pemulangan Pegawai yang Pensiun*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan*	*2 Orang*	*17.000.000*	*18.700.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*07*	*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*	*1 Laporan*	*17.000.000*	*18.700.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*08*	*Pemindahan Tugas ASN*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan*	*3 Orang*	*25.000.000*	*28.050.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*09*	*Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*5 Orang*	*70.000.000*	*75.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*10*	*Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*	*5 Orang*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	*01*	*01*	*1.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*5 Orang*	*70.000.000*	*75.000.000*
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**50 Laporan**	**3.505.000.000**	**3.778.000.000**
8	*01*	*01*	*1.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*25.000.000*	*30.000.000*
8	*01*	*01*	*1.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*1.000.000.000*	*1.150.000.000*
8	*01*	*01*	*1.06*	*03*	*Penyediaan peralatan rumah tangga*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*12 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
8	*01*	*01*	*1.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	*70.000.000*	*75.000.000*
8	*01*	*01*	*1.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*12 Paket*	*200.000.000*	*220.000.000*
8	*01*	*01*	*1.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	01	1.06	07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*12 Paket*	*100.000.000*	*105.000.000*
8	01	01	1.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*250.000.000*	*265.000.000*
8	01	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*60 Laporan*	*1.500.000.000*	*1.550.000.000*
8	01	01	1.06	10	*Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*1 Dokumen*	*30.000.000*	*33.000.000*
8	01	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*2 Dokumen*	*30.000.000*	*30.000.000*
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**134 Unit**	**3.820.000.000**	**4.030.000.000**
8	01	01	1.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*2 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
8	01	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*
8	01	01	1.07	03	*Pengadaan Alat Besar*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	*2 unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	01	01	1.07	04	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*3 Unit*	*20.000.000*	*20.000.000*
8	01	01	1.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*100 paket*	*500.000.000*	*600.000.000*
8	01	01	1.07	06	*Pengadaan peralatan dan mesin lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*200.000.000*	*210.000.000*
8	01	01	1.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*200.000.000*	*210.000.000*
8	01	01	1.07	08	*Pengadaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*1 Unit*	-	-
8	01	01	1.07	09	*Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*120.000.000*
8	01	01	1.07	10	*Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*200.000.000*	*210.000.000*
8	01	01	1.07	11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Kendari*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	*550.000.000*	*605.000.000*
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah lainnya**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**48 Laporan**	**1.160.000.000**	**1.180.000.000**
8	01	01	1.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*10.000.000*	*15.000.000*
8	01	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*150.000.000*	*155.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	*01*	*01*	*1.08*	*03*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*500.000.000*	*505.000.000*
8	*01*	*01*	*1.08*	*04*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*500.000.000*	*505.000.000*
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Kendari**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**92 Unit**	**3.358.000.000**	**3.643.000.000**
8	*01*	*01*	*1.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*12 Unit*	*400.000.000*	*405.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*12 Unit*	*200.000.000*	*205.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*03*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	*2 Unit*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*04*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	*4 Unit*	*8.000.000*	*8.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*05*	*Pemeliharaan mebel*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*12 Unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*06*	*Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*12 Unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*07*	*Pemeliharaan aset tetap lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*12 Unit*	*250.000.000*	*275.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*08*	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*12 Unit*	-	-
8	*01*	*01*	*1.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*12 Unit*	*450.000.000*	*495.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*750.000.000*	*825.000.000*
8	*01*	*01*	*1.09*	*11*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*750.000.000*	*825.000.000*
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PUSAT & PROV.SULTRA**	**Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**6 KEGIATAN**	**2.730.190.000**	**3.133.699.500**
8	**01**	**02**	**101**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***Kota Kendari***	**Jumlah Dokumen Kegiatan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 Dokumen**	**2.730.190.000**	**3.133.699.500**
8	*01*	*02*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	02	1.01	02	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kota Kendari*	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	*4 dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	01	02	1.01	03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*100 Orang*	*151.150.000*	*157.699.500*
8	01	02	1.01	04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat & Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*12 Orang*	*100.000.000*	*200.000.000*
8	01	02	1.01	05	*Pelaksanaan Monotoring,Evaluai dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kabupaten/kota*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*12 laporan*	*60.000.000*	*65.000.000*
8	01	02	1.01	06	*Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kabupaten/kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	*5 dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	01	02	1.01	07	*Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila*	*100 Orang*	*30.000.000*	*45.000.000*
8	01	02	1.01	08	*Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*	*2 Dokumen*	*30.000.000*	*45.000.000*
8	01	02	1.01	09	*Pelaksanaan tugas Paskibraka*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka*	*3 Dokumen*	*2.159.040.000*	*2.365.000.000*
8	01	02	1.01	10	*Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila*	*1 Dokumen*	*30.000.000*	*45.000.000*
8	01	02	1.01	11	*Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila*	*1 Dokumen*	*30.000.000*	*45.000.000*
8	01	02	1.01	12	*Pembentukan Paskibraka*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Paskibraka*	*70 Orang*	*30.000.000*	*45.000.000*
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PUSAT & PROV.SULTRA**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan PEMILUKADA**	**90 PERSEN**	**1.660.000.000**	**1.861.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	**01**	**03**	**101**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Pusat & Prov.Sultra**	**Jumlah Dokumen hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**2 Dokumen**	**1.660.000.000**	**1.861.000.000**
8	*01*	*03*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat & Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
8	*01*	*03*	*1.01*	*02*	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat & Prov.Sultra*	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun*	*4 Dokumen*	*100.000.000*	*100.000.000*
8	*01*	*03*	*1.01*	*03*	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*400 Orang*	*800.000.000*	*900.000.000*
8	*01*	*03*	*1.01*	*04*	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat & Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*12 Orang*	*250.000.000*	*300.000.000*
8	*01*	*03*	*1.01*	*05*	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kabupaten/kota*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*12 Laporan*	*500.000.000*	*550.000.000*
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PUSAT & PROV.SULTRA**	**Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar Dalam setiap Tahunnya**	**80 PERSEN**	**335.000.000**	**356.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	**01**	**04**	**101**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pusat & Prov.Sultra	**Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**80 PERSEN**	**335.000.000**	**356.000.000**
8	*01*	*04*	*1.01*	*01*	*Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat & Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
8	*01*	*04*	*1.01*	*02*	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat & Prov.Sultra*	*Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun*	*4 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	*01*	*04*	*1.01*	*03*	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*200 Orang*	*150.000.000*	*155.000.000*
8	*01*	*04*	*1.01*	*04*	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*12 Orang*	*75.000.000*	*80.000.000*
8	*01*	*04*	*1.01*	*05*	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*12 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PUSAT DAN PROV.SULTRA**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1 KEGIATAN**	**335.000.000**	**356.000.000**
8	**01**	**05**	**101**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***Prov.Sultra***	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**5 Kegiatan**	**335.000.000**	**356.000.000**
8	*01*	*05*	*101*	*01*	*Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
8	*01*	*05*	*101*	*02*	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*	*4 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	05	101	03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*400 Orang*	*150.000.000*	*155.000.000*
8	01	05	101	04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*12 Orang*	*75.000.000*	*80.000.000*
8	01	05	101	05	*Pelaksanaan Monitoring , Evalusai dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*12 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**PUSAT DAN PROV.SULTRA**	**Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**1 KEGIATAN**	**1.310.000.000**	**1.671.000.000**
8	**01**	**06**	**101**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	***Prov.Sultra***	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Pemantapan Peningkatan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**6 Kegiatan**	**1.310.000.000**	**1.671.000.000**
8	01	06	101	01	*Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	*2 Dokumen*	*10.000.000*	*11.000.000*
8	01	06	101	02	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	*4 Dokumen*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	01	06	101	03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*400 Orang*	*500.000.000*	*750.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	06	101	04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Pusat*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*12 Orang*	*200.000.000*	*250.000.000*
8	01	06	101	05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Kabupaten/kota*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*12 Laporan*	*50.000.000*	*55.000.000*
8	01	06	101	06	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi*	*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*	*Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	*Prov.Sultra*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi*	*12 Laporan*	*500.000.000*	*550.000.000*

Bab VII
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi dasar bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik termuat dalam RKPD maupun dalam Renja PD. Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.1. Indikator Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengidikasikan keberhasilan dalam suatu pembangunan yang dibandingkan secara nasional. Berikut ini merupakan target indikator makro yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024:

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMN TAHUN 2024	TARGET RKP TAHUN 2024	TARGET RPD TAHUN 2024	TARGET RKPD TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Sasaran Pembangunan					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8,90	6,0-6,8	6,0-6,5	6,0-6,5
2	Rasio Gini	Indeks	-	0,363-0,364	0,366-0,375	0,366-0,375
3	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,25	9,50-9,80	10,00-11,00	10,00-11,00
4	T P T (%)	Persen	2,40	2,47-3,19	2,75-3,00	2,75-3,00
5	I P M (Indeks)	Indeks	-	73,02-73,20	73,00-73,30	73,00-73,30
	Indikator Pembangunan					
1	Nilai Tukar Petani	Nilai				107-110
2	Nilai Tukar Nelayan	Nilai				105-108

Untuk dapat mencapai target indikator makro Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dukungan capaian dari Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara. Berikut target indikator makro yang masing-masing Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024:

Tabel 7.2
Target Indikator Makro Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM (%)	Rasio Gini	PDRB Per Kapita (Rp Jt)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Buton	5,80	12,26	22,6	67,50	0,260	39,00
2	Muna	5,70	13,12	4,19	70,61	0,290	3,32
3	Konawe	11,61	9,65	3,56	71,74	0,306	34,30
4	Kolaka	5,50	10,65	2,05	74,00	0,380	-
5	Konawe Selatan	5,85	11,08	2,58	69,36	0,370	45,73
6	Bombana	5,50	9,75	2,64	68,73	0,350	60,00
7	Wakatobi	6,00	13,5	2,10	71,85	0,328	44,31
8	Kolaka Utara	5,05	12,23	2,50	70,14	0,295	69,26
9	Buton Utara	5,50	13,50	2,50	69,70	0,340	56,00
10	Konawe Utara	5,91	13,01	3,62	71,48	0,372	62,17
11	Kolaka Timur	5,63	13,10	3,05	67,21	0,3592	-
12	Konawe Kepulauan	5,10	15,55	1,76	67,35	0,370	28,95
13	Muna Barat	5,60	11,76	2,65	67,00	0,370	24,00
14	Buton Tengah	3,40	15,50	2,50	65,30	0,360	1,85
15	Buton Selatan	5,00	12,00	-	68,00	0,300	
16	Kendari	6,00	4,50	5,00	85,50	0,350	74,97
17	Baubau	6,27	6,91	4,95	77,78	0,410	72,09
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	6,0-6,5	10,00-11,00	2,75-3,00	73,00-73,30	0,366-0,375	-

7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah adalah Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Sasaran Rancangan Pembangunan Daerah (RPD). Penetapan target indikator kinerja utama daerah selanjutnya disajikan dalam 7.2. berikut ini :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	10,63
2	Harapan Lama Sekolah	Persen	14,87
3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72,02
4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	10.046
5	Gini Ratio	Nilai	0,336
6	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86,1
7	Prevalensi Stunting	Persen	16,79
8	Pertumbuhan Pdrb Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan.	Nilai	2,75

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
9	Pertumbuhan Pdrb Lap. Usaha Pertambangan Dan Penggalian	Nilai	1,53
10	Pertumbuhan Pdrb Lap. Usaha Industri Pengolahan	Nilai	5,72
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,12
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Pmtb)	Persen	1,24
13	Indeks Infrastruktur	Persen	90,15
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,00
15	Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,02
16	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB
17	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP
18	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Kategori	B

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra 2024-2026

7.3. Indikator Kinerja Kunci Daerah

Indikator Kinerja Kunci Daerah adalah Indikator Kinerja yang dicapai oleh OPD dalam kewajibannya menyelenggarakan urusan pemerintahan. Penetapan target indikator kinerja kunci daerah selanjutnya disajikan dalam 6.4. berikut ini :

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Aspek Pelayanan Umum			
A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib			
Pelayanan Dasar			
1.	**Pendidikan**		
1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	100
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	100
2.	**Kesehatan**		
2.1.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Nilai	1,49
2.2.	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	Persen	100
2.3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Persen	100
2.4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
3.1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	68
3.2.	Rasio kemantapan jalan	persen	87
3.3.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	Orang	60
3.4.	Cakupan perpipaan jaringan air minum	dokumen	2
3.5.	Cakupan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	Sistem jaringan	40
3.6.	Cakupan Bangunan Gedung dan fasilitas umum pemda sesuai standard an kriteria	Unit	197
3.7.	Tersedianya RTR Kab/kota yang mendapat rekom dan dokumen RTR Provinsi yang tersusun	Dokumen	10
4.	**Perumahan Rakyat**		
4.1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100
4.2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100
4.3.	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Persen	0,25
4.4.	Persentase Satuan Perumahan yang dilengkapi PSU	Persen	6,5
5.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	85
6.	**Sosial**		
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	25
6.2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	80
6.3.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	50
6.4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100
Pelayanan Non Dasar			
1.	**Tenaga Kerja**		
1.1.	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100
1.2.	Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	17,5
1.3.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	65
1.4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	2,2
1.5.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	25
1.6.	Persentase perusahaan yang menerapkan norma hukum ketenagakerjaan	Persen	2

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	10
2.2.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	2,8
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai	15.51
3.	**Pangan**		
3.1.	Persentase cadangan pangan	Persen	33
4.	**Pertanahan**		
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yabg diterbitkan	Persen	98
4.2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	95
4.3.	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	90
5.	**Lingkungan Hidup**		
5.1.	Tingkat keterpenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100
5.2.	Tingkat kepatuhan terhadap perizinan lingkungan hidup	Persen	80
5.3.	Indeks Kualitas Air	Poin	56,32
5.4.	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,84
5.5.	Indeks Kualitas Udara	Poin	92,12
5.6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	74,64
5.7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	23
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
6.1.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	95
6.2.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	42
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
7.1	Indeks Desa Membangangun	Nilai	0,62
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
8.1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,51
8.2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern *contracepture prevalence rate*/mCPR)	Nilai	48,76
8.3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Nilai	23,54
9.	**Perhubungan**		
9.1.	Rasio konektivitas Provinsi	Persen	47,06
9.2.	V/C Ratio Jalan Provinsi	Persen	38,23
10.	**Komunikasi dan Informatika**		
10.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	10
10.2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	70

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
11.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**		
11.1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	71,6
12.	**Penanaman Modal**		
12.1.	persentase peningkatan investasi di provinsi	persen	1,24
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**		
13.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	53
13.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	63
13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	60
14.	**Statistik**		
14.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50
15.	**Persandian**		
15.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20
16.	**Kebudayaan**		
16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya (jumlah Cagar Budaya yang terlindungi)	Persen	24
16.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Hasil Kesepatakan Rakortek)	Nilai	50,66
17.	**Perpustakaan**		
17.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	72,5
17.2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	77,5
18.	**Kearsipan**		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	10
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	55
B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	**Kelautan Perikanan**		
1.1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ribu Ton	670
1.2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	93
2.	**Pariwisata**		
2.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,99
3.	**Pertanian**		
3.1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
	Padi	Ku/ha	41,38
	Jagung	Ku/ha	38,64
	Kedelai	Ku/ha	17,18
	Kacang Tanah	Ku/ha	8,72
	Kacang Hijau	Ku/ha	12,76

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Ubi Kayu	Ku/ha	267,67
	Ubi Jalar	Ku/ha	133,57
3.2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular :		
	Ai (Unggas)	Persen	2
	Brucellosis dan Helminthiasis (Ternak Potong)	Persen	2
	Rabies (Hewan Peliharaan /anjing)	Persen	5
4.	**Kehutanan**		
4.1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	3000
4.2.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestrasi)	Persen	100
4.3.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	1250
5.	**Energi Sumber Daya Mineral**		
5.1.	Persentase desa yang teraliri listrik	Persen	100
6.	**Perdagangan**		
6.1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen	50
6.2.	Tertib usaha	Persen	80
6.3.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga-harga barang kebutuhan pokok	Persen	3
7.	**Perindustrian**		
7.1.	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri	Persen	8
	Pengolahan Nonmigas (kesepakatan hasil rakortek)		
7.2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	8,6
	Nonmigas Terhadap PDB (kesepakatan hasil rakortek)		
C. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan			
1.	**Urusan Pemerintahan**		
1.1.	**Sekretariat Daerah**		
1.1.1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B
1.2.	**Sekretariat DPRD**		
1.2.1.	Persentase dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persen	100
1.2.2.	Persentase Perda yang ditetapkan	Perda	8
2.	**Keuangan**		
2.1.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5
2.2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	Predikat (Nilai)	A-
3.	**Pengadaan**		
3.1.	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangi pada kuartal pertama	Persen	0
3.2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10,16
3.3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	65,69

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
4,	**Manajemen Keuangan**		
4.1.	Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	100
5.	**Kepegawaian**		
5.1.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	453,92
5.2.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	7,25
5.3.	Rasio jabatan fungsional berkompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100
6.	**Transparansi dan Partisipasi Publik**		
6.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan *(information on resources available to frontline service delivery units)*	Persen	50
6.2.	Akses public terhadap informasi keuangan daerah *(Public Access to Fiscal Information)*	Persen	50
7.	Pengawasan		
7.1.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
7.2.	Marturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,07

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra 2024-2026

Bab VIII
Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara setelah melalui beberapa tahapan penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penetapan RKPD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dokumen perencanaan anggaran sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta prioritas pembangunan nasional. Dalam perumusan permasalahan, isu strategis dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengakomodir usulan dan saran dari pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi. Selain itu mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah dan nasional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gubernur Sulawesi Tenggara,

ALI MAZI